

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019**



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SAMBUTAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2020

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah rabbiláamin, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* - Tuhan Yang Maha Esa, atas telah terbitnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020. Proses penyusunan RKPD Tahun 2020 telah menggunakan aplikasi *entebePlan* berbasis online dan merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB yang diselenggarakan pada Tahun 2019. Pelaksanaan Musrenbang tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah, meliputi unsur Pemerintah maupun non-pemerintah. Musrenbang ini telah dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan penyelenggaraan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota serta Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dalam upaya untuk menyelaraskan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Khususnya Pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi dijadikan sebagai : a) Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi; b) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.

Saya berharap agar dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Akhir kata, saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat menghimbau agar seluruh jajaran pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas daerah dalam mewujudkan pencapaian seluruh indikator RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas perlu ditingkatkan guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* - Tuhan Yang Maha Esa merestui niat dan langkah kita bersama dalam meletakkan pondasi yang kuat bagi perwujudan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Juni 2019

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD setelah disepakati dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII PENUTUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD dan RKA-Kementerian/Lembaga APBN bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD dan RAPBN Tahun 2020 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan kementerian/Lembaga dan DPRD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menelaah kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal , 28 Juni 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

The image shows the official seal of the Governor of Nusa Tenggara Barat, which is a circular emblem containing a Garuda bird. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the seal, the name 'H. ZULKIEFLIMANSYAH' is printed in capital letters.

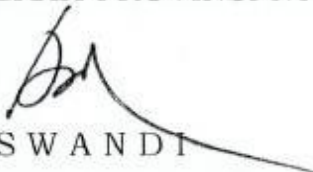
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

PENJABAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. I S W A N D I', is written over the printed name.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
I.3 Hubungan Antar Dokumen	3
I.4 Maksud dan Tujuan	4
I.5 Sistematika Dokumen RKPD	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	7
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	7
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	17
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	34
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	138
2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA.....	139
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018	139
2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2013-2018.....	154
2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	157
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN	159
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	159
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	159
3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita.....	163
3.1.3 Inflasi.....	164
3.1.4 Ketenagakerjaan	166
3.1.5 Kemiskinan	168
3.1.6 Ketimpangan Regional.....	169
3.1.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	170
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	170
3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan.....	171
3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	172
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah	175
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah	175
3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	176
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	181

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	181
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	188
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020.....	188
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020	193
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA		206
5.1	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	207
5.2	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	231
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	222
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	223
BAB VIII	PENUTUP	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1. Hubungan antar dokumen perencanaan	4
Gambar 2- 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013-2018 ...	18
Gambar 2- 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2018	24
Gambar 2- 3. Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2013-2018	25
Gambar 2- 4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB 2010-2018	27
Gambar 2- 5. Gini Ratio menurut Provinsi tahun 2018.....	27
Gambar 2- 6. Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2014-2018	28
Gambar 2- 7. Posisi Relatif IPM Tahun 2018.....	29
Gambar 2- 8. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 -2017	31
Gambar 2- 9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017	33
Gambar 2- 10. Proporsi TPT Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Gambar 2- 11. Angka Drop Out (DO) Tahun 2012/2013 - 2016/2017	37
Gambar 2- 12. Posisi Relatif Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2016	40
Gambar 2- 13. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Tahun 2016.....	43
Gambar 2- 14. Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni Yang Ditangani Tahun 2013- 2017	43
Gambar 2- 15. Jumlah Konflik Sosial Tahun 2013 – 2017	44
Gambar 2- 16. <i>Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Pergub Tahun 2013 – 2018</i>	45
Gambar 2- 17. Indeks Demokrasi Indonesia	47
Gambar 2- 18. Perkembangan Indeks Aspek IDI NTB.....	47
Gambar 2- 19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013 – 2018 .	49
Gambar 2- 20. Nilai Capaian Aspek Pembentuk IDG Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2017	51
Gambar 2- 21. Jenis Kekerasan kepada Perempuan Berdasarkan jenis Tahun 2015.....	51
Gambar 2- 22. Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	53
Gambar 2- 23. Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2013-2017	54
Gambar 2- 24. Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB.....	60
Gambar 2- 25. Indeks Pembangunan Desa di Provinsi NTB Tahun 2014	62
Gambar 2- 26 Klasifikasi Desa di Provinsi NTB Tahun 2014.....	62
Gambar 2- 27 Nilai Dimensi IPD di Provinsi NTB Tahun 2014	63
Gambar 2- 28. Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2015-2016	64
Gambar 2- 29. Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi Tahun 2016	66
Gambar 2- 30. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan selama periode tahun 2013- 2017	69
Gambar 2- 31. Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 (Rp.Milyar)....	70
Gambar 2- 32. Proporsi Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016.....	83
Gambar 2- 33. Produksi Perikanan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat (ribuan ton), 2011- 2016	84
Gambar 2- 34. Produksi Perikanan Laut dan Beberapa Komoditas Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016 (ton)	84
Gambar 2- 35. Perkembangan PAD Tahun 2013-2018 (dalam Milyar rupiah)	130
Gambar 2- 36. Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun 2013-2018	131
Gambar 2- 37. Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN	133
Gambar 3- 1. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018	161

Gambar 3- 2. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018	162
Gambar 3- 3. Inflasi Tahun 2016-2018	165
Gambar 3- 4. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018.....	168
Gambar 3- 5. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2018.....	169
Gambar 3- 6. Nilai Indeks Wiliamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016.....	170
Gambar 3- 7. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018	170

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018.....	7
Tabel 2- 2. Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	9
Tabel 2- 3. Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor	10
Tabel 2- 4. Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi	10
Tabel 2- 5. Lokasi Kawasan Rawan Tsunami	11
Tabel 2- 6. Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan	12
Tabel 2- 7. Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang.....	12
Tabel 2- 8. Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan	12
Tabel 2- 9. Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia.....	13
Tabel 2- 10. Status Penyediaan Air Provinsi NTB.....	14
Tabel 2- 11. Sebaran Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018	14
Tabel 2- 12. Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018	15
Tabel 2- 13. Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018	16
Tabel 2- 14. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018....	17
Tabel 2- 15. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018	19
Tabel 2- 16. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (dalam Ribuan).....	19
Tabel 2- 17. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	20
Tabel 2- 18. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	20
Tabel 2- 19. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	20
Tabel 2- 20. PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB (Dalam Milyar) Tahun 2014-2018.....	21
Tabel 2- 21. Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2014-2018	22
Tabel 2- 22. Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2014-2018	23
Tabel 2- 23. Perkembangan Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2014-2018	30
Tabel 2- 24. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013-2017	31
Tabel 2- 25. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017.....	32
Tabel 2- 26. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2014-2018.....	34
Tabel 2- 27. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017	35
Tabel 2- 28. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	36
Tabel 2- 29. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Th. 2013 – 2017 di Provinsi NTB.....	36
Tabel 2- 30. Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2013-2017	38
Tabel 2- 31. Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2018	39
Tabel 2- 32. Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	39
Tabel 2- 33. Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2018	39
Tabel 2- 34. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 tahun yg Melahirkan Anak Lahir Hidup & Penolong Proses Kelahiran Tahun 2018	40
Tabel 2- 35. Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2016.....	41

Tabel 2- 36. Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Jenis dan Kondisi Th. 2017	41
Tabel 2- 37. Jumlah Dan Kondisi Jembatan Di Provinsi NTB Tahun 2017	42
Tabel 2- 38. Capaian Indikator Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017	44
Tabel 2- 39. Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013-2017	44
Tabel 2- 40. Jumlah Bencana yang Terjadi di Wilayah NTB Tahun 2013 – 2017	46
Tabel 2- 41. Indeks Kerentanan Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota.....	46
Tabel 2- 42. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	48
Tabel 2- 43. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017	50
Tabel 2- 44. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017	50
Tabel 2- 45. Jumlah Kekerasan pada laki-laki dan Perempuan dilihat dari Lokasi Tahun 2014-2015	51
Tabel 2- 46. Luas Tanah dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi NTB.....	52
Tabel 2- 47. Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2013-2017	53
Tabel 2- 48. Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2013-2017	55
Tabel 2- 49. Cadangan Pangan Provinsi NTB 2013-2017	55
Tabel 2- 50. Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2014-2017	56
Tabel 2- 51. Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2013-2017.....	56
Tabel 2- 52. Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2013-2017	58
Tabel 2- 53. Jumlah Pendaftaran Tanah Menurut Jenis di provinsi NTB Tahun 2013-2016	59
Tabel 2- 54. Jasa Ekosistem Pangan Provinsi NTB	59
Tabel 2- 55. Status Penyediaan Pangan Provinsi NTB	60
Tabel 2- 56. Status Penyediaan Air Provinsi NTB.....	60
Tabel 2- 57. Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2017	61
Tabel 2- 58. Angka Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2014-2018.....	61
Tabel 2- 59. Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2017.....	65
Tabel 2- 60. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2013 - 2017	65
Tabel 2- 61. Indeks Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	66
Tabel 2- 62. Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2012-2016	68
Tabel 2- 63. Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017	69
Tabel 2- 64. Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	70
Tabel 2- 65. Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	71
Tabel 2- 66. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017	71
Tabel 2- 67. Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab./Kota Th.2013 – 2017	72
Tabel 2- 68. Realisasi Investasi PMA Menurut Kab./Kota Tahun 2013 – 2017	73
Tabel 2- 69. Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2013 – 2017	73
Tabel 2- 70. Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	74
Tabel 2- 71. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017.....	82
Tabel 2- 72. Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	85
Tabel 2- 73. Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2017	85
Tabel 2- 74. Produksi Tanaman Pangan tahun 2013-2017	86

Tabel 2- 75. Produksi Tanaman Hortikultura 2013-2017	86
Tabel 2- 76. Produksi Komoditi tanaman perkebunan 2013 -2017	87
Tabel 2- 77. Target dan Realisasi Populasi Sapi di Prov. NTB Th. 2013-2017	87
Tabel 2- 78. Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian Per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018	88
Tabel 2- 79. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasilnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016	88
Tabel 2- 80. Luas Rehabilitasi Hutan & Lahan, Kerusakan Kawasan Hutan dan Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Th. 2013 – 2017	89
Tabel 2- 81. Perkembangan Ekspor Tahun 2013 – 2017	90
Tabel 2- 82. Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa.....	90
Tabel 2- 83. Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	90
Tabel 2- 84. Operasi Pasar 2013-2017	91
Tabel 2- 85. Perkembangan Industri NTB Tahun 2013-2017	91
Tabel 2- 86. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2017.....	94
Tabel 2- 87. Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2016-2017	94
Tabel 2- 88. Hasil penilaian LKjIP Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2017.....	96
Tabel 2- 89. Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2016-2017	96
Tabel 2- 90. Jumlah Perda/Perbup/Perwal Yang difasilitasi dan dievaluasi Tahun 2017	97
Tabel 2- 91. Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2017	97
Tabel 2- 92. Fasilitasi Pengganti Antar Waktu Tahun 2017	105
Tabel 2- 93. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017	106
Tabel 2- 94. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Tahun 2014 – 2017	107
Tabel 2- 95. PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan 2017	107
Tabel 2- 96. Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2017	108
Tabel 2- 97. Deviden Dari Perusahaan Daerah dan BUMD Provinsi NTB Tahun 2015-2017	109
Tabel 2- 98. Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017 Sumber dana APBD Provinsi NTB.....	110
Tabel 2- 99. Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017 Sumber Dana APBN Provinsi NTB	111
Tabel 2- 100. Event Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2017	112
Tabel 2- 101. Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB selaku SKPKD Tahun 2017-2018.....	125
Tabel 2- 102. Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2017-2018	125
Tabel 2- 103. Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2015 - 2019.....	125
Tabel 2- 104. Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2015 - 2019.....	127
Tabel 2- 105. Opini BK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 - 2017.....	127
Tabel 2- 106. Data Penghapusan BMD Yang Telah Dilaksanakan Oleh BPKAD Pada Tahun 2018	128
Tabel 2- 107. Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 - 2018	130
Tabel 2- 108. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 -2018	131

Tabel 2- 109. Jenis Diklat dan Jumlah Widyaiswara yang Mengikutinya Tahun 2018.....	135
Tabel 2- 110. Capaian Penyelenggaraan Diklat Manajerial Tahun 2018.....	137
Tabel 2- 111. Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2018.....	137
Tabel 2- 112. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah.....	138
Tabel 2- 113. Hasil evaluasi pelaksanaan RPKD Provinsi NTB Tahun 2018	144
Tabel 2- 114. Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	154
Tabel 2- 115. Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum	156
Tabel 2- 116. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah.....	156
Tabel 3- 1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018 (Milyar Rupiah)	160
Tabel 3- 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2018 (Juta Rupiah)	163
Tabel 3- 3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2017	164
Tabel 3- 4. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2016 - 2018	167
Tabel 3- 5. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020....	171
Tabel 4- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	183
Tabel 4- 2. Target Pembangunan Daerah Tahun 2020	195
Tabel 4- 3. Keselarasan Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah	196
Tabel 5- 1 Target Indikator makro pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020	206
Tabel 5- 2 10 Desa Pilot Project Pada 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Penanganan Provinsi	208
Tabel 5- 3 400 desa prioritas penanggulangan kemiskinan intervensi Kabupaten/Kota Serta Desa / Kelurahan.....	213
Tabel 5- 4 . 99 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2019-2020.....	227
Tabel 5- 5. 20 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2020.....	230
Tabel 7- 1. Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023	223
Tabel 7- 2. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.....	224

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Tujuan pembangunan sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal inilah yang dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

Mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan sistem perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, dimana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* melalui pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Dalam menyusun RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kedua penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

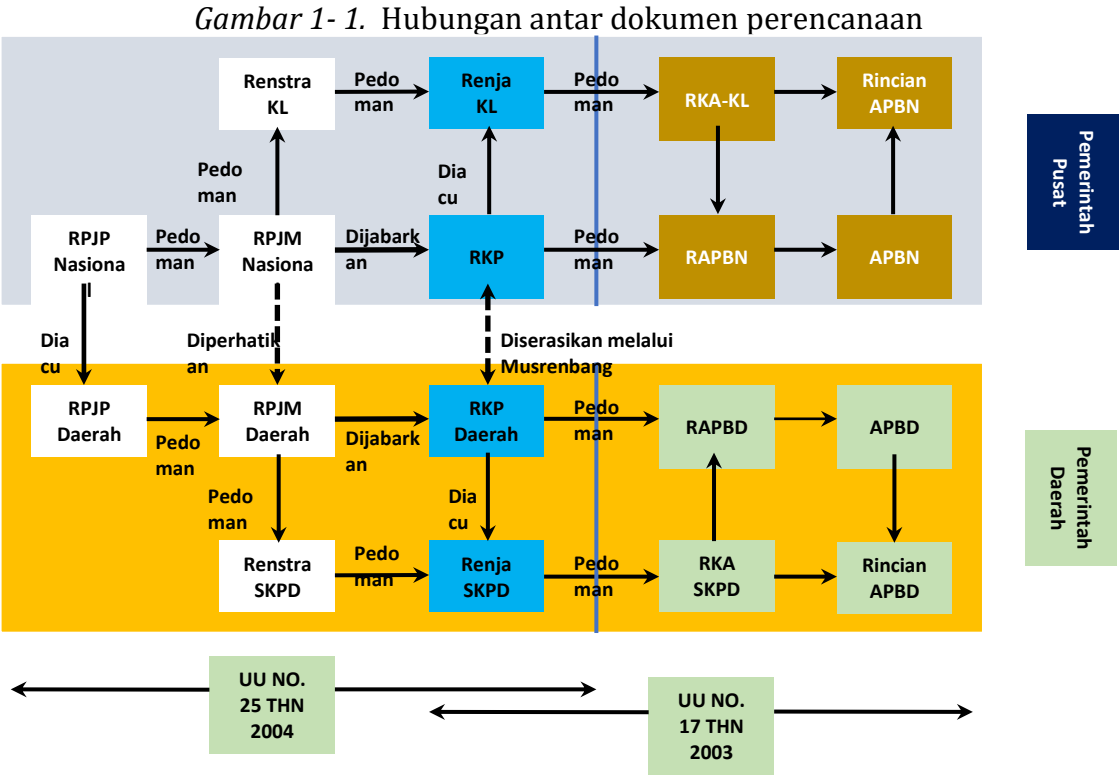
I.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah, dimana Rencana Kerja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun RKPD tahun 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen RKPD Tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas.

Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004
: UU Nomor 17 Tahun 2003

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1). Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh Kepala Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2020;
- (2). Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;
- (3). Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;
- (4). Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (5). Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- (6). Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
- (7). Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (8). Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (9). Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah daerah lainnya;
- (10). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD.
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VIII	PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan sinergitas di jajaran pemerintah Provinsi Nua Tenggara Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Provinsi NTB secara geografis terletak antara 08° 10' – 09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46' – 119° 05' Bujur Timur. Wilayah di sebelah utara berbatasan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi NTT, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² atau 40,87% dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² atau 59,13% dengan panjang garis pantai sekitar 2.332,80 Km, yang terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi oleh 278 pulau-pulau kecil, 15,71% atau 44 pulau-pulau kecil tersebut telah berpenghuni. Beberapa pulau kecil merupakan daerah obyek wisata seperti: Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, Pulau Moyo. Pulau Lombok mempunyai luas 4.738,80 Km² atau 23,51% sedangkan Pulau Sumbawa 15.414,05 Km² atau 76,49%.

Posisi Provinsi NTB terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis, dari arah Timur Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu, wilayah NTB adalah lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya-Makasar) dan terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal, Bali-Komodo-Tana Toraja.

Secara administratif, Provinsi NTB terdiri dari 8 (delapan) kabupaten, 2 (dua) kota, 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 254 desa/kelurahan. Kabupaten Lombok Utara memiliki jumlah kecamatan terkecil sebanyak 5 (lima) kecamatan dengan 33 desa/kelurahan dan Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB. Tabel berikut memaparkan secara rinci jumlah kecamatan, desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi NTB tahun 2018.

Tabel 2- 1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	122	1.053,92

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
2	Kabupaten Lombok Utara	5	33	809,53
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	139	1.208,40
4	Kabupaten Lombok Timur	20	254	1.605,55
5	Kabupaten Sumbawa	24	165	6.643,98
6	Kabupaten Dompu	8	81	2.324,60
7	Kabupaten Bima	18	191	4.389,40
8	Kabupaten Sumbawa Barat	8	64	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	38	207,50
	Jumlah	116	1.137	20.153,15

Sumber: DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, 2018

Selama tahun 2018 di beberapa kabupaten terdapat pemekaran desa sebanyak 26 Desa diantaranya Kabupaten Lombok Utara sebanyak 10 Desa; Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 15 Desa; dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) Desa, dimana sampai saat ini status desa tersebut adalah dalam tahap Desa Persiapan dan belum mendapat persetujuan menjadi Desa Definitif dari Kementerian Dalam Negeri. Jumlah desa/keluruhan hingga saat ini sebanyak 1.137, apabila Desa Persiapan tersebut telah mendapat persetujuan maka jumlah Desa/Kelurahan menjadi sebanyak 1.163 Desa/Kelurahan.

2.1.1.1.2 Topografi

Secara topografis, Provinsi NTB mempunyai topografi wilayah bervariasi dari 0 - 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok, dan 0 - 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa. Berdasarkan pada klasifikasi ketinggian wilayah, diketahui bahwa wilayah yang memiliki ketinggian 0-100 mdpl sekitar 23,76% atau seluas 478,911 Ha, ketinggian 100-500 mdpl sekitar 37,39% atau seluas 753,612 Ha, ketinggian 500-1000 mdpl sekitar 15,25% atau seluas 307,259 Ha dan lebih dari 1000 mdpl seluas 475,533 Ha (23,60%). Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Berdasarkan klasifikasi kemiringan tanah atau lereng, Provinsi NTB memiliki wilayah daratan yang paling luas termasuk klasifikasi kemiringan tanah 15-40% sebesar 704.619 Ha atau 34,96%, sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0–2% sebesar 338.552 Ha atau 16,80%. Pulau Lombok memiliki klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15% seluas 198.616 Ha atau sebesar 9,85% dari luas wilayah daratan sedangkan, paling sempit dengan klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha atau sebesar 1,01% dari luas wilayah Provinsi NTB. Pulau Sumbawa mempunyai

klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas antara 15-40% seluas 573.903 Ha atau sebesar 28,48% dari luas Provinsi NTB, sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2% seluas 214.194 Ha atau sebesar 10,63%.

Provinsi NTB memiliki 16 gunung, 7 (tujuh) jajaran gunung terdapat di Pulau Lombok, Rinjani merupakan gunung tertinggi yang mempunyai ketinggian 3.726 mdpl dan 6 (enam) gunung lainnya adalah gunung Mareje, Timanuk, Nangi, Perigi, Plawangan dan Baru. Sedangkan di Pulau Sumbawa terhampar deretan Gunung Batu Lanteh, Tukan, Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi dimana Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 2.851 mdpl.

2.1.1.1.3 Geologi

Geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar, batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral, aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

2.1.1.1.4 Hidrologi

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2- 2. Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3

5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

2.1.1.1.5 Klimatologi

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB 33,2°C – 33,6°C temperature udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata rata 26,9°C – 27,6°C. Kelembaban udara rata rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3 – 5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

2.1.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 3. Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2- 4. Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2- 5. Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluku, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2- 6. Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2- 7. Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2- 8. Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*).

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel 2- 9. Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkak
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2- 10. Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda Prov. NTB

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m³ sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m³ sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m³.

2.1.1.2 Demografi NTB

Penduduk di Provinsi NTB sesuai dengan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 sebanyak 5.013.687 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk masing-masing sebesar 1,21% dan 1,17%. Berdasarkan sebaran penduduk, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk terkecil yakni sebanyak 144.707 orang tetapi mempunyai laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2,71%, sedangkan Kabupaten Lombok Timur mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.192.110 orang dengan laju pertumbuhan penduduk terendah 0,75%. Lebih jauh dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk pada Pulau Sumbawa sebesar 1,33%, relatif lebih besar dari Pulau Lombok yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,11%. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk disebabkan karena adanya kelahiran alamiah dan adanya migrasi penduduk. Tabel dibawah ini menyajikan informasi terkait jumlah penduduk NTB menurut kabupaten/kota.

Tabel 2- 11. Sebaran Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		
		2016	2017	2018
	Lombok Barat	665.132	675.222	685.161
	Lombok Tengah	922.088	930.797	939.409
	Lombok Timur	1.173.781	1.183.204	1.192.110
	Lombok Utara	214.393	216.515	218.533
	Kota Mataram	456.314	468.509	477.476

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		
		2016	2017	2018
	Pulau Lombok	3.434.708	3.474.274	3.512.689
	D o m p u	214.888	245.387	248.879
	B i m a	473.890	478.967	483.901
	Sumbawa Barat	137.072	140.890	144.707
	Sumbawa	445.503	449.680	453.797
	Kota Bima	163.503	166.407	169.714
	Pulau Sumbawa	1.461.454	1.481.331	1.500.998
	Jumlah	4.896.162	4.955.578	5.013.687

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Bila dilihat berdasarkan pada distribusi penduduk menurut wilayah terlihat tidak merata, hal ini disebabkan karena 29,94% penduduk tinggal di Pulau Sumbawa sedangkan 70,06% di Pulau Lombok sehingga berimplikasi pada tingginya perbedaan kepadatan penduduk antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 12. Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)		
		2016	2017	2018
1	Lombok Barat	631,13	640,71	650,14
2	Lombok Tengah	763,07	1.149,80	1.160,44
3	Lombok Timur	731,08	979,15	986,52
4	Lombok Utara	264,84	117,10	118,19
5	Kota Mataram	7.492,89	7.642,89	7.789,17
	Pulau Lombok	724,83	697,35	705,06
6	Sumbawa Barat	74,13	32,10	32,97
7	Sumbawa	67,05	280,08	282,64
8	Dompu	104,06	36,93	37,46
9	Bima	107,96	206,04	208,17
10	Kota Bima	786,03	801,96	817,90
	Pulau Sumbawa	94,81	97,64	98,94
	Provinsi NTB	242,95	245,90	248,78

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018, Pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumbawa, yaitu sebesar 705,06 jiwa/km² sedangkan Pulau Sumbawa 98,94 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kota Mataram yakni 7.789,17 jiwa/km² sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 32,97 jiwa/km².

Menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, hal ini terlihat dari besarnya *sex ratio* yaitu sebesar 94,33 pada tahun 2018. Namun demikian pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan dan secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk baik laki-laki maupun perempuan cenderung menurun yaitu dari 1,25% pada tahun 2016 menjadi 1,17% pada tahun 2018. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk di Provinsi NTB secara rinci periode tahun 2016 - 2018.

Tabel 2- 13. Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2016	2.375.750	2.520.412	4.835.577	1,28	1,23	1,25	94,26
	(48,52)	(51,48)	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,30
	(48,53)	(51,47)	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.687	1,19	1,15	1,17	94,33
	(51,47)	(51,46)	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2018 sebanyak 3.282.080 orang atau sebesar 65,46%, meningkat 0,12 point dibandingkan tahun 2017 dan 0,30% pada tahun 2016, sedangkan kelompok umur tidak produktif sebesar 1.731.607 orang atau 34,54%. Penduduk perempuan pada usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu mencapai 34,29% sedangkan laki-laki sebesar 31,18% dengan demikian jumlah penduduk laki-laki yang tidak produktif lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu sebesar 17,37% dan perempuan 17,17%. Adapun rasio rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2018 sebesar 52,76, bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 rasio ketergantungan di Provinsi NTB cenderung menurun masing-masing sebesar 0,62 dan 0,28 poin, hal ini mengindikasikan semakin banyaknya sumberdaya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin serta rasio ketergantungan tahun 2016 – 2018.

Tabel 2- 14. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018

TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65	
2016	Laki	746.262	1.517.829	111.659	56,52
	Perempuan	715.539	1.674.396	130.477	50,53
	Total	1.461.801	3.192.225	242.136	53,38
2017	Laki	749.138	1.540.900	115.042	56,08
	Perempuan	718.95	1.697.088	134.46	50,29
	Total	1.468.088	3.237.988	249.502	53,04
2018	Laki	751.919	1.563.026	118.786	55,71
	Perempuan	722.099	1.719.054	138.803	50,08
	Total	1.474.018	3.282.080	257.589	52,76

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Povinsi NTB terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidakmerataan sebaran penduduk, dan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa serta semakin meningkatnya kelompok umur produktif mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait dengan strategi pembangunan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja tetapi juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

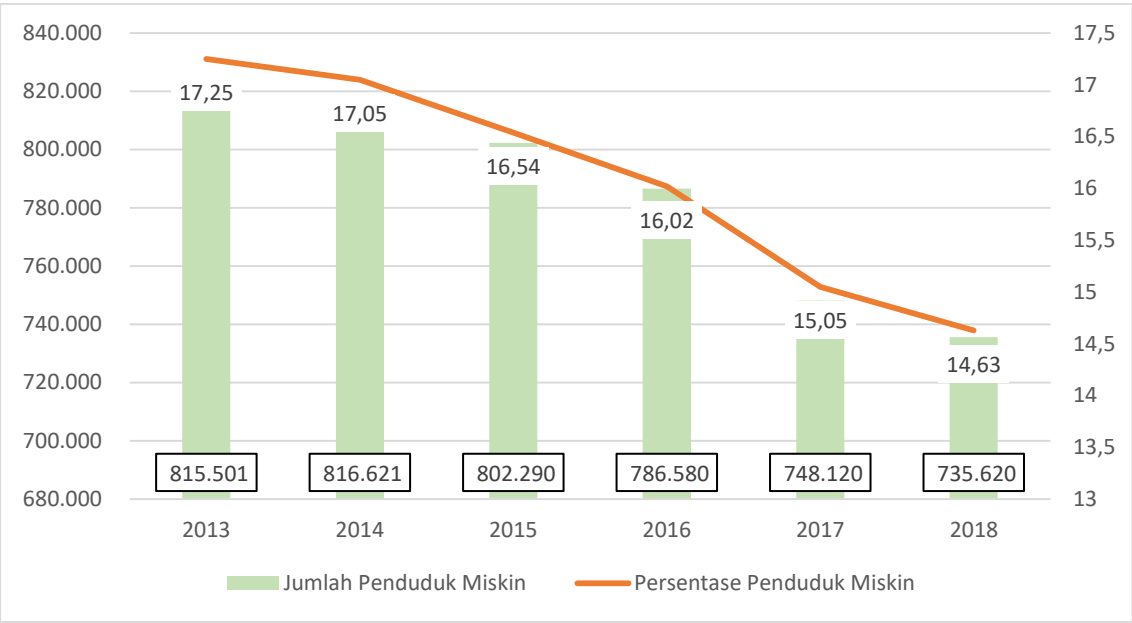
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum diukur dengan menggunakan indikator-indikator moneter seperti tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pendapatan perkapita menunjukan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah. Meskipun mirip, kedua indikator tersebut umumnya menggunakan pendekatan perhitungan yang berbeda. Tingkat kemiskinan diperoleh dari data survei SUSENAS sementara itu pendapatan perkapita diperoleh dari data PDRB wilayah. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan antar pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

2.1.2.1.1 Kemiskinan

Membaiknya tingkat kesejahteraan dilihat dari segi moneter, diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan di NTB menurun dari 17,25 persen pada tahun 2013 menjadi 14,63 persen pada tahun 2018 atau rata-rata 0,52 persen per tahun, sedangkan secara nasional 0,34 persen per tahun.

Gambar 2- 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Tapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode Maret 2016 – Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan juga mengalami kenaikan. Sementara di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 3,137 pada Maret 2016 menjadi 3,590 pada Maret 2017. Untuk perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 2,899 pada Maret 2016 menjadi 2,758 pada Maret 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat, sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Demikian halnya dengan indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan mengalami kenaikan, dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017. Untuk pedesaan, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Meningkatnya indeks keparahan kemiskinan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. Menurunnya indeks keparahan kemiskinan di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara

dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan Provinsi NTB sebesar Rp 365.901 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 314.238. Berikut ini garis kemiskinan di Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2018.

Tabel 2- 15. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lombok Barat	313.632	328.402	353.667	375.684	390.979	412.487
2	Lombok Tengah	306.311	319.518	335.286	357.337	369.645	386.676
3	Lombok Timur	321.249	335.651	359.235	382.861	396.668	414.721
4	Sumbawa	259.474	268.326	272.274	296.914	300.643	320.617
5	Dompu	233.213	239.936	243.467	263.458	266.483	284.188
6	Bima	243.339	252.628	255.962	282.854	288.703	308.695
7	Sumbawa Barat	379.222	395.832	408.991	435.890	444.465	459.065
8	Lombok Utara	332.073	347.150	363.367	387.265	398.702	416.705
9	Kota Mataram	359.651	376.178	397.468	414.115	428.754	457.950
10	Kota Bima	262.967	270.037	274.394	293.048	299.346	323.187
Provinsi NTB		278.514	297.907	314.238	333.996	345.341	365.901

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2018, GK paling tinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat dengan GK sebesar Rp 459.065 sedangkan yang terendah di Kabupaten Dompu dengan GK Rp 284.188. Namun bila dilihat dari peningkatan, daerah dengan peningkatan GK tertinggi pada periode 2013-2018 adalah Kabupaten Lombok Barat dengan perubahan sebesar Rp77.347 lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Tabel 2- 16. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (dalam Ribuan)

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2013- 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	110,99	110.75	113,30	110,85	110,69	0,30
2	Lombok Tengah	145,15	145.18	147,94	145,37	142,14	3,01
3	Lombok Timur	219,56	219.67	222,19	216,18	215,81	3,75
4	Sumbawa	73,79	73.86	73,57	71,66	68,69	5,10
5	Dompu	36,40	36.42	35,94	34,31	32,85	3,55
6	Bima	73,83	74.54	73,71	72,36	72,14	1,69
7	Sumbawa Barat	21,71	22.04	22,50	22,47	22,33	(0,62)
8	Lombok Utara	72,16	72.19	72,28	71,02	69,24	2,92
9	Kota Mataram	46,67	46.67	46,76	44,81	44,53	2,14
10	Kota Bima	15,25	15.31	15,70	15,42	15,36	(0,11)
Provinsi NTB		815,50	816,62	823,89	804,45	793,78	21,72

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Jumlah penduduk miskin paling banyak tinggal di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, sedangkan yang paling sedikit di Kota Bima dan Kabupaten

Sumbawa Barat. Jumlah Penduduk miskin relatif lebih banyak mendiami Pulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Tabel 2- 17. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	17,43	17,11	17,38	16,73	16,46	0,97
2	Lombok Tengah	16,20	16,03	16,26	15,80	15,31	0,89
3	Lombok Timur	19,16	19,00	19,14	18,46	18,28	0,88
4	Sumbawa	17,04	16,87	16,73	16,12	15,31	1,73
5	Dompu	14,24	15,46	15,11	14,23	13,43	0,81
6	Bima	16,24	16,04	15,78	15,31	15,10	1,14
7	Sumbawa Barat	17,10	16,87	16,97	16,50	15,96	1,14
8	Lombok Utara	35,88	34,27	34,13	33,21	32,06	3,82
9	Kota Mataram	10,75	10,53	10,45	9,80	9,55	1,20
10	Kota Bima	9,91	9,74	9,85	9,51	9,27	0,64
Provinsi NTB		17,25	17,05	16,54	16,02	15,05	2,20

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,20%, hal ini juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kondisi yang positif, penurunan P0 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 3,28% sedangkan yang paling kecil di Kota Bima dengan 0,64%.

Tabel 2- 18. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Peningkatan/ Penurunan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	2,96	3,14	2,91	3,11	3,24	0,28
2	Lombok Tengah	2,32	2,21	3,00	2,74	2,81	0,49
3	Lombok Timur	2,58	2,68	3,36	2,88	3,03	0,45
4	Sumbawa	2,52	2,90	2,70	3,12	2,60	0,08
5	Dompu	2,07	2,02	2,40	1,66	1,84	(0,23)
6	Bima	2,33	2,66	2,41	2,34	2,47	0,14
7	Sumbawa Barat	4,25	2,50	2,93	4,79	3,81	(0,44)
8	Lombok Utara	7,64	7,28	7,50	7,06	7,63	(0,01)
9	Kota Mataram	1,87	1,82	1,53	1,69	1,73	(0,14)
10	Kota Bima	1,56	1,20	1,68	2,08	1,30	(0,26)
Provinsi NTB		2,72	2,92	2,72	2,63	2,63	(0,09)

Sumber: BPS indonesia (diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 tertinggi pada tahun 2017 ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 7,63 sedangkan yang terendah di Kota Bima dengan 1,30.

Tabel 2- 19. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun

		2013	2014	2015	2016	2017	Peningkatan/ Penurunan
1	Lombok Barat	0,72	0,85	0,77	0,89	0,92	0,20
2	Lombok Tengah	0,50	0,48	0,87	0,64	0,75	0,25
3	Lombok Timur	0,54	0,61	0,87	0,68	0,79	0,25
4	Sumbawa	0,61	0,76	0,63	0,84	0,63	0,02
5	Dompu	0,45	0,42	0,61	0,30	0,39	(0,06)
6	Bima	0,54	0,66	0,57	0,52	0,58	0,04
7	Sumbawa Barat	1,47	0,58	0,81	1,70	1,22	(0,25)
8	Lombok Utara	2,37	2,26	2,61	2,22	2,57	0,20
9	Kota Mataram	0,50	0,52	0,38	0,43	0,47	(0,03)
10	Kota Bima	0,34	0,26	0,49	0,65	0,31	(0,03)
	Provinsi NTB	0,66	0,72	0,73	0,65	0,63	(0,03)

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Posisi P2 Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 masih berada di atas nilai capaian nasional, namun secara tren menunjukkan kondisi yang relevan dan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017, nilai P2 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 2,57 poin diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan 1,22 poin. Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan 0,25 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2013.

Pada tahun 2017, nilai P2 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 2,57 poin diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan 1,22 poin. Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan 0,22 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2015.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah NTB. Perkembangan nilai PDRB Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya pertambahan terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi NTB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah, semakin besar PDRB mengindikasikan semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di sebuah daerah. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS diketahui bahwa PDRB Provinsi NTB atas dasar harga konstan tahun 2010 selalu meningkat yaitu dari 73,373 milyar di tahun 2014 menjadi 90,323 milyar di tahun 2018, sedangkan PDRB NTB tanpa tambang meningkat dari 64,449 Milyar di tahun 2014 menjadi 80,286 milyar di tahun 2018. Tabel berikut menyajikan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing masing sektor dalam periode tahun 2014 – 2018.

Tabel 2- 20. PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB (Dalam Milyar) Tahun 2014-2018

NO	SEKTOR	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,702	18,925	19.565	20.843	21.188

NO	SEKTOR	2014	2015	2016	2017*	2018**
2	Pertambangan dan Penggalian	11,239	23,267	24,501	19.635	13.017
3	Industri Pengolahan	3,659	3,773	3,971	4.218	4.274
4	Pengadaan Listrik, Gas	67	67	75	78	79
5	Pengadaan Air	64	66	69	72	70
6	Konstruksi	7,219	7,774	8,414	9.033	9.250
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,747	10,337	11,148	12.112	12.771
8	Transportasi dan Pergudangan	5,335	5,680	5,919	6.399	6.529
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,329	1,404	1,545	1.658	1.582
10	Informasi dan Komunikasi	1,685	1,825	1,986	2.158	2.275
11	Jasa Keuangan	2,269	2,480	2,796	3.066	3.273
12	Real Estate	2,206	2,356	2,502	2.678	2.803
13	Jasa Perusahaan	131	139,118.53	149	158	166
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,207	4,362	4,492	4,641	4.689
15	Jasa Pendidikan	3,352	3,595	3,813	4,062	4.274
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,511	1,613	1,705	1,828	1.975
17	Jasa Lainnya	1,652	1,754	1,865	2,002	2.109
PDRB		73,373	89,338	94.524	94,640	90.323
PDRB Tanpa Tambang		64,449	68,632	72.715	77,883	80.286

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018 *Angka Sementara

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai tambah terbesar berasal dari sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan, kemudian diikuti oleh sektor tertier dan skunder. Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 21. Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2014-2018

No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,13	21,16	20,72	22,06	23,46
2	Pertambangan dan Penggalian	15,32	26,02	25,92	20,75	14,41
3	Industri Pengolahan	4,99	4,22	4,2	4,44	4,73
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air	0,09	0,07	0,07	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,84	8,69	8,9	9,57	10,24

No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,28	11,56	11,79	12,8	14,14
8	Transportasi dan Pergudangan	7,27	6,35	6,26	6,7	7,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	1,57	1,63	1,76	1,75
10	Informasi dan Komunikasi	2,3	2,04	2,1	2,28	2,52
11	Jasa Keuangan	3,09	2,77	2,96	3,25	3,62
12	Real Estate	3,01	2,64	2,65	2,83	3,10
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,16	0,16	0,17	0,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,73	4,88	4,75	4,9	5,19
15	Jasa Pendidikan	4,57	4,02	4,03	4,29	4,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	1,8	1,8	1,93	2,19
17	Jasa Lainnya	2,25	1,96	1,97	2,12	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Kinerja ekonomi Provinsi NTB dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2014 - 2018 mengalami fluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir untuk tambang sebesar 7,60 persen, sedangkan untuk non tambang sebesar 6,25 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 adalah sektor pengadaan listrik, gas dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 10,92 persen dan 39,65 persen. Pada tahun 2015 sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar 107,03 persen dan pada tahun 2016 dan 2017 sumber pertumbuhan tertinggi adalah berasal dari sektor jasa keuangan dengan masing-masing besarnya pertumbuhan 12,73 persen dan 9,98 persen. Tabel berikut menyajikan pertumbuhan sektor usaha pada periode 2014 – 2018 secara rinci.

Tabel 2- 22. Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2014-2018

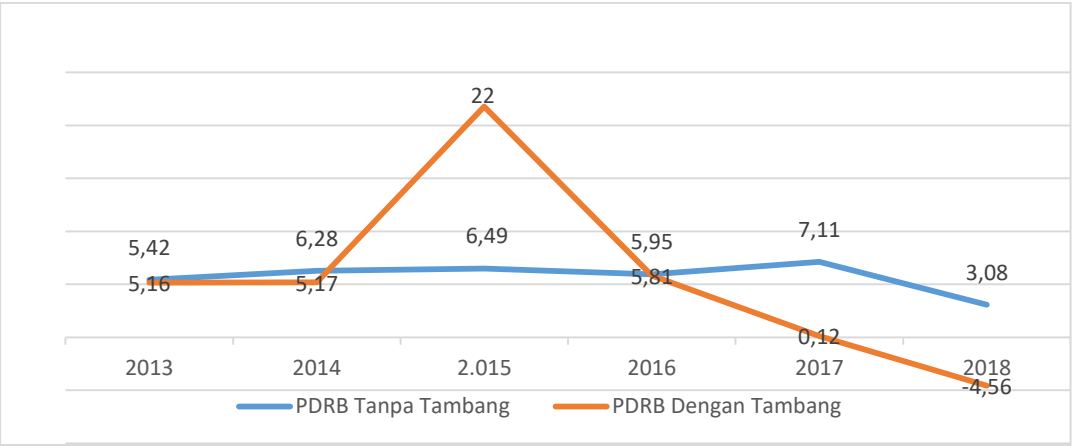
No	Sektor	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,46	6,91	3,16	6,53	1,65
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,14	107,03	5,72	-19,86	-33,71
3	Industri Pengolahan	3,37	3,12	5,42	6,06	1,33
4	Pengadaan Listrik, Gas	39,65	0,89	11,25	4,29	1,55
5	Pengadaan Air	12,87	3,79	4,89	4,61	-3,64
6	Konstruksi	7,80	7,69	8,64	7,35	2,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,67	6,05	7,85	8,64	5,45
8	Transportasi dan Pergudangan	7,48	6,47	4,24	8,07	2,03

No	Sektor	2014	2015	2016	2017*	2018**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	5,65	10,09	7,27	-4,59
10	Informasi dan Komunikasi	8,37	8,34	8,79	8,66	5,41
11	Jasa Keuangan	7,72	9,32	12,46	9,91	6,77
12	Real Estate	5,74	6,83	6,18	7,05	4,66
13	Jasa Perusahaan	7,26	5,76	6,99	5,87	5,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	3,69	2,98	3,30	1,03
15	Jasa Pendidikan	6,72	7,27	6,04	6,54	5,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,92	6,77	6,18	6,71	8,08
17	Jasa Lainnya	7,83	6,21	6,29	7,35	5,33
PE Dengan Tambang		5,17	21,76	5,81	0,12	-4,56
PE Tanpa Tambang		6,28	6,49	5,95	7,11	3,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dengan dan tanpa tambang pada tahun 2013-2018

Gambar 2- 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil dan menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tiga tahun terakhir terus menurun.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

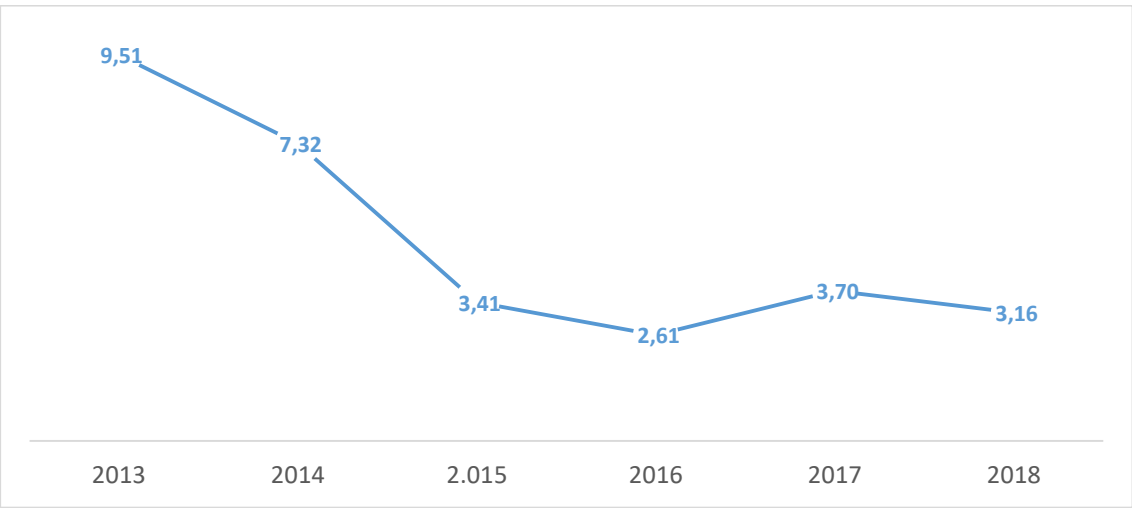
Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Hal ini disebabkan karena implikasinya yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa. Grafik berikut menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2013 -2018.

Gambar 2- 3. Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB 2018

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 9,51 persen, penyebab tingginya inflasi tahun 2013 karena pada tanggal 22 Juni 2013 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 07.PM/12/MPM/2013 telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini berdampak cukup signifikan pada pembentukan laju inflasi, tekanan inflasi yang cukup tinggi ini juga disebabkan karena kenaikan harga BBM yang berdekatan dengan tahun ajaran baru, bulan Ramadhan dan Lebaran yang memberikan sumbangan inflasi cukup tinggi disamping itu juga disebabkan karena adanya eksternal faktor seperti pengaruh perekonomian global.

Pada tahun 2014 inflasi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 7,23 persen sedangkan tahun 2015 sebesar 3,41 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 2,61 persen. Inflasi yang terjadi pada tahun 2016 ini jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2014 disebabkan karena adanya kenaikan harga LPG pada awal tahun, kenaikan harga tarif dasar listrik pada bulan Oktober kemudian juga adanya kenaikan harga BBM pada bulan November. Pada grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2016 cenderung menurun yaitu dari 3,41 persen menjadi 2,61 persen, inflasi tersebut jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen.

Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 persen, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi pada tahun 2017 di Provinsi NTB lebih tinggi dari inflasi nasional yang besarnya 3,62. Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Januari - Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung Bali yang mengganggu distribusi barang.

Pada tahun 2018 inflasi menurun 0,54 persen menjadi 3,16 persen dari tahun 2017 sebesar 3,70 persen, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi pada tahun 2018 di Provinsi NTB lebih tinggi dari inflasi nasional yang besarnya 3,13.

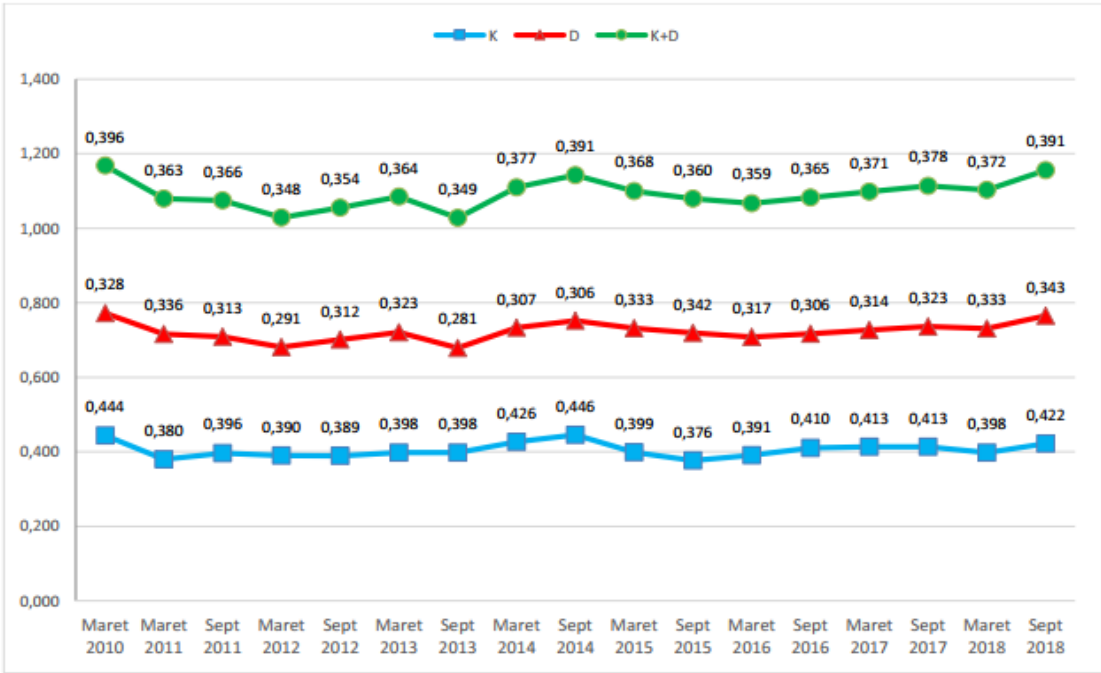
1. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan salah satu ukuran umum dan sering digunakan untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Indeks Gini memiliki kisaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 (satu) menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,396 dan menurun menjadi 0,363 pada Maret 2011. *Gini Ratio* naik pada September 2011 menjadi 0,366. Pada periode Maret 2012 (0,348) hingga September 2014, nilai *Gini Ratio* berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 yaitu sebesar 0,391. Pada Maret 2015 *Gini Ratio* mulai turun menjadi 0,368 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,359 pada Maret 2016. *Gini Ratio* pada September 2016 naik menjadi 0,365 dan kembali berfluktuasi hingga mencapai angka 0,391 pada September 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,422. Angka ini mengalami peningkatan dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 maupun *Gini Rati* September 2017,

masing-masing sebesar 0,024 poin dan 0,009 poin. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* September 2018 tercatat sebesar 0,343. Angka ini meningkat sebesar 0,010 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 yang sebesar 0,333 dan meningkat 0,019 poin dibanding *Gini Ratio* September 2017 yang sebesar 0,323.

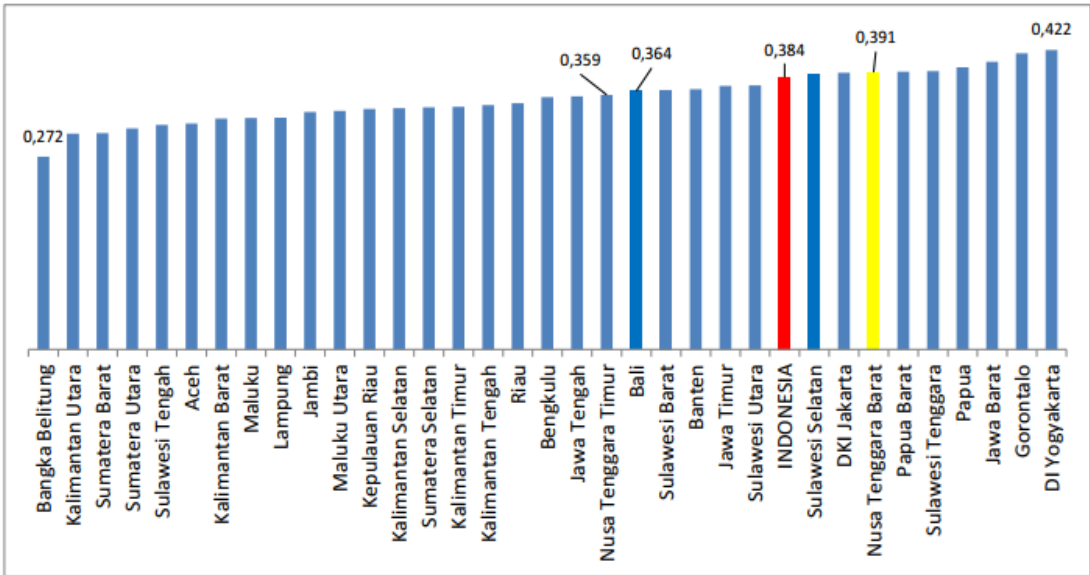
Gambar 2- 4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Pada September 2018, Gini Ratio Provinsi NTB berada di urutan ke 7 dari urutan tertinggi yang ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *Gini Ratio* sebesar 0,422 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,272.

Gambar 2- 5. Gini Ratio menurut Provinsi tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Dibanding dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,384, terdapat sembilan provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa

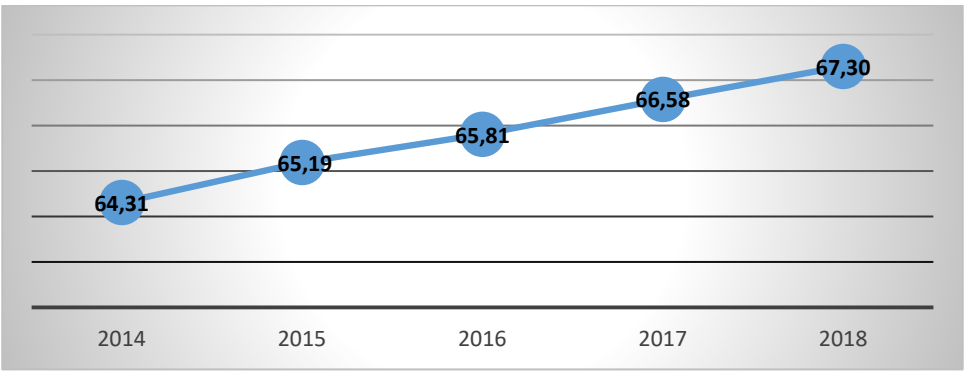
Yogyakarta (0,422), Gorontalo (0,417), Jawa Barat (0,405), Papua (0,398), Sulawesi Tenggara (0,392), Papua Barat (0,391), Nusa Tenggara Barat (0,391), DKI (0,394), dan Sulawesi Selatan (0,388).

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan perkembangan pembangunan non fisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Capaian IPM Provinsi NTB dalam 7 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 67,30 pada tahun 2018. Selama periode 2010-2018, IPM Provinsi NTB telah bertambah 6,14 poin dengan status capaian IPM sedang. Laju pertumbuhan IPM NTB Tahun 2018 sebesar 1,08 persen. Walaupun laju pertumbuhan pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1,17 persen, namun pertumbuhannya masih di atas satu persen dan dapat dikatakan tergolong pertumbuhan tinggi. Jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan maka bukan tidak mustahil suatu hari nanti akan dapat mencapai IPM level tinggi

Gambar 2- 6. Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2014-2018



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017

Level IPM Provinsi NTB berada di bawah level Nasional. Selisih IPM Provinsi NTB dengan Nasional pada tahun 2010 masih cukup lebar yaitu sebesar 5,37 poin. Seiring dengan berjalannya waktu, selisih ini semakin menipis menjadi 4,09 poin pada tahun 2018. Artinya NTB semakin berbenah dan berusaha mengejar ketertinggalan dengan nasional. Namun sepertinya upaya yang lebih keras diperlukan agar jarak ketertinggalan dengan nasional semakin menipis

Gambar 2- 7. Posisi Relatif IPM Tahun 2018

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM		
	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2017	2018	Capaian		Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,52	69,64	14,13	14,27	8,98	9,09	8 957	9 186	70,60	71,19	0,84
Sumatera Utara	68,37	68,61	13,10	13,14	9,25	9,34	10 036	10 391	70,57	71,18	0,86
Sumatera Barat	68,78	69,01	13,94	13,95	8,72	8,76	10 306	10 638	71,24	71,73	0,69
Riau	70,99	71,19	13,03	13,11	8,76	8,92	10 677	10 968	71,79	72,44	0,91
Jambi	70,76	70,89	12,87	12,90	8,15	8,23	9 880	10 357	69,99	70,65	0,94
Sumatera Selatan	69,18	69,41	12,35	12,36	7,99	8,00	10 220	10 652	68,86	69,39	0,77
Bengkulu	68,59	68,84	13,57	13,58	8,47	8,61	9 778	10 162	69,95	70,64	0,99
Lampung	69,95	70,18	12,46	12,61	7,79	7,82	9 413	9 858	68,25	69,02	1,13
Kep. Bangka Belitung	69,95	70,18	11,83	11,87	7,78	7,84	12 066	12 666	69,99	70,67	0,97
Kepulauan Riau	69,48	69,64	12,81	12,82	9,79	9,81	13 566	13 976	74,45	74,84	0,52
DKI Jakarta	72,55	72,67	12,86	12,95	11,02	11,05	17 707	18 128	80,06	80,47	0,51
Jawa Barat	72,47	72,66	12,42	12,45	8,14	8,15	10 285	10 790	70,69	71,30	0,86
Jawa Tengah	74,08	74,18	12,57	12,63	7,27	7,35	10 377	10 777	70,52	71,12	0,85
DI Yogyakarta	74,74	74,82	15,42	15,56	9,19	9,32	13 521	13 946	78,89	79,53	0,81
Jawa Timur	70,80	70,97	13,09	13,10	7,34	7,39	10 973	11 380	70,27	70,77	0,71
Banten	69,49	69,64	12,78	12,85	8,53	8,62	11 659	11 994	71,42	71,95	0,74
Bali	71,46	71,68	13,21	13,23	8,55	8,65	13 573	13 886	74,30	74,77	0,63
Nusa Tenggara Barat	65,55	65,87	13,46	13,47	6,90	7,03	9 877	10 284	66,58	67,30	1,08
Nusa Tenggara Timur	66,07	66,38	13,07	13,10	7,15	7,30	7 350	7 566	63,73	64,39	1,04
Kalimantan Barat	69,92	70,18	12,50	12,55	7,05	7,12	8 472	8 860	66,26	66,98	1,09
Kalimantan Tengah	69,59	69,64	12,45	12,55	8,29	8,37	10 492	10 931	69,79	70,42	0,90
Kalimantan Selatan	68,02	68,23	12,46	12,50	7,99	8,00	11 600	12 062	69,65	70,17	0,75
Kalimantan Timur	73,70	73,96	13,49	13,67	9,36	9,48	11 612	11 917	75,12	75,83	0,95
Kalimantan Utara	72,47	72,50	12,79	12,82	8,62	8,87	8 643	8 943	69,84	70,56	1,03
Sulawesi Utara	71,04	71,26	12,66	12,68	9,14	9,24	10 422	10 731	71,66	72,20	0,75
Sulawesi Tengah	67,32	67,78	13,04	13,13	8,29	8,52	9 311	9 488	68,11	68,88	1,13
Sulawesi Selatan	69,84	70,08	13,28	13,34	7,95	8,02	10 489	10 814	70,34	70,90	0,80
Sulawesi Tenggara	70,47	70,72	13,36	13,53	8,46	8,69	9 094	9 262	69,86	70,61	1,07
Gorontalo	67,14	67,45	13,01	13,03	7,28	7,46	9 532	9 839	67,01	67,71	1,04
Sulawesi Barat	64,34	64,58	12,48	12,59	7,31	7,50	8 736	9 051	64,30	65,10	1,24
Maluku	65,40	65,59	13,91	13,92	9,38	9,58	8 433	8 721	68,19	68,87	1,00
Maluku Utara	67,54	67,80	13,56	13,62	8,61	8,72	7 792	7 980	67,20	67,76	0,83
Papua Barat	65,32	65,55	12,47	12,53	7,15	7,27	7 493	7 816	62,99	63,74	1,19
Papua	65,14	65,36	10,54	10,83	6,27	6,52	6 996	7 159	59,09	60,06	1,64
INDONESIA	71,06	71,20	12,85	12,91	8,10	8,17	10 664	11 059	70,81	71,39	0,82

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Nilai IPM Provinsi NTB menempati peringkat ke-29 nasional, IPM Provinsi NTB lebih tinggi dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian serius, meskipun secara pertumbuhan menunjukkan kondisi yang sangat baik.

Seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di tahun 2017, sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 65,87 tahun dengan peningkatan sebanyak 0,32 tahun. Artinya setiap bayi yang lahir di tahun 2018 mempunyai harapan untuk hidup hingga berusia 65,87 tahun.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,47 tahun dengan penambahan sebanyak 0,01 tahun. Artinya penduduk usia 7 tahun ke atas di NTB memiliki harapan untuk sekolah hingga tingkat 2 perguruan tinggi.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 7,03 tahun dengan penambahan sebanyak 0,13 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTB masih setara kelas VII (sekolah menengah pertama).
4. Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Per Tahun bertambah menjadi Rp 10.284 ribu dengan peningkatan sebesar Rp 407 ribu

Membaiknya IPM NTB itu disebabkan banyak faktor seperti indikator AHH, karena pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian halnya dengan angka HLS dan RLS membaik karena pelayanan pendidikan semakin baik artinya perbaikan pelayanan dasar selama ini mulai menunjukkan hasil.

Tabel 2- 23. Perkembangan Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2014-2018

No	Komponen IPM			2014	2015	2016	2017	2018
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)			64,90	65,38	65,48	65,55	65,87
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lama Sekolah		12,73	13,04	13,16	13,46	13,47
3	Rata-Rata (Tahun)	Lama Sekolah		6,67	6,71	6,79	6,90	7,03
4	Pengeluaran Per Kapita Rp 000/ tahun			8.987	9.241	9.575	9.877	10.284
IPM				64,31	65,19	65,81	66,58	67,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

3. Ketenagakerjaan

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dari suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan serapan tenaga kerjanya semakin besar sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi semakin meningkat, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat dan ini akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada data BPS Provinsi NTB, diketahui bahwa selama periode tahun 2013 – 2017 jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan dari 2.094.608 orang di tahun 2013 menjadi 2.396.169 orang di tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut.

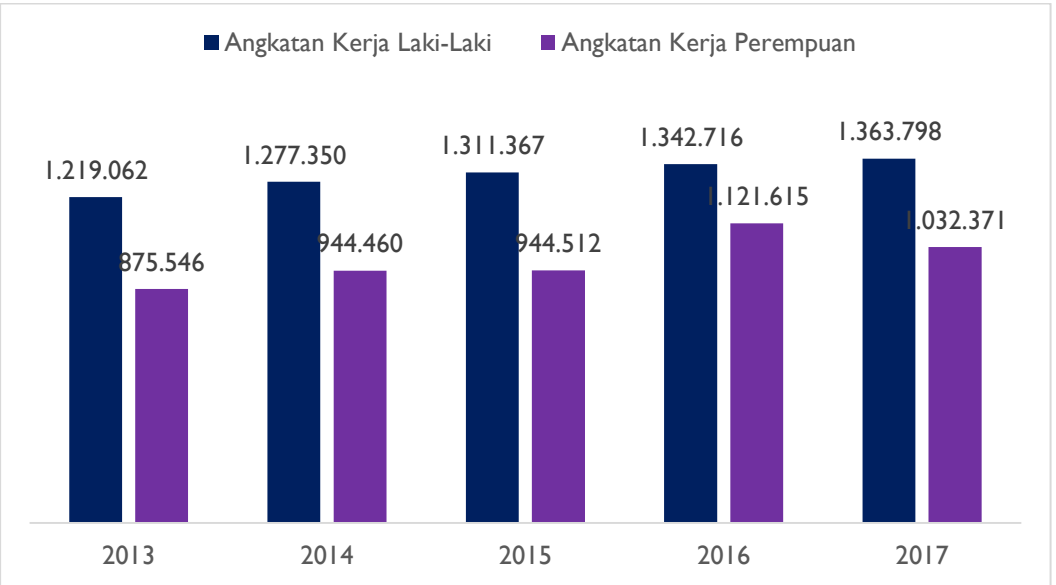
Tabel 2- 24. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan kerja	2.094.608	2.221.810	2.255.879	2.464.331	2.396.169
	Laki-laki	1.219.062	1.277.350	1.311.367	1.342.716	1.363.798
	(%)	-58,2	-57,49	-58,13	-54,49	-56,92
	Perempuan	875.546	944.460	944.512	1.121.615	1.032.371
	(%)	-41,8	-42,51	-41,87	-45,51	-43,08
	r (%)	0,28	3,53	1,53	9,24	-2,77
2	Pengangguran	112.708	127.710	128.376	97.021	79.449
	Laki-laki	72.284	81.886	88.294	61.129	51.471
	(%)	-64,13	-64,12	-68,78	-63,01	-64,78
	Perempuan	40.424	45.824	40.082	35.892	27.978
	(%)	-35,87	-36,88	-31,22	-36,99	-35,22
	r (%)	2,51	12,3	0,52	-24,42	-18,11
3	TPT (%)	5,38	5,75	5,69	3,94	3,32

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Jumlah angkatan kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, meskipun secara tren menunjukkan tren yang positif.

Gambar 2- 8. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 -2017



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Data ini sejalan dengan kondisi dimana peran serta perempuan dalam ekonomi dan politik yang tercermin dari indikator IPG dan IDG masih cenderung rendah.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran.

Tabel 2- 25. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	45,29	43,13	39,01	38,90	29,69
Industri	8,05	8,89	9,38	8,87	14,05
Konstruksi	5,33	5,01	7,36	6,51	6,73
Perdagangan	18,88	20,20	21,58	19,39	23,28
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,55	3,90	3,28	4,71	4,76
Keuangan	1,52	1,40	1,14	1,76	3,1
Jasa Kemasyarakatan	15,62	15,51	16,47	17,24	16,92
Lainnya	1,76	1,97	1,77	2,62	1,47

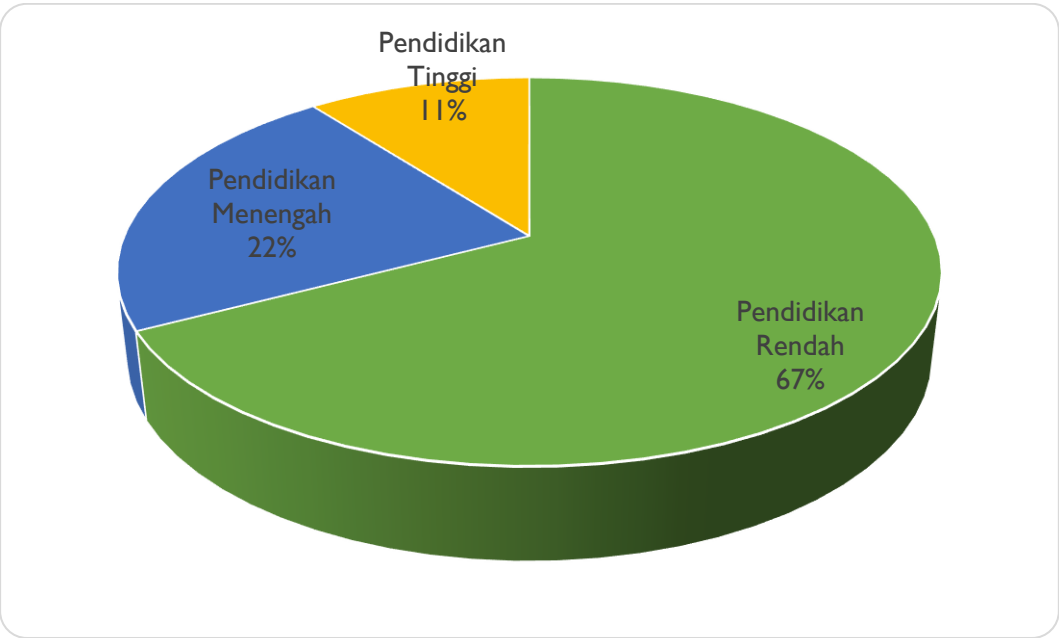
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan lapangan usaha pada periode Agustus 2013 – Agustus 2017, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB adalah pertanian, kemudian diikuti oleh perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri sedangkan yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air. Tabel berikut memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha.

Hal yang menarik adalah adanya penurunan persentase atau porsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dari 45,29% menjadi 29.69%. Hal ini berbanding lurus dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian yang juga menunjukkan tren yang menurun.

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.559.978 orang (67,34%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 513.943 orang (22,18%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.799 orang (10,48%) mencakup 41.481 orang berpendidikan Diploma dan 201.318 orang berpendidikan Universitas.

Gambar 2- 9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB 2018

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi NTB masuk dalam pendidikan rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2018*) sebanyak 2.237,38 (ribu) orang,menurun 221,64 (ribu) orang dibanding Februari 2018 (semester lalu) dan turun 158,79 (ribu) orang dibanding Agustus 2017(setahun yang lalu). Sebagai catatan, data ketenagakerjaan bulan Agustus 2018 belum termasuk data Kabupaten Lombok Utara. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018*) sebanyak 2.154,12 (ribu) orang, turun 221,69 (ribu) orang dibanding keadaan semester lalu dan berkurang 162,60 (ribu) orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83,26 (ribu) orang, mengalami kenaikan sekitar 0,05 (ribu) orang dibanding semester lalu dan meningkat sebanyak 3,81 (ribu) orang dibanding setahun yang lalu. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2018*) tercatat sebesar 65,91 persen, turun 3,92 poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 2,58 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan terjadinya kejadian bencana gempa pada Bulan Agustus 2018 sehingga pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar / pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Disamping itu sebagai catatan data ketenagakerjaan bulan Agustus 2018*) belum termasuk data Kabupaten Lombok Utara, sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan data tahun 2017.

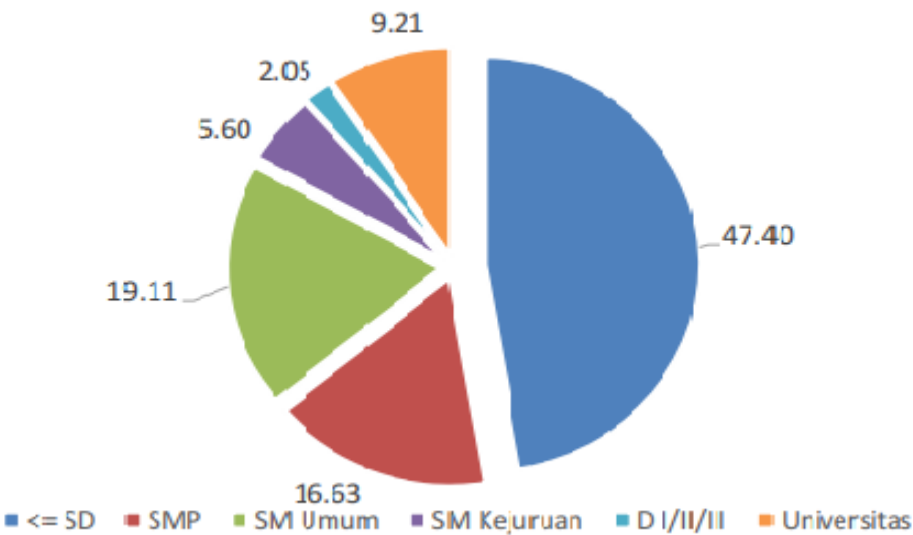
Tabel 2- 26. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2014-2018

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,75	5,69	3,94	3,32	3,72

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,72%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,06%.

Gambar 2- 10. Proporsi TPT Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018*)masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikanrendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.379.317 orang (64,03 persen). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMU sederajat) sebanyak 532.253 orang (24,71 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.554 orang (11,26 persen) mencakup 44.174 orang berpendidikan Diploma dan 198.380 orang berpendidikan Universitas

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

APK merupakan Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau

melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2- 27. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	APK SD/MI/Paket A	APK SMP/MTS/Paket B	APK SMA/MA/SMK/Paket C
1	2013	107.90	88.72	65.00
2	2014	109.08	92.44	76.68
3	2015	111.54	91.94	89.51
4	2016	110.78	93.40	91.25
5	2017	109.63	94.97	93.89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut, APK SD/ sederajat cenderung mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, sedangkan untuk APK SMP/ sederajat dan APK SMA/ sederajat cenderung mengalami peningkatan. APK SD/ sederajat diketahui mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, ini berarti penduduk yang bersekolah diluar usia 7-12 tahun pada jenjang SD/ sederajat juga mengalami penurunan. Masyarakat semakin peduli akan pentingnya pendidikan dasar sehingga saat anak berusia 7-12, anak tersebut diberi pendidikan sesuai jenjangnya. Selain itu masyarakat mudah untuk mengakses layanan pendidikan tingkat SD/ sederajat bahkan sampai daerah terpencil sehingga APK SD/ Sederajat menurun. Selain itu penurunan APK SD/ sederajat juga disebabkan karena adanya aturan pengetatan usia sekolah 7 tahun.

Penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2013-2017 mengalami trend meningkat. Disandingkan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat termasuk paket B setara, terlihat bahwa lebih tinggi jumlah penduduk yang bersekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk diluar usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat. Kondisi ini semakin menjelaskan mengapa nilai APK SMP/ sederajat dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun semakin meningkat dari tahun 2013-2017. Apabila melihat penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2013 sampai 2017 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia 16-18 tahun dapat melanjutkan sekolah pada jenjang SMA/ sederajat. Sementara jika melihat besaran APK jenjang SMA/ Sederajat terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk diluar usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak

penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Nilai APM berkisar antara 0-100, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Dari ketiga jenjang pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat), nilai APM cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai 2017. APM yang mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya

Tabel 2- 28. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A	APM SMP/ MTS/Paket B	APM SMA/MA/SMK/Paket C
1	2013	96.71	80.21	58.00
2	2014	97.62	82.29	64.11
3	2015	97.80	82.83	64.97
4	2016	97.90	83.17	65.19
5	2017	98.13	83.57	65.67

Sumber: BPS, Tahun 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai termasuk didalamnya pendidikan non formal dan paket A, B, dan C. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2- 29. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Th. 2013 – 2017 di Provinsi NTB

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
2013	98,20	92,23	66,40	22,64
2014	99,11	97,27	75,68	26,73
2015	99,48	97,44	75,86	26,84
2016	99,42	97,60	76,24	27,79
2017	99,43	97,69	76,61	28,52

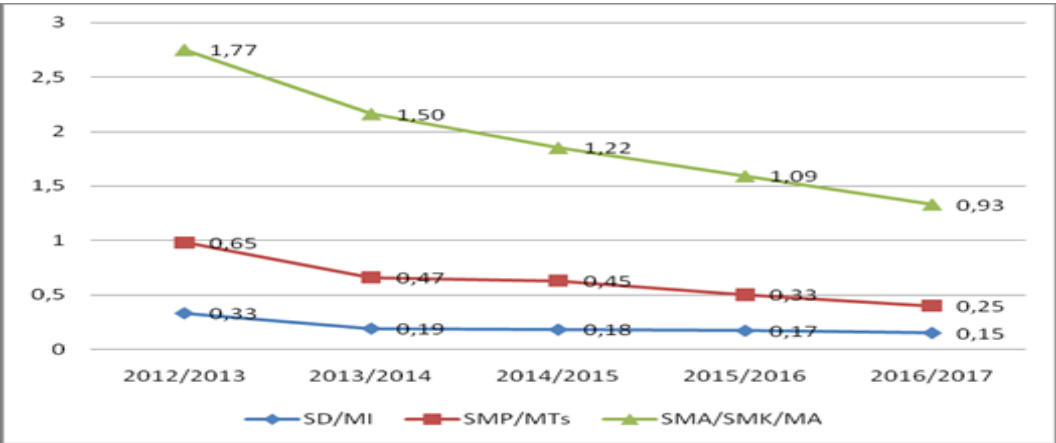
Sumber: BPS-RI Susenas, 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APS semakin rendah. APS jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2013-2017 menunjukkan angka mendekati 100 persen. Data ini menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan jenjang pendidikan SD dan SMP cukup tinggi yang didorong oleh adanya program wajib belajar 9 tahun, pembangunan rumah singgah dan penambahan ruang kelas baru bagi sekolah yang berada di daerah terpencil serta adanya dana BOS untuk membantu operasional sekolah dan untuk mendukung siswa yang kurang mampu. Sementara untuk APS usia 16-18 tahun jenjang SMA dan usia

19-24 tahun jenjang perguruan tinggi sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung meningkat namun masih tergolong rendah atau masih jauh dari 100 persen disebabkan oleh masih terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil, belum semua penduduk usia 16-18 tahun dapat ditampung di sekolah yang ada dan juga disebabkan oleh keterbatasan dana.

Dengan telah dipenuhinya dana BOS untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2- 11. Angka Drop Out (DO) Tahun 2012/2013 - 2016/2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2013-2017

Dari grafik diatas terlihat trend persentase jumlah siswa putus sekolah menurun yang terjadi pada semua jenjang pendidikan. Penurunan angka putus sekolah tahun 2017/2018 pada semua jenjang pendidikan optimis dapat dicapai dengan tetap meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu, disertai dengan dana BOS dan melakukan penanganan dini terhadap siswa yang potensial putus sekolah. Beberapa terobosan yang dilakukan dalam rangka penurunan angka drop out antara lain:

- a. Bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta keluarga terutama orang tua dalam pendidikan anak mereka.
- b. Melaksanakan program Paket A, B dan C, serta membangun sekolah SD-SMP satu atap untuk wilayah terpencil dan terisolir.
- c. Layanan khusus bagi anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi melalui program beasiswa dan pendidikan inklusi.
- d. Meningkatkan jumlah SMA terbuka secara bertahap pada semua kabupaten/kota yang pada saat ini baru ada di Kabupaten Lombok Barat dengan sekolah induk SMA Negeri 1 Narmada.
- e. Meningkatkan APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C dengan terus memfasilitasi berbagai bantuan.

- f. Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 4 Tahun 2015 yang memberikan implikasi hukum dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di provinsi NTB.

2.1.3.1.2 **Urusan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Jumlah kematian bayi dalam 6 tahun terakhir terus menurun pada kisaran 1.070 kasus pada tahun 2013 sampai dengan 866 kasus pada tahun 2018. Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian indikator usia harapan hidup. Kasus Kematian Ibu juga terus menurun selama 5 tahun terakhir, namun pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu mencapai 99 kasus. Kasus kematian bayi menurut kabupaten/kota tahun 2013 – 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 30. Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mataram	44	39	34	25	44	58
2	Lombok Barat	90	60	42	38	31	28
3	Lombok Utara	52	40	82	59	86	87
4	Lombok Tengah	255	199	192	192	242	230
5	Lombok Timur	593	482	460	467	346	226
6	Sumbawa Barat	27	21	28	24	17	17
7	Sumbawa	83	73	75	66	30	74
8	Dompu	29	33	35	30	40	43
9	Bima	97	100	91	80	74	79
10	Kota Bima	29	22	17	25	19	24
NTB		1.299	1.069	1056	1006	929	866

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2017

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 1.299 kasus pada tahun 2013 menjadi 866 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah dengan jumlah kematian bayi tertinggi

pada tahun 2018 dengan 230 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 2- 31. Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi (per 1.000 KH)	12,6	10,3	10,35	9.86	9.00	7.91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

Proporsi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukan kondisi positif yaitu dari 12,6 kematian per 1.000 KH menjadi 7.9 kematian per 1.000 KH. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan telah berhasil menekan angka kematian bayi meskipun masih cukup banyak kasus kematiannya.

Tabel 2- 32. Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mataram	14	9	10	11	6	9
2	Lombok Barat	10	7	5	5	4	5
3	Lombok Utara	2	6	2	2	3	2
4	Lombok Tengah	20	18	16	26	24	24
5	Lombok Timur	35	37	28	20	22	34
6	Sumbawa Barat	5	4	1	1	4	1
7	Sumbawa	15	15	10	7	4	12
8	Dompu	2	2	12	6	4	0
9	Bima	11	8	8	9	8	8
10	Kota Bima	3	5	3	5	6	4
NTB		117	111	95	92	85	99

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

Angka kematian ibu pada tahun 2013 di NTB sebanyak 117 kasus kemudian terus menurun hingga menjadi 99 kasus pada tahun 2018. Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2018.

Tabel 2- 33. Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi (per 100.000 KH)	114,00	107,00	93,19	90,25	82,38	90,58

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

Proporsi angka kematian ibu per 100.000 KH Provinsi NTB tahun 2013 sebanyak 114 kematian per 100.000 KH dan pada tahun 2018 menjadi 90,58 kematian per 100.000 KH.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Kesiapsiagaan Desa Siaga yang ada di Desa/Kelurahan memiliki kontribusi yang positif terhadap capaian target Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah

dimulai tahun 2006. Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018 tercatat dari 1.137 Desa/kelurahan. 1.090 Desa (95,86%) telah mengembangkan desa siaga aktif. Hal ini menandakan bahwa Desa dan Kelurahan di Provinsi NTB telah memulai upaya mewujudkan desa dan kelurahan Siaga.

Tabel 2- 34. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 tahun yg Melahirkan Anak Lahir Hidup & Penolong Proses Kelahiran Tahun 2018

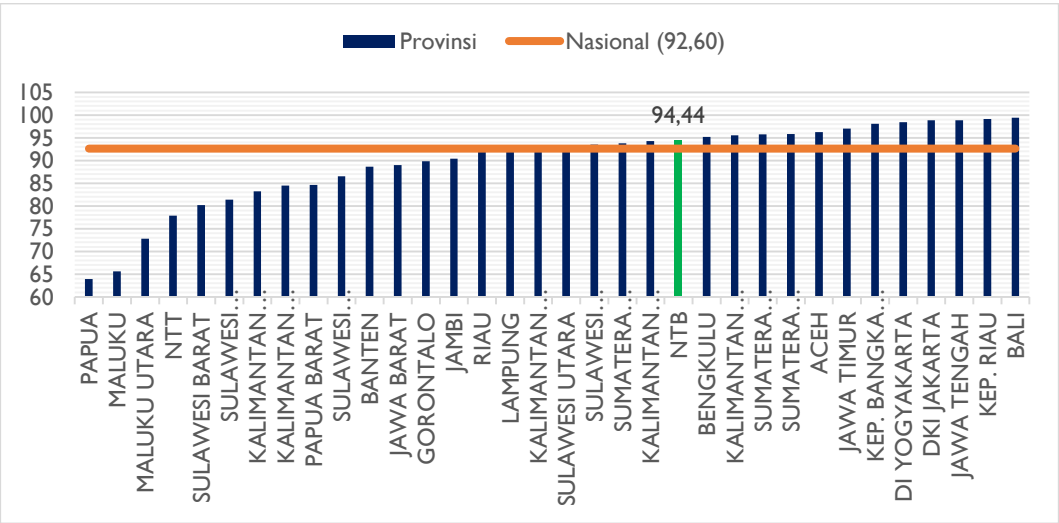
No	Keterangan	Tenaga Kesehatan	Non-Tenaga Kesehatan
1	Lombok Barat	95.45	4.55
2	Lombok Tengah	94.17	5,83
3	Lombok Timur	100.00	0
4	Sumbawa	93.50	6.5
5	Dompu	97.96	2.04
6	Bima	96.19	3.81
7	Sumbawa Barat	80.88	19.12
8	Lombok Utara	94.58	5.42
9	Mataram	83.56	16.44
10	Kota Bima	94.05	5.95
11	NTB	94.81	5.19

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pada tahun 2018, persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan di Provinsi NTB sebesar 94,81% dan ditolong oleh tenaga non kesehatan sebesar 5,19%. Kabupaten Sumbawa Barat Menjadi daerah dengan nilai capaian ditolong tenaga kesehatan terendah dengan 80.88%.

Nilai capaian Provinsi NTB telah berada di atas nilai capaian nasional dan berada di atas beberapa provinsi lain di Indonesia. Meskipun demikian masih ada ruang untuk terus meningkatkan pelayanan bagi ibu melahirkan.

Gambar 2- 12. Posisi Relatif Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2016



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia

Tabel 2- 35. Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2016

No	Keterangan	Provinsi NTB	Indonesia
1	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	55,00	42,98
2	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	65,63	53,47
3	Persentase Posyandu Aktif	51,11	56,57

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia

Persentase puskesmas terakreditasi di Provinsi NTB baru sebanyak 79.4% artinya masih ada 20.6% puskesmas yang belum terakreditasi, meskipun demikian angka ini sudah melampaui nilai capaian nasional (42,98%). Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 72.9% dan persentase posyandu aktif hanya 51,11%. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan dengan optimal.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infratraktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibangun 934,55 km Jalan Negara dan 1.484,43 km Jalan Provinsi. Dari total panjang Jalan Provinsi, 83,33% atau 1.236.98 km sudah diaspal, dan sisanya 16,67% atau 247,45 km belum diaspal. Sementara itu jika dilihat dari kondisinya, sepanjang 886,51 km (59,72%) dalam kondisi baik, 258,89 km (17,44%) dalam kondisi sedang, 22,53 km (1,52%) rusak ringan dan 316,50 km (21,32%) rusak berat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 36. Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Jenis dan Kondisi Th. 2017

No	Uraian	Panjang (km)	%
1	Jenis Permukaan		
	a. Diaspal	1.236,98	83,33
	b. Kerikil	89,45	6,03
	c. Tanah	130,00	8,76
	d. Tidak Dirinci	28,00	1,88
	TOTAL	1.484,43	100,00
2	Kondisi Jalan		
	a. Baik	886,51	59,72
	b. Sedang	258,89	17,44
	c. Rusak Ringan	22,53	1,52
	d. Rusak Berat	316,50	21,32
	e. Tidak Dirinci	0	0
	TOTAL	1.484,43	100,00

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2018

Pada tahun 2017, jembatan yang masuk dalam kewenangan Provinsi NTB dengan bentang > 6 m berjumlah 687 unit jembatan dimana 458 unit berjenis jembatan

beton, 9 unit jembatan komposit, 64 unit jembatan rangka baja dan 156 unit jembatan lintasan basah. Sedangkan dengan bentang < 6 m berjumlah 213 unit jembatan dimana 202 unit jembatan beton, jembatan rangka baja 10 unit dan jembatan lintasan basah 1 unit.

Tabel 2- 37. Jumlah Dan Kondisi Jembatan Di Provinsi NTB Tahun 2017

Keadaan	Jembatan Provinsi			
	Bentang < 6 m		Bentang > 6 m	
	Jumlah	Meter	Jumlah	Meter
Beton	202	854,20	458	5.265,70
Komposit	0	0	9	273,00
Rangka Baja	10	42,20	64	2.077,90
Lintasan Basah	1	5,00	156	4.954,90
Jumlah	213	901,40	687	12.571,50

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2018

Bidang penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikatornya yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, telah terealisasi.

Adapun sistem perkotaan menurut Perda Nomor 3 Tahun 2010, yaitu menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Mataram; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Praya, Sumbawa Besar dan Bima; Pusat Kegiatan Wil. Promosi (PKW-P) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, Woha; dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu’u, Kilo, Kore, O’o, Sila, Tangga, Wawo, Wera, Sape.

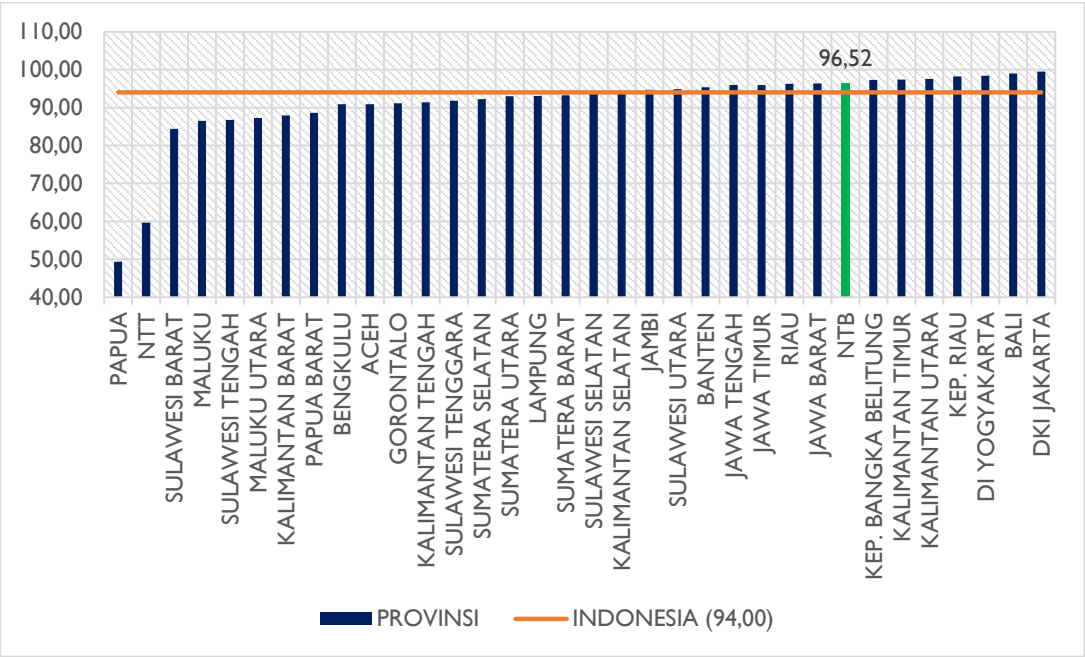
2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan yang meliputi (1) rumah layak huni dan terjangkau dan (2) lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU). Rumah layak huni dan terjangkau diindikasikan oleh cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

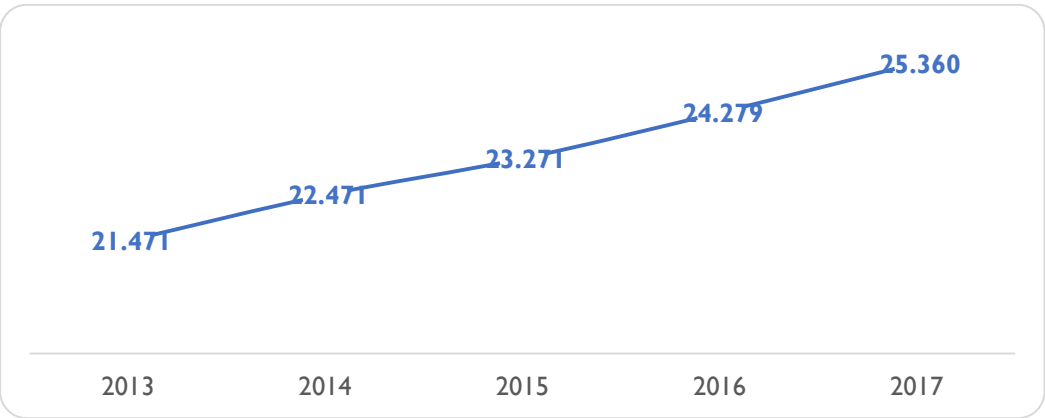
Gambar 2- 13. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Tahun 2016



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau di Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 96,52% angka ini sudah melampaui nilai capaian nasional yang masih berada pada angka 94,00%. Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, guna meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Perkembangan jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani secara kumulatif selama tahun 2013-2017 mencapai 25.360 unit dengan perkembangan disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2- 14. Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni Yang Ditangani Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan jumlah rumah layak huni yang ditangani selama periode tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 38. Capaian Indikator Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017

Uraian	Capaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (unit)	21.471	1.000	800	1.008	1.081

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017

Penanganan rumah tidak layak berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 39. Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013- 2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Mataram	532	25	23	26	32
2	Lombok Barat	3.276	153	116	158	160
3	Lombok Tengah	5.414	252	156	195	76
4	Lombok Utara	1.040	48	56	70	208
5	Lombok Timur	5.789	270	242	309	217
6	Sumbawa Barat	321	15	20	18	96
7	Sumbawa	2.069	96	61	76	52
8	Dompu	1.192	55	31	38	72
9	Bima	1.683	79	72	92	121
10	Kota Bima	155	7	23	26	47
Jumlah		21.471	1.000	800	1.008	1.081

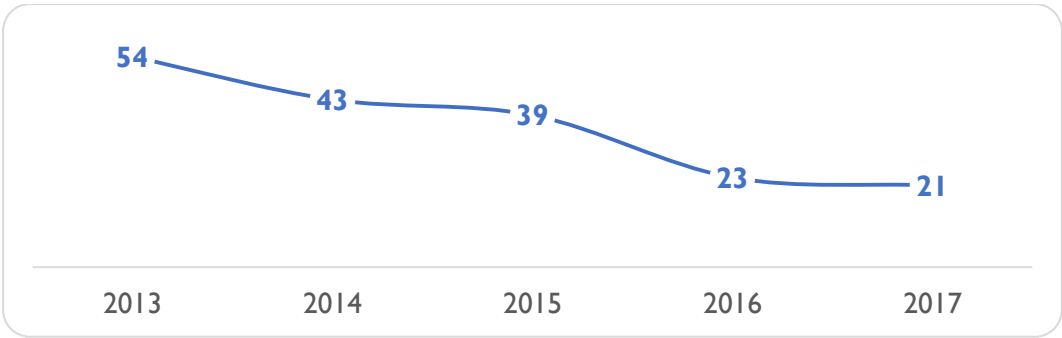
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017

Menurut pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Minimal, ada dua jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

2.1.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentruman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu faktor syarat terlaksananya pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017, konflik yang terjadi terus menunjukkan trend penurunan sebagaimana pada grafik berikut.

Gambar 2- 15. Jumlah Konflik Sosial Tahun 2013 – 2017

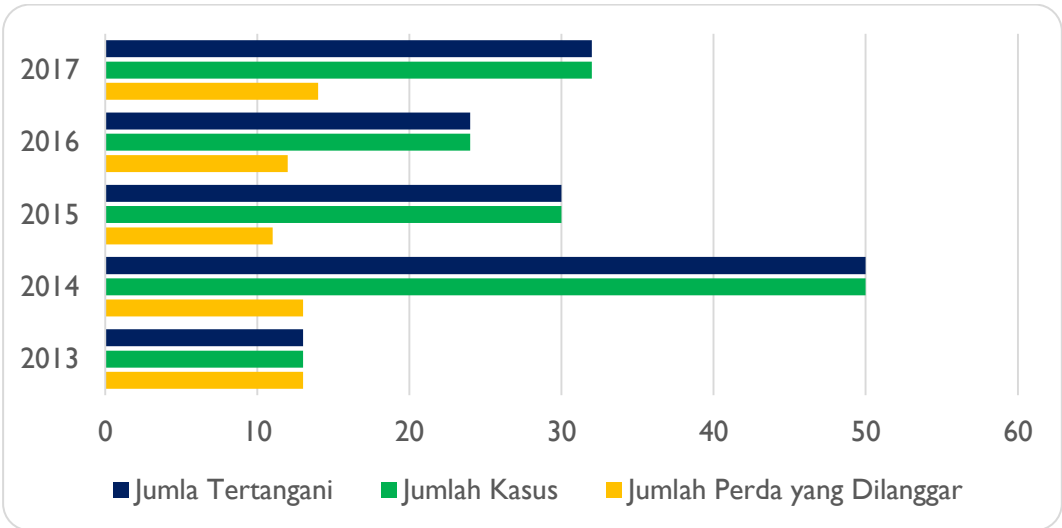


Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2017

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Untuk penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur telah dilakukan secara pre-entif dan preventif. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 149 kasus dan telah tertangani seluruhnya sebagaimana pada grafik berikut.

Gambar 2- 16. Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Pergub Tahun 2013 – 2018



Sumber: Satpol PP Provinsi NTB, 2017

Bencana yang terjadi di wilayah Provinsi NTB sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagian besar diakibatkan oleh gejala alam antara lain angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa, kekeringan, dan letusan gunung berapi. Bencana alam yang kerap terjadi tiap tahun didominasi oleh angin kencang/puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Bencana tersebut menimbulkan tingkat kerusakan dan jumlah korban terbanyak. Berikut jumlah bencana yang terjadi di wilayah NTB selama tahun 2013 – 2017:

Tabel 2- 40. Jumlah Bencana yang Terjadi di Wilayah NTB Tahun 2013 – 2017

No	Jenis Bencana	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kebakaran	3	-	1	-	-
2	Angin Kencang/Puting Beliung	26	9	6	3	2
3	Banjir	41	9	22	32	19
4	Tanah Longsor	4	1	4	9	2
5	Gempa	1	1	-	13	-
6	Gelombang Pasang / Banjir ROB	5	-	-	3	-
7	Kekeringan	-	1	1	1	1
8	Letusan Gunung Berapi	-	-	1	1	-

Sumber: LKPJ AMJ Tahun 2013 – 2018

Berdasarkan data diatas, wilayah Provinsi NTB cukup rentan terhadap bencana alam terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang/puting beliung yang lebih disebabkan oleh perubahan cuaca dan musim. Bencana yang terjadi di NTB masih dalam kategori status bencana provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penanganannya dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai daerah wisata, upaya antisipasi bencana dilaksanakan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi dengan pemasangan Display Informasi Cuaca dan bencana di BPBD Provinsi NTB, dan pembentukan Prosedur Tetap (Protap/SOP) kebencanaan dan pembentukan Tim Siaga Bencana di semua hotel terutama di kawasan Senggigi, Kerjasama (Mou) BPBD Provinsi NTB dengan Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia. Adanya upaya tersebut, diharapkan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penduduk NTB pada umumnya, dan para wisatawan pada khususnya.

Kerentanan terhadap bencana terkait dengan iklim diperoleh dari data mengenai tingkat kerentanan didapatkan melalui akses Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang dipublikasi oleh KLHK. Nilai IKA menunjukkan tingkat adaptasi suatu daerah dan IKS menyatakan tingkat keterpaparan suatu daerah. Pengelompokkan berdasarkan nilai IKA dan IKS selanjutnya dinyatakan dalam kelas kerentanan.

Tabel 2- 41. Indeks Kerentanan Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota

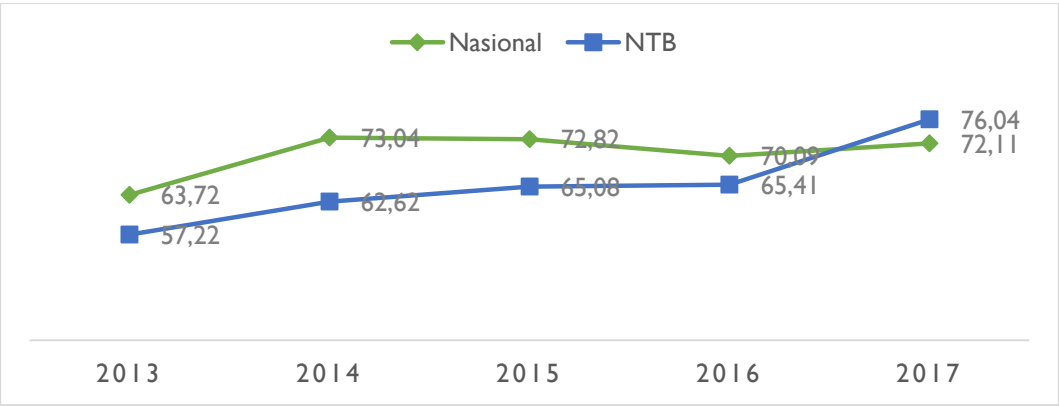
Kabupaten/Kota	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Lombok Barat	0,626725	0,5705	3	3	3
Lombok Tengah	0,623580	0,4310	3	3	3
Lombok Timur	0,561590	0,5310	3	3	3
Sumbawa	0,771735	0,8320	2	2	2
Dompu	0,773885	0,6265	2	2	2
Bima	0,768025	0,7130	2	2	2
Sumbawa Barat	0,781375	0,7180	2	2	2
Lombok Utara	0,711585	0,4320	1	1	1
Kota Mataram	0,612195	0,2350	1	1	1
Kota Bima	0,737305	0,8080	2	2	2

Sumber: Bappeda Provinsi NTB

Indeks demokrasi Indoensia untuk Provinsi NTB pada tahun 2016 tercatat sebesar 65,41 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,08 angka ini masih berada di atas nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka di atas 70. Berikut ini nilai capaian indeks demokrasi NTB dan indonesia tahun 2016.

Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi NTB pada tahun 2017 tercatat sebesar 76,04 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,41 angka ini masih berada di atas nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka di atas 70. Berikut ini nilai capaian indeks demokrasi NTB dan Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

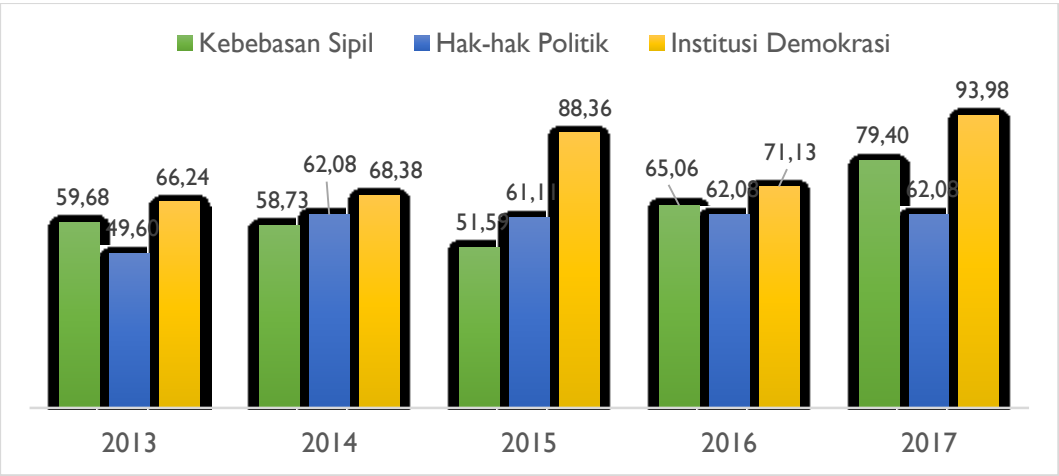
Gambar 2- 17. Indeks Demokrasi Indonesia



Sumber: BPS Provinsi NTB 2018

Perkembangan aspek Indeks Demokrasi Indonesia yang meliputi tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Institusi Demokrasi selama lima tahun terakhir terus mengalami tren positif. Perkembangan ketiga aspek tersebut di jelaskan pada gambar berikut :

Gambar 2- 18. Perkembangan Indeks Aspek IDI NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB 2018

Aspek IDI yang masih tertinggal dari nilai capaian nasional di Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah pada aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik, sedangkan pada aspel lembaga demokrasi sudah jauh melampaui. Peningkatan indeks demokrasi bisa difokuskan kepada dua aspek yang masih tertinggal tersebut.

2.1.3.1.6 **Urusan Sosial**

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini dan di masa yang akan datang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat serta swasta diantaranya pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kegiatan penanganan PMKS, dan jumlah sarana sosial (seperti panti sosial, panti jompo, dan panti rehabilitasi). Adapun jumlah sarana sosial pada tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjumlah 983 LKS.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2- 42. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

No	Jenis PMKS	Jumlah	Yang Sudah Diberikan Layanan
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	4.036	40
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	301	-
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Pengemis	55	-
4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan	695	-
5	Pelayanan dan Rehabilitasi Pemulung	316	-
6	Pelayanan dan Rehabilitasi Gepeng	324	-
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Waria	701	-
8	Pelayanan dan Rehabilitasi Trafiking Perempuan	1.541	-
9	Pelayanan dan Rehabilitasi HIV/ AIDS	523/659	15
10	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Melalui Usaha Kemandirian.APBN – P	100	100
11	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bagi (BWBLP) Melalui Usah Kemandirian APBN – P	225	225
12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bagi Trafiking	138	138
13	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bagi Eks WTS Melalui Usah Kemandirian APBN – P	12	12
14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dalam Panti Bagi WTS, Korban Tindak Asusila, Trafiking, ODHA.	80	-
15	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dalam Panti Bagi Gelandangan Pengemis	100	-

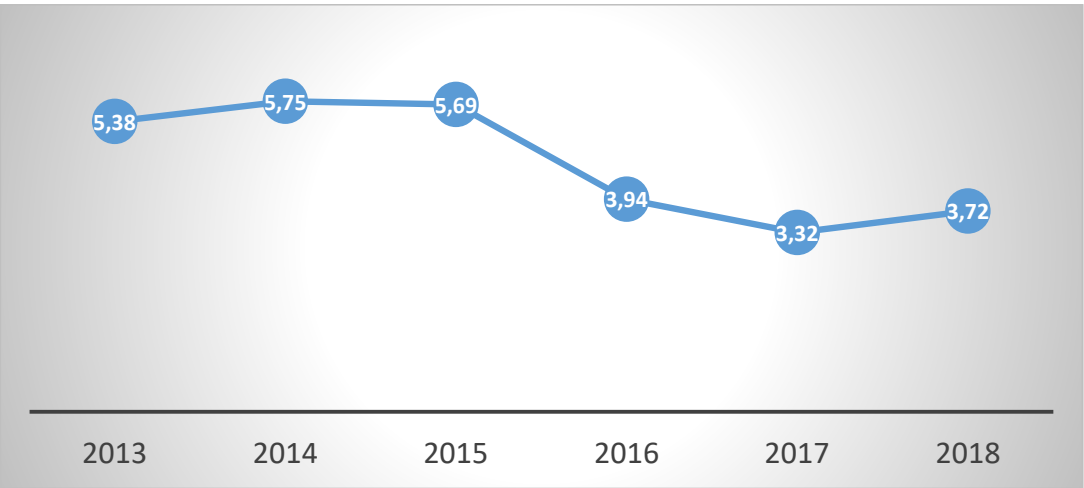
Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017

2.1.3.2 **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

2.1.3.2.1 **Urusan Tenaga Kerja**

Sampai dengan tahun 2018, TPT di Provinsi NTB telah mencapai 3,72 persen atau setara dengan 79.449 orang pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun 2017, TPT mencapai 3,32 persen atau setara dengan 97.021 orang. Kondisi ini lebih tinggi 0,40 point. Menurunnya tingkat pengangguran, dari tahun 2015 sebesar 1,04 persen sampai dengan tahun 2017 sebesar 15,74 persen, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja produktif dan berkualitas telah mampu memperoleh pekerjaan untuk dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera. Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2013 – 2018 sebagai berikut.

Gambar 2- 19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013 – 2018



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2017

Data perkembangan Tenaga Kerja Indonaesia (TKI), Remittance dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi NTB selama tahun 2013 - 2017 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Strategi yang yang dilakukan dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan diantaranya Pembentukan 6 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Provinsi NTB dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di LTSP, kegiatan Informasi Pasar Kerja (Job Fair), peningkatan kompetensi kepada calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, dan menjaga kondusifitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dengan meningkatkan peran Pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi/penegakan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan di perusahaan.

Tabel 2-1 Kondisi Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Keterangan	2016	2017
1	TPT Penduduk Umur Muda (persen)	14,72	11,25
2	Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Dewasa	9,2	6,11
3	Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur	66,59	52,3

Sumber: BPS Provinsi NTB

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penganggur terbuka masih berada pada penganggur orang dewasa.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat dua indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks pembangunan gender merupakan ukuran yang dapat melihat sejauh mana kualitas pembangunan manusia dalam hal ini perempuan dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Tabel 2- 43. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun					Peningkatan	Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017		
NTB	89,44	90,02	90,23	90,05	90,36	0,92	1,02
Indonesia	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	0,77	0,85

Sumber: BPS Tahun 2018

Nilai IPG Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 masih selalu berada di bawah nilai capaian IPG nasional, meskipun demikian bila dilihat dari peningkatan, nilai peningkatan IPG NTB yaitu sebesar 0,92 poin atau tumbuh 1,02% lebih besar dibandingkan dengan peningkatan IPG nasional yaitu 0,77 poin atau 0,85%. Hal ini menandakan adanya progres yang lebih cepat dari rata-rata nasional.

Indikator lainnya adalah IDG, dengan IDG kita dapat melihat sejauhmana perempuan terlibat dalam bidang ekonomi dan politik, berikut ini IDG tahun 2013-2017.

Tabel 2- 44. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017

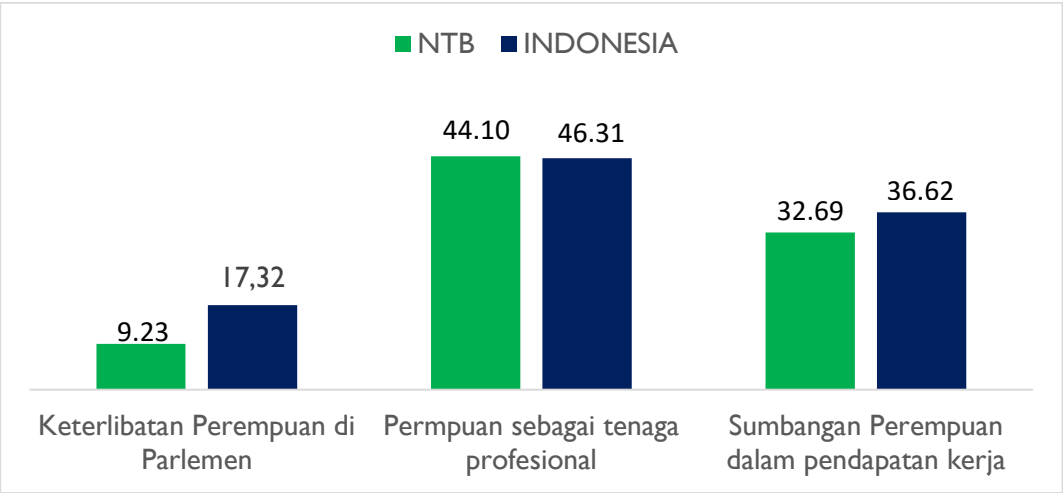
Keterangan	Tahun					Peningkatan	Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017		
NTB	58,54	57,49	58,69	60,06	59,95	1,41	2,41
Indonesia	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	1,02	1,45

Sumber: BPS Tahun 2018

Nilai capaian IDG Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 tumbuh sebesar 2,41% meningkat 1,41 poin dari 58,54 poin pada tahun 2013 menjadi 59,95 poin pada tahun 2017. Meskipun demikian, secara posisi nilai capaian IDG Provinsi NTB masih berada di bawah nilai nasional. Posisi IDG provinsi NTB adalah pada peringkat ke-4 dari 34 provinsi lain di Indonesia, IDG NTB lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Timur.

Rendahnya nilai capaian IDG ini sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing komponen pembentuknya, berikut ini kondisi komponen pembentuk IDG tahun 2015-2016.

Gambar 2- 20. Nilai Capaian Aspek Pembentuk IDG Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2017



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017, BPS

Komponen yang masih tertinggal adalah pada aspek keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada tahun 2016, persentase perempuan sebagai anggota parlemen hanya 9,38% lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 17,32%.

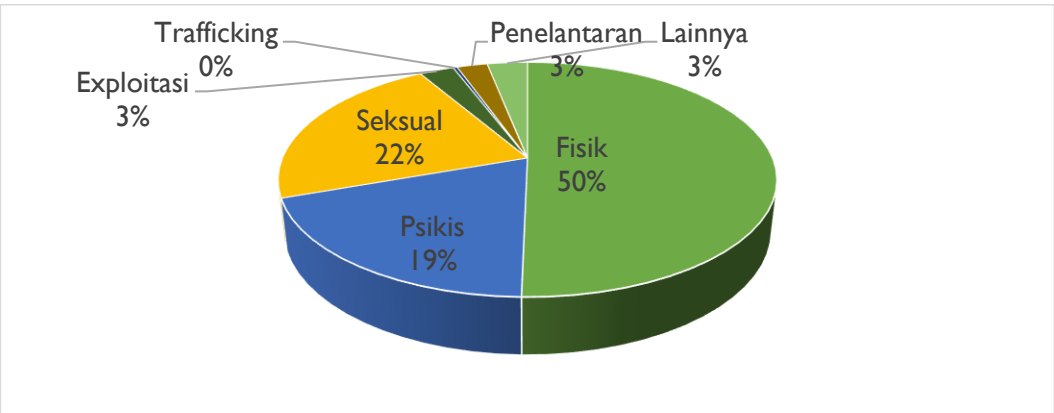
Tabel 2- 45. Jumlah Kekerasan pada laki-laki dan Perempuan dilihat dari Lokasi Tahun 2014-2015

Keterangan	2014			2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Rumah Tangga	85	482	567	72	21	93
Tempat Kerja	7	24	31	5	25	30
Lainnya	121	410	531	157	586	743
TOTAL	213	916	1129	234	632	866

Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari data di atas terlihat bahwa mayoritas kekerasan pada perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga disamping di lokasi lain seperti tempat kerja atau tempat-tempat umum lainnya.

Gambar 2- 21. Jenis Kekerasan kepada Perempuan Berdasarkan jenis Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi NTB

Mayoritas kekerasan yang diterima oleh perempuan adalah kekerasan fisik (50%) diikuti oleh kekerasan seksual (22%) dan Kekerasan psikis (19%). Hal ini harus menjadi perhatian agar perempuan dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

2.1.3.2.3 **Urusan Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Seiring dengan penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah. Oleh karena itu untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Upaya penjaminan perlindungan lahan pertanian dan pangan ini kemudian direspon dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWP adalah seluas 828.401 ha yang terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa lahan sawah seluas 227.606 Ha dan cadangan pertanian pangan seluas 600.795 Ha. Berikut ini luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi NTB.

Tabel 2- 46. Luas Tanah dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi NTB

No	Keterangan	Luas (Ha)	
		Lahan sawah	Cadangan Pangan
1	Kabupaten Lombok Barat	25.153	59.624
2	Kabupaten Lombok Tengah	51.202	43.120
3	Kabupaten Lombok Timur	45.382	39.413
4	Kabupaten Lombok Utara	7.449	41.878
5	Kabupaten Sumbawa	43.179	174.736
6	Kabupaten Sumbawa Barat	8.952	22.174
7	Kabupaten Dompu	19.194	58.693
8	Kabupaten Bima	30.784	153.038
9	Kota Bima	1.927	7.994
10	Kota Mataram	1.833	125

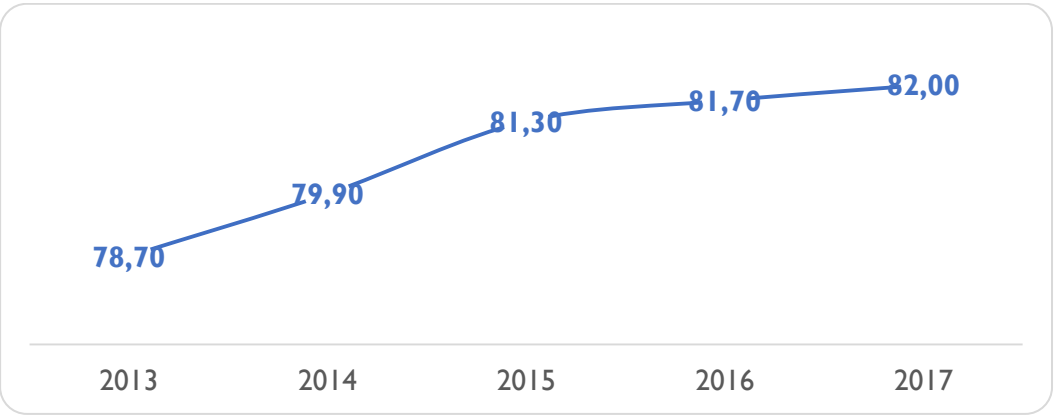
Sumber: Perda Provinsi NTB No. 1 Tahun 2013

Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan sawah dan cadangan lahan pertanian di atas kemudian ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWP.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Perkembangan capaian PPH di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2- 22. Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk NTB sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor PPH mendekati 100. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk NTB tahun 2013 sd 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 47. Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2013-2017

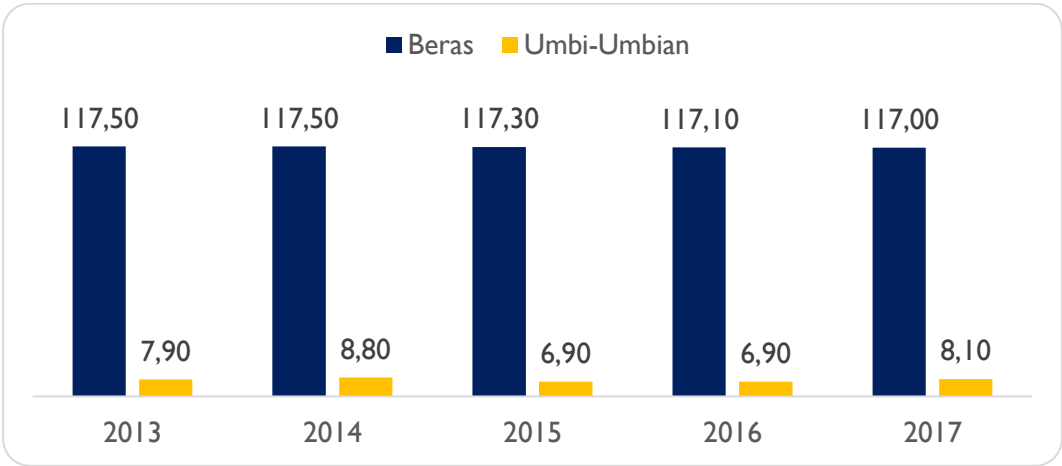
No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	275	396,0	354,7	356,3	344,2	363,2
	Beras		323,6	321,9	321,4	320,9	320,6

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)				
			2013	2014	2015	2016	2017
2	Umbi-umbian	100	21,6	24,1	19	19	22,1
3	Pangan Hewani	150	114,6	108,4	118,4	115,4	87,9
4	Minyak dan Lemak	20	15,6	18,5	21,2	18,9	21,0
5	Buah/Biji Berminyak	10	5,4	3,9	4,7	3,3	3,4
6	Kacang-kacangan	35	21,2	22,2	23	20,4	21,6
7	Gula	30	17,0	14,6	17,2	11,9	16,7
8	Sayur dan Buah	250	260,6	275,4	269	251,9	197,2
9	Lain-lain	-	-	100,3	57,4	68,1	85,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa konsumsi aktual padi-padian masih diatas konsumsi ideal 275 gr/kapita/hari, terutama konsumsi beras yang masih cukup tinggi, hal ini salah satu penyebab belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Tingginya konsumsi protein sumbangan kelompok pangan padi-padian (beras) mencapai 72,0 persen, padahal protein beras memiliki kandungan 98 persen indeks glikemik. Indeks Glikemik adalah zat yang mempercepat merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga menyebabkan masyarakat banyak menderita penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, obesitas (kegemukan). Alternatif lain sumber karbohidrat yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, berdasarkan data diatas konsumsi umbi-umbian masih jauh dibawah konsumsi ideal. Perkembangan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian penduduk NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2- 23. Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2013-2017



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu

untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB tahun 2013-2017 cukup berfluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan mencapai 3,74 persen/tahun dan 3,03 persen/tahun untuk protein. Perkembangan ketersediaan energi dan protein tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2- 48. Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Uraian	Ketersediaan Energi dan Protein					Peningkatan Pertahun (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Energi (kalori/kapita /hari)	4.745,0 0	4.380,0 0	3.991,0 0	5.011,8 3	5.310,9 7	3,74
2	Protein (gr/kap /hari)	126,46	115,84	135,17	118,07	137,52	3,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTB tahun 2013 s.d 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 49. Cadangan Pangan Provinsi NTB 2013-2017

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	167,04	156,55	156,21	164,77	137,18
2	Cadangan Pemerintah Kabupaten	87,54	84,19	70,93	592,33	145,73
3	Cadangan Pangan Masyarakat	980,99	608,51	755,41	112,32	163,00
Jumlah		1.235,57	849,25	982,55	869,42	445,91

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan, dilakukan pemantauan harga pangan ditingkat pengumpul, sebagai upaya antisipasi jika terjadi gejolak harga untuk dilakukan operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas toleransi yang ditentukan. Perkembangan harga pangan ditingkat pengumpul tahun 2013-2017 di Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 50. Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2014-2017

Tahun	Harga (Rp)						
	Beras Super/ Premium	Beras Medium	Jagung Pipilan	Kedelai Lokal	Minyak Goreng Curah	Daging Sapi	Cabe Rawit
2014	9.000	8.508	3.992	9.433	12.025	99.308	30.142
2015	9.000	8.969	4.052	8.854	11.167	106.979	32.146
2016	9.646	8.958	5.313	8.979	11.760	117.292	29.041
2017	9.309	9.173	5.200	9.551	12.500	115.000	26.250
Rata-rata	9.239	8.902	4.639	9.204	11.863	109.645	29.395
Peningkatan Pertahun (%)	1,23	2,57	10,17	0,55	1,49	5,14	-4,21

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Labuhan Haji, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Sape, Benete, Kempo dan Pelabuhan Bima.

Pemantauan arus keluar masuk komoditas strategis dilakukan terhadap 18 komoditas, yaitu: gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, kacang tanah, kacang hijau, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, sapi potong, kerbau potong, tembakau, jambu mente, rumput laut dan pakan ternak, dengan hasil seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2- 51. Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2013-2017

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
1	Beras	51	785.241	
	2013	1	96.546	Masuk : Bali
	2014	13	116.057	Keluar : Bali, Makassar, NTT, Sumba, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin
	2015	24	553.830	
	2016	-	25	
	2017	13	18.783	
2	Jagung	161	1.260.466	
	2013	3	203.204	Masuk : NTT, Bali
	2014	9	179.624	Keluar : Surabaya, Bali, Bajo, Ende, Gresik, Jakarta, Probolinggo, Kupang, Makassar, Jawa Barat, Banjarmasin, Padang, Madiun, Banyuwangi, Kediri, Cirebon, Semarang
	2015	7	348.137	
	2016	54	13.001	
	2017	88	516.500	
3	Kedelai	16.369	34.739	
	2013	2.730	21.601	Masuk : Surabaya dan Banyuwangi
	2014	3.265	4.666	Keluar :

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
	2015	5.206	6.758	Surabaya, Lab. Bajo, Banjarmasin, Makassar, Marpokot, Bali, Surabaya
	2016	2.926	230	
	2017	2.242	1.484	
4	Bawang Merah	597	133.236,00	
	2013	97	31.974	Masuk : Brebes, Surabaya, Probolinggo, banyuwangi, Malang, Mojosari, Makassar, Kudus, Bali
	2014	162	25.665	
	2015	64	37.547	Keluar : Surabaya, Bali, Banjarmasin, Bau-bau, Gorontalo, Kupang, Makassar, Marpokot, Maumere, Merauke, Reo, Labuan Bajo, Waikabuba, Ende, Bejawa, Jakarta, Sorong, Probolinggo
	2016	96	509	
	2017	178	37.541	
5	Bawang Putih	2.031	179	
	2013	591	33	Masuk : Bali, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Jakarta, Demak
	2014	614	55	
	2015	490	35	Keluar : Bajawa, NTT
	2016	222	0	
	2017	114	56	
6	Cabai Rawit	454	16.149	
	2013	135	3.124	Masuk : Sulteng, Jatim, Maluku, Jabar, NTT, Sulsel, Jateng, Sulut, Sultra, Kaltim, Gorontalo, Riau, Bali
	2014	144	2.301	
	2015	76	2.960	Keluar : Surabaya, Bali, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalteng, Sumatera Selatan, Jambi, DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jambi, Kaltim, Jateng
	2016	49	1.051	
	2017	50	6.713	
7	Daging Ayam	1036	24	
	2013	226	0	Masuk : Jatim, Bali
	2014	147	6	
	2015	23	1	Keluar : Makassar, Bali
	2016	204	0	
	2017	436	17	
8	Telur Ayam	11.283	22	
	2013	997	1	Masuk : Bali
	2014	1.894	18	
	2015	1.246	3	Keluar : NTT
	2016	3349	0	
	2017	3.797	0	
9	Sapi Potong	2	116.694	
	2013	0	43.074	Masuk : Manggarai Barat

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
	2014	0	38.906	Keluar : Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Pulau Pinang, Palangkaraya
	2015	0	18.655	
	2016	0	538	
	2017	2	15.521	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang stabil, keamanan pangan segar juga perlu dijamin agar masyarakat dapat memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman. Sertifikasi Prima 3 dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang memberikan jaminan mutu dan aman dikonsumsi. Kegiatan Sertifikasi Prima dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTB yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 321 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009.

Sertifikasi Prima 3 diberikan pada produk sayur dan buah segar yang telah lulus uji sertifikasi, sedangkan untuk Registrasi Produk Dalam untuk memastikan aman dikonsumsi dilakukan untuk komoditas beras dalam kemasan. Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 52. Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2013-2017

Tahun	Sertifikasi Prima 3 (Sertifikat)	Registrasi Produk Dalam
2013	7	-
2014	21	-
2015	8	-
2016	17	5
2017	41	3
Jumlah	94	8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan

Pendaftaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 yang menjelaskan tentang urusan pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pertanahan adalah Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan meliputi: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Kesembilan sub bidang urusan pertanahan yang secara *de jure* menjadi kewenangan pemerintah daerah, secara *de facto* penanganannya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB. Namun demikian, penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB.

Pendaftaran tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 98.836 dimana pada tahun 2015 sebanyak 51.615. Berikut ini perkembangan pendaftaran tanah di Provinsi NTB tahun 2013-2016.

Tabel 2- 53. Jumlah Pendaftaran Tanah Menurut Jenis di provinsi NTB Tahun 2013-2016

No	Jenis	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Hak Milik	39.802	38.684	48.340	94.975
2	HGB	1.475	560	1.066	2.802
3	HGU	5	4	0	0
4	Hak Pakai	390	232	455	383
5	Pemisahan	4.346	4.105	1.576	552
6	Penggabungan	130	234	178	124
TOTAL		46.148	43.819	51.615	98.836

Sumber: Provinsi NTB Dalam Angka

Tahun 2016 adalah tahun dengan penerbitan pendaftaran tanah terbanyak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, tumbuh 114% dari tahun 2013. Pada kurun waktu tersebut jumlah penerbitan paling banyak untuk pendaftaran tanah hak milik, diikuti oleh pemisahan dan HGB

2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Daya dukung pangan dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang dapat menghasilkan pangan. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan pangan di Provinsi NTB.

Tabel 2- 54. Jasa Ekosistem Pangan Provinsi NTB

Daerah	Jasa Ekosistem Pangan		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Provinsi NTB	5%	29%	67%

Sumber: Bappeda NTB

Mayoritas daerah memiliki nilai ekosistem pangan tinggi yaitu sebesar 67%, diikuti oleh daerah dengan nilai sedang 29% dan rendah sebesar 5%. Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung pangan pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan pangan pada provinsi NTB dibandingkan dengan tingkat konsumsi.

Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2- 55. Status Penyediaan Pangan Provinsi NTB

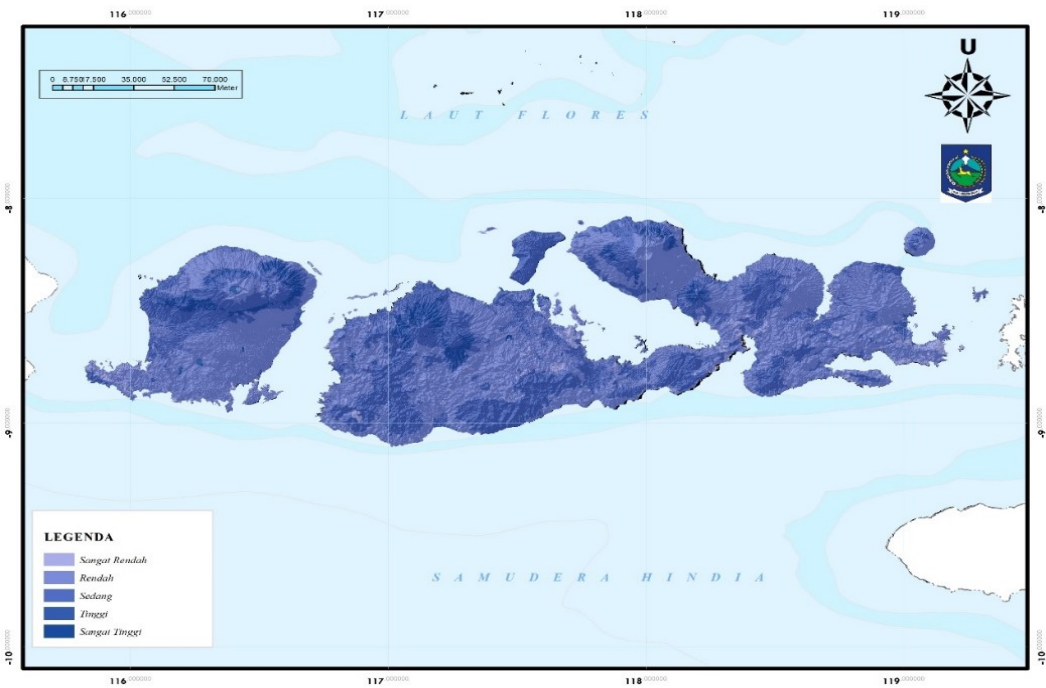
Ketersediaan (Kkal)	Kebutuhan (Kkal)	Selisih (Kkal)	Status Ketersediaan
1.729.592.923.750	7.685.171.289.323	5.955.578.365.573	Belum Terlampaui

Sumber: Bappeda NTB

Dari tabel di atas terlihat masih ada selisih yang cukup jauh antara kebutuhan pangan dan ketersediaan (dalam Kkal). Total Ketersediaan pangan di NTB sebesar 1.729.592.923.750 Kkal sedangkan kebutuhannya 7.865.171.289.323 Kkal sehingga masih berselisih 5.955.578.365.573 Kkal.

Daya ekosistem air di Provinsi NTB mayoritas masuk dalam kategori rendah (59%), diikuti oleh kategori sedang dengan 37% dan tinggi sebesar 3%. Berikut ini pola sebarannya.

Gambar 2- 24. Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB



Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2- 56. Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m³)	Kebutuhan (m³)			Selisih (m³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda NTB

2.1.3.2.6 **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penataan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Provinsi NTB sampai dengan Desember 2017, dari 3.757.949 penduduk wajib KTP telah dilakukan perekaman sebanyak 3.345.513 orang atau 89,02 persen, dengan KTP yang telah tercetak sebanyak 3.140.376 orang atau 83,57 persen. Rincian rekapitulasi administrasi kependudukan per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 57. Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2017

No	Kabupaten /Kota	Wajib KTP	Rekam	%	Cetak	%
1	Kota Mataram	298.997	298.562	99,85	294.412	98,47
2	Lombok Barat	518.826	436.125	84,06	447.020	86,16
3	Lombok Utara	164.099	163.278	99,50	178.993	109,08
4	Lombok Tengah	752.644	639.703	84,99	574.193	76,29
5	Lombok Timur	925.143	800.001	86,47	667.437	72,14
6	Sumbawa Barat	93.416	91.796	98,27	87.920	94,12
7	Sumbawa	372.037	313.036	84,14	292.240	78,55
8	Dompu	150.840	146.840	97,35	139.376	92,40
9	Bima	380.168	357.469	94,03	362.350	95,31
10	Kota Bima	101.779	98.703	96,98	96.435	94,75
Total		3.757.949	3.345.513	89,02	3.140.376	83,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2013-2017

2.1.3.2.7 **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan yang signifikan. Tahun 2013 jumlah Penduduk Miskin NTB sebanyak 815,50 ribu jiwa atau 17,25 persen, hingga pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin NTB menjadi 748,12 ribu jiwa atau 15,05 persen.

Tabel 2- 58. Angka Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kemiskinan (%)	17,05	16,54	16,02	15,05	14,63
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	816,62	823,89	804,45	748,12	735,62

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

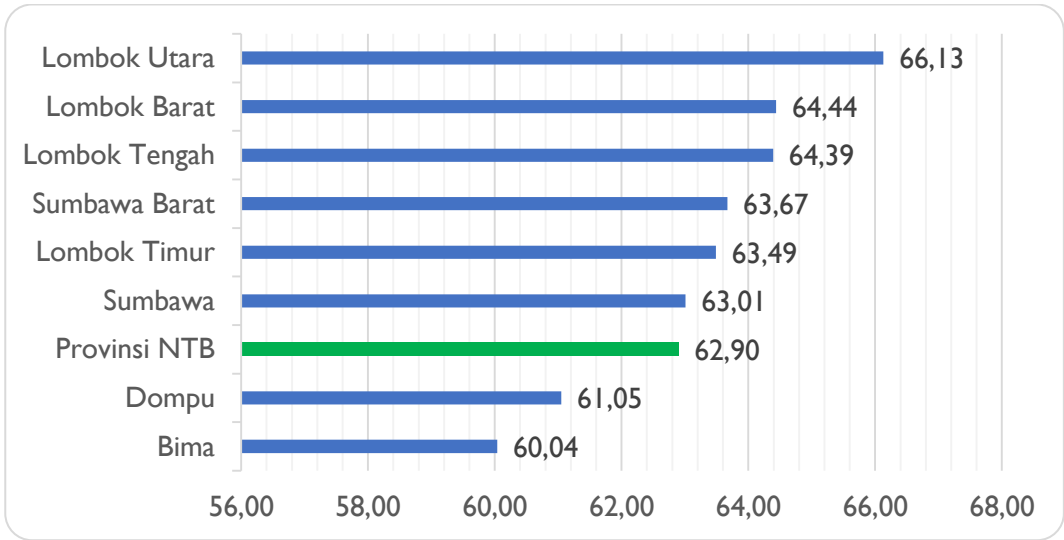
Capaian kinerja terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan awal 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

- BUMDesa, sampai dengan awal tahun 2018 telah terbentuk sebanyak 577 BUMDes
- Lembaga Adat, Jumlah Lembaga Adat yang terbentuk hingga Desember 2017 baru mencapai 100 Lembaga Adat, dengan intervensi Dana Desa diharapkan akan banyak terbentuk Lembaga Adat lainnya di masa yang akan datang.

- Desa Swadaya Lanjut, Jumlah Desa Swadaya Lanjut hingga Desember 2017 sebanyak 269 Desa.

Salah satu indikator untuk mengukur urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah dengan indikator indeks pembangunan desa (IPD). Berikut ini kondisi IPD di Provinsi NTB pada tahun 2014.

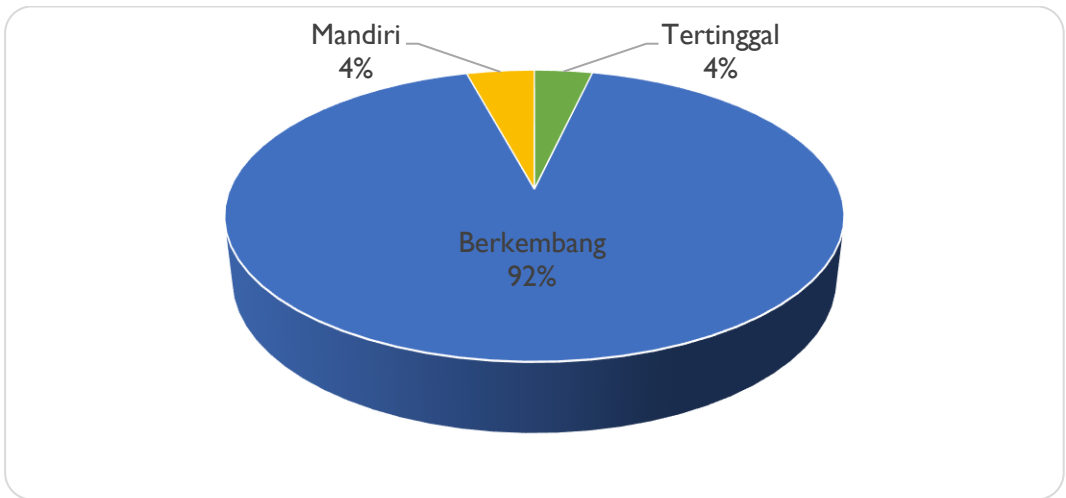
Gambar 2- 25. Indeks Pembangunan Desa di Provinsi NTB Tahun 2014



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014, Bappenas-BPS

Pada tahun 2014, IPD tertinggi di Provinsi NTB ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 66,13 lebih tinggi dari nilai IPD provinsi yaitu sebesar 62,90. Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu memiliki IPD terkecil dengan 60,04 dan 61,05 yang masih berada di bawah nilai capaian provinsi.

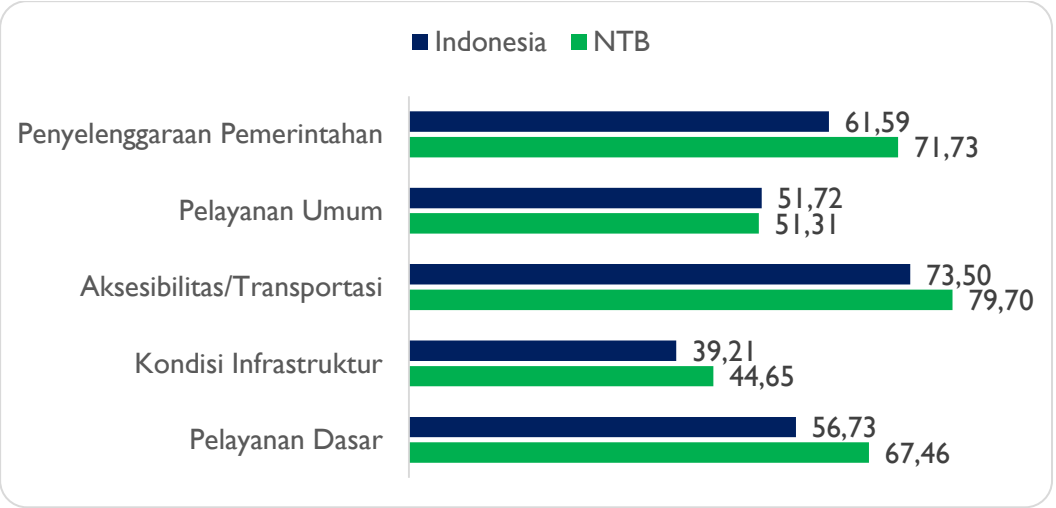
Gambar 2- 26 Klasifikasi Desa di Provinsi NTB Tahun 2014



Sumber: Buku IPD 2014, Bappenas-BPS

Pada tahun 2014 dari total 995 desa yang ada, mayoritas (92,16%) desa masih masuk dalam kategori berkembang, desa dengan kategori mandiri sebesar 4,22% dan masih ada 3,62% desa tertinggal. Desa tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Gambar 2- 27 Nilai Dimensi IPD di Provinsi NTB Tahun 2014



Sumber: Buku IPD 2014, Bappenas-BPS

IPD diukur melalui lima dimensi yaitu aspek pelayanan dasar, aspek infrastruktur, aspek aksesibilitas, aspek pelayanan umum dan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dari lima dimensi tersebut, dimensi yang paling rendah di Provinsi NTB adalah dimensi infrastruktur dengan 44,65 meskipun sudah berada di atas capaian Indonesia. Empat dari lima dimensi IPD Provinsi NTB sudah melampaui nilai nasional, hanya satu dimensi yang masih berada di bawah nilai nasional yaitu dimensi pelayanan umum, meskipun secara disparitas sangat kecil.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Tabel 2-2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	4.630.302	4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578
Laju Petumbuhan Penduduk	0,93	3,10	1,29	1,25	1,21

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Secara jumlah, penduduk Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan namun secara laju terus menunjukkan pelambatan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk NTB tercatat sebesar 4.630.302 jiwa kemudian terus meningkat secara persisten menjadi 4.955.578 jiwa pada tahun 2017. Sementara itu LPP terus menurun dari 3,10% pada tahun 2014 menjadi 1,21% pada tahun 2017.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan optimalisasi program keluarga berencana dan menekan rata-rata usia kawin pertama perempuan. Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total dan Prosentasi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan penduduk.

Tabel 2-3 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Provinsi NTB Tahun 2013-2017

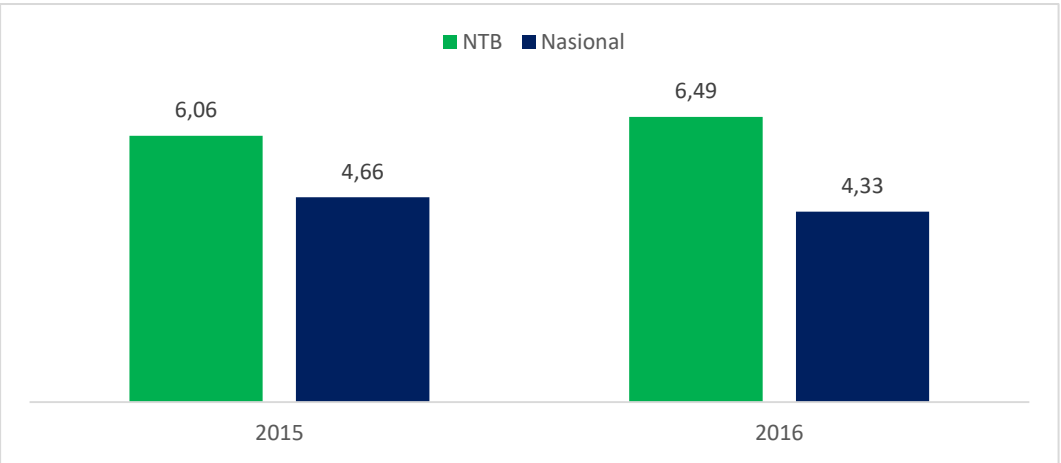
No	Keterangan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	19,87	19,83	19,98	20,24	20,15
2	Lombok Tengah	19,34	19,14	19,83	19,57	19,59
3	Lombok Timur	19,29	19,12	19,80	19,14	19,41
4	Sumbawa	20,69	20,89	21,06	21,21	21,35
5	Dompu	20,77	20,72	20,70	20,75	20,83
6	Bima	21,13	21,28	21,13	21,23	21,11
7	Sumbawa Barat	21,08	20,90	20,92	21,39	22,02
8	Lombok Utara	19,23	19,81	20,26	20,25	20,27
9	Mataram	20,78	20,96	20,97	21,09	21,28
10	Kota Bima	21,11	21,69	21,07	21,41	22,01
11	NTB	19,94	19,94	20,32	20,15	20,27

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pada tahun 2013-2017 terjadi peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama di Provinsi NTB yaitu dari 19,94 tahun menjadi 20,27 tahun. Pada tahun 2017, ada dua daerah dengan rata-rata perkawinan pertama di bawah 20 tahun yaitu Kabupaten Lombok Tengah (19,59 tahun) dan Kabupaten Lombok Timur (19,41 tahun).

Definisi unmet need menurut DHS (*Demographic Health Survey*) adalah proporsi wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

Gambar 2- 28. Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2015-2016



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2015 dan 2016 nilai capaian NTB sudah lebih baik dibandingkan dengan nasional dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,43%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu: (1) akses ke layanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan transportasi; (2) Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi, pemahaman efek samping yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kontrasepsi dan hubungan antara wanita dan provider; (3) Biaya dan (4) Hambatan sosial, budaya dan norma agama.

2.1.3.2.9 **Urusan Perhubungan**

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 2- 59. Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2017

No.	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	147	2.850
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	55	1.196
3	AKDP Dompu		1.391
4	AKDP Bima	44	2.970

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB tahun 2017

Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2017, angkutan darat memiliki 9 rute perintis yang dilayani oleh BUS DAMRI dan angkutan laut melayani pada 3 rute perintis. Dua kapal laut perintis berpangkalan di Bima untuk membuka konektivitas wilayah Indonesia Tengah. Sementara, satu kapal perintis berpangkalan di Surabaya yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di rute Surabaya-Bima.

Selain membuka konektivitas antar wilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 60. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Meninggal Dunia (Jiwa)
1	2013	2.958	482
2	2014	2.693	531
3	2015	2.601	519
4	2016	2.820	536
5	2017	1.463	473

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kejadian kecelakaan menurun dari 2.958 kejadian pada tahun 2013 menjadi 1.463 kejadian pada tahun 2017. Korban

yang meninggal dunia cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2013 terdapat 482 korban meninggal dunia dan meningkat pada 3 tahun setelahnya tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi 473 orang. Salah satu eksese negatif dari konektivitas transportasi adalah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi, untuk itu dibuat sebuah indeks fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dibanding dengan 1/10.000 jumlah seluruh kendaraan yang ada.

Tabel 2- 61. Indeks Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Indeks Fatalitas
1	2013	1.057.244	482	4,56
2	2014	1.168.159	531	4,55
3	2015	1.266.198	519	4,10
4	2016	1.360.759	536	3,94
5	2017	1.448.996	473	3,26

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

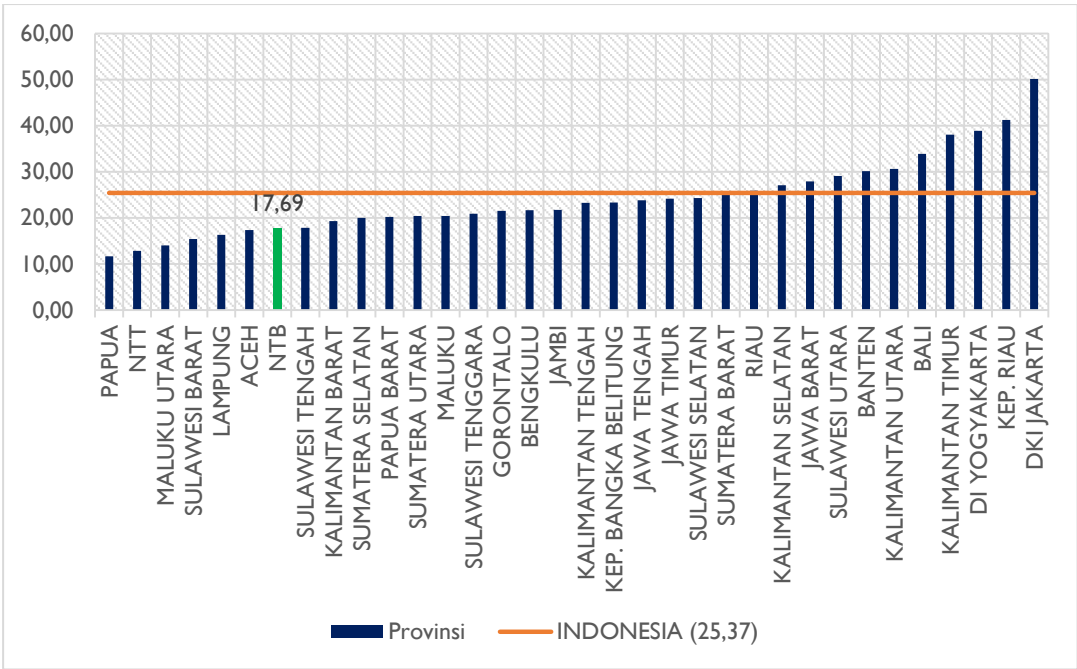
2.1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://ntbprov.go.id/>.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemprov diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Proporsi Individu yang menggunakan internet Provinsi NTB pada tahun 2016 tercatat sebesar 17,69% angka ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai capaian nasional sebesar 25,37%.

Gambar 2- 29. Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi Tahun 2016



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2016, proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi NTB sebesar 17,69% menempati peringkat ke-7 terendah dari 34 provinsi lain di Indonesia dan masih berada di bawah nilai rata-rata nasional. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengembangan masyarakat melek internet yang sehat.

Salah satu program yang dilaksanakan di Provinsi NTB dalam rangka mempercepat penyebarluasan informasi adalah melalui pengembangan kampung media. Kampung media merupakan program untuk penyebarluasan informasi yang berbasis komunitas yang seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Metode yang dimanfaatkan adalah dengan menggunakan kemampuan jurnalisme warga, yang diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media. Warga Kampung Media diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Melalui kampung media masyarakat dapat ikut secara langsung berpartisipasi dalam penyebaran informasi publik. Sampai tahun 2014 komunitas kampung media mencapai 150 komunitas yang tersebar di 10 kabupaten/kota se NTB dengan jumlah 1.235 anggota.

Komitmen jajaran Kominfo terhadap penyediaan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil terus diwujudkan, dan awal tahun 2018 telah dibangun fasilitas komunikasi di salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat melalui program Telkomsel Bakti. Program Telkomsel Bakti membangun fasilitas komunikasi di Desa Sebeok dan Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang dengan menggunakan GSM 900, yang coverage atau jangkauannya meliputi empat desa di Kecamatan Orong Telu, yakni Desa Senawang, Desa Sebeok, Desa Kelawis dan Desa Mungkin.

2.1.3.2.11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengukur kinerjanya melalui tiga indikator kinerja pokok, yakni:

- Pembentukan 1.000 koperasi berkualitas, sampai dengan tahun 2017 terbentuk 758 koperasi berkualitas.
- Penumbuhan 5.000 Wira Usaha Baru, hingga tahun 2017 telah tercipta sebanyak 4.427 Wira Usaha Baru
- Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari’ah, sampai dengan tahun 2017 KSP Pola syari’ah yang telah terbentuk sebanyak 260 unit.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Jumlah KUMKM yang sudah difasilitasi sejak Januari sampai Desember 2017 sebanyak 624 UMKM dan 31 Koperasi serta 9 kampung UMKM digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 147 orang.

Pada Tahun 2017 telah diinisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan telah mendapat respon positif dari Bapak Gubernur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi dan UKM

Tabel 2- 62. Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	3.728	3.851	3.966	4.077	4.187
2	Jumlah Koperasi Aktif	3.225	2.627	2.283	2.412	2.472
3	Persentase Koperasi Aktif	86,51	68,22	57,56	59,16	59,04

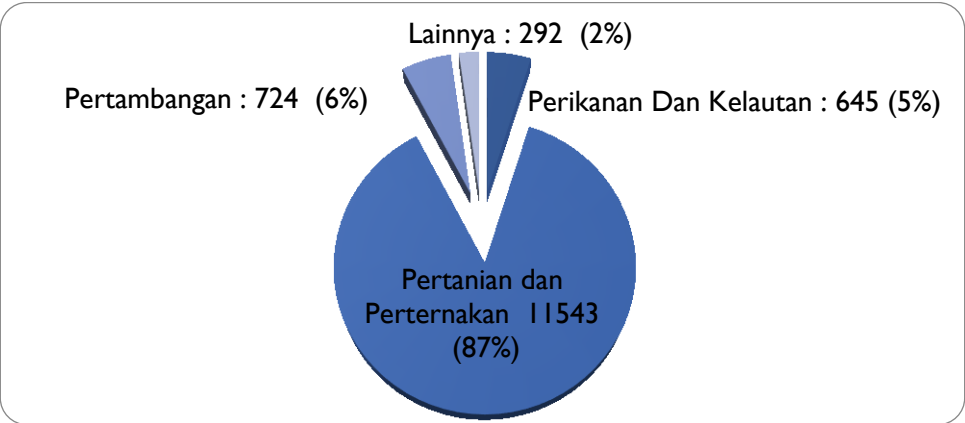
Sumber: Statistik Daerah Provinsi NTB (diolah)

Meskipun secara jumlah meningkat, namun persentase koperasi aktif terus menunjukkan penurunan, artinya makin banyak koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2012, persentase koperasi aktif sebesar 86,51% kemudian menurun hingga mencapai 59,04% pada tahun 2016.

2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Provinsi NTB dalam rentang waktu 2013-2017 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pemerintah sebanyak 13.242 izin yang didominasi perizinan di sektor pertanian dan peternakan sebesar 87% sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2- 30. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan selama periode tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan jumlah izin dan non izin berdasarkan bidang perizinan selama periode tahun 2013-2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 63. Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017

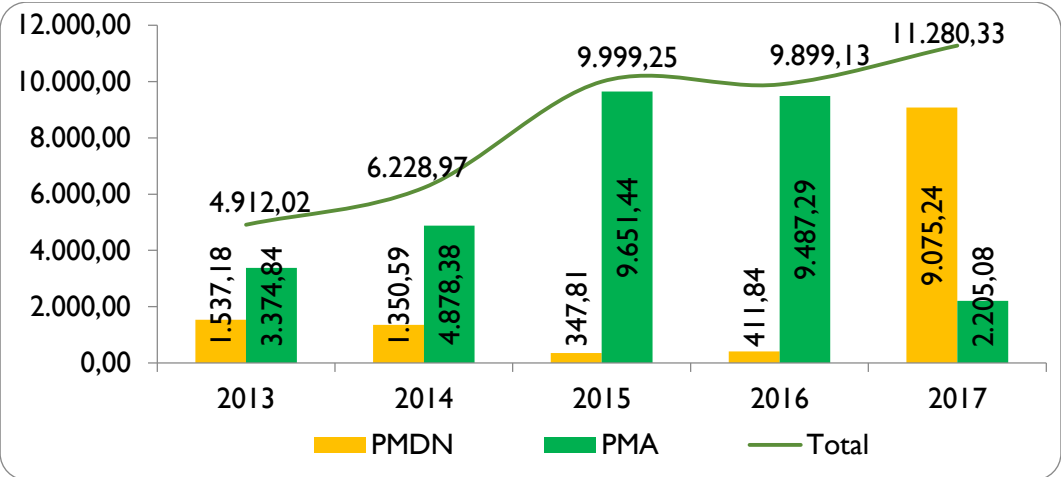
No	Bidang Perizinan	Izin dan Non Izin					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penanaman Modal	13	2	7	6	10	38
2	Perikanan Dan Kelautan	6	4	27	208	400	645
3	Pertanian dan Perternakan	395	1.437	3.426	3.449	2.836	11.543
4	Koperasi dan UMKM	0	1	6	7	2	16
5	Pekerjaan Umum	0	0	1	2	1	4
6	Kehutanan	5	4	24	64	19	116
7	Lingkungan Hidup dan Penelitian	2	2	10	13	25	52
8	Perindustrian	0	0	0	1	0	1
9	Perdagangan	0	0	0	1	2	3
10	Perkebunan	0	0	0	5	2	7
11	Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	0	0	1	11	26	38
12	Pertambangan	5	0	197	209	313	724
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	2	8	12	22
14	Kesehatan	0	0	7	7	14	28
15	Pariwisata	0	0	3	0	2	5
Jumlah		426	1.450	3.711	3.991	3.664	13.242

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta, tapi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pelayanan investasi yang tercermin pada kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses perizinan investasi dilakukan. Pelayanan investasi yang diberikan oleh

pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai investasi selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2- 31. Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 (Rp.Milyar)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan realisasi investasi berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 64. Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)		Total (RUPIAH)
	PMDN	PMA	
2013	1.537.177.711.419	3.374.844.350.000	4.912.022.061.419
2014	1.350.586.547.701	4.878.381.520.000	6.228.968.067.701
2015	347.805.000.000	9.651.444.000.000	9.999.249.000.000
2016	411.835.602.836	9.487.292.016.600	9.899.127.619.436
2017	9.075.242.457.981	2.205.084.068.287	11.280.326.526.268
Jumlah	12.722.647.319.937	29.597.045.954.887	42.319.693.274.824

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Realisasi investasi di Provinsi NTB Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2013 realisasi investasi sebesar Rp. 4,91 Trilyun menjadi Rp. 6,23 Trilyun di Tahun 2014, dan terus meningkat sampai Tahun 2017 mencapai Rp. 11,28 Trilyun. Laju investasi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi, namun di Tahun 2016 laju investasi tumbuh sebesar 1 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh perekonomian global yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016, tapi pada tahun 2017 laju investasi kembali mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 13,95 persen.

Terdapat sepuluh sektor yang cukup banyak diminati oleh Investor untuk berinvestasi di Provinsi NTB. Realisasi investasi menurut sektor berdasarkan jenis penanaman modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 65. Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Sektor	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pariwisata	136.137,14	347.186,42	149.700,55	-	284.646,06	917.670,18
2	Perhubungan/ Transportasi	1.331.073,52	326.902,30	35.000,00	36.000,00	-	1.728.975,82
3	Perdagangan	-	-	-	63.611,06	161.794,53	225.405,58
4	Pertanian	-	30.303,31	17.956,33	-	-	48.259,64
5	Perkebunan	-	172.503,14	103.852,91	177.181,61	-	453.537,67
6	Kehutanan	-	4.000,00	11.000,00	-	-	15.000,00
7	Perikanan	25.397,45	12.519,50	2.743,82	71.632,69	-	112.293,47
8	Pertambangan Energi Kelistrikan	22.521,70	72.051,90	3.017,69	50.590,01	8.258.850,02	8.407.031,32
9	Industri	1.663,38	322.966,84	6.356,41	11.213,65	125.292,50	467.492,77
10	Jasa Lainnya	20.384,52	62.153,13	18.177,29	1.606,58	244.659,34	346.980,87
Jumlah		1.537.177,71	1.350.586,55	347.805,00	411.835,60	9.075.242,46	12.722.647,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas, realisasi investasi PMDN menurut sektor tahun 2013-2017 mencapai Rp.12,7 Trilyun dengan investasi tertinggi di sektor pertambangan, energy & kelistrikan sebesar Rp. 8,4 Trilyun atau 66,08%, kemudian diikuti sektor perhubungan/transportasi mencapai Rp.1,73 Trilyun atau 13,59 persen, disusul sektor pariwisata sebesar Rp. 917,67 Milyar atau 7,21 persen, diikuti sektor industri sebesar Rp. 467,49 Milyar atau 3,67 persen dan investasi terendah berada pada sektor kehutanan sebesar Rp.15 milyar atau 0,12 persen.

Realisasi investasi PMA menurut sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 mencapai Rp. 29,59 Trilyun, dengan realisasi investasi terbesar di sektor pertambangan, energy & kelistrikan sebesar Rp. 16,58 Trilyun atau 56,05%, diikuti sektor pariwisata mencapai Rp.7,49 Trilyun atau 25,34 persen, disusul sektor jasa lainnya mencapai Rp. 4,87 Trilyun atau 16,44 persen dan terendah sektor pertanian yang hanya sebesar Rp.3,19 atau 0,01 persen, sedangkan sektor perhubungan/transportasi dan kehutanan tidak mencatatkan investasi pada periode tahun 2013-2017. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah, Provinsi NTB sebagai salah satu daerah agraris, ditengah berbagai tantangan pembangunan di sektor pertanian, perlu meningkatkan investasi disektor pertanian terutama industry pengolahan hasil-hasil pertanian. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 66. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Sektor	Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pariwisata	146.530,83	1.656.532,4 6	2.152.007,8 8	2.109.728,5 0	1.434.680,4 0	7.499.480,07
2	Perhubunga n/ Transportasi	-	-	-	-	-	0
3	Perdaganga n	2.858,00	18.568,77	20.481,46	9.049,86	37.916,89	88.874,99

4	Pertanian	-	-	-	3.188,01	-	3.188,01
5	Perkebunan	55.909,10	9.456,10	27.600,00	-	-	92.965,20
6	Kehutanan	-	-	-	-	-	0
7	Perikanan	9.552,04	25.000,00	14.567,23	173.244,36	63.017,19	285.380,83
8	Pertambang an Energi Kelistrikan	3.119.006,85	1.692.304,2 5	5.048.426,6 4	6.582.191,0 4	146.858,02	16.588.786,8 1
9	Industri	6.300,00	44.925,00	103.635,73	3.537,84	12.856,68	171.255,26
10	Jasa Lainnya	34.687,53	1.431.594,9 4	2.284.725,0 3	606.352,40	509.754,89	4.867.114,79
Jumlah		3.374.844,3 5	4.878.381, 52	9.651.444, 00	9.487.292, 02	2.205.084, 07	29.597.045, 95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMDN di Provinsi NTB periode Tahun 2013-2017 tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.6,96 Trilyun atau 54,75 persen, hal ini karena perubahan status investasi perusahaan tambang dari PMA menjadi PMDN sejak tahun 2017. Lokasi investasi terbesar berikutnya adalah Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp.2,36 Trilyun atau 18,54 persen, diikuti Kota Mataram sebesar Rp.1,10 Trilyun atau 8,70 persen dan terendah di Kabupaten Bima sebesar Rp.31,95 Milyar atau 0,25 persen. Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 67. Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab./Kota Th.2013 – 2017

No	Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	414.222,15	292.714,10	927,08	39.348,82	359.252,99	1.106.465,14
2	Lombok Utara	48.493,59	80.829,71	9.097,44	436,06	5.600,00	144.456,81
3	Lombok Barat	60.820,00	302.621,77	59.285,38	97.201,94	1.839.250,7 1	2.359.179,81
4	Lombok Tengah	276.148,10	154.559,57	151.830,0 3	111,77	3.991,20	586.640,67
5	Lombok Timur	207.111,08	6.478,10	-	1.342,00	798,03	215.729,21
6	Sumbawa Barat	207.111,08	-	1.498,42	66.592,91	6.688.619,5 6	6.963.821,96
7	Sumbawa	22.721,40	46.166,41	17.956,33	24.580,71	177.729,96	289.154,80
8	Dompu	138.074,05	465.953,25	105.964,9 1	177.181,6 1	-	887.173,83
9	Bima	24.402,21	1.263,64	1.245,40	5.039,79	-	31.951,03
10	Kota Bima	138.074,05	-	-	-	-	138.074,05
Jumlah		1.537.177, 71	1.350.586, 55	347.805, 00	411.835, 60	9.075.242, 46	12.722.647, 32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Sedangkan Realisasi Investasi PMA periode Tahun 2013-2017 terbesar juga berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.16,92 Trilyun atau mencapai 57,17 persen dari total investasi sebesar Rp.29,59 Trilyun, hal ini dikarenakan investasi sampai Tahun 2016 di Perusahaan Tambang Batu Hijau masih di lakukan

oleh PT. Newmont. Realisasi PMA terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Lombok Barat dengan nilai sebesar Rp.3,93 Trilyun atau 13,28 persen, disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp.3,84 Trilyun atau 12,99 persen. Investasi PMA terendah pada periode tahun 2013-2017 berada di Kota Bima yang hanya sebesar Rp.3,9 Juta. Perkembangan realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 68. Realisasi Investasi PMA Menurut Kab./Kota Tahun 2013 - 2017

No	Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi PMA (Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	58.159,00	411.619,75	106.207,15	495.188,14	383.881,48	1.455.055,51
2	Lombok Utara	82.616,40	741.006,10	1.583.893,76	813.970,82	622.281,09	3.843.768,17
3	Lombok Barat	79.462,80	967.929,56	1.602.899,67	555.104,73	723.950,69	3.929.347,45
4	Lombok Tengah	8.308,20	382.437,68	821.022,36	708.216,98	224.031,21	2.144.016,44
5	Lombok Timur	-	61,39	493.793,20	204.126,95	167.600,43	865.581,96
6	Sumbawa Barat	3.119.006,85	2.211.571,93	4.939.815,40	6.626.090,75	24.003,99	16.920.488,92
7	Sumbawa	27.291,10	158.568,17	3.878,39	9.748,21	49.386,98	248.872,85
8	Dompu	-	5.186,94	96.406,83	4.966,72	3.625,99	110.186,47
9	Bima	-	-	3.527,24	69.878,72	6.318,23	79.724,19
10	Kota Bima	-	-	-	-	3,99	3,99
Jumlah		3.374.844,35	4.878.381,52	9.651.444,00	9.487.292,02	2.205.084,07	29.597.045,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Dalam rangka memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah melakukan pelayanan sesuai dengan standar perizinan. Perkembangan jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya Tahun 2013-2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 69. Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	3	3	3	3
2	Izin Usaha Penanaman Modal	7	7	6	6	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	3	3	3	3
4	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	7	7	6	6	3
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3	3	5	5	3
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	7	7	5	5	3
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	10	10	7	7	3

8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	7	7	6	6	3

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan laju investasi adalah:

- a. Memperbaiki secara terus menerus sistem layanan perijinan serta mempermudah proses perijinan;
- b. Mengirim nota pengingat kepada perusahaan-perusahaan tentang kewajiban LKPM dan menjemput bola bagi perusahaan yang belum menyampaikan LKPM;
- c. Sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan langsung di tempat/lokasi;

Guna meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui : Perijinan yang tidak dipungut biaya; mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi; sinkroisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP; dan memfasilitasi perusahaan yang bermasalah di lokasi kegiatan melalui Satgas Penanaman Modal.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat. Nilai IKM tahun 2015 sebesar 79,14, meningkat di tahun 2016 menjadi 79,64 dan mencapai 80,98 ditahun 2017 yang seluruhnya masuk dengan kriteria BAIK dengan rentang nilai 62,51-81,25.

2.1.3.2.13 Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi NTB tahun 2013-2017 melalui pelaksanaan program prioritas yaitu: program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pendewasaan usia perkawinan, program peningkatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, dan program peningkatan kepemimpinan, kepramukaan dan peranserta kepemudaan. Kinerja program prioritas tersebut untuk diukur dengan indikator cakupan pembinaan atlet olahraga yang berprestasi, penyediaan sarpras olahraga yang memadai, cakupan kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penumbuhan kewirausahaan, cakupan penyuluhan bahaya narkoba dan PUP dan cakupan pemuda/pelajar yang berprestasi.

Tabel 2- 70. Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
1.	2013	Nas	Atletik	3	3	1	7	POPNAS Jakarta
			Pencak	1	0	0	1	POPNAS Jakarta
			Silat					
			Taekwondo	0	0	1	1	POPNAS Jakarta

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Karate	0	0	2	2	POPNAS Jakarta
			Atletik	2	0	6	8	Kejurnas atletik antar PPLP di Semarang.
			Pencak silat	2	0	2	4	Kejurnas pencak silat antar PPLP di Maluku
			Taekwondo	0	1	0	1	Kejurnas Taekwondo antar PPLP di Padang
			Voly pantai	1	0	0	1	Kejurnas Voly pantai antar PPLP di Solo
			Atletik	3	0	3	6	Kejurnas atletik antar PPLM di Surabaya
			Atletik	1	1	1	3	POMNAS di Yogyakarta
			Pencak Silat	1	0	0	1	POMNAS di Yogyakarta
			Voly pantai	1	1	0	2	POMNAS di Yogyakarta
		Int'l	Atletik	1	2	2	5	ASEAN School Games di Hanoi-Vietnam
			Atletik	0	0	1	1	International under Two a twenty Vietnam
			Pencak silat	1	0	0	1	ASEAN School Games di Hanoi
		Jumlah 2013		17	8	19	44	
2.	2014	Nas	Atletik	11	5	6	22	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Manado dan Kejurnas PPLM di Jakarta sertaKejuaraan PON remaja di Jatim
			Bola Voly Indoor Putri		1	1	2	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Mataram dan Pekan Olahraga Wilayah IV di Kupang NTT
			Bola Voly Indoor Putri			2	2	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Mataram dan Pekan pelajar Olahraga Wilayah IV di Kupang NTT
			Pencak silat	3	3	4	10	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Semarang, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah IV di kupang NTT dan PON remaja di Surabaya Jatim
			Taekwondo		1	1	2	Kejuaraan Nasional antar PPLP di kendari
			Menembak	1		1	2	Kejuaraan PON remaja di Surabaya Jatim
			Tenis lapangan Putri			1	1	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah IV di kupang NTT

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Bola Basket Putra		1		1	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah IV di Kupang NTT
		Jumlah		15	11	16	41	
		Int'l	Voly Inddor Putri	1			1	Ikut Partisipasi pada ASEAN SCHOOL GAMES memperkuat team Indonesia dengan mengirimkan 1 orang atlet PPLP
		Jumlah		1			1	
3.	2015	Nas	Ateltik	18	7	9	34	Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Aceh Tahun 2015; Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015; Kejurnas Atletik Cabang Olah Raga Atletik di Jakarta Tahun 2015;Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Provinsi AcehThn 2015
			Voli Pantai	1	-	-	1	Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015
			Pencak silat	5	-	2	7	Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015; Kejurnas Cabor Pencak SilatDi JakartaTahun 2015
		Jumlah		24	7	11	42	
4.	2016	Nas	Ateltik	1	1	2	4	Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Jakarta Tahun 2016
			Pencak silat	1	-	1	2	Kejurnas PPLP Cabor Pencak Silat Manado, Sulawesi Utara 2016
			Taekwondo	-	1	1	2	Kejurnas PPLP Cabor Taekwondo Di Palu, Sulteng Tahun 2016
		Jumlah		2	2	4	8	
5.	2017	Nas	Atletik	6	7	2	15	POPNAS XIV SEMARANG;
			Pencak silat	1	1	0	2	PEPARPENAS VII SOLO;
			Taekwondo	0	0	2	2	Kejurnas PPLP di Papua
			Senam	0	0	0	0	
			Tarung Derajat	1	0	3	4	
			Karate	0	1	0	1	
			Catur	0	1	0	1	
			Boccia	0	1	1	2	

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Bulu Tangkis	0	0	1	1	
			Pencak Silat	3	1	2	6	Kejurnas PPLP di NTB
			Taekwondo	0	0	2	2	Kejurnas PPLP di Manado
			Voli Pasir	0	0	1	1	Kejurnas PPLP di Makasar
		Jumlah		11	15	14	40	
	Int'l	Atletik		0	3	0	3	ASEAN SCHOOL di Singapura
		Jumlah		0	3	0	3	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTB, 2013-2017

2.1.3.2.14 Urusan Statistik

Pelaksanaan penyelenggaraan bidang statistik yang merupakan salah satu bidang yang ada di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB didasarkan pada regulasi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTB 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;

Sejak tahun 2017 Bidang Statistik sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pada Januari 2017, Bidang Statistik melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam hal penguatan data statistik sektoral di tiga seksi, yaitu seksi Ekonomi, Sosial, dan Sumber Alam (SDA).

Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan selama tiga hari di Kantor Balai ITE yang diikuti oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan 45 Perangkat Daerah. Dalam kegiatan tersebut, BPS menjadi narasumber;

2. Melaksanakan Forum Data dengan 45 Perangkat Daerah dalam penguatan data sektoral NTB Dalam Angka;
3. Melakukan *Momerandum of Understanding* (MoU) dengan Bappeda Provinsi NTB dan BPS Provinsi NTB untuk penguatan data sektoral NTB Satu Data;
4. Terlibat secara rutin pada acara *Press Release* data yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi NTB;
5. Penyusunan sembilan buku yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tiga buku Statistik Ekonomi, tiga buku Statistik Sosial, dan tiga buku Statistik SDA dan Infrastruktur. Adapun buku-buku yang dibuat adalah “Data Statistik Potensi Sektor Pertanian di Provinsi NTB”, “Data Statistik Potensi Sektor Desa di Provinsi NTB”, dan “Data Statistik Potensi Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi NTB”. Sementara buku terkait Statistik Sosial berjudul “Data Statistik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi NTB”, “Data Statistik Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan”, dan “Data Statistik Lembaga Pendidikan PAUD NI-HI di Provinsi NTB”. Buku terkait SDA dan Infrastruktur berjudul “Data Statistik Potensi Sumber Daya Alam di Provinsi NTB”, “Data Statistik Areal Hutan Terlindungi dan Dikonservasi di Provinsi NTB”, dan “Data Statistik Infrastruktur Wilayah di Provinsi NTB”.

2.1.3.2.15 Urusan Persandian

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, istilah persandian merupakan semua bentuk kegiatan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan berdasarkan konsep, teori dari teknik-teknik penyandian (enkripsi), serta ilmu pendukung lain secara metodologis, konsisten dan sistematis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bidang persandian memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan bidang Persandian menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang wewenang penyelenggaraannya diturunkan ke daerah. Sehubungan dengan penyelenggaraan bidang Persandian di daerah, telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Berdasarkan undang-undang tersebut, urusan Persandian di daerah mengalami perubahan struktur organisasi serta tugas dan

fungsi karena terdapat penambahan uraian tugas berupa persandian untuk pengamanan informasi.

Guna mengoptimalkan penyelenggaraan persandian, meningkatkan kualitas pelayanan persandian, membentuk jejaring/networking, mengembangkan kompetensi SDM Sandi di daerah melalui skill coaching dan counseling, transfer knowledge dan aksi terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di daerah, maka dalam rangka mengoptimalkan persandian, Lembaga Sandi Negara menugaskan 2 orang Pegawai Lembaga Sandi Negara pada Dinas maupun Unit Teknis Persandian ke 34 Provinsi selama 3 bulan. Terkait penugasan tersebut setiap tim optimalisasi wajib membuat laporan akhir kegiatan optimalisasi penyelenggaraan persandian di daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraan bidang persandian dilaksanakan oleh Pusat Data dan Elektronik (PDE) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, namun dengan ditindaklanjutnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang didukung dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 maka penyelenggaraan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Adapun Dasar pelaksanaan tugas kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian di Provinsi NTB Tahun 2017, antara lain:

1. Program Kerja Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1160/LSN/D1/PB.03.06/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian Daerah melalui Penugasan Lulusan STSN pada Pemerintah Provinsi;
3. Surat Perintah Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1161/D1/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penugasan Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian di Provinsi NTB.

Untuk kegiatan kirim terima berita sandi dilaksanakan di ruangan Kasa, sementara kegiatan operasional dukungan persandian dilaksanakan ketika ada rapat terbatas dan kegiatan yang memerlukan dukungan jamming. Selain itu kegiatan kontra penginderaan untuk sterilisasi dilaksanakan ke ruangan pimpinan daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah serta beberapa ruangan pejabat yang meminta disterilisasi. Pelaksanaan kegiatan sandi pada tahun 2017 yang dilaksanakan adalah kirim terima berita melalui email sanapati. Untuk kegiatan operasional dukungan persandian belum pernah dilakukan dikarenakan tidak adanya permintaan untuk melakukan jamming. Kontra penginderaan tidak dapat dilakukan karena adanya penarikan peralatan oleh Lembaga Sandi Negara, sehingga jika terdapat permintaan sterilisasi tidak dapat dilakukan langsung oleh personil sandi Provinsi.

Namun peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di jajaran Pemerintah Provinsi NTB belum ada. Dalam rangka menerapkan persandian untuk keamanan informasi, Pemerintah Provinsi NTB sedang mengajukan rancangan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pernah dibuat dan dilaksanakan oleh Biro Umum, namun sampai dengan saat ini SOP pada Bidang Persandian dan LPSE Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk pelayanan persandian belum ada. Sementara itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan salah satu indikator utama (IKU) RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, digunakan untuk mengukur kinerja Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, khususnya dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Esensi dari keberadaan LPSE sesungguhnya adalah untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, efektif, efisien, adil dan akuntabel serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan usaha tidak sehat lainnya. Dalam rangka pelayanan, penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah disusun Standar Pelayanan (SP), Standard Operating Procedure (SOP) dan Penyusunan Program Kerja/Rencana Kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2017, kegiatan sistem administrasi elektronik, pada hakekatnya meliputi kegiatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan/sistem elektronik (LPSE), pengaturan bandwidth dan pelayanan pendaftaran/ pembuatan/ pembaharuan admin agency, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Pengelolaan dan pemeliharaan server LPSE serta sarana pendukungnya.
- Pembuatan data *agency* Perangkat Daerah maupun instansi lain kesistem SPSE. Perangkat Daerah yang telah membuat *admin agency* sebanyak 229.
- Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- Pengarsipan surat LPSE yang terkait dengan penggunaan/pembuatan akun baik akun *Admin Agency* dan Admin SiRUP.

Hingga akhir tahun 2017 sudah terdaftar 122 admin SiRUP Perangkat Daerah/UPTD yang ada di Pemerintahan Provinsi NTB dari 115 admin Perangkat Daerah/KPA yang ada pada aplikasi SiRUP LPSE Provinsi NTB. Sementara itu hingga akhir tahun 2017 baru 51 Perangkat Daerah /UPTD (41,35 persen) yang sudah meng-

input data di aplikasi SiRUP LPSE, sedangkan sisanya sebanyak 64 SKPD/UPTD (58,65 persen) belum meng-input data SiRUP untuk pengadaan baik melalui penyedia ataupun swakelola sesuai jumlah admin PA/KPA di masing-masing Satker PA/KPA yang telah terdaftar di aplikasi SiRUP LPSE Provinsi NTB. Sementara itu masih terdapat 10 Perangkat Daerah /KPA Perangkat Daerah /UPTD yang belum melakukan pendaftaran admin SiRUP Perangkat Daerah /KPA di masing-masing Satker yang ada atau sekitar 8,1 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap admin SiRUP yang terdaftar di aplikasi ditemukan adanya admin SiRUP tidak aktif yang cukup tinggi hal ini disebabkan karena pengisian SiRUP di masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara terpusat, sementara beberapa UPTD di beberapa Perangkat Daerah sudah terlanjur melakukan registrasi admin SiRUP untuk masing-masing Satker yang ada di Perangkat Daerah /UPTD.

Untuk melakukan penertiban admin SiRUP yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, maka LPSE Provinsi NTB untuk tahun 2018 akan melakukan penertiban admin SiRUP PA/KPA dengan menetapkan 1 orang admin SiRUP di masing-masing Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah.

Kegiatan pelayanan pendaftaran/registrasi dan verifikasi penyedia, pada dasarnya meliputi pelaksanaan pelayanan kepada penyedia yang terkait dengan :

- Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
- Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- Persetujuan atau penolakan pendaftaran pengguna SPSE;
- Pemberian penonaktifan *user id* dan *password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan/ULP berkaitan dengan daftar hitam perusahaan (*blacklist*).

Kegiatan layanan dan dukungan pengoperasian SPSE, Pada dasarnya meliputi kegiatan-Kegiatan pelayanan konsultasi dan pemberian pelatihan/ Bimbingan teknis kepada semua Stakeholder/Pengguna SPSE, baik panitia/ULP, Penyedia dan konsultan perorangan maupun Auditor/APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan masyarakat, serta pelayanan tindak lanjut atas keluhan dan pertanyaan dari stakeholder. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai:

- Penanganan Keluhan tentang Pelayanan Penanganan keluhan dan pertanyaan dari stakeholder SPSE.
- Pelayanan pelatihan serta konsultasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik, selain dilakukan dengan tatap muka langsung juga dilakukan secara online melalui fasilitas tanya jawab yang disediakan oleh website

LPSE, email helpdesk LPSE (helpdesk-lpse@NTBProvinsigo.id) dan Aplikasi (*Trouble ticketing system*) TTS Helpdesk LPSE NTB sebagai tool untuk mencatat permasalahan-permasalahan atau gangguan yang timbul.

Proses Pelelangan yang dilakukan melalui SPSE dengan Lelang *E-Procurement* selama tahun 2017 adalah sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) paket lelang dengan sumber dana dari APBN maupun APBD. Paket lelang yang bersumber dari dana APBN sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, sedangkan paket lelang dari sumber dana APBD sebanyak 305 (tiga ratus lima) paket lelang.

2.1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013-2017 telah oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat seturut nilai-nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai-nilai budaya dan pembentukan pranata adat di masyarakat. Pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Perkembangan pembentukan pranata adat di NTB tahun 2013-2017 menurut kabupaten dan kota sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2- 71. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017

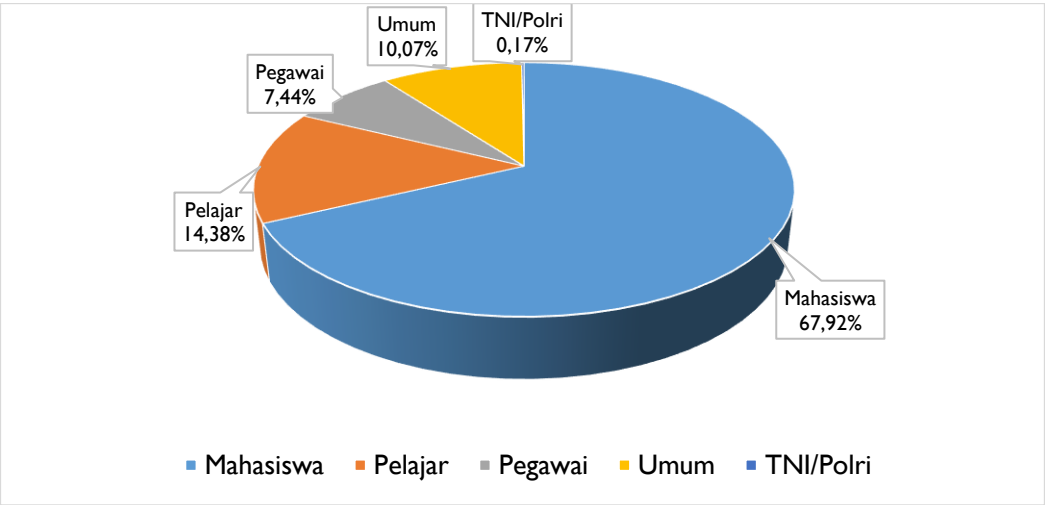
No	Kabupaten/Kota	Pranata Adat (Lembaga)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mataram	1	7	5	10	5
2	Lombok Tengah	1	9	5	10	5
3	Lombok Timur	1	9	5	10	5
4	Lombok Barat	1	9	5	10	5
5	Lombok Utara	1	10	5	10	5
6	Sumbawa	1	4	5	10	5
7	Sumbawa Barat	1	1	10	10	5
8	Dompu	1	1	4	3	5
9	Bima	1	3	4	10	5
10	Kota Bima	1	1	5	10	5
Jumlah		10	54	53	93	50

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB 2013-2017

2.1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Gambar 2- 32. Proporsi Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menurut catatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPKP NTB) hingga Desember 2016 jumlah pengunjung mencapai angka 959.530 orang. Dengan rincian pengunjung pelajar 14 persen, mahasiswa mendominasi dengan 67,95 persen, TNI/Polri 0,02 persen, PNS/ASN 7,45 persen dan umum 9,71 persen.

2.1.3.18 Urusan Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Badan Perpustakaan daerah dan arsip sebagai instansi penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan urusan ini, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2009 – 2013 telah banyak mendukung pembangunan di Provinsi NTB dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah diperoleh antara lain: hasil kajian sistem administrasi kearsipan sebanyak 4 dokumen/400 eksemplar, hasil penataan dokumen/arsip daerah, akuisisi arsip dan pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 40 SKPD, hasil penilaian arsip inaktif dan statistik hasil akuisisi 5 SKPD, pengolahan dan pelayanan informasi khasanah arsip yang memiliki nilai sejarah 14 jenis, pengembangan model instansi pengelola kearsipan 30 SKP, pembinaan dan pengawasan kearsipan 46 SKP dan 40 Pondok pesantren, dan pelatihan kersipan 240 Sekretaris Desa dan Pengurus Pondok Pesantren.

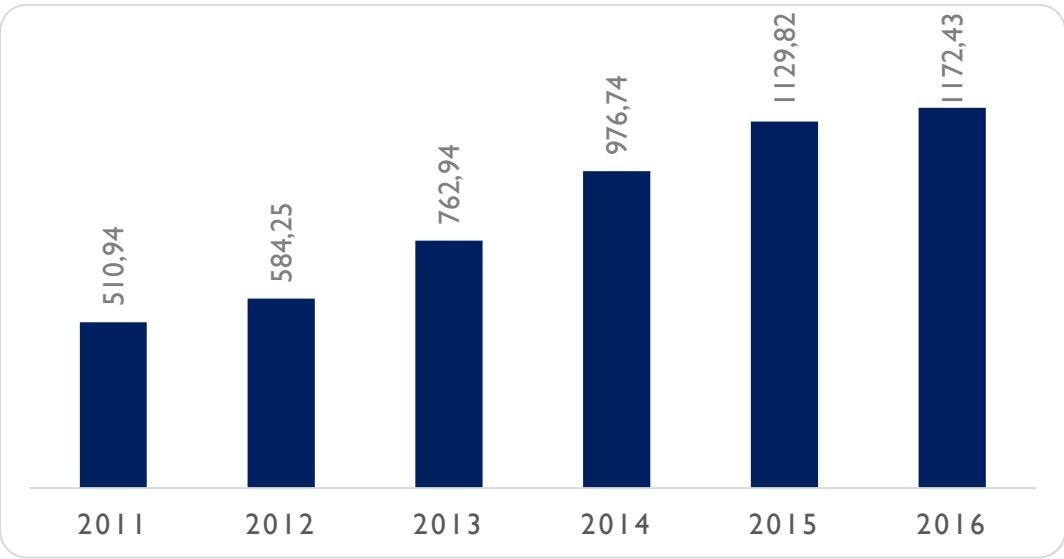
2.1.3.3 Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang dikelilingi oleh laut, produksi perikanan NTB terus mengalami peningkatan terutama perikanan lautnya. Produksi Ikan Laut pada tahun 2015 mencapai 170.167 ton, meningkat 17,06 persen dibanding tahun 2014.

Sementara itu perikanan darat di NTB didominasi oleh pengembangan budidaya air payau (tambak) dimana paling banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa.

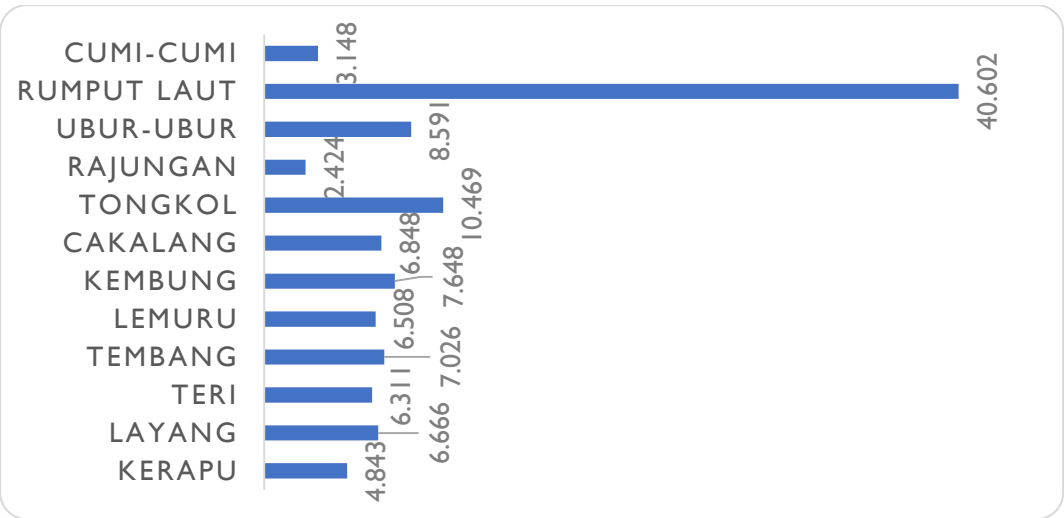
Gambar 2- 33. Produksi Perikanan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat (ribuan ton), 2011-2016



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017

Untuk produksi perikanan laut diperoleh dari beberapa jenis ikan seperti kerapu, layang, teri, tembang, lemuru, kembung, cakalang, tongkol, rajungan, ubur-ubur, rumput laut dan cumi-cumi. Hal tersebut sebagai perikanan laut juga sebagai komoditas utama Nusa Tenggara Barat. Daerah produksi perikanan laut tersebar di 8 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 2- 34. Produksi Perikanan Laut dan Beberapa Komoditas Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016 (ton)



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017

Pada tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak memproduksi perikanan laut jenis rumput laut yakni sebanyak 40.602 ton. Sedangkan pada tahun 2015, produksi rumput laut tercatat 920.710 ton, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 22,10 persen dibanding tahun 2014. Sedangkan produksi perikanan laut terendah yaitu jenis rajungan yakni hanya sebanyak 2.424 ton

Tabel 2- 72. Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Tukar Nelayan	Indeks	95.78	98.70	101.33	101.04	104,59
Konsumsi Ikan	Kg/Kap/tahun	28,66	31,00	31,53	32.35	35.49
Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	%	89,85	86,27	86,27	83,12	84,97
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	2,49	2,72	7,87	7,87	8,26

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2018

Dari tabel data diatas terlihat bahwa Nilai Tukar Nelayan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini berarti kesejahteraan nelayan makin membaik sebagai dampak dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Demikian juga dengan tingkat konsumsi ikan, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sadar tentang nilai gizi dari produk perikanan. Rasio kawasan lindung perairan juga menunjukkan nilai peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2013 sebesar 2,49% meningkat jadi 8,6% pada tahun 2017.

2.1.3.3.2 Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2- 73. Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisatawan	1.357.602	1.629.122	2.210.527	3.094.437	3.508.903
- Mancanegara	565.944	752.306	1.149.235	1.404.328	1.430.249
- Nusantara	791.658	876.816	1.061.292	1.690.109	2.078.654

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program Visit Lombok Sumbawa

yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program Pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan penguatan branding Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 3,5 (tiga koma lima) juta wisatawan pada akhir tahun 2017.

2.1.3.3.3 **Urusan Pertanian**

Melihat geografis Nusa Tenggara Barat serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat NTB sebagai petani, sudah barang tentu hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dalam struktur perekonomian NTB. Seiring dengan berkembangnya perekonomian yang mencanangkan masa depan NTB menuju era industrialisasi dan daerah pariwisata dunia tentunya sector pertanian tetap dipertimbangkan.

Sektor pertanian NTB terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai. Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2- 74. Produksi Tanaman Pangan tahun 2013-2017

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)				
		2013*	2014*	2015*	2016*	2017**)
1	Padi (Gabah Kering Giling)	2.193.698	2.116.637	2.417.392	2.095.118	2.323.700
2	Jagung (Pipilan Kering)	633.773	785.864	959.973	1.278.271	2.127.324
3	Kedelai (Biji Kering)	91.065	97.172	125.036	109.480	56.097

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017 *) Angka tetap **) Angka Sementara 2017

Sedangkan komoditas pertanian lainnya adalah tanaman hortikultura yang terdiri dari Cabai dan Bawang merah sebagai mana table berikut:

Tabel 2- 75. Produksi Tanaman Hortikultura 2013-2017

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2013*	2014*	2015*	2016*	2017**
1	Cabe (buah segar)	41.722	84.666	84.752	109.037	189.016
2	Bawang merah (umbi kering)	107.337	126.914	169.981	222.805	227.551

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017\ * Angka Tetap **) Angka Sementara 2017

Komoditi tanaman perkebunan NTB adalah kopi, kakao, kelapa, jambu mete dan tembakau dengan produksi tahun 2013 -2017 sebagaimana table berikut:

Tabel 2- 76. *Produksi Komoditi tanaman perkebunan 2013 -2017*

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2013*	2014*	2015*	2016*	2017 **)
1	Kopi (Biji Berasan)	4.302,12	4.817,91	4.981,91	4.641,41	4.865,15
2	Kelapa (Kopra)	56.481,15	54.977,55	47.763,35	45.998,17	48.356,30
3	Kakao (Biji Kering)	1.536,30	1.794,01	1.860,65	2.110,66	2.083,37
4	Jambu Mete (Biji Gelondong)	17.425,81	11.855,99	10.827,81	12.765,32	12.734,03
5	Tembakau (Daun Kering)	38.528,67	37.067,26	34.448,51	39.589,90	50.680,13

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

*) Angka Tetap **) Angka Sementara tahun 2017

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendukung Program ketahanan pangan nasional di NTB. Sub sektor peternakan merupakan salah satu program unggulan daerah dan diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan serta memiliki daya ungkit sektor ekonomi lainnya.

Keberhasilan sub sektor peternakan ditunjukkan oleh indikator peningkatan populasi ternak sapi dalam kurun waktu 2013 - 2017 telah berhasil meningkatkan rata-rata pertumbuhan populasi sebesar 7 % yang tersebar di Kabupaten/Kota sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 2- 77. *Target dan Realisasi Populasi Sapi di Prov. NTB Th. 2013-2017*

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	1.000.000	1.002.731
2	2014	1.092.977	1.013.793
3	2015	1.169.485	1.055.013
4	2016	1.100.757	1.092.719
5	2017	1.147.355	1.149.540

Sumber : dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi NTB 2017

Sebagai salah satu daerah sentra produksi sapi potong dan sapi bibit populasi sapi di NTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 terus mengalami peningkatan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan populasi yaitu jumlah ketersediaan sapi potong dan sapi bibit dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional. Provinsi NTB, memiliki peran yang lebih besar dalam mensuplai kebutuhan bibit dan sapi potong bagi lebih dari 12 provinsi lainnya di Indonesia. Transaksi perdagangan ternak dalam setahun rata-rata mencapai 374 Milyar dan sekaligus turut meningkatkan Produk domestic Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di NTB.

Jumlah kelompok tani di Provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 17.813 kelompok yang tersebar di 10 kabupaten/kota, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah kelompok tani terbanyak dengan 3.678 kelompok.

Tabel 2- 78. Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian Per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani
1	Lombok Barat	1.404	122	59
2	Lombok Tengah	2.473	223	64
3	Lombok Timur	3.092	253	90
4	Sumbawa	3.678	164	70
5	Dompu	1.439	88	85
6	Bima	2.941	186	126
7	Sumbawa Barat	1.165	68	137
8	Lombok Utara	889	37	26
9	Kota Mataram	300	43	8
10	Kota Bima	432	38	12
JUMLAH		1.7813	1.222	677

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi NTB

Jumlah kelompok tani tahun 2018 sebanyak 1.7813 kelompok dan baru 1.222 kelompok saja yang sudah membentuk gabungan kelompok tani. Kelembagaan para pelaku pertanian menjadi penting, sehingga lebih baik bila kelompok-kelompok tani tersebut membentuk gabungan kelompok tani sehingga dapat mengembangkan komoditas baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu gapoktan akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

2.1.3.3.4 Urusan Kehutanan

Adapun kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghasilkan kayu hutan yang terdiri dari 3 jenis yakni Jati, Meranti dan Rimba campuran. Jenis yang paling banyak diproduksi adalah jenis Rimba campuran. Tetapi tiap tahunnya mengalami penurunan produksi sebesar 17.058,91 ton dari 20.972,82 ton pada tahun 2012 menjadi 3.913,91 pada tahun 2016.

Tabel 2- 79. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasilnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016

Tahun	Kayu Bulat	Rotan	Kemiri	Madu	Bambu	Akar Lontoh
2013	0	240	0	29.000	26.400	33
2014	4.889	220	0	60.141	22.000	48
2015	0	0	317	4.775	454.400	0
2016	0	120	0	0	0	0

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017

Hutan dan lahan yg direhabilitasi pada tahun 2013 seluas 1.353 ha, pada tahun 2017 meningkat jadi 3.800 ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak sebanding dengan luas kerusakan kawasan hutan yang terjadi, dimana pada tahun 2017 terjadi kerusakan kawasan hutan seluas 96.238,24 ha. Hal ini tentunya akan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan.

Tabel 2- 80. Luas Rehabilitasi Hutan & Lahan, Kerusakan Kawasan Hutan dan Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Th. 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1.353	1.961	3.196	2.491	3.800
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	NA	NA	NA	NA	96.238,24
3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan	%	41,44	41,44	41,44	41,44	41,44

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018

2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan bidang ESDM hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang ESDM di Kabupaten/Kota berpindah menjadi kewenangan Provinsi. Sementara itu terkait sub urusan minyak dan gas serta pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan perubahan kewenangan terkait Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka untuk tahun 2017 urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Isu strategis di sektor ESDM saling terkait dengan aspek infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan hidup. Isu strategis yang memerlukan penanganan langsung diantaranya adalah angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Dari isu tersebut, sektor ESDM mencoba merumuskannya kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Fokus kebijakan ESDM selama periode 2013-2018 diikhtiarkan untuk menjawab isu strategis sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya daya dukung dan kapasitas energi listrik dan air bersih.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya geologi.
3. NTB berada pada rangkaian sabuk gunung api yang memiliki potensi bencana alam geologi.
4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

2.1.3.3.6 **Urusan Perdagangan**

Total ekspor Provinsi NTB secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai sebesar 2.611.932,995 ton dengan nilai US\$ 4.849.343.689,315, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 81. Perkembangan Ekspor Tahun 2013 – 2017

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Us\$)
2013	274.454,93	402.568.348,66
2014	190.182,92	307.601.681,16
2015	827.651,70	1.560.043.159,81
2016	785.694,63	1.581.791.827,98
2017	533.948,82	997.338.671,71
Jumlah	2.611.933,00	4.849.343.689,32

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2013–2017, terdapat tiga komoditi yakni Konsentrat Tembaga, Mutiara, dan Kerajinan Buah Kering selalu menempati 5 besar komoditi ekspor NTB. Lima komoditi ekspor teratas setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2- 82. Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsentrat Tembaga	401.724,59	305.668,71	1.532.170,49	1.580.767,76	996.194,05
2	Mutiara	479,06	1.056,97	1.616,55	153,40	302,42
3	Kerajinan Buah Kering	-	193,90	215,17	218,98	226,19
4	Udang Vannamei	-	-	564,16	378,99	516,43
5	Gerabah	51,35	37,79	-	59,71	44,19
6	Kerajinan Kayu	2,17	-	-	-	-
7	Kerajinan Rotan	-	83,41	-	-	-
8	Jagung	-	-	24.860,24	-	-
9	Buah Kering	272,63	-	-	-	-
10	Komoditi Lainnya	38,56	560,91	616,54	2,99	55,49
Total Ekspor		402.568,35	307.601,68	1.560.043,16	1.581.791,83	997.338,67

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB selama periode 2013-2017 tercatat Jepang, Korea Selatan, dan China secara konsisten selalu berada pada lima besar nilai ekspor terbesar. Lima negara dengan nilai ekspor terbesar selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 83. Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jepang	188.457,62	163.813,05	665,72	760.931,80	331.324,67
Korea Selatan	131.019,12	107.728,62	390,27	260.788,53	147.004,76

China	636,12	34.636,48	58,23	78.07,03	-
Philipina	-	-	264,77	435.044,32	452.107,73
India	-	106,16	-	-	65.955,73
Jerman	81.694,75	-	-	-	-
Negara Lainnya	748,76	1.317,38	100,47	46.954,15	945,78
Total Eksport	402.556,36	307.601,68	1.479,45	1.581.791,83	997.338,67

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Kegiatan operasi pasar rakyat sempat mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya alokasi anggaran yang diterima. Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga. Hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi pasar selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2- 84. Operasi Pasar 2013-2017

Tahun	Realisasi Penyaluran Bantuan Paket Sembako Untuk Masyarakat Miskin (Paket)
2013	1.089
2014	2.390
2015	3.489
2016	11.697
2017	8.152

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

2.1.3.3.7 Urusan Perindustrian

Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian NTB. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industry Kecil Mengah (IKM), memfasiltasi sertifikasi halal dari MUI, bimbingan teknis desain produksi, fasilitasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain industry, merek, hak cipta), dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Perekembangan sentra industry formal NTB dari Tahun 2014-2017 sebesar 2,59 persen, sedangkan untuk industri non-formal memiliki perkembangan sebesar 2,19 persen. Pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang masuk ke dalam industri formal sebanyak 8,730 unit dan untuk industri non-formal sebanyak 72.113 unit. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2- 85. Perkembangan Industri NTB Tahun 2013-2017

No	JENIS	2013	2014	2015	2016	2017
A	FORMAL					
1	Perusahaa n (Unit)	11.688	7.337	7.897	8.425	8.730
2	Tenaga Kerja (Orang)	83.889	44.553	47.399	49.994	51.541

No	JENIS	2013	2014	2015	2016	2017
3	Nilai Investasi (Rp 000,-)	324.339.776	1.904.424.928	1.946.143.169	2.004.619.612	2.056.454.883
4	Nilai Produksi (Rp 000,-)	1.586.806.113	3.041.553.475	3.221.767.413	3.391.464.311	3.476.961.215
5	Nilai Bahan Baku/ Penolong (Rp 000,-)	750.945.015	1.434.843.752	1.527.844.467	1.593.964.930	1.633.424.893
B NON FORMAL						
1	Perusahaan (Unit)	73.995	73.741	74.800	74.894	72.113
2	Tenaga Kerja (Orang)	184.127	171.647	174.014	173.974	167.579
3	Nilai Investasi (Rp 000,-)	164.374.828	180.358.848	187.718.222	195.143.809	192.257.762
4	Nilai Produksi (Rp 000,-)	938.797.835	1.559.680.346	1.698.997.552	1.713.579.404	1.648.544.665
5	Nilai Bahan Baku/ Penolong (Rp 000,-)	465.525.832	839.780.706	902.970.266	912.902.093	919.937.816

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2013 - 2017

2.1.3.3.8 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan penduduk/transmigran untuk dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak untuk dihuni, layak untuk diusahakan, dan layak untuk dikembangkan secara lestari.

Jumlah transmigran yang telah ditempatkan di NTB didominasi oleh UPT Sori Panihi SP.6 di Kabupaten Bima sejak tahun 2013 dengan jumlah 150 KK (984 jiwa), Kabupaten Sumbawa pada UPT Branglamar 100 KK (814 jiwa), dan Kabupaten Sumbawa Barat 110 KK (453 jiwa). Sedangkan jumlah transmigran asal Provinsi NTB yang mengikuti program transmigran sebanyak 19 KK (75 jiwa) di Provinsi Kalimantan Barat, 10 KK (35 jiwa) di Provinsi Gorontalo, 25 KK (95 jiwa) di Provinsi Sulawesi Tengah, 17 KK (57 jiwa) di Provinsi Sulawesi Tenggara, 5 KK (18 jiwa) di Provinsi Sulawesi Barat, dan 5 KK (19 jiwa) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk jumlah transmigran swakarsa, saat ini belum tersedia data terkait asal transmigran dan penempatan dari dan ke NTB.

2.1.3.4 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan. Pada tahun 2017, urusan pemerintah fungsi

penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut :

2.1.3.4.1 Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan pemerintah fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan merupakan unsur pendukung yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah meliputi Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Humas dan Protokol, Sekretariat DPRD, dan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta.

2.1.3.4.1.1 Biro Umum

Pada tahun 2017 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, maka indikator Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (RKPD online, NTB satu Data, SIP-PPID), menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Informasi terkait prestasi Biro Umum atas nama pemerintah daerah baik tingkat nasional/internasional selama dua tahun berturut-turut telah berhasil mempersembahkan prestasi tingkat Nasional melalui inovasi/terobosan layanan yang dilakukannya, yaitu:

- a) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dengan tema Temukan Arsip dalam 3 Menit dan ditetapkan sebagai Duta NTB dalam Lomba Pelayanan Publik Nasional.
- b) National Procurement Award atas keberhasilan Pelaksanaan Peran LPSE Provinsi NTB dalam mengawal proses pengadaan barang jasa secara efektif dan efisien.
- c) Terbaik Pertama Nasional Pengaman Informasi berdasarkan Hasil Evaluasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Sandi Negara.
- d) Perwakilan Indonesia dalam Audisi kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat UNPSA (United National Public Service Awards)

Tata kelola kearsipan yang diselenggarakan Biro Umum dalam mengelola arsip inaktif sebanyak 39.282 berkas dan 30.475 berkas yang terdiri dari : 13.243 surat masuk, 7.641 surat keluar, 9.315 distribusi undangan dan 276 dokumen konfirmasi surat. Dalam peningkatan pelaksanaan tata kelola kearsipan Biro Umum menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Mataram, Inspektorat, Biro Organisasi Setda Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, dalam mengadopsi sistem pengelolaan arsip berbasis TIK (e-arsip NTB) dan pengelolaan arsip inaktif. Sedangkan untuk pelatihan/magang tata kelola kearsipan bermitra dengan Badan Perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

2.1.3.4.1.2 Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagai perangkat daerah pengelola utama salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 86. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2017

Indikator	Satuan	2016	2017		Target
		Realisasi	Target	Realisasi	2018
Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2017.

Jumlah aduan pelayanan publik yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 sebanyak 348 aduan, relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 352 aduan yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 87. Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun		Jumlah	Ditindaklanjuti (%)
		2016	2017		
1	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	5	4	4	100,0
2	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	72	140	212	100,0
3	Dinas Kominfo dan Statistik	-	65	65	100,0
4	Rumah Sakit Umum Daerah NTB	40	111	151	100,0
5	Rumah Sakit H.L Manambai	-	5	5	100,0
6	Satpol PP	17	20	37	100,0
7	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	-	3	3	100,0
8	Biro Umum	95	-	95	100,0
9	KPID	3	-	3	100,0
10	Biro Adm.Pembangunan,LB BJP	2	-	2	100,0
11	Biro Hukum	1	-	1	100,0
12	BLHP	7	-	7	100,0
13	Dinas Naker	94	-	94	100,0

No	Uraian	Tahun		Jumlah	Ditindaklanjuti (%)
		2016	2017		
14	Dinas Budpar	16	-	16	100,0
	Jumlah	352	348	700	100,0

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2017

Data pada tabel di atas menunjukkan seluruh aduan telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, namun demikian ditahun 2017 beberapa perangkat daerah yang mengalami penambahan aduan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara terus menjadi perhatian, karena kualitas kinerja pelayanan publik yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat, dan akan meningkatkan mutu aparatur pemerintah. Pelayanan publik di era reformasi menjadi isu penting dan strategis karena masyarakat semakin cerdas dan semakin tahu hak-haknya. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen kuat dalam menyelenggarakan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Langkah strategis yang terus diupayakan untuk mendorong perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB adalah dengan memberikan stimulan, semangat perubahan dan inovasi pelayanan serta melakukan penilaian untuk mengetahui model kinerja yang obyektif dari unit pelayanan yang ada di daerah, serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang dirasakan tidak sesuai harapan. Pengaduan adalah ungkapan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penanganan pengaduan yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disebut Pos Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik, yang memiliki tugas menyampaikan laporan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk surat yang minimal memuat informasi tentang nomor dan tanggal pengaduan, isi ringkas pengaduan, posisi penanganan dan hasil penanganan dan disampaikan kepada Sekretariat Desk Pengaduan Masyarakat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Hasil penyelesaian aduan pelayanan publik pada Tahun 2017 telah memenuhi target RPJMD yaitu 100 persen, karena Pos diseluruh Unit Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB telah memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat dan memberikan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Biro Organisasi telah melakukan upaya dalam peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 pada kategori predikat penilaian B dengan nilai skor 60,64, dibandingkan tahun 2015 masih memiliki nilai CC dengan nilai skor 58,65, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 88. Hasil penilaian LKjIP Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2017

No	Komponen Yang Dinilai	2015		2016		2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja			30	20,49	30	21,47
b	Pengkuran Kinerja			25	15,21	25	15,14
c	Pelaporan Kinerja			15	8,50	15	9,05
d	Evaluasi Internal			10	6,30	10	5,30
e	Capian Kinerja			20	10,14	20	10,05
	Nilai Hasil Evaluasi		58,65	100	60,64	100	61,01
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B		B

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2017.

Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintahan Provinsi NTB, yang berorientasi pada hasil serta budaya kerja menunjukkan kinerja yang baik, namun masih perlu upaya meraih predikat yang lebih baik lagi dimasa depan. Pada tahun 2017 hasil penilaian LKjIP masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB.

2.1.3.4.1.3 Biro Hukum

Perkembangan produk hukum dari Tahun 2016 -2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 89. Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2016-2017

No.	Produk Hukum	Satuan	2016	2017	
				Target	Realisasi
1.	Peraturan Daerah	Buah	12	10	13
2.	Peraturan Gubernur	Buah	56	30	69
3.	Keputusan Gubernur	Buah	1.136	700	1046
	Jumlah		1.204	740	1125

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2017

Tabel 2- 90. Jumlah Perda/Perbup/Perwal Yang difalitasi dan dievaluasi Tahun 2017

No	Kabupaten /Kota	Difasilitasi			Dievaluasi		
		Raperda / Perda	Raperbup/Perbup	Raperwal/Perwal	Raperda/Perda	Raperbup/Perbup	Raperwal/Perwal
1.	Kota Mataram	8	-	-	5	-	-
2.	Lobar	8	-	-	4	-	-
3.	Loteng	5	-	-	4	-	-
4.	Lotim	1	11	-	4	1	-
5.	Lombok Utara	5	1	-	3	-	-
6.	Sumbawa Barat	15	-	-	6	-	-
7.	Sumbawa	5	-	-	5	-	-
8.	Dompu	6	2	-	5	-	-
9.	Kota Bima	12	-	-	4	-	-
10.	Bima	3	1	-	4	-	-
	Jumlah	85	15	-	46	1	-

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2017

Tabel 2- 91. Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2017

No	Uraian	Pengugat/Pe mbandi ng	Tergugat /Terban ding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahap an Kasus
					PN/PTUN MTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
1	Perkara Perdata No. 37/PDT.G /2016/P N.Pya	SURYO	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 76.150 M2	PN. Selong No. 37/PDT.G / 2016/PN. Pya			Desa Leneng dan Desa Puyung Kec. Pyara Kab. Loteng	Kasasi

No	Uraian	Penggugat/Pe mbandi ng	Tergugat /Terban ding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahap an Kasus
					PN/PTUN MTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
2	Perkara Perdata No. 44/PDT.G / 2016/PN. Pya	SALIM Dkk.	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB	PN Peraya No. 44/PDT.G /2016/P N.Pya			Dusun Batu Beduk Desa Batujai Desa Puyung Kec. Pyara Kab. Loteng	Seled ai
3	Perkara TUN No. 56/G/20 16/PTUN. MTR.	IRWAN SYAH, S.Pd.	Pemprov NTB	Keputusa n Gubernur No. 171- 923 Tahun 2016 ttg Peresmia n Pemberh entian Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat Masa Jabatan 2014- 2019	PTUN Mataram No. 56/G/20 16 /PTUN.M TR.			Kab. Sumbaw a Barat	Selesa i
4	Perkara Perdata No. 274/PDT. G/ 2017/PN. MTR	LUTFI HEYDE R	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 3,2 Ha.				Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemena ng Kab. Lombok Utara	Selesa i karen a Gugat annya dicab ut

No	Uraian	Penggugat/ Pembanding	Tergugat/ Terbanding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahapan Kasus
					PN/PTUN MTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
5	Perkara TUN No. 05/G/2017/PTUN.MTR.	LUTFI HEYDER	Pemprov NTB	Surat Dinas yang ditandatangani Sekda No. : 900/1540/BPKAD/2016 TGL 2 Desember 2016 ttg Penataan Bangunan di Tanah Milik Pemprov. NTB dan Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/1502/BPKAD/2017 tgl 24 November 2016 ttg Penataan Bangunan di Tanah Milik Pemprov. NTB				Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemena ng Kab. Lombok Utara	Selesai karena Gugatannya dicabut
6	Perkara Perdata No. 05/PDT.G / 2017/PN.SEL	L. ABBAS Dkk	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 4.620 M2	PN. Selong No. 05/PDT.G /2017/P N.SEL			Dusun Gerami Desa Loyok Kec. Sikur Kab. Lombok Timur	Selesai

No	Uraian	Pengugat/ Pembanding	Tergugat/ Terbanding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahapan Kasus
					PN/PTUN MTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
7	Perkara Perdata No. 11/PDT.G / 2017/PN. MTR	WAK IBRAHIM	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 15.000 M2	PN Mataram No. 11/PDT.G / 2017/PN. MTR			Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemena ng Kab. Lombok Utara	Selesai
8	Perkara TUN No. 148/G/2017/PTUN.N.MTR.	MASDIN	Pemprov NTB	Keputusan Gubernur No. 171.2-397 Tahun 2017 ttg Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Bima Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 2 Mei 2016	PTUN Mataram No. 148/G/2017 /PTUN.MTR.			Kab. Bima	Kasasi
9	Perkara Perdata No. 91/PDT.G / 2017 /PN.SEL	Gugatan Kelompok (Class Action)	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB	PN Selong No. 91/PDT.G /2017/P N.SEL			Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lotim	Bandi ng
10	Perkara Perdata No.20/PDT.G/2017 /PN.Rbi	SITI NUR Dkk	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB yaitu Kantor UPTD TPI Dinas				Sape Kabupat en Bima	Selesai

No	Uraian	Pengugat/ Pembanding	Tergugat/ Terbanding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahapan Kasus
					PN/PTUN MTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
				Kelautan dan Perikanan					
11	Perkara Perdata No. 01/PDT.G / 2017/PN. Rbi	SAMSU L M. NUR	Pemprov NTB	Tergugat Mengajukan Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Penggugat				Kabupaten Bima	Selesai

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2017

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penanganan penyelesaian sengketa hukum dalam Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan dengan baik sehingga beberapa perkara hukum dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus, banding 1 kasus dan 2 kasus kasasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum pada tahun 2017 antara lain :

- Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Guru

Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti setiap warga negara harus menghargai, menghormati dan menganggap penting semua proses dan upaya pemahaman HAM. Pengenalan nilai-nilai HAM dapat di internalisasikan dan sosialisasikan melalui pelatihan HAM.

Guru memiliki peranan yang sangat penting dan sangat strategis dalam upaya meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan di HAM. Dalam tugas-tugasnya guru juga sangat berpotensi melakukan pelanggaran HAM terhadap para siswa/siswinya. Oleh karena itu, pelatihan HAM bagi guru penting untuk dilakukan agar mampu memberikan penguatan HAM bagi guru khususnya di Prov. NTB guna mengimplementasikan HAM ke dalam proses belajar mengajar disatuan Pendidikan masing-masing.

- Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Siswa

Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari sejak janin kandungan sampaoi anak berumur 18 Tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan

kelangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak oleh karena itu sosialisasi HAM bagi siswa SMA/SMK penting untuk dilakukan agar siswa mampu memberikan perlindungan diri terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Sekolah.

- Kegiatan Rakor HAM.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019 serta merealisasikan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia melalui Nawacita dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kelompok rentan kedalam satu rencana aksi nasional yang inklusif, maka semua Kab./Kota melalui OPD terkait wajib melaksanakan dan melaporkan Aksi HAM Tahun 2017 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab./Kota. Dan sebagai bagian dari kegiatan Aksi HAM ini adalah penilaian Kab./Kota peduli HAM yang wajib diikuti oleh 10 Kab./Kota se NTB oleh karena itu Biro Hukum Setda Provinsi NTB berupaya memfasilitasi kebutuhan ini melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan Aksi HAM dan penilaian Kab./Kota Peduli HAM yang diikuti 40 peserta dari Kab./Kota se NTB dan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi.

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kegiatan sosialisasi kebijakan ini dilaksanakan di 5 kabupaten/kota se-NTB dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang per kabupaten/kota (100 orang) dan sosialisasi di Mataram tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dengan jumlah peserta 50 orang.

- Kegiatan Prolegda

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penataan Peraturan Perundang-undangan dan pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan sehingga penyusunan/pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah secara terarah, terkoordinir dan terpadu setiap tahun.

- Kegiatan Rapat koordinasi Hukum,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terwujudnya supremasi hukum yang berkualitas, terjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, menyamakan persepsi terhadap dasar hukum dalam memproses penyusunan produk hukum daerah, dan pemahaman isu-isu aktual dibidang hukum.

2.1.3.4.1.4 Biro Pemerintahan

- Penyusunan LPPD

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) termasuk dalam Dokumen Pertanggungjawaban Gubernur. LPPD dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Peringkat LPPD diumumkan setiap dua tahun sekali, LPPD yang dievaluasi dan dinilai tahun 2015 diumumkan pada saat hari Otonomi Daerah pada bulan April tahun 2017, dimana Provinsi NTB

menduduki peringkat 6 untuk tingkat nasional, penghargaan yang diperoleh dari hasil penilaian LPPD sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Provinsi NTB mampu mempertahankan Penghargaan tersebut dan setiap tahun selalu meningkat, sejak tahun 2012 berada pada peringkat 16, tahun 2013 mencapai peringkat 9 dan tahun 2014 mampu mempertahankan peringkat 8.

- Batas Daerah

Kebijakan pembinaan batas wilayah Tahun 2017, diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik. Terkait dengan penyelesaian batas wilayah, pada tahun 2017 batas wilayah daerah telah diterbitkan 6 peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah,
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Tengah masih mempermasalahkan akan melakukan gugatan melalui Mahkamah Agung, untuk wilayah Nambung dengan pertimbangan, melanggar Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah teritorial tingkat 1 Bali, NTB, NTT termasuk tidak sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten, namun dari pihak Provinsi masih menunggu hasil putusan.

Kendala Batas daerah yang belum tercapai kata sepakat dalam penentuan titik batas dan penarikan garis batas daerah disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam penarikan garis batas dan penggunaan peta dasar sebagai acuan dalam penentuan titik koordinat batas dan tarikan garis batas, untuk segmen batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat sengketa batas sebagai berikut:

- a) Kabupaten Lombok Barat menghendaki penempatan titik Koordinat batas dan tarikan garis batas dari TK. 1 menuju TK. 2 dan selanjut mengarah ke TK.3 yang mengikuti alur punggung gunung dan sesuai pemempatan titik koordinat pada tahun 2006. (alternatif A.)
- b) Kabupaten Lombok Tengah menghendaki penempatan titik koordinat batas daerah dari titik A menuju titik B dan selanjutnya ke titik C, yang mengikuti As median Jalan.

- c) Areal yang jadi sengketa adalah Dusun pengantap Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah. (Alternatif B.)
- d) Sementara di wilayah yang disengketakan secara administrasi sudah dilayani oleh Pemerintah Lombok Barat melalui Desa Buwun Mas, layanan yang diberikan antara lain pembuatan KTP, SPPT, pembangunan gedung SD, Pembangunan PUSTU, dan daftar pemilih pada waktu Pilkada maupun Pilpres.

- Penataan Daerah Otonomi Baru

Perkembangan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai dengan tahun anggaran 2017 masih terdapat 4 usulan Daerah Otonomi Baru yang belum dapat diproses. Keempat usulan Daerah Otonomi Baru tersebut adalah :

- a) Provinsi Pulau Sumbawa, merupakan pemekaran dari Provinsi NTB dengan cakupan wilayah semua kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
- b) Kabupaten Lombok Selatan, usul pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur di wilayah bagian selatan;
- c) Kota Samawa Rea. Usul pemekaran dari Kabupaten Sumbawa yang rencananya sekaligus untuk memenuhi persyaratan sebagai ibukota Provinsi Pulau Sumbawa; dan
- d) Kabupaten Bima Timur, usul pemekaran dari Kabupaten Bima di wilayah bagian timur.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru. Sehubungan dengan itu, perkembangan usulan Daerah Otonom Baru di Provinsi NTB dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kebijakan pemerintah dalam hal ini Dewan Pertimbangan Daerah terhadap pemekaran daerah otonom sampai saat ini masih moratorium karena kondisi keuangan Negara sedang mengalami defisit.
- b) Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap daerah otonom baru yang telah terbentuk sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 283 daerah. Karena terbentuknya daerah ini menyisakan masalah besar terkait dengan aset, batas daerah, dokumen, peralatan, personil (P3D).
- c) Sampai saat ini terdapat 242 usulan daerah otonom baru yang diterima, terdiri dari 88 daerah ditambah dengan yang terbaru sebanyak 154 daerah.
- d) Pemerintah dalam tiga tahun kedepan akan focus pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 pemilihan presiden.
- e) Terkait dengan RPP Daerah Otonom Baru, saat ini sedang digodok dan sudah harmonisasi tahap pertama, namun masih menunggu hasil kesepakatan lintas kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Mensesneg. Masih ada tarik ulur karena masih ada masukan dari Kementerian Lembaga seperti BIG, Kementerian Keuangan terhadap substansi di RPP.

Untuk fasilitasi proses Pengganti Antar Waktu (PAW) sampai dengan akhir tahun 2017 telah diterbitkan SK Gubernur tentang rekomendasi PAW, administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se NTB. Fasilitasi pengganti antar waktu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 92. Fasilitasi Pengganti Antar Waktu Tahun 2017

No	Kegiatan	Uraian	Keterangan
1	Memfasilitasi Rekomendasi PAW	Keputusan Gubernur No.171-343 tanggal 4 April 2017 Keputusan Gubernur No.171-3-398 tanggal 2 Mei 2017 Keputusan Gubernur No.171-3-440 tanggal 8 Mei 2017 Keputusan Gubernur No.171/615/2017 Keputusan Gubernur No.171/670/2017	5 SK Telah diproses: - 1 Provinsi - 4 Kab/Kota Masih Dalam Proses : 3 Provinsi
2	Penyelesaian Adm. Kepala Daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB	Izin Cuti Umrah Tanggal 5/6/2017 No. 090/156/Pem/2017 Tanggal 6/6/2017 No. 090/157/Pem/2017 Tanggal 8/3/2017 No. 100/52/Pem/2017 Tanggal 8/3/2017 No. 100/53/Pem/2017 Tanggal 28/2/2017 No. 100/26/Pem/2017 Tanggal 17/2/2017 No. 100/019/Pem/2017 Tanggal 24/5/2017 No. 090/155/Pem/2017 Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Tanggal 8/11/2017 No. 099/278/Pem/2017 Tanggal 17/10/2017 No. 099/255/Pem/2017	11 SK

No	Kegiatan	Uraian	Keterangan
		Tanggal 31/8/2017 No. 099/207/Pem/2017 Tanggal 12/6/2017 No. 190/150/Pem/2017 Izin Berobat ke Luar Negeri Tanggal 22/2/2017 No. SK No : 100/20/Pem/ 2017	1 SK

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2017

2.1.3.4.1.5 Biro Perekonomian

Capaian kinerja Biro Perekonomian mengacu pada upaya untuk meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian sebagai fasilitator dan koordinator pelaksana program pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian Provinsi NTB. Program yang telah dilaksanakan antara lain pengendalian inflasi daerah, Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah, dan Peningkatan iklim investasi dan realisasi invetasi.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu dari indikator RPJMD, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 93. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017

INDIKATOR	2016	2017		TARGET 2018
		TARGET	REALISASI	
Pertumbuhan Ekonomi non Tambang (%)	5,97	6,00 – 6,25	7,10	6,25 - 6,50

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 kinerja perekonomian Provinsi NTB meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi non tambang tahun 2016 mencapai 5,97 persen, dan tahun 2017 sebesar 7,10 persen, target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 6,00 – 6,25 sudah terlampaui. Pertumbuhan ekonomi NTB dan Nasional (non tambang) tahun 2014 - 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 94. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Tahun 2014 – 2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi NTB (Non Tambang)	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2014	6,15	5,01
2015	5,62	4,73
2016	5,71	5,02
2017	7,1	5,19

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2014 - 2017 selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi makro di Provinsi NTB, yang menunjukkan setiap sektor lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 95. PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan 2017

No	Lapangan Usaha	PDRB (Milyar)		Laju Pertumbuhan
		2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.587	20.880	6,60
2	Pertambangan dan Penggalian (bijih logam)	24.501	19.635	(19,86)
	Pertambangan dan Penggalian (tanpa bijih logam)	2.692	2.879	6,95
3	Industri Pengolahan	3.971	4.207	5,93
4	Pengadaan Listrik , Gas	75	78	4,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	69	72	4,61
6	Konstruksi	8.414	9.055	7,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.148	12.112	8,64
8	Transportasi dan Pergudangan	5.919	6.345	7,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.545	1.663	7,61
10	Informasi dan Komunikasi	1.986	2.158	8,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.796	3.075	9,98
12	Real Estate	2.502	2.678	7,05
13	Jasa Perusahaan	149	158	5,87

No	Lapangan Usaha	PDRB (Milyar)		Laju Pertumbuhan
		2016	2017	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.492	4.641	3,30
15	Jasa Pendidikan	3.813	4.062	6,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.705	1.826	7,07
17	Jasa Lainnya	1.865	2.002	7,35
PDRB		94.538	94.645	0,11
PDRB (tanpa bijih logam)		72.729	77.889	7,10

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi sebesar 9,98 persen diikuti secara berurutan oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi 8,66 persen, perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai laju pertumbuhan 8,64 persen.

Pembangunan Resort Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, beroperasinya pabrik gula di Dompu, pembangunan bendungan, pembangunan pelabuhan Gili Mas dan rencana beroperasinya pembangkit tenaga listrik, akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB di masa yang akan datang, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Biro Perekonomian sudah melaksanakan program kegiatan penataan kebijakan perusahaan daerah dan BUMD, monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi NTB berjumlah 12 perusahaan terdiri dari 8 PD. Bank Perkreditan Rakyat NTB dan 4 BUMD. Dari 8 PD. Bank Perkreditan Rakyat yang ada dilihat dari indikator CAMEL (capital, aset, management, equity, liquiditas), terdapat 7 PD. Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan sehat dan 1 PD. Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan kurang sehat (PD. BPR NTB Lombok Timur) disebabkan besarnya kredit macet. Keempat BUMD semuanya telah menyetorkan deviden, sebagai kontribusi PAD kepada Pemerintah Provinsi NTB. Daftar Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 96. Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2017

NO	PERUSAHAAN DAERAH DAN BUMD	KATEGORI
1	PT. Bank NTB	Sehat
2	PT. GNE	Sehat
3	PT. DMB	Sehat
4	PT. Jamkrida NTB Bersaing	Sehat
5	PD. BPR NTB Kota Mataram	Sehat
6	PD. BPR NTB Lombok Barat	Sehat

NO	PERUSAHAAN DAERAH DAN BUMD	KATEGORI
7	PD. BPR NTB Lombok Tengah	Sehat
8	PD. BPR NTB Lombok Timur	Kurang Sehat
9	PD. BPR NTB Sumbawa Barat	Sehat
10	PD. BPR NTB Sumbawa	Sehat
11	PD. BPR NTB Dompu	Sehat
12	PD. BPR NTB Bima	Cukup Sehat

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2017

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang bersumber dari kontribusi deviden Perusahaan Daerah dan BUMD selama tiga tahun mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2- 97. Deviden Dari Perusahaan Daerah dan BUMD Provinsi NTB Tahun 2015-2017

No	Perusahaan Daerah Dan BUMD	Deviden		
		2015	2016	2017
1	PT. Bank NTB	48.904.261.963	59.958.510.102	62.065.732.074
2	PD. BPR NTB	8.121.158.642	11.631.764.969	11.305.220.112
3	PT. Gerbang NTB Emas	750.000.000	1.000.000.000	745.473.000
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	88.761.211	100.634.661	100.634.661
5	PT. Jamkrida NTB Bersaing	-	136.702.012	437.998.804
6.	PT. DMB	-	-	89.188.168.000
	Jumlah	57.864.181.816	72.827.611.744	163.843.226.651

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2017

Memperhatikan kontribusi PAD yang bersumber dari deviden Perusahaan Daerah dan BUMD tahun 2015 sebesar Rp.57.864.181.816,- tahun 2016 sebesar Rp.72.827.611.744,- dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp.163.843.226.651 atau meningkat sebesar Rp.91.015.614.907 atau 124,97 persen. Dari 6 Perusahaan Daerah dan BUMD yang memiliki peningkatan tertinggi selama tiga tahun adalah PT. Bank NTB.

2.1.3.4.1.6 Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada tahun 2017 Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota se-NTB serta organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi. Unit Layanan Pengadaan Provinsi NTB yang berada di Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa

pemerintah lingkup Provinsi NTB, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN sejumlah 414 paket (15%) lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam program prioritas RPJMD, sebagaimana tabel berikut.

*Tabel 2- 98. Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017
Sumber dana APBD Provinsi NTB*

No	Kegiatan	2016		2017	
		Jumlh Paket Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Jumlh Paket Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang	294	723.926.308.778	353	865.179.550.716
	Terdiri dari :				
	Jasa Konsultansi	87	25.468.821.000	82	31.807.637.997
	Jasa Konstruksi	129	549.687.290.877	182	756.485.987.072
	Pengadaan Barang	64	66.701.213.265	85	74840..925.647
	Jasa Lainnya	14	19.141.337.700	4	2.045.000.000
2.	Jumlah Kontrak dari 353 paket lelang adalah sebesar	660.998.662.842		806.218.128.205	
3.	Efisiensi dari 353 paket kegiatan yang di lelang	62.927.645.936		58.961.422.511	
4.	Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang	8,69 %		6,81 %	

Sumber : Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi NTB, 2017

Selain yang bersumber dari dana APBD, ULP Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB juga melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBN dengan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 99. Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017
Sumber Dana APBN Provinsi NTB

No	Kegiatan	2016		2017	
		Jumlah Paket Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)	Jumlh Paket Kegiatan	Besar Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang Tahun	55	72.887.990.000	61	191.564.938.260
	Terdiri dari :				
	a. Jasa Konsultansi	7	3.645.498.000	0	0
	b. Jasa Konstruksi	17	24.895.175.000	1	3.451.364.000
	c. Pengadaan Barang	26	33.135.522.000	47	179.809.399.301
	d. Jasa Lainnya	5	2.705.789.000	13	8.304.174.959
2.	Jumlah Kontrak dari 61 paket lelang adalah sebesar	64.381.984.000		184.365.442.290	
3.	Efisiensi dari 61 paket kegiatan yang di lelang	8.505.667.100		7.199.495.970	
4.	Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang	11,67 %		3.76 %	

Sumber : Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi NTB, 2017

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa perlu didukung sumberdaya manusia yang memadai, sehingga pada tahun 2017 Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan MCAI telah memfasilitasi aparatur yang berada di Unit Layanan Pengadaan untuk mengikuti bimbingan teknis sebanyak 18 orang, pendidikan dan pelatihan 10 orang dan sosialisasi aturan-aturan yang ada sebanyak 24 orang.

Kualifikasi tenaga pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang memiliki sertifikat sebanyak 18 orang, dan telah menjadi fungsional pengelola barang dan jasa sebanyak 11 orang. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB masuk dalam salah satu ULP percontohan di Indonesia.

2.1.3.4.1.7 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Peringatan hari besar Islam Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tarawih, Idul fitri, idul adha, tahun baru hijriah, qurban.
- Penyelenggaraan Pemberangkatan Calon Jamah Haji (CJH) dan Pemulangan Jamaah Haji (JH) Jumlah Calon Jamaah Haji yang diberangkatkan dari Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2017 sebanyak 4.504 jamaah.
- Peserta STQ provinsi sebanyak 32 orang telah melalui seleksi dan tersaring sebanyak 16 orang untuk selanjutnya dikirim ke tingkat nasional di Tarakan, Kalimantan Utara. Provinsi NTB mendapat peringkat 10 besar dari 34 provinsi.
- Pemilihan sekolah sehat tingkat provinsi, terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP dan SMA. Dari 40 sekolah yang dinilai, terseleksi 12 sekolah yang dinilai paling sehat dan bersih.

2.1.3.4.1.8 Biro Humas dan Protokol

Biro Humas dan Protokol pada tahun 2017 telah melakukan 794 kali kerjasama publikasi melalui berbagai media massa cetak dan elektronik baik media lokal maupun media nasional untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan kegiatan pimpinan. Dalam rangka memperkuat publikasi informasi, secara rutin mengirim rilis berita dan mengadakan jumpa pers, dengan memanfaatkan kemajauan teknologi informasi dan komunikasi melalui website Biro Humas dan protokol, youtube serta media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram.

Pelibatan Event Biro Humas dan Protokol dalam event berskala nasional dan internasional khususnya dari pengaturan protokoler, poses pemberitaan, dan pendokumentasian diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2- 100. Event Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2017

No	Event	Skala	Waktu
1	Seminar Internasional Al-Daurah Al-Ilmiah Al-Dauliah	Internasional	Februari
2	Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-43 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2017	Nasional	Maret
3	Tour de Mandalika	Internasional	April
4	Musyawarah Nasional (Munas) I Himpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI)	Nasional	April
5	Seminar nasional dari Nadhatul wathan untuk Indonesia	Nasional	April
6	Rinjani 100 (event Lomba lari)	Internasional	April

No	Event	Skala	Waktu
7	Djarum Sirkuit Nasional Li Ning NTB Open 2017	Nasional	Oktober
8	Konferensi Internasional Multaqa IV alumni Al Azhar Indonesia	Internasional	Oktober
9	Penyerahan Sertifikat Kawasan Ekonomi Khusus	Nasional	Oktober
10	Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU	Nasional	November
11	Seminar Internasional Pengembangan Ilmu Pakan dan Nutrisi Ternak/International Seminar of Animal Nutrition and Feed Sciences(ISAINI) ke-5 tahun 2017	Internasional	November
12	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia Ke 10 dengan tema “Peran Perpustakaan Digital Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals 2030”	Nasional	November
13	Bike Solo-Komodo (SIKOMO)	Internasional	November
14	Symposium Internasional AKECOP	Internasional	Desember
15	Lomba Desain Poster Maulana Syeikh Meriahkan HUT NTB (pserta dari dalam dan luar negeri)	Internasional	Desember
16	Pengajian Milad Muhammadiyah ke-108 Masehi	Nasional	Desember

Sumber: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, 2017

2.1.3.4.1.9 Sekretariat DPRD

Capaian Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2017, sebanyak 19 RAPERDA yang diusulkan diantaranya :

- I. Raperda usul Prakarsa DPRD antara lain:
 1. Raperda tentang Fasilitas Keamanan Transportasi;
 2. Raperda tentang Kepemudaan;
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 5. Raperda tentang Perijinan Usaha Kelautan dan Perikanan;
 6. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB;
- II. Raperda usul Prakarsa Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:

1. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Raperda tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah;
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PT. Jamkrida NTB Bersaing;
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta;
5. Raperda tentang Mediasi;
6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB;
7. Raperda tentang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Agropolitan Alas Utan;
8. Raperda tentang Pengelolaan Hutan;
9. Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah;
11. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah;
12. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
13. Raperda tentang Pengelolaan Terminal.

Hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, 16 Raperda telah ditetapkan menjadi Perda dan Raperda yang memerlukan pembahasan lanjutan di tahun 2019. 16 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, antara lain:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerinthan Berbasis Sistem Elektronik;
4. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
6. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
7. Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah;
9. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi;
10. Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Evaluasi Raperda Provinsi NTB tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017;
11. Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

12. Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
13. Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
14. Perda Nomor 14 Tahun 2018 Irigasi;
15. Perda Nomor 15 Tahun 2018 Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Tipe B Provinsi NTB;
16. Perda Nomor 16 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Aspirasi masyarakat yang secara umum disampaikan dalam reses dari delapan daerah pemilihan, disimpulkan sebagai berikut :

- I. Daerah pemilihan I (Dapil I) Kota Mataram
 - 1) Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, jalan irigasi, drainase, saluran air bersih, talud, pembangunan gorong-gorong dan pembangunan ruang kelas baru untuk madrasah, sarana olah raga dan MCK;
 - 2) Bantuan peralatan bagi ibu-ibu PKK berupa alat catering, alat pembuat jajan dan alat penggilingan daging, alat qosidah, bantuan kepada masyarakat berupa sound system, wireless, terop dan kursi;
 - 3) Bantuan dana untuk perbaikan masjid, perbaikan musholla, bantuan modal bagi pedagang bakulan, pedagang kaki lima, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha produktif;
 - 4) Perlu adanya bantuan pemerintah daerah untuk melestarikan budaya-budaya lokal dan kesenian daerah;
 - 5) Masalah sampah menjadi problem bagi masyarakat terutam terkait pengangkutan sampah yang tidak setiap haridan kurangnya lahan pembuangan sampah sementara (TPS);
 - 6) Memberikan perhatian khusus tentang tanah pemakaman;
 - 7) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.
- II. Daerah pemilihan II (Dapil II) Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara) membutuhkan :
 - 1) Pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, jalan usaha tani, saluran irigasi, drainase, pengaspalan jalan, talud, rabat jalan, pemasangan batu bronjong, pompa air, sumur dangkal, penimbunan dan pengerasan jalan;
 - 2) Bantuan di bidang pendidikan berupa gedung sekolah untuk PAUD;
 - 3) Bantuan dan renovasi tempat ibadah (masjid, musholla dan TPQ);
 - 4) Bantuan bibit peternakan berupa bibit sapi, bibit ayam dan bibit kambing;
 - 5) Bantuan dalam bidang pertanian berupa alat pertanian (handtractor) dan pengadaan sumur bor untuk pertanian;
 - 6) Bantuan modal usaha bagi pedagang bakulan, pedagang kaki lima, pengrajin meubelair, pandai besi, pengrajin ketak, pengrajin bambu, pengrajin penjalin, kelompok usaha bersama, kelompok jahit, tata rias, tata boga dan kelompok usaha produktif;

- 7) Bantuan alat kesenian berupa rabana, gong, alat drumband, sound system, pakaian adat dan bantuan alat komunikasi orari (HT);
 - 8) Bantuan gerobak, kendaraan roda tiga untuk angkut sampah, terop, kursi, kostum sepakbola, alat catering ibu-ibu pkk dan mesin jahit;
 - 9) Bantuan peralatan perbengkelan;
 - 10) Perhatian dan bantuan sosial bagi pesantren di NTB;
 - 11) Pelatihan pemuda untuk mengurangi pengangguran;
 - 12) Penyuluhan bagi perkawinan anak dan remaja putri;
 - 13) Bantuan paket sembako untuk anak yatim, lansia dan masyarakat kurang mampu;
 - 14) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian unggulan desa, sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi unggulan, sarana dan prasarana pembinaan generasi muda kelompok sepakbola, volly dan lain-lain, sarana dan prasarana keagamaan;
 - 15) Belum meratanya akses BPJS khususnya bagi kelompok miskin dan rentan seperti kelompok di pelosok, anak dan keluarga buruh migran dan disabilitas;
 - 16) Perhatian pemerintah Provinsi NTB kepada rakyat yang membutuhkan sambungan listrik gratis dan listrik murah yang dibiayai dengan dukungan APBD Provinsi;
 - 17) Perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan potensi SDM bagi para pemuda pemudi yang memiliki kemampuan atau keahlian;
 - 18) Bantuan Rumah Layak Huni;
 - 19) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.
- III. Daerah pemilahan III (Dapil III) Kabupaten Lombok Timur Bagian Utara membutuhkan :
- 1) Bantuan dalam bidang kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan (bpjs bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu);
 - 2) Bantuan dalam bidang pendidikan dengan menggratiskan spp sma sederajat dan bea siswa serta peningkatan kesejahteraan untuk pelaku pendidikan (guru honorer di sekolah negeri maupun swasta);
 - 3) Bantuan modal usaha untuk kelompok masyarakat/pemuda serta kelompok usaha ekonomi yang produktif;
 - 4) Perlunya pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, jalan usaha tani, perpipaan, jembatan, irigasi, beronjong, pengaspalan jalan, bak penampungan dan rabat jalan, pembangunan mesjid di dusun denggen dan dusun batu mulut, jalan lingkungan dari denggen ke kembangsari, jalan dari lingkungan montong gerung ke batu mulut, talud dan irigasi perbaikan reban paok rusak akibat banjir;
 - 5) Perlunya bantuan dana untuk perbaikan masjid, musholla, tpq, tpa, pondok pesantren, tahfiz qur'an serta sarana dan prasarana (sound system dll);

- 6) Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk meberdayakan desanya;
- 7) Perlunya bantuan handtractor, mesin panen, alat elektronik, alsintan (alat mesin pertanian), perlengkapan alat olah raga, lapangan sepak bola, futsal dan alat-alat pendakian gunung;
- 8) Perlunya bantuan pertanian, peternakan, perikanan dan nelayan kepada kelompok usaha kecil yang ada di Lombok Timur;
- 9) Perlunya bantuan terop, kursi, tikar untuk kegiatan sosial masyarakat yang ada di lombok timur;
- 10) Perlunya bantuan dana untuk rehab rumah tidak layak huni yang ada di Lombok Timur;
- 11) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.

IV. Daerah pemilahan IV (Dapil IV) Kabupaten Lombok Timur Bagian Selatan membutuhkan :

- 1) Bantuan dalam bidang perikanan berupa pengadaan mesin ketinting dan jaring;
- 2) Perlunya bantuan dana untuk usaha pedagang kaki lima, pedagang bakulan, masyarakat kurang mampu, anak yatim dan orang tua jompo;
- 3) Perlunya pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, vavingisasi/perabatan jalan lingkungan, saluran irigasi melalui pemasangan viva untuk pengadaan air bersih, pembuatan sumur bor dan pembangunan embung baru;
- 4) Perlunya bantuan dana untuk perbaikan masjid dan musholla serta sarana dan prasaran tpq dan lain-lain;
- 5) Perlunya bantuan di bidang pertanian berupa pengadaan mesin perontok padi dan di bidang peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam;
- 6) Perlunya pemerataan bantuan baik bantuan modal, bantuan peralatan, dan pembinaan terhadap kelompok tani, kelompok ternak, kelompok usaha bersama, pengusaha mikro kecil menengah dan koperasi;
- 7) Bantuan dalam bidang pertanian berupa bantuan peralatan pertanian dan di bidang peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam;
- 8) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.

V. Daerah pemilahan V (Dapil V) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan :

- 1) Pembangunan infrastruktur khususnya daerah kena banjir berupa peninggian drainase, talud, penataan bantahan kali untuk mengganti rumah warga yang hanyut dan penguatan tebing sungai;
- 2) Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, pengaspalan jalan, drainase pinggir jalan negara,

pemasangan paving block, pembangunan tempat pembuangan akhir sampah, pembukaan jalan usaha tani, pembuatan jalan dan jembatan pada wilayah objek wisata dan pembangunan cek dam/embung/irigasi untuk kesulitan air bersih;

- 3) Pembangunan dan rehab masjid serta pengembangan sarana penunjang TPQ;
- 4) Bantuan dana untuk pedagang bakulan, pedagang kaki lima, pengrajin kelompok tenun, kelompok usaha bersama dan bantuan dana untuk posyandu;
- 5) Bantuan alat produksi pertanian, peternakan, perbengkelan dan pertukangan;
- 6) Bantuan pengadaan alat katering, alat pembuatan kue, bantuan sembako, pengadaan kostum olahraga, alat peraga untuk PAUD, alat qasidah rabana, alat pembuat kripik, bantuan terop, kursi dan pengadaan sound system portabel;
- 7) Bantuan mesin pompa air, handtractor, alat semprot hama, mesin ketinting, mesin penggilingan padi, mesin pengering gabah, alat penyemprotan tanaman, mesin bor, mesin genset dan mesin pompa air;
- 8) Bantuan di bidang perikanan berupa kontainer dan pembuatan dermaga untuk para nelayan;
- 9) Bantuan untuk bidang pendidikan berupa pengadaan tanah untuk TK PGRI, pembangunan dan rehab sekolah-sekolah. Peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan perlengkapan sekolah;
- 10) Pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kerja bagi pemuda dan remaja untuk mengurangi pengangguran;
- 11) Perlunya pemasangan aliran listrik baik itu dengan program listrik murah untuk rumah tangga miskin maupun PLTS untuk sarana-sarana umum;
- 12) Permohonan bantuan dana untuk pengadaan buku nikah;
- 13) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.

VI. Daerah pemilahan VI (Dapil VI) Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu membutuhkan :

- 1) Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan Provinsi, perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, rabat gang, saluran air bersih, pengerasan jalan, pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, drainase, pembangunan TK, pembangunan PAUD, pemagaran pemakaman umum, pemasangan bronjong, bantuan pembuatan sumur bor;
- 2) Bantuan di bidang perikanan dalam hal pengadaan genset untuk nelayan, freezer, pukot, cool box, mesin ketinting;
- 3) Perlunya bantuan alat kesenian berupa wireless, sound system, rabana qasidah dan alat musik marawis;
- 4) Bantuan alat kesehatan berupa kendaraan ambulan dan tenaga medis;

- 5) Bantuan sarana dan prasarana olah raga berupa pembuatan lapangan olahraga, pengadaan fasilitas olahraga;
- 6) Bantuan bibit peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam;
- 7) Bantuan di bidang pertanian berupa pengadaan sumur bor untuk pertanian, pengadaan hand traktor, mesin pertanian, hand sprayer, pompa air, mesin perontok padi, bantuan alat pemipil jagung, pengadaan bibit pertanian yaitu bibit bawang, bibit jagung dan bibit padi serta mengatasi kelangkaan pupuk;
- 8) Bantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan perbengkelan berupa pengadaan mesin jahit, usaha perbengkelan, roda tiga dan alat-alat pertukangan;
- 9) Bantuan dana untuk kelompok usaha bersama, usaha produktif, pedagang kaki lima, pedagang bakulan, lansia dan kelompok usaha mandiri;
- 10) Bantuan kursus untuk pemuda dan masyarakat untuk mengurangi pengangguran;
- 11) Bantuan fasilitas umum untuk masyarakat berupa pengadaan terop, toilet untuk masyarakat tidak mampu, penembokan pagar tempat pemakaman umum;
- 12) Pembangunan dan rehab masjid serta TPQ;
- 13) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.

VII. Daerah pemilahan VII (Dapil VII) Kabupaten Lombok Tengah Bagian Utara membutuhkan :

- 1) Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, saluran irigasi, jalan usaha tani, pembuatan dam, rehabilitasi dan embung rakyat, penataan jalan lingkungan, untuk menadah air guna mengairi lahan pertanian, rabat jalan dan pembersihan lingkungan berupa saluran pembuangan air limbah (SPAL);
- 2) Pengembangan usaha kecil menengah ke bawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata;
- 3) Pelatihan dan bantuan peralatan bagi remaja seperti mesin percetakan, mesin press batako, mesin jahit, terop dan lain-lain;
- 4) Perlunya bantuan alat teknologi pertanian yang memadai untuk meningkatkan hasil pertanian berupa hand tractor, hand sprayer, mesin pompa air, mesin tanam padi, dan mesin panen padi;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana bagi yayasan pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar berupa pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan peralatan komputer, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, efisien, dan berbasis komputer sesuai yang diharapkan;

- 6) Pembinaan mental spritual serta kewirausahaan bagi pemuda di beberapa desa dan kelurahan untuk menghindari pemuda dari pergaulan negatif, miras dan narkoba;
- 7) Bantuan modal usaha untuk pedagang kaki lima, pedagang bakulan, UMKM, kelompok usaha produktif, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha tani;
- 8) Pembangunan dan rehab masjid serta TPQ serta sarana dan prasarana penunjang TPQ (mukena, sound system dan lain-lain);
- 9) Bantuan dalam bidang perkebunan berupa bibit buah-buahan seperti jeruk, manggis dan kelengkeng;
- 10) promosi potensi pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
- 11) Pembangunan instalasi air bersih (PDAM) dan sumur bor atau air bawah tanah untuk mengatasi persoalan kekurangan air bersih;
- 12) Bantuan dalam bidang kesehatan berupa peningkatan pelayanan kesehatan;
- 13) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.

VIII. Daerah pemilahan VIII (Dapil VIII) Kabupaten Lombok Tengah Bagian Selatan membutuhkan :

- 1) Pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembuatan jembatan, perbaikan saluran irigasi, pembangunan bendungan, pengecekan dam, pembuatan sumur bor, pembuatan saluran air bersih, pengerasan jalan, pipanisasi, pembuatan talud, bantuan rehab rumah tidak layak huni;
- 2) Bantuan dibidang peternakan berupa kerbau;
- 3) Bantuan pengembangan tenun ikat;
- 4) Bantuan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air bersih;
- 5) Bantuan ekonomi, modal dan alat kelompok tani;
- 6) Bantuan modal dan pemasaran kepada kelompok pengembangan jagung, palawija dan kacang-kacangan;
- 7) Bantuan dana untuk pengelolaan masjid dan mushalla serta fasilitas penunjang lainnya;
- 8) Pembangunan dan penataan lingkungan tempat pemakaman umum;
- 9) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri.

2.1.3.4.1.10 Badan Penghubung Daerah

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB selain melaksanakan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga melaksanakan koordinasi pemasaran pariwisata. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, promosi budaya dan promosi potensi daerah NTB yang rutin diselenggarakan di provinsi lain dan di dalam Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Selama tahun 2018 Badan Penghubung Provinsi NTB telah melakukan silaturahmi dan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan

anggota organisasi sosial serta kemasyarakatan se-Jabodetabek. Selain itu Badan Penghubung juga melaksanakan fungsi promosi budaya-budaya dan mengenalkan potensi pariwisata NTB di Jakarta. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pentas Seni Budaya NTB. Dalam rangka Liga Dangdut Indonesia menampilkan Atraksi Musik Tradisional Gendang Beleg dari Daerah Lombok;
2. Pentas Seni Budaya Daerah NTB, Dalam rangka Hari raya Imlek menampilkan Pawai Atraksi Musik tradisinal Gendang Beleg dari Daerah Lombok;
3. Pentas Seni Budaya Daerah NTB dengan tema **MOZAIK BUDAYA** menampilkan tarian Atraksi Gendang Beleg dan Drama tari Putri Mandalika;
4. Pentas Seni Budaya Daerah NTB, Menampilkan Pawai Atraksi tari dan musik Tradisional Gendang Beleg dari Daerah Lombok;
5. Pentas Seni Budaya NTB Konser Iwan Fals **Situs Budaya NTB LOMBOK & BIMA** Menampilkan Tari Atraksi Musik Tradisional Gendang Beleg, tari Wura Bongi Monca, tari Gandrung, dan tari Lenggo;
6. Gelar Seni Budaya NTB, Paket Acara Khusus.dengan Menampilkan Drama Kolosal dengan tema **PUTRI MANDALIKA** dari Kabupaten Lombok Tengah;
7. Dalam rangka HUT TMII ke-43 Anjungan NTB ikut mengisi kegiatan Pameran Expo pameran produk Unggulan: Mutiara, Kain Tenun ikat, Madu, dll;
8. Dalam rangka HUT TMII ke-43 Anjungan NTB ikut serta kegiatan Festival Kuliner menampilkan masakan khas Daerah Bima NTB yaitu Palu Mara, Londe isi;
9. Dalam rangka HUT TMII ke-43 Anjungan NTB ikut melaksanakan kegiatan Pentas dari Daerah Lombok dengan judul **Gelar Karya Anak Berprestasi** menampilkan atraksi tari Gendang Beleg, Gandrung dll dari Daerah Lombok;
10. Dalam rangka HUT TMII ke-43 Gelar Citra Budaya Tradisi Melaksanakan Pentas Seni Budaya NTB dari Daerah Bima menampilkan Tari Wura bongi monca, pakaian Adat Rimpu;
11. Pentas Seni Budaya NTB menampilkan atraksi tari Gendang Beleg dan tari Kembang Sembah;
12. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan menampilkan Pawai Atraksi tari Gendang Beleg dari Daerah Lombok NTB;
13. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Petival Rimpu menampilkan Pawai Atraksi dan tari Gendang Beleg dari Daerah Lombok;
14. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka *launching* Bulan Lombok Sumbawa menampilkan Tari Japin Bima dan tari Rasate Tanjung menangis dari Daerah Sumbawa NTB;

15. Pentas Seni Budaya NTB menampilkan Atraksi Tari Gendang Beleq dari Daerah Lombok NTB;
16. Dalam rangka Audensi Tokoh Masyarakat NTB se-Jabodetabek sekaligus Nonton Bareng Film Dokumenter Keagungan Cinta MAULANA SYAIKH;
17. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Parade Tari Nusantara menampilkan Tari Wadu Ntanda Rahi dari Bima;
18. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Asean Game 2018 menampilkan atraksi tari dan Gendang Beleq dari Daerah Lombok;
19. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Promosi Budaya menampilkan atraksi tari dan Gendang Beleq dari Daerah Lombok;
20. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Asean Game 2018 menampilkan atraksi tari dan tradisional Gendang Beleq dan Tari nguri dari Sumbawa;
21. Pentas Seni Budaya NTB menampilkan Pawai atraksi tari dan Gendang Beleq Iring – iringan Pakaian adat Pengantin Lombok;
22. Pentas Seni Budaya Daerah NTB menampilkan; Pawai Atraksi tari dan musik Gendang Beleq dari Daerah Lombok;
23. Pentas Seni Budaya Daerah NTB menampilkan Pawai Atraksi tari dan musik Gendang Beleq dan tari Nguri;
24. Silaturahmi Dialog Masyarakat NTB se-Jabodetabek di Anjungan NTB TMII oleh Badan Penghubung Daerah NTB yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan Tokoh Masyarakat NTB.
25. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Paket Acara Khusus **“Silaturahmi Budaya Lombok Sumbawa Bangkit”**. Menampilkan Drama Tari Rasate Tanjung Menangis dari Daerah Sumbawa NTB yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, para tamu Undangan, Pejabat Daerah dan Duta besar Negara Sahabat.
26. Pentas Seni Budaya NTB dalam rangka Parade Lagu Daerah TMII Gita Permata Nusantara 2018 menampilkan Lagu Daerah dari Bima NTB.

Dalam melaksanakan fungsi promosi budaya dan mengenalkan potensi pariwisata NTB pada tahun 2018 jumlah pengunjung di anjungan TMII mencapai 61.046 orang, yang terdiri dari wisatawan mancanegara 753 orang, wisatawan nusantara 53.920 orang dan pelajar/mahasiswa sebanyak 6.373 orang.

2.1.3.4.2 Urusan Inspektorat

Berdasarkan hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi NTB, terdapat total kerugian negara/daerah sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp.187.285.025.005,20 dan yang sudah dikembalikan ke kas negara/daerah sebesar Rp.151.381.908.186,33. Adapun sisa total kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan perlu ditindaklanjuti sebesar Rp.35.903.116.818,87.

Total sisa kerugian negara/daerah tersebut terlebih dahulu akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui kegiatan operasi tindaklanjut dan apabila tidak dapat ditindaklanjuti maka akan dilimpahkan ke Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi NTB. Hasil sidang majelis (TP-TGR) akan menerbitkan Surat

Kuasa Khusus (SKK) bagi entitas yang sudah ditetapkan oleh Majelis untuk diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam rangka meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2018 telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tata kelola (Governance) Organisasi Perangkat daerah (OPD). Selain itu Pemerintah Provinsi NTB juga membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada sisi lain untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi NTB telah melakukan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Internal Auditor Capability Model/IACM-APIP sehingga kapabilitas APIP Inspektorat yang sebelumnya Level II menjadi Level III, yang artinya Inspektorat dipandang telah mampu menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada sistem tata kelola (Governance), Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal pada entitas.

2.1.3.4.3 Urusan Perencanaan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan, Bappeda telah melakukan revisi RPJMD 2013 – 2018 sesuai dengan regulasi pemerintah pusat dan hasil evaluasi selama 3 tahun. Revisi RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Penyesuaian arah kebijakan dan strategi serta program prioritas pembangunan untuk mendorong percepatan pencapaian Indikator RPJMD;
- 4) Penyesuaian Nomenklatur dan target indikator kinerja program prioritas dan Indikator Kinerja Daerah;
- 5) Penyesuaian sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 6) Penyesuaian sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 7) penyesuaian/pemutakhiran data dan informasi, penyesuaian kerangka pendanaan, penyelarasan dengan Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: Menambahkan isu strategis nasional terkait Isu SGD's dan Isu Nawacita.

Sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi bidang perencanaan, Bappeda bertanggungjawab atas indikator kinerja keselarasan program RKPD terhadap RPJMD. Capaian tahun 2017 adalah 99,03 persen, artinya bahwa telah melampaui dari target 95 persen. Penerapan sistem informasi perencanaan (e-

planning/entebePLAN) yang dibangun merupakan upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 7 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang, e-KUA PPAS, e-Pokir, dan e-ASB.

Tahun 2017, Bappeda Provinsi NTB telah terpilih sebagai SKPD terbaik I berdasarkan penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB. Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi, khususnya pemanfaatan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan, Bappeda telah mengembangkan inovasi NTB SATU PETA berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website <http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id>. Inovasi tersebut menghantarkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang dinilai mampu melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif.

Untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan kegiatan : (1) Forum SKPD yang bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan SKPD lingkup Provinsi NTB, (2) Sarasehan Pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder yaitu unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan Provinsi NTB (LSM), pihak swasta dan lainnya. (3) Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah momen yang dipergunakan untuk menselaraskan program/kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD (dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang berprestasi), Bappeda berupaya untuk menyamakan pemahaman dengan Biro Organisasi dan Inspektorat terkait SAKIP untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di Provinsi NTB, melibatkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi, dengan narasumber dari Kota Bandung yang telah mampu mencapai nilai SAKIP A berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB. Dalam kegiatan ini sekaligus di-launching aplikasi e-SAKIP.

2.1.3.4.4 Urusan Keuangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut :

2.1.3.4.4.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB bertujuan untuk mewujudkan tatakelola keuangan dan barang milik daerah dengan baik, benar dan lebih tertib. Secara menyeluruh perkembangan anggaran Belanja Daerah dalam APBD selaku SKPD dan SKPKD tahun 2017 dan tahun 2018, menunjukkan penurunan sebesar 5,53 persen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 101. Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB selaku SKPKD Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018	Persentase Bertambah / (Berkurang)
Belanja Tidak Langsung	1.380.184.673.734,04	1.627.098.385.000,90	17,88

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2018

Tabel 2- 102. Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018	Persentase Bertambah / (Berkurang)
Belanja Tidak Langsung	2.757.512.955.077,84	3,029,832,773,415.90	9,88
Belanja Langsung	2.788.893.149.537,92	2,763,339,825,176.83	(0,92)
Jumlah	5.546.406.104.615,76	5,793,172,598,592.73	4,19

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2018

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana data di atas, menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mencapai 4,19%. Dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yang terakomodir dalam belanja langsung adalah sebesar Rp.2.763.339.825.176,83 atau menurun 0,92% dari tahun 2017.

Terkait penetapan APBD Provinsi NTB, berikut data penetapan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2- 103. Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2015 - 2019

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
MURNI						
2015	06-08-2014	22-08-2014	No. 903-3636 Tahun 2014	Nomor 8 Tahun 2014	Nomor 21 Tahun 2014	Tepat waktu
			15-09-2014	22-09-2014	22-09-2014	
2016	04-11-2015	30-11-2015	No. 903-6194 Tahun 2015	Nomor 11 Tahun 2015	Nomor 50 Tahun 2015	Tepat waktu
			18-12-2015	28-12-2015	29-12-2015	

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
2017	11-11-2016	30-11-2016	No.903-10295 Tahun 2016	Nomor 12 Tahun 2016	Nomor 47 Tahun 2016	Tepat waktu
			16-12-2016	21-12-2016	22-12-2016	
2018	21-11-2017	30-11-2017	No. 903-9031 Tahun 2017	Nomor 13 Tahun 2017	Nomor 67 Tahun 2017	Tepat waktu
			22-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	
2019	05-11-2018	27-11-2018	No. 903-8688 Tahun 2018	Nomor 13 Tahun 2018	Nomor 47 Tahun 2018	Tepat waktu
			10-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	
PERUBAHAN						
2014	04-06-2014	28-07-2014	No. 903-3322 Tahun 2014	Nomor 7 Tahun 2014	Nomor 17 Tahun 2014	Tepat waktu
			12-08-2014	15-08-2014	15-08-2014	
2015		11-08-2015	No. 903-5023 Tahun 2015	Nomor 6 Tahun 2015	Nomor 33 Tahun 2015	Tepat waktu
			31-08-2015	04-09-2015		
2016	09-09-2016	30-09-2016	No. 903-9936 Tahun 2016	Nomor 7 Tahun 2016	Nomor 32 Tahun 2016	Terlambat
			18-10-2016	19-10-2016	20-10-2016	
2017	20-07-2017	11-08-2017	No. 903-7656 Tahun 2017	Nomor 8 Tahun 2017	Nomor 29 Tahun 2017	Tepat waktu
			31-08-2017	07-09-2017	07-09-2017	
2018	03-09-2018	14-09-2018	No. 903-7421 Tahun 2018	Nomor 11 Tahun 2018	Nomor 33 Tahun 2018	Tepat waktu
			25-09-2018	28-09-2018	28-09-2019	

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2018

Sedangkan untuk APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 104. Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2015 - 2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	JADWAL PENETAPAN APBD				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	KOTA MATARAM	22-Dec-2014	29-Dec-2015	30-Dec-2016	28-Dec-2017	28-Dec-2018
2	LOMBOK BARAT	1-Dec-2014	17-Dec-2015	28-Dec-2016	27-Dec-2017	27-Dec-2018
3	LOMBOK TENGAH	31-Dec-2014	31-Dec-2015	29-Dec-2016	20-Dec-2107	27-Dec-2018
4	LOMBOK TIMUR	18-Dec-2014	30-Dec-2015	28-Dec-2016	18-Dec-2017	28-Dec-2018
5	LOMBOK UTARA	31-Dec-2014	30-Dec-2015	29-Dec-2016	27-Dec-2017	28-Dec-2018
6	SUMBAWA BARAT	30-Dec-2014	29-Dec-2015	15-Dec-2016	18-Dec-2017	30-Nov-2018
7	SUMBAWA	30-Dec-2014	28-Dec-2015	30-Dec-2016	7-Dec-2017	18-Dec-2018
8	DOMPU	31-Dec-2014	31-Dec-2015	17-Jan-2016	29-Dec-2017	28-Dec-2018
9	BIMA	24-Dec-2014	28-Dec-2015	30-Dec-2016	28-Dec-2017	28-Dec-2018
10	KOTA BIMA	11-Dec-2014	8-Dec-2015	16-Dec-2016	20-Dec-2017	28-Dec-2018

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2018

Terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan 2018 dengan LKPD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan 2017 seluruh Kabupaten/Kota se-NTB telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya dimana seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan opini WTP.

Tabel 2- 105. Opini BK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 - 2017

NO	KAB./KOTA	OPINI LKPD			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kota Mataram	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lombok Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WTP	WTP
5.	Kab. Lombok Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Sumbawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Dompu	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Bima	WDP	WTP	WTP	WTP
10.	Kota Bima	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Provinsi NTB	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2018

2.1.3.4.4.1.1 Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
- 1) Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
 - 2) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 3) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - 4) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
 - 5) Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Untuk itu dokumen RKBMD merupakan indikator pengelolaan BMD yang tertib dari sisi perencanaan. BPKAD Provinsi NTB telah menyusun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 032-962 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 032-497 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018 Tanggal 26 Juni 2018.

- b) Terkait pemindahtanganan BMD, BPKAD Provinsi NTB selaku PPBMD telah melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai dari Kanwil DJKN, dengan hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam proses pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD tahun 2018.

Penilaian terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang telah dilakukan terdiri dari:

- 1) Penilaian BMD Pemerintah Provinsi NTB tahap I terhadap 5 (lima) objek yang terdiri dari Objek di Gili Tangkong, Eks Rumah Jabatan Sekretaris Daerah dan Wisma Giri Putri, Eks Rumah Dinas DPRD Provinsi NTB, Gedung Wanita dan Tanah Kosong Batulayar. Penilaian dilakukan oleh tim penilai dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
 - 2) Penilaian BMD Pemerintah Provinsi NTB tahap II sejumlah 3 (tiga) objek penilaian yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda 4 dan 1 (satu) penilaian terhadap 1 bidang tanah yang dilakukan oleh tim penilai dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
- c) Terkait penghapusan BMD, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 13 SK penghapusan. Data usulan dan penghapusan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 106. Data Penghapusan BMD Yang Telah Dilaksanakan Oleh BPKAD Pada Tahun 2018

No	No SK	Tanggal SK	Tentang	Nilai (Rp)
1	032-141	26 Februari 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Kendaraan Dinas Roda 4	1.483.669.400

No	No SK	Tanggal SK	Tentang	Nilai (Rp)
2	032-144	26 Februari 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa PLTS Komunal dan Lampu	22.175.439.000
3	032-176	27 Februari 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan/ Gedung IGD Lama	3.379.967.000
4	032-263	23 Maret 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan/ Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov NTB	407.803.400
5	032-264	23 Maret 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov NTB	1.554.500.000
6	032-286	4 April 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Tanah dan Bangunan	43.066.158.452,25
7	032-498	26 Juni 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Barang Inventaris Peralatan	9.574.928.941,82
8	032-554	11 Juli 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Tanah, Jalan dan Jembatan	1.145.673.500.854,11
9	032-655	13 Agustus 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan/ Gedung Sekolah	1.377.074.770
10	032-797	5 Agustus 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan Ex Samsat Dompu	153.226.000
11	032-816	15 Nopember 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan/ Gedung	84.126.740
12	032-947	26 Desember 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan	2.165.610.762
13	032-948	26 Desember 2018	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Inventaris Peralatan dan Mesin	4.954.758.476,24

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2018

2.1.3.4.4.2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)

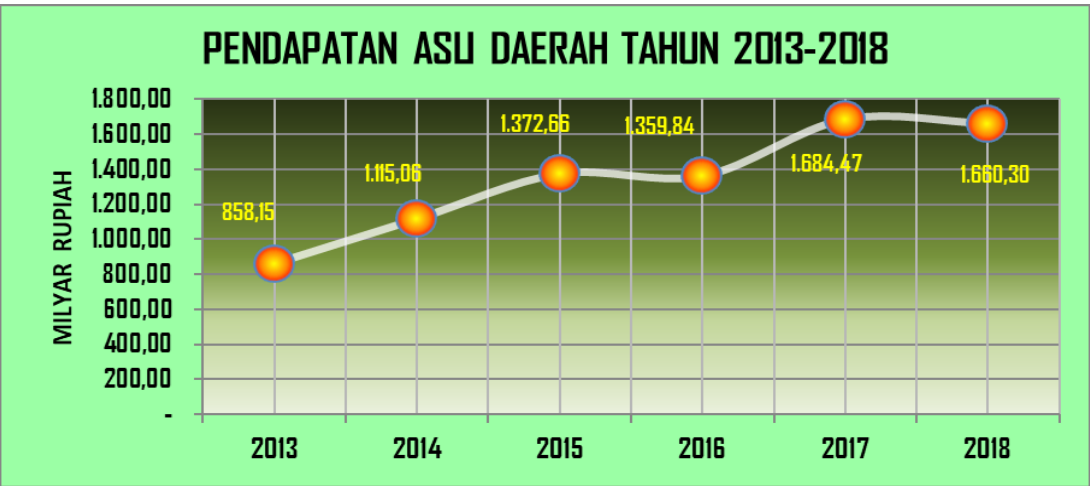
Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang ditangani oleh BAPPENDA Provinsi NTB diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2- 107. Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 - 2018

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH			PERTUMBUHAN		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2013	904.540.290.700	858.154.094.987	94,87	13,15	13,66	103,88
2014	1.194.261.581.800	1.115.060.397.173	93,37	13,78	29,94	217,27
2015	1.420.471.239.378	1.372.661.567.125	96,63	13,64	23,08	169,19
2016	1.450.044.930.319	1.359.844.019.438	93,78	2,09	(0,93)	(44,68)
2017	1.641.688.654.497	1.684.468.709.594	102,61	5,19	23,87	459,97
2018*	1.767.746.421.040	1.660.300.469.938	93,92	7,64	(1,43)	(18,78)

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019, *data fix (audited)

Gambar 2- 35. Perkembangan PAD Tahun 2013-2018 (dalam Milyar rupiah)



Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019, *(non-audited)

Pendapatan Daerah provinsi NTB dari tahun 2013 sampai dengan 2018 meningkat secara berkelanjutan. Pendapatan Daerah tahun 2018 meningkat 107,65% dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013, dimana Pendapatan daerah tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.379.555.590.300,- dan tahun 2018 sebesar Rp.4.941.129.737.194,-. Berikut adalah target dan realisasi komponen pendapatan daerah tahun 2013 sampai dengan 2018.

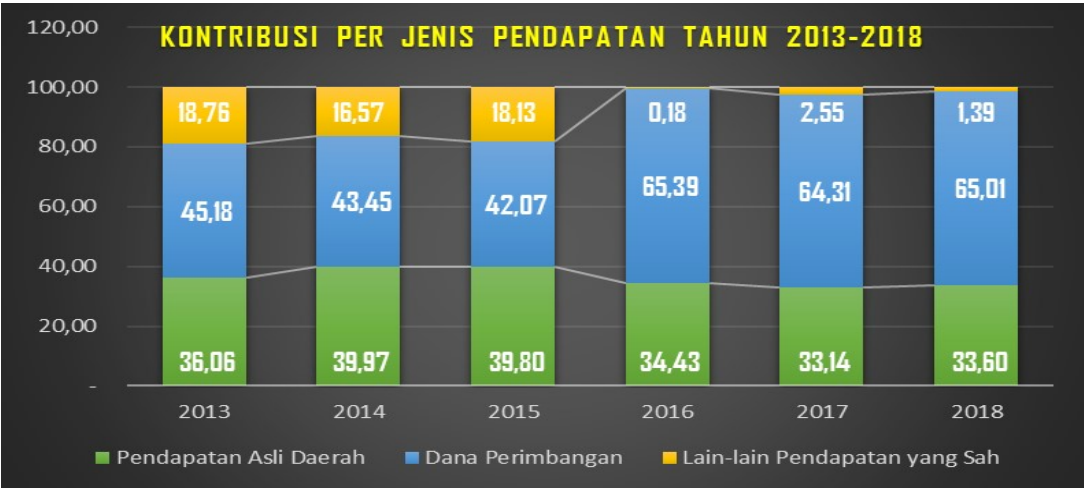
Tabel 2- 108. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 -2018

NO	Tahun	Realisasi (Rp)			
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
1.	2013	858.154.094.987	1.075.004.985.595	446.396.509.718	2.379.555.590.300
2.	2014	1.115.060.397.173	1.212.086.447.141	462.280.397.500	2.789.427.241.814
3.	2015	1.372.661.567.125	1.450.695.264.778	625.228.800.000	3.448.585.631.903
4.	2016	1.359.844.019.438	2.583.032.589.905	7.120.189.000	3.949.996.798.343
5.	2017	1.684.480.179.335	3.268.927.294.306	129.760.001.000	5.083.156.004.899
6.	2018*	1.660.300.469.938	3.212.386.689.010	68.442.578.246	4.941.129.737.194

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019, *data fix (audited)

Total Pendapatan Daerah sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 telah terealisasi sebesar Rp.22.591.851.004.454 atau 96,78% dari total target pendapatan daerah dalam APBD sebesar Rp.23.344.683.086.507,-. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah dengan kontribusi masing-masing komponen dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 2- 36. Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun 2013-2018



Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019, *data fix (audited)

Dari diagram diatas dapat diketahui kontribusi rerata masing-masing komponen pembentuk pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 yakni: PAD rata-rata 36,17%; Bagian Dana Perimbangan rata-rata 54,24%; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 9,60%.

Pertumbuhan PAD setiap tahun selalu meningkat kecuali pada tahun 2016, PAD sempat mengalami penurunan -0,93% disebabkan menurunnya penerimaan dari Pajak Rokok dan PBBKB, namun pertumbuhan PAD kembali meningkat tajam hingga 23,87% pada tahun 2017 akibat tercapainya semua

target pajak daerah dan adanya realisasi bagian laba dari PT. DMB. Namun di tahun 2018 ini terjadi kontraksi sebesar -1,43%, sebagai akibat tidak tercapainya target Retribusi Daerah yang hanya mampu terealisasi 35,81% dan Lain-lain PAD yang Sah hanya mampu menyumbangkan 87,67%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 27,80%. Setiap tahunnya realisasi Dana Perimbangan selalu bertambah dari tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka pertumbuhan sebesar 78,05% namun pada tahun 2018 Dana Perimbangan turun -1,73% dari tahun 2017. Untuk rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah adalah sebesar 268,63%, hal tersebut disebabkan komponen ini bergantung dari nilai hibah maupun dana insentif daerah yang diberikan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dari tahun 2013 sampai dengan 2017 selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,82% dan jika dihitung sampai dengan tahun 2018 maka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 31,96%, hal ini dipicu realisasi pendapatan tahun 2018 berkontraksi sebesar 1,43%.

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh BAPPENDA Provinsi NTB tahun 2013-2018 yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan UPTB UPPD yang ada di kabupaten/kota dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk aplikasi e-Samsat dan e-STS Retribusi Online dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan PAD;
4. Menambah 10 unit Armada Samsat keliling untuk masing-masing samsat kabupaten/kota, serta menambah beberapa unit Samsat bantuan yang digagas jajaran Bappenda;
5. Membuka layanan Samsat Delivery, yang makin memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB tahunan melalui system jemput antar berbasis lokasi GPS perangkat Android dimanapun berada, khusus untuk Kota Mataram.

Dalam rangka operasionalisasi kebijakan umum yang mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, BAPPENDA NTB menjalankan 8 program rutin dan prioritas sesuai RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Reformasi Birokrasi; dan

8. Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset.

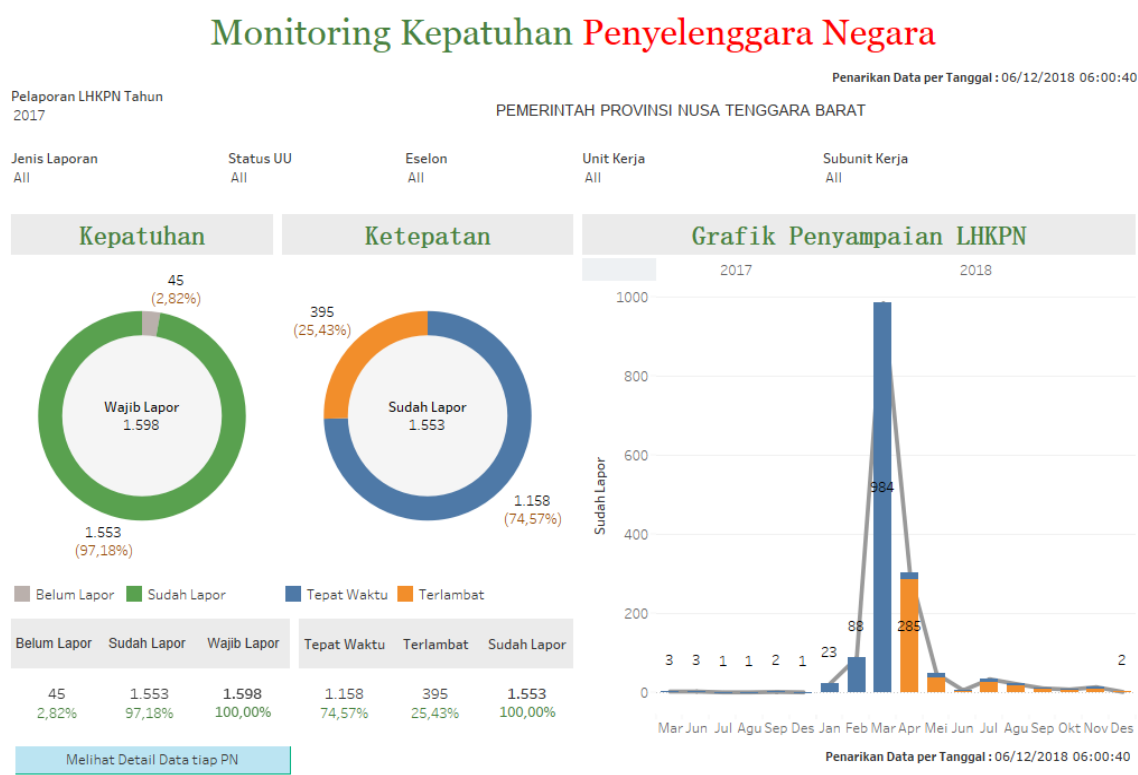
Pencapaian program tersebut merupakan bagian dari kegiatan strategis BAPPENDA Provinsi NTB selama kurun waktu 2013-2018 yang meliputi:

- 1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
- 2. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan aparatur pengelola keuangan daerah di tingkat Provinsi dan UPTB-UPPD yang berada di Kabupaten/Kota se-NTB;
- 3. Peningkatan manajemen aset dan barang daerah untuk memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3.4.5 Urusan Kepegawaian

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur NTB Nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, maka seluruh PNS yang berpredikat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2018 wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi capaian LHKPN Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Gambar 2- 37. Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN



Sumber: <https://elhkpn.kpk.go.id> tahun 2018

Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi NTB sangat tinggi yakni mencapai 97,18% dengan persentasi tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN sebesar 74,57%. Hal ini perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang sehingga capaian pelaporan dan tingkat ketepatan waktu Pelaporan LHKPN dapat mencapai 100%.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan penghargaan “Kepatuhan LHKPN terbaik 2017” sehingga untuk mempertahankan penghargaan tersebut BKD Provinsi NTB terus melakukan pembinaan dan pendampingan dengan cara melakukan Bimbingan teknis tata cara pengisian LHKPN serta memberikan penghargaan bagi OPD yang telah tuntas dan tepat waktu melaporkan LHKPN. Adapun OPD yang LHKPN-nya mencapai 100% dan telah diberikan penghargaan berupa “Piagam Kepatuhan LHKPN 2018” antara lain:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB;
2. Dinas Pariwisata Provinsi NTB;
3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB;
4. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB;
5. Biro Umum Setda Provinsi NTB;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB;
7. Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan bagi OPD yang belum 100% juga memberikan surat teguran dan sekaligus melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2018 yaitu Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi NTB sehingga dari 1.592 jumlah wajib LHKPN yang melaporkan sampai dengan Per Desember 2018 yaitu ada 1.553 orang atau 97,27% dan yang belum 36 orang atau 2,63%.

Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 497 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assited Test (CAT) dengan jumlah pelamar sebanyak 5.589 orang

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur meningkatkan layanan E-Government berbasis elektronik dengan maksud memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan tujuan stakeholder dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi, oleh karena itu BKD Provinsi NTB mengembangkan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang disebut SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu), dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user, operator bahkan ASN itu sendiri dalam memanfaatkan, mengolah, dan mengelola data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN.

Selain itu penerapan pelayanan publik berbasis aplikasi terus dilaksanakan, pada tahun 2018 BKD sudah merilis Buku saku elektronik yang dapat diunduh di playstore guna memudahkan bagi user dalam melihat data tentang kepegawaian. Selanjutnya melalui aplikasi SIMADU selain merupakan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi juga merupakan sistem pelayanan kepegawaian berbasis elektronik, sehingga hal ini dapat mempermudah pelayanan kepegawaian lingkup pemerintah provinsi NTB dari ujung timur Pulau Sumbawa sampai dengan ujung barat Pulau Lombok.

Disamping itu dikembangkan juga sistem aplikasi SIMATA (Sistem Manajemen Penataan ASN) merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user dalam rangka melihat/mengamati secara lebih detail data, talenta dan rekam jejak seorang ASN untuk pengembangan karier sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

2.1.3.4.6 Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintah fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2018, BPSDM Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang bersifat manajerial/dasar maupun teknis/fungsional, peningkatan kapasitas kompetensi widyaiswara/tenaga pengajar serta fasilitasi sertifikasi kompetensi keahlian. Salah satu unsur optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan tenaga pengajar/widyaiswara yang profesional. Hingga akhir Desember 2018, jumlah tenaga pengajar/widyaiswara yang ada pada BPSDMD Provinsi NTB sebanyak 25 orang. Guna meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran, maka Widyaiswara diberikan pendidikan dan pelatihan muatan substantif melalui sistem pengiriman ke instansi penyelenggara diklat seperti Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut ini disajikan kegiatan diklat dan jumlah Widyaiswara yang dikirim untuk mengikuti diklat dimaksud :

Tabel 2- 109. Jenis Diklat dan Jumlah Widyaiswara yang Mengikutinya Tahun 2018

NO	Jenis Diklat	Jumlah Widyaswara yang Mengikuti Diklat	Keterangan
1	Ujian Ulang Substansi Pbj bagi calon Narasumber/Pengajar Pbj tk Dasar di LKPP	1 orang	Jakarta
2	Desiminasi bahan ajar pelatihan Pbj tk dasar	2 orang	Jakarta
3	Rakor Teknis Pengelola Jabatan Fungsional Bid. Ketenagakerjaan	1 orang	Denpasar
4	Training of E-Learning Development/Multimedia	1 orang	Jakarta
4	Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang tingkat tinggi pola PNB	1 orang	Jakarta
5	Pelatihan Aparatur Desa	1 orang	Jakarta
6	Metodelogi Pelatihan Berbasis SKKNI dan Sertifikas	1 orang	Jakarta
7	Pelatihan TOF Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	8 orang	Jakarta

NO	Jenis Diklat	Jumlah Widyaswara yang Mengikuti Diklat	Keterangan
	di Lingkungan Kemendagri dan Pemda		
8	Pelatihan ToTOrientasi Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD Prov. Dan DPRD Kab/Kota Pelatihan Dasar CPNS	1orang	BSDMD Kemendagri
9	ToT Diklat Pimpemdagri	1 orang	Jakarta
10	Ujikompeserta pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi di LAN RI	2 orang	Jakarta
11	ToF Latsar CPNS Angkatan III di PKP2A LAN III Samarinda	5 orang	Kaltim
12	Pelatihan bagi Pelatih Tk. Prov. Pembina Teknis Desa	1 orang	Jakarta

Sumber : BPSDMD Provinsi NTB, 2018

Sebagai unsur utama dalam pembangunan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu mereka harus memiliki kompetensi dan integritas yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan dasar (latsar), Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinan.

BPSDMD Provinsi NTB tahun 2018 telah melaksanakan Diklat Prajabatan untuk K-2 Provinsi sebanyak 33 orang dan 703 orang untuk Kabupaten/Kota yang terbagi dalam 3 kelas dengan 4 angkatan. Sedangkan 3 orang CPNS yang berada di Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengikuti diklat Latsar bersamaan dengan CPNS yang berasal dari Kemenkumham. Disamping Diklat Prajabatan/ Latsar juga telah dilaksanakan Diklat Manajerial untuk PIM III dan IV baik untuk Provinsi Maupun Kabupaten. Untuk PIM II yang rencananya juga akan dilaksanakan di BPSDMD Provinsi NTB, namun karena gempa yang melanda Pulau Lombok selama 5 bulan lebih mulai dari bulan Juli 2018 akhirnya dibatalkan karena sarana prasarana kediklatan banyak yang mengalami kerusakan, mengatasi Pejabat Eselon II yang belum mengikuti Diklat PIM II dari 9 orang Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang akan mengikuti Diklat PIM II yang bisa diakomodir hanya 3 oang pejabat eselon II yang dikirim mengikuti diklat PIM II ke LAN Bandung karena keterbatasan anggaran. Adapun rincian diklat manajerial sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 110. Capaian Penyelenggaraan Diklat Manajerial Tahun 2018

NO	JENIS DIKLAT	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Diklat PIM III Provinsi	35 orang	34 orang	Setelah DPA Perubahan
2	Diklat PIM IV Provinsi	35 orang	35 orang	
3	Diklat PIM III Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	
4	Diklat PIM IV Kabupaten/Kota	80 orang	80 orang	
5	Diklat PIM II	8 orang	3 orang	
JUMLAH		198 orang	192 orang	

Sumber : BPSDMD Provinsi NTB, 2018

Selain upaya mendorong ASN memiliki kemampuan dasar/manajerial, BPSDMD Provinsi NTB juga terus meningkatkan kompetensi teknis tugas dan fungsional kepada ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsional bagi PNS Daerah. Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu pelaksanaan diklat berbasis wisata/kuliner, artinya selain pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas (in class), juga dilaksanakan diluar kelas (out class) yang diarahkan ke lokasi wisata (alam, buatan, desa adat, tempat kuliner dan sebagainya). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa jenuh bagi peserta diklat, juga sebagai pengenalan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pembelajaran (out class). Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan jumlah diklat teknis/fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2018 :

Tabel 2- 111. Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2018

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		KETERANGAN
		TARGET (orang)	REALISASI (orang)	
A	Diklat Teknis	525	515	
1	Diklat Renstra Angkatan I	30	30	In Class
2	Diklat Renstra Angkatan II	30	30	In Class
3	Diklat Keuangan Desa	30	30	In Class
4	Diklat Pengadaan Barang / Jasa	30	30	In Class
5	Diklat Website	30	30	In Class
6	Diklat Peraras Nasi	30	30	In Class dan OutClass
B	Diklat Fungsional	90	51	
1	Diklat Analisis Kepegawaian	30	21	In Class
JUMLAH		210	210	

Sumber : BPSDM Provinsi NTB, 2018

Dibandingkan tahun 2017 jumlah jenis diklat dan target peserta lebih banyak dibandingkan tahun 2018 karena pada tahun 2017 terselenggaranya kegiatan

kediklatan di BPSDMD Provinsi NTB tidak terlepas dari ketersediaan sarana prasarana yang mendukung diantaranya : 2 gedung asrama (Wisma Tambora dan Wisma Praja), 6 lokal kelas, dan 3 Aula, sedangkan untuk kelengkapan peralatan pendukung sudah cukup memadai. Sedangkan tahun 2018 akibat gempa yang menimpa pulau Lombok sarana prasarana kediklatan banyak yang mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun berat sehingga mendapatkan zona merah dari Dinas PUPR Provinsi NTB (Wisma Tambora, Aula Rinjani dan lokal kelas lain.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 12 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2- 112. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Indikator	Realisasi		2018	
		2016	2017	Target	Realisasi
1	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas (tahun)				
2	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas (%)	12,94	12,86	10	12,42*
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	65,48	65,55	67,7	65,77*
4	Prevalensi Kurang Gizi (%)	20,2	22,6	15	26,4
5	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,15	20,27	21	20,23
6	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah (%)	100	100	75	100
7	Pranata Adat yang Terbentuk (lembaga)	93	50	50	61
8	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah				
	- Desain Industri (produk)	5	61	15	20
	- Merek (produk)	135	45	20	0
	- Hak Cipta (produk)	29	30	15	20
9	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)	94,72	99,03	100	100
10	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut				
	- Angkutan udara (orang)	3.778.787	4.080.124	3.626.000	4.205.496
	- Angkutan laut (orang)	1.071.173	1.327.229	227.502	950.088
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,53	56,99	67,95	59,49
12	Mata Air Terlindungi (titik)	414	485	438	527

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi, 2018

Dari 12 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 7 indikator tercapai atau mencapai 58,33%, sedangkan 5 indikator atau 41,67% belum tercapai

yaitu indikator Usia Harapan Hidup, Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas, Prevalensi Kurang Gizi, Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 untuk mengukur konsistensi antara RKPD Tahun 2018 dengan APBD TA. 2018 serta tingkat capaian kinerja dan anggarannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 secara konsistensi 100% teranggarkan dalam APBD TA. 2018, sedangkan rata-rata capaian kinerja program dari 45 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB mencapai 98,22% (Kategori sangat Tinggi) sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangannya mencapai 92,20% (Kategori sangat Tinggi). Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RPKD 2018 menurut perangkat daerah dapat dideskripsikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2- 113. Hasil evaluasi pelaksanaan RPKD Provinsi NTB Tahun 2018

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RPKD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RPKD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92,50	94,49	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	97,63	73,42	Sangat Tinggi	Sedang	Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas	1) Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan; 2) Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
3	Rumah Sakit Umum Daerah	88,41	86,65	Tinggi	Tinggi	Semua program yang ada di RPKD dan renja terdapat didalam RPJMD	Pada pelaksanaan kegiatan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit, sudah tercapai 100% untuk fisik namun realisasi keuangan masih 42%	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan unit / bidang terkait
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	90,12	74,21	Sangat Tinggi	Sedang	Adanya perencanaan yang baik dalam penyusunan beberapa rencana kegiatan RSJ Mutiara Sukma	1. Adanya program inovasi yang tidak tertera dalam RPJMD maupun Renstra namun terdapat pada Renja RSJ Mutiara Sukma 2. Adanya akreditasi Rumah Sakit yang dilaksanakan pada tahun 2016, sehingga dibutuhkan tambahan tenaga teknis, dan	Perlunya perencanaan yang lebih baik agar apa yang direncanakan bisa sesuai dengan pelaksanaannya dan kerjasama dalam hal penyusunan dengan unit-unit pelaksana

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pembiayaannya melalui dana APBD	
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	82,50	153,07	Tinggi	Sangat Tinggi	Semua kegiatan pelaksanaannya harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	1) Kegiatan yang bersifat kontraktual dalam proses pengadaannya; 2) Mundurnya pelaksanaan kegiatan sehingga perlu penjadwalan ulang.	Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104,29	99,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II; 2. Perda Percepatan jalan & jembatan 2017-2018	Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP sering mengalami tender ulang	Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	80,27	74,43	Tinggi	Sedang	-	-	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	88,89	87,59	Tinggi	Tinggi	SDM, Sarana dan prasarana, Anggaran, yang tersedia.	Tidak sama Indikator antara RPJMD dan Renstra	1. Melakukan revisi Renstra untuk menyesuaikan dengan RPJMD 2. Tidak ada lagi perbedaan indikator program/ kegiatan dan satuannya pada RKPD/Renstra dengan Renstra/RPJMD
9	Satuan Polisi Pamong Praja	94,56	81,95	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89,16	304,78	Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya tambahan anggaran dana APBD hibah tahun 2018 pada program/kegiatan antara lain : o Program Siaga Darurat Beancana	• Keterlambatan 2 (dua) paket pekerjaan disebabkan karena kegagalan dalam pelaksanaan tender yaitu 1 paket pekerjaan pembangunan prasaranan KTA (Konservasi Tanah dan Air) di	-

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana - Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kebencanaan	Desa Tarlawi dan 1 paket pengadaan bibit di Desa Raba Kabupaten Bima sehingga diusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pemanfaatan dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	
11	Dinas Sosial	103,95	98,75	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal SKPD terus dibangun	Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan	1. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan 2. Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	101,94	99,67	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan.	1) Masih ada beberapa kegiatan yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan anggaran kas; 2) Masih Kurangnya anggaran Oprasional.	1) Untuk kedepannya akan dilaksanakan rapat koordinasi teknis dengan bidang agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan anggaran kas sehingga penyerapan anggaran dapat optimal;

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2) Akan diusulkan APBD P Tahun 2018 sesuai anggaran yang tersedia.
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	99,83	100,49	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1) Penyelesaian dokumen/SPJ dari tiap-tiap Bidang tepat waktu; 2) Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal maupun eksternal berjalan baik; 3) Pengawasan internal berjalan dengan baik.	1) Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM; 2) Dukungan anggaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas masih sangat terbatas; 3) Sarana dan prasarana pendukung kinerja masih terbatas.	-
3	Dinas Ketahanan Pangan	100,14	88,08	Sangat Tinggi	Tinggi	-	1) DPA Perubahan selesai di Triwulan IV; 2) Pencairan Bantuan hibah terkendala harus berbadan hukum atau ada Surat Keterangan Terdaftar; 3) Terbatas tenaga memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	110,55	110,87	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan sekretariat dan instansi lainnya.	1) Terdapat komponen beberapa perubahan penjadwalan aliran kas dan revisi anggaran; 2) Anggaran dalam Renja 2018 berbeda cukup jauh dengan DPA 2018, sehingga beberapa capain kinerja yang terukur sangat rendah	1) Memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal ROK; 2) Mendorong pelaksanaan kegiatan yang tidak terpengaruh musim di awal tahun; 3) Memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja.

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	101,81	89,37	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-
6	Dinas Perhubungan	85,80	84,61	Tinggi	Tinggi	Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait	Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan	Meningkatkan kinerja, SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100,91	83,13	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	95,81	84,85	Sangat Tinggi	Tinggi	Pemahaman akan Tupoksi, Inovasi, Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama	Menunggu DPA Perubahan	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	172,89	63,13	Sangat Tinggi	Rendah	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ROK yang telah disusun	Regulasi Penanaman modal yang dinamis namun tidak diikuti perkembangan SDM dan Sarana Prasarana, dan terbatasnya pemahaman petugas/aparatur terkait perpu yang berlaku dlm pelaksanaan Penanaman Modal	Menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi Promosi, Penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	84,55	90,95	Tinggi	Tinggi	Ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim	Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota, jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana dan dana yang masih kurang	Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	91,18	77,76	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-
C	URUSAN PILIHAN							
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	96,96	100,18	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
2	Dinas Pariwisata	96,86	83,66	Sangat Tinggi	Tinggi	Optimalisasi kinerja dan koordinasi baik terjalin sehingga output yang dihasilkan sesuai target	Perencanaan kurang baik di awal sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tepat waktu; Pelaksanaan kegiatan seringkali melewati batas penganggaran yang ada, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal	Perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik dengan output dan outcome yang tepat sasaran
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	100,00	80,16	Sangat Tinggi	Tinggi	1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait.	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi	Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					-	-	-
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	91,98	78,85	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Dinas Perdagangan	105,09	93,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Penyusunan RKPD yang sesuai dengan nomenklatur yang di telah ditentukan beserta rencana anggarannya	Regulasi yang selalu berubah pada proses pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan	Merencanakan dengan tepat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan
7	Dinas Perindustrian	103,73	76,34	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-
D	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG							
1	Biro Umum	96,32	94,32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
2	Biro Organisasi	98,92	98,84	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
3	Biro Hukum	106,96	61,62	Sangat Tinggi	Rendah	Tertibnya administrasi dan keuangan	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan	Perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang
4	Biro Adm. Pemerintahan	100,00	86,44	Sangat Tinggi	Tinggi	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat	-	-
5	Biro Perekonomian	85,62	67,47	Tinggi	Sedang	Tidak Melaporkan	Tidak Melaporkan	Tidak Melaporkan
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	98,91	77,37	Sangat Tinggi	Tinggi	Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD	Masih ada program/kegiatan SKPD yang berubah/revisi di anggaran perubahan sehingga proses pengadaannya belum bisa dilaksanakan	Meningkatkan pelaksanaan rakor terkait upaya percepatan pelaksanaan kegiatan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	106,68	82,52	Sangat Tinggi	Tinggi	-	-	-
8	Biro Humas dan Protokol	96,36	77,12	Sangat Tinggi	Rendah	-	-	-
9	Sekretariat DPRD	85,71	73,40	Tinggi	Sedang	Komitmen OPD dalam pelaksanaan RKPD	1. Belum adanya komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan RKPD	Mengevaluasi capaian kinerja sebelumnya

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2. Ada beberapa Indikator yang belum SMART pada dokumen RKPD	
10	Badan Penghubung Daerah	100,00	105,60	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
11	Inspektorat	91,74	87,92	Sangat Tinggi	Tinggi	a. Pengembangan SDM b. Profesionalisme SDM c. Ketersediaan Anggaran d. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan	a. Keterbatasan Anggaran b. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD c. Infrastruktur yang belum memadai	a. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan b. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM c. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan d. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM e. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,80	94,67	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85,28	100,21	Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	82,50	76,09	Tinggi	Tinggi	1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkat	Masih adanya pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan, 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.	-
15	Badan Kepegawaian Daerah	107,99	94,01	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan time schedule masing-masing bidang 2. Diberlakukannya penambahan jam kantor manakala beban pekerjaan berlebih 3. Kesesuaian antara perencanaan dan penatausahaan keuangan sehingga mampu mendongkrak capaian fisik dan keuangan	1. Adanya perubahan OPD menyebabkan perubahan terhadap struktur organisasi sehingga beberapa struktur belum mendapat dukungan anggaran yang memadai 2. Adanya perubahan OPD mengakibatkan renstra harus direview kembali sehingga target pada RPJM berubah. 3. Banyaknya kebijakan-kebijakan pusat terkait kepegawaian yang menyebabkan target pada renstra meleset seperti kebijakan sekolah menengah dialihkan ke provinsi sehingga target penempatan PNS melampaui target renstra	target kinerja harus disesuaikan dengan renstra pasca penetapan OPD baru sehingga jelas target beserta indikator masing-masing program dan kegiatan
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125,61	64,53	Sangat Tinggi	Rendah	Adanya visi dan misi yang tepat yg dimiliki SKPD,SKPD memiliki ASN yang kreatif, inovatif dan kompeten, perencanaan anggaran yang sesuai mulai dari penyusunan RPJMD, RENSTRA, RKA sampai menjadi DPA, ketepatan	ASN yang tidak kompeten dan kurang inovasi di bidangnya, tidak sesuai pelaksanaannya anggaran dengan target yang telah disusun dalam RPJMD, RENSTRA sampai pelaksanaan program kegiatan di DPA, adanya peraturan dari pusat atau dari Gubernur terkait dengan	1. Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran, melaksanakan kegiatan sesuai dengan

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI BAGI ARAHAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						waktu realisasi anggaran dengan kegiatan yang telah direncanakan.	program dan kegiatan yang harus dilaksanakan padahal anggaran tidak ada,kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja,keterlambatan dalam penyusunan dokumen pendukung kinerja,tidak adanya kesesuaian permintaan data yang diinginkan dari SKPD pendukung, kurangnya anggaran yang dibutuhkan.	anggaran yang telah tersedia. 2. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD, Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD, RENSTRA dan DPA, Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD.
RATA-RATA		98,22	92,20	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
E	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB							
1	Kota Mataram	MELAPORKAN						
2	Kota Bima	MELAPORKAN						
3	Kabupaten Lombok Barat	MELAPORKAN						
4	Kabupaten Lombok Utara	MELAPORKAN						
5	Kabupaten Lombok Tengah	MELAPORKAN						
6	Kabupaten Lombok Timur	MELAPORKAN						
7	Kabupaten Sumbawa Barat	MELAPORKAN						
8	Kabupaten Sumbawa	MELAPORKAN						
9	Kabupaten Dompu	MELAPORKAN						
10	Kabupaten Bima	MELAPORKAN						

2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2013-2018

Sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, terdapat 31 indikator untuk mendeskripsikan kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : **aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 12 indikator kinerja** meliputi indikator Penurunan Jumlah Konflik Sosial, Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (non tambang), Pola Pangan Harapan, Pengeluaran Per Kapita, Angka kemiskinan, Laju Investasi, Pertumbuhan PAD, Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara), dan Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); **aspek pelayanan umum diukur dengan 7 indikator kinerja** meliputi indikator Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik, Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online, Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap, Ratio Elektrifikasi, Cakupan Air Bersih (Perkotaan dan Perdesaan), Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dan Cakupan Jamban Keluarga; serta **aspek daya saing daerah dengan 12 indikator kinerja** meliputi indikator Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas, Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas, Usia Harapan Hidup, Prevalensi Kurang Gizi, Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan, Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah, Pranata Adat yang Terbentuk, Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta), Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Mata Air Terlindungi.

Capaian 31 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2018 secara keseluruhan terdapat 22 indikator tercapai atau 70,97%, dan masih terdapat 9 indikator belum tercapai atau 29,03%. Deskripsikan capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dijelaskan sebagai berikut.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2- 114. Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kinerja Awal 2013	Kinerja Akhir 2018		
				Target	Capaian Akhir	Interpretasi Capaian Terhadap Target (>melampaui ; < belum tercapai; = sesuai)
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	27	13	>
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	100	100	=

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kinerja Awal 2013	Kinerja Akhir 2018		
				Target	Capaian Akhir	Interpretasi Capaian Terhadap Target (>melampaui ; < belum tercapai; = sesuai)
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	73	75,12	>
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	4,55	3,72	>
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	6,25 – 6,50	3,08	<
6	Pola Pangan Harapan	point	78,7	82,5	82,80	>
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.950	9.578	10.034,71*	>
8	Angka kemiskinan	%	17,25	12,25	14,63	<
9	Laju Investasi	%	8,28	13,5	39,90	>
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	7,64	-1,43	<
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	4.000.000	2.812.379	<
	- Mancanegara	Org	565.944	2.000.000	1.204.556	<
	- Nusantara	Org	791.658	2.000.000	1.607.823	<
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	2,42	22,42	>

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi, 2018

Dari 12 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat 8 indikator tercapai atau mencapai 66,67%, sedangkan 4 indikator 33,33% belum tercapai. Adapun indikator yang belum tercapai meliputi pertumbuhan ekonomi non tambang, angka kemiskinan, pertumbuhan PAD, dan angka kunjungan wisatawan. Indikator yang belum tercapai tersebut termasuk yang terkena dampak langsung bencana gempa bumi.

b. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah. Indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum diukur melalui 7 indikator, dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%. Dengan demikian seluruh indikator pada aspek ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2- 115. Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kinerja Awal 2013	Kinerja Akhir 2018		
				Target	Capaian Akhir	Interpretasi Capaian Terhadap Target (>melampaui ; < belum tercapai; = sesuai)
B	Aspek Pelayanan Umum					
1	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	=
2	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Kali	4.653	160.000	549.047	>
3	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	83,65	83,65	=
4	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	75	93,83	>
5	Cakupan Air Bersih					
	- Perkotaan	%	80,23	87,56	92,66	>
	- Perdesaan	%	72,15	81,87	82,49	>
6	Penanganan Rumah Tidak layak huni	Unit	21.471	26.471	27.530	>
7	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	80	85,94	>

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2018

c. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 12 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2- 116. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kinerja Awal 2013	Kinerja Akhir 2018		
				Target	Capaian Akhir	Interpretasi Capaian Terhadap Target (>melampaui ; < belum tercapai; = sesuai)
C	Aspek Daya Saing					
1	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6,54	6,95	7,06*	>
2	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,04	10	12,42*	>
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,73	67,7	65,77*	>

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kinerja Awal 2013	Kinerja Akhir 2018		
				Target	Capaian Akhir	Interpretasi Capaian Terhadap Target (>melampaui ; < belum tercapai; = sesuai)
4	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27	15	26,4	<
5	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,52	21	20,23	<
6	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	75	100	>
7	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	260	321	>
8	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah					
	- Desain Industri	Produk	37	112	127	>
	- Merek	Produk	42	142	238	>
	- Hak Cipta	Produk	18	93	98	>
9	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	78,58	100	100	=
10	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut					
	- Angkutan udara	org	2.145.290	3.626.000	4.205.496	>
	- Angkutan laut	org	125.794	227.502	950.088	>
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77	67,95	59,49	<
12	Mata Air Terlindungi	Titik	334	438	527	>

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggunjawab Indikator, *) Angka Proyeksi, 2018

Dari 12 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 7 indikator tercapai atau mencapai 58,33%, sedangkan 5 indikator atau 41,67% belum tercapai yaitu indikator Usia Harapan Hidup, Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas, Prevalensi Kurang Gizi, Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 telah terjadi gempa bumi yang berdampak pada kerusakan baik sektor perumahan, sosial, ekonomi, infrastruktur dan lintas sektor yang memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi hingga tahun 2019 belum dapat dituntaskan 100 persen.
2. Sebagai dampak gempa bumi menyebabkan Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis, tingkat pengangguran terbuka meningkat serta pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.
3. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

4. Belum optimalnya kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah
5. Masih tingginya angka prevalensi gizi buruk , angka stunting, angka kematian bayi dan angka kematian ibu.
6. Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
7. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan)
8. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan tingginya angka buta huruf.
9. Masih tingginya angka kemiskinan.
10. Belum meratanya pembangunan antar wilayah kabupaten kota.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi NTB tahun 2018 mencapai Rp.123,87 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.90,32 triliun. Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.123,86 triliun dan Rp.94,64 triliun, sedangkan tahun 2016 atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sebesar Rp.116,5 triliun dan Rp.94,524 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 terhadap 2017 mengalami kontraksi sebesar 4,56%. Kontraksi pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada sub kategori Pertambangan Bijih Logam dibanding 2017, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada Kategori Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2018, kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 33,71%. Selain itu, terjadi kontraksi pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,59% sebagai dampak dari musibah gempa yang melanda Provinsi NTB. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2018, disaat pertumbuhan ekonomi NTB tertekan oleh kinerja pertambangan bijih logam/konsentrat, aktivitas pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan masih mampu tumbuh. Kondisi ini mengurangi dalamnya kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB yang tertahan pada angka -4,56%. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,70 poin, diikuti oleh Kategori Pertanian pada tahun 2018 Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin, Kategori Konstruksi sebesar 0,23 poin. Adapun Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin, Kategori Konstruksi sebesar 0,23 poin. Kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber kontraksi sebesar -6,99 poin. Selain Kategori Pertambangan dan Penggalian, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Kategori Pengadaan Air dan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan tertinggi berturut-turut terjadi pada Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,08%, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,45%, dan Kategori Jasa Lainnya 5,33%. Untuk mengetahui besarnya perbandingan kegiatan ekonomi pada masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3- 1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018 (Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK)		
		2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24.662	27.183	28.985	19.565	20.843	21.188
2	Pertambangan dan Penggalian	26.232	24.109	17.318	24.501	19.635	13.017
3	Industri Pengolahan	4.511	4.923	5.109	3.977	4.218	4.274
4	Pengadaan Listrik dan Gas	74	91	97	75	78	79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	98	106	102	69	72	70
6	Kontrsuksi	9.893	10.961	11.774	8.414	9.033	9.25
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.506	16.388	17.955	11.148	12.112	12.771
8	Transportasi dan Pengangkutan	8.209	9.035	9.338	5.921	6.399	6.529
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.503	2.747	2.66	1.545	1.658	1.582
10	Informasi dan Komunikasi	2.045	2.303	2.457	1.986	2.158	2.275
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.701	4.246	4.692	2.789	3.066	3.273
12	Real Estate	3.498	3.794	4.1	2.502	2.678	2.803
13	Jasa Perusahaan	193	211	227	149	158	166
14	Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.992	7.438	7.818	4.492	4.641	4.689
15	Jasa Pendidikan	5.152	5.681	6.122	3.813	4.062	4.274
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.006	2.187	2.45	1.713	1.828	1.975
17	Jasa Lainnya	2.188	2.46	2.668	1.865	2.002	2.109

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK)		
		2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
	PDRB dengan Tambang	116.465	123.862	123.872	94.524	94.64	90.323
	PDRB tanpa Tambang	93.355	103.28	110.319	72.715	77.883	80.286

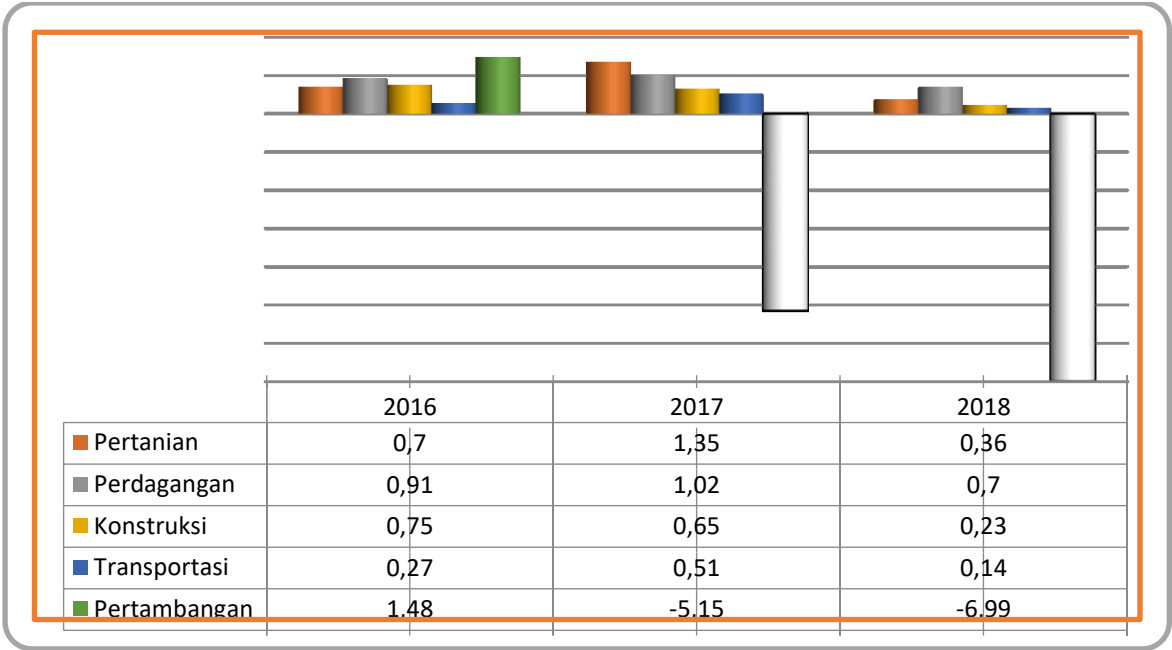
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, berdasarkan pada 5 (lima) sumber pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa perbandingan sumber pertumbuhan ekonomi periode tahun 2016-2018 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3- 1. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

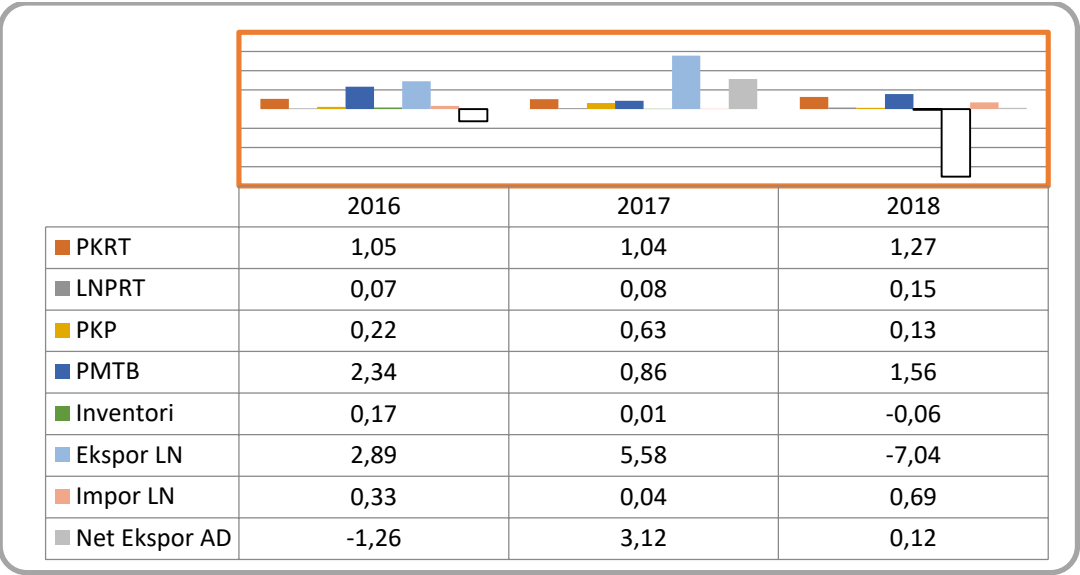
Pada grafik diatas terlihat bahwa sumber pertumbuhan sektor lapangan usaha pada tahun 2018 selalu lebih rendah dari tahun 2016 dan 2017, dan sektor pertambangan memberikan pertumbuhan yang bersifat kontraktif sejak tahun 2017. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada struktur ekonomi diketahui bahwa Ekonomi NTB selama tahun 2018 masih didominasi oleh sektor primer. *Share* tertinggi terhadap PDRB Provinsi NTB berturut-turut adalah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,40%), kemudian diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,49%) dan Kategori Pertambangan dan Penggalian (13,98%).

Mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami fluktuatif akibat berfluktuasinya pertambangan bijih logam, maka tanpa sub kategori Pertambangan Bijih Logam, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2018 mencapai 3,08%. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 7,11% sebagai akibat dari dampak gempa bumi yang terjadi.

Menurut PDRB dari sisi pengeluaran pada tahun 2018, sumber kontraksi utama dari PDRB sangat dipengaruhi oleh komponen ekspor luar negeri yang memberikan sumbangan kontraksi sebesar 7,04 poin. Selain itu, komponen lain yang memberikan sumbangan kontraksi adalah komponen perubahan inventori sebesar 0,06 poin. Selain kedua komponen tersebut, komponen lain penyusun PDRB menurut pengeluaran memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber pertumbuhan tertinggi disumbang oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 1,56 poin, disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 1,27 poin. Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), dan net ekspor antar daerah masing-masing menyumbang sebesar 0,15 poin, 0,13 poin, dan 0,12 poin. Sedangkan komponen impor luar negeri sebagai pengurang dalam PDRB juga tumbuh positif. Adapun perbandingan sumber pertumbuhan PDRB Provinsi NTB menurut Pengeluaran tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3- 2. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Menurunnya kinerja perekonomian NTB pada tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dari turunnya ekspor luar negeri, dimana konsentrat tembaga sebagai penyumbang terbesar ekspor luar negeri Provinsi NTB (91%). Tercatat selama tahun 2018 Ekspor Luar Negeri konsentrat tembaga sebanyak 274.675 DMT, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 579.199. Sementara, komponen dengan laju tertinggi adalah komponen LNPRT yang mampu tumbuh 10,43% dengan *share* terhadap total

PDRB sebesar 1,61%. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen dominan dengan *share* 63,80% terhadap total PDRB Provinsi NTB mampu tumbuh 2,17%. Struktur Ekonomi NTB pada tahun 2018 yang tercermin pada PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (63,80%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (38,14%) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (15,96%). Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB menurut pengeluaran berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2018 (Juta Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga	70.678.201	74.849.147	79.035.517	54.328.121	55.309.565	56.510.111
Konsumsi LNRT	1.643.778	1.810.762	2.067.613	1.243.292	1.319.662	1.457.369
Konsumsi Pemerintah	17.766.902	19.218.414	19.768.790	11.457.581	12.051.869	12.176.372
PMTB	41.117.882	43.826.438	47.243.912	27.709.645	28.526.821	30.007.146
Perubahan Inventori	962.901	993.754	874.798	376.693	384.014	329.617
Ekspor Luar Negeri	23.087.588	17.526.279	10.104.565	18.514.145	13.239.097	6.574.059
Impor Luar Negeri	3.744.358	3.903.926	5.097.307	2.537.080	2.573.732	3.223.142
Net Ekspor Antar Daerah	(35.048.133)	(30.459.163)	(30.126.204)	(16.568.108)	(13.617.754)	(13.508.112)
PDRB	116.464.762	123.861.704	123.871.684	94.524.290	94.639.544	90.323.420

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

*Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita NTB atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2016, diikuti dengan sedikit penurunan pada 2017. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 14,81 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 mencapai 19,31 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Selanjutnya pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi 19,10 juta rupiah. Perubahan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3- 3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2017

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2013	2014	2015	2016	2017
- ADHB	73.619	81.621	105.665	116.528	123.927
- ADHK/ at 2010	69.767	73.373	89.338	94.538	94.645
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	15.628	17.098	21.852	23.800	25.008
- ADHK	14.810	15.370	18.475	19.309	19.099
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	3,73	3,78	20,20	4,51	-1,09
Jumlah Penduduk (ribu orang)	4.711	4.774	4.836	4.896	4.956
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,38	1,34	1,29	1,25	1,21

3.1.3 Inflasi

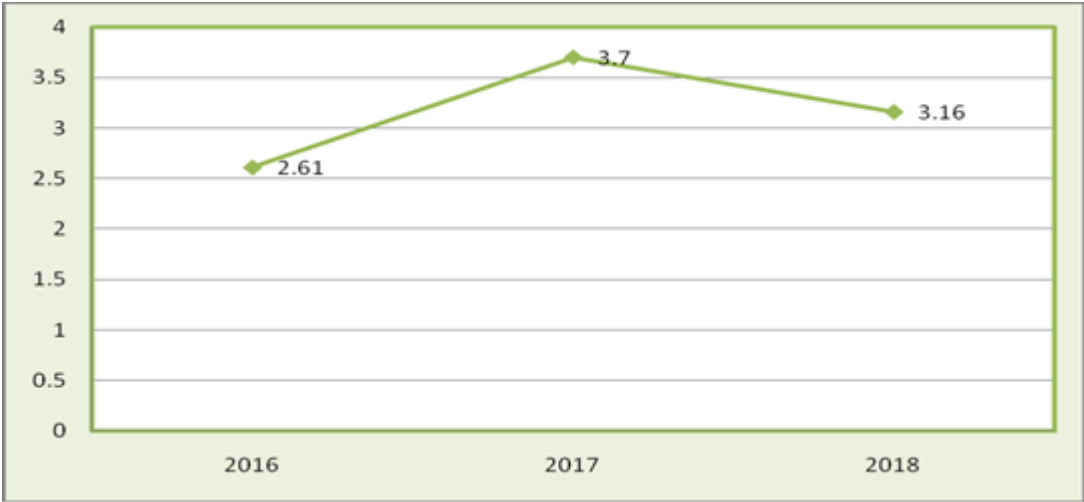
Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi–rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus–menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Hal ini disebabkan karena implikasinya yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga

meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa. Grafik berikut menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2016 -2018.

Gambar 3- 3. Inflasi Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2016 relatif rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 bahkan inflasi tahun 2016 jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02%. Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 namun masih lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 4 ± 1 . Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak 3 kali dalam kurun waktu Januari–Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung yang mengganggu distribusi barang. Pada tahun 2018 inflasi menurun menjadi 3,16 namun masih lebih besar dari inflasi nasional yaitu sebesar 3,13 tetapi tetap lebih kecil dari target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar $3,5 \pm 1$. Inflasi bulanan, tahun 2018 yaitu pada bulan Juni merupakan inflasi yang tertinggi yaitu sebesar 0,76 sedangkan pada saat gempa yaitu bulan Agustus dan September terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,10 dan 0,28. Pasca gempa terjadi inflasi namun relatif dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan karena Tim Pengendali Inflasi (TPID) cukup berhasil mengimplementasikan program pengendalian inflasi seperti:

1. Menjaga ketersediaan pasokan melalui pemenuhan kebutuhan air minum dari luar daerah sehubungan dengan menurunnya produksi air minum kemasan lokal yang terkontaminasi oleh tanah pasca gempa bumi, bekerjasama dengan PT. Pelindo (Persero) memprioritaskan bongkar muat untuk bahan bangunan yang akan masuk melalui Pelabuhan Lembar untuk pemenuhan kebutuhan bahan bangunan yang di datangkan dari luar daerah;

2. Kelancaran distribusi barang melalui jalur darat dilakukan bekerjasama dengan pihak TNI dengan Truk TNI, jalur distribusi laut dioptimalkan melalui Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Poto Tano. Sementara Pelabuhan Kayangan melalui satu dermaga yang tidak rusak, untuk melayani penyeberangan Sumbawa – Lombok. Angkasa Pura I menambah penerbangan jalur Jakarta Lombok untuk memperlancar arus bantuan barang.

Keterjangkauan harga dilakukan dengan cara TPID dan Satgas Pangan setiap hari memantau harga di pasar dan distributor, Bulog Divre NTB melakukan operasi pasar.

3.1.4 Ketenagakerjaan

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal tersebut.

Paparan data ketenagakerjaan dibawah ini tidak termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) hal ini disebabkan karena pada Bulan Agustus tahun 2018 BPS Provinsi NTB tidak dapat melakukan survey ketenagakerjaan di KLU disebabkan karena adanya bencana gempa, sehingga perlu kehati-hatian untuk membandingkan data tahun 2018 dengan data tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2018 sebanyak 2.237.381 orang, menurun 158,790 orang dibanding Agustus 2017 dan menurun 226.950 bila dibandingkan dengan Agustus 2016. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 2.154.120 orang, turun 162.600 orang dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83.260 orang, mengalami kenaikan sebanyak 38.100 orang dibanding Agustus 2017 tetapi menurun sebanyak 13.761 dibandingkan tahun 2016. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 65,91%, turun sebesar 2,58 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan terjadinya bencana gempa pada Bulan Agustus 2018 sehingga pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018 TPAK laki-laki sebesar 78,83% sementara TPAK perempuan hanya 54,25%. Namun demikian, dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 1,93 poin sementara TPAK laki-laki juga mengalami penurunan sebesar 3,28 poin. Demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT bergerak turun dari 3,94% pada Agustus 2016 menjadi 3,32% pada Agustus 2017 namun meningkat pada Agustus 2018 menjadi 3,72% akibat terjadinya bencana gempa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran namun demikian disebabkan karena bencana gempa yang terjadi pada tahun 2018 TPT meningkat namun tetap mencapai target RPJMD. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. TPT di perkotaan menunjukkan trend yang menurun sebaliknya di perdesaan

menunjukkan tren meningkat. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 4,25%, sedangkan TPT di perdesaan 3,24%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi kenaikan tingkat pengangguran di perdesaan sebesar 0,92 poin sedangkan di perkotaan TPT turun sebesar 0,27 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2016 - 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

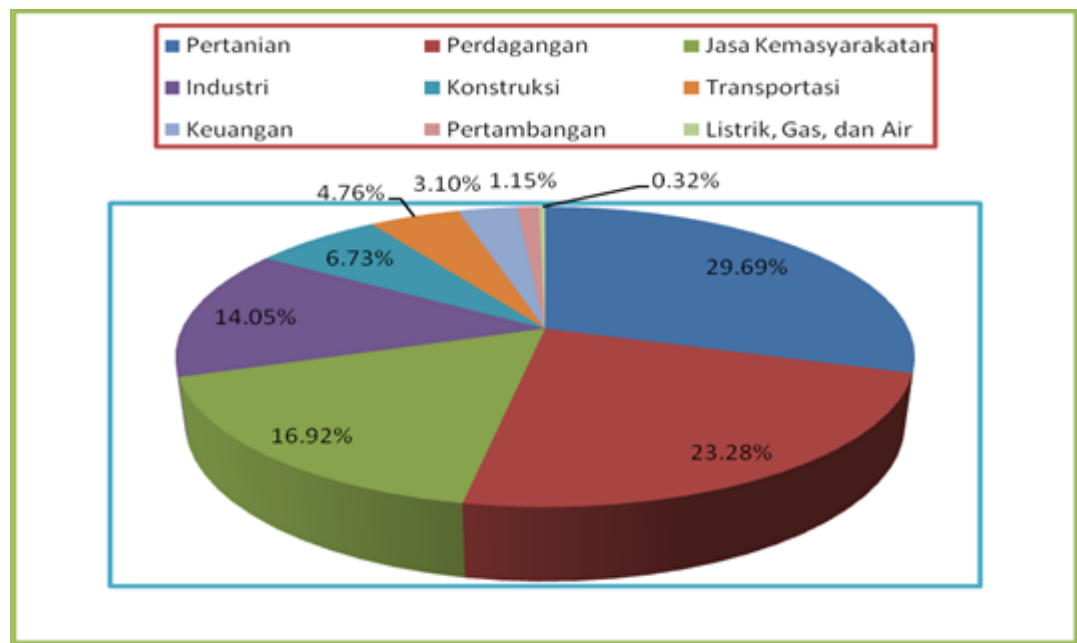
Tabel 3- 4. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2016 - 2018

NO	URAIAN	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Angkatan kerja	2.464.331	2.396.169	2.237.381
	Laki-laki	1.342.716	1.363.798	1.269.780
	(%)	(54,49)	(56,92)	(56,75)
	Perempuan	1.121.615	1.032.371	967.601
	(%)	(45,51)	(43,08)	(43,25)
	r (%)	9,24	-2,77	-6,63
2	Pengangguran	97.021	79.449	83.260
	Laki-laki	61.129	51.471	51.199
	(%)	(63,01)	(64,78)	(61,50)
	Perempuan	35.892	27.978	32.058
	(%)	(36,99)	(35,22)	(38,50)
	r (%)	-24,42	-18,11	4,80
3	TPT (%)	3,94	3,32	3,72
	Target TPT(%)	4,43	4,82	4,55

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan pada lapangan usaha diketahui bahwa pada Agustus 2018 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang paling bayak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 33,48% kemudian diikuti oleh perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,3% dan industri pengolahan sebesar 12,38% sedangkan sektor lainnya menyerap tenaga kerja berkisar 0 - 6,91%. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi penduduk bekerja menurut lapangan usaha tahun 2018 terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 3- 4. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

3.1.5 Kemiskinan

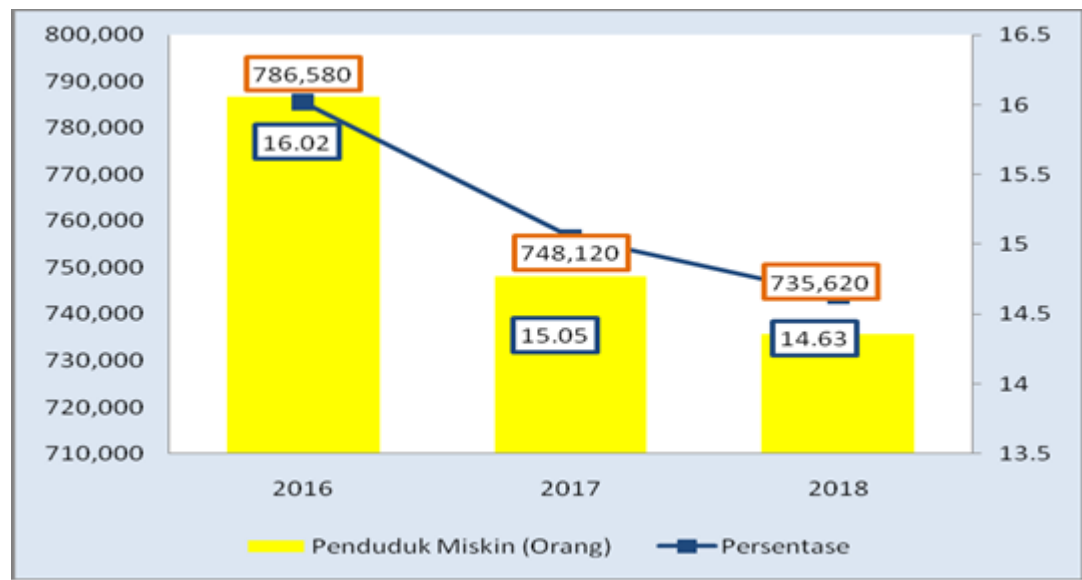
Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagi kebijakan telah diambil terutama kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan baik yang bersifat moneter maupun non moneter.

Berdasarkan indikator moneter terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. hal ini terlihat dari PDRB perkapita Provinsi NTB, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.25.010.000 dan tahun 2018 menjadi Rp.24.706.368. Tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 735,620 orang atau 14,63% namun penurunan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Bila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak yaitu 375.120 orang atau 15,66% dibandingkan dengan perdesaan yaitu 360.500 orang atau 13,69%. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada tingkat kedalaman kemiskinan diketahui bahwa pada periode Maret - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada

Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Berdasarkan pada paparan diatas terindikasi bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian jumlah penduduk miskin belum mencapai target RPJMD. Grafik berikut menyajikan perkembangan penduduk miskin dari tahun 2016 - 2018.

Gambar 3- 5. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2018



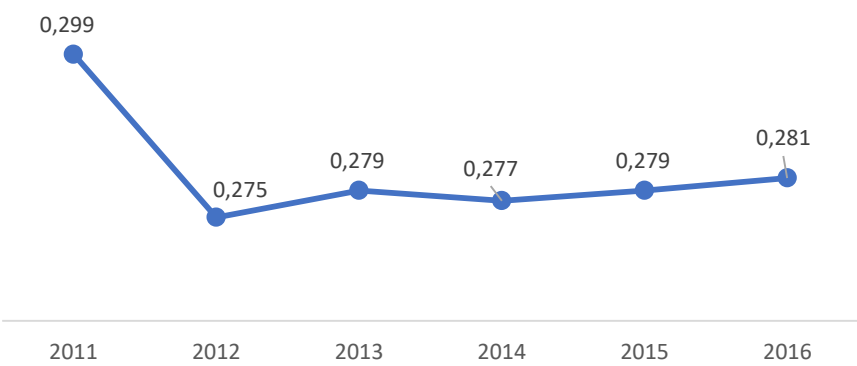
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

3.1.6 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur menggunakan Indeks Wiliamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi.

Ketimpangan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif menggambarkan kenaikan dan penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Sepanjang tahun 2011-2016 angka ketimpangan regional berkisar pada angka 0,28 sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Gambar 3- 6. Nilai Indeks Wiliamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016

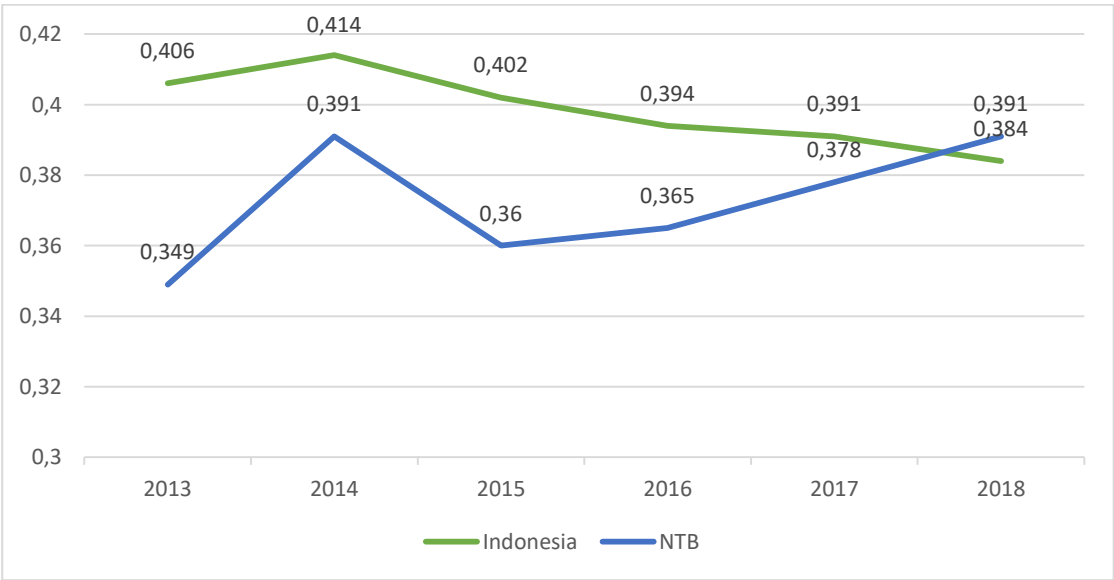


Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

3.1.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Gambar 3- 7. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018



Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam

mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3- 5. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020

No	Uraian	APBD Tahun 2018 (N-2)	APBD Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi Tahun 2020 (N)
1	PENDAPATAN	4.941.129.737.195,07	5.244.782.852.085,00	5.595.222.847.609,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.660.300.469.939,07	1.682.135.490.285,00	1.890.462.534.079,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.269.688.670.076,00	1.340.689.853.350,00	1.531.912.972.145,00
1.1.2	Retribusi Daerah	21.300.001.632,00	23.807.449.350,00	27.185.050.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.080.960.356,96	65.452.614.200,00	68.810.400.000,00
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	309.230.837.874,11	252.185.573.385,00	262.554.111.934,00
1.2	Dana Perimbangan	3.212.386.689.010,00	3.475.324.958.800,00	3.648.050.413.530,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	261.642.853.635,00	237.759.335.800,00	291.802.100.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.537.777.886.000,00	1.583.746.053.000,00	1.599.583.513.530,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.412.965.949.375,00	1.653.819.570.000,00	1.756.664.800.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68.442.578.246,00	87.322.403.000,00	56.709.900.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.904.037.246,00	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27.250.000.000,00	36.346.428.000,00	36.709.900.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	31.288.541.000,00	975.975.000,00	0,00
2	BELANJA	5.373.799.385.918,80	5.253.582.354.490,00	6.140.847.258.310,67
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.020.515.004.599,90	3.071.274.021.800,00	3.179.363.631.672,63

No	Uraian	APBD Tahun 2018 (N-2)	APBD Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi Tahun 2020 (N)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.391.416.619.599,00	1.490.951.044.400,00	1.520.990.962.647,63
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	3.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.005.274.654.773,00	882.781.533.000,00	904.631.514.125,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.906.140.000,00	44.147.740.000,00	20.555.427.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	590.514.685.626,90	625.197.817.345,00	683.185.727.900,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.052.514.400,00	19.195.486.600,00	32.000.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.350.390.201,00	9.000.400.455,00	15.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	2.353.284.381.318,90	2.182.308.332.690,00	2.961.483.626.638,04
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	432.669.648.723,73	28.799.502.405,00	15.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
 - c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
 - d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.

- e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian.
 - g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186.
 - h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.
 - i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
 - k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
 - m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
 - n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah.
2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.
 - b. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
 3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.
 - b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
2. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pada komponen belanja tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.
7. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis.
8. Pemenuhan Pelaksanaan SPM.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan

lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

3.2.5.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3.2.5.4 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

3.2.5.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.

5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPB dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan

menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun kedua sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penyelesaian target-target nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2020.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Prioritas pembangunan daerah yang telah disusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

4. Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	167,01
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	100
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	77,14
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	78,64
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
					Nilai SAKIP	BB
					Indeks Profesionalisme ASN	0,67
					Persentase Kerjasama Daerah	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,35

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,49
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,87
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,84
			Indeks Kebahagiaan			71,9
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,16
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	31,49
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,19
					Indeks Kualitas Air	25,25
					Indeks Kualitas Udara	88,53

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
	daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan			Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,13
					Neraca pengelolaan sampah (%)	54
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,5
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			5,0 - 5,5
				Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.800
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26
			Pertumbuhan Industri	Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	4,04
			Inflasi			3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9.996
			Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio	0,366
			Angka Kemiskinan			12,75
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	75

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	75,74
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72
					Rasio Elektrifikasi	95,09
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,60
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	825.043,71
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.400.000

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			15,65
			Indeks Demokrasi			76,70
				Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Indeks Kriminalitas	15,65
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,45
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)`	60,67

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.

- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.

- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **“Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari”**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2020 yaitu :

1. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah, dengan program prioritas meliputi :

- a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
- b. Mitigasi bencana.
- c. Infrastruktur dasar.
- d. Infrastruktur kawasan.
- e. Konektivitas wilayah.
- f. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.

2. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pengentasan Kemiskinan
- d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- e. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi

BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.

3. Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan investor sektor riil
- b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- c. Pengembangan Pariwisata
- d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.

4. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah

5. Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre, Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable.

Tabel 4- 2. Target Pembangunan Daerah Tahun 2020

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5	3,12	5,0 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,07	3,26
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	16,85	12,75
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380	-	0,366
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	-	67,38

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2020

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Perumusan program prioritas tahun 2020 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2020 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Perumusan program prioritas tahun 2020 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2020 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya keselarasan prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4- 3. Keselarasan Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
I	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial	Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan		Perlindungan Sosial	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial
		Meningkatnya dan meratanya Kesejahteraan Masyarakat		meningkatnya kepemilikan dokumen admisnistrasi			Penataan Adminstrasi Kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan
				meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan				
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat			Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular				Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular
				meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan
								Meningkatnya Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar
			Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi	Meningkatnya peartisipasi pendidikan			Pemerataan Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				meningkatnya kualitas pendidikan				Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan
				meningkatnya kapabilitas, adopsi iptek dan penciptaan inovasi SDM Indonesia			Penelitian dan pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan
			Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi			Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kemampuan ekonomi penduduk miskin dan hampir miskin
			Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa	Meningkatnya kemajuan kebudayaan dalam memperkuat ketahanan budaya dan kerukunan			Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah	Meningkatnya nilai budaya yang dilestarikan
				Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda				Meningkatnya Pembinaan keluarga

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				meningkatnya prestasi olahraga di internasional			Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di level nasional dan internasional
II	Infrastruktur dan Pemerataan wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Perluasan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah		Infrastruktur dasar	Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi				
		Meningkatnya Ketahanan Bencana dipantai utara Jawa	Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana	Meningkatnya indeks konektivitas di daerah tertinggal			Mitigasi bencana.	Meningkatnya ketahanan masyarakat menghadapi resiko bencana

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
		Terpenuhinya perumahan dan Permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat dalam mengurangi daya rusak air				
			Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya indeks konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda			Konektivitas wilayah.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
			Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya pangsa angkutan umum				
				Meningkatnya share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional				
			Transformasi digital	Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK			Teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Aksesibilitas telekomunikasi

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK				
III	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Nilai Tambah, Investasi, Ekspor, Komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital	Penguatan kewirausahaan dan UMKM	Meningkatnya kualitas tatakelola pengeolaan kewirausahaan dan UMKM	Invetasi, Pariwisata, Indusri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian		Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan UMKM
			Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital			Peningkatan Investasi Sektor Riil	Meningkatnya investasi sektor riil

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
			Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan terciptanya Lapangan Kerja baru
			Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi				
			Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi			Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian	Meningkatnya Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
IV	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan	Meningkatnya produksi pangan	Pelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi		Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
		Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumberdaya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
		Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi			Peningkatan Daya Dukung SDA	meningkatkan Daya dukung SDA
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Menurunnya luas lahan kritis				
		Menurunkan indeks resiko bencana indonesia		Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS				
			Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi	Meningkatnya porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional			Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	Meningkatnya Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
			Baru dan Terbarukan (EBT).	Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien				
				Meningkatnya efisiensi energi				
			Peningkatan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan			Peningkatan Daya Tampung Lingkungan	meningkatnya Daya Tampung Lingkungan
			Penguatan Ketahanan Bencana	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana				
V	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Terjaganya Keutuhan Wilayah dan Rasa Aman di Masyarakat	Penguatan Kemampuan Pertahanan	Terpenuhinya kekuatan pokok minimum				
		Meningkatnya Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI diluar negeri	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah indonesia				
		Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap		Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI diluar negeri				

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional				
			Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap				
			Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat				
				Meningkatnya ketahanan dan kemanan siber				
				Meningkatnya kemanann laut				
			Penanggulangan Narkotika dan penguatan Kamtibmas	Menurunnya penyalahgunaan narkotika				
				Menurunnya tingkat kejahatan				

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di setiap provinsinya, begitu juga halnya dengan keberhasilan pembangunan di Provinsi tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten/Kota. Untuk itu, untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan provinsi maka perlu didukung oleh Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2020 berpedoman pada penyusunan RKP tahun 2020 yang disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sedangkan penyusunan kabupaten/kota berpedoman pada RKPD provinsi tahun 2020.

Berdasarkan target pembangunan provinsi NTB pada tahun 2020, terdapat beberapa indikator makro merupakan kontribusi dan akumulasi dari target kabupaten/kota se provinsi NTB. Adapun beberapa indikator makro provinsi NTB yang ditargetkan pada tahun 2020 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5- 1 Target Indikator makro pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Angka Kemiskinan (%)	Rasio Gini (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	Kota Mataram	8,27	0,97	6,06		81,22
2	Kota Bima		1	9,00	0,31	
3	Lombok Barat	> 6	3,10	15,75	< 0,4	66-67
4	Lombok Tengah	6,56	2,84	14,17	0,336	67,19
5	Lombok Timur	5,86	3,48	15,05		67,06
6	Lombok Utara	3,25	2	0,5	0,319	
7	Sumbawa Barat	4,259	5,09	5,7	0,39	71,28
8	Sumbawa	5,5-6,0	3	13,18	0,34-0,33	68,69
9	Dompu	6,7	3,04	12		67,13
10	Bima	6,01		11,62		
NTB		5,0 – 5,5	3,26	12,75	0,366	67,38
Nasional		5,3 – 5,5	4,8 – 5,1	8,5 – 9,0	0,375 – 0,380	72,5

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dilakukan melalui integrasi program baik lintas sektor maupun lintas daerah. Hal ini telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan difokuskan pada 5 aspek prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan sampah berbasis *Zero Waste*
- 2. Revitalisasi Posyandu

3. Pengembangan desa wisata
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Mitigasi bencana

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 25 (dua puluh lima) program prioritas yaitu: (1) Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah; (2) Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan; (3) Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; (4) Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi; dan (5) Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat. Hal ini mendorong percepatan integrasi pembangunan antara pusat dengan daerah.

5.1 Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2020, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir rata-rata diatas 6 persen per tahun namun belum diikuti dengan penurunan yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan didorong pada peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata. Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dari percepatan penurunan angka kemiskinan telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin sesuai dengan pengelompokan 4 (empat) Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang berujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis kewilayahan yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, maka perlu didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Untuk itu, penganggaran penanggulangan kemiskinan perlu memanfaatkan potensi anggaran yang tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dapat dikolaborasikan dengan penganggaraan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan bahkan *stakeholders* lainnya.

Pola penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) dengan pendekatan spasial. Terdapat 13 program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa di 500 desa/kelurahan terbanyak penduduk miskinnya dan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan oleh APBD provinsi (data desa sesuai hasil musrenbang). Sisanya 400 desa kategori miskin tersebut diharapkan dukungan kabupaten dan dana desa untuk mengintervensi dengan 13 program kegiatan tsb. Disamping itu, terdapat 10 desa/kelurahan pilot project (dari 100 desa prioritas provinsi) yang diharapkan kenuntasan penanganannya melalui integrasi dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/kota dan APBDesa serta NGO serta ada 50 desa wisata juga yg diharapkan dukungan Kab/kota serta Pemerintah Desa sesuai kewenangannya masing-masing. Adapun 13 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan hasil kesepakatan (MOU) Pemerintah provinsi NTb dengan Pemerintah Kabupaten Kota yaitu : (1) Pengembangan Bumdes, (2) Jamban Keluarga, (3) Rumah Layah Huni , (4) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), (5) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (6) Pengelolaan Sampah (Bank Sampah), (7) Pembangunan Sarana Air Bersih, (8) Pengembangan Desa Wisata, (9) Pengembangan Pertanian Konservasi, (10) Sambungan Listrik Murah dan Hemat, (11) Desa Berdaya, (12) Motorisasi nelayan atau budidaya udang panani, (13) Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan dan Revitalisasi POSYANDU.

Berikut ini sebaran desa miskin yang akan diintervensi di 10 Kabupaten/kota Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 400-234 Tahun 2019 tentang Penetapan lokasi pelaksanaan progam kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dan Perencanaan tahun 2020 yaitu 10 Desa pilot project pada 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan penanganan Provinsi dan 400 desa prioritas penanggulangan kemiskinan intervensi Kabupaten/Kota Serta Desa / Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 5- 2 10 Desa Pilot Project Pada 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Penanganan Provinsi

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
I	KAB.LOMBOK TIMUR					
1		Pringgabaya	Pringgabaya	4084	12297	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
2		Sakra	Sakra	2951	10601	
3		Pringgabaya	Labuhan Lombok	3254	9643	
4		Aikmel	Aikmel	2599	8660	
5		Pringgabaya	Pohgading	3080	8612	
6		Pringgabaya	Apitaik	2745	8558	
7		Sikur	Kotaraja	2563	8537	
8		Aikmel	Lenek	2115	8015	
9		Masbagik	Masbagik Selatan	2382	7817	
10		Masbagik	Masbagik Utara	2204	7789	
11		Masbagik	Danger	2523	7471	
12		Masbagik	Paok Motong	2162	7438	
13		Keruak	Tanjung Luar	1824	7263	
14		Jerowaru	Jerowaru	2539	7188	
15		Pringgasela	Pringgasela	1744	6766	
16		Terara	Suradadi	1812	6696	
17		Pringgabaya	Batuyang	2193	6620	
18		Suralaga	Anjani	1855	6423	
19		Sukamulia	Dasan Lekong	1958	6394	
20		Sikur	Tetebatu	2020	6371	
21		Montong Gading	Montong Betok	1822	6347	
22		Wanasaba	Mamben Daya	1964	6250	
23		Jerowaru	Pandan Wangi	2176	5905	Desa Tertinggal
24		Sakra Tmur	Menceh	1357	5688	Desa Tertinggal
25		Labuhan Haji	Labuhan Haji	1646	5320	
26		Terara	Sukadana	1672	5217	Desa Tertinggal
27		Aikmel	Kembang Kerang Daya	1547	4604	Pilot Project &

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
						Desa Tertinggal
28		Suela	Mekar Sari	1556	4312	Desa Stunting
29		Jerowaru	Sukaraja	992	3232	Desa Stunting
30		Sambelia	Belanting	1000	3230	Desa Stunting
II	KAB.LOMBOK TENGAH					
1		Praya Barat	Batujai	3430	9201	
2		Jonggat	Labulia	2476	7562	Desa Tertinggal
3		Praya Barat	Mangkung	2463	7010	
4		Jonggat	Puyung	2368	6826	
5		Kopang	Kopang Rembiga	2108	6699	
6		Praya Barat	Penujak	2019	6640	
7		Janapria	Saba	2513	6617	Desa Tertinggal
8		Batukliang	Barabali	2246	6454	
9		Kopang	Dasan Baru	2149	6372	Desa Tertinggal
10		Kopang	Montong Gamang	2096	6351	
11		Jonggat	Sukarara	2372	5956	Desa Tertinggal
12		Praya Barat	Kateng	1818	5941	
13		Kopang	Muncan	1763	5896	
14		Janapria	Loang Maka	1919	5884	Desa Tertinggal
15		Praya Tengah	Pengadang	1883	5781	
16		Pringgarata	Sintung	1800	5756	
17		Pringgarata	Pringgarata	1776	5729	
18		Praya	Jago	1956	5713	
19		Praya	Montong Terep	2016	5669	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
20		Batukliang Utara	Teratak	1633	5027	Desa Stunting
21		Pujut	Mertak	1749	4862	Pilot Project & Desa Tertinggal
22		Praya Timur	Marong	1592	4407	Desa Tertinggal & Stunting
23		Praya Barat	Mekar Sari	1450	4132	Desa Tertinggal & Stunting
24		Pujut	Sukadana	1212	3951	Desa Stunting
III	KAB.LOMBOK BARAT					
1		Gunung Sari	Sesela	2160	8071	
2		Sekotong	Buwun Mas	3123	7941	Desa Stunting
3		Kediri	Kediri	1638	6737	
4		Kuripan	Jagaraga	1966	6714	
5		Kuripan	Kuripan	2334	6434	Desa Stunting
6		Gunung Sari	Taman Sari	2074	6433	
7		Kediri	Banyumulek	2068	6368	Desa Tertinggal
8		Lembar	Lembar Selatan		6118	
9		Sekotong	Pelangan	2158	6080	Desa Tertinggal
10		Lembar	Lembar	1039	6009	Desa Tertinggal & Stunting
11		Sekotong	Sekotong Tengah	1809	5992	Desa Tertinggal
12		Lembar	Jembatan Kembar	367	5758	
13		Sekotong	Batu Putih	1822	5642	Desa Tertinggal & Stunting
14		Labu Api	Bengkel	1624	5604	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
15		Kuripan	Kuripan Utara	1706	5595	Desa Stunting
16		Sekotong	Sekotong Barat	1697	5022	Pilot Project
17		Batu Layar	Sandik	1456	4772	
18		Lingsar	Langko	154	4272	Desa Tertinggal & Stunting
19		Gerung	Banyu Urip	521	3933	Desa Tertinggal & Stunting
20		Gunung Sari	Mekar Sari	897	3452	Desa Tertinggal & Stunting
IV	KAB.LOMBOK UTARA					
1		Tanjung	Sigar Penjalin	1885	6479	Desa Stunting
2		Bayan	Sukadana	1743	6448	Pilot Project
3		Pemenang	Pemenang Barat	1735	6395	
4		Tanjung	Sokong	1926	6061	
5		Kayangan	Sesait	1729	5777	Desa Stunting
6		Gangga	Bentek	1809	5724	Desa Tertinggal
7		Pemenang	Malaka	1518	5420	
8		Tanjung	Jenggala	1612	5359	
9		Bayan	Senaru	1533	5294	
10		Kayangan	Selengen	1461	5178	
11		Bayan	Akar Akar	1438	5076	
12		Tanjung	Tanjung	1532	4975	
13		Gangga	Rempek	1194	4081	Desa Stunting
14		Pemenang	Pemenang Timur	1145	4077	Desa Stunting
15		Kayangan	Kayangan	1247	3817	Desa Stunting

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
V	KOTA MATARAM					
1		Ampenan	Bintaro	1378	5385	Pilot Project
VI	KAB. SUMBAWA BARAT					
1		Taliwang	Batu Putih	723	2643	Pilot Project
2		Poto Tano	Mantar	286	1111	
VII	KAB. SUMBAWA					
1		Alas	Pulau Bungin	455	1525	Pilot Project
2		Batulanteh	Kelungkung	468	1489	Desa Tertinggal & Stunting
VIII	KAB. DOMPU					
1		Kilo	Malaju	407	1338	Pilot Project
2		Woja	Saneo	627	2220	Desa Tertinggal
IX	KAB. BIMA					
1		Palibelo	Ntonggu	819	2937	Pilot Project
2		Ambalawi	Rite	758	2201	Desa Tertinggal & Stunting
X	KOTA BIMA					
1		Rasanae Barat	Tanjung	702	2540	Pilot Project
2		Asakota	Jatiwangi	1184	4528	Desa Tertinggal

Tabel 5- 3 400 desa prioritas penanggulangan kemiskinan intervensi Kabupaten/Kota Serta Desa / Kelurahan

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
I	Kab.Lombok Timur					

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
1		Aikmel	Lenek Kali Bambang	421	1436	Desa Stunting & Tertinggal
2		Sambelia	Dadap	567	1385	Desa Stunting & Tertinggal
3		Suralaga	Bintang Rinjani	410	1299	Desa Stunting & Tertinggal
4		Jerowaru	Batu Nampar Selatan	433	1279	Desa Stunting & Tertinggal
5		Aikmel	Lenek Duren	210	730	Desa Stunting & Tertinggal
6		Aikmel	Toya	1507	4762	Desa Tertinggal
7		Pringgasela	Jurit	1540	4371	Desa Tertinggal
8		Sakra Timur	Gereneng	1365	4114	Desa Tertinggal
9		Sakra Timur	Gelanggang	1169	3937	Desa Tertinggal
10		Pringgasela	Jurit Baru	1541	3920	Desa Tertinggal
11		Sakra Barat	Sukarara	1366	3783	Desa Tertinggal
12		Jerowaru	Sekaroh	1302	3665	Desa Tertinggal
13		Pringgabaya	Pringgabaya Utara	1234	3430	Desa Tertinggal
14		Aikmel	Lenek Baru	1206	3369	Desa Tertinggal
15		Terara	Rarang Selatan	954	3239	Desa Tertinggal
16		Sambelia	Labuhan Pandan	787	2924	Desa Tertinggal
17		Pringgabaya	Teko	985	2879	Desa Tertinggal
18		Sakra Timur	Surabaya	787	2770	Desa Tertinggal
19		Sukamulia	Padamara	949	2753	Desa Tertinggal
20		Sakra Timur	Gereneng Timur	915	2598	Desa Tertinggal
21		Pringgasela	Pengadangan Barat	834	2539	Desa Tertinggal
22		Jerowaru	Seriwe	897	2446	Desa Tertinggal
23		Aikmel	Aik Prapa	813	2307	Desa Tertinggal
24		Aikmel	Kalijaga Baru	821	2203	Desa Tertinggal
25		Aikmel	Kalijaga Selatan	666	2118	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
26		Terara	Leming	729	1999	Desa Tertinggal
27		Sambelia	Dara Kunci	666	1973	Desa Tertinggal
28		Sakra Timur	Surabaya Utara	639	1928	Desa Tertinggal
29		Sakra Timur	Lenting	622	1919	Desa Tertinggal
30		Selong	Denggen Timur	617	1908	Desa Tertinggal
31		Terara	Pandan Duri	892	1859	Desa Tertinggal
32		Jerowaru	Ekas Buana	619	1840	Desa Tertinggal
33		Wanasaba	Bandok	625	1825	Desa Tertinggal
34		Sukamulia	Setanggor	567	1746	Desa Tertinggal
35		Aikmel	Aikmel Utara	519	1697	Desa Tertinggal
36		Sakra Barat	Pejaring	602	1658	Desa Tertinggal
37		Sikur	Sikur Barat	621	1638	Desa Tertinggal
38		Pringgabaya	Tanak Gadang	529	1583	Desa Tertinggal
39		Sambelia	Madayin	466	1520	Desa Tertinggal
40		Sambelia	Padak Guar	436	1504	Desa Tertinggal
41		Keruak	Pulau Maringkik	475	1420	Desa Tertinggal
42		Sakra Barat	Boyemare	495	1307	Desa Tertinggal
43		Sikur	Jeruk Manis	521	1282	Desa Tertinggal
44		Sakra Barat	Mengkuru	439	1273	Desa Tertinggal
45		Terara	Embung Kandong	455	1249	Desa Tertinggal
46		Sakra Timur	Lepak Timur	377	1247	Desa Tertinggal
47		Sukamulia	Jantuk	387	1211	Desa Tertinggal
48		Suralaga	Gapuk	350	1202	Desa Tertinggal
49		Jerowaru	Pene	490	1194	Desa Tertinggal
50		Sembalun	Sembalun Timba Gading	341	1166	Desa Tertinggal
51		Terara	Rarang Batas	431	1143	Desa Tertinggal
52		Suralaga	Gerung Permai	342	1119	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
53		Suela	Puncak Jeringo	384	1119	Desa Tertinggal
54		Wanasaba	Wanasaba Daya	385	1117	Desa Tertinggal
55		Jerowaru	Sukadamai	388	1108	Desa Tertinggal
56		Jerowaru	Kwang Rundun	394	1076	Desa Tertinggal
57		Sambelia	Senanggalih	355	1060	Desa Tertinggal
58		Sakra Barat	Rensing Raya	294	1044	Desa Tertinggal
59		Sakra Barat	Jero Gunung	308	1022	Desa Tertinggal
60		Sakra Barat	Rensing Bat	260	859	Desa Tertinggal
61		Wanasaba	Otak Rarangan	270	751	Desa Tertinggal
62		Wanasaba	Karang Baru Timur	231	643	Desa Tertinggal
63		Wanasaba	Jineng	170	560	Desa Tertinggal
64		Suralaga	Bagikpayung Timur	1072	2505	Desa Stunting
65		Jerowaru	Batunampar	541	1227	Desa Stunting
66		Terara	Jenggik	1558	5862	
67		Suela	Suela	1895	5441	
68		Masbagik	Kesik	1704	5345	
69		Selong	Pancor	1504	5342	
70		Aikmel	Kembang Kerang	1503	5317	
71		Suralaga	Suralaga	1546	5301	
72		Masbagik	Masbagik Timur	1668	5197	
73		Suela	Suntalangu	1801	5179	
74		Pringgasela	Pengadangan	1622	5152	
75		Masbagik	Lendang Nangka	1777	5146	
76		Montong Gading	Perian	1767	5104	
77		Sakra Barat	Gunung Rajak	1292	5090	
78		Terara	Rarang	1462	5001	
79		Suralaga	Bagik Payung	1487	4988	
80		Sikur	Montongban Selatan	1745	4946	
81		Aikmel	Kalijaga	1597	4841	
82		Sakra	Sakra Selatan	1537	4789	
83		Terara	Lando	1778	4782	
84		Sikur	Loyok	1393	4752	
85		Pringgabaya	Seruni Mumbul	1503	4711	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
II	Kab. Lombok Tengah					
1		Janapria	Langko	1169	3623	Desa Stunting & Tertinggal
2		Praya Barat	Banyu Urip	1116	3467	Desa Stunting & Tertinggal
3		Janapria	Lekor	1952	5080	Desa Tertinggal
4		Pujut	Kuta	1446	4845	Desa Tertinggal
5		Janapria	Kerembong	1943	4602	Desa Tertinggal
6		Praya Timur	Beleka	1817	4601	Desa Tertinggal
7		Pringgarata	Pemepek	1457	4457	Desa Tertinggal
8		Pujut	Tumpak	1494	4333	Desa Tertinggal
9		Pringgarata	Menemeng	1347	4147	Desa Tertinggal
10		Batukliang Utara	Lantan	1334	4034	Desa Tertinggal
11		Praya Timur	Kidang	1428	3851	Desa Tertinggal
12		Praya	Mertak Tombok	1296	3770	Desa Tertinggal
13		Pujut	Pengengat	1373	3669	Desa Tertinggal
14		Pujut	Prabu	904	3113	Desa Tertinggal
15		Praya Barat Daya	Montong Ajan	1070	3017	Desa Tertinggal
16		Pringgarata	Arjangka	1112	2958	Desa Tertinggal
17		Praya Barat	Setanggor	1153	2897	Desa Tertinggal
18		Pringgarata	Sisik	1082	2872	Desa Tertinggal
19		Praya Barat Daya	Montong Sapah	952	2652	Desa Tertinggal
20		Batukliang	Tampak Siring	928	2339	Desa Tertinggal
21		Praya Barat Daya	Ranggagata	854	2233	Desa Tertinggal
22		Janapria	Setuta	843	2229	Desa Tertinggal
23		Praya Barat Daya	Serage	786	2176	Desa Tertinggal
24		Praya Timur	Bilelando	728	2037	Desa Tertinggal
25		Praya Tengah	Prai Meke	627	1816	Desa Tertinggal
26		Batukliang	Mekar Bersatu	560	1458	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
27		Pujut	Gapura	514	1374	Desa Tertinggal
28		Praya Barat	Tanak Rarang	527	1172	Desa Tertinggal
29		Praya Barat Daya	Teduh	440	1105	Desa Tertinggal
30		Praya Barat	Selong Belanak	1085	3106	Desa Stunting
31		Praya Timur	Sukaraja	860	2593	Desa Stunting
32		Praya Tengah	Dakung	800	2239	Desa Stunting
33		Kopang	Waja Geseng	1760	5611	
34		Praya	Prapen	1625	5597	
35		Batukliang	Bujak	1770	5574	
36		Pujut	Pengembur	1819	5545	
37		Jonggat	Pengenjek	1748	5384	
38		Praya	Bunut Baok	1680	5378	
39		Pujut	Sengkol	1821	5313	
40		Kopang	Darmaji	1668	5230	
41		Jonggat	Jelantik	1741	5230	
42		Janapria	Janapria	1966	5214	
III	Kab.Lombok Barat					
1		Sekotong	Gili Gede Indah	318	999	Desa Stunting & Tertinggal
2		Kediri	Jagaraga Indah	1062	3826	Desa Tertinggal
3		Kediri	Ombe Baru	1024	3756	Desa Tertinggal
4		Sekotong	Cendi Manik	953	3541	Desa Tertinggal
5		Gerung	Gapuk	944	3417	Desa Tertinggal
6		Lembar	Sekotong Timur	970	3254	Desa Tertinggal
7		Narmada	Krama Jaya	848	2777	Desa Tertinggal
8		Narmada	Badrain	840	2610	Desa Tertinggal
9		Lembar	Mareje	804	2437	Desa Tertinggal
10		Kediri	Dasan Baru	700	2425	Desa Tertinggal
11		Kediri	Lelede	506	2276	Desa Tertinggal
12		Narmada	Sembung	697	2251	Desa Tertinggal
13		Lembar	Mareje Timur	0	1895	Desa Tertinggal
14		Kuripan	Kuripan Timur	110	1831	Desa Tertinggal
15		Lingsar	Gegelang	212	1806	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
16		Narmada	Sedau	718	1749	Desa Tertinggal
17		Narmada	Buwun Sejati	103	1687	Desa Tertinggal
18		Gunung Sari	Guntur Macan	620	1680	Desa Tertinggal
19		Gunung Sari	Gelangsar	115	1599	Desa Tertinggal
20		Batu Layar	Bengkaung	101	1580	Desa Tertinggal
21		Gunung Sari	Bukit Tinggi	62	1206	Desa Tertinggal
22		Lingsar	Saribaye	125	1095	Desa Tertinggal
23		Narmada	Pakuan	64	1010	Desa Tertinggal
24		Lingsar	Gontoran	115	972	Desa Tertinggal
25		Batu Layar	Pusuk Lestari	80	593	Desa Tertinggal
26		Lingsar	Batu Mekar	1634	5051	Desa Stunting
27		Gunung Sari	Penimbung	1379	2540	Desa Stunting
28		Gerung	Mesanggok	681	2271	Desa Stunting
29		Gunung Sari	Mambalan	1154	1746	Desa Stunting
30		Gerung	Babussalam	154	5447	
31		Gerung	Beleke	233	5104	
32		Labu Api	Bajur	1525	4681	
33		Labu Api	Merembu	1305	4333	
34		Kediri	Gelogor	1181	4310	
IV	Kab.Lombok Utara					
1		Kayangan	Gumantar	1215	4384	
2		Kayangan	Salut	814	2704	
3		Kayangan	Pendua	473	1746	
4		Tanjung	Teniga	593	1709	
5		Bayan	Karang Bajo	784	2713	
6		Bayan	Mumbul Sari	769	2387	
7		Kayangan	Dangiang	677	2169	
8		Gangga	Genggelang	1435	4814	
9		Bayan	Anyar	1443	4787	
V	Kota Mataram					
1		Sekarbela	Jempong Baru	2472	8557	
2		Sandubaya	Selagalas	1884	6738	
3		Selaparang	Dasan Agung	1392	5351	
4		Ampenan	Ampenan Tengah	1329	4965	
5		Sandubaya	Babakan	1310	4767	
6		Sandubaya	Bertais	1353	4752	
7		Mataram	Pagutan	1226	4730	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
8		Cakranegara	Sayang Sayang	1395	4662	
9		Sekarbela	Karang Pule	1154	4575	
10		Sandubaya	Mandalika	1298	4556	
11		Selaparang	Monjok	1187	4329	
12		Mataram	Pagesangan Barat	1020	4172	
13		Sandubaya	Turida	1097	3947	
14		Ampenan	Pejeruk	1012	3874	
VI	Sumbawa Barat					
1		Poto Tano	Kiantar	235	927	Desa Stunting & Tertinggal
2		Sekongkang	Tatar	135	516	Desa Stunting & Tertinggal
3		Seteluk	Loka	131	509	Desa Stunting & Tertinggal
4		Brang Rea	Sapugara Bree	481	1754	Desa Tertinggal
5		Poto Tano	Tua Nanga	297	1241	Desa Tertinggal
6		Seteluk	Seteluk Atas	288	1153	Desa Tertinggal
7		Brang Rea	Seminar Salit	281	1043	Desa Tertinggal
8		Taliwang	Lalar Liang	288	1022	Desa Tertinggal
9		Brang Ene	Kalimanton g	266	889	Desa Tertinggal
10		Brang Rea	Lamuntet	190	811	Desa Tertinggal
11		Taliwang	Seloto	252	785	Desa Tertinggal
12		Brang Ene	Mura	205	727	Desa Tertinggal
13		Taliwang	Tamekan	224	711	Desa Tertinggal
14		Brang Ene	Manemeng	162	580	Desa Tertinggal
15		Poto Tano	Tebo	156	563	Desa Tertinggal
16		Brang Rea	Moteng	142	522	Desa Tertinggal
17		Seteluk	Lamusung	136	501	Desa Tertinggal
18		Brang Ene	Lampok	133	480	Desa Tertinggal
19		Seteluk	Seran	116	433	Desa Tertinggal
20		Sekongkang	Tongo	145	395	Desa Tertinggal
21		Brang Ene	Mataiyang	79	274	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
22		Sekongkang	Ai Kangkung	212	832	Desa Stunting
23		Sekongkang	Talonang Baru	231	723	Desa Stunting
VII	Sumbawa					
1		Moyohulu	Maman	301	984	Desa Stunting & Tertinggal
2		Rhee	Luk	245	903	Desa Stunting & Tertinggal
3		Moyohulu	Sempe	263	797	Desa Stunting & Tertinggal
4		Orong Telu	Mungkin	219	711	Desa Stunting & Tertinggal
5		Rhee	Rhee Loka	384	1516	Desa Tertinggal
6		Alas Barat	Mapin Rea	408	1441	Desa Tertinggal
7		Buer	Juru Mapin	413	1398	Desa Tertinggal
8		Maronge	Pemasar	386	1334	Desa Tertinggal
9		Moyohilir	Kakiang	372	1210	Desa Tertinggal
10		Moyohilir	Olat Rawa	376	1152	Desa Tertinggal
11		Plampang	Sp Iii Prode	313	1078	Desa Tertinggal
12		Plampang	Brang Kolong	275	1054	Desa Tertinggal
13		Moyohulu	Mokong	346	1047	Desa Tertinggal
14		Labuhan Badas	Sebotok	373	1022	Desa Tertinggal
15		Utan	Bale Brang	311	999	Desa Tertinggal
16		Lantung	Sepukur	303	926	Desa Tertinggal
17		Labangka	Suka Mulya	294	912	Desa Tertinggal
18		Ropang	Lebangkar	274	864	Desa Tertinggal
19		Lenangguar	Ledang	215	839	Desa Tertinggal
20		Moyohulu	Lito	238	765	Desa Tertinggal
21		Moyohilir	Ngeru	225	759	Desa Tertinggal
22		Moyohulu	Marga Karya	243	744	Desa Tertinggal
23		Orong Telu	Senawang	199	743	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
24		Orong Telu	Sebeok	170	689	Desa Tertinggal
25		Empang	Jotang	204	678	Desa Tertinggal
26		Plampang	Sp li Prode	181	639	Desa Tertinggal
27		Plampang	Sp I Prode	132	424	Desa Tertinggal
28		Ropang	Lebin	108	347	Desa Tertinggal
29		Lantung	Ai Mual	102	329	Desa Tertinggal
30		Ropang	Ranan	107	262	Desa Tertinggal
31		Rhee	Sampe	59	252	Desa Tertinggal
32		Lantung	Padesa	49	165	Desa Tertinggal
33		Utan	Stowe Brang	706	2444	Desa Stunting
34		Lopok	Berora	467	1685	Desa Stunting
35		Batulanteh	Bao Desa	353	1047	Desa Stunting
36		Empang	Ongko	275	862	Desa Stunting
37		Moyohulu	Berang Rea	268	803	Desa Stunting
38		Plampang	Usar	471	1775	
39		Labuhan Badas	Labuan Sumbawa	1408	5132	
40		Labuhan Badas	Karang Dima	922	3509	
41		Sumbawa	Brang Biji	923	3405	
42		Unter Iwes	Pelat	915	3386	
43		Utan	Pukat	964	3355	
44		Utan	Jorok	948	3216	
45		Lape	Lape	788	2756	
46		Alas	Dalam	670	2561	
47		Moyohilir	Serading	787	2553	
48		Batulanteh	Baturotok	662	2455	
49		Lunyuk	Pada Suka	738	2448	
50		Alas	Juranalas	694	2406	
51		Lopok	Langam	604	2398	
52		Sumbawa	Seketeng	622	2388	
53		Alas	Luar	584	2269	
54		Alas	Marenteh	544	2093	
55		Labuhan Badas	Labuhan Badas	594	2081	
56		Alas	Baru	508	2047	
57		Lunyuk	Emang Lestari	559	2013	
58		Utan	Motong	537	2008	
59		Labangka	Suka Damai	607	1998	
60		Sumbawa	Bugis	498	1973	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
61		Buer	Labuhan Burung	516	1933	
62		Lape	Dete	483	1879	
63		Alas Barat	Lekong	515	1840	
64		Plampang	Sepayung	520	1825	
65		Lopok	Lopok	505	1805	
66		Labangka	Labangka	547	1776	
67		Tarano	Mata	528	1771	
68		Alas	Kalimango	441	1744	
69		Utan	Labuan Bajo	454	1710	
70		Lenangguar	Lenangguar	497	1704	
71		Utan	Sabedo	497	1692	
72		Tarano	Labuan Aji	486	1662	
73		Plampang	Teluk Santong	417	1658	
74		Moyohulu	Leseng	454	1616	
75		Batulanteh	Tepal	443	1599	
76		Sumbawa	Brang Bara	390	1569	
77		Labuhan Badas	Labuan Aji	486	1562	
78		Lape	Labuan Kuris	471	1556	
79		Sumbawa	Pekat	495	1541	
80		Unter Iwes	Kerekeh	428	1513	
81		Lape	Hijrah	430	1487	
82		Tarano	Labuan Jambu	395	1465	
VIII	Dompu					
1		Hu'u	Cempi Jaya	300	969	Desa Stunting & Tertinggal
2		Woja	Simpasai	1038	3732	Desa Tertinggal
3		Woja	Wawonduru	721	2596	Desa Tertinggal
4		Kempo	Soro	440	1556	Desa Tertinggal
5		Hu'u	Daha	398	1410	Desa Tertinggal
6		Woja	Serakapi	305	1099	Desa Tertinggal
7		Hu'u	Adu	227	761	Desa Tertinggal
8		Hu'u	Marada	218	704	Desa Tertinggal
9		Kempo	Konte	215	686	Desa Tertinggal
10		Woja	Bakajaya	868	3018	Desa Stunting
11		Dompu	Oo	690	2920	Desa Stunting
12		Woja	Mumbu	681	2324	Desa Stunting
13		Dompu	Dorebara	624	2087	Desa Stunting

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
14		Pajo	Ranggo	491	1638	Desa Stunting
15		Pekat	Sorinomo	385	1400	Desa Stunting
16		Hu'u	Persiapan Jala	279	1115	Desa Stunting
17		Dompu	Katua	274	982	Desa Stunting
18		Pekat	Upt Nangakara	232	781	Desa Stunting
19		Woja	Montabaru	819	3115	
20		Pekat	Doropeti	751	2817	
21		Woja	Kandai Dua	772	2774	
22		Pekat	Pekat	853	2694	
23		Woja	Matua	717	2675	
24		Pekat	Kadindi	747	2609	
25		Woja	Bara	680	2488	
26		Dompu	Mangge Asi	639	2374	
27		Kempo	Kempo	730	2373	
28		Woja	Nowa	606	2367	
29		Kempo	Ta'a	676	2196	
IX	Bima					
1		Monta	Simpasai	1436	3966	Desa Tertinggal
2		Woha	Risa	962	3259	Desa Tertinggal
3		Lambu	Soro	804	2992	Desa Tertinggal
4		Sape	Parangina	833	2813	Desa Tertinggal
5		Langgudu	Karumbu	665	2393	Desa Tertinggal
6		Lambu	Sumi	670	2323	Desa Tertinggal
7		Wera	Pai	814	2299	Desa Tertinggal
8		Sape	Sari	581	2265	Desa Tertinggal
9		Mada Pangga	Rade	658	2126	Desa Tertinggal
10		Bolo	Timu	648	2077	Desa Tertinggal
11		Monta	Tolotangga	573	1999	Desa Tertinggal
12		Belo	Renda	772	1943	Desa Tertinggal
13		Soromandi	Sai	512	1897	Desa Tertinggal
14		Langgudu	Karampi	608	1857	Desa Tertinggal
15		Sape	Poja	478	1851	Desa Tertinggal
16		Soromandi	Sampungu	521	1849	Desa Tertinggal
17		Langgudu	Rupe	653	1838	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
18		Belo	Ncera	660	1824	Desa Tertinggal
19		Wera	Nunggi	549	1689	Desa Tertinggal
20		Lambu	Hidirasa	659	1674	Desa Tertinggal
21		Ambalawi	Mawu	442	1668	Desa Tertinggal
22		Monta	Tangga Baru	490	1611	Desa Tertinggal
23		Sape	Jia	456	1583	Desa Tertinggal
24		Wera	Bala	495	1576	Desa Tertinggal
25		Parado	Kuta	469	1515	Desa Tertinggal
26		Palibelo	Roi	464	1505	Desa Tertinggal
27		Monta	Pela	431	1473	Desa Tertinggal
28		Woha	Pandai	396	1450	Desa Tertinggal
29		Sanggar	Taloko	427	1410	Desa Tertinggal
30		Langgudu	Dumu	425	1405	Desa Tertinggal
31		Lambu	Lambu	408	1373	Desa Tertinggal
32		Monta	Monta	462	1371	Desa Tertinggal
33		Wawo	Raba	383	1368	Desa Tertinggal
34		Langgudu	Doro O'o	394	1363	Desa Tertinggal
35		Sanggar	Boro	411	1323	Desa Tertinggal
36		Tambora	Labuhan Kananga	371	1308	Desa Tertinggal
37		Lambu	Lanta Barat	453	1290	Desa Tertinggal
38		Lambu	Nggelu	400	1266	Desa Tertinggal
39		Langgudu	Wadu Ruka	432	1244	Desa Tertinggal
40		Mada Pangga	Campa	426	1215	Desa Tertinggal
41		Lambu	Melayu	330	1191	Desa Tertinggal
42		Palibelo	Tonggorisa	483	1178	Desa Tertinggal
43		Langgudu	Rompo	306	1169	Desa Tertinggal
44		Lambu	Mangge	377	1151	Desa Tertinggal
45		Lambitu	Sambori	318	1144	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
46		Tambora	Kawinda Nae	342	1134	Desa Tertinggal
47		Tambora	Kawinda Toi	410	1132	Desa Tertinggal
48		Donggo	Bumi Pajo	285	1131	Desa Tertinggal
49		Mada Pangga	Mpuri	409	1126	Desa Tertinggal
50		Wawo	Maria Utara	314	1112	Desa Tertinggal
51		Ambalawi	Kole	395	1098	Desa Tertinggal
52		Lambu	Sangga	56	1096	Desa Tertinggal
53		Sanggar	Sandue	356	1067	Desa Tertinggal
54		Donggo	Mpili	260	1021	Desa Tertinggal
55		Sanggar	Piong	346	977	Desa Tertinggal
56		Palibelo	Tonggondoa	308	951	Desa Tertinggal
57		Donggo	Kala	258	935	Desa Tertinggal
58		Wawo	Tarlawi	235	931	Desa Tertinggal
59		Belo	Lido	304	913	Desa Tertinggal
60		Palibelo	Ragi	116	895	Desa Tertinggal
61		Belo	Soki	261	886	Desa Tertinggal
62		Donggo	Rora	376	882	Desa Tertinggal
63		Wera	Kalajena	23	873	Desa Tertinggal
64		Monta	Sondo	248	867	Desa Tertinggal
65		Sape	Tanah Putih	257	785	Desa Tertinggal
66		Sape	Boke	206	754	Desa Tertinggal
67		Monta	Waro	63	749	Desa Tertinggal
68		Wera	Tadewa	201	715	Desa Tertinggal
69		Monta	Nontotera	89	714	Desa Tertinggal
70		Soromandi	Wadukopa	176	697	Desa Tertinggal
71		Donggo	Palama	200	695	Desa Tertinggal
72		Lambitu	Teta	286	685	Desa Tertinggal
73		Langgudu	Kalodu	175	658	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
74		Sanggar	Oi Saro	205	656	Desa Tertinggal
75		Wawo	Riamau	167	636	Desa Tertinggal
76		Langgudu	Kawuwu	205	620	Desa Tertinggal
77		Palibelo	Padolo	86	581	Desa Tertinggal
X	Kota Bima					
1		Raba	Rite	407	1524	Desa Stunting & Tertinggal
2		Asakota	Melayu	855	3144	Desa Tertinggal
3		Asakota	Kolo	1048	3834	Desa Stunting
4		Raba	Ntobo	750	2617	Desa Stunting
5		Raba	Rabadompu Timur	541	1864	Desa Stunting

Selain itu untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB, sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat dapat diharapkan berjalan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pengembangan pariwisata kerakyatan diperlukan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. Terdapat 99 desa wisata yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan dan berkelanjutan yang lebih optimal.

Berikut penetapan 99 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2019-2020 sesuai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 050.13-366 Tahun 2019:

Tabel 5- 4 . 99 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2019-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
1	BIMA	1. KAWINDA TOI
		2. PIONG
		3. LABUHAN KANANGA
		4. OI PANIHI
		5. SAMBORI
		6. MARIA
		7. SORO
		8. RISA
		9. PANDA
		10. TOLOTANGGA

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
2	DOMPU	1. Saneo
		2. Malaju
		3. Pancasila
		4. HUU
		5. Doropeti
		6. Riwo
		7. Madaprama
		8. Nangamiro
		9. Lanci Jaya
3	Kota Bima	1. Kolo
		2. DARA
		3. KUMBE
		4. ULE
4	Kota Mataram	1. Tanjung Karang
		2. Jempong Baru
		3. Karang Pule
		4. Sayang Sayang
5	Lombok Barat	1. Buwun Mas
		2. MEKAR SARI
		3. PUSUK LESTARI
		4. PELANGAN
		5. SENGIGI
		6. BANYUMULEK
		7. LINGSAR
		8. SENTELUK
		9. KARANG BAYAN
		10. GILI GEDE INDAH
		11. SEKOTONG BARAT
		12. BATU PUTIH
		13. LABUAN TERENG
6	Lombok Tengah	1. SUKARARA
		2. MARONG
		3. MERTAK
		4. LANTAN
		5. KUTA
		6. LABULIA
		7. BONJERUK
		8. SEPAKEK
		9. SELONG BELANAK
		10. MEKAR SARI
		11. KARANG SIDEMEN

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
		12. REMBITAN
		13. AIK BERIK
		14. TANAK BEAK
		15. PENUJAK
		16. SENGKOL
7	LOMBOK TIMUR	1. TETEBATU
		2. SEMBALUN BUMBUNG
		3. KEMBANG KUNING
		4. PRINGGASELA
		5. TANJUNG LUAR
		6. JERUK MANIS
		7. SEKAROH
		8. SEMBALUN LAWANG
		9. LENEK RAMBAN BIAK
		10. JEROWARU
		11. LABUHAN PANDAN
		12. SUGIAN
		13. LENEK PESIRAMAN
		14. BEBIDAS
		15. SENANGGALIH
		16. SERIWE
		17. SAPIT
		18. SEMBALUN
8	LOMBOK UTARA	1. SENARU
		2. PEMENANG BARAT
		3. GENGSELANG
		4. SOKONG
		5. KARANG BAJO
		6. SANTONG
		7. MEDANA
		8. GILI INDAH
9	SUMBAWA	1. PULAU BUNGIN
		2. MARENTE
		3. BATUDULANG
		4. LANTUNG
		5. LABUAN AJI
		6. LABUAN JAMBU
		7. LENANGGUAR
		8. TELUK SANTONG
		9. LEPADE
10	SUMBAWA BARAT	1. MANTAR

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
		2. TATAR
		3. POTO TANO
		4. LABUHAN KERTASARI
		5. LABUAN LALAR
		6. BERU
		7. PASIR PUTIH
		8. SEKONGKANG ATAS

Sementara itu berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, dari 99 lokasi desa wisata ada 20 lokasi desa wisata yang menjadi kesepakatan sebagai target di tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5- 5. 20 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
1	BIMA	1. SORO
		2. RISA
2	DOMPU	3. MALAJU
		4. HUU
3	KOTA BIMA	5. DARA
		6. ULE
4	KOTA MATARAM	7. SAYANG SAYANG
5	LOMBOK BARAT	8. LINGSAR
		9. GILI GEDE INDAH
6	LOMBOK TENGAH	10. MERTAK
		11. LANTAN
		12. KUTA
7	LOMBOK TIMUR	13. LABUHAN PANDAN
		14. SUGIAN
		15. SENANGGALIH
8	SUMBAWA	16. MARENTE
		17. LABUAN AJI
		18. LABUAN JAMBU
9	SUMBAWA BARAT	19. LABUHAN KERTASARI
		20. BERU

5.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota :

Pendidikan

Pemerintah Provinsi :

1. Pendidikan menengah
2. Pendidikan khusus

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi :

1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. pelayanan kesehatan ibu hamil
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi :

1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Pemerintah Provinsi :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. pelayanan informasi rawan bencana
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Sementara itu laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut contoh laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2020 yaitu **“Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari”**.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem *entebePlan* (<http://e-planning.ntbprov.go.id/>) sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 telah ditetapkan sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 7- 1. Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Risiko Bencana	172,18	167,01	162	157,14	152,43
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15
5	Indeks Kebahagiaan	-	71,9	-	-	73,1
6	Persentase Balita <i>Stunting</i>	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53
8	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Pertambangan Bijih Logam)	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
9	Pertumbuhan Industri	3,2	4,04	5,26	6,7	8,4
10	Inflasi	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
11	Gini Ratio	0,367	0,366	0,365	0,362	0,36
12	Angka Kemiskinan	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75
13	Indeks Kriminalitas	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25
14	Indeks Demokrasi	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69
15	Indeks Pembangunan Gender	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Tabel 7- 2. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERA AN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0
2	Inflasi		3,7	3,16	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Angka Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	9,75
4	Gini Ratio		0,378	0,372	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	0,360
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15	71,15
6	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-	71,9	-	-	73,1	73,1
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
7	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
8	Indeks Kebermanfaata n Infrastruktur		-	74,60	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56,99	57,03	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53	59,53
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	87,51	87,79	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
11	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	172,18	167,01	162,00	157,14	152,43	152,43

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
13	Indeks Pelayanan Publik		97,58	97,68	97,78	97,87	97,97	98,07	98,17	98,17
14	Indeks Demokrasi		76,04	-	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69	77,69
C	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
16	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
1.02	Kesehatan									
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62	75,72	78,81	81,91	85,00	85,00
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,55	66,07	66,2	66,43	66,65	66,82	66,82
20	Persentase Balita Stunting	%	37,20	33,49	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49	28,49
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
21	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	%	-	10,00	50,00	100,00				100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	akibat bencana gempa bumi									
22	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	86,65	88,65	89,65	90,65	90,65
23	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	75,74	77,55	79,52	81,66	81,66
24	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		55,31	55,35	56,18	57,07	58,01	59,01	60,06	60,06
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	18,18	36,36	54,55	72,73	72,73
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
26	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	-	20,00	75,00	100,00				100,00
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92,01	92,37	92,74	93,10	93,46	93,82	93,82
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
28	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0,00	10,00	50,00	100,00				100,00
29	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0,00	10,00	50,00	100,00				100,00
30	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Persentase Penanganan Pelanggaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Produk Hukum Daerah (%)									
32	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	16,36	20,97	25,58	30,18	30,18
33	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%		0,41	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
1.06	Sosial									
34	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54,50	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	6,60	7,60	8,60	10,00	10,00
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.01	Tenaga Kerja									
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,26	3,21	3,19	3,17	3,17
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,95	60,19	60,43	60,67	60,91	61,16	61,40	61,40
38	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90,36	90,72	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55	92,55
39	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,57	20,72	20,87	21,00	21,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.03	Pangan									
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		77,80	78,30	78,80	79,60	80,60	81,80	83,30	83,30
2.05	Lingkungan Hidup									
41	Indeks Kualitas Air		20,25	20,25	22,75	25,25	27,75	30,25	32,75	32,75
42	Indeks Kualitas Udara		88,02	88,37	88,45	88,53	89,01	89,09	89,17	89,17
43	Neraca pengolahan sampah	%	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	57,00
2.04	Pertanahan									
44	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
45	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio		0,78	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
46	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	26,74	29,01	31,28	33,69	33,69
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
47	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,08	1,04	1,00	0,95	0,95
2.09	Perhubungan									
48	Indeks konektivitas		-	74,76	76,7	78,64	80,58	82,52	84,47	84,47

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	transportasi publik									
2.10	Komunikasi dan Informatika									
49	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level		1	2	2,5	3	3,5	4	4
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
50	Persentase Koperasi Aktif	%	62,00	60,00	62,00	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
2.12	Penanaman Modal									
51	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	88.410,10
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									
52	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	30	35	40	45	175
53	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	15	15	15	15	
54	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68,07	68,18	68,28	68,39	68,39
2.14	Statistik									
55	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
2.15	Persandian									
56	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	I	I	II	II+	III	III+	IV	IV

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.16	Kebudayaan									
57	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	-	-	3,52	7,05	10,57	14,10	17,62	17,62
58	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8,70	17,39	20,00	24,35	28,70	33,04	37,39	37,39
2.17	Perpustakaan									
59	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	23,91	27,90	31,89	35,87	39,86	39,86
2.18	Kearsipan									
61	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
3	URUSAN PILIHAN									
3.01	Kelautan dan Perikanan									
62	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,76	4,75	4,75	4,74	4,74
3.02	Pariwisata									
63	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
64	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,95	3,10	3,25	3,35	3,35
65	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	4.000.000	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
66	Persentase Geosites yang Tertata	%	-	-	-	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
3.03	Pertanian									

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
67	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	%	1.292.781,85	308.343,18	820.307,23	825.043,71	829.328,38	833.239,98	836.838,30	836.838,30
68	Nilai Tukar Petani		107,95	>105	>105	>105	>105	>105	>105	>105
3.04	Kehutanan									
69	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,27	61,27	60,03	60,13	60,23	60,33	60,43	60,43
70	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	0,08	0,08	5,08	10,08	15,08	20,08	20,08
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral									
71	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	95,09	95,72	96,35	97,00	97,00
3.06	Perdagangan									
72	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	9.956	9.996	10.036	10.076	10.116	10.116
3.07	Perindustrian									
73	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	235.421,31	67.344,90	164.565,72	168.395,36	171.859,70	175.022,39	177.931,78	177.931,78
74	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	2,2	2,69	3,14	3,55	3,55
75	Pertumbuhan Industri	%		2,68	3,20	4,04	5,26	6,70	8,40	8,40
3.08	Transmigrasi									
76	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	85	90	95	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
4.01	Administrasi Pemerintahan									
77	Skor EKPPD		2,9752	3,0012	3,0329	3,0462	3,0557	3,0652	3,0747	3,0747
78	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,1	35,45	35,81	36,16	36,53	36,89	37,26	37,26
81	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	2	2	12	12
82	Jumlah Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan	Jumlah Kerjasama	-	-	36	38	49	58	62	243
4.02	Pengawasan									
83	Nilai SAKIP		B	B	B	BB	BB	A	A	A
4.03	Perencanaan									
84	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.04.	Keuangan									
85	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,46	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,57
4.05	Kepegawaian dan Diklat									

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
87	Indeks Profesionalisme ASN		0,00	0,60	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,75
4.06	Pendidikan dan Pelatihan									
88	Akreditasi BPSDM	Level Akreditasi	B	B	B	A	A	A	A	A
89	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	10,43	11,35	11,42	11,49	11,56	56,25
4.07	Penelitian dan Pengembangan									
90	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00

BAB VIII PENUTUP

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang.

Perencanaan Tahun 2020 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan

rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2020.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	18	19	20	21	22	23
1	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				1,642,709,413,250				374,882,023,657
1:01	PENDIDIKAN				362,239,819,913				374,882,023,657
1:01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				362,239,819,913				374,882,023,657
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				348,826,089,962				374,882,023,657
1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,161,685,316				363,133,389
1.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	P A D	Provinsi NTB	4893 surat	6,172,000	Provinsi NTB	4893 surat	7,383,537
1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	P A D	Provinsi NTB	33 rekening	350,270,400	Provinsi NTB	33 rekening	373,434,105
1.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa	P A D	Provinsi NTB	204 OB	200,796,080	Provinsi NTB	204 OB	216,082,512
1.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan	P A D	Provinsi NTB	180 OB	315,167,900	Provinsi NTB	180 OB	335,597,580
1.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	P A D	Provinsi NTB	22054 buah	42,599,675	Provinsi NTB	22054 tahun	47,217,614
1.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	P A D	Provinsi NTB	123745 lembar	15,000,000	Provinsi NTB	123745 lembar	20,417,925
1.01.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	P A D	Provinsi NTB	232 Buah	10,273,200	Provinsi NTB	232 buah	10,941,120
1.01.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	DAU	Provinsi NTB	3650 exemplar	25,550,000	Provinsi NTB	3650 exemplar	31,802,450
1.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	P A D	Provinsi NTB	25691 Porsi	1,096,260,661	Provinsi NTB	25691 Porsi	1,167,142,130
1.01.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	frekuensi koordinasi	DAU	Provinsi NTB	65 OT	388,000,000	Provinsi NTB	65 OT	414,127,480
1.01.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	DAU	Provinsi NTB	42 OB	356,860,000	Provinsi NTB	42 OB	427,344,078
1.01.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	frekuensi koordinasi	P A D	Provinsi NTB	67 kali	154,000,000	Provinsi NTB	67 kali	166,027,809
1.01.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	P A D	Provinsi NTB	84 OB	144,739,000	Provinsi NTB	84 OB	154,105,896
1.01.01.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola	P A D	Provinsi NTB	4900 arsip	55,996,400	Provinsi NTB	4900 arsip	59,721,200
1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			1,059,550,273				61,190,677
1.01.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	DAU	Provinsi NTB	2 unit	62,470,000	Provinsi NTB	2 unit	66,511,608
1.01.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DAU	Provinsi NTB	1 paket	10,500,000	Provinsi NTB	1 paket	11,025,000
1.01.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah Meublaier	DAU	Provinsi NTB	20 unit	45,762,000	Provinsi NTB	20 unit	48,726,460
1.01.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah komputer dan alat elektronik	DAU	Provinsi NTB	5 unit	100,685,710	Provinsi NTB	5 unit	107,198,195
1.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	3 unit	45,766,233	Provinsi NTB	3 unit	48,726,453
1.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	40 unit	493,360,000	Provinsi NTB	40 unit	525,271,160
1.01.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	DAU	Provinsi NTB	91 unit	86,500,000	Provinsi NTB	91 unit	134,972,292
1.01.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Terpeliharanya taman, tempat parkir, dan halaman kantor	DAU	Provinsi NTB	1 unit	13,729,870	Provinsi NTB	1 unit	14,617,936
1.01.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DAU	Provinsi NTB	1 unit	200,776,460	Provinsi NTB	1 unit	213,762,949
1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			957,043,300				11,798,100
1.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat	P A D	Provinsi NTB	795 org	936,643,300	Provinsi NTB	795 org	1,164,196,410
1.01.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur	DAU	Provinsi NTB	250 org	20,400,000	Provinsi NTB	250 org	49,945,250
1.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			355,743,000				25,611,195

1.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	DAU	Provinsi NTB	2 dok	119,671,200	Provinsi NTB	2 dok	149,171,380
1.01.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	7 dokumen	236,071,800	Provinsi NTB	7 dokumen	279,168,253
1.01.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			122,189,350				12,332,688
1.01.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terkelolanya asset sesuai standar	P A D	Provinsi NTB	1 dokumen	122,189,350	Provinsi NTB	1 dokumen	153,239,525
1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs ; Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI ; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs ; Angka DO SD/MI ; Angka DO SMP / MTs			49,689,125,296				52,802,640,817
1.01.01.01.22.04	Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	Tersusunnya peraturan daerah/peraturan gubernur bidang pendidikan	DAU	Provinsi NTB	3 Produk Hukum	224,719,500	Provinsi NTB	3 Produk Hukum	375,000,000
1.01.01.01.22.10	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah peserta seleksi	P A D	Provinsi NTB	200 orang	679,471,600	Provinsi NTB	200 orang	720,145,400
1.01.01.01.22.11	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta lomba	P A D	Kota Mataram	210 orang	1,282,613,640	Kota Mataram	210 orang	1,359,392,370
1.01.01.01.22.13	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	DAU	se-NTB	3981 sekolah	867,235,000	se-NTB	3981 sekolah	919,583,133
1.01.01.01.22.14	Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3	Jumlah peserta	P A D	se-NTB	76 orang	3,185,870,752	se-NTB	76 orang	3,376,580,288
1.01.01.01.22.15	Pengembangan Mutu Pendidikan	Jumlah jam tatap muka	DAU	Provinsi NTB	1313966 jtm	43,414,711,404	Provinsi NTB	1313966 jtm	46,013,775,354
1.01.01.01.22.16	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Jumlah dokumen manajemen BOS	DAU	Provinsi NTB	12 dokumen	34,503,400	Provinsi NTB	12 dokumen	38,164,272
1.01.01.01.23	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) ; Persen Penurunan Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMA minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			39,652,425,383				46,694,495,111
1.01.01.01.23.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung baru SMA	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	1,995,300,000	Provinsi NTB	1 Unit	2,132,940,000
1.01.01.01.23.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	DAK,DAU	Provinsi NTB	47 Ruang	13,891,350,159	Provinsi NTB	47 Ruang	18,104,908,634
1.01.01.01.23.04	Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	DAU	Provinsi NTB	1 Ruang	400,000,000	Provinsi NTB	1 Ruang	511,905,600
1.01.01.01.23.05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	DAK	Provinsi NTB	27 Ruang	12,905,844,480	Provinsi NTB	27 Ruang	13,793,846,454
1.01.01.01.23.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir yang dibangun	DAU	Provinsi NTB	8 m2	1,600,000,000	Provinsi NTB	8 m2	1,880,355,000
1.01.01.01.23.11	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah sekolah yang dibangun	DAU	Provinsi NTB	2 Ruang	224,000,000	Provinsi NTB	2 Ruang	269,648,520
1.01.01.01.23.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	DAU	Provinsi NTB	1 Ruang	34,000,000	Provinsi NTB	1 Ruang	587,119,800
1.01.01.01.23.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	DAU	Provinsi NTB	3 Ruang	103,800,000	Provinsi NTB	3 Ruang	134,712,000
1.01.01.01.23.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku dan alat tulis siswa	DAU	Provinsi NTB	20000 Eksemplar	1,128,000,000	Provinsi NTB	20000 Eksemplar	1,341,620,000
1.01.01.01.23.19	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya meubelair sekolah	DAU	Provinsi NTB	1 Set	785,850,000	Provinsi NTB	1 Set	841,950,000
1.01.01.01.23.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai	DAU	Provinsi NTB	2 paket	1,575,000,000	Provinsi NTB	2 paket	1,683,900,000

1.01.01.01.23.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	DAU	Provinsi NTB	1 Sekolah	2,139,499,500	Provinsi NTB	1 Sekolah	2,294,045,979
1.01.01.01.23.57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya penyusunan dan pengembangan kurikulum	DAU	Kab. Bima	200 orang	580,000,000	Kab. Bima	200 orang	651,108,000
1.01.01.01.23.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Atas	DAU	Provinsi NTB	328 Sekolah	45,756,088	Provinsi NTB	328 Sekolah	50,040,992
1.01.01.01.23.70	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa	DAU	Provinsi NTB	700 orang	1,559,771,500	Provinsi NTB	700 orang	1,660,659,700
1.01.01.01.23.75	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersinkronisasi data pendidikan SMA	DAU	Provinsi NTB	328 sekolah	470,000,056	Provinsi NTB	328 sekolah	527,622,112
1.01.01.01.23.77	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Jumlah sekolah sekolah sehat yang dibina	DAU	Provinsi NTB	1 Sekolah	214,253,600	Provinsi NTB	1 Sekolah	228,112,320
1.01.01.01.24	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) ; Persen Penurunan Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMK minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah ; Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi ; Rasio Siswa SMK terhadap SMA			25,505,030,004				21,616,415,369
1.01.01.01.24.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Ruang laboratorium yang dibangun	DAK	se-NTB	36 ruang	20,343,108,000	se-NTB	26 ruang	15,642,559,325
1.01.01.01.24.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang tersedia (Kamar/Toilet/WC)	DAK	se-NTB	44 Ruang	3,377,000,000	se-NTB	44 Ruang	4,069,703,405
1.01.01.01.24.57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum	Dana Insentif Daerah	se-NTB	8 Dokumen	251,060,649	se-NTB	6 Dokumen	200,953,797
1.01.01.01.24.66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	Tersedianya siswa yang tersertifikasi (LSP)	Dana Insentif Daerah	se-NTB	150 siswa	179,248,000	se-NTB	150 siswa	190,842,000
1.01.01.01.24.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi yang maksimal	Dana Insentif Daerah	se-NTB	2 kali	48,924,160	se-NTB	2 kali	52,088,640
1.01.01.01.24.70	Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	Terlaksananya lomba lomba	Dana Insentif Daerah	se-NTB	200 siswa	1,020,191,152	se-NTB	200 siswa	1,086,178,478
1.01.01.01.24.75	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Manajemen sekolah akuntabel yang terlaksana	Dana Insentif Daerah	se-NTB	5 Dokumen	122,310,400	se-NTB	5 dokumen	130,221,600
1.01.01.01.24.76	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Tersedianya data pendidikan jenjang SMK	Dana Insentif Daerah	se-NTB	3 Kali	94,372,743	se-NTB	4 Kali	133,969,198
1.01.01.01.24.78	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah sekolah sehat yang terbina	Dana Insentif Daerah	se-NTB	2 Sekolah	68,814,900	se-NTB	3 Sekolah	109,898,925
1.01.01.01.25	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) ; Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi			8,834,878,165				13,556,387,848
1.01.01.01.25.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Tersedianya Gedung Sekolah Luar Biasa (SLB)	DAU	se-NTB	2 Unit	74,000,000	se-NTB	2 Unit	1,230,706,380
1.01.01.01.25.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	DAK,DAU	se-NTB	20 Ruang	2,893,260,000	se-NTB	20 Ruang	4,007,358,700
1.01.01.01.25.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev	DAU	se-NTB	10 Kab/Kota	41,833,430	se-NTB	10 Kab/Kota	44,625,510

1.01.01.01.25.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	DAU	se-NTB	3 Unit	317,500,000	se-NTB	3 Unit	349,577,640
1.01.01.01.25.19	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya meubelair sekolah	DAU	se-NTB	3 Unit	230,840,000	se-NTB	3 Unit	252,585,000
1.01.01.01.25.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terpeliharanya bangunan sekolah	DAU	se-NTB	13 Unit	2,860,662,500	se-NTB	13 Unit	5,097,154,075
1.01.01.01.25.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	DAU	se-NTB	6 unit	634,255,338	se-NTB	6 unit	675,279,822
1.01.01.01.25.57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Workshop penyusunan / pengembangan kurikulum	DAU	Provinsi NTB	50 orang	179,775,200	Provinsi NTB	50 Orang	191,403,300
1.01.01.01.25.61	Penyusunan bahan pembelajaran siswa SLB	Tersusunnya bahan ajar SLB	DAU	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	103,304,932	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	111,264,450
1.01.01.01.25.62	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	Tersedianya Tenaga Pendidik SLB yang berkompeten	DAU	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	126,528,000	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	134,712,000
1.01.01.01.25.70	Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	Jiswa yang mengikuti peningkatan minat dan bakat kreativitas siswa	DAU	Provinsi NTB	200 Orang	1,346,299,400	Provinsi NTB	200 Orang	1,433,379,800
1.01.01.01.25.75	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Tersedianya data PKPLK yang Valid	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	26,619,365	Provinsi NTB	1 Dokumen	28,341,171
1.01.01.01.26	Program Pembinaan Ketenagaan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah ; Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB ; Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV ; Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV ; Kepala Sekolah bersertifikat ; Pengawas Sekolah bersertifikat ; Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya			4,666,084,775				5,055,818,909
1.01.01.01.26.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi S1/DIV	DAU	Provinsi NTB	286 orang	82,641,000	Provinsi NTB	386 orang	108,558,787
1.01.01.01.26.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tenaga Kependidikan	DAU	Provinsi NTB	538 orang	60,554,000	Provinsi NTB	807 orang	79,545,078
1.01.01.01.26.10	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi	DAU	Provinsi NTB	140 orang	713,000,000	Provinsi NTB	140 orang	1,018,501,302
1.01.01.01.26.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Data guru dan tenaga kependidikan	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	95,230,000	Provinsi NTB	1 dokumen	0
1.01.01.01.26.13	Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	Pengawas yang dinilai	DAU	Provinsi NTB	150 orang	383,609,000	Provinsi NTB	150 orang	523,617,630
1.01.01.01.26.15	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Calon kepala sekolah yang bersertifikat	DAU	Provinsi NTB	200 orang	300,000,000	Provinsi NTB	0 orang	0
1.01.01.01.26.16	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Materi Muatan Lokal	DAU	Provinsi NTB	6 dokumen	55,439,000	Provinsi NTB	9 dokumen	72,825,700
1.01.01.01.26.17	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah calon kepala kepala sekolah SMA, SMK dan PKPLK yang mengikuti bimtek	DAU	Provinsi NTB	300 orang	499,999,325	Provinsi NTB	300 orang	0
1.01.01.01.26.19	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	Guru yang mengikuti peningkatan kompetensi jenjang regional/ nasional	Dana Insentif Daerah	Provinsi NTB	250 orang	1,794,929,250	Provinsi NTB	300 org	2,357,870,850
1.01.01.01.26.21	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai TU tidak tetap	Dana Insentif Daerah	Provinsi NTB	200 orang	237,576,000	Provinsi NTB	200 orang	312,082,800
1.01.01.01.26.22	Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sistem kendali pendidikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	DAU	Provinsi NTB	100 orang	183,112,600	Provinsi NTB	100 orang	241,022,220
1.01.01.01.26.23	Olimpiade Sains Guru	Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional	DAU	Provinsi NTB	60 orang	259,994,600	Provinsi NTB	90 orang	341,794,542
1.01.01.01.27	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan			692,513,400				783,000,000
1.01.01.01.27.01	Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan	Tersusunnya Data Pendidikan yang valid	DAU	Provinsi NTB	8 dokumen	245,871,800	Provinsi NTB	8 dokumen	321,000,000
1.01.01.01.27.02	Sinkronisasi Program Pendidikan	Jumlah peserta Rakor Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pendidikan	DAU	Provinsi NTB	60 Orang	241,716,600	Provinsi NTB	60 kegiatan	252,000,000
1.01.01.01.27.05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersedia	P A D	Provinsi NTB	350 proposal	204,925,000	Provinsi NTB	350 proposal	210,000,000

1.01.01.01.30	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB			214,129,821,700				227,975,387,297
1.01.01.01.30.01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah siswa yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS)	DAK Non Fisik	se-NTB	139199 Siswa	214,129,821,700	se-NTB	160079 Siswa	227,975,387,297
1.01.01.02	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan				1,516,294,872				1,622,555,476
1.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			219,836,639				363,133,389
1.01.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	se-NTB	500 surat	11,634,000	se-NTB	500 surat	12,390,000
1.01.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa	P A D	se-NTB	60 OB	46,892,700	se-NTB	60 OB	54,385,020
1.01.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK	P A D	se-NTB	396 jenis	5,333,050	se-NTB	396 jenis	5,690,916
1.01.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	P A D	se-NTB	41000 lbr	12,400,000	se-NTB	41000 lbr	13,202,000
1.01.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	se-NTB	1 Unit	8,146,189	se-NTB	1 Unit	8,673,095
1.01.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	P A D	Provinsi NTB	12 kali	2,040,000	Provinsi NTB	12 kali	2,180,664
1.01.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	P A D	se-NTB	210 porsi	11,000,000	se-NTB	210 porsi	12,390,210
1.01.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi koordinasi	P A D	se-NTB	5 OT	37,850,600	se-NTB	5 OT	40,351,040
1.01.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa	P A D	se-NTB	36 OB	72,667,200	se-NTB	36 OB	77,369,940
1.01.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	frekuensi koordinasi	P A D	se-NTB	8 OT	11,872,900	se-NTB	8 OT	13,111,160
1.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			33,510,000				61,190,677
1.01.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor	P A D	se-NTB	4 Unit	22,010,000	se-NTB	4 Unit	23,680,960
1.01.01.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	P A D	se-NTB	11 unit	11,500,000	se-NTB	11 unit	12,668,876
1.01.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			30,913,063				25,611,195
1.01.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	P A D	se-NTB	1 dok	2,856,563	se-NTB	1 dok	3,041,329
1.01.01.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen program perencanaan	P A D	se-NTB	6 dok	28,056,500	se-NTB	6 dok	29,906,580
1.01.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			15,112,500				12,332,688
1.01.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen manajemen asset	P A D	se-NTB	12 dok	15,112,500	se-NTB	12 dok	16,089,996
1.01.01.02.28	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan			1,216,922,670				1,297,423,690
1.01.01.02.28.01	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah sarana pembelajaran berbasis TI yang diadakan	P A D	se-NTB	32 unit	38,400,000	se-NTB	40 unit	50,000,000
1.01.01.02.28.03	Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah peserta diklat	P A D	se-NTB	710 Orang	1,115,959,540	se-NTB	710 Orang	1,185,081,590
1.01.01.02.28.04	Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	jumlah sekolah yang dipantau	P A D	se-NTB	16 kali	44,284,800	se-NTB	16 kali	42,149,200
1.01.01.02.28.06	Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan	jumlah keping CD media pembelajaran	P A D	se-NTB	700 keping	18,278,330	se-NTB	700 Keping	20,192,900
1.01.01.03	Taman Budaya				1,595,195,993				1,745,137,472
1.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,360,216,625				1,335,854,386
1.01.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jumlah surat	P A D	Kota Mataram	100 Surat	2,068,400	Kota Mataram	100 Surat	2,204,800
1.01.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening	P A D	Kota Mataram	4 rekening	243,696,250	Kota Mataram	4 rekening	259,460,924
1.01.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	P A D	Kota Mataram	72 OB	77,714,000	Kota Mataram	72 OB	82,892,808
1.01.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	P A D	Kota Mataram	204 OB	457,067,300	Kota Mataram	204 OB	510,507,144
1.01.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	P A D	Kota Mataram	1808 buah	30,257,400	Kota Mataram	1808 buah	32,218,560
1.01.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	P A D	Kota Mataram	103250 lembar	21,773,200	Kota Mataram	103250 lembar	23,231,250

1.01.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	P A D	Kota Mataram	719 buah	29,591,475	Kota Mataram	719 buah	31,509,456
1.01.01.03.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kota Mataram	25 unit	116,194,000	Kota Mataram	25 unit	123,710,525
1.01.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	P A D	Kota Mataram	556 eksemplar	6,190,000	Kota Mataram	556 eksemplar	6,590,824
1.01.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat	P A D	Kota Mataram	512 orang	29,733,000	Kota Mataram	512 orang	31,657,472
1.01.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi koordinasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah	P A D	Luar Provinsi	13 OT	102,003,200	Luar Provinsi	13 OT	108,592,809
1.01.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Jasa administrasi dan teknis perkantoran	P A D	Kota Mataram	28 OB	76,004,000	Kota Mataram	28 OB	82,814,200
1.01.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi	P A D	se-NTB	8 OT	23,010,000	se-NTB	8 OT	24,498,496
1.01.01.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa keamanan kantor	P A D	Kota Mataram	72 OB	144,914,400	Kota Mataram	72 OB	169,416,504
1.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			203,224,568				110,140,001
1.01.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang pelihara	P A D	Kota Mataram	1 unit	105,440,000	Kota Mataram	1 unit	112,260,000
1.01.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan roda empat	P A D	Kota Mataram	4 unit	24,305,000	Kota Mataram	4 unit	26,942,400
1.01.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	P A D	Kota Mataram	8 Unit	33,518,168	Kota Mataram	8 Unit	38,496,336
1.01.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	P A D	Kota Mataram	8 Unit	17,819,000	Kota Mataram	8 Unit	18,971,944
1.01.01.03.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah taman kantor	P A D	Kota Mataram	1 buah	22,142,400	Kota Mataram	1 buah	23,574,600
1.01.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			21,000,000				29,930,768
1.01.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen program perencanaan	P A D	Kota Mataram	4 dok	21,000,000	Kota Mataram	4 dok	24,135,900
1.01.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			10,754,800				10,319,004
1.01.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen asset	P A D	Kota Mataram	12 dok	10,754,800	Kota Mataram	12 dok	11,450,520
1.01.01.04	Museum Negeri				1,601,573,250				1,689,644,159
1.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,271,216,900				1,335,854,386
1.01.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	se-NTB	500 surat	8,814,000	se-NTB	500 surat	9,255,000
1.01.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening	P A D	Kota Mataram	5 rekening	207,558,000	Kota Mataram	5 rekening	217,938,000
1.01.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa	P A D	Kota Mataram	60 OB	48,570,300	Kota Mataram	60 OB	50,998,980
1.01.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa	P A D	Kota Mataram	216 OB	464,394,400	Kota Mataram	216 OB	487,616,976
1.01.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	P A D	Kota Mataram	470 buah	12,518,700	Kota Mataram	470 buah	13,144,960
1.01.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah lembar	P A D	Kota Mataram	727400 lembar	152,754,000	Kota Mataram	727400 lembar	160,755,400
1.01.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	P A D	Kota Mataram	167 buah	14,488,100	Kota Mataram	167 buah	15,217,040
1.01.01.04.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit	P A D	Kota Mataram	7 unit	47,649,000	Kota Mataram	7 unit	50,031,002
1.01.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksemplar	P A D	Kota Mataram	556 eksemplar	5,248,800	Kota Mataram	556 eksemplar	5,512,740
1.01.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah porsi	P A D	Kota Mataram	727 porsi	41,975,000	Kota Mataram	727 porsi	44,083,826
1.01.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi koordinasi	P A D	Luar Provinsi	3 OT	16,965,000	Luar Provinsi	3 OT	18,062,634
1.01.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi	P A D	se-NTB	7 OT	22,050,000	se-NTB	7 OT	23,585,828
1.01.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah jasa	P A D	Kota Mataram	108 OB	228,231,600	Kota Mataram	108 OB	239,652,000
1.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			104,888,250				110,140,001
1.01.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	P A D	Kota Mataram	1 unit	21,000,000	Kota Mataram	1 unit	22,050,000
1.01.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	P A D	Kota Mataram	7 unit	29,819,350	Kota Mataram	7 unit	31,311,000
1.01.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	P A D	Kota Mataram	3 unit	23,624,800	Kota Mataram	3 unit	24,806,001

1.01.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	P A D	Kota Mataram	4 unit	14,696,650	Kota Mataram	4 unit	15,435,000
1.01.01.04.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	jumlah taman, tempat parkir, dan halaman kantor yang dipelihara	P A D	Kota Mataram	1 unit	10,497,450	Kota Mataram	1 unit	11,025,000
1.01.01.04.02.36	Pemeliharaan buku perpustakaan	jumlah buku yang dipelihara	P A D	Kota Mataram	500 buku	5,250,000	Kota Mataram	500 buku	5,513,000
1.01.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			187,200,000				203,400,000
1.01.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah peserta diklat	P A D	Kota Mataram	15 org	180,000,000	Kota Mataram	15 org	195,000,000
1.01.01.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Frekuensi Kegiatan	P A D	Kota Mataram	24 kali	7,200,000	Kota Mataram	24 kali	8,400,000
1.01.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			28,440,100				29,930,768
1.01.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan aset/BMD	P A D	Provinsi NTB	1 dokumen	3,562,900	Provinsi NTB	1 dokumen	3,809,768
1.01.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	P A D	Kota Mataram	5 dokumen	24,877,200	Kota Mataram	5 dokumen	26,121,000
1.01.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,828,000				10,319,004
1.01.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen asset	P A D	Provinsi NTB	12 dokumen	9,828,000	Provinsi NTB	12 dokumen	10,319,004
1.01.01.05	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram				1,354,240,819				1,432,229,802
1.01.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			221,716,651				363,133,389
1.01.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kota Mataram	500 surat	1,812,000	Kota Mataram	500 surat	1,933,000
1.01.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening	P A D	Kota Mataram	4 rekening	36,851,000	Kota Mataram	4 rekening	39,235,432
1.01.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	P A D	Kota Mataram	60 OB	49,978,300	Kota Mataram	60 OB	53,211,000
1.01.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	P A D	Kota Mataram	24 OB	39,588,180	Kota Mataram	24 OB	42,151,584
1.01.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	P A D	Kota Mataram	687 buah	20,536,387	Kota Mataram	687 buah	21,865,149
1.01.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	P A D	Kota Mataram	50000 lembar	7,750,000	Kota Mataram	50000 lembar	8,250,000
1.01.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik	P A D	Kota Mataram	100 buah	2,637,800	Kota Mataram	100 buah	2,808,400
1.01.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	P A D	Kota Mataram	250 exp.	2,094,734	Kota Mataram	250 exp.	2,230,250
1.01.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	P A D	Kota Mataram	364 porsi	15,516,550	Kota Mataram	364 porsi	16,536,520
1.01.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi	P A D	Kota Mataram	50 OT	44,951,700	Kota Mataram	50 OT	47,859,250
1.01.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			21,730,723				61,190,677
1.01.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	P A D	Kota Mataram	4 unit	21,730,723	Kota Mataram	4 unit	23,136,392
1.01.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			12,064,340				25,611,195
1.01.01.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	3,280,246	Kota Mataram	1 Dokumen	3,492,436
1.01.01.05.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	3 dokumen	8,784,094	Kota Mataram	3 dokumen	9,354,738
1.01.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			11,582,405				12,332,688
1.01.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen asset/barang milik daerah	P A D	Kota Mataram	12 Dokumen	11,582,405	Kota Mataram	12 Dokumen	12,331,644
1.01.01.05.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			1,087,146,700				773,973,740
1.01.01.05.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan PKPLK berprestasi Tk. Kab./Kota	P A D	Kota Mataram	200 Orang	95,387,200	Kota Mataram	200 Orang	100,613,800
1.01.01.05.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab./Kota	P A D	Kota Mataram	950 Orang	360,000,600	Kota Mataram	950 Orang	379,721,650
1.01.01.05.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dupak yang dinilai	P A D	Kota Mataram	300 dupak	57,487,100	Kota Mataram	300 dupak	60,636,600

1.01.01.05.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	siswa yang mengikuti pengembangan dan pembinaan karakter siswa SMA, SMK, dan PKPLK	P A D	Kota Mataram	350 orang	189,791,800	Kota Mataram	350 orang	201,321,750
1.01.01.05.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	P A D	Kota Mataram	202 Sekolah	363,448,000	Kota Mataram	202 Sekolah	383,356,206
1.01.01.05.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan hasil money	P A D	Kota Mataram	3 kali	21,032,000	Kota Mataram	3 kali	22,184,001
1.01.01.06	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah				1,142,110,000				1,219,225,967
1.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			212,918,200				363,133,389
1.01.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	P A D	Kab. Lombok Tengah	500 Surat	2,325,000	Kab. Lombok Tengah	500 Surat	2,478,000
1.01.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	P A D	Kab. Lombok Tengah	4 Rekening	34,300,000	Kab. Lombok Tengah	4 Rekening	36,596,100
1.01.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	P A D	Kab. Lombok Tengah	60 OB	40,855,000	Kab. Lombok Tengah	60 OB	43,551,900
1.01.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	24 OB	40,284,000	Kab. Lombok Tengah	24 OB	42,933,096
1.01.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	649 Buah	10,617,100	Kab. Lombok Tengah	649 Buah	11,406,824
1.01.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Lembar cetakan dan penggandaan	P A D	Kab. Lombok Tengah	20000 lembar	3,100,000	Kab. Lombok Tengah	20000 lembar	4,000,000
1.01.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	P A D	Kab. Lombok Tengah	80 buah	1,551,000	Kab. Lombok Tengah	80 buah	1,652,000
1.01.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	P A D	Kab. Lombok Tengah	250 Eksemplar	1,246,800	Kab. Lombok Tengah	250 Eksemplar	1,338,000
1.01.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta makan minum rapat	P A D	Kab. Lombok Tengah	164 orang	6,982,400	Kab. Lombok Tengah	164 orang	7,450,520
1.01.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi	P A D	Kab. Lombok Tengah	140 kali	31,756,900	Kab. Lombok Tengah	140 kali	33,830,860
1.01.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga jasa keamanan kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	24 OB	39,900,000	Kab. Lombok Tengah	24 OB	42,502,104
1.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			122,124,200				61,190,677
1.01.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 unit	13,729,900	Kab. Lombok Tengah	1 unit	14,617,900
1.01.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	P A D	Kab. Lombok Tengah	3 unit	21,052,500	Kab. Lombok Tengah	3 unit	22,414,200
1.01.01.06.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	P A D	Kab. Lombok Tengah	26 unit	59,000,000	Kab. Lombok Tengah	26 unit	63,344,398
1.01.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	P A D	Kab. Lombok Tengah	4 Unit	22,850,000	Kab. Lombok Tengah	4 unit	24,363,200
1.01.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan yang dipelihara	P A D	Kab. Lombok Tengah	3 unit	5,491,800	Kab. Lombok Tengah	3 unit	5,847,201
1.01.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			9,000,000				11,798,100
1.01.01.06.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Meningkatnya mental dan fisik aparatur	P A D	Kab. Lombok Tengah	20 Org	9,000,000	Kab. Lombok Tengah	20 Org	12,388,000
1.01.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			22,220,000				25,611,195
1.01.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	8,745,000	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	9,357,000
1.01.01.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Program Perencanaan	P A D	Kab. Lombok Tengah	5 Dokumen	13,475,000	Kab. Lombok Tengah	5 Dokumen	14,434,400
1.01.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,755,000				12,332,688
1.01.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen Asset	P A D	Kab. Lombok Tengah	12 Dokumen	9,755,000	Kab. Lombok Tengah	12 Dokumen	10,493,196
1.01.01.06.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			766,092,600				773,973,740

1.01.01.06.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah Peserta Seleksi	P A D	Kab. Lombok Tengah	360 orang	87,461,800	Kab. Lombok Tengah	360 orang	92,946,600
1.01.01.06.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah Peserta Lomba	P A D	Kab. Lombok Tengah	400 orang	169,532,000	Kab. Lombok Tengah	400 orang	182,338,800
1.01.01.06.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dupak yang dinilai	P A D	Kab. Lombok Tengah	100 dupak	28,668,400	Kab. Lombok Tengah	100 dupak	30,387,800
1.01.01.06.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah Peserta pembinaan	P A D	Kab. Lombok Tengah	150 orang	95,954,300	Kab. Lombok Tengah	150 orang	102,031,950
1.01.01.06.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah Sekolah di Pantau	P A D	Kab. Lombok Tengah	354 sekolah	357,476,100	Kab. Lombok Tengah	354 sekolah	376,573,518
1.01.01.06.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Frekuensi Kunjungan	P A D	Kab. Lombok Tengah	12 kali	18,000,000	Kab. Lombok Tengah	12 kali	19,965,600
1.01.01.06.29.75	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	frekuensi kunjungan	P A D	Kab. Lombok Tengah	4 kali	9,000,000	Kab. Lombok Tengah	4 kali	9,982,800
1.01.01.07	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur				1,212,133,390				1,330,238,353
1.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			243,287,620				363,133,389
1.01.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	P A D	Kab. Lombok Timur	500 Surat	3,936,720	Kab. Lombok Timur	500 Surat	4,212,500
1.01.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	P A D	Kab. Lombok Timur	6 Rekening	39,470,000	Kab. Lombok Timur	6 Rekening	42,023,214
1.01.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Jasa administrasi keuangan	P A D	Kab. Lombok Timur	72 OB	43,798,000	Kab. Lombok Timur	72 OB	46,630,944
1.01.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Jasa kebersihan kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	24 OB	42,882,700	Kab. Lombok Timur	24 OB	45,657,480
1.01.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	P A D	Kab. Lombok Timur	537 Buah	11,799,700	Kab. Lombok Timur	537 Buah	12,717,234
1.01.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Lembar	P A D	Kab. Lombok Timur	30000 Lembar	4,654,800	Kab. Lombok Timur	30000 Lembar	6,600,000
1.01.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	P A D	Kab. Lombok Timur	112 Buah	3,738,500	Kab. Lombok Timur	112 Buah	3,980,592
1.01.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Exemplar	P A D	Kab. Lombok Timur	300 Exemplar	2,322,000	Kab. Lombok Timur	300 Exemplar	2,478,000
1.01.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat	P A D	Kab. Lombok Timur	245 orang	10,454,000	Kab. Lombok Timur	245 orang	11,130,350
1.01.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	frekuensi Koordinasi	P A D	Kab. Lombok Timur	55 kali	24,017,200	Kab. Lombok Timur	55 kali	25,570,655
1.01.01.07.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga Jasa keamanan kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	36 OB	56,214,000	Kab. Lombok Timur	36 OB	59,850,288
1.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			50,808,570				61,190,677
1.01.01.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Unit	5,500,000	Kab. Lombok Timur	30 Unit	45,000,000
1.01.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan Yang Dipelihara	P A D	Kab. Lombok Timur	8 Unit	31,578,700	Kab. Lombok Timur	8 Unit	33,621,256
1.01.01.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Unit	13,729,870	Kab. Lombok Timur	1 Unit	14,617,936
1.01.01.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			16,743,600				11,798,100
1.01.01.07.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Aparatur	P A D	Kab. Lombok Timur	91 orang	16,743,600	Kab. Lombok Timur	91 orang	18,081,518
1.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			18,532,400				25,611,195
1.01.01.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	P A D	Kab. Lombok Timur	1 dokumen	3,717,600	Kab. Lombok Timur	1 dokumen	3,958,094
1.01.01.07.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Program Perencanaan	P A D	Kab. Lombok Timur	6 dokumen	14,814,800	Kab. Lombok Timur	6 dokumen	15,773,130
1.01.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			7,106,800				12,332,688
1.01.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen Aset	P A D	Kab. Lombok Timur	12 Dokumen	7,106,800	Kab. Lombok Timur	12 Dokumen	7,566,552

1.01.01.07.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			875,654,400				773,973,740
1.01.01.07.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah Peserta Seleksi	P A D	Kab. Lombok Timur	210 Org	110,391,500	Kab. Lombok Timur	210 Org	116,438,070
1.01.01.07.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah Peserta Lomba	P A D	Kab. Lombok Timur	820 orang	252,254,600	Kab. Lombok Timur	820 orang	266,071,960
1.01.01.07.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dupak yang dinilai	P A D	Kab. Lombok Timur	750 dupak	42,075,700	Kab. Lombok Timur	750 dupak	44,380,500
1.01.01.07.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah Peserta	P A D	Kab. Lombok Timur	150 Org	105,399,700	Kab. Lombok Timur	150 Org	111,252,000
1.01.01.07.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah Sekolah Yang Pantau	P A D	Kab. Lombok Timur	165 Sekolah	335,832,900	Kab. Lombok Timur	165 Sekolah	359,626,080
1.01.01.07.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	frekwensi kunjungan	P A D	Kab. Lombok Timur	165 kali	29,700,000	Kab. Lombok Timur	165 kali	33,000,000
1.01.01.08	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara				951,412,917				996,616,848
1.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			245,678,403				363,133,389
1.01.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU, P A D	Kab. Lombok Utara	500 surat	3,250,500	Kab. Lombok Utara	500 surat	3,461,000
1.01.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekenig	P A D	Kab. Lombok Utara	4 rekening	30,645,180	Kab. Lombok Utara	4 rekening	32,627,360
1.01.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa	P A D	Kab. Lombok Utara	60 OB	47,640,360	Kab. Lombok Utara	60 OB	50,721,840
1.01.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa	P A D	Kab. Lombok Utara	24 OB	40,920,864	Kab. Lombok Utara	24 OB	43,567,680
1.01.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	P A D	Kab. Lombok Utara	1062 buah	26,561,682	Kab. Lombok Utara	1062 buah	28,279,998
1.01.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar	P A D	Kab. Lombok Utara	35300 lembar	7,060,000	Kab. Lombok Utara	37583 lembar	7,516,600
1.01.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kompenen listrik	P A D	Kab. Lombok Utara	151 buah	3,724,717	Kab. Lombok Utara	151 buah	3,965,713
1.01.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	DAU	Kab. Lombok Utara	200 eksemplar	1,280,196	Kab. Lombok Utara	200 eksemplar	1,363,000
1.01.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman	P A D	Kab. Lombok Utara	150 orang	17,050,000	Kab. Lombok Utara	150 orang	18,999,750
1.01.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi	P A D	Kab. Lombok Utara	100 OT	27,896,400	Kab. Lombok Utara	100 OT	29,700,700
1.01.01.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah jasa	P A D	Kab. Lombok Utara	24 OB	39,648,504	Kab. Lombok Utara	24 OB	42,213,024
1.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			244,296,885				61,190,677
1.01.01.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan	P A D	Kab. Lombok Utara	3 unit	27,054,870	Kab. Lombok Utara	5 unit	36,500,000
1.01.01.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	P A D	Kab. Lombok Utara	5 set	37,500,000	Kab. Lombok Utara	3 buah	22,500,000
1.01.01.08.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	P A D	Kab. Lombok Utara	2 unit	16,000,000	Kab. Lombok Utara	1 unit	4,000,000
1.01.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	P A D	Kab. Lombok Utara	1 gedung	88,998,740	Kab. Lombok Utara	1 gedung	10,000,000
1.01.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	P A D	Kab. Lombok Utara	4 Unit	61,336,000	Kab. Lombok Utara	7 Unit	147,000,000
1.01.01.08.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	P A D	Kab. Lombok Utara	28 buah	7,000,000	Kab. Lombok Utara	4 buah	16,000,000
1.01.01.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara	P A D	Kab. Lombok Utara	7 Unit	6,407,275	Kab. Lombok Utara	7 Unit	6,821,703
1.01.01.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			17,610,000				11,798,100
1.01.01.08.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Peningkatan mental dan fisik aparatur	P A D	Kab. Lombok Utara	20 orang	17,610,000	Kab. Lombok Utara	20 orang	19,319,360
1.01.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			20,181,660				25,611,195

1.01.01.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	P A D	Kab. Lombok Utara	1 dokumen	3,621,860	Kab. Lombok Utara	1 dokumen	3,856,127
1.01.01.08.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen program perencanaan	P A D	Kab. Lombok Utara	5 dokumen	16,559,800	Kab. Lombok Utara	5 dokumen	17,673,595
1.01.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			21,040,800				12,332,688
1.01.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen asset	P A D	Kab. Lombok Utara	1 dokumen	21,040,800	Kab. Lombok Utara	1 dokumen	22,402,752
1.01.01.08.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			402,605,169				773,973,740
1.01.01.08.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah peserta seleksi	P A D	Kab. Lombok Utara	138 orang	42,282,816	Kab. Lombok Utara	138 orang	45,243,024
1.01.01.08.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah peserta lomba	P A D	Kab. Lombok Utara	300 orang	117,015,400	Kab. Lombok Utara	300 orang	124,414,200
1.01.01.08.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dupak yang dinilai	P A D	Kab. Lombok Utara	50 dupak	46,615,152	Kab. Lombok Utara	50 dupak	49,770,550
1.01.01.08.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah peserta	P A D	Kab. Lombok Utara	70 orang	118,323,980	Kab. Lombok Utara	70 orang	124,444,390
1.01.01.08.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah sekolah yang dipantau	P A D	Kab. Lombok Utara	26 sekolah	56,709,015	Kab. Lombok Utara	26 sekolah	59,940,322
1.01.01.08.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	P A D	Kab. Lombok Utara	26 kali	21,658,806	Kab. Lombok Utara	26 kali	24,314,160
1.01.01.09	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat				791,687,319				853,834,704
1.01.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			216,355,261				363,133,389
1.01.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kab. Sumbawa Barat	750 Surat	3,180,750	Kab. Sumbawa Barat	750 Surat	3,550,500
1.01.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	P A D	Kab. Sumbawa Barat	4 rekening	16,711,324	Kab. Sumbawa Barat	4 rekening	18,654,428
1.01.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa	P A D	Kab. Sumbawa Barat	60 OB	51,786,540	Kab. Sumbawa Barat	60 OB	57,808,020
1.01.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa	P A D	Kab. Sumbawa Barat	24 OB	40,138,224	Kab. Sumbawa Barat	24 OB	44,805,264
1.01.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	P A D	Kab. Sumbawa Barat	966 jenis	9,504,474	Kab. Sumbawa Barat	966 jenis	10,609,578
1.01.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	P A D	Kab. Sumbawa Barat	26249 Lembar	4,068,595	Kab. Sumbawa Barat	26249 Lembar	4,541,077
1.01.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	60 Buah	3,594,420	Kab. Sumbawa Barat	60 Buah	4,012,320
1.01.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	P A D	Kab. Sumbawa Barat	350 eksemplar	2,327,500	Kab. Sumbawa Barat	350 eksemplar	2,598,050
1.01.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi	P A D	Kab. Sumbawa Barat	182 Porsi	7,766,122	Kab. Sumbawa Barat	182 Porsi	8,669,024
1.01.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi	P A D	Kab. Sumbawa Barat	30 OT	39,801,120	Kab. Sumbawa Barat	30 OT	44,428,980
1.01.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa	P A D	Kab. Sumbawa Barat	24 OB	37,476,192	Kab. Sumbawa Barat	24 OB	41,833,728
1.01.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			13,363,740				61,190,677

1.01.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	P A D	Kab. Sumbawa Barat	3 Unit	13,363,740	Kab. Sumbawa Barat	3 Unit	14,917,605
1.01.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12,743,520				11,798,100
1.01.01.09.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur	P A D	Kab. Sumbawa Barat	20 orang	12,743,520	Kab. Sumbawa Barat	20 orang	14,225,260
1.01.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			23,675,124				25,611,195
1.01.01.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 dok	4,269,419	Kab. Sumbawa Barat	1 dok	4,765,845
1.01.01.09.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja	P A D	Kab. Sumbawa Barat	5 dok	19,405,705	Kab. Sumbawa Barat	5 dok	21,784,845
1.01.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			12,686,628				12,332,688
1.01.01.09.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah dokumen aset/barang milik daerah tertata	P A D	Kab. Sumbawa Barat	12 dokumen	12,686,628	Kab. Sumbawa Barat	12 ddokumen	14,161,752
1.01.01.09.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			512,863,046				773,973,740
1.01.01.09.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah peserta seleksi	P A D	Kab. Sumbawa Barat	152 orang	54,817,432	Kab. Sumbawa Barat	152 orang	57,819,888
1.01.01.09.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah peserta lomba	P A D	Kab. Sumbawa Barat	569 orang	143,798,249	Kab. Sumbawa Barat	569 orang	151,674,916
1.01.01.09.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dupak yang dinilai	P A D	Kab. Sumbawa Barat	50 dupak	34,642,500	Kab. Sumbawa Barat	50 dupak	36,540,000
1.01.01.09.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah peserta	P A D	Kab. Sumbawa Barat	68 orang	113,011,104	Kab. Sumbawa Barat	68 orang	119,201,144
1.01.01.09.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah sekolah yang dipantau	P A D	Kab. Sumbawa Barat	17 sekolah	163,193,761	Kab. Sumbawa Barat	17 sekolah	172,132,480
1.01.01.09.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sekolah yang dikunjungi/pantau	P A D	Kab. Sumbawa Barat	17 sekolah	3,400,000	Kab. Sumbawa Barat	17 sekolah	5,100,000
1.01.01.10	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa				1,049,137,871				1,187,918,261
1.01.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			232,099,975				363,133,389
1.01.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	P A D	Kab. Sumbawa	500 surat	2,714,000	Kab. Sumbawa	500 surat	2,891,000
1.01.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	P A D	Kab. Sumbawa	4 rekening	16,800,000	Kab. Sumbawa	4 rekening	41,878,660
1.01.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa	P A D	Kab. Sumbawa	60 OB	43,105,500	Kab. Sumbawa	60 OB	45,902,640
1.01.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa	P A D	Kab. Sumbawa	24 OB	44,108,800	Kab. Sumbawa	24 OB	47,040,216
1.01.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Sumbawa	251 buah	6,346,675	Kab. Sumbawa	251 buah	6,792,562
1.01.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar	P A D	Kab. Sumbawa	8500 lembar	1,310,000	Kab. Sumbawa	8500 lembar	1,402,500
1.01.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	P A D	Kab. Sumbawa	160 buah	3,054,000	Kab. Sumbawa	160 buah	3,304,000
1.01.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	P A D	Kab. Sumbawa	200 exp.	1,280,000	Kab. Sumbawa	200 exp.	1,363,000
1.01.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi	P A D	Kab. Sumbawa	300 porsi	7,000,000	Kab. Sumbawa	300 porsi	13,629,000

1.01.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi	P A D	Kab. Sumbawa	35 OT	68,941,000	Kab. Sumbawa	35 OT	75,379,045
1.01.01.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa	P A D	Kab. Sumbawa	24 OB	37,440,000	Kab. Sumbawa	24 OB	39,900,192
1.01.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			16,735,000				61,190,677
1.01.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	P A D	Kab. Sumbawa	3 unit	16,735,000	Kab. Sumbawa	3 unit	22,507,332
1.01.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10,105,000				11,798,100
1.01.01.10.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	peningkatan mental dan fisik aparatur	P A D	Kab. Sumbawa	55 org	10,105,000	Kab. Sumbawa	55 org	10,814,925
1.01.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			22,034,000				25,611,195
1.01.01.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian	P A D	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	3,259,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	4,821,000
1.01.01.10.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Program	P A D	Kab. Sumbawa	5 dokumen	18,775,000	Kab. Sumbawa	5 dokumen	23,459,915
1.01.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			24,591,000				12,332,688
1.01.01.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen aset daerah yang tertata	P A D	Kab. Sumbawa	12 dokumen	24,591,000	Kab. Sumbawa	12 dokumen	26,181,840
1.01.01.10.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			743,572,896				773,973,740
1.01.01.10.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah Peserta Seleksi	P A D	Kab. Sumbawa	150 orang	88,364,800	Kab. Sumbawa	150 orang	93,264,000
1.01.01.10.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah Peserta Lomba	P A D	Kab. Sumbawa	245 orang	194,755,500	Kab. Sumbawa	245 orang	205,441,075
1.01.01.10.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dupak yang dinilai	P A D	Kab. Sumbawa	150 dupak	72,945,900	Kab. Sumbawa	150 dupak	77,059,950
1.01.01.10.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah Peserta	P A D	Kab. Sumbawa	135 orang	92,162,100	Kab. Sumbawa	135 orang	97,271,685
1.01.01.10.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah Sekolah yang Dipantau	P A D	Kab. Sumbawa	190 Sekolah	277,344,596	Kab. Sumbawa	190 Sekolah	327,648,160
1.01.01.10.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sekolah yang dikunjungi/pantau	P A D	Kab. Sumbawa	138 sekolah	18,000,000	Kab. Sumbawa	138 sekolah	19,965,564
1.01.01.11	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompur				1,026,515,960				1,093,863,803
1.01.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			279,692,542				363,133,389
1.01.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kab. Dompur	500 surat	2,715,000	Kab. Dompur	500 surat	2,891,000
1.01.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	P A D	Kab. Dompur	4 rekening	34,200,000	Kab. Dompur	4 rekening	36,509,600
1.01.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	P A D	Kab. Dompur	60 OB	41,232,000	Kab. Dompur	60 OB	43,899,060
1.01.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	P A D	Kab. Dompur	12 OB	17,039,368	Kab. Dompur	12 OB	2,658,948
1.01.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	P A D	Kab. Dompur	272 jenis	7,305,300	Kab. Dompur	272 jenis	7,777,840
1.01.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	P A D	Kab. Dompur	20250 lembar	3,000,000	Kab. Dompur	20250 lembar	3,341,250
1.01.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	P A D	Kab. Dompur	43 buah	6,594,523	Kab. Dompur	43 buah	7,021,083
1.01.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bacaan	P A D	Kab. Dompur	300 exp.	2,326,875	Kab. Dompur	300 exp.	2,478,000
1.01.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	P A D	Kab. Dompur	418 porsi	17,836,476	Kab. Dompur	418 porsi	18,989,740
1.01.01.11.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya penyelarasan program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	P A D	Kab. Dompur	50 OT	109,385,000	Kab. Dompur	50 OT	116,461,100
1.01.01.11.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	P A D	Kab. Dompur	24 OB	38,058,000	Kab. Dompur	24 OB	40,519,704
1.01.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			133,714,944				61,190,677

1.01.01.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianay peralatan gedung kantor	P A D	Kab. Dompu	271 unit	27,298,624	Kab. Dompu	271 unit	29,064,479
1.01.01.11.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah, komputer dan alat-alat elektronik	P A D	Kab. Dompu	15 unit	92,366,324	Kab. Dompu	15 unit	98,340,705
1.01.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	P A D	Kab. Dompu	4 unit	14,049,996	Kab. Dompu	4 unit	14,959,020
1.01.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			14,020,000				25,611,195
1.01.01.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	P A D	Kab. Dompu	1 dokumen	2,440,000	Kab. Dompu	1 dokumen	2,598,538
1.01.01.11.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen program perencanaan	P A D	Kab. Dompu	5 dokumen	11,580,000	Kab. Dompu	5 dokumen	16,162,910
1.01.01.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,989,947				12,332,688
1.01.01.11.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen asset	P A D	Kab. Dompu	1 dokumen	9,989,947	Kab. Dompu	1 dokumen	10,636,110
1.01.01.11.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			589,098,527				773,973,740
1.01.01.11.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah peserta seleksi	P A D	Kab. Dompu	28 orang	58,943,751	Kab. Dompu	28 orang	62,172,320
1.01.01.11.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	jumlah peserta lomba	P A D	Kab. Dompu	90 orang	127,244,160	Kab. Dompu	90 orang	134,213,760
1.01.01.11.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dupak yang dinilai	P A D	Kab. Dompu	150 dupak	40,061,100	Kab. Dompu	150 dupak	60,444,450
1.01.01.11.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah peserta	P A D	Kab. Dompu	150 orang	47,358,900	Kab. Dompu	150 orang	49,953,000
1.01.01.11.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah sekolah yang dipantau	P A D	Kab. Dompu	47 sekolah	292,355,416	Kab. Dompu	47 sekolah	308,368,786
1.01.01.11.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sekolah yang pantau	P A D	Kab. Dompu	2 kali	23,135,200	Kab. Dompu	2 kali	24,402,400
1.01.01.12	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima				1,173,427,560				1,248,039,789
1.01.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			341,038,060				363,133,389
1.01.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kab. Bima	600 surat	4,654,800	Kab. Bima	600 surat	4,956,000
1.01.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	P A D	Kab. Bima	4 rekening	25,794,000	Kab. Bima	4 rekening	27,464,800
1.01.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa keuangan	P A D	Kab. Bima	60 OB	44,308,100	Kab. Bima	60 OB	47,174,220
1.01.01.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan	P A D	Kab. Bima	36 OB	57,300,200	Kab. Bima	36 OB	61,006,716
1.01.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Bima	349 buah	7,945,500	Kab. Bima	349 buah	8,460,458
1.01.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	P A D	Kab. Bima	21250 lbr	3,296,900	Kab. Bima	21250 lbr	3,510,075
1.01.01.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	P A D	Kab. Bima	22 buah	925,000	Kab. Bima	22 buah	991,210
1.01.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	P A D	Kab. Bima	300 eksemplar	2,326,800	Kab. Bima	300 eksemplar	2,478,000
1.01.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersdianya makanan dan minuman	P A D	Kab. Bima	436 porsi	18,600,000	Kab. Bima	436 porsi	19,824,048
1.01.01.12.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi	P A D	Kab. Bima	50 OT	117,345,000	Kab. Bima	50 Ot	124,939,550
1.01.01.12.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	P A D	Kab. Bima	36 OB	58,541,760	Kab. Bima	36 OB	62,328,312
1.01.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			57,472,400				61,190,677
1.01.01.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	P A D	Kab. Bima	1 unit	4,576,600	Kab. Bima	1 unit	4,872,645
1.01.01.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubler	P A D	Kab. Bima	4 jenis	13,729,600	Kab. Bima	4 jenis	14,617,936
1.01.01.12.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya komputer dan alat elektronik	P A D	Kab. Bima	4 unit	23,615,000	Kab. Bima	4 unit	25,142,848
1.01.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	P A D	Kab. Bima	4 unit	15,551,200	Kab. Bima	4 unit	16,557,248
1.01.01.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			11,080,800				11,798,100
1.01.01.12.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur	P A D	Kab. Bima	75 org	11,080,800	Kab. Bima	75 org	11,798,100
1.01.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen Perencanaan			24,055,100				25,611,195

1.01.01.12.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen program perencanaan	P A D	Kab. Bima	5 dokumen	24,055,100	Kab. Bima	5 dokumen	25,611,195
1.01.01.12.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			11,583,400				12,332,688
1.01.01.12.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen asset	P A D	Kab. Bima	12 dokumen	11,583,400	Kab. Bima	12 dokumen	12,332,688
1.01.01.12.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	-			728,197,800				773,973,740
1.01.01.12.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah peserta seleksi PTK berprestasi Tk. Kab/Kota	P A D	Kab. Bima	140 orang	58,319,900	Kab. Bima	140 orang	62,092,100
1.01.01.12.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah peserta lomba bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/Kota	P A D	Kab. Bima	200 orang	108,973,100	Kab. Bima	200 orang	116,021,800
1.01.01.12.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yangb dinilai	P A D	Kab. Bima	200 dupak	48,459,400	Kab. Bima	200 dupak	53,723,200
1.01.01.12.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah peserta	P A D	Kab. Bima	100 orang	56,222,000	Kab. Bima	100 orang	59,858,700
1.01.01.12.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah sekolah yang dikunjungi/pantau	DAU	Kab. Bima	130 sekolah	429,223,400	Kab. Bima	130 sekolah	452,329,540
1.01.01.12.29.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sekolah yang dikunjungi/pantau	P A D	Kab. Bima	4 kali	27,000,000	Kab. Bima	4 kali	29,948,400
1:02 KESEHATAN					366,171,672,964				98,918,918,999
1:02:01 Dinas Kesehatan					79,635,417,238				98,918,918,999
1.02.01.01	Dinas Kesehatan (Induk)				65,477,101,674				98,918,918,999
1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,079,243,693				1,882,027,000
1.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	190 Jenis	7,335,000	Provinsi NTB	200 Jenis	7,779,000
1.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	4 Jenis	768,468,073	Provinsi NTB	4 Jenis	831,424,000
1.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	8 Orang	76,622,500	Provinsi NTB	8 Orang	85,686,000
1.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	DAU	Provinsi NTB	13 Orang	301,600,410	Provinsi NTB	14 Orang	328,204,100
1.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	55 Jenis	52,132,300	Provinsi NTB	55 Jenis	55,313,005
1.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	DAU	Provinsi NTB	11 Jenis	30,752,600	Provinsi NTB	11 Jenis	34,847,010
1.02.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	DAU	Provinsi NTB	14 Jenis	12,146,200	Provinsi NTB	14 Jenis	13,278,006
1.02.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	15 Jenis	183,211,010	Kota Mataram	15 Jenis	199,728,000
1.02.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	14,280,000	Provinsi NTB	2 Jenis	15,440,000
1.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi rapat	DAU	Provinsi NTB	24 Kali	40,000,000	Provinsi NTB	25 Kali	43,452,000
1.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	DAU	Provinsi NTB	17 Kali	117,981,400	Provinsi NTB	18 Kali	133,814,016
1.02.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	DAU	Provinsi NTB	7 Orang	414,519,200	Provinsi NTB	7 Orang	448,167,006
1.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	15 Kali	60,195,000	Provinsi NTB	16 Kali	69,177,008
1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			2,120,035,000				3,069,270,000

1.02.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Kota Mataram	2 Unit	1,500,000,000	Kota Mataram	0 Unit	0
1.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	DAU	Provinsi NTB	2 Unit	268,235,000	Provinsi NTB	2 Unit	273,600,000
1.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	60 Unit	316,800,000	Provinsi NTB	61 Unit	340,002,959
1.02.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	6 Jenis	35,000,000	Provinsi NTB	6 Jenis	36,048,000
1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			175,500,000				102,850,520
1.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah jenis diklat formal yang diikuti	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	10,000,000	Provinsi NTB	4 Jenis	17,436,000
1.02.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis Bimtek yang diikuti	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	138,750,000	Provinsi NTB	4 Jenis	149,856,000
1.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga	DAU	Provinsi NTB	37 Kali	26,750,000	Provinsi NTB	37 Kali	28,931,998
1.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			81,530,000				65,977,664
1.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen laporan yang disusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	19,790,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	26,967,000
1.02.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jenis dokumen laporan yang disusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	9,325,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	10,748,000
1.02.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jenis dokumen laporan yang disusun	DAU	Provinsi NTB	3 Dokumen	52,415,000	Provinsi NTB	3 Dokumen	80,100,000
1.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			30,628,500				20,980,876
1.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jenis dokumen laporan yang disusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	30,628,500	Provinsi NTB	1 Dokumen	36,513,000
1.02.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan			1,035,088,000				432,229,000
1.02.01.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi	DAU	Provinsi NTB	20 Jenis	830,518,000	Provinsi NTB	25 Jenis	888,230,000
1.02.01.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan yang didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan	DAU	Provinsi NTB	120 Jenis	84,687,000	Provinsi NTB	120 Jenis	90,192,000
1.02.01.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan obat rasional	DAU	Provinsi NTB	20 Fasilitas	119,883,000	Provinsi NTB	20 Fasilitas	127,076,000
1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			1,510,278,002				700,000,000
1.02.01.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah TGC (Tim Gerak Cepat) yang dibina	DAU	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	11 Tim	210,278,002	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	11 Tim	240,515,991
1.02.01.01.16.20	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah Lokasi yang ditangani Tim Gerak Cepat (TGC) dan kluster kesehatan	DAU	Provinsi NTB	60 Lokasi	1,300,000,000	Provinsi NTB	60 Lokasi	1,326,000,000
1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif			705,169,697				750,764,905
1.02.01.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jenis media promkes yang dikembangkan di posyandu	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Kab. Lombok Utara,Provinsi NTB	2 Jenis	44,711,697	Kab. Lombok Utara,Provinsi NTB	2 Jenis	47,775,900
1.02.01.01.19.06	Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	DAK Non Fisik	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Sumbawa,Kota Mataram,Provin si NTB	158 Posyandu	660,458,000	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Sumbawa,Kota Mataram,Provin si NTB	158 Posyandu	702,989,005
1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting			9,284,388,792				9,968,950,651

1.02.01.01.20.03	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Jumlah jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan	P A D	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	2 Jenis	8,264,642,400	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	4 Jenis	8,710,651,000
1.02.01.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan TTD dalam mensukseskan program GEN 2025	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	100 Sekolah	1,019,746,392	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	100 Sekolah	1,258,299,651
1.02.01.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat tempat Umum yang Memenuhi Syarat			168,393,200				179,281,448
1.02.01.01.21.05	Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Jumlah sumber air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	DAU	Provinsi NTB	100 Titik	87,424,900	Provinsi NTB	100 Titik	93,108,000
1.02.01.01.21.08	Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah tempat tempat umum yang dibina	DAU	Provinsi NTB	30 Tempat	80,968,300	Provinsi NTB	30 Tempat	86,173,448
1.02.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi			2,276,198,000				690,199,998
1.02.01.01.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar	P A D	Provinsi NTB	40 FKTP	1,110,094,000	Provinsi NTB	40 FKTP	1,180,104,000
1.02.01.01.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Rumah Sakit (RS) yang melaksanakan sistem rujukan terintegrasi	DAU, P A D	Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Kota Mataram,Provinsi NTB	20 RS	684,480,000	Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Kota Mataram,Provinsi NTB	23 RS	2,785,502,000
1.02.01.01.23.09	Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah FKTP dan FKTL yang terakreditasi/reakreditasi	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	70 Fasilitas	481,624,000	Provinsi NTB	70 Fasilitas	701,248,001
1.02.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional			602,387,000				299,240,705
1.02.01.01.24.12	Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN	Jumlah Kebersertaan Baru JKN PBI	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	1500 Orang	602,387,000	Provinsi NTB	1500 Orang	608,409,000
1.02.01.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar			40,000,000,000				15,122,182,401
1.02.01.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	Gedung rumah sakit yang terbangun	DAK	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	40,000,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	70,755,288,704
1.02.01.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			369,326,010				393,206,020
1.02.01.01.32.04	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	P A D	Kab. Dompu,Provinsi NTB	20 Puskesmas	72,156,000	Kab. Dompu,Provinsi NTB	20 Puskesmas	79,372,000
1.02.01.01.32.05	Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR, PKRET, dan santun lansia	P A D	Provinsi NTB	30 Puskesmas	297,170,010	Provinsi NTB	30 Puskesmas	313,834,020
1.02.01.01.33	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah			1,025,484,288				1,091,790,231
1.02.01.01.33.01	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	Jumlah dokumen persiapan perencanaan, penganggaran, dan monev	P A D	Provinsi NTB	3 Dokumen	760,068,999	Provinsi NTB	3 Dokumen	823,721,000
1.02.01.01.33.03	Penyediaan sistem informasi kesehatan daerah	Jumlah dokumen profil kesehatan	DAU, P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	265,415,289	Provinsi NTB	1 Dokumen	268,069,231
1.02.01.01.34	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan			389,726,740				343,498,804
1.02.01.01.34.01	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah analisis dan rekomendasi kebutuhan tenaga kesehatan di NTB	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	11 Rekomendasi	2,421,940	Provinsi NTB	11 Rekomendasi	92,762,000

1.02.01.01.34.02	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	500 Orang	387,304,800	Provinsi NTB	500 Orang	578,785,000
1.02.01.01.36	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak			2,145,570,562				2,284,299,085
1.02.01.01.36.02	Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok wirasaha sanitasi yang dibina	DAU	Provinsi NTB	40 Kelompok	180,190,682	Provinsi NTB	40 Kelompok	805,482,365
1.02.01.01.36.06	Peningkatan penggunaan jamban keluarga	Jumlah Penambahan Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan jamban	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	2900 KK	1,965,379,880	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	2900 KK	1,478,816,720
1.02.01.01.37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi			1,478,154,190				1,610,001,855
1.02.01.01.37.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	310 Orang	854,087,000	Provinsi NTB	313 Orang	946,583,001
1.02.01.01.37.08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80%	DAU	Provinsi NTB	10 Kabkota	510,424,000	Provinsi NTB	10 Kabkota	547,504,000
1.02.01.01.37.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	DAU	Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	10 Analisis	113,643,190	Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	10 Analisis	115,914,854
1.02.01.02	Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis				5,495,488,140				6,489,511,414
1.02.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,043,434,176				1,882,027,000
1.02.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	500 surat	8,000,000	Provinsi NTB	500 surat	8,948,000
1.02.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	3 jenis	190,080,000	Provinsi NTB	3 jenis	201,384,000
1.02.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	72 orangbulan	88,049,880	Provinsi NTB	72 orangbulan	93,332,952
1.02.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	72 orangbulan	158,908,300	Provinsi NTB	72 Orangbulan	170,032,968
1.02.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	2500 jenis	31,800,000	Provinsi NTB	2500 Jenis	33,707,500
1.02.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	8000 lembar	45,540,000	Provinsi NTB	8000 lembar	54,184,000
1.02.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	170 jenis	3,036,000	Provinsi NTB	170 jenis	3,248,020
1.02.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	10 Jenis	62,098,000	Provinsi NTB	10 Jenis	65,824,000

1.02.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi rapat rutin laboratorium	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	10 Kali	19,380,000	Provinsi NTB	10 Kali	20,640,000
1.02.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi penyelarasan program pemerintahan pusat dan daerah	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	6 kali	54,027,996	Provinsi NTB	6 kali	57,810,000
1.02.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	84 Orang/bulan	276,322,400	Provinsi NTB	84 Orang/bulan	292,901,952
1.02.01.02.01.23	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	jenis tabung gas yang diisi	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	10 buah	6,426,000	Provinsi NTB	10 buah	6,812,000
1.02.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	48 orang/bulan	99,765,600	Provinsi NTB	48 orang/bulan	105,751,968
1.02.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			1,497,878,980				3,069,270,000
1.02.01.02.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	33 jenis	912,424,980	Provinsi NTB	33 jenis	944,952,990
1.02.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	2 Unit	291,898,000	Provinsi NTB	2 unit	147,735,000
1.02.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	6 unit	54,876,000	Provinsi NTB	6 unit	55,974,000
1.02.01.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	50 Jenis	238,680,000	Provinsi NTB	50 Jenis	243,454,000
1.02.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			168,639,996				102,850,520
1.02.01.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah jenis diklat formal yang diikuti	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	12 kali	124,449,996	Provinsi NTB	12 kali	129,327,996
1.02.01.02.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	30 kali	44,190,000	Provinsi NTB	30 kali	45,957,990
1.02.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			20,800,000				65,977,664
1.02.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen laporan yang disusun	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	2 dokumen	20,800,000	Provinsi NTB	2 dokumen	22,050,000
1.02.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			18,539,992				20,980,876
1.02.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jenis dokumen laporan yang disusun	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	2 Dokumen	18,539,992	Provinsi NTB	2 Dokumen	19,281,000
1.02.01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan			2,400,000				432,229,000

1.02.01.02.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat dan reagen/bahan habis pakai yang diadakan di laboratorium	(Pendapatan Asli Daerah) PAD + Pajak Rokok	Provinsi NTB	300 jenis	2,400,000	Provinsi NTB	320 jenis	848,102,080
1.02.01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			2,061,184,998				700,000,000
1.02.01.02.16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Jumlah alat kesehatan dan perbekalan yang diadakan	DAU,DBH-CHT,Pajak Rokok	Provinsi NTB	60 unit	2,061,184,998	Provinsi NTB	25 unit	2,227,899,000
1.02.01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi			682,609,998				690,199,998
1.02.01.02.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jenis Akreditasi yang dilaksanakan	Pajak Rokok	Provinsi NTB	3 jenis	562,309,998	Provinsi NTB	3 jenis	562,309,998
1.02.01.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Laboratorium Pelayanan Kesehatan yang dievaluasi	Pajak Rokok	Provinsi NTB	30 Laboratorium	120,300,000	Provinsi NTB	30 Laboratorium	127,890,000
1.02.01.03	Balai Pelatihan Kesehatan				1,612,963,928				1,752,503,340
1.02.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			799,485,928				1,882,027,000
1.02.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	DAU	Provinsi NTB	80 Jenis	5,040,000	Provinsi NTB	85 Jenis	5,342,080
1.02.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	139,860,000	Provinsi NTB	3 Jenis	147,649,002
1.02.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan	DAU	Provinsi NTB	5 Orang	41,890,000	Provinsi NTB	5 Orang	44,404,000
1.02.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	DAU	Provinsi NTB	17 Orang	428,100,960	Provinsi NTB	17 Orang	458,603,016
1.02.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	50 Jenis	45,898,000	Provinsi NTB	50 Jenis	48,651,000
1.02.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	DAU	Provinsi NTB	5 Jenis	18,353,000	Provinsi NTB	5 Jenis	19,638,000
1.02.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	Provinsi NTB	15 Jenis	26,597,010	Provinsi NTB	15 Jenis	28,458,000
1.02.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	DAU	Provinsi NTB	1 Jenis	3,060,000	Provinsi NTB	1 Jenis	3,244,000
1.02.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi rapat	DAU	Provinsi NTB	10 Kali	11,914,000	Provinsi NTB	10 Kali	12,688,000
1.02.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	DAU	Luar Provinsi	2 Kali	26,765,000	Luar Provinsi	2 Kali	28,639,000
1.02.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	DAU	Provinsi NTB	1 Orang	30,702,000	Provinsi NTB	1 Orang	32,544,000
1.02.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	DAU	Provinsi NTB	10 Kali	21,305,958	Provinsi NTB	10 Kali	22,797,398
1.02.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			463,208,000				3,069,270,000
1.02.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	421,920,000	Provinsi NTB	1 Unit	490,028,000
1.02.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	8 Unit	41,288,000	Provinsi NTB	8 Unit	42,114,040
1.02.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			15,040,000				65,977,664
1.02.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	DAU	Provinsi NTB	2 Dokumen	15,040,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	15,792,000
1.02.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			8,090,000				20,980,876
1.02.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan yang disusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	8,090,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	8,413,000
1.02.01.03.34	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan			327,140,000				343,498,804
1.02.01.03.34.02	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Kesehatan	DAU	Luar Provinsi	7 Orang	327,140,000	Luar Provinsi	8 Orang	343,498,804
1.02.01.04	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat				7,007,863,496				21,743,086,742

1.02.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,764,833,500				1,882,027,000
1.02.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	P A D	Provinsi NTB	50 Surat	4,200,000	Provinsi NTB	50 Surat	4,452,000
1.02.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	P A D	Provinsi NTB	4 Jenis	203,124,000	Provinsi NTB	4 Jenis	215,341,000
1.02.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan	P A D	Provinsi NTB	8 Orang/Bulan	78,986,000	Provinsi NTB	8 Orang/Bulan	83,725,000
1.02.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	P A D	Provinsi NTB	40 Orang/Bulan	814,697,000	Provinsi NTB	40 Orang/Bulan	871,725,000
1.02.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	P A D	Provinsi NTB	50 Jenis	80,183,000	Provinsi NTB	50 Jenis	86,044,000
1.02.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	P A D	Provinsi NTB	40 Jenis	314,067,000	Provinsi NTB	40 Jenis	333,974,000
1.02.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	P A D	Provinsi NTB	16 Jenis	31,212,000	Provinsi NTB	20 Jenis	33,396,000
1.02.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	P A D	Provinsi NTB	1 Jenis	1,836,000	Provinsi NTB	1 Jenis	1,946,000
1.02.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	P A D	Provinsi NTB	8 Kali	64,080,500	Provinsi NTB	8 Kali	68,629,000
1.02.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	P A D	Provinsi NTB	8 Orang/Bulan	172,448,000	Provinsi NTB	10 Orang/Bulan	182,795,000
1.02.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			2,366,845,000				3,069,270,000
1.02.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	P A D	Provinsi NTB	1 Unit	1,453,833,000	Provinsi NTB	1 Unit	2,000,000,000
1.02.01.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	DAU	Provinsi NTB	2 Unit	600,000,000	Provinsi NTB	2 Unit	750,000,000
1.02.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	5 Jenis	98,047,000	Provinsi NTB	5 Jenis	100,007,000
1.02.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	P A D	Provinsi NTB	10 Unit	130,560,000	Provinsi NTB	10 Unit	133,170,000
1.02.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	P A D	Provinsi NTB	12 Jenis	84,405,000	Provinsi NTB	14 Jenis	86,093,000
1.02.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			93,499,950				102,850,520
1.02.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah jenis diklat formal yang diikuti	P A D	Provinsi NTB	10 Kali	93,499,950	Provinsi NTB	10 Kali	102,850,520
1.02.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			63,439,484				65,977,664
1.02.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen laporan yang disusun	P A D	Provinsi NTB	4 Dokumen	63,439,484	Provinsi NTB	4 Dokumen	65,977,664
1.02.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			19,982,298				20,980,876
1.02.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jenis dokumen laporan yang disusun	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	19,982,298	Provinsi NTB	1 Dokumen	20,980,876
1.02.01.04.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan			5,846,000				432,229,000
1.02.01.04.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi	P A D	Provinsi NTB	70 Jenis	5,846,000	Provinsi NTB	70 Jenis	432,229,000
1.02.01.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			649,999,000				700,000,000
1.02.01.04.16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Jumlah jenis obat untuk pelayanan kesehatan mata yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	70 Jenis	649,999,000	Provinsi NTB	70 Jenis	700,000,000
1.02.01.04.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional			250,141,750				299,240,705
1.02.01.04.24.01	Pelayanan operasi katarak	Cakupan Penduduk Miskin Yang Dilayani	P A D	Provinsi NTB	500 Orang	250,141,750	Provinsi NTB	500 Orang	299,240,705
1.02.01.04.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar			1,747,883,000				15,122,182,401

1.02.01.04.26.01	Pembangunan rumah sakit	Gedung rumah sakit mata yang terbangun	P A D	Kota Mataram	1 Unit	103,062,000	Kota Mataram	1 Unit	0
1.02.01.04.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	7 Jenis	1,700,000	Provinsi NTB	11 Jenis	5,602,181,992
1.02.01.04.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	2 unit	900,000,000	Provinsi NTB	0 Unit	0
1.02.01.04.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah jenis meubeler yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	5 Jenis	810,000	Provinsi NTB	10 Jenis	2,000,000,000
1.02.01.04.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	3 Jenis	737,511,000	Provinsi NTB	4 Jenis	1,500,000,000
1.02.01.04.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah jenis bahan logistik dan obat yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	80 Jenis	4,800,000	Provinsi NTB	87 Jenis	6,020,000,409
1.02.01.04.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara			45,393,514				48,328,576
1.02.01.04.27.07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	Jumlah Ruang Operasi Yang Dipelihara	P A D	Provinsi NTB	4 Kali	30,244,000	Provinsi NTB	4 Kali	33,028,000
1.02.01.04.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara	P A D	Provinsi NTB	2 Kali	15,149,514	Provinsi NTB	2 Kali	15,300,576
1.02.01.06	Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD				42,000,000				0
1.02.01.06.39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan			42,000,000				0
1.02.01.06.39.01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persentase target pendapatan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Kab. Lombok Timur	100 Persen	42,000,000	Kab. Lombok Timur	0 Persen	0
1:02:02	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				203,502,939,526				238,851,572,739
1.02.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				203,502,939,526				238,851,572,739
1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,105,827,095				4,371,302,376
1.02.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	APBD PROV.	Provinsi NTB	3 Jenis	3,540,683,985	Provinsi NTB	3 Jenis	3,730,347,450
1.02.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	APBD PROV.	Provinsi NTB	16 Orang	183,163,200	Provinsi NTB	16 Orang	201,479,520
1.02.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Judul	APBD PROV.	Provinsi NTB	25 Judul	128,650,000	Provinsi NTB	35 Judul	160,812,505
1.02.02.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Orang	APBD PROV.	Provinsi NTB	5 Orang	253,329,910	Provinsi NTB	5 Orang	278,662,901
1.02.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			704,793,921				750,364,609
1.02.02.01.02.02	Pembangunan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas On-Site Dokter IGD Yang Terbangun	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Unit	454,793,921	Provinsi NTB	1 Unit	500,364,609
1.02.02.01.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Dibeli	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Unit	250,000,000	Provinsi NTB	1 Unit	250,000,000
1.02.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			840,373,024				894,710,220
1.02.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal/mengikuti pelatihan formal ? 20 Jam Pelajaran	APBD PROV.	Provinsi NTB	206 Orang	775,373,224	Provinsi NTB	209 Orang	829,710,222
1.02.02.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah karyawan yang mengikuti tes kebugaran	APBD PROV.	Provinsi NTB	900 Orang	64,999,800	Provinsi NTB	900 Orang	64,999,998
1.02.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			109,364,574				116,435,885
1.02.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	APBD PROV.	Provinsi NTB	5 Orang	109,364,574	Provinsi NTB	5 Orang	116,435,885
1.02.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			45,512,034				48,454,882
1.02.02.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Orang	APBD PROV.	Provinsi NTB	4 Orang	22,755,960	Provinsi NTB	4 Orang	24,227,440
1.02.02.01.07.82	Penyusunan RKBM	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 Dokumen	22,756,074	Provinsi NTB	2 Dokumen	24,227,442

1.02.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat			4,489,878,621				4,780,185,984
1.02.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah masyarakat miskin, terlarant dan masalah sosial lainnya yang tertangani	APBD PROV.	Provinsi NTB	700 orang	4,489,878,621	Provinsi NTB	760 orang	4,780,185,984
1.02.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular			205,009,686				218,265,237
1.02.02.01.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Jumlah Orang Yang Terperiksa CD4, Viral Load & MESO ARV	APBD PROV.	Provinsi NTB	90 Orang	205,009,686	Provinsi NTB	90 Orang	218,265,237
1.02.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi			615,029,060				0
1.02.02.01.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Persiapan Evaluasi Yang tersusun	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 Dokumen	615,029,060	Provinsi NTB	0 Dokumen	0
1.02.02.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			812,943,325				865,506,750
1.02.02.01.24.01	Pelayanan operasi katarak	Jumlah Orang Yang Dioperasi Katarak	APBD PROV.	Provinsi NTB	25 Orang	120,018,325	Provinsi NTB	25 Orang	127,506,750
1.02.02.01.24.04	Pelayanan sunatan masal	Jumlah Orang Yang Dikhitan	APBD PROV.	Provinsi NTB	400 Orang	300,000,000	Provinsi NTB	500 Orang	375,000,000
1.02.02.01.24.11	Pelayanan Kesehatan pasien rujukan kasus gizi buruk	Jumlah Pasien Gizi Buruk Yang dilayani	APBD PROV.	Provinsi NTB	75 Orang	392,925,000	Provinsi NTB	75 Orang	363,000,000
1.02.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar			15,173,602,432				39,000,000,004
1.02.02.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	Luas Selasar dan Gedung Yang Terbangun	APBD PROV.	Provinsi NTB	5217 Meter	2,623,602,432	Provinsi NTB	0 Meter	0
1.02.02.01.26.19	Pengadaan obat	Jumlah jenis Obat Yang disediakan	APBD PROV.	Provinsi NTB	12 Jenis	7,500,000,000	Provinsi NTB	12 Jenis	38,000,000,004
1.02.02.01.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah Ambulan/Mobil Jenazah Yang Disediakan	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 Unit	1,550,000,000	Provinsi NTB	0 Unit	0
1.02.02.01.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	jumlah Mebeleur Yang tersedia	APBD PROV.	Provinsi NTB	250 Unit	1,000,000,000	Provinsi NTB	250 Unit	1,000,000,000
1.02.02.01.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain	Jumlah Pneumatic Tube dan IPAL Yang Disediakan	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Set	2,500,000,000	Provinsi NTB	0 Set	0
1.02.02.01.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara			2,418,658,311				2,575,044,340
1.02.02.01.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	22 Gedung	700,000,004	Provinsi NTB	22 Gedung	750,000,020
1.02.02.01.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Instalasi Limbah RS Yang Terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	3 Unit	630,659,307	Provinsi NTB	3 Unit	505,805,370
1.02.02.01.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat	Jumlah Alat-alat Kesehatan/Kedokteran Yang Terkalibrasi/Terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	5250 Unit	999,999,000	Provinsi NTB	5300 Unit	1,219,100,700
1.02.02.01.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah Perlengkapan RS Yang Terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	250 Unit	88,000,000	Provinsi NTB	250 Unit	100,138,250
1.02.02.01.39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan			173,981,947,443				185,231,302,451
1.02.02.01.39.01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Tahun	173,981,947,443	Provinsi NTB	1 Tahun	185,231,302,451
1:02:03	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi				33,366,759,023				35,722,920,564
1.02.03.01	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi				33,366,759,023				35,722,920,564
1.02.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			426,877,870				463,307,266
1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa sumber daya	P A D	Provinsi NTB	3 jenis	300,000,000	Provinsi NTB	3 jenis	300,000,000
1.02.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan	P A D	Provinsi NTB	33 unit	26,894,980	Provinsi NTB	33 unit	29,521,777
1.02.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Provinsi NTB	9 orang	69,411,890	Provinsi NTB	9 orang	77,703,993
1.02.03.01.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan/perlengkapan	P A D	Provinsi NTB	10 jenis	30,571,000	Provinsi NTB	12 jenis	56,081,496
1.02.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			8,829,493,585				10,122,632,902

1.02.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan oprasional (roda 2 dan roda 4)	DBH-CHT	Provinsi NTB	8 unit	355,000,000	Provinsi NTB	1 unit	275,000,000
1.02.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit perlengkapan	P A D	Provinsi NTB	36 unit	1,172,999,550	Provinsi NTB	25 unit	680,000,000
1.02.03.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	jumlah unit perangkat elektronik	P A D	Provinsi NTB	86 unit	503,599,985	Provinsi NTB	23 unit	545,499,900
1.02.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah unit gedung	DAK,P A D	Provinsi NTB	5 unit	6,797,894,050	Provinsi NTB	6 unit	8,622,133,002
1.02.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			612,627,335				652,238,705
1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang	DBH-CHT	Provinsi NTB	167 orang	612,627,335	Provinsi NTB	250 orang	652,238,705
1.02.03.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat			1,413,863,422				454,428,565
1.02.03.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kasus pasung yang ditangani	P A D	Provinsi NTB	67 orang	1,119,563,829	Provinsi NTB	69 orang	130,699,041
1.02.03.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah masyarakat miskin terlayani	DBH-CHT,P A D	Provinsi NTB	45 orang	294,299,593	Provinsi NTB	40 orang	323,729,524
1.02.03.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi			10,064,000				77,460,363
1.02.03.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Nilai tindak lanjut rekomendasi akreditasi perencanaan perbaikan strategis	P A D	Provinsi NTB	80 nilai	10,064,000	Provinsi NTB	80 nilai	77,460,363
1.02.03.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar			3,748,832,812				4,319,818,495
1.02.03.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	Jumlah unit gedung	DAK	Provinsi NTB	1 unit	685,241,090	Provinsi NTB	1 unit	683,392,008
1.02.03.01.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Unit Alat Kesehatan	DBH-CHT	Provinsi NTB	71 unit	742,124,946	Provinsi NTB	78 unit	861,087,494
1.02.03.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah jenis	DBH-CHT	Provinsi NTB	13 jenis	2,153,971,176	Provinsi NTB	13 jenis	2,562,838,992
1.02.03.01.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah unit jenis mebeleur	P A D	Provinsi NTB	56 unit	79,995,600	Provinsi NTB	81 unit	75,000,000
1.02.03.01.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah unit	P A D	Provinsi NTB	104 unit	87,500,000	Provinsi NTB	57 unit	137,500,001
1.02.03.01.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara			125,000,000				133,034,268
1.02.03.01.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah gedung yang terpelihara	P A D	Provinsi NTB	6 unit	125,000,000	Provinsi NTB	6 unit	133,034,268
1.02.03.01.39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD			18,200,000,000				19,500,000,000
1.02.03.01.39.01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Provinsi NTB	1 pendapatan	18,200,000,000	Provinsi NTB	1 pendapatan	19,500,000,000
1:02:04	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				49,666,557,177				53,365,023,246
1.02.04.01	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				49,666,557,177				53,365,023,246
1.02.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			14,233,479,400				15,013,279,400
1.02.04.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	APBD PROV.	Provinsi NTB	350 Orang	14,233,479,400	Provinsi NTB	350 Orang	15,013,279,400
1.02.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			620,000,000				693,727,000
1.02.04.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 unit	500,000,000	Provinsi NTB	2 unit	520,000,000
1.02.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasioanl	APBD PROV.	Provinsi NTB	10 Unit	100,000,000	Provinsi NTB	10 Unit	120,000,000
1.02.04.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	APBD PROV.	Provinsi NTB	10 Kegiatan	20,000,000	Provinsi NTB	15 kegiatan	53,727,000
1.02.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			452,357,185				515,072,660
1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	terpenuhinya pendidikan formal bagi karyawan	APBD PROV.	Provinsi NTB	35 orang	452,357,185	Provinsi NTB	40 orang	515,072,660
1.02.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			15,000,000				15,000,000
1.02.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP dan Dokumen ANJAB	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 Dokumen	15,000,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	15,000,000

1.02.04.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			22,965,827				23,772,584
1.02.04.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	dokumen manajemen asset/barang milik daerah	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 dokumen	22,965,827	Provinsi NTB	1 dokumen	23,772,584
1.02.04.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat			173,983,536				180,095,337
1.02.04.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Pasien Miskin/Tidak Mampu yang terlayani	APBD PROV.	Provinsi NTB	50 Orang	173,983,536	Provinsi NTB	45 orang	180,095,337
1.02.04.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi			115,186,829				144,076,270
1.02.04.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Nilai tindak lanjut hasil Verifikasi akreditasi	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Kali	115,186,829	Provinsi NTB	1 Kali	144,076,270
1.02.04.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar			4,233,584,400				4,500,000,000
1.02.04.01.26.19	Pengadaan obat	Jumlah jenis	APBD PROV.	Provinsi NTB	12 Jenis	4,233,584,400	Provinsi NTB	12 Jenis	4,500,000,000
1.02.04.01.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara			300,000,000				779,999,995
1.02.04.01.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Instalasi Limbah Rumah Sakit Yang Terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 Paket	100,000,000	Provinsi NTB	2 Paket	200,000,000
1.02.04.01.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan Yang Terkalibrasi/Terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	12 unit	150,000,000	Provinsi NTB	15 Unit	499,999,995
1.02.04.01.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah unit kendaraan roda 4/ambulance terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	10 unit	50,000,000	Provinsi NTB	10 unit	80,000,000
1.02.04.01.39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD			29,500,000,000				31,500,000,000
1.02.04.01.39.01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Provinsi NTB	1 Tahun	29,500,000,000	Provinsi NTB	1 Tahun	31,500,000,000
1:03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				772,861,464,209				698,651,318,926
1:03:01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				772,861,464,209				698,651,318,926
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Induk)				678,929,656,488				698,651,318,926
1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			1,954,940,500				250,689,860
1.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	DAU	Kota Mataram	3 Jenis	120,000,000	Kota Mataram	3 Jenis	446,700,000
1.03.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	10 Unit	13,760,000	Provinsi NTB	10 Unit	13,760,000
1.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	DAU	Provinsi NTB	15 Orang	96,768,000	Provinsi NTB	15 Orang	96,768,000
1.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	15 Orang	365,695,500	Provinsi NTB	15 Orang	365,695,500
1.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	DAU	Provinsi NTB	50 Jenis	51,351,900	Provinsi NTB	50 Jenis	51,351,900
1.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	DAU	Provinsi NTB	988 Buku	21,736,000	Provinsi NTB	1000 Buku	22,000,000
1.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	DAU	Provinsi NTB	30 Buah	5,796,000	Provinsi NTB	30 Buah	6,000,000
1.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg disediakan	DAU	Provinsi NTB	20 Unit	120,950,000	Provinsi NTB	15 Unit	121,950,000
1.03.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan yg disediakan	DAU	Provinsi NTB	454 Buku	9,080,000	Provinsi NTB	500 Buku	10,000,000
1.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	25,950,000	Provinsi NTB	2 Jenis	26,000,000
1.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Perjalanan Luar Daerah	DAU	Luar Provinsi	17 Orang	153,000,000	Luar Provinsi	21 Orang	189,000,000
1.03.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung	DAU	Provinsi NTB	14 Orang	710,972,640	Provinsi NTB	14 Orang	710,972,640
1.03.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	DAU	Provinsi NTB	111 Orang	61,050,000	Provinsi NTB	111 Orang	61,050,000
1.03.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga jasa keamanan kantor	DAU	Kota Mataram	15 Orang	198,830,460	Kota Mataram	15 Orang	198,830,550

1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			374,640,000				69,500,000
1.03.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung / kantor	DAU	Provinsi NTB	4 Unit	39,801,600	Provinsi NTB	4 Unit	39,801,600
1.03.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 Unit	35,000,000	Kota Mataram	1 Unit	35,000,000
1.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara	DAU	Kota Mataram	48 Unit	199,838,400	Kota Mataram	48 Unit	199,838,400
1.03.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 Unit	50,000,000	Kota Mataram	1 Unit	55,000,000
1.03.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair	DAU	Provinsi NTB	10 Set	50,000,000	Provinsi NTB	10 Set	50,000,000
1.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur			47,729,000				6,050,000
1.03.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembina Peningkatan mental dan fisik aparatur	DAU	Kota Mataram	4 Orang	32,191,500	Kota Mataram	4 Orang	35,084,000
1.03.01.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepegawaian	DAU	Kota Mataram	1 Dok	15,537,500	Kota Mataram	1 Dok	15,537,500
1.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			284,326,770				10,774,929
1.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan LAKIP dan LKPJ	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	47,645,696	Kota Mataram	2 Dokumen	51,534,206
1.03.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	DAU	Provinsi NTB	1 Laporan	10,000,000	Provinsi NTB	1 Laporan	11,000,000
1.03.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	46,935,450	Kota Mataram	1 Dokumen	49,972,160
1.03.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Penyusunan Renja SKPD, RKA dan DPA	DAU	Kota Mataram	4 Dokumen	97,016,200	Kota Mataram	4 Dokumen	100,000,000
1.03.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan	DAU	Kota Mataram	4 Dokumen	61,969,424	Kota Mataram	4 Dokumen	62,250,988
1.03.01.01.06.10	Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	Jumlah dokumen penyusunan laporan T3 LHP	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	20,760,000	Kota Mataram	2 Dokumen	22,820,000
1.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			58,699,090				10,780,858
1.03.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan peningkatan manajemen aset daerah	DAU	Provinsi NTB	2 Laporan	58,699,090	Provinsi NTB	2 Laporan	70,128,000
1.03.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap			501,589,876,020				506,677,225,800
1.03.01.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi	DAU	Provinsi NTB	4 Dok	2,000,000,000	Provinsi NTB	4 Dok	2,200,000,000
1.03.01.01.15.03	Pembangunan Jalan	Panjang jalan provinsi yg dibangun	DAK,DAU	Kab. Lombok Barat,Kota Bima,Provinsi NTB	54 Km	493,000,000,020	Kab. Lombok Barat,Kota Bima,Provinsi NTB	60 Km	498,759,960,000
1.03.01.01.15.04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersusunnya rencana pembangunan jembatan	DAU	Provinsi NTB	4 Dok	1,700,000,000	Provinsi NTB	4 Dok	1,890,130,400
1.03.01.01.15.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan	DAU	Provinsi NTB	2 Dok	100,000,000	Provinsi NTB	2 Dok	110,000,000
1.03.01.01.15.05	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan	DAU	Kota Bima,Provinsi NTB	100 Meter	4,597,396,000	Kota Bima,Provinsi NTB	110 Meter	3,497,135,400
1.03.01.01.15.09	Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan	DAU	Provinsi NTB	2 Dok	192,480,000	Provinsi NTB	2 Dok	220,000,000
1.03.01.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap			65,687,812,000				10,986,190,464
1.03.01.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Provinsi NTB	100 Meter	5,280,212,000	Kab. Bima,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Provinsi NTB	110 Meter	5,808,233,200

1.03.01.01.18.07	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan provinsi yg direhabilitasi	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	110 Km	60,407,600,000	Kab. Bima,Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	121 Km	57,972,406,800
1.03.01.01.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Rencana program			275,000,000				275,000,000
1.03.01.01.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	jumlah laporan hasil survey jalan	DAU	Kota Mataram	1 Dok	190,000,000	Kota Mataram	1 Dok	190,000,000
1.03.01.01.22.02	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Jumlah laporan Data Hasil survey kondisi jembatan	DAU	Kota Mataram	1 Dok	85,000,000	Kota Mataram	1 Dok	85,000,000
1.03.01.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi			12,043,805,386				9,051,007,621
1.03.01.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang direncanakan	DAU	Provinsi NTB	5 DI	1,000,000,000	Provinsi NTB	5 DI	1,100,000,000
1.03.01.01.24.18	Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi yang dibangun	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	54 Km	1,986,783,386	Kab. Bima,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	54 Km	2,189,861,730
1.03.01.01.24.19	Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah laporan kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air dan Rehab. Sal. Irigasi	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Prov. NTB	10 Km	9,057,022,000	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Prov. NTB	10 Km	10,720,275,000
1.03.01.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung			647,960,000				3,418,789,000
1.03.01.01.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air baku yang terpenuhi	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,se-NTB	1900 M3	57,210,000	Kab. Bima,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,se-NTB	5892 M3	5,892,000,000
1.03.01.01.26.05	Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi SDA	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	90,750,000	Provinsi NTB	1 Dok	220,000,000
1.03.01.01.26.11	Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen perencanaan pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya	DAU	Provinsi NTB	5 Dok	500,000,000	Provinsi NTB	5 Dok	550,000,000
1.03.01.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum ; Cakupan sanitasi			65,783,200,000				69,400,000,000

1.03.01.01.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	tersedianya penyediaan dan pengolahan air minum	DAU	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,se-NTB	10 Kab/Kota	50,025,648,390	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,se-NTB	10 Kab/Kota	51,400,000,200
1.03.01.01.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Bima,Kota Mataram,Provinsi NTB	50 Lokasi	10,000,000,000	Kab. Bima,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Bima,Kota Mataram,Provinsi NTB	50 Lokasi	13,900,000,000
1.03.01.01.27.10	Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	tersusunnya laporan perencanaan sarana dan prasarana DED air minum	DAU	Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	3 Dokumen	4,964,751,810	Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	4 Dokumen	3,600,000,000
1.03.01.01.27.11	Perencanaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah	DAU	Provinsi NTB	3 Dokumen	792,799,800	Provinsi NTB	3 Dokumen	499,999,800
1.03.01.01.28	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir			1,289,000,000				5,118,767,630
1.03.01.01.28.06	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	panjang talud/bronjong sungai	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Provinsi NTB	1289 Meter	1,289,000,000	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Provinsi NTB	1247 Meter	1,371,700,000
1.03.01.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis			20,687,480,997				22,022,349,000
1.03.01.01.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terbangunnya infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	7 Unit	20,687,480,997	Kab. Bima,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	8 Unit	22,022,349,000
1.03.01.01.34	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat			378,614,725				408,754,000
1.03.01.01.34.05	Penguatan Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	DAU	se-NTB	90 orang	38,020,000	se-NTB	90 orang	34,957,625
1.03.01.01.34.06	Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi	Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	50,000,000	Provinsi NTB	1 tahun	55,000,000
1.03.01.01.34.07	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi	terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	DAU	Provinsi NTB	90 orang	40,900,200	Provinsi NTB	90 orang	47,039,200

1.03.01.01.34.08	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	33,694,525	Provinsi NTB	1 tahun	34,157,175
1.03.01.01.34.09	Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi	Dokumen pembinaan uit P2JK (pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi) di kab/kota	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	216,000,000	Provinsi NTB	2 dokumen	237,600,000
1.03.01.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali			5,419,065,000				6,934,277,952
1.03.01.01.35.01	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial	terbangunnya fasilitas umum dan perkantoran akibat gempa	DAU	Provinsi NTB	30 Unit	5,419,065,000	Provinsi NTB	28 Unit	6,934,277,952
1.03.01.01.36	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun			476,119,000				1,629,410,000
1.03.01.01.36.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang	DAU	Provinsi NTB	2 KSP	276,119,000	Provinsi NTB	2 KSP	1,409,410,000
1.03.01.01.36.11	Pembinaan Penyusunan RTR Kab./Kota	tersedianya dokumen pembinaan penyusunan RTR kab./Kota	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	200,000,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	220,000,000
1.03.01.01.37	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan			408,220,000				500,273,000
1.03.01.01.37.05	Survey dan Pemetaan	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)	DAU	Provinsi NTB	1 KSP	199,210,000	Provinsi NTB	1 KSP	250,136,500
1.03.01.01.37.10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Telaksananya Kegiatan Sosialisasi	DAU	Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	1 Dokumen	209,010,000	Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	1 Dokumen	250,136,500
1.03.01.01.38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penurunan Penyimpangan tata ruang			1,185,130,000				1,483,710,000
1.03.01.01.38.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang	DAU	Provinsi NTB	2 KSP	252,000,000	Provinsi NTB	2 KSP	443,500,500
1.03.01.01.38.09	Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	DAU	Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	1 Dokumen	80,061,704	Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	1 Dokumen	87,549,695
1.03.01.01.38.10	Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	853,068,296	Provinsi NTB	1 Dokumen	952,659,805
1.03.01.01.39	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan			147,749,000				157,309,000
1.03.01.01.39.01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan	Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan	DAU	Provinsi NTB	2 Kawasan	147,749,000	Provinsi NTB	2 Kawasan	157,309,000
1.03.01.01.40	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor			94,917,000				101,058,000
1.03.01.01.40.01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor	Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	94,917,000	Provinsi NTB	4 Dokumen	101,058,000
1.03.01.01.41	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah			95,372,000				119,430,000
1.03.01.01.41.01	Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	95,372,000	Provinsi NTB	4 Dokumen	119,430,000
1.03.01.02	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok				10,199,004,664				11,285,202,779
1.03.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			313,760,028				250,689,860
1.03.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	DAU	Kota Mataram	3 Jenis	87,193,068	Kota Mataram	3 Jenis	137,093,781
1.03.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	4 Orang	54,336,000	Kota Mataram	4 Orang	55,000,000
1.03.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	Kota Mataram	2 Orang	31,511,320	Kota Mataram	2 Orang	32,000,000
1.03.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	DAU	Kota Mataram	50 Jenis	15,550,000	Kota Mataram	50 Jenis	660,000
1.03.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	350 Buku	8,750,000	Kota Mataram	360 Buku	9,000,000

1.03.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	DAU	Kota Mataram	30 Buah	5,529,000	Kota Mataram	30 Buah	5,600,010
1.03.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	5 unit	25,000,000	Kota Mataram	5 unit	25,000,000
1.03.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	Kota Mataram	2 Orang	12,000,000	Kota Mataram	2 Orang	12,000,000
1.03.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DAU	Kota Mataram	14 Orang	24,990,000	Kota Mataram	14 Orang	24,990,000
1.03.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	DAU	Kota Mataram	2 Orang	48,900,640	Kota Mataram	2 Orang	48,900,640
1.03.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			170,399,974				69,500,000
1.03.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	Kota Mataram	38 Unit	155,399,974	Kota Mataram	38 Unit	155,399,974
1.03.01.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	DAU	Kota Mataram	1 Unit	15,000,000	Kota Mataram	1 Unit	15,000,000
1.03.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			14,484,190				10,774,929
1.03.01.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	14,484,190	Kota Mataram	1 Dokumen	14,344,646
1.03.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			34,222,000				10,780,858
1.03.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	DAU	Kota Mataram	4 Dokumen	34,222,000	Kota Mataram	4 Dokumen	31,000,000
1.03.01.02.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap			9,566,138,472				10,986,190,464
1.03.01.02.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	DAU	Kota Mataram	100 meter	500,000,000	Kota Mataram	110 meter	550,000,000
1.03.01.02.18.08	Pemeliharaan rutin jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	DAU	Kota Mataram	83 km	9,066,138,472	Kota Mataram	92 km	10,049,213,728
1.03.01.02.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Umur teknis alat berat			100,000,000				122,000,000
1.03.01.02.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat	DAU	Kota Mataram	10 Unit	100,000,000	Kota Mataram	10 Unit	120,000,000
1.03.01.03	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa				10,546,942,013				11,579,149,730
1.03.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			278,978,645				250,689,860
1.03.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	DAU	Kab. Sumbawa	3 Jenis	50,751,000	Kab. Sumbawa	3 Jenis	51,000,000
1.03.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	5 Unit	24,286,000	Kab. Sumbawa	5 Unit	24,600,000
1.03.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DAU	Kab. Sumbawa	5 Orang	44,949,145	Kab. Sumbawa	5 Orang	40,000,000
1.03.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	2 Orang	4,000,000	Kab. Sumbawa	2 Orang	4,000,000
1.03.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	DAU	Kab. Sumbawa	10 Jenis	13,217,500	Kab. Sumbawa	10 Jenis	13,217,500
1.03.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kab. Sumbawa	250 Buku	5,500,000	Kab. Sumbawa	250 Buku	5,500,000
1.03.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	DAU	Kab. Sumbawa	100 buah	5,500,000	Kab. Sumbawa	100 buah	5,000,000
1.03.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	20 Unit	54,675,000	Kab. Sumbawa	20 Unit	55,000,000
1.03.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan	DAU	Kab. Sumbawa	100 Buku	2,500,000	Kab. Sumbawa	104 Buku	2,600,000
1.03.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	5,000,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	5,000,000

1.03.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	Kab. Sumbawa	2 Orang	18,000,000	Kab. Sumbawa	8 Orang	72,000,000
1.03.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DAU	Kab. Sumbawa	92 Orang	50,600,000	Kab. Sumbawa	55 Orang	30,250,000
1.03.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			114,950,000				69,500,000
1.03.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	DAU	Kab. Sumbawa	2 unit	4,500,000	Kab. Sumbawa	2 unit	6,836,400
1.03.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	Kab. Sumbawa	21 unit	110,450,000	Kab. Sumbawa	21 unit	110,450,000
1.03.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			17,550,060				10,774,929
1.03.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA	DAU	Kota Mataram	3 Dokumen	17,550,060	Kota Mataram	3 Dokumen	19,305,066
1.03.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			29,200,300				10,780,858
1.03.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	DAU	Kab. Sumbawa	1 dokumen	29,200,300	Kab. Sumbawa	1 dokumen	26,200,300
1.03.01.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap			9,986,263,008				10,986,190,464
1.03.01.03.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	DAU	Kab. Sumbawa	106 meter	530,000,000	Kab. Sumbawa	102 meter	510,000,000
1.03.01.03.18.08	Pemeliharaan rutin jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	DAU	Kab. Sumbawa	58 km	9,456,263,008	Kab. Sumbawa	64 km	10,476,190,464
1.03.01.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Umur teknis alat berat			120,000,000				122,000,000
1.03.01.03.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat	DAU	Kab. Sumbawa	10 Unit	120,000,000	Kab. Sumbawa	10 Unit	122,000,000
1.03.01.04	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok				55,942,348,426				60,214,283,125
1.03.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			161,072,000				250,689,860
1.03.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	DAU	Kota Mataram	3 jenis	13,749,000	Kota Mataram	3 jenis	38,000,000
1.03.01.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	10 unit	10,000,000	Kota Mataram	10 unit	10,000,000
1.03.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	12 bulan	25,200,000	Kota Mataram	12 bulan	25,500,000
1.03.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	DAU	Kota Mataram	50 jenis	12,150,000	Kota Mataram	50 jenis	12,500,000
1.03.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	22 buku	2,173,000	Kota Mataram	22 buku	2,200,000
1.03.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	DAU	Kota Mataram	50 buah	15,000,000	Kota Mataram	50 buah	15,000,000
1.03.01.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	2 unit	7,800,000	Kota Mataram	2 unit	10,000,000
1.03.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	Kota Mataram	100 orang	60,000,000	Kota Mataram	108 orang	64,800,000
1.03.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DAU	Kota Mataram	2 orang	15,000,000	Kota Mataram	3 orang	22,500,000
1.03.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			63,000,000				69,500,000
1.03.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	Kota Mataram	10 unit	39,000,000	Kota Mataram	10 unit	39,000,000
1.03.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	DAU	Kota Mataram	1 unit	24,000,000	Kota Mataram	1 unit	24,000,000
1.03.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			10,501,584				10,774,929
1.03.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA	DAU	Kota Mataram	3 dokumen	10,501,584	Kota Mataram	3 dokumen	15,851,000

1.03.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			16,055,270				10,780,858
1.03.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	DAU	Kota Mataram	1 dokumen	16,055,270	Kota Mataram	1 dokumen	17,660,797
1.03.01.04.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi			29,175,755,886				9,051,007,621
1.03.01.04.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan	DAK,DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Mataram	41 km	29,175,755,886	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Mataram	47 km	31,388,855,088
1.03.01.04.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung			24,192,799,986				3,418,789,000
1.03.01.04.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah bendungan dan embung yang dipelihara rutin	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kota Mataram	198 buah	23,892,799,996	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kota Mataram	198 buah	25,889,210,198
1.03.01.04.26.08	Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah pos Hidrologi yang di updating, publikasi dan validasi data hidrologinya	DAU	Kota Mataram	62 pos	100,000,000	Kota Mataram	62 pos	110,000,000
1.03.01.04.26.09	Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi	Jumlah jaringan hidrologi yang dioperasikan optimal	DAU	Kota Mataram	28 pos	199,999,990	Kota Mataram	28 pos	220,000,000
1.03.01.04.28	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir			2,323,163,700				5,118,767,630
1.03.01.04.28.03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya Normalisasi/perkuatan tebing sungai	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Timur,Kota Mataram	88 lokasi	2,323,163,700	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Timur,Kota Mataram	97 lokasi	2,309,206,041
1.03.01.05	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa				16,552,653,520				18,229,164,751
1.03.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			335,932,608				250,689,860
1.03.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	DAU	Kab. Sumbawa	3 jenis	57,000,000	Kab. Sumbawa	3 jenis	57,000,000
1.03.01.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	10 unit	10,000,000	Kab. Sumbawa	10 unit	15,000,000
1.03.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DAU	Kab. Sumbawa	72 OB	34,085,448	Kab. Sumbawa	72 OB	34,085,450
1.03.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	12 OB	30,000,000	Kab. Sumbawa	12 OB	30,000,000
1.03.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	DAU	Kab. Sumbawa	50 jenis	42,305,200	Kab. Sumbawa	50 jenis	43,000,000
1.03.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kab. Sumbawa	150000 lembar	15,441,500	Kab. Sumbawa	150000 lembar	32,941,500
1.03.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	DAU	Kab. Sumbawa	10 unit	8,000,000	Kab. Sumbawa	10 unit	9,000,000
1.03.01.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	1 unit	5,000,000	Kab. Sumbawa	3 unit	15,000,000
1.03.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan	DAU	Kab. Sumbawa	360 exemplar	4,554,000	Kab. Sumbawa	360 exemplar	5,000,000

1.03.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	Kab. Sumbawa	27 orang	62,563,230	Kab. Sumbawa	27 orang	64,183,234
1.03.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DAU	Kab. Sumbawa	3 orang	66,983,230	Kab. Sumbawa	5 orang	110,683,435
1.03.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			112,991,994				69,500,000
1.03.01.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	4,451,626	Kab. Sumbawa	1 Unit	11,846,626
1.03.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	Kab. Sumbawa	16 Unit	108,540,368	Kab. Sumbawa	16 Unit	139,135,440
1.03.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			16,610,000				10,774,929
1.03.01.05.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA	DAU	Kab. Sumbawa	3 dokumen	16,610,000	Kab. Sumbawa	3 dokumen	18,271,000
1.03.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			50,412,560				10,780,858
1.03.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dok.	50,412,560	Kab. Sumbawa	1 Dok.	55,453,816
1.03.01.05.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi			8,263,388,359				9,051,007,621
1.03.01.05.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan	DAU	Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	52 km	8,263,388,359	Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	60 km	9,051,007,621
1.03.01.05.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung			3,119,892,000				3,418,789,000
1.03.01.05.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah bendungan dan embung yang dipelihara rutin	DAU	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	100 Buah	2,807,900,000	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	100 Buah	3,088,789,000
1.03.01.05.26.08	Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah pos Hidrologi yang di updating, publikasi dan validasi data hidrologinya	DAU	Kab. Sumbawa	10 pos	100,000,000	Kab. Sumbawa	10 pos	110,000,000
1.03.01.05.26.09	Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi	Jumlah jaringan hidrologi yang dioperasikan optimal	DAU	Kab. Sumbawa	12 pos	211,992,000	Kab. Sumbawa	12 pos	220,000,000
1.03.01.05.28	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir			4,653,425,999				5,118,767,630
1.03.01.05.28.03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya Normalisasi/perkuatan tebing sungai	DAU	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	94 lokasi	4,653,425,999	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	97 lokasi	5,118,767,630
1.03.01.06	Balai Pengujian Material Konstruksi				690,859,098				744,250,647
1.03.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			224,539,929				250,689,860
1.03.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	DAU	Kota Mataram	3 Jenis	45,999,999	Kota Mataram	3 Jenis	46,000,000
1.03.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	3 Unit	15,000,000	Kota Mataram	5 Unit	25,000,000
1.03.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	24 OB	41,146,000	Kota Mataram	24 OB	41,146,000
1.03.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	Kota Mataram	12 OB	25,620,320	Kota Mataram	12 OB	25,620,320
1.03.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	15,252,250	Kota Mataram	10 Jenis	16,000,000
1.03.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	10 Buku	1,765,500	Kota Mataram	10 Buku	1,942,050
1.03.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	DAU	Kota Mataram	10 Buah	1,801,360	Kota Mataram	10 Buah	1,981,490

1.03.01.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	1 Unit	15,000,000	Kota Mataram	2 Unit	25,000,000
1.03.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	Kota Mataram	7 Orang	52,091,700	Kota Mataram	7 Orang	53,000,000
1.03.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DAU	se-NTB	10 Orang	10,862,800	se-NTB	10 Orang	15,000,000
1.03.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			69,500,000				69,500,000
1.03.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	Kota Mataram	10 Unit	44,500,000	Kota Mataram	10 Tahun	44,500,000
1.03.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	DAU	Kota Mataram	10 Unit	25,000,000	Kota Mataram	10 Unit	25,000,000
1.03.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur			5,500,000				6,050,000
1.03.01.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan	DAU	Kota Mataram	1 Orang	5,500,000	Kota Mataram	1 Orang	6,050,000
1.03.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			9,795,390				10,774,929
1.03.01.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA	DAU	Kota Mataram	3 Dok.	9,795,390	Kota Mataram	3 Dok.	10,774,929
1.03.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,800,780				10,780,858
1.03.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	DAU	se-NTB	1 Dok.	9,800,780	se-NTB	1 Dok.	10,780,858
1.03.01.06.31	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji			371,722,999				396,455,000
1.03.01.06.31.01	Pengujian Bahan Bangunan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan	P A D	Kota Mataram	55 Jenis	135,935,000	Kota Mataram	55 Jenis	138,455,000
1.03.01.06.31.03	Pengujian kualitas air	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air	P A D	Kota Mataram	55 Jenis	235,787,999	Kota Mataram	55 Jenis	258,000,000
1:04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				98,238,581,734				212,047,904,516
1:04:01	Dinas Perumahan dan Permukiman				98,238,581,734				212,047,904,516
1.04.01.01	Dinas Perumahan dan Permukiman				98,238,581,734				212,047,904,516
1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,537,716,581				1,694,101,976
1.04.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	2,850,000	Provinsi NTB	2 Jenis	2,850,000
1.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	230,373,996	Provinsi NTB	4 Jenis	231,132,000
1.04.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	10 Orang	133,991,340	Provinsi NTB	10 Orang	147,830,332
1.04.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	14 Orang	338,118,480	Provinsi NTB	14 Orang	369,345,564
1.04.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tahun	DAU	Provinsi NTB	34 Jenis	20,052,600	Provinsi NTB	34 Jenis	20,253,698
1.04.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	19,300,800	Provinsi NTB	3 Jenis	42,035,328
1.04.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis	DAU	se-NTB	11 Jenis	5,505,700	se-NTB	11 Jenis	5,506,699
1.04.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	6,091,042	Provinsi NTB	8 Unit	30,145,336
1.04.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	40,434,074	Provinsi NTB	2 Jenis	50,000,000
1.04.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	DAU	Provinsi NTB	28 OT	214,091,812	Provinsi NTB	29 OT	230,000,027
1.04.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	DAU	Provinsi NTB	125 OT	348,179,685	Provinsi NTB	131 OT	384,488,669
1.04.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	7 Orang	178,727,052	Provinsi NTB	7 Orang	180,514,323
1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			647,105,863				692,154,045
1.04.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	DAU	Provinsi NTB	6 Unit	149,999,950	Provinsi NTB	0 0	0
1.04.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	40,000,000	Provinsi NTB	9 Jenis	184,275,000
1.04.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah unit	DAU	Provinsi NTB	26 unit	99,999,200	Provinsi NTB	26 unit	100,000,000
1.04.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah unit	DAU	Provinsi NTB	38 unit	25,749,975	Provinsi NTB	38 unit	26,522,480

1.04.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah unit	DAU	Provinsi NTB	1 unit	331,356,738	Provinsi NTB	1 unit	381,356,565
1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			64,838,816				69,025,976
1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	22,000,000	Provinsi NTB	2 jenis	24,194,000
1.04.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	93 orang	30,384,216	Provinsi NTB	93 orang	31,754,478
1.04.01.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	12,454,600	Provinsi NTB	1 dokumen	13,077,498
1.04.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			275,097,659				453,602,000
1.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	28,839,992	Provinsi NTB	1 dokumen	30,282,000
1.04.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	46,247,000	Provinsi NTB	2 dokumen	48,559,350
1.04.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	3 dokumen	148,310,667	Provinsi NTB	3 dokumen	156,175,679
1.04.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	4 dokumen	46,700,000	Provinsi NTB	4 dokumen	210,884,971
1.04.01.01.06.10	Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	jumlah kegiatan	DAU	Provinsi NTB	1 kegiatan	5,000,000	Provinsi NTB	1 kegiatan	7,700,000
1.04.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah			34,418,690				36,644,000
1.04.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	34,418,690	Provinsi NTB	1 dokumen	36,644,000
1.04.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani			10,924,150,284				111,414,701,050
1.04.01.01.15.06	Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan rumah layak huni di Provinsi NTB	DAU	se-NTB	3500 Unit	786,220,800	se-NTB	3500 Unit	100,010,963,500
1.04.01.01.15.09	Penyediaan dan pembangunan perumahan	Pembangunan dan rehabilitasi perumahan formal dan informal	P A D	se-NTB	3 Unit	9,972,169,200	se-NTB	5 Unit	11,143,305,583
1.04.01.01.15.10	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Program Informasi Perumahan dan Permukiman	DAU	se-NTB	1 dokumen	84,792,484	se-NTB	1 dokumen	87,336,259
1.04.01.01.15.11	Perencanaan Pembangunan Perumahan	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	6 dokumen	80,967,800	se-NTB	6 dokumen	173,095,708
1.04.01.01.18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi			618,436,029				1,296,015,814
1.04.01.01.18.01	Rehabilitasi rumah akibat bencana alam	jumlah rumah	DAU, P A D	se-NTB	1 dokumen	448,410,629	se-NTB	1 dokumen	1,096,015,814
1.04.01.01.18.04	Mitigasi kawasan perumahan rawan bencana	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi	DAU	se-NTB	50 kk	170,025,400	se-NTB	50 kk	200,000,000
1.04.01.01.22	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata			84,136,817,812				96,391,659,655
1.04.01.01.22.01	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB	Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB	DAU, P A D	se-NTB	1 Dokumen	1,200,000,000	se-NTB	1 Dokumen	1,424,018,867
1.04.01.01.22.02	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh	P A D	Provinsi NTB	2 Dokumen	8,080,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	520,775,000
1.04.01.01.22.04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	DAU	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kota Bima, Kota Mataram	1%	82,928,737,812	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kota Bima, Kota Mataram	1%	94,446,865,788
1:05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17,541,474,464				12,368,656,000
1:05:01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				11,717,837,000				12,368,656,000

1.05.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				11,717,837,000				12,368,656,000
1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran			1,074,681,680				1,173,662,000
1.05.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	DAU	Kota Mataram	362 Buah	1,810,000	Kota Mataram	318 Buah	1,908,000
1.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	DAU	Kota Mataram	3 Rekening	107,268,000	Kota Mataram	3 Rekening	107,478,000
1.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	84 Orang/ Bulan	83,580,000	Kota Mataram	84 Orang/ Bulan	83,916,000
1.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan dan kewanaman kantor	DAU	Kota Mataram	192 Orang/ Bulan	391,648,680	Kota Mataram	192 Orang/ Bulan	445,440,000
1.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	DAU	Kota Mataram	80 Jenis	50,130,000	Kota Mataram	85 Jenis	56,695,000
1.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan & penggandaan	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	11,820,000	Kota Mataram	10 Jenis	12,540,000
1.05.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DAU	Kota Mataram	5 Jenis	110,375,000	Kota Mataram	5 Jenis	110,385,000
1.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	DAU	Kota Mataram	3100 Orang/Porsi	71,300,000	Kota Mataram	3100 Orang/Porsi	74,400,000
1.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	Luar Provinsi	50 OT	120,000,000	Luar Provinsi	50 OT	127,150,000
1.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembinaan dan sinergitas program ke kabupaten/kota dalam daerah	DAU	Provinsi NTB	125 OT	126,750,000	Provinsi NTB	125 OT	153,750,000
1.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan			495,448,320				350,938,000
1.05.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	253,369,320	Provinsi NTB	0 Jenis	0
1.05.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang memadai	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	76,799,000	Kota Mataram	10 Jenis	114,810,000
1.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	DAU	Kota Mataram	30 Unit	139,530,000	Kota Mataram	32 Unit	197,088,000
1.05.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	25,750,000	Kota Mataram	10 Jenis	39,040,000
1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat			16,416,000				17,472,000
1.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah penceramah/ instruktur senam	DAU	Kota Mataram	48 Orang	16,416,000	Kota Mataram	48 Orang	17,472,000
1.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan			230,340,000				279,405,000
1.05.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja	DAU	Kota Mataram	4 Dokumen	79,700,000	Kota Mataram	5 Dokumen	114,240,000
1.05.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya Renja Tahunan	DAU	Kota Mataram	5 Dokumen	150,640,000	Kota Mataram	5 Dokumen	165,165,000
1.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset			20,772,000				22,115,000
1.05.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersedianya datanya asset asset institusi	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	20,772,000	Kota Mataram	1 Dokumen	22,115,000
1.05.01.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya			549,200,000				584,600,000
1.05.01.01.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah TOGA/TOMA/TODAT	DAU	Provinsi NTB	100 Orang	162,200,000	Provinsi NTB	100 Orang	179,300,000
1.05.01.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Anggota Forum Mitra Wawasan Kebangsaan	DAU	Provinsi NTB	300 Orang	387,000,000	Provinsi NTB	300 Orang	405,300,000
1.05.01.01.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penurunan Konflik Sosial			6,120,999,000				6,516,774,000
1.05.01.01.19.04	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah forum mitra pengendalian keamanan	DAU	Provinsi NTB	3 Forum/ Mitra	6,120,999,000	Provinsi NTB	3 Forum/ Mitra	6,516,774,000
1.05.01.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)			2,103,870,000				2,245,220,000
1.05.01.01.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	DAU	Provinsi NTB	10 Desa	2,103,870,000	Provinsi NTB	10 Desa	2,245,220,000

1.05.01.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah			1,106,110,000				1,178,470,000
1.05.01.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	DAU	Provinsi NTB	400 Orang	1,009,600,000	Provinsi NTB	400 Orang	1,070,800,000
1.05.01.01.21.07	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	Jumlah Proposal permohonan bantuan hibah yang terverifikasi	DAU	Provinsi NTB	30 Dokumen	96,510,000	Provinsi NTB	30 Dokumen	107,670,000
1:05:02	Satuan Polisi Pamong Praja				4,205,061,762				4,821,798,905
1.05.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja				4,205,061,762				4,821,798,905
1.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			767,710,554				895,639,798
1.05.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Menyurat yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 Bulan	4,998,000	Kota Mataram	12 Bulan	5,000,000
1.05.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	40,203,900	Kota Mataram	12 bulan	45,000,000
1.05.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	115,809,500	Kota Mataram	12 bulan	123,000,000
1.05.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	105,000,000	Kota Mataram	12 bulan	106,823,000
1.05.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	34,830,600	Kota Mataram	12 bulan	34,830,600
1.05.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	30,402,000	Kota Mataram	12 bulan	30,402,000
1.05.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	8,139,100	Kota Mataram	12 bulan	8,139,101
1.05.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	30,000,000	Kota Mataram	12 bulan	30,000,000
1.05.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	28,000,000	Kota Mataram	12 bulan	28,000,001
1.05.02.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersusun	APBD PROV., DAU	Kota Mataram	12 bulan	139,751,099	Kota Mataram	12 bulan	239,751,100
1.05.02.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	43,400,000	Kota Mataram	12 bulan	50,036,501
1.05.02.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersusun	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	142,518,900	Kota Mataram	12 bulan	150,000,000
1.05.02.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Arsiparis yang terakuisi	APBD PROV.	Kota Mataram	3600 berkas	44,657,455	Kota Mataram	3600 berkas	44,657,496
1.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur			1,088,980,996				1,165,074,991
1.05.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	2 unit	534,094,600	Kota Mataram	1 unit	604,851,600
1.05.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeuler yang diadakan	APBD PROV.	Kota Mataram	2 buah	37,599,496	Kota Mataram	30 buah	37,599,501
1.05.02.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah alat elektronik yang tersedia	APBD PROV., DAU	Kota Mataram	5 unit	125,695,100	Kota Mataram	17 unit	125,695,093
1.05.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	APBD PROV.	Kota Mataram	35 Unit	357,091,800	Kota Mataram	37 tahun	362,428,797
1.05.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	APBD PROV.	Kota Mataram	51 unit	34,500,000	Kota Mataram	51 unit	34,500,000
1.05.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur			109,350,000				117,435,000
1.05.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	APBD PROV.	Kota Mataram	1 Paket	109,350,000	Kota Mataram	1 Paket	117,435,000
1.05.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program			267,337,550				284,623,000
1.05.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Keuangan (LK SKPD) yang tersusun	APBD PROV.	Kota Mataram	3 dokumen	71,498,600	Kota Mataram	3 dokumen	81,498,600
1.05.02.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah rencana kerja yang tersusun	APBD PROV.	Kota Mataram	3 dokumen	195,838,950	Kota Mataram	4 dokumen	203,124,400
1.05.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset			19,568,646				20,833,919
1.05.02.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah	APBD PROV.	Kota Mataram	2 dokumen	19,568,646	Kota Mataram	2 dokumen	20,833,919

1.05.02.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)			488,328,099				502,904,400
1.05.02.01.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Satlinmas yang terlatih	APBD PROV.	Kota Mataram	50 org	70,833,700	Kota Mataram	150 org	75,000,000
1.05.02.01.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mengikuti gelar pasukan satlinmas	APBD PROV.	Provinsi NTB	500 orang	139,589,999	Provinsi NTB	500 orang	150,000,000
1.05.02.01.15.08	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi	APBD PROV.	se-NTB	600 orang	277,904,400	se-NTB	600 orang	277,904,400
1.05.02.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)			1,108,933,920				1,383,122,096
1.05.02.01.16.07	Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik dan Gangguan Kemanan dan Ketentraman Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Terpadu	APBD PROV., DAU	Kota Mataram	4 kali	32,700,000	Kota Mataram	4 kali	346,875,596
1.05.02.01.16.08	Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI)	Jumlah kegiatan Turjawali	APBD PROV.	Kota Mataram	12 bulan	30,279,920	Kota Mataram	12 bulan	30,280,001
1.05.02.01.16.09	Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB	Jumlah peserta rapat koordinasi pengawasan dan penegakan perda	APBD PROV., DAU	Provinsi NTB	70 orang	10,037,500	Provinsi NTB	1 keg	40,000,000
1.05.02.01.16.10	Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan, pengamanan dan penanganan aset	APBD PROV.	Kota Mataram	4 kali	65,000,000	Kota Mataram	4 kali	65,000,000
1.05.02.01.16.13	Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah operasi yustisi	APBD PROV.	Provinsi NTB	6 kegiatan	525,000,000	Provinsi NTB	6 kegiatan	500,000,000
1.05.02.01.16.15	Pengamanan/Pengawasan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB	Jumlah lokasi pengamanan, pengawalan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota	APBD PROV.	se-NTB	10 kab/kota	170,000,000	se-NTB	10 kab/kota	200,000,000
1.05.02.01.16.17	Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan terhadap Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Jumlah kegiatan pengawasan aparatur	APBD PROV.	Kota Mataram	12 kali	42,494,000	Kota Mataram	12 kali	42,544,000
1.05.02.01.16.18	Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	APBD PROV.	Kota Mataram	600 orang	158,422,500	Kota Mataram	600 orang	158,422,500
1.05.02.01.16.19	Bimbingan Teknis Petugas Khusus Wisata Halal	Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal yang terlatih	APBD PROV.	Kota Mataram	50 orang	75,000,000	Kota Mataram	0 orang	0
1.05.02.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			354,851,997				452,165,700
1.05.02.01.20.02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta koordinasi tibum dan tranmas	APBD PROV.	Kota Mataram	30 orang	49,447,500	Kota Mataram	1 kali	52,265,700
1.05.02.01.20.10	Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba)	Jumlah kegiatan operasi pekat	APBD PROV.	Kota Mataram	6 kali	167,599,999	Kota Mataram	6 kali	240,000,000
1.05.02.01.20.12	Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat	Jumlah masyarakat yang memahami pendeteksian dini dan pencegahan konflik	DAU	Kota Mataram	150 orang	75,000,000	Kota Mataram	150 orang	75,000,000
1.05.02.01.20.13	Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perkada melalui Pendekatan Kearifan Lokal	Frekuensi pembinaan masyarakat masyarakat patuh perda/perkada	APBD PROV.	Provinsi NTB	8 kali	62,804,498	Provinsi NTB	8 kali	84,900,000
1:05:03	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB				1,618,575,702				4,794,538,881
1.05.03.01	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB				1,618,575,702				4,794,538,881
1.05.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			122,073,360				805,770,000
1.05.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar	DAU	Kota Mataram	1250 Jumlah Surat	10,625,000	Kota Mataram	1250 Jumlah Surat	11,250,000
1.05.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	5 Jenis	6,999,600	Kota Mataram	5 Jenis	245,000,000
1.05.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	10 Orang	21,540,000	Kota Mataram	10 Orang	110,000,000
1.05.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	10 Orang	9,668,760	Kota Mataram	10 Orang	213,340,000
1.05.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	30 Jenis	11,400,000	Kota Mataram	30 Jenis	23,400,000
1.05.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	720,000	Kota Mataram	10 Jenis	8,300,000
1.05.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	12 Jenis	40,000,000	Kota Mataram	12 Jenis	171,600,000
1.05.03.01.01.31	Rapat Pengendalian Teknis	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	44 Orang	21,120,000	Kota Mataram	44 Orang	22,880,000
1.05.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			131,311,702				330,735,251

1.05.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan	DAU	Kota Mataram	47 Unit	60,403,702	Kota Mataram	47 Unit	230,635,251
1.05.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Gedung	DAU	Kota Mataram	1 Tahun	22,504,000	Kota Mataram	1 Tahun	39,500,000
1.05.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	6 Jenis	48,404,000	Kota Mataram	6 Jenis	60,600,000
1.05.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			119,500,000				189,946,281
1.05.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Laporan	DAU	Kota Mataram	2 Laporan	79,500,000	Kota Mataram	2 Laporan	90,750,000
1.05.03.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jenis dokumen	DAU	Kota Mataram	4 dokumen	40,000,000	Kota Mataram	4 dokumen	99,196,281
1.05.03.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			23,045,000				28,065,349
1.05.03.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jenis Laporan	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	23,045,000	Kota Mataram	1 Laporan	28,065,349
1.05.03.01.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana			1,192,642,640				3,283,500,000
1.05.03.01.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	11 Lokasi	48,302,640	Provinsi NTB	11 Lokasi	187,000,000
1.05.03.01.22.06	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (Rescue Linmas)	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	50 Orang	59,400,000	Provinsi NTB	50 Orang	176,500,000
1.05.03.01.22.07	Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jumlah Orang/Kegiatan	DAU	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	400 Orang	18,040,000	Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	400 Orang	180,000,000
1.05.03.01.22.08	Sosialisasi pengurangan resiko bencana	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	40 or	28,750,000	Kota Mataram	40 or	440,000,000
1.05.03.01.22.11	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjir dan Tanah Longsor	Jumlah Lokasi	DAU	Provinsi NTB	10 Lokasi	1,700,000	Provinsi NTB	10 Lokasi	440,000,000
1.05.03.01.22.12	Pengurangan Daerah Rawan Kekeringan	Jumlah Lokasi	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kota Mataram	2 Lokasi	478,040,000	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kota Mataram	2 Lokasi	560,000,000
1.05.03.01.22.16	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana	Jumlah Jenis/Lokasi	DAU	Kota Mataram	11 lokasi	43,800,000	Kota Mataram	11 lokasi	187,000,000
1.05.03.01.22.17	Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	40 jenis	1,720,000	Kota Mataram	40 jenis	206,000,000
1.05.03.01.22.18	Penanganan Siaga Darurat Bencana	Jumlah Lokasi	DAU	Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kota Mataram	10 lokasi	70,040,000	Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kota Mataram	10 lokasi	155,000,000
1.05.03.01.22.19	Penanganan Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	2500 Orang	10,770,000	Kota Mataram	2500 Orang	452,000,000
1.05.03.01.22.20	Penanganan transisi ke pemulihan darurat	Jumlah lokasi	DAU	Kota Mataram	10 Lokasi	267,830,000	Kota Mataram	10 Lokasi	300,000,000
1.05.03.01.22.23	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Desa Tangguh Bencana (Destana)	Jumlah Desa	DAU	se-NTB	20 desa	73,000,000	se-NTB	0 0	0
1.05.03.01.22.24	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SAB)	Jumlah Sekolah	DAU	Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,se-NTB	10 sekolah	91,250,000	Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,se-NTB	0 0	0
1.05.03.01.24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) ; Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi			30,003,000				156,522,000
1.05.03.01.24.01	Identifikasi lokasi pasca bencana	Jumlah Lokasi	DAU	Kota Mataram	10 lokasi	2,367,000	Kota Mataram	10 lokasi	54,000,000
1.05.03.01.24.02	Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	10 Dok	3,225,000	Kota Mataram	10 Dok	56,522,000
1.05.03.01.24.03	Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	500 Orang	24,411,000	Kota Mataram	500 Orang	46,000,000
1:06	SOSIAL				25,656,399,966				15,983,593,985
1:06:01	Dinas Sosial				25,656,399,966				15,983,593,985

1.06.01.01	Dinas Sosial (Induk)				8,435,041,200				15,983,593,985
1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran			780,434,000				559,500,000
1.06.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	P A D	Provinsi NTB	1000 Surat	8,300,000	Provinsi NTB	1000 Surat	9,786,500
1.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, air listrik dan internet kantor	P A D	Provinsi NTB	4 Jenis	186,500,000	Provinsi NTB	4 Jenis	226,819,012
1.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia	P A D	Provinsi NTB	9 Orang	94,620,000	Provinsi NTB	9 Orang	122,119,650
1.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan kantor dan alat pembersih yang tersedia	P A D	Provinsi NTB	3 Orang	92,080,000	Provinsi NTB	3 Orang	110,539,788
1.06.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	P A D	Provinsi NTB	10 Jenis	25,000,000	Provinsi NTB	10 Jenis	26,450,000
1.06.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	55 Jenis	43,910,000	Provinsi NTB	60 Jenis	50,356,200
1.06.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan tersedia	P A D	Provinsi NTB	3 Jenis	37,500,000	Provinsi NTB	3 Jenis	40,733,001
1.06.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	P A D	Provinsi NTB	15 Jenis	9,400,000	Provinsi NTB	15 Jenis	11,816,538
1.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	P A D	Provinsi NTB	3270 eksemplar	16,400,000	Provinsi NTB	3270 eksemplar	48,086,102
1.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	P A D	Provinsi NTB	250 Orang	39,000,000	Provinsi NTB	250 Orang	46,287,500
1.06.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Orang	P A D	se-NTB	50 OT	101,094,000	se-NTB	50 OT	189,888,000
1.06.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	P A D	Provinsi NTB	8 Orang	22,675,000	Provinsi NTB	8 Orang	146,143,232
1.06.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	P A D	Provinsi NTB	4 Orang	103,955,000	Provinsi NTB	4 Orang	118,500,000
1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			409,500,000				327,000,000
1.06.01.01.02.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	P A D	Provinsi NTB	16 Unit	80,000,000	Provinsi NTB	16 Unit	85,000,000
1.06.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah alat	P A D	Provinsi NTB	6 Unit	46,050,000	Provinsi NTB	20 Unit	50,000,000
1.06.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah unit	P A D	Provinsi NTB	10 Unit	85,450,000	Provinsi NTB	5 Unit	50,000,000
1.06.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	DAU, P A D	Provinsi NTB	24 Unit	198,000,000	Provinsi NTB	24 Unit	255,000,000
1.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur			171,125,000				58,069,056
1.06.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah orang	P A D	Provinsi NTB	90 orang	171,125,000	Provinsi NTB	24 orang	58,069,056
1.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			140,925,000				21,000,000
1.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Dokumen	875,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	33,000,000
1.06.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	P A D	Provinsi NTB	2 Dokumen	46,650,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	62,000,000
1.06.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	20,975,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	30,000,000
1.06.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	20,775,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	25,000,000
1.06.01.01.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	P A D	Provinsi NTB	2 Dokumen	51,650,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	58,000,000
1.06.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			25,000,000				5,700,000
1.06.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	25,000,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	28,000,000
1.06.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			3,678,380,000				8,095,000,000
1.06.01.01.15.01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah orang	P A D	se-NTB	25 Kegiatan	60,630,000	se-NTB	25 Kegiatan	150,000,000
1.06.01.01.15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah orang	P A D	se-NTB	200 Orang	119,500,000	se-NTB	200 Orang	130,000,000
1.06.01.01.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KK	P A D	se-NTB	250 Orang	1,222,200,000	se-NTB	250 Orang	1,250,000,000

1.06.01.01.15.06	Pemberdayaan fakir miskin	Jumlah KK	P A D	Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Mataram,se-NTB	250 Kelompok	2,114,550,000	Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Mataram,se-NTB	250 Kelompok	6,250,000,000
1.06.01.01.15.07	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KK	P A D	Kab. Sumbawa	200 Lokasi	121,350,000	Kab. Sumbawa	200 Lokasi	260,000,000
1.06.01.01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	40,150,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	55,000,000
1.06.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,740,082,200				980,000,000
1.06.01.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah kasus/korban	P A D	se-NTB	500 Kasus	274,175,000	se-NTB	500 Kasus	310,000,000
1.06.01.01.16.12	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat)	Jumlah anak	P A D	Provinsi NTB	200 anak	30,000,000	Provinsi NTB	200 anak	30,000,000
1.06.01.01.16.13	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	Jumlah orang	P A D	Provinsi NTB	100 orang	30,000,000	Provinsi NTB	100 orang	35,000,000
1.06.01.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah orang	P A D	se-NTB	200 Orang	220,000,000	se-NTB	200 Orang	400,000,000
1.06.01.01.16.15	Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza	Jumlah orang	P A D	se-NTB	200 orang	182,500,000	se-NTB	200 orang	300,000,000
1.06.01.01.16.16	Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah orang	P A D	se-NTB	200 Orang	778,700,000	se-NTB	200 Orang	850,000,000
1.06.01.01.16.29	Pelayanan dan penanganan korban perdagangan orang/trafficking,pekerja migran bermasalah dan orang terlanjar	Jumlah orang	DAU,P A D	se-NTB	300 Orang	224,707,200	se-NTB	350 Orang	350,000,000
1.06.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			696,890,000				2,739,999,451
1.06.01.01.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah DUDI	P A D	Provinsi NTB	35 Orang	33,650,000	Provinsi NTB	35 Orang	59,999,975
1.06.01.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Orang	P A D	se-NTB	100 Orang	177,845,000	se-NTB	100 Orang	410,000,000
1.06.01.01.21.05	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna	P A D	se-NTB	10 Lembaga	85,470,000	se-NTB	10 Lembaga	100,000,000
1.06.01.01.21.06	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah kelompok	P A D	se-NTB	50 kelompok	139,275,000	se-NTB	60 kelompok	1,800,000,000
1.06.01.01.21.07	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah orang	APBD PROV.,P A D	Provinsi NTB	602 Kegiatan	210,550,000	Provinsi NTB	602 Kegiatan	299,999,476
1.06.01.01.21.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	P A D	se-NTB	1 Dokumen	50,100,000	se-NTB	1 Dokumen	70,000,000
1.06.01.01.22	Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			792,705,000				991,999,956
1.06.01.01.22.01	Jaminan Sosial bagi korban bencana alam	Jumlah Orang	P A D	Provinsi NTB	79 Kegiatan	652,950,000	Provinsi NTB	79 Kegiatan	809,999,956
1.06.01.01.22.02	Jaminan sosial bagi korban bencana sosial	Jumlah orang	P A D	Provinsi NTB	100 Kegiatan	37,950,000	Provinsi NTB	100 Kegiatan	90,000,000
1.06.01.01.22.03	Jaminan sosial bagi keluarga	Jumlah KK	P A D	se-NTB	500 Orang	101,805,000	se-NTB	500 Orang	92,000,000
1.06.01.02	Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"				2,587,797,940				2,681,034,955
1.06.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			404,752,940				559,500,000
1.06.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	P A D	Kab. Lombok Barat	300 Surat	2,037,600	Kab. Lombok Barat	300 Surat	2,654,100
1.06.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	67,452,000	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	77,569,800

1.06.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Orang	39,564,000	Kab. Lombok Barat	4 Orang	46,830,300
1.06.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Orang	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Orang	88,085,000	Kab. Lombok Barat	3 Orang	104,304,258
1.06.01.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	7,000,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	8,222,500
1.06.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	25 Jenis	11,242,500	Kab. Lombok Barat	25 Jenis	12,506,475
1.06.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	6,300,000	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	7,273,749
1.06.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	1,821,600	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	87,285
1.06.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Orang	19,325,240	Kab. Lombok Barat	2 Orang	22,224,000
1.06.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Orang	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Orang	103,200,000	Kab. Lombok Barat	4 Orang	106,265,808
1.06.01.02.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	7,125,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	8,222,500
1.06.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Orang	51,600,000	Kab. Lombok Barat	2 Orang	59,400,000
1.06.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			260,500,000				327,000,000
1.06.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	88,000,000	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	96,800,000
1.06.01.02.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah Jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	22,500,000	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	25,410,000
1.06.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Unit	40,000,000	Kab. Lombok Barat	4 Unit	47,078,680
1.06.01.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Unit	110,000,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	121,000,000
1.06.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			13,450,000				21,000,000
1.06.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	6,150,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	7,078,500
1.06.01.02.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	7,300,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	8,107,000
1.06.01.02.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,909,095,000				980,000,000
1.06.01.02.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	20,000,000
1.06.01.02.16.17	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	Jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Barat	100 orang	1,869,095,000	Kab. Lombok Barat	100 orang	1,900,000,000
1.06.01.03	Balai Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"				1,331,183,780				1,409,097,793
1.06.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran			407,251,780				559,500,000
1.06.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kota Mataram	450 surat	3,000,000	Kota Mataram	450 surat	3,415,500
1.06.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	40,200,000	Kota Mataram	3 jenis	48,323,001
1.06.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	4 orang	41,376,000	Kota Mataram	4 orang	47,589,300
1.06.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	5 orang	134,916,600	Kota Mataram	5 orang	167,304,600
1.06.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	5 jenis	5,500,000	Kota Mataram	5 jenis	6,325,000
1.06.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	36 jenis	13,749,900	Kota Mataram	36 jenis	15,812,496
1.06.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	6,544,000	Kota Mataram	3 jenis	7,526,751
1.06.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	10 jenis	7,260,000	Kota Mataram	10 jenis	8,343,940
1.06.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	P A D	Kota Mataram	2 eksemplar	3,300,000	Kota Mataram	2 eksemplar	3,795,000
1.06.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Kota Mataram	5 orang	34,500,000	Kota Mataram	5 orang	47,578,205
1.06.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	0 orang	97,105,280	Kota Mataram	0 orang	0

1.06.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	P A D	Kota Mataram	10 orang	19,800,000	Kota Mataram	10 orang	32,000,000
1.06.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			52,500,000				327,000,000
1.06.01.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	4 jenis	37,500,000	Kota Mataram	4 jenis	50,000,000
1.06.01.03.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah Jenis	P A D	Kota Mataram	1 Jenis	15,000,000	Kota Mataram	1 Jenis	50,000,000
1.06.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			8,350,000				21,000,000
1.06.01.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	P A D	Kota Mataram	1 Dok	8,350,000	Kota Mataram	1 Dok	8,500,000
1.06.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			11,440,000				5,700,000
1.06.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	1 dokumen	11,440,000	Kota Mataram	1 dokumen	12,584,000
1.06.01.03.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			851,642,000				980,000,000
1.06.01.03.16.19	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	40 orang	851,642,000	Kota Mataram	40 orang	900,000,000
1.06.01.04	Balai Sosial Lanjut Usia "Mandalika"				1,992,273,781				2,052,799,938
1.06.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran			488,473,794				559,500,000
1.06.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kota Mataram	300 surat	1,490,000	Kota Mataram	300 surat	4,500,000
1.06.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	99,999,998	Kota Mataram	3 jenis	120,000,000
1.06.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	4 orang	44,482,000	Kota Mataram	4 orang	48,000,000
1.06.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	4 orang	112,691,808	Kota Mataram	4 orang	125,000,000
1.06.01.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	4 unit	6,000,000	Kota Mataram	4 unit	7,000,000
1.06.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	11 Jenis	11,019,992	Kota Mataram	11 Jenis	14,999,996
1.06.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	4,749,998	Kota Mataram	3 jenis	6,000,000
1.06.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	P A D	Kota Mataram	1 eksemplar	1,700,000	Kota Mataram	1 eksemplar	1,800,000
1.06.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Luar Provinsi	4 Orang	22,250,000	Luar Provinsi	4 Orang	33,000,000
1.06.01.04.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	3 orang	99,000,000	Kota Mataram	3 orang	99,999,999
1.06.01.04.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	5,089,998	Kota Mataram	3 jenis	9,000,000
1.06.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	1 orang	80,000,000	Kota Mataram	1 orang	85,000,000
1.06.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			268,499,998				327,000,000
1.06.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	3 unit	60,000,000	Kota Mataram	3 unit	75,000,000
1.06.01.04.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	2 jenis	10,000,000	Kota Mataram	3 jenis	30,000,000
1.06.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	1 Unit	150,000,000	Kota Mataram	1 Unit	100,000,000
1.06.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	6 Unit	48,499,998	Kota Mataram	6 Unit	49,999,998
1.06.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			15,300,000				21,000,000
1.06.01.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	7,500,000	Kota Mataram	1 Dokumen	8,000,000
1.06.01.04.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	7,800,000	Kota Mataram	1 Dokumen	8,000,000
1.06.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			9,999,999				5,700,000
1.06.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	9,999,999	Kota Mataram	1 Dokumen	12,500,000
1.06.01.04.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,209,999,990				980,000,000
1.06.01.04.16.18	Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan Jompo	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	85 Tahun	1,209,999,990	Kota Mataram	85 Tahun	1,214,999,945
1.06.01.05	Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"				2,269,046,600				2,441,523,484
1.06.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran			406,862,600				559,500,000

1.06.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kab. Lombok Barat	300 surat	4,090,000	Kab. Lombok Barat	300 surat	4,719,000
1.06.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	3 jenis	90,040,000	Kab. Lombok Barat	3 jenis	117,744,645
1.06.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Barat	4 orang	40,560,000	Kab. Lombok Barat	4 orang	48,061,200
1.06.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Barat	5 orang	125,274,600	Kab. Lombok Barat	5 orang	138,025,910
1.06.01.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	3 jenis	5,000,000	Kab. Lombok Barat	3 jenis	6,049,998
1.06.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	21 jenis	8,549,000	Kab. Lombok Barat	21 jenis	10,368,477
1.06.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	2 jenis	5,950,000	Kab. Lombok Barat	2 jenis	7,054,300
1.06.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	10 jenis	8,994,000	Kab. Lombok Barat	10 jenis	10,500,000
1.06.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	P A D	Kab. Lombok Barat	1 eksemplar	2,000,000	Kab. Lombok Barat	1 eksemplar	2,450,000
1.06.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Kab. Lombok Barat	11 orang	21,055,000	Kab. Lombok Barat	12 orang	24,300,000
1.06.01.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Barat	2 orang	70,250,000	Kab. Lombok Barat	2 orang	80,000,000
1.06.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	P A D	Kab. Lombok Barat	14 Orang	25,100,000	Kab. Lombok Barat	15 Orang	30,349,995
1.06.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			548,609,000				327,000,000
1.06.01.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Barat	1 unit	16,000,000	Kab. Lombok Barat	1 unit	17,000,000
1.06.01.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	2 jenis	46,450,000	Kab. Lombok Barat	2 jenis	51,500,000
1.06.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Barat	3 unit	54,159,000	Kab. Lombok Barat	3 unit	61,599,999
1.06.01.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit	DAU	Kab. Lombok Barat	1 unit	432,000,000	Kab. Lombok Barat	1 unit	474,500,000
1.06.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			11,700,000				21,000,000
1.06.01.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 dokumen	4,450,000	Kab. Lombok Barat	1 dokumen	5,200,000
1.06.01.05.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 dokumen	7,250,000	Kab. Lombok Barat	1 dokumen	8,500,000
1.06.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			11,875,000				5,700,000
1.06.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 dokumen	11,875,000	Kab. Lombok Barat	1 dokumen	13,600,000
1.06.01.05.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,290,000,000				980,000,000
1.06.01.05.16.05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	30,000,000
1.06.01.05.16.28	Pendidikan dan pelayanan sosial berkelanjutan bagi anak terlantar dalam panti/balai sosial	Jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Barat	45 orang	1,260,000,000	Kab. Lombok Barat	45 orang	1,299,999,960
1.06.01.06	Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "				3,022,269,600				3,576,193,212
1.06.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran			389,641,600				559,500,000
1.06.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kota Mataram	300 surat	1,350,000	Kota Mataram	300 surat	1,633,500
1.06.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	71,000,000	Kota Mataram	3 jenis	85,909,998
1.06.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	4 orang	37,410,000	Kota Mataram	4 orang	44,975,700
1.06.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	3 orang	84,473,960	Kota Mataram	3 orang	102,213,489
1.06.01.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	18,000,000	Kota Mataram	3 jenis	21,780,000
1.06.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	21 jenis	11,395,000	Kota Mataram	21 jenis	13,787,949
1.06.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	8,000,000	Kota Mataram	3 jenis	9,679,998

1.06.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	13 jenis	7,420,000	Kota Mataram	13 jenis	8,978,190
1.06.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	P A D	Kota Mataram	1 eksemplar	2,040,000	Kota Mataram	1 eksemplar	4,468,400
1.06.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	100 orang	4,000,000	Kota Mataram	100 orang	4,840,000
1.06.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Kota Mataram	5 orang	35,150,000	Kota Mataram	5 orang	42,531,500
1.06.01.06.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	2 orang	83,452,640	Kota Mataram	2 orang	100,977,000
1.06.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	P A D	Kota Mataram	15 orang	25,950,000	Kota Mataram	16 orang	31,399,488
1.06.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			948,850,000				327,000,000
1.06.01.06.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	1 jenis	46,650,000	Kota Mataram	1 jenis	50,000,000
1.06.01.06.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	5 unit	8,200,000	Kota Mataram	8 unit	80,000,000
1.06.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	1 unit	38,000,000	Kota Mataram	1 unit	45,980,000
1.06.01.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	1 unit	856,000,000	Kota Mataram	1 unit	1,035,760,000
1.06.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			16,900,000				21,000,000
1.06.01.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	5,200,000	Kota Mataram	1 Dokumen	7,000,000
1.06.01.06.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	1 dokumen	11,700,000	Kota Mataram	1 dokumen	14,278,000
1.06.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			11,700,000				5,700,000
1.06.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	11,700,000	Kota Mataram	1 Dokumen	15,000,000
1.06.01.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,655,178,000				980,000,000
1.06.01.06.16.28	Pendidikan dan pelayanan sosial berkelanjutan bagi anak terlantar dalam panti/balai sosial	Jumlah anak	P A D	Kota Mataram	80 anak	1,655,178,000	Kota Mataram	80 anak	1,855,000,000
1.06.01.07	Balai Sosial Bina Laras "Mutmainnah"				2,302,893,570				2,367,630,044
1.06.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran			116,847,950				559,500,000
1.06.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Surat	2,600,000	Kab. Lombok Tengah	1 Surat	3,460,600
1.06.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 orang	37,524,000	Kab. Lombok Tengah	1 orang	49,944,444
1.06.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 orang	32,674,500	Kab. Lombok Tengah	1 orang	39,400,000
1.06.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 jenis	10,554,450	Kab. Lombok Tengah	1 jenis	12,775,000
1.06.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Tengah	3 Jenis	1,845,000	Kab. Lombok Tengah	3 Jenis	2,400,000
1.06.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 jenis	5,510,000	Kab. Lombok Tengah	1 jenis	6,750,000
1.06.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 eksemplar	2,640,000	Kab. Lombok Tengah	1 eksemplar	3,300,000
1.06.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Luar Provinsi	1 orang	23,500,000	Luar Provinsi	1 orang	28,500,000
1.06.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			509,300,000				327,000,000
1.06.01.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	18,200,000	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	25,000,000
1.06.01.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 unit	50,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 unit	50,000,000
1.06.01.07.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 jenis	10,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 jenis	60,000,000
1.06.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 unit	400,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 unit	50,000,000
1.06.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 unit	31,100,000	Kab. Lombok Tengah	1 unit	40,100,000

1.06.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			14,000,000				21,000,000
1.06.01.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	8,000,000
1.06.01.07.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	9,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	18,000,000
1.06.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			9,436,000				5,700,000
1.06.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	9,436,000	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	20,000,000
1.06.01.07.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,653,309,620				980,000,000
1.06.01.07.16.20	Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar dan pemulihan psikososial bagi orang dengan gangguan jiwa dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya	P A D	Kab. Lombok Tengah	100 Tahun	1,653,309,620	Kab. Lombok Tengah	100 Tahun	1,950,000,000
1.06.01.08	Balai Sosial Bina Karya "Madani"				1,927,270,000				2,864,000,000
1.06.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			71,510,000				559,500,000
1.06.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kab. Lombok Timur	1 surat	1,300,000	Kab. Lombok Timur	1 surat	1,800,000
1.06.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Timur	1 jenis	27,500,000	Kab. Lombok Timur	1 jenis	29,000,000
1.06.01.08.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	DAU	Kab. Lombok Timur	1 unit	7,500,000	Kab. Lombok Timur	1 unit	7,500,000
1.06.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Timur	1 jenis	11,050,000	Kab. Lombok Timur	1 jenis	13,000,000
1.06.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Timur	1 jenis	5,000,000	Kab. Lombok Timur	1 jenis	5,000,000
1.06.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	P A D	Kab. Lombok Timur	1 eksemplar	960,000	Kab. Lombok Timur	1 eksemplar	1,000,000
1.06.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Luar Provinsi	1 Orang	18,200,000	Luar Provinsi	1 Orang	20,000,000
1.06.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			226,700,000				327,000,000
1.06.01.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Unit	20,000,000	Kab. Lombok Timur	2 Unit	50,000,000
1.06.01.08.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Timur	2 Unit	10,000,000	Kab. Lombok Timur	0 Unit	0
1.06.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Timur	1 unit	150,000,000	Kab. Lombok Timur	1 unit	1,000,000,000
1.06.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kab. Lombok Timur	1 unit	46,700,000	Kab. Lombok Timur	1 unit	60,000,000
1.06.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD			17,000,000				21,000,000
1.06.01.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	5,400,000	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	7,000,000
1.06.01.08.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	P A D	Kab. Lombok Timur	2 Dokumen	11,600,000	Kab. Lombok Timur	2 Dokumen	14,000,000
1.06.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD			12,060,000				5,700,000
1.06.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	DAU, P A D	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	12,060,000	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	5,700,000
1.06.01.08.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			1,600,000,000				980,000,000
1.06.01.08.16.19	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	Jumlah KK	P A D	Kab. Lombok Timur	100 Tahun	1,600,000,000	Kab. Lombok Timur	100 Tahun	1,650,000,000
1.06.01.09	Balai Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "				1,788,623,495				1,866,500,000
1.06.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			452,143,495				559,500,000
1.06.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kota Bima	1 surat	1,800,000	Kota Bima	1 surat	2,500,000

1.06.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kota Bima	1 jenis	45,500,000	Kota Bima	1 jenis	60,000,000
1.06.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kota Bima	1 orang	37,596,000	Kota Bima	1 orang	50,000,000
1.06.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Bima	1 orang	62,557,500	Kota Bima	1 orang	80,000,000
1.06.01.09.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	P A D	Kota Bima	1 unit	10,000,000	Kota Bima	1 unit	12,500,000
1.06.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Bima	1 jenis	13,929,995	Kota Bima	1 jenis	18,000,000
1.06.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kota Bima	1 jenis	6,440,000	Kota Bima	1 jenis	11,000,000
1.06.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	P A D	Kota Bima	1 eksemplar	1,920,000	Kota Bima	1 eksemplar	2,500,000
1.06.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Kota Bima	1 orang	22,500,000	Kota Bima	1 orang	33,000,000
1.06.01.09.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	P A D	Kota Bima	1 orang	129,500,000	Kota Bima	1 orang	150,000,000
1.06.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	P A D	Kota Bima	1 orang	62,500,000	Kota Bima	1 orang	75,000,000
1.06.01.09.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah unit	P A D	Kota Bima	1 unit	6,300,000	Kota Bima	1 unit	10,000,000
1.06.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Bima	1 orang	51,600,000	Kota Bima	1 orang	55,000,000
1.06.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur			442,500,000				327,000,000
1.06.01.09.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	P A D	Kota Bima	2 Unit	44,150,000	Kota Bima	2 Unit	50,000,000
1.06.01.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis	P A D	Kota Bima	1 jenis	35,150,000	Kota Bima	1 jenis	40,000,000
1.06.01.09.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah unit	P A D	Kota Bima	1 unit	10,500,000	Kota Bima	1 unit	45,000,000
1.06.01.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	P A D	Kota Bima	1 unit	313,400,000	Kota Bima	1 unit	150,000,000
1.06.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kota Bima	1 unit	39,300,000	Kota Bima	1 unit	42,000,000
1.06.01.09.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			893,980,000				980,000,000
1.06.01.09.16.18	Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan Jompo	Jumlah orang	P A D	Kota Bima	50 orang	893,980,000	Kota Bima	50 orang	980,000,000
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				144,767,534,829				5,880,005,874
2:01	TENAGA KERJA				6,342,107,279				5,880,005,874
2:01:01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				6,342,107,279				5,880,005,874
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)				4,019,391,650				5,880,005,874
2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,092,495,500				350,218,377
2.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang keluar	DAU	Kota Mataram	2000 Surat	1,110,000	Kota Mataram	2100 Surat	2,100,000
2.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	4 Jenis	209,900,000	Kota Mataram	4 Jenis	316,500,000
2.01.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	DAU	Kota Mataram	21 unit	19,360,000	Kota Mataram	21 unit	31,500,000
2.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	8 Orang	78,039,000	Kota Mataram	8 Orang	84,000,000
2.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	22 Orang	549,999,600	Kota Mataram	22 Orang	583,534,800
2.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	60 Jenis	12,622,800	Kota Mataram	60 Jenis	21,000,000
2.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	14 Jenis	8,220,100	Kota Mataram	14 Jenis	21,000,000
2.01.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	22 Jenis	5,944,000	Kota Mataram	22 Jenis	10,500,000
2.01.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah eksemplar	DAU	Kota Mataram	13 Eksemplar	8,400,000	Kota Mataram	13 Eksemplar	26,250,000
2.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	500 Orang	15,000,000	Kota Mataram	525 Orang	31,500,000
2.01.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	3 Orang	123,900,000	Kota Mataram	3 orang	131,250,000
2.01.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	DAU	Kota Mataram	70 OT	60,000,000	Kota Mataram	73 OT	177,297,920
2.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			269,800,000				14,056,000
2.01.01.01.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	6 Unit	92,900,000	Kota Mataram	5 Unit	185,966,150
2.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	DAU	Kota Mataram	2 gedung	52,000,000	Kota Mataram	2 gedung	82,500,000

2.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	DAU	Kota Mataram	21 unit	93,900,000	Kota Mataram	21 unit	165,000,000
2.01.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	21 jenis	31,000,000	Kota Mataram	21 jenis	60,500,000
2.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			72,166,000				6,031,290
2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang yang dibina	DAU	Kota Mataram	5 Orang	52,216,000	Kota Mataram	6 Orang	112,869,126
2.01.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	2 org	19,950,000	Kota Mataram	2 org	62,062,578
2.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			271,490,600				25,290,553
2.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah jenis laporan	DAU	Kota Mataram	3 Jenis	24,509,200	Kota Mataram	3 Jenis	44,775,802
2.01.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis Laporan	DAU	Kota Mataram	1 Jenis	3,334,500	Kota Mataram	1 Jenis	21,250,000
2.01.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah jenis rencana kerja	DAU	Kota Mataram	4 jenis	30,819,100	Kota Mataram	4 jenis	77,000,000
2.01.01.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	jumlah jenis media KIE	DAU	Kota Mataram	6 jenis	212,827,800	Kota Mataram	6 jenis	225,816,246
2.01.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			25,721,900				23,234,580
2.01.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah jenis laporan	DAU	Kota Mataram	12 OB	25,721,900	Kota Mataram	12 OB	36,669,156
2.01.01.01.08	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan			356,574,000				823,098,000
2.01.01.01.08.05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah orang trip	DAU	Kota Mataram	22 OT	4,353,000	Kota Mataram	22 OT	93,139,684
2.01.01.01.08.11	Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	50 orang	62,278,000	Kota Mataram	50 orang	126,875,000
2.01.01.01.08.12	Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Jumlah orang trip	DAU	Kota Mataram	70 OT	53,478,000	Kota Mataram	70 OT	126,198,715
2.01.01.01.08.13	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah buku PTKD	DAU	Kota Mataram	25 Eksemplar	87,328,000	Kota Mataram	25 Eksemplar	138,649,601
2.01.01.01.08.14	Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan	Jumlah buku data	DAU	Kota Mataram	50 eksemplar	19,828,000	Kota Mataram	50 eksemplar	50,750,000
2.01.01.01.08.15	Penyusunan buku data perkembangan dan kesejahteraan transmigran di UPT Bina	Jumlah buku data	DAU	Kota Mataram	50 eksemplar	13,278,000	Kota Mataram	49 eksemplar	49,735,000
2.01.01.01.08.17	Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembug Ketenagakerjaan)	Jumlah peserta	DAU	Kota Mataram	80 orang	40,153,000	Kota Mataram	80 orang	110,875,000
2.01.01.01.08.18	Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Jumlah laporan IPK	DAU	Kota Mataram	50 eksemplar	75,878,000	Kota Mataram	50 eksemplar	126,875,000
2.01.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			325,797,400				486,933,800
2.01.01.01.15.02	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA)	Jumlah LPK yang terakreditasi	DAU	Provinsi NTB	45 LPK	104,714,700	Provinsi NTB	40 LPK	71,999,999
2.01.01.01.15.07	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	jumlah lembaga yang dibina	DAU	Provinsi NTB	1 lembaga	21,461,700	Provinsi NTB	1 lembaga	45,000,000
2.01.01.01.15.08	Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	30 Orang	132,525,600	Kota Mataram	30 Orang	200,000,000
2.01.01.01.15.13	Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	100 Orang	36,594,900	Kota Mataram	100 Orang	66,466,900
2.01.01.01.15.25	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	jumlah dokumen hasil identifikasi	DAU	Kota Mataram	1 dokumen	30,500,500	Kota Mataram	1 dokumen	32,000,000
2.01.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja			141,554,950				32,276,100
2.01.01.01.17.10	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	jumlah lembaga tripartit	DAU	Provinsi NTB	10 Lembaga	30,654,800	Provinsi NTB	10 Lembaga	36,000,000
2.01.01.01.17.11	Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	100 Orang	45,670,000	Kota Mataram	100 Orang	60,000,000
2.01.01.01.17.12	Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	dokumen UMP/UMK	DAU	Provinsi NTB	11 UMP/UMK	43,804,150	Provinsi NTB	11 UMP/UMK	69,000,000
2.01.01.01.17.13	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	jumlah perusahaan yang dibina	DAU	Kab. Lombok Tengah,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	35 Perusahaan	21,426,000	Kab. Lombok Tengah,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	35 Perusahaan	59,199,980
2.01.01.01.18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan			77,389,800				137,603,000
2.01.01.01.18.01	Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang	jumlah perusahaan	DAU	Provinsi NTB	10 Perusahaan	19,372,000	Provinsi NTB	10 Perusahaan	37,857,326

2.01.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	jumlah perusahaan	DAU	Provinsi NTB	15 Perusahaan	30,372,400	Provinsi NTB	20 Perusahaan	35,823,720
2.01.01.01.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	jumlah perusahaan	DAU	Provinsi NTB	15 Perusahaan	27,645,400	Provinsi NTB	15 Perusahaan	47,887,326
2.01.01.01.19	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			1,386,401,500				1,784,830,845
2.01.01.01.19.04	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Jumlah Orang	DAU	Kab. Sumbawa,Kota Mataram	2500 Orang	538,332,900	Kab. Sumbawa,Kota Mataram	2500 orang	542,743,400
2.01.01.01.19.06	Layanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	20000 Orang	199,288,200	Kota Mataram	21500 Orang	349,702,445
2.01.01.01.19.10	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	50 Orang	36,134,000	Kota Mataram	60 Orang	60,000,000
2.01.01.01.19.18	Padat Karya Produktif	Jumlah Orang	DAU	Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kota Bima,Kota Mataram	74 Orang	131,350,300	Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kota Bima,Kota Mataram	74 Orang	162,000,000
2.01.01.01.19.20	Informasi Pasar Kerja (Job Fair)	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	4000 Orang	131,141,900	Kota Mataram	4000 Orang	153,000,000
2.01.01.01.19.22	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Orang	DAU	Kab. Lombok Timur,Kota Bima,Kota Mataram	60 Orang	157,985,200	Kab. Lombok Timur,Kota Bima,Kota Mataram	60 orang	230,385,000
2.01.01.01.19.23	Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	30 Orang	37,043,700	Kota Mataram	30 Orang	50,000,000
2.01.01.01.19.24	Padat Karya Infrastruktur	Jumlah orang	DAU	Kab. Lombok Timur,Kota Bima,Kota Mataram	74 Orang	118,046,300	Kab. Lombok Timur,Kota Bima,Kota Mataram	74 Orang	162,000,000
2.01.01.01.19.25	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ex TKI purna	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	45 orang	37,079,000	Kota Mataram	45 Orang	75,000,000
2.01.01.03	Balai Latihan Kerja NTB				1,347,068,657				1,462,610,815
2.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			692,010,483				350,218,377
2.01.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	P A D	Kota Mataram	300 Surat	1,800,000	Kota Mataram	300 Surat	2,499,900
2.01.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa	P A D	Kota Mataram	6 jenis	111,000,000	Kota Mataram	6 jenis	120,000,000
2.01.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	P A D	Kota Mataram	10 Unit	70,893,550	Kota Mataram	10 Unit	83,000,000
2.01.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	4 Orang	46,635,400	Kota Mataram	4 Orang	62,876,000
2.01.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orang	P A D	Kota Mataram	13 Orang	331,850,758	Kota Mataram	13 Orang	349,651,159
2.01.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	35 jenis	7,081,310	Kota Mataram	35 jenis	9,999,990
2.01.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah eksemplar	P A D	Kota Mataram	20 Eksampler	6,984,000	Kota Mataram	20 Eksampler	8,034,000
2.01.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	75 jenis	6,872,225	Kota Mataram	80 jenis	12,000,000
2.01.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah eksemplar	P A D	Kota Mataram	12 eksemplar	4,480,000	Kota Mataram	12 eksemplar	7,200,000
2.01.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	P A D	Kota Mataram	500 Orang	22,500,000	Kota Mataram	400 Orang	25,000,000
2.01.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	P A D	Luar Provinsi	9 OT	61,913,240	Luar Provinsi	7 OT	49,000,000
2.01.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah orang trip	P A D	se-NTB	40 OT	20,000,000	se-NTB	40 OT	38,000,000
2.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			157,381,438				14,056,000
2.01.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	P A D	Kota Mataram	2 Gedung	40,381,438	Kota Mataram	3 Gedung	53,000,001
2.01.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	40 jenis	42,000,000	Kota Mataram	45 jenis	86,340,645
2.01.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	P A D	Kota Mataram	1 Gedung	75,000,000	Kota Mataram	0 Gedung	0
2.01.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			5,665,000				6,031,290

2.01.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang	P A D	Kota Mataram	2 Orang	5,665,000	Kota Mataram	2 Orang	6,031,290
2.01.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24,219,762				25,290,553
2.01.01.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah jenis laporan	P A D	Kota Mataram	5 jenis	7,985,000	Kota Mataram	5 jenis	10,500,000
2.01.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah jenis rencana kerja	P A D	Kota Mataram	10 jenis	16,234,762	Kota Mataram	10 jenis	28,709,450
2.01.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			19,315,074				23,234,580
2.01.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah jenis laporan	P A D	Kota Mataram	12 OB	19,315,074	Kota Mataram	12 OB	23,834,580
2.01.01.03.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			448,476,900				486,933,800
2.01.01.03.15.03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	jumlah unit	DBH-CHT	Kota Mataram	20 unit	227,361,600	Kota Mataram	25 unit	230,933,800
2.01.01.03.15.12	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	jumlah orang yang dilatih berbasis kompetensi	DBH-CHT	Kota Mataram	2 orang	197,158,900	Kota Mataram	2 orang	220,000,000
2.01.01.03.15.18	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah orang trip	P A D	Kota Mataram	5 OT	23,956,400	Kota Mataram	5 OT	36,000,000
2.01.01.06	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok				499,824,370				617,237,522
2.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			295,216,920				350,218,377
2.01.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang keluar	DAU	Provinsi NTB	500 surat	750,000	Provinsi NTB	500 surat	1,350,000
2.01.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	36,000,000	Provinsi NTB	3 jenis	37,500,000
2.01.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	6 jenis	15,820,000	Provinsi NTB	6 jenis	21,000,000
2.01.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	3 orang	30,625,000	Provinsi NTB	3 orang	32,138,000
2.01.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	4 orang	100,871,280	Provinsi NTB	4 orang	101,111,280
2.01.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	20 jenis	5,848,000	Provinsi NTB	25 jenis	11,250,000
2.01.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	3,000,000	Provinsi NTB	2 jenis	7,000,000
2.01.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	10 jenis	1,500,000	Provinsi NTB	10 jenis	1,500,000
2.01.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	DAU	Provinsi NTB	12 eksemplar	1,200,000	Provinsi NTB	12 eksemplar	1,440,000
2.01.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	30 orang	3,300,000	Provinsi NTB	30 orang	6,000,000
2.01.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah orang trip	DAU	Luar Provinsi	6 OT	28,000,000	Luar Provinsi	7 OT	52,500,000
2.01.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah orang trip	DAU	se-NTB	30 OT	20,000,000	se-NTB	30 OT	45,000,000
2.01.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	2 orang	48,302,640	Provinsi NTB	2 orang	48,302,640
2.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			43,500,000				14,056,000
2.01.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	5 jenis	43,500,000	Provinsi NTB	5 jenis	45,000,000
2.01.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,578,500				25,290,553
2.01.01.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 laporan	6,578,500	Provinsi NTB	1 laporan	9,000,000
2.01.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			10,448,950				23,234,580
2.01.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jenis Laporan	DAU	Provinsi NTB	12 OB	10,448,950	Provinsi NTB	12 OB	11,599,992
2.01.01.06.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja			30,000,000				32,276,100
2.01.01.06.17.09	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	30 orang	30,000,000	Provinsi NTB	30 orang	30,000,000
2.01.01.06.18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan			114,080,000				137,603,000
2.01.01.06.18.06	Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	jumlah perusahaan	DAU	Provinsi NTB	22 perusahaan	28,039,000	Provinsi NTB	22 perusahaan	35,000,000
2.01.01.06.18.07	Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan	jumlah perusahaan	DAU	Provinsi NTB	22 perusahaan	25,969,000	Provinsi NTB	22 perusahaan	35,000,000
2.01.01.06.18.10	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	Jumlah kasus	DAU	Provinsi NTB	20 kasus	25,106,000	Provinsi NTB	20 kasus	31,000,000

2.01.01.06.18.11	Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan	Jumlah orang trip	DAU	Luar Provinsi	3 OT	13,083,500	Luar Provinsi	4 OT	30,000,000
2.01.01.06.18.18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	1 OT	21,882,500	Provinsi NTB	30 OT	24,545,610
2.01.01.07	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa				475,822,602				582,678,610
2.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			271,735,001				350,218,377
2.01.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar	DAU	Kab. Sumbawa	192 surat	2,875,000	Kab. Sumbawa	192 surat	3,875,000
2.01.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa	DAU	Kab. Sumbawa	3 jenis	24,999,999	Kab. Sumbawa	3 jenis	25,000,000
2.01.01.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan	DAU	Kab. Sumbawa	6 unit	46,676,002	Kab. Sumbawa	6 unit	48,676,000
2.01.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah orang	DAU	Kab. Sumbawa	2 orang	17,434,500	Kab. Sumbawa	2 orang	19,739,500
2.01.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orang	DAU	Kab. Sumbawa	3 orang	99,818,500	Kab. Sumbawa	3 orang	100,822,800
2.01.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	DAU	Kab. Sumbawa	36 jenis	7,166,000	Kab. Sumbawa	36 jenis	11,147,152
2.01.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis	DAU	Kab. Sumbawa	5 jenis	5,325,000	Kab. Sumbawa	5 jenis	8,125,000
2.01.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah eksemplar	DAU	Kab. Sumbawa	1 eksemplar	1,440,000	Kab. Sumbawa	1 eksemplar	2,447,000
2.01.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	DAU	Kab. Sumbawa	400 orang	6,000,000	Kab. Sumbawa	400 orang	10,000,000
2.01.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	DAU	Kab. Sumbawa	7 OT	30,000,000	Kab. Sumbawa	7 OT	59,279,425
2.01.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	DAU	Kab. Sumbawa	13 OT	30,000,000	Kab. Sumbawa	13 OT	61,106,500
2.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			14,056,000				14,056,000
2.01.01.07.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	3 jenis	4,056,000	Kab. Sumbawa	3 jenis	4,056,000
2.01.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis pemeliharaan	DAU	Kab. Sumbawa	4 jenis	10,000,000	Kab. Sumbawa	4 jenis	10,000,000
2.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20,245,700				25,290,553
2.01.01.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah jenis laporan	DAU	Kab. Sumbawa	1 laporan	6,824,000	Kab. Sumbawa	1 laporan	7,722,000
2.01.01.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan	DAU	Kab. Sumbawa	1 laporan	3,636,700	Kab. Sumbawa	1 laporan	3,936,700
2.01.01.07.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis rencana kerja	DAU	Kab. Sumbawa	1 laporan	9,785,000	Kab. Sumbawa	1 laporan	13,631,853
2.01.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20,814,000				23,234,580
2.01.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah laporan	DAU	Kab. Sumbawa	12 OB	20,814,000	Kab. Sumbawa	12 OB	23,234,580
2.01.01.07.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja			15,289,900				32,276,100
2.01.01.07.17.09	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	jumlah orang	DAU	Kab. Sumbawa	300 Orang	15,289,900	Kab. Sumbawa	300 Orang	32,276,100
2.01.01.07.18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan			133,682,001				137,603,000
2.01.01.07.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	jumlah perusahaan	DAU	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	24,100,000	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	27,000,000
2.01.01.07.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	jumlah perusahaan	DAU	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	24,979,001	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	25,300,000
2.01.01.07.18.14	Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau sumbawa	jumlah perusahaan	DAU	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	15,244,200	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	15,544,200

2.01.01.07.18.15	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa	jumlah perusahaan	DAU	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	15,144,200	Kab. Sumbawa	20 Perusahaan	15,144,200
2.01.01.07.18.16	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	jumlah kasus	DAU	Kab. Sumbawa	1 kasus	18,816,300	Kab. Sumbawa	1 kasus	19,216,300
2.01.01.07.18.18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah orang trip	DAU	Kab. Sumbawa	1 OT	35,398,300	Kab. Sumbawa	1 OT	35,398,300
2:02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,968,517,439				6,188,078,433
2:02:01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3,968,517,439				6,188,078,433
2.02.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3,968,517,439				6,188,078,433
2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			742,803,239				989,406,368
2.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	DAU	Provinsi NTB	1000 surat	910,000	Provinsi NTB	1000 surat	1,750,000
2.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa	DAU	Provinsi NTB	3 jenis	107,870,001	Provinsi NTB	3 jenis	94,050,000
2.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	96 orang	80,715,000	Provinsi NTB	96 orang	109,185,504
2.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	132 orang	246,472,240	Provinsi NTB	132 orang	362,862,324
2.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	50 jenis	10,846,000	Provinsi NTB	50 jenis	18,980,500
2.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	20 jenis	7,490,000	Provinsi NTB	20 jenis	28,724,700
2.02.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	12 jenis	127,599,998	Provinsi NTB	12 jenis	182,485,992
2.02.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksemplar	DAU	Provinsi NTB	100 eksemplar	8,400,000	Provinsi NTB	100 eksemplar	21,847,700
2.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	483 orang	10,500,000	Provinsi NTB	355 orang	17,750,000
2.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	DAU	Luar Provinsi	12 OT	70,000,000	Luar Provinsi	8 OT	52,000,000
2.02.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	14 orang	39,000,000	Provinsi NTB	14 orang	52,503,248
2.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	DAU	se-NTB	11 OT	30,000,000	se-NTB	13 OT	39,650,000
2.02.01.01.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	57 jenis	3,000,000	Provinsi NTB	66 jenis	7,616,400
2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			292,504,200				432,543,155
2.02.01.01.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	10 jenis	35,704,200	Provinsi NTB	15 jenis	159,616,245
2.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	DAU	Provinsi NTB	1 gedung	50,000,000	Provinsi NTB	1 gedung	57,500,000
2.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan	DAU	Provinsi NTB	27 unit	189,000,000	Provinsi NTB	27 unit	195,627,690
2.02.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	10 jenis	17,800,000	Provinsi NTB	10 jenis	19,799,220
2.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25,000,000				35,249,940
2.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	684 orang	25,000,000	Provinsi NTB	684 orang	35,249,940
2.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Pelaporan			66,375,000				268,293,509
2.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 laporan	11,075,000	Provinsi NTB	1 laporan	34,857,051
2.02.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	9,100,000	Provinsi NTB	1 jenis	13,959,914
2.02.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis laporan rencana kerja yang disusun	DAU	Provinsi NTB	4 laporan	38,600,000	Provinsi NTB	4 laporan	208,220,352
2.02.01.01.06.06	Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	7,600,000	Provinsi NTB	1 jenis	11,256,192
2.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			19,700,000				24,719,959
2.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	19,700,000	Provinsi NTB	1 jenis	24,719,959
2.02.01.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG			135,250,000				234,401,794

2.02.01.01.15.05	Penguatan Kelembagaan PUG	Dokumen PPRG	DAU	Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB	1 dokumen	135,250,000	Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB	1 dokumen	234,401,794
2.02.01.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA			1,270,450,000				2,040,531,135
2.02.01.01.16.05	Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota	Jumlah kab/kota yang diadvokasi	DAU	se-NTB	3 kab/kota	84,675,000	se-NTB	3 kab/kota	120,276,000
2.02.01.01.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	40,000,000	Provinsi NTB	1 dokumen	108,243,000
2.02.01.01.16.10	Temu / Forum Anak Prov. NTB	Jumlah anak yang terseleksi	DAU	Provinsi NTB	1400 orang	138,450,000	Provinsi NTB	1400 orang	210,000,000
2.02.01.01.16.11	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	JUmlah lembaga yang dibina	DAU	Provinsi NTB	5 lembaga	100,000,000	Provinsi NTB	6 lembaga	300,000,000
2.02.01.01.16.13	Precegaahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah peserta sosialisasi	DAU	se-NTB	150 Orang	73,600,000	se-NTB	175 Orang	95,331,075
2.02.01.01.16.15	Pendampingan Korban Kekerasan	Jumlah Tenaga pendamping yang dilatih	DAU	Provinsi NTB	250 orang	276,975,000	Provinsi NTB	250 orang	293,593,500
2.02.01.01.16.17	Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi	DAU	se-NTB	1000 siswa	109,725,000	se-NTB	1000 siswa	180,970,000
2.02.01.01.16.18	Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB	LPA yang mandiri	DAU	Provinsi NTB	1 LPA	179,550,000	Provinsi NTB	1 LPA	205,693,000
2.02.01.01.16.19	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah peserta rakor	DAU	Provinsi NTB	80 orang	102,200,000	Provinsi NTB	80 orang	276,424,560
2.02.01.01.16.23	Peningkatan kapasitas Mantan TKW	Jumlah perempuan korban TPPO yang dilatih	DAU	Kab. Sumbawa, se-NTB	100 orang	165,275,000	Kab. Sumbawa, se-NTB	125 orang	250,000,000
2.02.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan			487,460,000				1,041,581,953
2.02.01.01.17.08	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	jumlah korban yang ditangani	DAU	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB	63 orang	93,150,000	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB	63 orang	394,656,381
2.02.01.01.17.10	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah aktivis PATBM yang dibentuk	DAU	se-NTB	81 orang	179,810,000	se-NTB	81 orang	323,257,878
2.02.01.01.17.11	Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah sarana prasarana yang disewa untuk korban KTP/KTA	DAU	Provinsi NTB	1 unit	214,500,000	Provinsi NTB	1 unit	323,667,694
2.02.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja			928,975,000				1,121,350,620
2.02.01.01.18.04	Manajemen usaha bagi perempuan	jumlah perempuan yang dibentuk	DAU	Kab. Dompu, se-NTB	60 orang	75,300,000	Kab. Dompu, se-NTB	60 orang	101,942,460
2.02.01.01.18.07	Temu PUSPA Daerah	Jumlah peserta	DAU	se-NTB	60 orang	59,225,000	se-NTB	60 orang	119,094,240
2.02.01.01.18.13	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Jumlah motivator ketahanan keluarga yang dibentuk	DAU	se-NTB	1440 orang	794,450,000	se-NTB	1440 orang	900,313,920
2:03	PANGAN				7,534,349,739				6,996,641,490
2:03:01	Dinas Ketahanan Pangan				7,534,349,739				6,996,641,490
2.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan (Induk)				6,857,033,924				6,996,641,490
2.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			651,467,065				217,635,291
2.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	DAU	Provinsi NTB	1500 SURAT	9,690,000	Provinsi NTB	1500 SURAT	10,317,000
2.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	143,064,605	Provinsi NTB	1 TAHUN	152,321,000
2.03.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Sarana Publikasi	DAU	Provinsi NTB	4 JENIS	13,250,000	Provinsi NTB	4 JENIS	14,107,000
2.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	66,628,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	70,939,000
2.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	4 ORANG	96,855,000	Provinsi NTB	4 ORANG	103,122,000
2.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	8,752,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	9,318,000
2.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	7,750,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	8,251,000

2.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik dan penerangan	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	6,639,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	7,069,000
2.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	10 UNIT	73,670,500	Provinsi NTB	10 UNIT	78,501,000
2.03.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Jenis bahan bacaan	DAU	Provinsi NTB	5 JENIS	32,000,000	Provinsi NTB	5 JENIS	34,070,000
2.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	10,250,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	10,913,000
2.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dan daerah	DAU	Provinsi NTB	10 KALI	100,964,000	Provinsi NTB	10 KALI	107,498,000
2.03.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	72,703,960	Provinsi NTB	1 TAHUN	77,406,000
2.03.01.01.01.25	Pengelola Kearsipan	Jumlah arsip Kantor	DAU	Provinsi NTB	1000 LEMBAR	9,250,000	Provinsi NTB	1000 LEMBAR	9,849,000
2.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			184,566,996				4,500,000
2.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas (44 UNIT)	DAU	Provinsi NTB	44 unit	163,066,996	Provinsi NTB	1 TAHUN	172,627,000
2.03.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit peralatan kerja (26 UNIT)	DAU	Provinsi NTB	26 unit	21,500,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	34,696,000
2.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,380,000				24,001,486
2.03.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	1 TAHUN	21,380,000	Provinsi NTB	1 TAHUN	24,001,486
2.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			315,606,000				338,541,000
2.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	2 DOKUMEN	47,625,000	Provinsi NTB	2 DOKUMEN	50,900,000
2.03.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 LAPORAN	50,000,000	Provinsi NTB	1 LAPORAN	51,500,000
2.03.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	152,000,000	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	155,499,000
2.03.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	25,381,000	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	31,351,000
2.03.01.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Publikasi	DAU	Provinsi NTB	1 JENIS	40,600,000	Provinsi NTB	1 JENIS	49,291,000
2.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			39,526,000				9,000,198
2.03.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	39,526,000	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	24,002,000
2.03.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			5,476,384,400				263,165,000
2.03.01.01.16.09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah KRPL	DAU	se-NTB	54 KRPL	2,997,100,000	se-NTB	54 KRPL	3,000,000,000
2.03.01.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	DAU	Provinsi NTB	10 TON	138,548,500	Provinsi NTB	10 TON	138,607,000
2.03.01.01.16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri yang dikembangkan	DAU	se-NTB	10 DESA	1,193,553,000	se-NTB	10 DESA	1,200,000,000
2.03.01.01.16.18	Pengembangan Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang terbangun/Stok Cadangan Pangan Masyarakat	DAU	se-NTB	10 TON/UNIT	146,459,000	se-NTB	10 TON/UNIT	150,000,000
2.03.01.01.16.32	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	48,850,000	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	48,850,000
2.03.01.01.16.33	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	50,775,000	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	59,362,000
2.03.01.01.16.34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	12 DOKUMEN	149,415,000	Provinsi NTB	12 DOKUMEN	150,000,000
2.03.01.01.16.36	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	20 ORANG	45,000,000	Provinsi NTB	20 ORANG	45,000,000
2.03.01.01.16.37	Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	46 ORANG	175,369,000	Provinsi NTB	46 ORANG	189,169,000
2.03.01.01.16.38	Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan	Jumlah Komoditas yang dipantau	DAU	se-NTB	18 KMODITAS	59,999,500	se-NTB	18 KMODITAS	60,000,000
2.03.01.01.16.39	Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah Orang	DAU	se-NTB	2700 ORANG	193,612,500	se-NTB	2700 ORANG	193,613,004
2.03.01.01.16.40	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah LDPM yang dibina	DAU	se-NTB	52 LDPM	31,162,950	se-NTB	52 LDPM	35,000,000

2.03.01.01.16.42	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah komoditi yang diawasi	DAU	se-NTB	15 KOMODITAS	60,949,950	se-NTB	KOMODITAS ¹⁵	60,950,000
2.03.01.01.16.43	Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Jumlah Komoditas dipantau	DAU	se-NTB	14 KOMODITAS	70,000,000	se-NTB	KOMODITAS ¹⁴	70,000,000
2.03.01.01.16.45	Prognosa Ketersediaan Pangan	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	35,152,500	Provinsi NTB	DOKUMEN ¹	45,000,000
2.03.01.01.16.52	Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	25 ORANG	45,437,500	Provinsi NTB	25 ORANG	50,438,000
2.03.01.01.16.56	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	35,000,000	Provinsi NTB	DOKUMEN ¹	45,000,000
2.03.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan			168,103,463				168,104,000
2.03.01.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Jumlah Event Pameran	DAU	Provinsi NTB	5 EVENT	168,103,463	Provinsi NTB	5 EVENT	168,104,000
2.03.01.02	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan				677,315,815				494,300,489
2.03.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			231,244,856				217,635,291
2.03.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	DAU	Provinsi NTB	100 SURAT	3,704,000	Provinsi NTB	100 SURAT	3,944,000
2.03.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	DAU	Provinsi NTB	3 JENIS	67,960,000	Provinsi NTB	3 JENIS	72,367,000
2.03.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	DAU	Provinsi NTB	3 ORANG	16,694,500	Provinsi NTB	3 ORANG	17,776,000
2.03.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	2 ORANG	51,679,996	Provinsi NTB	2 ORANG	55,024,000
2.03.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	12 JENIS	2,661,000	Provinsi NTB	12 JENIS	2,833,000
2.03.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	2 UNIT	14,389,000	Provinsi NTB	2 UNIT	15,220,000
2.03.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	DAU	Provinsi NTB	3 ORANG	74,156,360	Provinsi NTB	3 ORANG	50,471,291
2.03.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			39,021,500				4,500,000
2.03.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor	DAU	Provinsi NTB	1 UNIT	20,000,000	Provinsi NTB	0 UNIT	0
2.03.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	3 UNIT	14,804,000	Provinsi NTB	0 UNIT	0
2.03.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	10 UNIT	4,217,500	Provinsi NTB	10 UNIT	4,500,000
2.03.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,411,959				9,000,198
2.03.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	9,411,959	Provinsi NTB	DOKUMEN ¹	9,000,198
2.03.01.02.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			397,637,500				263,165,000
2.03.01.02.16.35	Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar	Jumlah Komoditi tersertifikasi	DAU	se-NTB	15 KOMODITAS	142,485,500	se-NTB	KOMODITAS ¹⁵	150,000,000
2.03.01.02.16.46	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar	Jumlah komoditas pangan yang diawasi	DAU	se-NTB	30 KOMODITAS	113,165,000	se-NTB	KOMODITAS ³⁰	113,165,000
2.03.01.02.16.58	Temu Teknis Keamanan Pangan	Jumlah Pelaku Usaha	DAU	Provinsi NTB	30 ORANG	48,000,000	Provinsi NTB	30 ORANG	0
2.03.01.02.16.59	Pelatihan GHP/GMP	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	30 ORANG	43,992,500	Provinsi NTB	0 ORANG	0
2.03.01.02.16.60	Penyusunan Peta Potensi Lahan PSAT	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 DOKUMEN	49,994,500	Provinsi NTB	DOKUMEN ⁰	0
2:04	PERTANAHAN				192,583,000				630,000,000
2:04:01	Sekretariat Daerah				192,583,000				630,000,000
2.04.01.04	Biro Pemerintahan				192,583,000				630,000,000
2.04.01.04.19	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi			192,583,000				630,000,000
2.04.01.04.19.01	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pertanahan	frekuensi monev administrasi pertanahan yang dilakukan	P A D	se-NTB	20 kali	44,333,000	se-NTB	20 kali	150,000,000

2.04.01.04.19.02	Penyelesaian konflik pertanahan dan tanah bermasalah	jumlah kasus pertanahan yang difasilitasi	P A D	se-NTB	5 kasus	66,270,000	se-NTB	5 kasus	260,000,000
2.04.01.04.19.18	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Terlarang	Frekuensi upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	P A D	se-NTB	25 kali	81,980,000	se-NTB	25 kali	220,000,000
2:05 LINGKUNGAN HIDUP					20,329,972,554				12,637,042,784
2:05:01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				20,329,972,554				12,637,042,784
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)				11,859,363,232				12,637,042,784
2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,340,262,830				342,214,087
2.05.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti	DAU	Provinsi NTB	1500 Lembar	8,091,000	Provinsi NTB	1500 Lembar	8,613,000
2.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Provinsi NTB	3 Rekening	139,621,000	Provinsi NTB	3 Rekening	148,839,391
2.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Provinsi NTB	11 Orang	184,766,800	Provinsi NTB	11 Orang	196,713,667
2.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	9 Orang	236,400,880	Provinsi NTB	8 Orang	212,309,990
2.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Provinsi NTB	49 Jenis	11,675,700	Provinsi NTB	49 Jenis	12,431,917
2.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	11,366,800	Provinsi NTB	4 Jenis	12,101,778
2.05.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Provinsi NTB	10 Jenis	5,650,000	Provinsi NTB	10 Jenis	6,015,954
2.05.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	4,190,000	Provinsi NTB	2 Jenis	4,461,178
2.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Provinsi NTB	900 OH	43,650,000	Provinsi NTB	900 OH	46,476,216
2.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	24 OT	122,929,000	Luar Provinsi	24 OT	130,877,568
2.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Provinsi NTB	72 OT	125,780,200	Provinsi NTB	72 OT	133,913,116
2.05.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	8 Orang	194,219,160	Provinsi NTB	8 Orang	195,757,362
2.05.01.01.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	Tenaga pendukung kegiatan dinas tersedia	DAU	Provinsi NTB	11 Orang	251,922,290	Provinsi NTB	11 Orang	261,138,399
2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			309,995,630				532,904,125
2.05.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	23 Buah	54,649,200	Provinsi NTB	23 Buah	58,186,967
2.05.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah Sapras pendukung operasional yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	4 Unit	21,257,430	Provinsi NTB	4 Unit	22,631,897
2.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	95 Unit	220,400,000	Provinsi NTB	95 Unit	234,652,002
2.05.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	66 Unit	13,689,000	Provinsi NTB	66 Unit	14,574,762
2.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			246,570,400				65,631,312
2.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Provinsi NTB	48 Kali	31,180,000	Provinsi NTB	48 Kali	33,201,263
2.05.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah Aparatur mengikuti diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan	DAU	Provinsi NTB	20 Orang	152,847,600	Provinsi NTB	20 Orang	162,730,526
2.05.01.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Dokumen Anjab pegawai Dinas LHK yang tersusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	29,692,800	Provinsi NTB	1 Dokumen	31,612,809
2.05.01.01.05.12	Peningkatan kapasitas fungsional	Penilaian angka kredit pegawai jabatan fungsional yang terlaksana	DAU	Provinsi NTB	4 Jafung	32,850,000	Provinsi NTB	4 Jafung	34,980,651
2.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			358,965,900				95,959,245
2.05.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	20,947,600	Provinsi NTB	1 Dokumen	23,961,611

2.05.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Provinsi NTB	3 Dokumen	221,413,200	Provinsi NTB	3 Dokumen	235,729,532
2.05.01.01.06.12	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang akuntabel	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	39,014,200	Provinsi NTB	1 Dokumen	41,537,884
2.05.01.01.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah dokumen statistik SKPD yang aktual	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	77,590,900	Provinsi NTB	1 Dokumen	82,607,952
2.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			116,372,700				30,876,377
2.05.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	75,982,900	Provinsi NTB	1 Dokumen	80,903,824
2.05.01.01.07.02	Pengelolaan PAD sektor lingkungan hidup dan kehutanan	Jumah sumber PAD sektor lingkungan hidup dan kehutanan	DAU	Provinsi NTB	1 Lokasi	40,389,800	Provinsi NTB	1 Lokasi	43,001,683
2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah			8,216,993,872				6,096,745,209
2.05.01.01.15.08	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah unit usaha pengelolaan sampah yang terbentuk	DAU	Provinsi NTB	2 Unit	1,423,960,000	Provinsi NTB	2 Unit	1,516,034,014
2.05.01.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	DAU	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Bima,Kota Mataram,Provin si NTB	100 Unit	6,793,033,872	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kota Bima,Kota Mataram,Provin si NTB	100 Unit	7,232,365,724
2.05.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya			1,270,201,900				621,056,084
2.05.01.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah kab/kota yang diukur baku mutu udara dan airnya	DAU	Kab. Dompu,Kota Bima,Kota Mataram,se-NTB	10 Kab/ Kota	257,698,000	Kab. Dompu,Kota Bima,Kota Mataram,se-NTB	10 Kab/ Kota	289,295,371
2.05.01.01.16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertera dalam dokumen lingkungan	DAU	Kota Mataram,se-NTB	10 Usaha/ Kegiatan	209,354,000	Kota Mataram,se-NTB	10 Usaha/ Kegiatan	122,763,225
2.05.01.01.16.17	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah kabupaten/ kota yang terinventarisasi mempunyai kerusakan lahan dan pesisir	DAU	Kota Bima,se-NTB	10 Kab/ Kota	258,904,000	Kota Bima,se-NTB	10 Kab/ Kota	515,172,034
2.05.01.01.16.19	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	DAU	se-NTB	3 Dokumen	188,359,800	se-NTB	3 Dokumen	183,390,216
2.05.01.01.16.20	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi dan Adiwiyata	DAU	Kota Bima,se-NTB	10 Unit	200,461,100	Kota Bima,se-NTB	10 Unit	133,574,221
2.05.01.01.16.21	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Jumlah unit usaha/ kegiatan penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	DAU	se-NTB	10 Usaha/ Kegiatan	155,425,000	se-NTB	10 Usaha/ Kegiatan	174,485,080
2.05.01.02	Balai Laboratorium Lingkungan				1,836,641,518				2,274,248,845
2.05.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,258,342,982				342,214,087
2.05.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti	DAU	Kota Mataram	330 Lembar	2,277,580	Kota Mataram	330 Lembar	2,424,847
2.05.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kota Mataram	2 Rekening	71,627,000	Kota Mataram	2 Rekening	95,422,186
2.05.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kota Mataram	3 Orang	52,040,000	Kota Mataram	3 Orang	55,412,225
2.05.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kota Mataram	2 Orang	53,703,240	Kota Mataram	2 Orang	57,185,551

2.05.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kota Mataram	30 Jenis	9,376,970	Kota Mataram	30 Jenis	9,992,499
2.05.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	6,700,000	Kota Mataram	2 Jenis	8,932,639
2.05.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	57,811,400	Kota Mataram	10 Jenis	61,563,588
2.05.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	920,106,280	Kota Mataram	10 Jenis	1,052,098,171
2.05.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kota Mataram	140 OH	7,150,000	Kota Mataram	140 OH	9,093,174
2.05.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	23,998,000	Luar Provinsi	3 OT	15,997,249
2.05.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kota Mataram	12 OT	200,000	Kota Mataram	0 OT	0
2.05.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kota Mataram	1 Orang	2,315,024	Kota Mataram	1 Orang	28,377,610
2.05.01.02.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	Tenaga pendukung kegiatan dinas tersedia	DAU	Kota Mataram	2 Orang	51,037,488	Kota Mataram	2 Orang	54,337,479
2.05.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			80,860,000				532,904,125
2.05.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kota Mataram	4 Buah	5,400,000	Kota Mataram	4 Buah	13,601,591
2.05.01.02.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah Sapras pendukung operasional yang tersedia	DAU	Kota Mataram	6 Unit	34,540,000	Kota Mataram	6 Unit	42,098,023
2.05.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	13 Unit	38,920,000	Kota Mataram	13 Unit	41,452,520
2.05.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	10 Unit	2,000,000	Kota Mataram	10 Unit	17,052,506
2.05.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			32,659,396				65,631,312
2.05.01.02.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah Aparatur mengikuti diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan	DAU	Kota Mataram	4 Orang	32,659,396	Kota Mataram	4 Orang	43,501,291
2.05.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			23,155,640				95,959,245
2.05.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	8,789,040	Kota Mataram	1 Dokumen	9,357,324
2.05.01.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	14,366,600	Kota Mataram	2 Dokumen	23,946,815
2.05.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			10,650,300				30,876,377
2.05.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	10,650,300	Kota Mataram	1 Dokumen	11,345,473
2.05.01.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya			430,973,200				621,056,084
2.05.01.02.16.18	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter yang dapat di uji di Lab	DAU	Kota Mataram	5 Parameter	430,973,200	Kota Mataram	5 Parameter	621,056,084
2.05.01.19	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB				6,633,967,804				7,164,330,355
2.05.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			241,661,680				342,214,087
2.05.01.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk yang tindak lanjuti	DAU	Kab. Lombok Barat	375 Lembar	2,021,000	Kab. Lombok Barat	375 Lembar	2,153,591
2.05.01.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Rekening	34,800,000	Kab. Lombok Barat	1 Rekening	37,209,848
2.05.01.19.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Lombok Barat	3 Orang	46,190,800	Kab. Lombok Barat	3 Orang	49,178,417
2.05.01.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Orang	24,926,920	Kab. Lombok Barat	2 Orang	53,077,498

2.05.01.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	12 Jenis	2,918,200	Kab. Lombok Barat	12 Jenis	3,107,979
2.05.01.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	2,841,000	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	3,025,445
2.05.01.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	1,412,400	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	1,503,988
2.05.01.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	1,047,400	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	1,115,295
2.05.01.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Lombok Barat	225 OH	10,350,000	Kab. Lombok Barat	225 OH	11,619,054
2.05.01.19.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	6 OT	32,719,392
2.05.01.19.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Lombok Barat	12 OT	18,000,000	Kab. Lombok Barat	18 OT	33,478,279
2.05.01.19.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Orang	24,851,320	Kab. Lombok Barat	2 Orang	48,939,340
2.05.01.19.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	Tenaga pendukung kegiatan dinas tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Orang	48,302,640	Kab. Lombok Barat	3 Orang	65,085,962
2.05.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			499,847,000				532,904,125
2.05.01.19.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Unit	338,420,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	360,314,175
2.05.01.19.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	6 Buah	13,663,000	Kab. Lombok Barat	6 Buah	14,546,742
2.05.01.19.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah Sapras pendukung operasional yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Unit	5,314,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	5,657,974
2.05.01.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Unit	84,400,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	90,078,544
2.05.01.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	24 Unit	54,650,000	Kab. Lombok Barat	24 Unit	58,663,000
2.05.01.19.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	16 Unit	3,400,000	Kab. Lombok Barat	16 Unit	3,643,691
2.05.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			61,551,000				65,631,312
2.05.01.19.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Lombok Barat	12 Kali	7,751,000	Kab. Lombok Barat	12 Kali	8,300,316
2.05.01.19.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah Aparatur mengikuti diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan	DAU	Kab. Lombok Barat	5 Orang	38,200,000	Kab. Lombok Barat	5 Orang	40,682,632
2.05.01.19.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Dokumen Anjab pegawai Dinas LHK yang tersusun	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	7,400,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	7,903,202
2.05.01.19.05.12	Peningkatan kapasitas fungsional	Penilaian angka kredit pegawai jabatan fungsional yang terlaksana	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Jafung	8,200,000	Kab. Lombok Barat	1 Jafung	8,745,163
2.05.01.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			75,350,764				95,959,245
2.05.01.19.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	5,600,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	5,990,403
2.05.01.19.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	40,600,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	58,932,383
2.05.01.19.06.12	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang akuntabel	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	9,753,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	10,384,471
2.05.01.19.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah dokumen statistik SKPD yang aktual	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	19,397,764	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	20,651,988
2.05.01.19.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			29,076,000				30,876,377
2.05.01.19.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	18,980,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	20,125,956
2.05.01.19.07.02	Pengelolaan PAD sektor lingkungan hidup dan kehutanan	Jumah sumber PAD sektor lingkungan hidup dan kehutanan	DAU	Provinsi NTB	1 Lokasi	10,096,000	Provinsi NTB	1 Lokasi	10,750,421

2.05.01.19.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah			5,726,481,360				6,096,745,209
2.05.01.19.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah TPA dan TPST regional yang operasional	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	5,726,481,360	Provinsi NTB	1 Unit	6,096,745,209
2:06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1,412,555,000				1,976,747,800
2:06:01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1,412,555,000				1,976,747,800
2.06.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1,412,555,000				1,976,747,800
2.06.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk			1,412,555,000				1,976,747,800
2.06.01.01.15.02	Bimtek tenaga pengelola SIAK	Jumlah Pengelola SIAK terbina	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	40 Orang	50,100,000	Provinsi NTB	40 Orang	112,000,000
2.06.01.01.15.05	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah peserta	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	314 Orang	471,155,000	Provinsi NTB	314 Orang	666,527,800
2.06.01.01.15.06	Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah eksemplar	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	526 Eksemplar	63,500,000	Provinsi NTB	535 Eksemplar	107,000,000
2.06.01.01.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah Aparat Dukcapil Terbina	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	120 Orang	297,200,000	Provinsi NTB	120 Orang	458,520,000
2.06.01.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah Peserta	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	40 orang	278,100,000	Provinsi NTB	0 Orang	0
2.06.01.01.15.15	Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang Trip	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	52 OT	252,500,000	Provinsi NTB	57 OT	632,700,000
2:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				4,955,900,800				8,669,953,540
2:07:01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4,955,900,800				8,669,953,540
2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4,955,900,800				8,669,953,540
2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi perkantoran			1,140,830,900				1,597,646,820
2.07.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	DAU	Provinsi NTB	12500 Eksemplar	900,000	Provinsi NTB	13750 Eksemplar	2,750,000
2.07.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	148,830,000	Provinsi NTB	3 Jenis	165,365,850
2.07.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan	DAU	Provinsi NTB	43 Unit	202,315,500	Provinsi NTB	43 Unit	222,552,950
2.07.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	9 Orang	74,745,000	Provinsi NTB	9 Orang	92,560,500
2.07.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	156 OB	345,441,700	Provinsi NTB	156 OB	407,160,000
2.07.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	52 Jenis	9,454,000	Provinsi NTB	52 Jenis	33,930,000
2.07.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah eksemplar	DAU	Provinsi NTB	152950 eksemplar	9,972,500	Provinsi NTB	168245 eksemplar	33,649,000
2.07.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	20 Jenis	4,255,000	Provinsi NTB	20 Jenis	22,275,000
2.07.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	DAU	Provinsi NTB	2352 eksemplar	8,400,000	Provinsi NTB	2352 eksemplar	12,195,120
2.07.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	DAU	Provinsi NTB	600 porsi	15,400,000	Provinsi NTB	660 porsi	36,300,000
2.07.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	31 OT	85,000,000	Provinsi NTB	34 OT	289,000,000
2.07.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Oang	DAU	Provinsi NTB	48 OB	159,520,000	Provinsi NTB	48 OB	191,179,200
2.07.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	36 OB	76,597,200	Provinsi NTB	36 OB	88,729,200
2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur			618,975,000				375,754,000
2.07.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	450,000,000	Provinsi NTB	0 Unit	0
2.07.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit	DAU	Provinsi NTB	9 Unit	104,025,000	Provinsi NTB	12 Unit	187,032,000
2.07.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	DAU	Provinsi NTB	1 Gedung	30,000,000	Provinsi NTB	1 Gedung	90,750,000
2.07.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit	DAU	Provinsi NTB	5 Unit	11,650,000	Provinsi NTB	5 Unit	16,940,000

2.07.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Unit	DAU	Provinsi NTB	10 Unit	10,000,000	Provinsi NTB	10 Unit	33,401,000
2.07.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah Paket	DAU	Provinsi NTB	1 Paket	10,000,000	Provinsi NTB	1 Paket	44,001,000
2.07.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Jumlah Berkas	DAU	Provinsi NTB	1 Berkas	3,300,000	Provinsi NTB	1 Berkas	3,630,000
2.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur			18,000,000				21,780,000
2.07.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	48 orang	18,000,000	Provinsi NTB	48 orang	21,780,000
2.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			76,292,500				198,682,000
2.07.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	10 jenis	36,230,000	Provinsi NTB	10 jenis	64,372,000
2.07.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	8,230,000	Provinsi NTB	1 jenis	18,150,000
2.07.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis rencana kerja	DAU	Provinsi NTB	5 jenis	31,832,500	Provinsi NTB	5 jenis	116,160,000
2.07.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			21,870,000				26,559,500
2.07.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	21,870,000	Provinsi NTB	2 jenis	26,559,500
2.07.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif			416,605,000				1,037,233,000
2.07.01.01.15.04	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi TTG	DAU	Provinsi NTB	10 Inovasi	111,575,000	Provinsi NTB	10 Inovasi	177,597,750
2.07.01.01.15.05	Gelar TTG Nasional	jumlah gelar inovasi TTG	DAU	Provinsi NTB	1 Kali	121,151,000	Provinsi NTB	1 Kali	212,403,750
2.07.01.01.15.06	Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya alam dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	110 Orang	75,677,000	Provinsi NTB	110 Orang	250,030,000
2.07.01.01.15.07	Pengembangan Wilayah Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terbina	DAU	Provinsi NTB	25 Orang	22,167,000	Provinsi NTB	60 orang	130,182,000
2.07.01.01.15.08	Penguatan Kapasitas dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah aparatur desa yang terbina	DAU	Provinsi NTB	33 orang	86,035,000	Provinsi NTB	33 orang	267,019,500
2.07.01.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif			1,416,310,500				2,495,182,700
2.07.01.01.16.02	Bimtek manajemen badan usaha milik desa	Jumlah orang yang terbina	DAU	Provinsi NTB	58 orang	228,021,000	Provinsi NTB	58 orang	456,460,000
2.07.01.01.16.08	Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	120 orang	105,363,000	Provinsi NTB	200 orang	229,391,000
2.07.01.01.16.10	Peningkatan kapasitas pendamping Desa	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	100 Orang	19,655,000	Provinsi NTB	100 Orang	23,806,700
2.07.01.01.16.13	Penguatan Pengurus BUMDesa	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	120 Orang	96,442,000	Provinsi NTB	180 Orang	179,784,000
2.07.01.01.16.14	Kajian Peningkatan Kapasitas Bumdes	Jumlah BUMDes berprestasi	DAU	Provinsi NTB	5 BUMDes	468,819,000	Provinsi NTB	5 BUMDes	799,101,000
2.07.01.01.16.23	Penguatan Pengelola Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	100 Orang	104,158,000	Provinsi NTB	100 Orang	231,312,000
2.07.01.01.16.24	Perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah juara desa/kelurahan	DAU	Provinsi NTB	6 Desa/Kelurahan	393,852,500	Provinsi NTB	6 Desa/Kelurahan	575,328,000
2.07.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif			347,040,000				710,483,920
2.07.01.01.17.07	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	Jumlah Kader KPM terbina	DAU	Provinsi NTB	40 Orang	83,400,000	Provinsi NTB	40 Orang	125,000,000
2.07.01.01.17.08	Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	40 Orang	40,940,000	Provinsi NTB	40 Orang	55,484,000
2.07.01.01.17.09	Bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah frekuensi kegiatan	DAU	Provinsi NTB	1 kali	34,900,000	Provinsi NTB	1 kali	110,000,000
2.07.01.01.17.11	Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	30 OT	19,200,000	Provinsi NTB	40 OT	100,000,000
2.07.01.01.17.12	Penguatan Kapasitas Paralegal	Jumlah Paralegal Terbina	DAU	Provinsi NTB	40 Orang	81,200,000	Provinsi NTB	40 Orang	120,000,000
2.07.01.01.17.13	Penguatan kapasitas Lembaga Adat	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	100 Orang	87,400,000	Provinsi NTB	120 Orang	199,999,920
2.07.01.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih			622,916,900				1,822,164,800
2.07.01.01.18.05	Pemantauan dan penyebaran informasi	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	6 OT	63,250,000	Provinsi NTB	10 OT	169,334,650
2.07.01.01.18.06	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	90 OT	173,297,000	Provinsi NTB	90 OT	624,232,800
2.07.01.01.18.07	Assistensi Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Orang Trip	DAU	Provinsi NTB	27 OT	21,525,000	Provinsi NTB	30 OT	75,000,000
2.07.01.01.18.08	Profil Desa	Jumlah peserta	DAU	Provinsi NTB	110 Orang	70,964,900	Provinsi NTB	121 Orang	176,097,350
2.07.01.01.18.10	Pembinaan rutin pemerintahan desa	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	12 OT	5,000,000	Provinsi NTB	16 OT	40,000,000
2.07.01.01.18.15	Pekan inovasi perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah inovasi desa	DAU	Provinsi NTB	1 Inovasi	21,100,000	Provinsi NTB	1 Inovasi	95,000,000
2.07.01.01.18.19	Bimbingan teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah Aparatur Desa terbina	DAU	Provinsi NTB	100 Orang	242,780,000	Provinsi NTB	150 Orang	532,500,000

2.07.01.01.18.22	Monitor dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	40 OT	25,000,000	Provinsi NTB	44 OT	110,000,000
2.07.01.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif			277,060,000				384,466,800
2.07.01.01.19.06	Penguatan Kapasitas Pokjanel Posyandu	Jumlah Kader Posyandu terbina	DAU	Provinsi NTB	350 Orang	277,060,000	Provinsi NTB	400 Orang	384,466,800
2:08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,548,660,000				3,290,858,324
2:08:01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1,548,660,000				3,290,858,324
2.08.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1,548,660,000				3,290,858,324
2.08.01.01.15	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB			189,200,000				409,893,340
2.08.01.01.15.02	Pelayanan KIE	Jumlah jenis media KIE	DAU	se-NTB	10 jenis	189,200,000	se-NTB	10 jenis	409,893,340
2.08.01.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama			298,500,000				686,068,600
2.08.01.01.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	jumlah peserta	DAU	Kab. Lombok Timur,se-NTB	195 orang	76,500,000	Kab. Lombok Timur,se-NTB	200 orang	190,623,600
2.08.01.01.16.03	Pendewasaan Usia Perkawinan ke Masyarakat	Jumlah peserta	DAU	se-NTB	500 orang	106,500,000	se-NTB	500 orang	215,449,500
2.08.01.01.16.04	Pengembangan Metode DW pada beberapa Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Dialog Warga yang dibina	DAU	se-NTB	50 kelompok	115,500,000	se-NTB	50 kelompok	279,995,500
2.08.01.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri			308,110,000				524,204,064
2.08.01.01.18.01	Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Kelompok Peduli KB yang difasilitasi	DAU	Kab. Dompu,se-NTB	50 kelompok	308,110,000	Kab. Dompu,se-NTB	48 kelompok	524,204,064
2.08.01.01.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB			102,600,000				189,558,080
2.08.01.01.19.01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang disuluh	DAU	se-NTB	10 kelompok	102,600,000	se-NTB	10 kelompok	189,558,080
2.08.01.01.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif			78,700,000				166,000,000
2.08.01.01.20.04	Penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (KRR)	jumlah PIK KRR yang dibina	DAU	se-NTB	4 PIK KRR	78,700,000	se-NTB	4 PIK KRR	166,000,000
2.08.01.01.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS			95,300,000				330,054,400
2.08.01.01.21.01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah siswa peserta sosialisasi	DAU	Kab. Dompu,se-NTB	600 siswa	95,300,000	Kab. Dompu,se-NTB	650 siswa	330,054,400
2.08.01.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)			420,700,000				858,000,000
2.08.01.01.24.03	Pembekalan bagi Penyuluh tentang PUP	Jumlah penyuluh yg dibekali	DAU	Kab. Dompu,se-NTB	100 orang	317,650,000	Kab. Dompu,se-NTB	100 orang	583,000,000
2.08.01.01.24.04	Bimtek tentang PUP bagi tenaga Pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang dibina	DAU	se-NTB	100 orang	103,050,000	se-NTB	100 orang	275,000,000
2.08.01.01.25	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA			55,550,000				127,079,840
2.08.01.01.25.02	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah tenaga pendamping yang dilatih	DAU	Kab. Dompu,Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	160 orang	55,550,000	Kab. Dompu,Kab. Lombok Timur,Provinsi NTB	160 orang	127,079,840
2:09	PERHUBUNGAN				40,181,365,000				18,552,779,981
2:09:01	Dinas Perhubungan				40,181,365,000				18,552,779,981
2.09.01.01	Dinas Perhubungan				40,181,365,000				18,552,779,981
2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,397,001,769				2,579,532,481
2.09.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	Dana Bagi Hasil	Kota Mataram	2100 surat	3,710,007	Kota Mataram	2200 surat	3,895,496

2.09.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dana Bagi Hasil	Kota Mataram	5 Jenis	276,009,000	Kota Mataram	5 Jenis	307,000,000
2.09.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor	Dana Bagi Hasil	Kota Mataram	5 Jenis	29,150,000	Kota Mataram	5 Jenis	30,607,500
2.09.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil	Kota Mataram	20 Unit	16,218,000	Kota Mataram	20 Unit	17,028,900
2.09.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Dana Bagi Hasil	Kota Mataram	9 Tahun	108,904,392	Kota Mataram	9 Tahun	114,349,617
2.09.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Dana Bagi Hasil,DAU	Kota Mataram	33 Orang	860,508,000	Kota Mataram	33 Orang	929,348,640
2.09.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	APBD PROV.	Kota Mataram	43 Jenis	68,652,600	Kota Mataram	43 Jenis	72,699,971
2.09.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	9 Jenis	42,296,400	Kota Mataram	9 Jenis	46,299,996
2.09.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	Kota Mataram	12 Jenis	12,856,400	Kota Mataram	12 Jenis	15,068,964
2.09.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD PROV.	Kota Mataram	52 Jenis	110,395,844	Kota Mataram	52 Jenis	111,265,648
2.09.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Eksplor Bahan Bacaan (Surat Kabar)	DAU	Kota Mataram	36 Eksemplar	35,377,488	Kota Mataram	36 Eksemplar	37,146,348
2.09.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Kedinasan	DAU	Kota Mataram	2477 Orang/kali	111,179,800	Kota Mataram	2477 Orang/kali	123,297,629
2.09.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	DAU	Kota Mataram	64 OT	258,264,000	Kota Mataram	68 OT	285,426,464
2.09.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	DAU	Kota Mataram	3 Orang	120,250,638	Kota Mataram	3 Orang	126,263,172
2.09.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD Dalam Daerah Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	DAU	Kota Mataram	114 OT	186,730,000	Kota Mataram	120 OT	190,815,000
2.09.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Meningkatnya Keamanan Kantor	Dana Bagi Hasil,DAU	Kota Mataram	6 Orang	156,499,200	Kota Mataram	6 Orang	169,019,136
2.09.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			2,423,343,356				659,383,387
2.09.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Yang Memadai	DAU	Kota Mataram	4 Jenis	15,000,000	Kota Mataram	4 Jenis	50,000,000
2.09.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kota Mataram	5 Jenis	22,839,600	Kota Mataram	5 Jenis	125,000,000
2.09.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DAU	Kota Mataram	1 Jenis	1,995,614,816	Kota Mataram	1 Jenis	75,000,000
2.09.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	DAU	Kota Mataram	21 Unit	352,403,940	Kota Mataram	21 Unit	370,024,137
2.09.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlatan Kerja Yang Baik	DAU	Kota Mataram	12 Jenis	37,485,000	Kota Mataram	12 Jenis	39,359,250
2.09.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat			77,640,000				81,591,100
2.09.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah penceramah (Dai) dan Pemandu Senam	DAU	Kota Mataram	2 kegiatan	27,640,000	Kota Mataram	2 kegiatan	29,091,100
2.09.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah peningkatan SDM	DAU	Luar Provinsi	2 orang	50,000,000	Luar Provinsi	2 orang	52,500,000
2.09.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan			165,426,765				174,500,000
2.09.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	47,978,490	Kota Mataram	2 Dokumen	50,500,000
2.09.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	22,777,650	Kota Mataram	1 Dokumen	24,000,000
2.09.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKA?DPA, RKAP?DPPA dan Rencana Kerja)	DAU	Kota Mataram	3 Dokumen	94,670,625	Kota Mataram	3 Dokumen	100,000,000
2.09.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan			36,968,000				100,000,000
2.09.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah secara efektif	DAU	se-NTB	1 Dokumen	36,968,000	se-NTB	1 Dokumen	100,000,000

2.09.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW			703,224,000				747,668,675
2.09.01.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen perencanaan perhubungan	APBD PROV.	Kab. Sumbawa,Kota Mataram	3 dokumen	424,999,000	Kab. Sumbawa,Kota Mataram	3 dokumen	425,000,000
2.09.01.01.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen data monitoring dan evaluasi	APBD PROV.	se-NTB	1 dokumen	31,815,000	se-NTB	1 dokumen	33,918,675
2.09.01.01.15.09	Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 dokumen	246,410,000	Provinsi NTB	1 dokumen	288,750,000
2.09.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara			320,096,000				2,339,787,500
2.09.01.01.16.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah fasilitas terminal type B yang terpelihara	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 terminal	100,396,000	Provinsi NTB	1 terminal	1,650,000,000
2.09.01.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara	APBD PROV.,DAU	se-NTB	2 jenis	219,700,000	se-NTB	5 jenis	689,787,500
2.09.01.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak			1,361,819,410				2,043,784,196
2.09.01.01.17.14	Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah peserta pembinaan/sosialisasi pengusaha angkutan barang dan terpilihnya Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi NTB untuk mewakili NTB di tingkat Nasional	APBD PROV.	Kota Mataram	2 Kegiatan	119,165,000	Kota Mataram	2 Kegiatan	134,834,700
2.09.01.01.17.18	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	Jumlah pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu	APBD PROV.	se-NTB	4 Kegiatan	259,550,250	se-NTB	4 Kegiatan	274,000,000
2.09.01.01.17.19	Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Kegiatan	756,570,000	Provinsi NTB	1 Kegiatan	815,000,000
2.09.01.01.17.20	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan	Kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Kegiatan	27,368,000	Provinsi NTB	1 Kegiatan	64,500,000
2.09.01.01.17.21	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	Jumlah rute angkutan	APBD PROV.	Kota Mataram	1 rute	20,000,000	Kota Mataram	1 rute	500,000,000
2.09.01.01.17.22	Peningkatan/pengembangan Angkutan Udara se NTB	Jumlah penumpang angkutan udara di 3 bandara	APBD PROV.	Provinsi NTB	3 lokasi	27,511,360	Provinsi NTB	3 lokasi	30,449,496
2.09.01.01.17.24	Pengawasan, Pengendalian Terminal	Jumlah Kendaraan Yang Laik jalan	APBD PROV.	se-NTB	1 kegiatan	99,758,400	se-NTB	1 kegiatan	112,500,000
2.09.01.01.17.25	Pembinaan Penertiban, Pengelolaan Operasional Terminal	Terlaksananya Pembinaan Penyewa Fasilitas Pelayanan Terminal dan Operator Bus di Terminal, dan Uji Petik Retribusi Terminal	APBD PROV.	se-NTB	4 terminal	51,896,400	se-NTB	4 terminal	112,500,000
2.09.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia			30,000,000,000				7,000,000,000
2.09.01.01.18.04	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	Jumlah Fasilitas Pelabuhan	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Paket	30,000,000,000	Provinsi NTB	1 Paket	7,000,000,000
2.09.01.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas			1,345,428,600				1,204,313,069
2.09.01.01.19.04	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Terpasangnya Fasilitas Keselamatan	APBD PROV.	Kab. Lombok Timur,Kota Bima,se-NTB	4 Jenis	1,162,000,000	Kab. Lombok Timur,Kota Bima,se-NTB	4 Jenis	985,169,309
2.09.01.01.19.05	Penyusunan Informasi/Database Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Dokumen Informasi Fasilitas Jalan di NTB	APBD PROV.	se-NTB	1 Dokumen	100,000,000	se-NTB	1 Dokumen	123,403,500
2.09.01.01.19.06	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	APBD PROV.	Kota Mataram	2 Orang	83,428,600	Kota Mataram	2 Orang	95,740,260
2.09.01.01.21	Program Peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas			168,316,800				272,309,873
2.09.01.01.21.01	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Andalalin	APBD PROV.	se-NTB	5 Dokumen	34,500,000	se-NTB	5 Dokumen	40,259,065
2.09.01.01.21.02	Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Terpilihnya Kab/ Kota Tertib Lalu Lintas	APBD PROV.	se-NTB	2 Kab/Kota	24,360,000	se-NTB	2 Kab/Kota	44,000,000
2.09.01.01.21.03	Evaluasi Sistem Transportasi ASDP	Jumlah Dokumen Evaluasi Operasional Transportasi ASDP	APBD PROV.	se-NTB	1 Dokumen	58,026,800	se-NTB	1 Dokumen	61,550,808

2.09.01.01.21.04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Dokumen Penurunan Pelaporan Gas Rumah Kaca	APBD PROV.	Kota Mataram	1 Dokumen	24,440,000	Kota Mataram	1 Dokumen	26,500,000
2.09.01.01.21.05	Peningkatan SDM Transportasi	Jumlah SDM Perhubungan yang Mengikuti Pendidikan	APBD PROV.	Kota Mataram	20 Orang	26,990,000	Kota Mataram	20 Orang	100,000,000
2.09.01.01.22	Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang			1,182,100,300				1,349,909,700
2.09.01.01.22.01	Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran	Jumlah Rute Pemantauan Keselamatan	APBD PROV.	Provinsi NTB	2 Rute	213,873,600	Provinsi NTB	2 Rute	226,706,000
2.09.01.01.22.02	Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhan di NTB	Jumlah Dokumen Databse Kepelabuhanan	APBD PROV.	se-NTB	1 Dok	41,107,900	se-NTB	1 Dok	79,500,000
2.09.01.01.22.04	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	Jumlah Rute/KOnektivitas	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 Rute	927,118,800	Provinsi NTB	1 Rute	1,043,703,700
2:10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10,847,828,841				11,814,392,800
2:10:01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				10,847,828,841				11,814,392,800
2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				10,847,828,841				11,814,392,800
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,414,749,918				1,771,413,801
2.10.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Provinsi NTB	1200 Jumlah Surat Keluar	5,932,000	Provinsi NTB	1700 Jumlah Surat Keluar	8,397,354
2.10.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	DAU	Provinsi NTB	3 jenis	235,999,992	Provinsi NTB	3 jenis	539,924,679
2.10.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	DAU	Provinsi NTB	5 orang	121,549,000	Provinsi NTB	5 orang	80,339,000
2.10.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	DAU	Provinsi NTB	6 orang	157,023,820	Provinsi NTB	6 orang	152,599,998
2.10.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	DAU	Provinsi NTB	51 Jumlah Jenis	73,299,800	Provinsi NTB	51 Jumlah Jenis	110,788,983
2.10.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Provinsi NTB	17 Jenis	56,177,300	Provinsi NTB	17 Jenis	75,550,992
2.10.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Provinsi NTB	16 Jenis	16,908,100	Provinsi NTB	16 Jenis	34,884,000
2.10.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfotik Prov NTB	DAU	Provinsi NTB	7675 Eksemplar	40,995,430	Provinsi NTB	7675 Eksemplar	56,948,500
2.10.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	DAU	Provinsi NTB	1460 orang	37,980,000	Provinsi NTB	1865 orang	117,974,305
2.10.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DAU	Luar Provinsi	9 Jumlah Orang	114,646,979	Luar Provinsi	10 Jumlah Orang	91,250,000
2.10.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak	DAU	Provinsi NTB	14 orang	386,694,300	Provinsi NTB	15 orang	291,765,990
2.10.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DAU	se-NTB	120 Jumlah Orang	167,543,197	se-NTB	125 Jumlah Orang	210,990,000
2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			798,945,998				850,607,999
2.10.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DAU	Provinsi NTB	10 Unit	15,250,000	Provinsi NTB	10 Unit	30,000,000
2.10.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	51,000,000	Provinsi NTB	4 Jenis	60,100,000
2.10.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terselenggaranya Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik Lainnya	DAU	Provinsi NTB	10 Jenis	90,324,998	Provinsi NTB	10 Jenis	70,500,000
2.10.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DAU	Provinsi NTB	5 Unit	86,000,000	Provinsi NTB	5 Unit	92,000,000

2.10.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Provinsi NTB	42 Unit	295,371,000	Provinsi NTB	44 Unit	305,375,000
2.10.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Provinsi NTB	7 Jenis	196,000,000	Provinsi NTB	7 Jenis	195,999,999
2.10.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terselenggaranya Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	DAU	Provinsi NTB	5 unit	50,000,000	Provinsi NTB	5 unit	19,900,000
2.10.01.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Provinsi NTB	3 Unit	15,000,000	Provinsi NTB	4 Unit	76,733,000
2.10.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			178,833,980				190,397,000
2.10.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	DAU	Luar Provinsi	8 Orang	108,983,880	Luar Provinsi	8 Orang	99,018,000
2.10.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	DAU	Provinsi NTB	5 Jenis	69,850,100	Provinsi NTB	5 Jenis	91,379,000
2.10.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			189,906,100				201,600,000
2.10.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	DAU	Provinsi NTB	2 Dokumen	46,406,900	Provinsi NTB	2 Dokumen	51,047,000
2.10.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD	DAU	Provinsi NTB	3 Dokumen	93,515,000	Provinsi NTB	3 Dokumen	94,289,000
2.10.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD	DAU	Provinsi NTB	2 Dokumen	49,984,200	Provinsi NTB	2 Dokumen	56,264,000
2.10.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			47,525,300				50,610,000
2.10.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	47,525,300	Provinsi NTB	1 Dokumen	50,610,000
2.10.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi			2,573,354,636				2,740,286,000
2.10.01.01.15.06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	DAU	Provinsi NTB	5 Dokumen	180,000,000	Provinsi NTB	8 Dokumen	207,477,000
2.10.01.01.15.08	Temu Pelajar Kreatif	Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi	DAU	se-NTB	500 Pelajar	172,140,000	se-NTB	500 Pelajar	235,255,000
2.10.01.01.15.09	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih	DAU	se-NTB	10 Komunitas	311,174,900	se-NTB	10 Komunitas	381,065,000
2.10.01.01.15.10	Penguatan Kemitraan dengan Lembaga dan Pers	Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebaran dan kualitas informasi	DAU	se-NTB	10 Lembaga/Pers	190,175,000	se-NTB	10 Lembaga/Pers	323,379,000
2.10.01.01.15.11	Publikasi Media Kreatif	Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media kreatif	DAU	Provinsi NTB	3 Dokumen	772,752,750	Provinsi NTB	3 Dokumen	557,680,000
2.10.01.01.15.12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik	DAU	Provinsi NTB	3000 Informasi	947,111,986	Provinsi NTB	4000 Informasi	1,035,430,000
2.10.01.01.17	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi Informatika			434,244,985				462,323,000
2.10.01.01.17.01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan bidang kominfo	DAU	se-NTB	90 Aparatur	180,224,600	se-NTB	90 Aparatur	367,323,000
2.10.01.01.17.02	Bimtek Bidang Kominfotik	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PPID	DAU	se-NTB	480 Orang	223,749,985	se-NTB	480 Orang	65,000,002
2.10.01.01.17.04	Penilaian Angka Kredit Jafung Bidang Kominfo	Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai	DAU	Provinsi NTB	5 Aparatur	30,270,400	Provinsi NTB	5 Aparatur	29,999,998
2.10.01.01.19	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif			2,776,481,944				2,956,004,000
2.10.01.01.19.01	Penguatan Layanan Data dan Informasi PPID Utama	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan PPID	DAU	Provinsi NTB	12000 Kunjungan	496,512,944	Provinsi NTB	14000 Kunjungan	418,004,020
2.10.01.01.19.02	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Jumlah Sengketa Informasi yang dapat terselesaikan melalui jalan Mediasi dan Ajudikasi	DAU	Provinsi NTB	8 Kasus	2,015,969,000	Provinsi NTB	6 Kasus	2,310,680,000
2.10.01.01.19.03	Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah PPID Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Desa) yang terbentuk	DAU	se-NTB	12 PPID	264,000,000	se-NTB	12 PPID	227,319,980

2.10.01.01.22	Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,433,785,980				2,591,151,000
2.10.01.01.22.01	Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center	Persentase Pemenuhan Standar Teknis Data Center dan Data Recovery Center	DAU	Provinsi NTB	30%	1,179,317,988	Provinsi NTB	40%	191,500,000
2.10.01.01.22.02	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	DAU	Provinsi NTB	20 OPD	402,250,000	Provinsi NTB	30 OPD	1,383,246,000
2.10.01.01.22.03	Penguatan Tata Kelola TIK	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata kelola TIK	DAU	Provinsi NTB	10 Dokumen	622,955,992	Provinsi NTB	10 Dokumen	626,157,000
2.10.01.01.22.05	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	DAU	Provinsi NTB	10 Aplikasi	229,262,000	Provinsi NTB	10 Aplikasi	390,248,000
2:11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				8,911,909,818				6,023,728,455
2:11:01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				8,911,909,818				6,023,728,455
2.11.01.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Induk)				4,594,476,783				6,023,728,455
2.11.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,009,517,890				284,383,280
2.11.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Keluar	DAU	Provinsi NTB	2500 Surat	5,000,000	Provinsi NTB	2500 Surat	5,000,000
2.11.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	251,055,410	Provinsi NTB	3 Jenis	251,055,410
2.11.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	DAU	Provinsi NTB	8 Orang	90,547,000	Provinsi NTB	8 Orang	90,547,000
2.11.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Penyediaan Peralatan Kebersihan	DAU	Provinsi NTB	7 Orang	195,007,740	Provinsi NTB	7 Orang	195,007,740
2.11.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	DAU	Provinsi NTB	20 Jenis	20,236,500	Provinsi NTB	20 Jenis	20,736,500
2.11.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DAU	Provinsi NTB	5 Jenis	7,239,000	Provinsi NTB	5 Jenis	15,500,000
2.11.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	20 Jenis	6,022,000	Provinsi NTB	20 Jenis	7,022,000
2.11.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	9 Jenis	26,160,000	Provinsi NTB	10 jenis	171,730,776
2.11.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/surat kabar yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	132 Exp	14,520,000	Provinsi NTB	132 Exp	14,520,000
2.11.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	478 Orang	33,346,000	Provinsi NTB	521 Orang	40,000,004
2.11.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi teknis pusat dan daerah	DAU	Luar Provinsi	25 OT	151,221,000	Luar Provinsi	30 OT	286,522,522
2.11.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi teknis perkantoran	DAU	Provinsi NTB	8 Orang	209,163,240	Provinsi NTB	8 Orang	209,163,240
2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			324,302,000				113,258,748
2.11.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	80,000,000	Provinsi NTB	1 Unit	175,000,000
2.11.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	36 Unit	210,815,000	Provinsi NTB	36 Unit	222,815,000
2.11.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	30 Unit	18,500,000	Provinsi NTB	35 Unit	45,164,773
2.11.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Akuisi Arsip Inaktif	DAU	Provinsi NTB	2250 Berkas	14,987,000	Provinsi NTB	2500 Berkas	17,500,000
2.11.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,605,600				16,614,687
2.11.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Peningkatan iman dan taqwa serta peningkatan jasamani aparatur	DAU	Provinsi NTB	48 OK	15,605,600	Provinsi NTB	48 OK	16,614,687
2.11.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			322,304,193				343,143,794
2.11.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	6 Dok	54,890,500	Provinsi NTB	6 Dok	54,890,500
2.11.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	27,127,500	Provinsi NTB	1 Dok	27,127,500
2.11.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	3 Dok	147,250,000	Provinsi NTB	3 Dok	147,500,000

2.11.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	3 Dok	93,036,193	Provinsi NTB	3 Dok	113,625,794
2.11.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			17,368,000				10,000,000
2.11.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	17,368,000	Provinsi NTB	1 Dok	19,089,734
2.11.01.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha			135,622,000				174,173,555
2.11.01.01.15.06	Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Laporan	DAU	Provinsi NTB	2 Laporan	135,622,000	Provinsi NTB	2 Laporan	174,173,555
2.11.01.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM			1,040,518,300				3,994,239,996
2.11.01.01.16.01	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah UKM Yang Dibina Dan Difasilitasi Pengembangan	DBH-CHT	se-NTB	390 UKM	1,040,518,300	se-NTB	430 UKM	1,694,145,936
2.11.01.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah			358,538,800				403,281,100
2.11.01.01.17.02	Pengembangan Klaster Bisnis	Jumlah UMKM Sentra Yang Dibina	DAU	se-NTB	35 UMKM	106,900,000	se-NTB	35 UMKM	127,150,000
2.11.01.01.17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana Pemasaran Yang Disediakan	DAU	se-NTB	25 Unit	65,000,000	se-NTB	25 Unit	65,000,000
2.11.01.01.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah UKM Yang dibimtek dan difasilitasi pengembangan usaha	DAU	se-NTB	3 UKM	14,999,800	se-NTB	5 UKM	25,000,000
2.11.01.01.17.09	Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Event Promosi	DAU	Provinsi NTB	1 Event	171,639,000	Provinsi NTB	1 Event	186,131,100
2.11.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas terhadap koperasi aktif ; Persentase Koperasi Aktif			1,370,700,000				1,605,994,684
2.11.01.01.18.01	Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangan	DAU	Provinsi NTB	700 Kop	211,600,000	Provinsi NTB	750 Kop	250,000,005
2.11.01.01.18.05	Penguatan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi Berprestasi	DAU	se-NTB	5 Kop	40,000,000	se-NTB	5 Kop	45,000,000
2.11.01.01.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Frekuensi koordinasi kerjasama	DAU	Provinsi NTB	2 Kali	61,311,000	Provinsi NTB	2 Kali	75,311,000
2.11.01.01.18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah KSP/USP-PS Yang dibina dan dikembangkan	DAU	Provinsi NTB	435 KSP/USP-PS	813,408,000	Provinsi NTB	440 KSP/USP-PS	890,664,003
2.11.01.01.18.10	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	DAU	se-NTB	50 Kop/KSP	142,831,000	se-NTB	60 Kop/KSP	239,269,684
2.11.01.01.18.13	Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi	Prosentase KUMKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan	DAU	Provinsi NTB	12%	101,550,000	Provinsi NTB	13%	105,749,992
2.11.01.02	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				4,317,433,035				4,401,882,024
2.11.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			284,381,840				284,383,280
2.11.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah Surat Yaang Keluar	DAU	Provinsi NTB	1000 Surat	4,475,000	Provinsi NTB	1000 Surat	4,475,000
2.11.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi Sumber Daya Air Yang Tersedia	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	40,789,000	Provinsi NTB	3 Jenis	40,789,040
2.11.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	DAU	Provinsi NTB	4 Orang	48,948,000	Provinsi NTB	4 Orang	48,948,000
2.11.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Kebersihan	DAU	Provinsi NTB	3 Orang	75,953,460	Provinsi NTB	3 Orang	75,953,960
2.11.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK Yang Tersedia	DAU	Provinsi NTB	15 Jenis	4,500,000	Provinsi NTB	15 Jenis	4,500,000
2.11.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	DAU	Provinsi NTB	5 Jenis	5,000,000	Provinsi NTB	5 Jenis	5,000,000
2.11.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	DAU	Provinsi NTB	11 Jenis	4,999,100	Provinsi NTB	11 Jenis	5,000,000
2.11.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Surat Kabar Yang Tersedia	DAU	Provinsi NTB	24 Exemplar	2,880,000	Provinsi NTB	24 Exemplar	2,880,000
2.11.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	DAU	Provinsi NTB	4 Orang	96,837,280	Provinsi NTB	4 Orang	96,837,280
2.11.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			96,237,600				113,258,748
2.11.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Yang Terpelihara	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	44,979,000	Provinsi NTB	1 Unit	48,000,000

2.11.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	DAU	Provinsi NTB	6 Unit	40,258,600	Provinsi NTB	6 Unit	40,258,750
2.11.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	DAU	Provinsi NTB	24 Unit	11,000,000	Provinsi NTB	24 Unit	24,999,998
2.11.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,823,000				10,000,000
2.11.01.02.07.71	Peningkatan Kapasitas Pengeioaian Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	9,823,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	10,000,000
2.11.01.02.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM			3,926,990,595				3,994,239,996
2.11.01.02.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha yang didiklat	DAK Non Fisik	se-NTB	400 Orang	1,212,980,400	se-NTB	440 Orang	1,224,335,301
2.11.01.02.16.07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM	Jumlah KUKM yang Didiklat	DAK Non Fisik	se-NTB	560 Orang	1,793,214,500	se-NTB	560 Orang	1,793,219,495
2.11.01.02.16.12	Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang kegiatan diklat KUMKM	Jumlah Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	DAK Non Fisik	Provinsi NTB	32 Orang	920,795,695	Provinsi NTB	32 Orang	976,685,200
2:12	PENANAMAN MODAL				3,317,134,248				3,872,177,044
2:12:01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				3,317,134,248				3,872,177,044
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				3,317,134,248				3,872,177,044
2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			881,961,554				929,907,979
2.12.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Benda Pos	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	2,589,650	Kota Mataram	2 Jenis	2,755,387
2.12.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa SDA Pendukung	DAU	Kota Mataram	4 Jenis	193,986,488	Kota Mataram	4 Jenis	206,401,623
2.12.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	DAU	Kota Mataram	25 Unit	44,022,460	Kota Mataram	25 Unit	37,788,172
2.12.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	6 Orang	53,907,000	Kota Mataram	6 Orang	57,357,048
2.12.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	6 Orang	156,648,920	Kota Mataram	6 Orang	166,674,488
2.12.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Unit	DAU	Kota Mataram	25 Unit	19,818,750	Kota Mataram	25 Unit	21,087,150
2.12.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	DAU	Kota Mataram	1 Tahun	23,809,850	Kota Mataram	1 Tahun	25,340,568
2.12.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	1 Tahun	13,654,326	Kota Mataram	1 Tahun	14,528,203
2.12.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis/Unit	DAU	Kota Mataram	4 Jenis/Unit	60,068,570	Kota Mataram	4 Jenis/Unit	63,912,958
2.12.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	7,410,000	Kota Mataram	2 Jenis	7,854,240
2.12.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	26,689,250	Kota Mataram	2 Jenis	28,397,362
2.12.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Orang	DAU	Luar Provinsi	9 OT	75,467,685	Luar Provinsi	10 OT	80,297,617
2.12.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Orang	DAU	Kota Mataram	5 Orang/Bulan	152,207,250	Kota Mataram	5 Orang/Bulan	161,949,312
2.12.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	20 OT	51,681,355	Provinsi NTB	21 OT	55,563,851
2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			119,900,438				111,896,545
2.12.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	DAU	Kota Mataram	25 Unit	85,273,000	Kota Mataram	25 Unit	90,730,977
2.12.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit	DAU	Kota Mataram	15 Unit	34,627,438	Kota Mataram	15 Unit	21,165,568
2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,182,976				16,165,641
2.12.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Tersedianya Penceramah dan Instruktur Senam	DAU	Kota Mataram	2 Orang	15,182,976	Kota Mataram	2 Orang	16,165,641
2.12.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			189,648,596				201,910,928
2.12.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	44,839,577	Kota Mataram	2 Dokumen	47,709,310
2.12.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	22,783,750	Kota Mataram	1 Laporan	24,241,910
2.12.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	69,623,217	Kota Mataram	2 Dokumen	74,079,103
2.12.01.01.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	52,402,052	Kota Mataram	2 Dokumen	55,880,605

2.12.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			20,334,377				21,649,161
2.12.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen Asset/Barang Milik Daerah	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	20,334,377	Kota Mataram	2 Dokumen	21,649,161
2.12.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi			1,323,008,211				1,504,308,312
2.12.01.01.15.01	Peningkatan kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Fasilitas Kerjasama Investasi	DAU	Provinsi NTB	10 Perusahaan	27,475,000	Provinsi NTB	10 Perusahaan	56,232,400
2.12.01.01.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Buku Potensi	DAU	Provinsi NTB	1000 Buku	247,274,800	Provinsi NTB	1000 Buku	220,578,340
2.12.01.01.15.04	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Perusahaan Bermasalah yang difasilitasi	DAU	Provinsi NTB	5 Perusahaan	75,125,000	Provinsi NTB	5 Perusahaan	126,593,190
2.12.01.01.15.05	Penyelarasan Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	178,107,121	Provinsi NTB	1 Dokumen	123,992,442
2.12.01.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	DAU	Provinsi NTB	20 Perusahaan	104,106,572	Provinsi NTB	20 Perusahaan	110,769,393
2.12.01.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Minat Pelaku Bisnis	DAU	Luar Provinsi	6 Event	498,468,936	Luar Provinsi	6 Event	565,780,914
2.12.01.01.15.12	Peningkatan Promosi Dalam Daerah	Jumlah Investor yang berinvestasi	DAU	Provinsi NTB	5 Perusahaan	192,450,782	Provinsi NTB	5 Perusahaan	300,361,633
2.12.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi			767,098,096				1,086,338,478
2.12.01.01.16.02	Peningkatan kerjasama antara dunia usaha	Jumlah Kerjasama	DAU	Provinsi NTB	10 Kerjasama	52,850,000	Provinsi NTB	10 Kerjasama	56,232,400
2.12.01.01.16.04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem	DAU	Kota Mataram	1 Sistem	50,146,000	Kota Mataram	1 Sistem	51,706,943
2.12.01.01.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	70,216,184	Provinsi NTB	4 Dokumen	74,802,588
2.12.01.01.16.06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	45,858,025	Kota Mataram	2 Dokumen	161,902,240
2.12.01.01.16.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DAU	Provinsi NTB	84 Nilai IKM	9,025,000	Provinsi NTB	85 Nilai IKM	57,224,216
2.12.01.01.16.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Perkembangan PMA PMDN	DAU	Provinsi NTB	4 Laporan	36,840,000	Provinsi NTB	4 Laporan	54,470,095
2.12.01.01.16.11	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan	DAU	Kota Mataram	360 Izin	290,162,900	Kota Mataram	370 Izin	400,000,000
2.12.01.01.16.12	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan yang diterbitkan	DAU	Kota Mataram	3510 Izin	92,000,000	Kota Mataram	3520 Izin	99,999,997
2.12.01.01.16.13	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan yang diterbitkan	DAU	Kota Mataram	30 Izin	119,999,987	Kota Mataram	35 Izin	130,000,000
2:13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				16,684,660,197				19,082,773,689
2:13:01	Dinas Pemuda dan Olahraga				16,684,660,197				19,082,773,689
2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olahraga				16,684,660,197				19,082,773,689
2.13.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,473,296,508				1,765,595,883
2.13.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kota Mataram	950 Surat	9,599,997	Kota Mataram	950 Surat	9,899,998
2.13.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	3 jenis	266,223,999	Kota Mataram	3 jenis	296,224,000
2.13.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	10 jenis	16,942,295	Kota Mataram	10 jenis	24,999,990
2.13.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	9 orang	129,632,499	Kota Mataram	9 orang	121,500,396
2.13.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	11 Orang	299,999,999	Kota Mataram	12 Orang	320,000,000
2.13.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	35 Jenis	9,272,399	Kota Mataram	35 Jenis	25,000,000
2.13.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	10 jenis	212,974,720	Kota Mataram	10 jenis	215,000,000
2.13.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	10 jenis	89,250,600	Kota Mataram	10 jenis	98,848,000
2.13.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah exemplar	P A D	Kota Mataram	1128 Exp	14,400,000	Kota Mataram	1128 Exp	29,000,000
2.13.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	P A D	se-NTB	1500 orang	29,000,000	se-NTB	1500 orang	67,999,500

2.13.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	P A D	Luar Provinsi	20 Orang	90,000,000	Luar Provinsi	20 Orang	145,124,000
2.13.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	P A D	se-NTB	75 Orang	80,000,000	se-NTB	80 Orang	160,000,000
2.13.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	11 Orang	226,000,000	Kota Mataram	12 Orang	252,000,000
2.13.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			355,093,988				378,074,000
2.13.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	1 Unit	30,144,000	Kota Mataram	1 Unit	31,000,000
2.13.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	P A D	Kota Mataram	1 Unit	100,000,000	Kota Mataram	1 Unit	100,000,000
2.13.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	18 Unit	149,999,989	Kota Mataram	19 Unit	160,000,000
2.13.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis	P A D	Kota Mataram	12 jenis	24,999,999	Kota Mataram	12 jenis	28,000,000
2.13.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	1 Unit	49,950,000	Kota Mataram	1 Unit	59,074,000
2.13.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			174,075,000				185,352,960
2.13.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang	P A D	Kota Mataram	75 Orang	174,075,000	Kota Mataram	80 Orang	185,352,960
2.13.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			268,866,001				432,374,000
2.13.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	55,000,000	Kota Mataram	2 Dokumen	58,000,000
2.13.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	3 Dokumen	213,866,001	Kota Mataram	4 Dokumen	374,374,000
2.13.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			28,377,000				30,000,000
2.13.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	28,377,000	Kota Mataram	2 Dokumen	30,000,000
2.13.01.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan			437,249,930				452,249,930
2.13.01.01.15.11	Pengembangan keterampilan pemuda	Jumlah pemuda yang diseleksi dalam KPN dan PPAN	P A D	se-NTB	70 Orang	247,249,940	se-NTB	70 Orang	247,249,940
2.13.01.01.15.12	Pengembangan pemuda pelopor	Jumlah hasil seleksi pemuda pelopor	P A D	se-NTB	15 Orang	189,999,990	se-NTB	15 Orang	204,999,990
2.13.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi			1,426,653,799				2,413,875,146
2.13.01.01.16.02	Peningkatan kapasitas pemuda	Jumlah orang	P A D	Kab. Bima,Kab. Sumbawa,se-NTB	550 Orang	1,349,403,799	Kab. Bima,Kab. Sumbawa,se-NTB	550 Orang	1,759,329,946
2.13.01.01.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah orang	P A D	se-NTB	400 Orang	77,250,000	se-NTB	400 Orang	654,545,200
2.13.01.01.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda			509,694,000				542,936,800
2.13.01.01.17.03	Penguatan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah wirausahawan muda yang dilatih	P A D	se-NTB	100 Orang	509,694,000	se-NTB	100 Orang	542,936,800
2.13.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi			6,983,494,979				7,440,996,970
2.13.01.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina	P A D	se-NTB	3 Cabor	996,399,999	se-NTB	3 Cabor	1,200,000,000
2.13.01.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah medali yang diperoleh	P A D	Kab. Sumbawa,Luar Provinsi	30 Medali	5,580,194,980	Kab. Sumbawa,Luar Provinsi	35 Medali	5,734,096,970
2.13.01.01.20.07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah event pemassalan olahraga	P A D	Kota Mataram	5 Event	406,900,000	Kota Mataram	5 Event	506,900,000
2.13.01.01.21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar			5,027,858,992				5,441,318,000
2.13.01.01.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah unit	P A D	Kota Mataram	4 Unit	533,090,000	Kota Mataram	4 Unit	633,090,000
2.13.01.01.21.09	Peningkatan Sarana Olahraga	Jumlah Jenis	P A D	Kota Mataram	12 Jenis	1,966,999,992	Kota Mataram	12 Jenis	2,100,000,000
2.13.01.01.21.10	Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Unit	P A D	se-NTB	10 Unit	1,577,769,000	se-NTB	10 Unit	1,608,228,000
2.13.01.01.21.11	Peningkatan Sarana Pemuda	Jumlah Jenis	DAU,P A D	Kota Mataram	5 Jenis	550,000,000	Kota Mataram	5 Jenis	650,000,000
2.13.01.01.21.12	Peningkatan Prasarana Pemuda	Jumlah Unit	P A D	se-NTB	10 Unit	400,000,000	se-NTB	10 Unit	450,000,000

2:14	STATISTIK				1,742,443,078				1,866,886,000
2:14:01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1,742,443,078				1,866,886,000
2.14.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1,742,443,078				1,866,886,000
2.14.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi			1,742,443,078				1,866,886,000
2.14.01.01.15.06	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	262,730,556	Provinsi NTB	4 Dokumen	479,362,008
2.14.01.01.15.07	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	263,999,498	Provinsi NTB	4 Dokumen	317,684,000
2.14.01.01.15.08	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	2 Dokumen	330,248,900	Provinsi NTB	2 Dokumen	357,500,000
2.14.01.01.15.09	Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Masyarakat yang Terlayani	DAU	Provinsi NTB	2200 Orang	232,747,700	Provinsi NTB	2400 Orang	258,499,992
2.14.01.01.15.10	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang terintegrasi	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	652,716,424	Provinsi NTB	4 Dokumen	453,840,000
2:15	PERSANDIAN				1,420,591,593				1,512,446,000
2:15:01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1,420,591,593				1,512,446,000
2.15.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1,420,591,593				1,512,446,000
2.15.01.01.16	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi			1,420,591,593				1,512,446,000
2.15.01.01.16.02	Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Kegiatan Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi di Provinsi NTB	DAU	se-NTB	10 Dokumen	214,999,993	se-NTB	10 Dokumen	216,853,000
2.15.01.01.16.04	Penguatan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	DAU	Provinsi NTB	10 Dokumen	250,000,000	Provinsi NTB	10 Dokumen	275,000,000
2.15.01.01.16.05	Pengembangan SDM Persandian	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek Persandian	DAU	Provinsi NTB	30 Aparatur	345,592,600	Provinsi NTB	45 Aparatur	365,593,000
2.15.01.01.16.06	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	DAU	Provinsi NTB	12 OPD	394,999,000	Provinsi NTB	26 OPD	420,000,000
2.15.01.01.16.07	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	DAU	Provinsi NTB	20%	215,000,000	Provinsi NTB	40%	235,000,000
2:16	KEBUDAYAAN				8,617,923,283				5,268,742,027
2:16:01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				8,617,923,283				5,268,742,027
2.16.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				5,199,538,389				5,268,742,027
2.16.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan			751,507,875				703,720,896
2.16.01.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Adat Budaya	DAU	Provinsi NTB	25 Awig-Awig	751,507,875	Provinsi NTB	25 Awig-Awig	800,648,750
2.16.01.01.16	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi			1,422,844,400				1,157,719,380
2.16.01.01.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Manuscript/Naskah Kuno yang di Dokumentasikan	DAU, P A D	Provinsi NTB	4 Manuscript	361,643,200	Provinsi NTB	3 Manuscript	327,000,000
2.16.01.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	P A D	Provinsi NTB	3 Event	601,201,200	Provinsi NTB	2 Event	467,099,172
2.16.01.01.16.22	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	Cagar budaya yang dirawat / dipugar	P A D	Provinsi NTB	4 situs	460,000,000	Provinsi NTB	4 situs	460,000,000
2.16.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni			2,820,186,114				100,000,000
2.16.01.01.17.05	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya festival seni dan budaya	P A D	Provinsi NTB	9 Festival	810,200,952	Provinsi NTB	9 Festival	862,605,837
2.16.01.01.17.11	Peningkatan teknis sanggar seni	Jumlah sanggar Seni yang difasilitasi/dibina	P A D	Provinsi NTB	9 Sanggar	292,095,162	Provinsi NTB	9 Sanggar	310,988,268
2.16.01.01.17.12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kesenian	P A D	Provinsi NTB	6 Jenis	1,717,890,000	Provinsi NTB	6 Jenis	1,835,400,000
2.16.01.01.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni			205,000,000				159,904,000

2.16.01.01.18.05	Pengembangan statistik kebudayaan dan pariwisata	jumlah dokumen statistik kebudayaan yang tersusun	DAU, P A D	Provinsi NTB	2 Dokumen	205,000,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	205,000,000
2.16.01.03	Taman Budaya				1,715,120,664				2,054,328,814
2.16.01.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan			1,470,216,364				703,720,896
2.16.01.03.15.07	Pergelaran Tetap	Jumlah pagelaran	P A D	Kota Mataram	6 Pergelaran	1,101,996,964	Kota Mataram	6 Pergelaran	1,401,543,648
2.16.01.03.15.08	Pameran Tetap	jumlah pameran	P A D	Kota Mataram	1 pameran	175,689,400	Kota Mataram	1 pameran	187,053,225
2.16.01.03.15.09	Olah Seni	Jumlah pentas seni	P A D	Kota Mataram	7 Pentas	192,530,000	Kota Mataram	7 Pentas	204,986,761
2.16.01.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni			149,297,700				100,000,000
2.16.01.03.17.08	Temu Budaya se Indonesia	Terlaksananya kegiatan Temu Karya Taman Budaya se Indonesia	P A D	Luar Provinsi	10 Pentas	149,297,700	Luar Provinsi	10 Orang	158,954,550
2.16.01.03.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni			95,606,600				159,904,000
2.16.01.03.18.03	Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	jumlah Pentas	P A D	Luar Provinsi	30 Orang	95,606,600	Luar Provinsi	30 Orang	101,790,630
2.16.01.04	Museum Negeri				1,703,264,230				2,121,344,276
2.16.01.04.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan			660,968,400				703,720,896
2.16.01.04.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Frekuensi Kegiatan Budaya	P A D	Kota Mataram	8 lomba	660,968,400	Kota Mataram	8 lomba	703,720,896
2.16.01.04.16	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi			786,635,830				1,157,719,380
2.16.01.04.16.13	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Jumlah kajian yang dilaksanakan	P A D	se-NTB	4 kajian	103,759,040	se-NTB	4 kajian	147,734,160
2.16.01.04.16.15	Perawatan/pemeliharaan preferitif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak	jumlah koleksi yang dirawat	P A D	Kota Mataram	750 koleksi	202,257,750	Kota Mataram	750 koleksi	321,807,750
2.16.01.04.16.16	Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	jumlah koleksi yang dirawat	P A D	Kota Mataram	750 koleksi	62,631,750	Kota Mataram	750 koleksi	93,299,250
2.16.01.04.16.17	Pameran keliling museum	jumlah koleksi yang dipamerkan	P A D	se-NTB	100 koleksi	103,020,700	se-NTB	100 koleksi	120,331,000
2.16.01.04.16.18	Pameran Temporer Museum	jumlah koleksi yang dipamerkan	P A D	Kota Mataram	100 koleksi	49,828,800	Kota Mataram	100 koleksi	58,375,200
2.16.01.04.16.19	Penyuluhan koleksi museum	Jumlah peserta penyuluhan	P A D	se-NTB	2000 Orang	112,936,000	se-NTB	2000 Orang	173,476,000
2.16.01.04.16.20	Renovasi Tata Pameran Tetap	jumlah tata pameran yang direnovasi	P A D	Kota Mataram	10 unit	152,201,790	Kota Mataram	10 unit	242,696,020
2.16.01.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni			100,000,000				100,000,000
2.16.01.04.17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Frekuensi seminar kebudayaan	P A D	Kota Mataram	2 kali	100,000,000	Kota Mataram	2 kali	100,000,000
2.16.01.04.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni			155,660,000				159,904,000
2.16.01.04.18.03	Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Frekuensi Pameran	P A D	Luar Provinsi	2 kali	155,660,000	Luar Provinsi	2 kali	159,904,000
2:17	PERPUSTAKAAN				6,287,649,210				7,616,347,824
2:17:01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6,287,649,210				7,616,347,824
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6,287,649,210				7,616,347,824
2.17.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,401,995,010				1,834,935,000
2.17.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar	DAU	Provinsi NTB	2 Surat	1,523,000	Provinsi NTB	2 Surat	2,500,000
2.17.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	335,600,000	Provinsi NTB	3 Jenis	351,999,000
2.17.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	DAU	Provinsi NTB	50 unit	20,250,000	Provinsi NTB	50 unit	22,500,000
2.17.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	7 Orang	70,514,000	Provinsi NTB	7 Orang	79,999,500
2.17.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	14 Orang	347,281,100	Provinsi NTB	14 Orang	360,703,000
2.17.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	20 jenis	23,500,610	Provinsi NTB	20 jenis	30,000,000
2.17.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	4 jenis	83,247,500	Provinsi NTB	4 jenis	88,234,000
2.17.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	3 jenis	7,387,000	Provinsi NTB	3 jenis	39,999,900
2.17.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksemplar	DAU	Provinsi NTB	8 eksemplar	8,400,000	Provinsi NTB	8 eksemplar	25,000,000
2.17.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1012 orang	14,025,000	Provinsi NTB	1250 orang	75,000,000

2.17.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	25 OT	85,000,000	Provinsi NTB	27 OT	270,000,000
2.17.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	5 Orang	186,200,000	Provinsi NTB	5 Orang	200,000,000
2.17.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	33 OT	50,000,000	Provinsi NTB	33 OT	99,000,000
2.17.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	7 Orang	169,066,800	Provinsi NTB	7 Orang	189,999,600
2.17.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			3,714,806,700				4,293,862,978
2.17.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	4 jenis	145,900,000	Provinsi NTB	4 jenis	157,222,000
2.17.01.01.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	DAU	Provinsi NTB	11 unit	279,999,700	Provinsi NTB	11 unit	550,000,000
2.17.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan	DAU	Provinsi NTB	51 unit	281,082,000	Provinsi NTB	51 unit	351,240,978
2.17.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	75,825,000	Provinsi NTB	2 jenis	150,000,000
2.17.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan	DAU	Provinsi NTB	4 jenis	97,000,000	Provinsi NTB	4 jenis	150,000,000
2.17.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	100,000,000	Provinsi NTB	2 jenis	200,000,000
2.17.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung	DAU	Provinsi NTB	4 gedung	2,735,000,000	Provinsi NTB	4 gedung	2,735,400,000
2.17.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35,224,000				39,612,400
2.17.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	2 orng	14,400,000	Provinsi NTB	2 orang	15,727,000
2.17.01.01.05.15	Penetapan angka kredit fungsional	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	11 orang	20,824,000	Provinsi NTB	11 orang	23,885,400
2.17.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja			191,150,000				240,934,800
2.17.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	3 jenis	53,840,000	Provinsi NTB	3 jenis	60,000,000
2.17.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis rencana kerja	DAU	Provinsi NTB	6 jenis	137,310,000	Provinsi NTB	6 jenis	180,934,800
2.17.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			22,363,500				26,044,644
2.17.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	22,363,500	Provinsi NTB	1 jenis	26,044,644
2.17.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun			922,110,000				1,180,958,002
2.17.01.01.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah event yang diselenggarakan	DAU	Provinsi NTB	2 event	53,348,000	Provinsi NTB	2 event	89,000,000
2.17.01.01.21.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pengunjung perpustakaan	DAU	Provinsi NTB	37000 orang	54,202,500	Provinsi NTB	38000 orang	54,986,000
2.17.01.01.21.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	16 OT	20,000,000	Provinsi NTB	16 OT	40,000,000
2.17.01.01.21.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	70 orang	65,666,500	Provinsi NTB	70 orang	146,972,000
2.17.01.01.21.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	100,000,000	Provinsi NTB	2 jenis	100,000,000
2.17.01.01.21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah jenis koleksi perpustakaan yang disediakan	DAU	Provinsi NTB	5 jenis	10,250,000	Provinsi NTB	5 jenis	15,000,000
2.17.01.01.21.11	Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip	Jumlah Buku Hasil Pendataan Perpustakaan	DAU	Provinsi NTB	12 eksemplar	21,661,000	Provinsi NTB	12 eksemplar	45,000,000
2.17.01.01.21.12	Peningkatan SDM Perpustakaan	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	150 orang	200,465,000	Provinsi NTB	150 orang	210,000,000
2.17.01.01.21.13	Pelestarian bahan pustaka	jumlah jenis kegiatan pelestarian bahan pustaka	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	46,850,000	Provinsi NTB	2 jenis	70,000,000
2.17.01.01.21.14	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam	jumlah judul bahan pustaka yang di KCKR	DAU	Provinsi NTB	200 judul	23,724,000	Provinsi NTB	200 judul	50,000,000
2.17.01.01.21.15	Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan	jumlah bahan pustaka yang dialih media	DAU	Provinsi NTB	500 judul	248,693,000	Provinsi NTB	500 judul	260,000,000
2.17.01.01.21.16	Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival	jumlah lomba	DAU	Provinsi NTB	6 lomba	77,250,000	Provinsi NTB	6 lomba	100,000,002
2:18	KEARSIPAN				471,383,750				451,401,000
2:18:01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				471,383,750				451,401,000
2.18.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				471,383,750				451,401,000
2.18.01.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			138,275,000				0

2.18.01.01.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	jumlah dokumen kajian	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	43,575,000	Provinsi NTB	1 dokumen	0
2.18.01.01.15.07	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	jumlah unit peralatan jaringan informasi kearsipan	DAU	Provinsi NTB	1 unit	94,700,000	Provinsi NTB	1 unit	0
2.18.01.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo			123,359,750				168,155,000
2.18.01.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah OPD yang didata dan ditata arsipnya	DAU	Provinsi NTB	10 OPD	12,661,000	Provinsi NTB	10 OPD	30,900,000
2.18.01.01.16.06	Pelaksanaan akuisisi arsip	jumlah arsip yang diakuisisi	DAU	Provinsi NTB	12000 arsip	7,185,000	Provinsi NTB	12000 arsip	30,000,000
2.18.01.01.16.07	Pengolahan arsip inaktif dan statistik hasil akuisisi	jumlah arsip yang diolah hasil akuisisi	DAU	Provinsi NTB	17000 arsip	53,864,750	Provinsi NTB	17000 arsip	54,995,000
2.18.01.01.16.08	Penilaian arsip inaktif dan statistik hasil akuisisi	jumlah arsip yang dinilai hasil akuisisi	DAU	Provinsi NTB	15000 arsip	49,649,000	Provinsi NTB	15000 arsip	52,260,000
2.18.01.01.17	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan			70,851,000				86,385,000
2.18.01.01.17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	jumlah jenis sarana	DAU	Provinsi NTB	5 jenis	70,851,000	Provinsi NTB	5 jenis	86,385,000
2.18.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi			112,251,000				155,010,000
2.18.01.01.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	jumlah unit	DAU	Provinsi NTB	1 unit	29,922,000	Provinsi NTB	1 unit	43,888,000
2.18.01.01.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	50 orang	77,075,000	Provinsi NTB	50 orang	78,622,000
2.18.01.01.18.05	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	9 OT	5,254,000	Provinsi NTB	13 OT	32,500,000
2.18.01.01.20	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD			26,647,000				41,851,000
2.18.01.01.20.01	Pembinaan dan Pengembangan model instansi/Record Center-Model	jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	8 OT	19,147,000	Provinsi NTB	8 OT	20,000,000
2.18.01.01.20.04	Monitoring dan Pengendalian Kearsipan	jumlah orang trip	DAU	Provinsi NTB	1 OT	7,500,000	Provinsi NTB	1 OT	21,851,000
3	URUSAN PILIHAN				255,483,665,464				9,984,226,276
3:01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				19,333,899,558				9,984,226,276
3:01:01	Dinas Kelautan dan Perikanan				19,333,899,558				9,984,226,276
3.01.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan (Induk)				8,198,676,644				9,984,226,276
3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			864,701,184				58,862,998
3.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	DAU	Kota Mataram	1 Tim	91,919,000	Kota Mataram	1 Tim	91,919,000
3.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kota Mataram	9 Orang	217,366,200	Kota Mataram	9 Orang	230,725,998
3.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	DAU	Kota Mataram	1 Paket	10,000,000	Kota Mataram	1 Paket	15,000,000
3.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	5,000,000	Kota Mataram	2 Jenis	8,000,000
3.01.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	DAU	Kota Mataram	5 Jenis	200,000	Kota Mataram	5 Jenis	11,500,000
3.01.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia	DAU	Kota Mataram	2 Eksemplar	200,000	Kota Mataram	2 Eksemplar	10,000,000
3.01.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan	DAU	Kota Mataram	22 Orang	182,000	Kota Mataram	25 Orang	188,000,000
3.01.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	DAU	Kota Mataram	7 Orang	269,999,996	Kota Mataram	7 Orang	277,455,997
3.01.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	DAU	Kota Mataram	32 Orang	200,000	Kota Mataram	32 Orang	70,000,000
3.01.01.01.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	DAU	Kota Mataram	3 Peralatan	2,299,998	Kota Mataram	3 Peralatan	2,299,998
3.01.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kota Mataram	11 Orang	267,333,990	Kota Mataram	11 Orang	267,333,990
3.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			430,887,400				2,798,000,316
3.01.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	DAU	Kota Mataram	1 Unit	350,000,000	Kota Mataram	0 0	0
3.01.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DAU	Kota Mataram	1 Jenis	25,887,400	Kota Mataram	5 Jenis	177,500,000
3.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	5 unit	200,000	Kota Mataram	5 unit	129,200,000

3.01.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	25,000,000	Kota Mataram	10 Jenis	45,000,000
3.01.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	15,000,000	Kota Mataram	10 Jenis	50,000,000
3.01.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Arsip Kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	14,800,000	Kota Mataram	1 Dokumen	20,000,000
3.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			23,000,000				23,000,000
3.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang difasilitasi dan dilatih	DAU	Kota Mataram	10 Orang	15,000,000	Kota Mataram	10 Orang	15,000,000
3.01.01.01.05.18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	Jumlah Kegiatan IMTAQ	DAU	Kota Mataram	20 Kali	8,000,000	Kota Mataram	20 Kali	8,000,000
3.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			248,096,492				275,157,171
3.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP dan PKRKT	DAU	Kota Mataram	2 Dokumen	20,650,000	Kota Mataram	2 Dokumen	30,000,000
3.01.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	9,000,000	Kota Mataram	1 Dokumen	10,000,000
3.01.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dokumen Renja , DPA, dan DPAP	DAU	Kota Mataram	3 Dokumen	165,103,998	Kota Mataram	3 Dokumen	165,103,998
3.01.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Tahunan Dinas	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	53,342,494	Kota Mataram	1 Laporan	70,053,173
3.01.01.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan			1,580,414,068				1,683,920,931
3.01.01.01.15.02	Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	DAU	Provinsi NTB	3 Kelompok	270,000,000	Provinsi NTB	4 Kelompok	290,000,000
3.01.01.01.15.03	Penguatan Usaha budidaya perikanan	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang diberdayakan	DAU	Provinsi NTB	4 kelompok	520,000,000	Provinsi NTB	4 kelompok	560,000,000
3.01.01.01.15.04	Penguatan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang diberdayakan	DAU	Provinsi NTB	4 kelompok	520,000,000	Provinsi NTB	4 kelompok	560,000,000
3.01.01.01.15.05	Penguatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang diberdayakan	DAU	Provinsi NTB	5 Kelompok	270,414,068	Provinsi NTB	5 Kelompok	273,920,931
3.01.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya			1,214,975,000				804,743,519
3.01.01.01.20.04	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah unit pembudidayaan ikan yang memenuhi standar dan sertifikasi CBIB	DAU	Provinsi NTB	224 unit	36,800,000	Provinsi NTB	224 unit	64,998,812
3.01.01.01.20.05	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa Barat,Kota Bima,Provinsi NTB	60 Org	1,121,375,000	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa Barat,Kota Bima,Provinsi NTB	60 Org	1,200,000,000
3.01.01.01.20.06	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	Unit Pembenihan Ikan yang memnuhi standard sertifikasi CPIB	DAU	Provinsi NTB	15 unit	56,800,000	Provinsi NTB	15 unit	100,000,000
3.01.01.01.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap			2,034,850,000				1,523,038,992
3.01.01.01.21.07	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen WKOPP yang disusun	DAU	Provinsi NTB	1 Dokumen	11,350,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	120,000,000
3.01.01.01.21.10	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah nelayan yang terlindungi	DAU	Provinsi NTB	56235 Orang	92,500,000	Provinsi NTB	60635 Orang	174,999,886
3.01.01.01.21.18	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah saran pemulihan sumberdaya ikan yang dibangun	DAU	Kab. Dompu,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Kota Bima,Provinsi NTB	10 unit	1,931,000,000	Kab. Dompu,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Kota Bima,Provinsi NTB	10 unit	2,331,000,000
3.01.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan			1,154,230,000				395,483,540

3.01.01.01.23.05	Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah SKP yang diterbitkan	DAU	Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	4 SKP	963,000,000	Kab. Sumbawa Barat,Provinsi NTB	4 SKP	1,000,000,000
3.01.01.01.23.06	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Ketersediaan Stok	DAU	Provinsi NTB	348026 Ton	32,280,000	Provinsi NTB	375597 Ton	149,998,418
3.01.01.01.23.07	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Eksposisi Hasil Kelautan dan Perikanan	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	158,950,000	Provinsi NTB	2 Jenis	210,000,000
3.01.01.01.27	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial			647,522,500				339,999,585
3.01.01.01.27.01	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif	DAU	Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	80 Kelompok	113,472,500	Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	80 Kelompok	164,715,863
3.01.01.01.27.02	Pelestarian dan Pemulihan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dicadangkan	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	251642 Ha	113,800,000	Kab. Lombok Barat,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	251642 Ha	157,500,211
3.01.01.01.27.03	Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 Kecil	Dokumen Penataan Ruang Laut	DAU	Provinsi NTB	3 Dok	420,250,000	Provinsi NTB	3 Dok	735,000,000
3.01.01.02	Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel				1,541,409,100				1,600,823,996
3.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			653,777,100				58,862,998
3.01.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Tim	31,548,000	Kab. Lombok Timur	1 Tim	32,548,000
3.01.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	10 Orang	241,783,000	Kab. Lombok Timur	10 Orang	241,783,000
3.01.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Paket	5,000,000	Kab. Lombok Timur	1 Paket	5,000,000
3.01.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Pengadaan	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	2,900,000	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	2,900,000
3.01.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	10,000,000	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	10,000,000
3.01.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	DAU	Kab. Lombok Timur	6 Orang	193,200,000	Kab. Lombok Timur	6 Orang	200,199,996
3.01.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan	DAU	Kab. Lombok Timur	6 Orang	100,000	Kab. Lombok Timur	9 Orang	9,000,000
3.01.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	7 Orang	169,246,100	Kab. Lombok Timur	7 Orang	169,247,000
3.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			113,730,000				2,798,000,316
3.01.01.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Jenis	22,930,000	Kab. Lombok Timur	1 Jenis	45,000,000
3.01.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Unit	55,800,000	Kab. Lombok Timur	1 Unit	65,800,000
3.01.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	4 unit	10,000,000	Kab. Lombok Timur	4 unit	10,000,000
3.01.01.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	5 Jenis	5,000,000	Kab. Lombok Timur	5 Jenis	5,000,000
3.01.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	10 Jenis	20,000,000	Kab. Lombok Timur	10 Jenis	20,000,000
3.01.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			8,900,000				9,100,000
3.01.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	8,900,000	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	9,349,000
3.01.01.02.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya			765,002,000				804,743,519
3.01.01.02.20.10	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	DAU	Kab. Lombok Timur	900000 Ekor	250,002,000	Kab. Lombok Timur	900000 Ekor	254,997,000
3.01.01.02.20.11	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	DAU	Kab. Lombok Timur	5000000 ekor	515,000,000	Kab. Lombok Timur	5000000 ekor	520,000,000
3.01.01.03	Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong				986,329,944				1,109,431,872

3.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			280,653,944				58,862,998
3.01.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Tim	41,240,000	Kab. Lombok Barat	1 Tim	31,540,000
3.01.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Paket	1,200,000	Kab. Lombok Barat	1 Paket	2,000,000
3.01.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	10,000,000	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	10,000,000
3.01.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	DAU	Kab. Lombok Barat	1 orang	35,000,000	Kab. Lombok Barat	1 orang	42,000,000
3.01.01.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	7 Orang	193,213,944	Kab. Lombok Barat	7 Orang	193,214,000
3.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			317,000,000				2,798,000,316
3.01.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	300,000,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	350,000,000
3.01.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	10,000,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	10,000,000
3.01.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	7,000,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	21,000,000
3.01.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			8,680,000				9,100,000
3.01.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	8,680,000	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	9,680,000
3.01.01.03.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya			379,996,000				804,743,519
3.01.01.03.20.10	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	Produksi Benih Ikan budidaya perikanan laut	DAU	Kab. Lombok Barat	613333 ekor	230,000,000	Kab. Lombok Barat	626667 ekor	259,997,872
3.01.01.03.20.11	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	produksi benih ikan buudidaya perikanan air payau	DAU	Kab. Lombok Barat	4400000 ekor	149,996,000	Kab. Lombok Barat	4800000 ekor	180,000,000
3.01.01.04	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar				77,281,800				86,282,000
3.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			63,081,800				58,862,998
3.01.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	12,000,000	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	20,000,000
3.01.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 tim	22,430,000	Kab. Lombok Timur	1 Tim	23,430,000
3.01.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat tulis Kantor yang disediakan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Paket	2,500,000	Kab. Lombok Timur	1 Paket	2,500,000
3.01.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	2,000,000	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	2,000,000
3.01.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Orang	24,151,800	Kab. Lombok Timur	1 Orang	24,152,000
3.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			5,000,000				2,798,000,316
3.01.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	1 unit	5,000,000	Kab. Lombok Timur	1 unit	5,000,000
3.01.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,200,000				9,100,000
3.01.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	9,200,000	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	9,200,000
3.01.01.05	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram				373,085,582				591,411,240
3.01.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			126,912,800				58,862,998
3.01.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	DAU	Kota Mataram	1 Tim	27,350,000	Kota Mataram	1 Tim	27,350,000
3.01.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kota Mataram	1 Orang	24,651,800	Kota Mataram	1 Orang	24,766,000
3.01.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	DAU	Kota Mataram	1 Paket	5,534,000	Kota Mataram	1 Paket	5,534,000
3.01.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	5,000,000	Kota Mataram	2 Jenis	5,000,000

3.01.01.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	DAU	Kota Mataram	1 Orang	39,720,000	Kota Mataram	1 Orang	47,000,000
3.01.01.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kota Mataram	1 Orang	24,657,000	Kota Mataram	1 Orang	24,657,000
3.01.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			21,636,000				2,798,000,316
3.01.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 Unit	8,800,000	Kota Mataram	1 Unit	14,000,000
3.01.01.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram	10 Jenis	10,000,000
3.01.01.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	7,836,000	Kota Mataram	10 JEnis	27,836,000
3.01.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			8,785,000				9,100,000
3.01.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	8,785,000	Kota Mataram	1 Laporan	9,784,700
3.01.01.05.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan			215,751,782				395,483,540
3.01.01.05.23.09	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah sampel yang diuji	DAU	Kota Mataram	60 Sampel	56,750,000	Kota Mataram	60 Sampel	210,000,000
3.01.01.05.23.10	Peningkatan Fungsi Laboratrium Penguji	Laporan Hasil Uji	DAU	Kota Mataram	20 Dokumen	159,001,782	Kota Mataram	20 Dokumen	185,483,540
3.01.01.06	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok				976,880,600				1,010,661,018
3.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			343,551,600				58,862,998
3.01.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Tim	36,285,600	Kab. Lombok Timur	1 Tim	31,286,000
3.01.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	4 Orang	105,607,000	Kab. Lombok Timur	4 Orang	105,607,000
3.01.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Paket	1,900,000	Kab. Lombok Timur	1 Paket	2,500,000
3.01.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	2,000,000	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	2,000,000
3.01.01.06.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi Teknis dan Perkantoran	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Orang	77,000,000	Kab. Lombok Timur	2 Orang	84,000,000
3.01.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	5 Orang	120,759,000	Kab. Lombok Timur	5 Orang	120,759,000
3.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			215,164,000				2,798,000,316
3.01.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DAU	Kab. Lombok Timur	20 Jenis	70,000,000	Kab. Lombok Timur	20 Jenis	70,000,000
3.01.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	2 unit	14,000,000	Kab. Lombok Timur	2 unit	14,000,000
3.01.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	10 Jenis	131,164,000	Kab. Lombok Timur	10 Jenis	131,164,000
3.01.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,345,000				9,100,000
3.01.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	9,345,000	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	9,345,000
3.01.01.06.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap			408,820,000				1,523,038,992
3.01.01.06.21.14	Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang didaratkan di pelabuhan	DAU	Kab. Lombok Timur	9727 Ton	208,820,000	Kab. Lombok Timur	9550 Ton	225,000,006
3.01.01.06.21.16	Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Usaha	Jumlah Kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan	DAU	Kab. Lombok Timur	4156 unit	200,000,000	Kab. Lombok Timur	4197 unit	215,000,013
3.01.01.07	Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya				109,340,800				113,730,000
3.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			80,238,800				58,862,998
3.01.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa tenaga adminstrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	1 tim	22,480,000	Kota Mataram	1 tim	25,200,000
3.01.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kota Mataram	1 Orang	24,758,000	Kota Mataram	1 Orang	24,758,000
3.01.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat kantor yang disediakan	DAU	Kota Mataram	1 Paket	1,000,000	Kota Mataram	1 Paket	2,500,000

3.01.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	2,000,000	Kota Mataram	2 Jenis	2,000,000
3.01.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	DAU	Kota Mataram	2 Orang	5,849,000	Kota Mataram	2 Orang	6,000,000
3.01.01.07.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	DAU	Kota Mataram	1 orang	24,151,800	Kota Mataram	1 orang	24,152,000
3.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			20,000,000				2,798,000,316
3.01.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 unit	10,000,000	Kota Mataram	1 Unit	10,000,000
3.01.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 unit	10,000,000	Kota Mataram	1 unit	10,000,000
3.01.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,102,000				9,100,000
3.01.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	9,102,000	Kota Mataram	1 Laporan	9,120,000
3.01.01.08	Pelabuhan Perikanan Teluk Santong				1,930,989,488				2,155,978,992
3.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			112,619,600				58,862,998
3.01.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	DAU	Kab. Sumbawa	1 Tim	27,000,000	Kab. Sumbawa	1 Tim	28,000,000
3.01.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	2 orang	48,303,600	Kab. Sumbawa	2 orang	48,304,000
3.01.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	DAU	Kab. Sumbawa	1 Paket	6,216,000	Kab. Sumbawa	1 Paket	6,216,000
3.01.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	DAU	Kab. Sumbawa	2 jenis	5,100,000	Kab. Sumbawa	2 jenis	5,100,000
3.01.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	DAU	Kab. Sumbawa	8 orang	26,000,000	Kab. Sumbawa	8 orang	26,000,000
3.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			257,500,000				2,798,000,316
3.01.01.08.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang dibangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 unit	190,000,000	Kab. Sumbawa	1 unit	500,000,000
3.01.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	3 unit	60,000,000	Kota Mataram	0 unit	0
3.01.01.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Sumbawa	10 jenis	7,500,000	Kab. Sumbawa	10 jenis	10,000,000
3.01.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,320,000				9,100,000
3.01.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Sumbawa	1 Laporan	9,320,000	Kab. Sumbawa	1 Laporan	9,320,000
3.01.01.08.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap			1,551,549,888				1,523,038,992
3.01.01.08.21.14	Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang didaratkan di pelabuhan	DAU	Kab. Sumbawa	2945 Ton	1,249,999,888	Kab. Sumbawa	3033 Ton	1,218,438,992
3.01.01.08.21.16	Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Usaha	Jumlah Kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan	DAU	Kab. Sumbawa	6031 unit	301,550,000	Kab. Sumbawa	6092 unit	304,600,000
3.01.01.09	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu				414,016,000				1,556,915,857
3.01.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			62,816,000				58,862,998
3.01.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	DAU	Kab. Bima	1 Tim	33,164,000	Kab. Bima	1 Tim	33,164,000
3.01.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	DAU	Kab. Bima	1 Paket	2,500,000	Kab. Bima	1 Paket	2,500,000
3.01.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis cetak dan penggandaan	DAU	Kab. Bima	2 jenis	2,000,000	Kab. Bima	2 jenis	2,000,000
3.01.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	DAU	Kab. Bima	1 orang	25,152,000	Kab. Bima	1 orang	25,152,000
3.01.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			15,000,000				2,798,000,316
3.01.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional yg dipelihara	DAU	Kab. Bima	1 unit	15,000,000	Kab. Bima	1 unit	15,000,000
3.01.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,100,000				9,100,000

3.01.01.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Bima	1 Laporan	9,100,000	Kab. Bima	1 Laporan	9,100,000
3.01.01.09.27	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial			327,100,000				339,999,585
3.01.01.09.27.06	Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing	Jumlah Operasi pengawasan dan penertiban illegal fising	DAU	Kab. Bima	10 Operasi	79,000,000	Kab. Bima	10 Operasi	120,000,000
3.01.01.09.27.07	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	jumlah/luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	DAK,DAU	Kab. Bima	64928 Ha	248,100,000	Kab. Bima	64928 Ha	1,349,999,857
3.01.01.10	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat				390,500,000				541,600,172
3.01.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			21,400,000				2,798,000,316
3.01.01.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 jenis	7,500,000	Kab. Sumbawa Barat	1 jenis	7,500,000
3.01.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang dipelihara	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 unit	13,900,000	Kab. Sumbawa Barat	1 unit	15,000,000
3.01.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,100,000				9,100,000
3.01.01.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	9,100,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	9,100,000
3.01.01.10.27	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial			360,000,000				339,999,585
3.01.01.10.27.06	Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing	Jumlah Operasi pengawasan dan penertiban illegal fishing	DAU	Kab. Sumbawa Barat	10 Operasi	150,000,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Operasi	180,000,000
3.01.01.10.27.07	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	jumlah/luas kawasan konservasi yang dikelola	DAU	Kab. Sumbawa Barat	151143 ha	210,000,000	Kab. Sumbawa Barat	164265 ha	330,000,172
3.01.01.11	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok				1,305,884,600				479,953,584
3.01.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			78,503,600				58,862,998
3.01.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	1 tim	28,200,000	Kota Mataram	1 tim	28,200,000
3.01.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	DAU	Kota Mataram	1 Orang	24,151,800	Kota Mataram	3 Orang	74,751,999
3.01.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis alat tulis kantor yang disediakan	DAU	Kota Mataram	1 Paket	1,000,000	Kota Mataram	1 Paket	1,750,000
3.01.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	1,000,000	Kota Mataram	2 Jenis	2,000,000
3.01.01.11.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga keamanan kantor	DAU	Kota Mataram	1 orang	24,151,800	Kota Mataram	1 orang	24,152,000
3.01.01.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9,000,000				9,100,000
3.01.01.11.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	DAU	Kota Mataram	1 laporan	9,000,000	Kota Mataram	1 laporan	9,100,000
3.01.01.11.27	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial			1,218,381,000				339,999,585
3.01.01.11.27.06	Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing	Jumlah operasi pengawasan dan penertiban illegal fishing	DAU	Kota Mataram	10 operasi	61,331,000	Kota Mataram	10 operasi	90,000,000
3.01.01.11.27.07	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	jumlah/luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	DAU	Kota Mataram	37643 Ha	1,157,050,000	Kota Mataram	37643 Ha	249,999,585
3.01.01.12	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar				3,029,505,000				3,661,606,833
3.01.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			51,191,000				58,862,998
3.01.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	DAU	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	26,000,000	Kab. Sumbawa Barat	2 jenis	29,999,998
3.01.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Tim	21,191,000	Kab. Sumbawa Barat	1 tim	24,863,000

3.01.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	DAU	Kab. Bima	1 Paket	2,000,000	Kab. Bima	1 Paket	2,000,000
3.01.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	DAU	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	2,000,000	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	2,000,000
3.01.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			2,304,140,000				2,798,000,316
3.01.01.12.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Unit	244,140,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Unit	750,000,000
3.01.01.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DAU	Kab. Bima	10 Jenis	1,500,000,000	Kab. Bima	10 Jenis	1,488,000,316
3.01.01.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 unit	450,000,000	Kab. Sumbawa Barat	1 unit	450,000,000
3.01.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Unit	10,000,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Unit	10,000,000
3.01.01.12.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg dipelihara	DAU	Kab. Bima	10 Jenis	100,000,000	Kab. Bima	10 Jenis	100,000,000
3.01.01.12.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya			674,174,000				804,743,519
3.01.01.12.20.10	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	produksi benih ikan budidaya perikanan laut	DAU	Kab. Sumbawa Barat	306667 ekor	500,000,000	Kab. Sumbawa Barat	313333 ekor	515,003,519
3.01.01.12.20.11	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	Produksi benih ikan budidaya perikanan payau	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1100000 ekor	174,174,000	Kab. Sumbawa Barat	1200000 ekor	289,740,000
3:02	PARIWISATA				25,128,039,453				34,299,494,978
3:02:01	Dinas Pariwisata				25,128,039,453				34,299,494,978
3.02.01.01	Dinas Pariwisata				25,128,039,453				34,299,494,978
3.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			2,294,130,560				2,635,450,973
3.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko serta paket barang penunjang surat menyurat	DAU	Kota Mataram	6000 buah	16,000,000	Kota Mataram	6500 buah	27,196,975
3.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah gedung yang difasilitasi untuk telepon, listrik, internet dan air	DAU	Kota Mataram	1 unit	200,000,000	Kota Mataram	1 unit	200,000,000
3.02.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	DAU	Kota Mataram	5 jenis	60,000,000	Kota Mataram	5 jenis	100,000,000
3.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah SPJ keuangan yang di administrasikan	DAU	Kota Mataram	600 dokumen	185,832,000	Kota Mataram	600 dokumen	199,999,998
3.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	DAU	Kota Mataram	6 orang	150,000,000	Kota Mataram	6 orang	150,000,000
3.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis atk yang tersedia	DAU	Kota Mataram	40 jenis	27,710,000	Kota Mataram	40 jenis	80,000,000
3.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar cetak dan fotocopy	DAU	Kota Mataram	100000 lembar	17,000,000	Kota Mataram	100000 lembar	80,000,000
3.02.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat dukung kelistrikan	DAU	Kota Mataram	10 jenis	32,950,000	Kota Mataram	10 jenis	50,000,000
3.02.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DAU	Kota Mataram	7 jenis	262,000,000	Kota Mataram	7 jenis	301,000,000
3.02.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran	DAU	Kota Mataram	30 exemplar	30,000,000	Kota Mataram	30 exemplar	54,000
3.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang dibeli (rapat dan tamu)	DAU	Kota Mataram	60 kegiatan	300,000,000	Kota Mataram	60 kegiatan	318,000,000
3.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinar luar daerah	DAU	Kota Mataram	60 dokumen	250,000,000	Kota Mataram	60 dokumen	43,200,000
3.02.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	DAU	Kota Mataram	8 orang	324,938,560	Kota Mataram	8 orang	336,000,000
3.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	DAU	Kota Mataram	70 dokumen	332,700,000	Kota Mataram	80 dokumen	640,000,000
3.02.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam	DAU	Kota Mataram	6 orang	105,000,000	Kota Mataram	6 orang	110,000,000
3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang berkondisi baik			319,998,400				401,880,000

3.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 unit	60,000,000	Kota Mataram	1 unit	100,000,000
3.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	26 unit	199,998,400	Kota Mataram	27 unit	230,000,000
3.02.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	120 buah	60,000,000	Kota Mataram	120 buah	71,880,000
3.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten			51,984,000				62,000,000
3.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang diberikan dukungan pendidikan dan bintek	DAU	Kota Mataram	6 orang	36,000,000	Kota Mataram	6 orang	42,000,000
3.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani	DAU	Kota Mataram	100 orang	15,984,000	Kota Mataram	100 orang	20,000,000
3.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			231,900,000				780,000,000
3.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	DAU	Kota Mataram	2 dokumen	65,800,000	Kota Mataram	2 dokumen	100,000,000
3.02.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA dan Rencana Kerja Tahunan	DAU	Kota Mataram	3 dokumen	103,000,000	Kota Mataram	3 dokumen	360,000,000
3.02.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas kedinasan	DAU	Kota Mataram	4 dokumen	63,100,000	Kota Mataram	4 dokumen	320,000,000
3.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			26,544,000				108,000,000
3.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset daerah	DAU	Kota Mataram	12 dokumen	26,544,000	Kota Mataram	12 dokumen	108,000,000
3.02.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan			2,525,822,500				3,710,000,005
3.02.01.01.15.03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah jaringan kerjasama serta media informasi	P A D	Provinsi NTB	10 media	901,432,500	Provinsi NTB	15 media	1,150,000,005
3.02.01.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Promosi Event yang dilaksanakan	P A D	Provinsi NTB	40 kegiatan	1,488,070,000	Provinsi NTB	40 kegiatan	2,500,000,000
3.02.01.01.15.07	Pengembangan statistik wisata terpadu	Jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata	DAU, P A D	Provinsi NTB	2 buku	136,320,000	Provinsi NTB	2 buku	60,000,000
3.02.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)			10,177,300,000				10,499,999,000
3.02.01.01.16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah buku dan leaflet paket wisata	DAU	Provinsi NTB	4000 exemplar	852,740,000	Provinsi NTB	4500 exemplar	999,999,000
3.02.01.01.16.12	Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota	Jumlah Sarpras pada 20 Desa Wisata	DAU	Provinsi NTB	20 paket	8,835,075,000	Provinsi NTB	20 paket	7,000,000,000
3.02.01.01.16.13	Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata	DAU, P A D	Provinsi NTB	2 dokumen	489,485,000	Provinsi NTB	2 dokumen	2,500,000,000
3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar			907,355,000				2,200,000,000
3.02.01.01.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang dilatih	DAU	Provinsi NTB	200 orang	175,025,000	Provinsi NTB	200 orang	1,000,000,000
3.02.01.01.17.10	Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya	Jumlah Pokdarwis yang diberikan penyuluhan dan pendampingan	DAU	Provinsi NTB	40 pokdarwis	732,330,000	Provinsi NTB	40 pokdarwis	1,200,000,000
3.02.01.01.18	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap			3,643,004,994				6,902,165,000
3.02.01.01.18.01	Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Jumlah event atraksi yang dikelola	DAU, P A D	Provinsi NTB	20 event	678,360,000	Provinsi NTB	20 event	1,000,000,000
3.02.01.01.18.03	Pelaksanaan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Jumlah festival atraksi budaya yang difasilitasi	P A D	Provinsi NTB	15 festival	2,445,050,000	Provinsi NTB	20 festival	4,622,165,000
3.02.01.01.18.04	Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif	Jumlah Workshop dan inovasi produk industri kreatif	DAU, P A D	Provinsi NTB	4 kali	519,594,994	Provinsi NTB	4 kali	1,280,000,000
3.02.01.01.19	Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata			4,949,999,999				7,000,000,000
3.02.01.01.19.13	Perencanaan Pengembangan Geopark	Jumlah Pengembangan Geosite di NTB yang tertata	DAU	Provinsi NTB	15 paket	4,949,999,999	Provinsi NTB	18 Paket	7,000,000,000
3:03	PERTANIAN				126,811,294,570				90,811,854,724
3:03:01	Dinas Pertanian dan Perkebunan				108,163,774,457				90,811,854,724
3.03.01.01	Dinas Pertanian dan Perkebunan				83,137,499,200				90,811,854,724
3.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1,434,308,000				739,347,000

3.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	DAU	Kota Mataram	1 tahun	2,500,000	Kota Mataram	1 tahun	2,500,000
3.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	4 jenis	190,080,000	Kota Mataram	4 Jenis	209,088,000
3.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	10 org	100,100,000	Kota Mataram	10 org	110,110,000
3.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kota Mataram	9 Org	246,798,000	Kota Mataram	9 org	271,478,700
3.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	20 Jenis	27,500,000	Kota Mataram	20 Jenis	30,250,000
3.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	2 Jenis	63,084,000	Kota Mataram	2 Jenis	69,394,000
3.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	10 Jenis	10,000,000	Kota Mataram	10 Jenis	10,000,000
3.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	DAU	Kota Mataram	20 unit	200,000,000	Kota Mataram	20 unit	200,000,000
3.03.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kota Mataram	1 tahun	6,353,000	Kota Mataram	1 tahun	6,770,000
3.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	DAU	Kota Mataram	1 tahun	41,927,000	Kota Mataram	1 tahun	44,023,000
3.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	1 tahun	150,000,000	Luar Provinsi	1 tahun	150,000,000
3.03.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	se-NTB	1 tahun	150,000,000	se-NTB	1 tahun	150,000,000
3.03.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	DAU	Kab. Bima	1 tahun	200,966,000	Kab. Bima	1 tahun	220,363,000
3.03.01.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah berkas	DAU	Kota Mataram	1 tahun	45,000,000	Kota Mataram	1 tahun	45,000,000
3.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			14,407,239,000				204,442,000
3.03.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	DAU	Kota Mataram	1 unit	13,187,407,000	Kota Mataram	0 unit	0
3.03.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kota Mataram	1 unit	500,000,000	Kota Mataram	0 unit	0
3.03.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeulair yang diadakan	DAU	Kota Mataram	1 paket	100,000,000	Kota Mataram	0 paket	0
3.03.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Kota Mataram	2 paket	40,000,000	Kota Mataram	1 paket	20,000,000
3.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kota Mataram	1 tahun	348,832,000	Kota Mataram	1 tahun	383,715,000
3.03.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	1 tahun	31,000,000	Kota Mataram	1 tahun	41,560,000
3.03.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Kota Mataram	1 Unit	200,000,000	Kota Mataram	1 unit	200,000,000
3.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			188,095,000				13,068,000
3.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	DAU	Kota Mataram	4 org	40,000,000	Kota Mataram	4 org	44,000,000
3.03.01.01.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan	DAU	Kota Mataram	1 tahun	24,530,000	Kota Mataram	1 tahun	26,983,000
3.03.01.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah pegawai	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	123,565,000	Provinsi NTB	1 tahun	124,753,000
3.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			752,921,000				26,864,000
3.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	DAU	Kota Mataram	1 lap	272,648,000	Kota Mataram	1 lap	307,900,000
3.03.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Kota Mataram	1 dok	313,700,000	Kota Mataram	1 dok	198,125,000
3.03.01.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah jenis media informasi	DAU	Kota Mataram	1 jenis	166,573,000	Kota Mataram	1 jenis	183,230,000
3.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			81,787,000				13,616,000
3.03.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan	DAU	Kota Mataram	2 lap	81,787,000	Kota Mataram	2 lap	82,564,000
3.03.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani			6,000,000,000				2,551,898,000
3.03.01.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	DAU	se-NTB	1 paket	5,000,000,000	se-NTB	1 paket	5,000,000,000
3.03.01.01.15.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah bantuan alat pengolahan hasil	DAU	Kab. Lombok Timur,se-NTB	10 unit	1,000,000,000	Kab. Lombok Timur,se-NTB	15 unit	1,500,000,000

3.03.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			60,273,149,200				1,877,589,360
3.03.01.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah prasarana dan sarana produksi	DAU	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,se-NTB	1 tahun	7,208,828,430	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,se-NTB	1 tahun	24,922,237,024
3.03.01.01.19.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Jumlah event yang diikuti	DAU	Provinsi NTB	4 event	600,000,000	Provinsi NTB	4 event	600,000,000
3.03.01.01.19.08	Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah komoditas yang dikembangkan	DAU	Kab. Lombok Timur	1 kom	395,560,000	Kab. Lombok Timur	1 kom	435,116,000
3.03.01.01.19.09	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Hortikultura	Jumlah bantuan sarana produksi	DAU	Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, se-NTB	40 Ha	1,752,923,000	Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, se-NTB	40 Ha	2,650,215,000
3.03.01.01.19.10	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah bantuan sarana produksi	DAU	Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, se-NTB	6010 Ha	6,483,003,250	Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, se-NTB	6010 Ha	7,701,214,000
3.03.01.01.19.11	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Jumlah dokumen statistik yang dibuat	DAU	Provinsi NTB	3 Lap	471,000,000	Provinsi NTB	3 lap	518,100,000
3.03.01.01.19.14	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Tanaman Pangan	Jumlah bantuan sarana produksi	DAU	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat, Kota Bima, se-NTB	1 tahun	4,429,530,000	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat, Kota Bima, se-NTB	1 tahun	4,883,660,000
3.03.01.01.19.17	Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah bantuan alat dan sarana fisik	DAU	Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, se-NTB	1 tahun	38,932,304,520	Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, se-NTB	1 tahun	39,469,506,000

3.03.01.02	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BTPP)				1,495,640,880				2,076,500,000
3.03.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			385,192,880				739,347,000
3.03.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	2,800,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	3,000,000
3.03.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	31,900,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	33,000,000
3.03.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga keuangan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	34,368,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	55,738,000
3.03.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	74,453,960	Kab. Lombok Barat	1 tahun	131,400,000
3.03.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	8,000,000
3.03.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	6,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,000,000
3.03.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	2,500,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	2,500,000
3.03.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	149,290,600	Kab. Lombok Barat	1 tahun	138,920,000
3.03.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	3,600,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	3,600,000
3.03.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	14,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	14,000,000
3.03.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	35,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	35,000,000
3.03.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	24,280,320	Kab. Lombok Barat	1 tahun	44,658,000
3.03.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			175,100,000				204,442,000
3.03.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah buah/unit	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	35,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	40,000,000
3.03.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	20,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	20,000,000
3.03.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	104,100,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	104,100,000
3.03.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	16,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	16,000,000
3.03.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			24,000,000				13,616,000
3.03.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan	DAU	Kab. Lombok Barat	2 lap	24,000,000	Kab. Lombok Barat	2 lap	25,000,000
3.03.01.02.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			911,348,000				1,877,589,360
3.03.01.02.19.07	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pertanian/Perkebunan	Jumlah kegiatan pengendalian OPT dan DPI	DAU	se-NTB	1 keg	911,348,000	se-NTB	1 keg	1,394,584,000
3.03.01.03	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)				980,135,920				1,229,308,616

3.03.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			555,946,320				739,347,000
3.03.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,249,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	8,669,000
3.03.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	68,250,000	Provinsi NTB	1 tahun	82,583,000
3.03.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	57,526,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	57,526,000
3.03.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	48,800,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	48,800,000
3.03.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	18,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	21,600,000
3.03.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	9,360,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	11,232,000
3.03.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	9,750,000	Provinsi NTB	1 tahun	12,675,000
3.03.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	165,000,000	Provinsi NTB	1 tahun	80,000,000
3.03.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	4,680,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	6,084,000
3.03.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	1 tahun	67,280,000	Luar Provinsi	1 tahun	85,920,000
3.03.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	se-NTB	1 taun	75,000,000	se-NTB	1 tahun	75,000,000
3.03.01.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	25,051,320	Kab. Lombok Barat	1 tahun	47,400,000
3.03.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			192,145,600				204,442,000
3.03.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	DAU	Provinsi NTB	1 paket	20,000,000	Provinsi NTB	1 paket	20,000,000
3.03.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	162,145,600	Kab. Lombok Barat	1 tahun	165,980,000
3.03.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	10,000,000	Provinsi NTB	1 tahun	40,500,000
3.03.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			19,460,000				13,616,000
3.03.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan	DAU	Kab. Lombok Barat	2 lap	19,460,000	Kab. Lombok Barat	2 lap	19,460,000
3.03.01.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			212,584,000				1,877,589,360
3.03.01.03.19.04	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi benih bermutu	DAU	Kab. Lombok Barat	448 ton	212,584,000	Kab. Lombok Barat	448 ton	445,879,616
3.03.01.04	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)				3,814,951,050				3,789,465,300
3.03.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1,728,261,550				739,347,000
3.03.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	500,750	Kab. Lombok Barat	1 tahun	1,375,000
3.03.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	66,500,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	73,150,000

3.03.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	41,644,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	45,808,000
3.03.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 taun	175,058,400	Kab. Lombok Barat	1 tahun	220,000,000
3.03.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	15,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	15,000,000
3.03.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	20,500,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	20,500,000
3.03.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	10,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	11,000,000
3.03.01.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan	DAK BIDANG Pertanian	Kab. Lombok Barat	1 paket	1,080,000,000	Kab. Lombok Barat	1 paket	769,012,300
3.03.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	6,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	6,000,000
3.03.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	60,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	60,000,000
3.03.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	APBD PROV.	se-NTB	1 tahun	80,000,000	se-NTB	1 tahun	80,000,000
3.03.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 tahun	173,058,400	Provinsi NTB	1 tahun	198,000,000
3.03.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			871,950,000				204,442,000
3.03.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	DAK BIDANG Pertanian	Provinsi NTB	15 paket	744,450,000	Provinsi NTB	15 paket	820,710,000
3.03.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 tahun	20,000,000	Provinsi NTB	1 tahun	20,000,000
3.03.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	APBD PROV.	Kab. Bima	1 tahun	64,000,000	Kab. Bima	1 tahun	64,040,000
3.03.01.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 tahun	43,500,000	Provinsi NTB	1 tahun	48,400,000
3.03.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			28,200,000				13,616,000
3.03.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan	APBD PROV.	Kab. Lombok Barat	2 lap	28,200,000	Kab. Lombok Barat	2 lap	31,830,000
3.03.01.04.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			1,186,539,500				1,877,589,360
3.03.01.04.19.20	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Jumlah benih yang dihasilkan	APBD PROV.,DBH-CHT	Provinsi NTB	96 ton	1,186,539,500	Provinsi NTB	96 ton	1,304,640,000
3.03.01.06	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)				1,141,071,000				1,220,837,000
3.03.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			524,056,000				739,347,000
3.03.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	960,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	1,100,000

3.03.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	32,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	34,000,000
3.03.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga admisintrasi	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	34,296,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	36,000,000
3.03.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	69,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	70,000,000
3.03.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	7,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	8,000,000
3.03.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	1,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	1,500,000
3.03.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	4,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	4,500,000
3.03.01.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	25,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	30,000,000
3.03.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	3,600,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	3,600,000
3.03.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	1 tahun	67,280,000	Luar Provinsi	1 tahun	85,920,000
3.03.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	se-NTB	1 tahun	245,000,000	se-NTB	1 tahun	245,000,000
3.03.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 orang	34,920,000	Kab. Lombok Tengah	1 orang	40,000,000
3.03.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			146,000,000				204,442,000
3.03.01.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 unit	70,000,000	Kab. Lombok Tengah	2 unit	70,000,000
3.03.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 paket	20,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 paket	20,000,000
3.03.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	21,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	22,000,000
3.03.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	35,000,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	35,000,000
3.03.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			25,000,000				26,864,000
3.03.01.06.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah media informasi	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 jenis	25,000,000	Kab. Lombok Tengah	2 jenis	25,000,000
3.03.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			24,000,000				13,616,000
3.03.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 lap	24,000,000	Kab. Lombok Tengah	2 lap	25,000,000
3.03.01.06.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			422,015,000				1,877,589,360
3.03.01.06.19.20	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Jumlah varietas yang diawasi	DAU	se-NTB	1 tahun	422,015,000	se-NTB	1 tahun	464,217,000
3.03.01.08	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)				2,666,949,547				2,878,804,000
3.03.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1,357,328,920				739,347,000

3.03.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	3,531,000	Kab. Lombok Barat	2 tahun	7,768,000
3.03.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	125,180,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	137,698,000
3.03.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	60,112,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	66,123,000
3.03.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	332,980,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	366,278,000
3.03.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	33,052,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	36,357,000
3.03.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	19,580,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	21,538,000
3.03.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	38,516,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	42,544,000
3.03.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,560,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,938,000
3.03.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat, tamu, siswa	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	468,750,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	468,750,000
3.03.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	90,160,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	90,160,000
3.03.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	P A D	se-NTB	1 tahun	33,000,000	se-NTB	1 tahun	36,300,000
3.03.01.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	144,907,920	Kab. Lombok Barat	1 tahun	164,439,000
3.03.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			252,802,627				204,442,000
3.03.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	50,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	50,000,000
3.03.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	144,540,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	154,994,000
3.03.01.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	58,262,627	Kab. Lombok Barat	1 tahun	66,426,000
3.03.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			3,600,000				26,864,000
3.03.01.08.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	P A D	Kab. Bima	2 dok	3,600,000	Kab. Bima	2 dok	3,600,000
3.03.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			12,948,000				13,616,000
3.03.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan	P A D	Kab. Lombok Barat	2 lap	12,948,000	Kab. Lombok Barat	2 lap	13,594,000
3.03.01.08.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			1,040,270,000				1,877,589,360
3.03.01.08.19.25	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Jumlah siswa yang bersekolah	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	1,040,270,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	1,144,297,000
3.03.01.09	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)				2,086,891,720				2,471,468,000
3.03.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1,147,795,000				739,347,000
3.03.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU	Kota Bima	1 tahun	3,300,000	Kota Bima	1 tahun	3,450,000

3.03.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Kota Bima	1 tahun	51,750,000	Kota Bima	1 tahun	57,504,000
3.03.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga keuangan	DAU	Kota Bima	1 tahun	50,981,000	Kota Bima	1 tahun	51,581,000
3.03.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kota Bima	1 tahun	184,707,000	Kota Bima	1 tahun	203,177,000
3.03.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kota Bima	1 tahun	21,339,000	Kota Bima	1 tahun	23,473,000
3.03.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kota Bima	1 tahun	21,656,000	Kota Bima	1 tahun	23,822,000
3.03.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Kota Bima	1 tahun	5,572,000	Kota Bima	1 tahun	6,129,000
3.03.01.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	DAK	Kota Bima	5 unit	100,000,000	Kota Bima	5 unit	100,000,000
3.03.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kota Bima	1 tahun	4,200,000	Kota Bima	1 tahun	4,392,000
3.03.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu, siswa	DAU	Kota Bima	1 tahun	464,500,000	Kota Bima	1 tahun	562,045,000
3.03.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	1 tahun	55,000,000	Luar Provinsi	1 tahun	55,000,000
3.03.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	Kota Bima	1 tahun	80,290,000	Kota Bima	1 tahun	80,290,000
3.03.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	DAU	Kota Bima	1 tahun	104,500,000	Kota Bima	1 tahun	114,950,000
3.03.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			33,805,000				204,442,000
3.03.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kota Bima	1 tahun	17,100,000	Kota Bima	1 tahun	21,250,000
3.03.01.09.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan	DAU	Kota Bima	1 tahun	16,705,000	Kota Bima	1 tahun	46,705,000
3.03.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			87,867,000				13,068,000
3.03.01.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta	DAU	Kota Bima	1 kegiatan	45,507,000	Kota Bima	1 kegiatan	47,782,000
3.03.01.09.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah kegiatan	DAU	Kota Bima	1 keg	32,360,000	Kota Bima	1 keg	32,360,000
3.03.01.09.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah Pegawai	DAU	Kota Bima	1 tahun	10,000,000	Kota Bima	1 tahun	10,000,000
3.03.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			9,500,000				26,864,000
3.03.01.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	DAU	Kota Bima	2 lap	9,500,000	Kota Bima	2 lap	9,500,000
3.03.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			16,462,000				13,616,000
3.03.01.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan	DAU	Kota Bima	2 lap	16,462,000	Kota Bima	2 lap	17,285,000
3.03.01.09.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			791,462,720				1,877,589,360
3.03.01.09.19.25	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Jumlah siswa yang bersekolah	DAU	Kota Bima	1 tahun	791,462,720	Kota Bima	1 tahun	1,000,773,000
3.03.01.10	Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan				9,042,665,900				8,305,597,000
3.03.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			842,276,000				739,347,000
3.03.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU	Kab. Bima	1 tahun	3,020,000	Kab. Bima	1 tahun	6,292,000
3.03.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	143,340,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	168,674,000

3.03.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	68,468,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	75,315,000
3.03.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	267,300,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	294,030,000
3.03.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	22,201,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	24,422,000
3.03.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	18,700,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	20,570,000
3.03.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	11,297,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	12,426,000
3.03.01.10.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 paket	100,000,000	Kab. Lombok Barat	1 paket	100,000,000
3.03.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	5,280,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	5,808,000
3.03.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu yang difasilitasi	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	4,400,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	4,840,000
3.03.01.10.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	1 tahun	66,000,000	Luar Provinsi	1 tahun	47,260,000
3.03.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	60,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	75,000,000
3.03.01.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	72,270,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	79,497,000
3.03.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,289,940,000				204,442,000
3.03.01.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	1 unit	1,375,000,000	Kab. Lombok Barat	1 unit	1,512,500,000
3.03.01.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kab. Lombok Barat	4 unit	80,000,000	Kab. Lombok Barat	2 unit	40,000,000
3.03.01.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	DAU	Kab. Lombok Barat	1 paket	666,550,000	Kab. Lombok Barat	1 paket	73,205,000
3.03.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Kab. Lombok Barat	1 paket	20,000,000	Kab. Lombok Barat	1 paket	20,000,000
3.03.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	83,490,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	91,839,000
3.03.01.10.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	64,900,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	71,390,000
3.03.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			11,880,000				13,068,000
3.03.01.10.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah pelaksanaan imtak dan olah raga	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	11,880,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	13,068,000
3.03.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			24,420,000				26,864,000
3.03.01.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	DAU	Kab. Bima	1 tahun	8,800,000	Kab. Bima	1 tahun	9,680,000
3.03.01.10.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen	DAU	Kab. Lombok Barat	2 dok	4,620,000	Kab. Lombok Barat	2 dok	5,084,000
3.03.01.10.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah jenis media	DAU	Kab. Lombok Barat	2 jenis	11,000,000	Kab. Lombok Barat	2 jenis	12,100,000
3.03.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			12,560,000				13,616,000
3.03.01.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan	DAU	Kab. Lombok Barat	2 lap	12,560,000	Kab. Lombok Barat	2 lap	13,616,000
3.03.01.10.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani			2,770,927,900				2,551,898,000
3.03.01.10.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 keg	44,235,000	Kab. Lombok Barat	1 keg	48,659,000
3.03.01.10.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	jumlah kelompok tani yang dibina/dilatih	DAU	se-NTB	10 poktan	307,672,000	se-NTB	10 poktan	589,239,000
3.03.01.10.15.08	PEKAN DAERAH (PEDA) dan PEKAN NASIONAL	Jumlah kegiatan Pekan Daerah yang dilaksanakan dan Pekan Nasional Yang diikuti	DAU	Provinsi NTB	2 keg	835,670,900	Provinsi NTB	0 keg	0
3.03.01.10.15.26	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Perkebunan	Jumlah angkatan pelatihan (1 angkatan = 30 org)	DAU	Kab. Lombok Barat	15 angk	1,583,350,000	Kab. Lombok Barat	15 angk	1,914,000,000

3.03.01.10.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang ditingkatkan Kapasitasnya			3,090,662,000				2,977,083,000
3.03.01.10.20.05	Penyusunan Program Penyuluhan	Jumlah buku	DAU	Kab. Lombok Barat	1 buku	47,925,000	Kab. Lombok Barat	1 buku	60,000,000
3.03.01.10.20.06	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kegiatan pemberdayaan penyuluh yang dilaksanakan	DAU	se-NTB	1 keg	1,644,549,000	se-NTB	1 keg	1,306,746,000
3.03.01.10.20.18	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan	Laporan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan penyuluhan	DAU	Kab. Lombok Barat	2 lap	76,564,000	Kab. Lombok Barat	2 lap	98,937,000
3.03.01.10.20.34	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyuluh yang dilatih (1 angkatan = 30 org)	DAU	Kab. Lombok Barat	12 angk	1,321,624,000	Kab. Lombok Barat	12 angk	1,511,400,000
3.03.01.11	Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan				3,797,969,240				2,821,378,360
3.03.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			521,864,240				739,347,000
3.03.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	2,822,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	3,105,000
3.03.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	79,000,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	102,600,000
3.03.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	31,416,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	74,495,000
3.03.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	125,756,600	Kab. Lombok Barat	1 tahun	254,903,000
3.03.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	10,575,000	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	10,907,000
3.03.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	11,990,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	12,100,000
3.03.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	13,090,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	13,310,000
3.03.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,312,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,693,000
3.03.01.11.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	85,500,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	92,500,000
3.03.01.11.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	1 tahun	106,100,000	Luar Provinsi	1 tahun	114,600,000
3.03.01.11.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	48,302,640	Kab. Lombok Barat	1 tahun	53,134,000
3.03.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			611,569,000				204,442,000
3.03.01.11.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung	DAK	Kab. Lombok Barat	1 paket	200,000,000	Kab. Lombok Barat	1 paket	0
3.03.01.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	DAU	Kab. Lombok Barat	2 unit	70,000,000	Kab. Lombok Barat	2 unit	70,000,000
3.03.01.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	DAK	Kab. Lombok Barat	1 paket	210,800,000	Kab. Lombok Barat	1 paket	40,000,000
3.03.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Kab. Lombok Barat	1 paket	44,829,000	Kab. Lombok Barat	0 paket	0
3.03.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	73,084,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	80,713,000
3.03.01.11.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	1 tahun	12,856,000	Kab. Lombok Barat	1 tahun	13,729,000

3.03.01.11.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar);Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering);Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan);Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering))			2,664,536,000				1,877,589,360
3.03.01.11.19.07	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pertanian/Perkebunan	Jumlah APH yang diproduksi	DAU	Kab. Lombok Barat	720 kg	662,616,000	Kab. Lombok Barat	720 kg	1,187,739,360
3.03.01.11.19.20	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Kegiatan perbenihan yang dilaksanakan	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	2,001,920,000	Provinsi NTB	1 tahun	689,850,000
3:03:02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				18,647,520,113				15,216,507,366
3.03.02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				14,220,830,018				15,216,507,366
3.03.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			997,762,539				154,886,000
3.03.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Surat Menyurat	DAU	Provinsi NTB	5000 Surat	52,618,000	Provinsi NTB	5000 Surat	57,880,000
3.03.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, tersedianya sumber daya air dan listrik	DAU	Provinsi NTB	3 Jenis	84,276,000	Provinsi NTB	3 Jenis	92,703,900
3.03.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan keuangan dinas yang akuntabel	DAU	Provinsi NTB	2 Dokumen	269,134,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	296,058,100
3.03.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	9 Orang	220,370,670	Provinsi NTB	9 Orang	220,370,670
3.03.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan aktivitas kantor	DAU	Provinsi NTB	17 Jenis	26,790,669	Provinsi NTB	17 Jenis	29,469,000
3.03.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terledianya dokumen dan arsip kegiatan dinas	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	39,016,000	Provinsi NTB	2 Jenis	42,918,000
3.03.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	Provinsi NTB	11 Jenis	6,318,000	Provinsi NTB	11 Jenis	6,949,000
3.03.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk ASN dan Mitra Kerja	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	30,800,000	Provinsi NTB	2 Jenis	34,964,000
3.03.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kegiatan	DAU	Provinsi NTB	500 Orang	16,275,000	Provinsi NTB	500 Orang	17,882,000
3.03.02.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	DAU	Luar Provinsi	14 Kali	75,625,000	Luar Provinsi	14 Kali	83,800,000
3.03.02.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	DAU	se-NTB	20 Kali	55,646,000	se-NTB	20 Kali	62,300,000
3.03.02.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor	DAU	Provinsi NTB	5 Orang	120,893,200	Provinsi NTB	5 Orang	120,893,200
3.03.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			317,632,994				38,415,000
3.03.02.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Tersedianya UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik kantor	DAU	Provinsi NTB	1 Tahun	37,633,000	Provinsi NTB	1 Tahun	40,716,298
3.03.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	DAU	Provinsi NTB	6 Unit	33,000,000	Provinsi NTB	6 Unit	35,000,000
3.03.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Provinsi NTB	25 Unit	234,999,998	Provinsi NTB	25 Unit	240,000,000
3.03.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	DAU	Provinsi NTB	14 Unit	11,999,996	Provinsi NTB	14 Unit	14,000,000
3.03.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			110,615,740				8,558,000

3.03.02.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur dinas	DAU	Provinsi NTB	190 Orang	20,544,750	Provinsi NTB	190 Orang	22,598,980
3.03.02.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN Dinas	DAU	Provinsi NTB	20 Orang	40,071,000	Provinsi NTB	20 Orang	43,658,000
3.03.02.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Meningkatnya disiplin ASN Dinas	DAU	Provinsi NTB	190 Orang	49,999,990	Provinsi NTB	190 Orang	52,000,000
3.03.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			855,200,000				19,393,000
3.03.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	186,000,000	Provinsi NTB	4 Dokumen	211,424,342
3.03.02.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD yang efektif	DAU	Provinsi NTB	4 Dokumen	260,000,000	Provinsi NTB	4 Dokumen	265,000,000
3.03.02.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya data statistik sektoral bidang peternakan	DAU	se-NTB	1 Dokumen	266,203,000	se-NTB	1 Dokumen	282,823,000
3.03.02.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersiarinya informasi pembangunan daerah	DAU	se-NTB	2 Dokumen	142,997,000	se-NTB	2 Dokumen	145,000,000
3.03.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			42,124,000				20,075,000
3.03.02.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya laporan asset yang akuntabel	DAU	Provinsi NTB	2 Dokumen	42,124,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	44,536,000
3.03.02.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS			314,113,000				334,503,362
3.03.02.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pencegahan dan pengendalian 5 PHMS	DAU	se-NTB	5 PHMS	123,685,000	se-NTB	5 PHMS	136,136,000
3.03.02.01.21.11	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	Peningkatan reproduksi ternak dan penurunan kematian pedet	DAU	se-NTB	3000 Ekor	97,999,500	se-NTB	3000 Ekor	99,999,990
3.03.02.01.21.13	Pengamatan Penyakit Hewan	Terdeteksinya penyebaran PHMS se NTB	DAU	se-NTB	1 Dokumen	92,428,500	se-NTB	1 Dokumen	98,367,372
3.03.02.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak			11,480,310,745				660,408,110
3.03.02.01.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan	DAU	Kab. Lombok Timur,se-NTB	7 Kelompok	704,393,100	Kab. Lombok Timur,se-NTB	7 Kelompok	846,318,000
3.03.02.01.22.33	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	Terjaminnya Keamanan Mutu Produk Pangan Asal Hewan	DAU	se-NTB	61 Kali	150,883,900	se-NTB	61 Kali	165,971,999
3.03.02.01.22.34	Peningkatan Pengelolaan RPH	Terlaksananya Pengelolaan RPH yang ASUH	DAU	se-NTB	61 RPH/TPH	41,026,999	se-NTB	61 RPH/TPH	45,130,000
3.03.02.01.22.35	Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak	Meningkatnya SDM Peternak	DAU	se-NTB	20 Kelompok	2,927,000,000	se-NTB	20 Kelompok	3,219,000,000
3.03.02.01.22.36	Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Menurunnya Angka Pemotongan Betina Produktif	DAU	se-NTB	6 Lokasi	29,913,000	se-NTB	6 Lokasi	32,904,000
3.03.02.01.22.38	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak	Meningkatnya populasi ternak	DAU	Kab. Bima,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Kota Bima,Kota Mataram,se-NTB	1 Tahun	7,627,093,746	Kab. Bima,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Kota Bima,Kota Mataram,se-NTB	1 Tahun	8,000,000,000
3.03.02.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan			103,071,000				109,735,514
3.03.02.01.23.16	Eksposisi hasil peternakan	Terpromosikan produk olahan hasil peternakan	DAU	Provinsi NTB	1 Kegiatan	19,900,000	Provinsi NTB	1 Kegiatan	21,800,000
3.03.02.01.23.17	Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	Terbinanya pelaku usaha pengolahan produk peternakan	DAU	se-NTB	15 Kelompok	45,900,000	se-NTB	15 Kelompok	50,500,000
3.03.02.01.23.18	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	Meningkatnya Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	DAU	se-NTB	3 Kali	37,271,000	se-NTB	3 Kali	37,435,514
3.03.02.02	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)				1,484,012,999				1,592,442,000

3.03.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			515,485,000				154,886,000
3.03.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Menyurat	P A D	Kab. Sumbawa	1000 Surat	4,942,000	Kab. Sumbawa	1000 Surat	5,436,000
3.03.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	51,522,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	57,225,000
3.03.02.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran	P A D	Kab. Sumbawa	4 Unit	2,168,000	Kab. Sumbawa	4 Unit	2,384,000
3.03.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan UPTD	P A D	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	61,350,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	67,485,000
3.03.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	P A D	Kab. Sumbawa	5 Orang	124,256,600	Kab. Sumbawa	5 Orang	124,257,000
3.03.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan ATK UPTD	P A D	Kab. Sumbawa	12 Jenis	6,478,000	Kab. Sumbawa	12 Jenis	6,479,000
3.03.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan	P A D	Kab. Sumbawa	2 Jenis	5,960,800	Kab. Sumbawa	2 Jenis	6,557,000
3.03.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya komponen instalasi	P A D	Kab. Sumbawa	2 Jenis	3,316,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	3,648,000
3.03.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kab. Sumbawa	6 Unit	330,000	Kab. Sumbawa	6 Unit	417,000
3.03.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	P A D	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,032,000	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,435,000
3.03.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makan minum	P A D	Kab. Sumbawa	150 Orang	30,450,000	Kab. Sumbawa	150 Orang	33,530,000
3.03.02.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	P A D	Kab. Sumbawa	2 Orang	70,000,000	Kab. Sumbawa	2 Orang	70,000,000
3.03.02.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan dan tersedianya dokumen	P A D	Kab. Sumbawa	1 Tahun	19,508,000	Kab. Sumbawa	1 Tahun	21,459,000
3.03.02.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya fasilitas dan keamanan kantor	P A D	Kab. Sumbawa	6 Orang	131,171,600	Kab. Sumbawa	6 Orang	131,174,000
3.03.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			45,887,000				38,415,000
3.03.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	P A D	Kab. Sumbawa	1 Unit	11,017,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	12,119,000
3.03.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor	P A D	Kab. Sumbawa	4 Unit	30,870,000	Kab. Sumbawa	4 Unit	33,977,000
3.03.02.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kab. Sumbawa	7 Unit	4,000,000	Kab. Sumbawa	7 Unit	4,411,000
3.03.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			66,661,000				8,558,000
3.03.02.02.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik	P A D	Kab. Sumbawa	24 Kegiatan	26,661,000	Kab. Sumbawa	24 Kegiatan	29,328,000
3.03.02.02.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Terselenggaranya peningkatan SDM	P A D	Kab. Sumbawa	1 Tahun	40,000,000	Kab. Sumbawa	1 Tahun	41,500,000
3.03.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			96,952,000				19,393,000
3.03.02.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen RKAP/DPAP 2019 dan laporan capaian kinerja	P A D	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	82,239,000	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	85,463,000
3.03.02.02.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan	P A D	Kab. Sumbawa	2 Jenis	14,713,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	16,184,000
3.03.02.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			17,736,000				20,075,000
3.03.02.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya dokumen asset UPTD	P A D	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	17,736,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	19,510,000
3.03.02.02.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak			741,291,999				660,408,110
3.03.02.02.22.26	Pembibitan hijauan makanan ternak Serading	Terlaksananya pengembangan hijauan	P A D	Kab. Sumbawa	20 Ha	119,212,000	Kab. Sumbawa	20 Ha	131,176,000
3.03.02.02.22.27	Pembibitan ternak sapi bali Serading	Terlaksananya pengembangan ternak bibit	P A D	Kab. Sumbawa	75 Ekor	316,569,999	Kab. Sumbawa	75 Ekor	348,227,000
3.03.02.02.22.39	Pengembangan Pakan Lokal	Tersedianya pakan lokal yang berkualitas	P A D	Kab. Sumbawa	20 Ha	42,452,000	Kab. Sumbawa	20 Ha	46,698,000

3.03.02.02.22.40	Peningkatan peran dan fungsi Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading	Terlaksananya peran dan fungsi UPTD	P A D	Kab. Sumbawa	1 Tahun	16,257,000	Kab. Sumbawa	1 Tahun	17,883,000
3.03.02.02.22.41	Pengembangan instalasi perbibitan ternak pekat Dompu	Terlaksananya pengembangan perbibitan	P A D	Kab. Dompu	40 Ha	114,964,000	Kab. Dompu	40 Ha	126,460,000
3.03.02.02.22.42	Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makanan ternak Pandai	Terlaksananya pengembangan HPT di Pandai Bima	P A D	Kab. Bima	20 Ha	131,837,000	Kab. Bima	20 Ha	145,020,000
3.03.02.03	Balai Inseminasi Buatan (BIB)				1,340,844,301				1,427,004,721
3.03.02.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			320,848,650				154,886,000
3.03.02.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kebutuhan pelayanan surat menyurat	P A D	Kab. Lombok Barat	1000 surat	1,650,000	Kab. Lombok Barat	1000 surat	1,967,000
3.03.02.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telpon	P A D	Kab. Lombok Barat	8 rekening	45,520,000	Kab. Lombok Barat	8 rekening	50,072,000
3.03.02.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Unit	5,419,000	Kab. Lombok Barat	10 Unit	5,961,000
3.03.02.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	29,834,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	33,458,000
3.03.02.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan Petugas Jasa Kebersihan	P A D	Kab. Lombok Barat	4 orang	98,662,280	Kab. Lombok Barat	4 orang	98,667,000
3.03.02.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	30 jenis	6,406,900	Kab. Lombok Barat	35 jenis	7,047,985
3.03.02.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Informasi Pelayanan UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	1000 Lembar	2,000,000	Kab. Lombok Barat	1000 Lembar	4,000,000
3.03.02.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik Bagi Kebutuhan Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	3,344,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	3,344,000
3.03.02.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Media	3,000,000	Kab. Lombok Barat	2 Media	3,000,000
3.03.02.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makan dan minum apratur dan tamu	P A D	Kab. Lombok Barat	250 orang	7,500,000	Kab. Lombok Barat	250 orang	7,500,000
3.03.02.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	P A D	se-NTB	10 OP	18,667,190	se-NTB	10 OP	31,159,240
3.03.02.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	5 orang	98,845,280	Kab. Lombok Barat	5 orang	122,856,600
3.03.02.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			29,997,461				38,415,000
3.03.02.03.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Tersedianya peralatan komputer dan elektronik	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Unit	12,997,461	Kab. Lombok Barat	1 Unit	15,000,000
3.03.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas	P A D	Kab. Lombok Barat	5 unit	5,000,000	Kab. Lombok Barat	5 unit	6,700,000
3.03.02.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Unit	12,000,000	Kab. Lombok Barat	10 Unit	14,000,000
3.03.02.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			23,248,238				8,558,000
3.03.02.03.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai - nilai keagamaan	P A D	Kab. Lombok Barat	60 Orang	7,650,000	Kab. Lombok Barat	60 Orang	7,650,000
3.03.02.03.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur bidang peternakan	P A D	Kab. Lombok Barat	2 OP	15,598,238	Kab. Lombok Barat	2 OP	16,966,896
3.03.02.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			16,788,952				19,393,000
3.03.02.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan DPA UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	2 dokumen	16,788,952	Kab. Lombok Barat	2 dokumen	25,000,000
3.03.02.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			20,961,000				20,075,000
3.03.02.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya Dokumen Asset UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	20,961,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	20,655,000
3.03.02.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak			929,000,000				660,408,110
3.03.02.03.22.10	Pembuatan mani beku	Terlaksananya pembuatan straw/ mani beku inseminasi buatan	P A D	Kab. Lombok Barat	100000 Straw	216,000,000	Kab. Lombok Barat	100000 Straw	220,000,000
3.03.02.03.22.12	Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor	Terpeliharanya ternak sapi brangus amor - amor	P A D	Kab. Lombok Barat	32 ekor	30,000,000	Kab. Lombok Barat	32 ekor	32,000,000

3.03.02.03.22.13	Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB)	Tersedianya Lab IB yang sesuai standar ISO/SNI	P A D	Kab. Lombok Barat	500 Orang	475,000,000	Kab. Lombok Barat	500 Orang	480,000,000
3.03.02.03.22.25	Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku	Terlaksananya pengujian straw / mani beku pejantan BULL	P A D	Kab. Lombok Barat	200 sampel	75,000,000	Kab. Lombok Barat	200 sampel	80,000,000
3.03.02.03.22.39	Pengembangan Pakan Lokal	Tersedianya HMT pakan ternak yang berkualitas	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Ha	133,000,000	Kab. Lombok Barat	4 Ha	140,000,000
3.03.02.04	Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)				553,207,880				609,071,000
3.03.02.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			206,194,480				154,886,000
3.03.02.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	P A D	Kab. Lombok Barat	1000 Surat	2,168,000	Kab. Lombok Barat	1000 Surat	2,384,000
3.03.02.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, listrik dan air	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Jenis	46,170,000	Kab. Lombok Barat	4 Jenis	50,787,000
3.03.02.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Jenis	14,089,000	Kab. Lombok Barat	4 Jenis	15,498,000
3.03.02.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	27,073,400	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	29,781,000
3.03.02.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Orang	79,580,660	Kab. Lombok Barat	3 Orang	88,152,000
3.03.02.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis menulis	P A D	Kab. Lombok Barat	16 Jenis	3,035,100	Kab. Lombok Barat	16 Jenis	3,340,000
3.03.02.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	2,168,000	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	2,384,000
3.03.02.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	P A D	Kab. Lombok Barat	5 Jenis	2,413,000	Kab. Lombok Barat	5 Jenis	2,654,000
3.03.02.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	1,296,000	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	1,431,000
3.03.02.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman untuk kebutuhan	P A D	Kab. Lombok Barat	250 Orang	4,050,000	Kab. Lombok Barat	250 Orang	4,471,000
3.03.02.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Orang	24,151,320	Kab. Lombok Barat	1 Orang	28,792,000
3.03.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			20,780,000				38,415,000
3.03.02.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Unit	3,360,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	3,696,000
3.03.02.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Unit	11,217,000	Kab. Lombok Barat	4 Unit	12,339,000
3.03.02.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Unit	6,203,000	Kab. Lombok Barat	2 Unit	7,153,000
3.03.02.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			18,700,000				8,558,000
3.03.02.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya peningkatan mental dan fisik ASN	P A D	Kab. Lombok Barat	12 Orang	2,200,000	Kab. Lombok Barat	12 Orang	2,504,000
3.03.02.04.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya kegiatan peningkatan SDM aparatur	P A D	Kab. Lombok Barat	12 Orang	16,500,000	Kab. Lombok Barat	12 Orang	17,000,000
3.03.02.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			16,010,000				19,393,000
3.03.02.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKAP/DPPA 2019 dan RKA	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	12,762,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	12,762,000
3.03.02.04.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi pembangunan UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	3,248,000	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	3,251,000
3.03.02.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			19,806,000				20,075,000
3.03.02.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Teridentifikasi dan terverifikasinya aset UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	19,806,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	21,787,000
3.03.02.04.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak			271,717,400				660,408,110
3.03.02.04.22.14	Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium Veteriner dan RSH	Terlaksananya pengembangan dan peran fungsi balai	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	47,687,000	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	52,456,000
3.03.02.04.22.16	Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B	Terlaksananya pelayanan laboratorium veteriner	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Dokumen	150,275,000	Kab. Lombok Barat	3 Dokumen	165,302,000

3.03.02.04.22.17	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan	Terlaksananya pelayanan Rumah Sakit Hewan	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	73,755,400	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	81,147,000
3.03.02.05	Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia				1,048,624,915				1,116,162,232
3.03.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			140,784,650				154,886,000
3.03.02.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya pelayanan surat menyurat	P A D	Kab. Lombok Barat	1000 Surat	2,063,000	Kab. Lombok Barat	1000 Surat	2,269,000
3.03.02.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan komunikasi, Listrik dan Air	P A D	Kab. Lombok Barat	1 tahun	6,493,992	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7,144,000
3.03.02.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Pemeliharaan	P A D	Kab. Lombok Barat	17 Jenis	7,956,998	Kab. Lombok Barat	17 Jenis	8,753,000
3.03.02.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	28,676,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	31,566,000
3.03.02.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	2 orang	49,717,000	Kab. Lombok Barat	2 orang	54,689,000
3.03.02.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	3,138,660	Kab. Lombok Barat	3 Jenis	3,453,000
3.03.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	3,207,000	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	3,528,000
3.03.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor BP3TR	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	3,104,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	3,414,000
3.03.02.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan perlengkapan gedung kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Paket	9,532,000	Kab. Lombok Barat	2 Paket	10,485,000
3.03.02.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Orang	26,896,000	Kab. Lombok Barat	2 Orang	29,585,000
3.03.02.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			34,199,800				38,415,000
3.03.02.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Unit	587,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	645,000
3.03.02.05.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Pengadaan Laptop (SIMDA Barang)	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Unit	8,066,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	8,873,000
3.03.02.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	P A D	Kab. Lombok Barat	6 Unit	13,182,800	Kab. Lombok Barat	6 Unit	14,501,000
3.03.02.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Unit	5,994,000	Kab. Lombok Barat	1 Unit	6,593,000
3.03.02.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Unit	6,370,000	Kab. Lombok Barat	4 Unit	7,803,000
3.03.02.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			7,779,800				8,558,000
3.03.02.05.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Orang	5,029,800	Kab. Lombok Barat	10 Orang	5,533,000
3.03.02.05.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Orang	2,750,000	Kab. Lombok Barat	10 Orang	3,025,000
3.03.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			17,630,000				19,393,000
3.03.02.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA/DPA dan RKAP/DPPA 2019	P A D	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	12,871,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	14,158,000
3.03.02.05.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan di UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	4,759,000	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	5,235,000
3.03.02.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			18,250,000				20,075,000
3.03.02.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Teridentifikasinya dan terverifikasinya Asset UPTD	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	18,250,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	20,075,000
3.03.02.05.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak			633,576,000				660,408,110
3.03.02.05.22.39	Pengembangan Pakan Lokal	Terlaksananya kegiatan pengembangan pakan olahan	P A D	Kab. Lombok Barat	10 ton	633,576,000	Kab. Lombok Barat	10 ton	660,408,110
3.03.02.05.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan			196,404,665				214,427,122
3.03.02.05.24.25	Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian	Terlaksananya pengembangan pakan ternak dan limbah pertanian	P A D	Kab. Lombok Barat	30 ton	43,698,999	Kab. Lombok Barat	30 ton	48,067,998

3.03.02.05.24.26	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	Terlaksananya Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Kegiatan	152,705,666	Kab. Lombok Barat	10 Kegiatan	166,359,124
3:04 KEHUTANAN					48,719,923,178				5,124,064,258
3:04:01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					48,719,923,178				5,124,064,258
3.04.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)				4,461,578,960				5,124,064,258
3.04.01.01.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,293,342,700				1,054,973,313
3.04.01.01.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	se-NTB	12 Lokasi	429,000,000	se-NTB	12 Lokasi	744,682,823
3.04.01.01.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Jumlah penyelesaian kasus Tipihut sampai P21	DAU	se-NTB	8 Kasus	415,478,500	se-NTB	8 Kasus	282,643,996
3.04.01.01.21.03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya	DAU	se-NTB	2 Unit	212,705,500	se-NTB	2 Unit	123,191,165
3.04.01.01.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	se-NTB	12 Lokasi	236,158,700	se-NTB	12 Lokasi	616,362,323
3.04.01.01.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			1,658,650,360				636,490,617
3.04.01.01.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah KPH yang dilakukan penataan batas	DAU	se-NTB	3 KPH	502,346,360	se-NTB	3 KPH	534,827,702
3.04.01.01.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	se-NTB	2 Ijin/ Usaha	904,145,000	se-NTB	2 Ijin/ Usaha	953,052,653
3.04.01.01.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	DAU	se-NTB	10 Unit	252,159,000	se-NTB	10 Unit	262,070,879
3.04.01.01.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			1,509,585,900				479,803,442
3.04.01.01.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	se-NTB	100000 Batang	225,717,900	se-NTB	100000 Batang	240,313,000
3.04.01.01.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	se-NTB	12 Unit	142,445,100	se-NTB	12 Unit	151,694,490
3.04.01.01.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	DAU	se-NTB	30 Kelompok	1,141,422,900	se-NTB	30 Kelompok	1,215,225,227
3.04.01.03	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA				2,642,144,500				2,616,604,402
3.04.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			169,470,721				186,578,379
3.04.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Rekening	20,000,000	Kab. Lombok Barat	1 Rekening	29,468,616
3.04.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Orang	29,355,400	Kab. Lombok Barat	2 Orang	31,253,572
3.04.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Orang	49,985,140	Kab. Lombok Barat	2 Orang	48,697,511
3.04.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	20 Jenis	4,699,000	Kab. Lombok Barat	20 Jenis	5,005,034
3.04.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	3,531,000	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	3,759,353
3.04.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	6 Jenis	3,490,600	Kab. Lombok Barat	6 Jenis	3,716,414
3.04.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	2,372,481	Kab. Lombok Barat	1 Jenis	2,525,881
3.04.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Lombok Barat	300 OH	14,037,100	Kab. Lombok Barat	300 OH	14,944,797
3.04.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	21,133,208

3.04.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Lombok Barat	12 OT	18,000,000	Kab. Lombok Barat	20 OT	16,923,405
3.04.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			158,780,827				278,031,052
3.04.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Unit	119,338,928	Kab. Lombok Barat	1 Unit	134,148,088
3.04.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	12 Unit	31,849,999	Kab. Lombok Barat	12 Unit	26,816,441
3.04.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	20 Unit	7,591,900	Kab. Lombok Barat	20 Unit	8,082,820
3.04.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			8,121,600				7,442,538
3.04.01.03.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Lombok Barat	12 Kali	8,121,600	Kab. Lombok Barat	12 Kali	8,646,934
3.04.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			33,531,600				40,492,201
3.04.01.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	11,942,200	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	12,730,442
3.04.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	21,589,400	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	22,985,521
3.04.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			6,880,000				15,769,155
3.04.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	6,880,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	7,325,056
3.04.01.03.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			807,503,420				1,054,973,313
3.04.01.03.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Lombok Barat	30 Lokasi	807,503,420	Kab. Lombok Barat	24 Lokasi	679,887,623
3.04.01.03.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			1,010,576,584				636,490,617
3.04.01.03.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	1,010,576,584	Kab. Lombok Barat,Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	1,073,574,969
3.04.01.03.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			447,279,748				479,803,442
3.04.01.03.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Lombok Barat	125000 Batang	382,733,748	Kab. Lombok Barat	125000 Batang	401,360,000
3.04.01.03.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Unit	64,546,000	Kab. Lombok Barat	2 Unit	63,618,717
3.04.01.04	Balai KPH Rinjani Barat				3,536,643,269				3,986,542,298
3.04.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			101,262,575				186,578,379
3.04.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Lombok Barat	4 Orang	2,170,000	Kab. Lombok Barat	4 Orang	48,469,980
3.04.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Orang	49,952,640	Kab. Lombok Barat	2 Orang	44,676,645
3.04.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	16 Jenis	10,245,000	Kab. Lombok Barat	16 Jenis	10,916,017
3.04.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	4 Jenis	1,200,000	Kab. Lombok Barat	4 Jenis	12,629,407
3.04.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	7,730,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	8,553,140

3.04.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	5,464,935	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	5,977,919
3.04.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	5 OT	25,343,010
3.04.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Lombok Barat	12 OT	500,000	Kab. Lombok Barat	30 OT	25,343,010
3.04.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			387,720,000				278,031,052
3.04.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Unit	256,547,500	Kab. Lombok Barat	2 Unit	273,217,565
3.04.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Unit	105,172,500	Kab. Lombok Barat	1 Unit	135,407,218
3.04.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Barat	24 Unit	26,000,000	Kab. Lombok Barat	24 Unit	88,405,849
3.04.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			13,750,000				7,442,538
3.04.01.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Lombok Barat	24 Kali	13,750,000	Kab. Lombok Barat	24 Kali	14,650,112
3.04.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			13,075,000				40,492,201
3.04.01.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	10,875,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	11,796,961
3.04.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	2,200,000	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	24,864,776
3.04.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			8,208,000				15,769,155
3.04.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	8,208,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	8,782,826
3.04.01.04.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,614,119,240				1,054,973,313
3.04.01.04.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Lombok Utara	62 Lokasi	1,586,006,840	Kab. Lombok Utara	60 Lokasi	1,701,036,034
3.04.01.04.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Lombok Utara	5 Titik	28,112,400	Kab. Lombok Utara	10 Titik	59,876,187
3.04.01.04.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			1,266,705,620				636,490,617
3.04.01.04.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Lombok Utara	4 Ijin/ Usaha	1,266,705,620	Kab. Lombok Utara	4 Ijin/ Usaha	1,346,269,141
3.04.01.04.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			131,802,834				479,803,442
3.04.01.04.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Lombok Utara	50000 Batang	131,802,834	Kab. Lombok Utara	50000 Batang	140,326,500
3.04.01.05	Balai KPH Ampang Riwo				2,790,673,149				3,150,528,211
3.04.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			190,710,940				186,578,379
3.04.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Dompu	1 Rekening	21,150,000	Kab. Dompu	1 Rekening	22,564,540
3.04.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Dompu	2 Orang	30,692,000	Kab. Dompu	2 Orang	32,684,905
3.04.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Dompu	2 Orang	49,997,140	Kab. Dompu	2 Orang	42,796,126

3.04.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Dompu	10 Jenis	6,543,800	Kab. Dompu	10 Jenis	6,967,896
3.04.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Dompu	1 Jenis	1,580,000	Kab. Dompu	1 Jenis	1,683,921
3.04.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Dompu	1 Jenis	1,108,000	Kab. Dompu	1 Jenis	1,180,429
3.04.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Dompu	275 OH	13,640,000	Kab. Dompu	275 OH	14,523,817
3.04.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	5 OT	30,000,000	Luar Provinsi	7 OT	33,804,713
3.04.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Dompu	12 OT	36,000,000	Kab. Dompu	25 OT	42,224,317
3.04.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			285,425,000				278,031,052
3.04.01.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Dompu	2 Unit	221,925,000	Kab. Dompu	2 Unit	250,441,141
3.04.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Dompu	14 Unit	63,500,000	Kab. Dompu	14 Unit	53,464,490
3.04.01.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			2,056,000				7,442,538
3.04.01.05.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Dompu	4 Kali	2,056,000	Kab. Dompu	4 Kali	2,189,097
3.04.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			34,301,000				40,492,201
3.04.01.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Dompu	1 Dokumen	10,257,000	Kab. Dompu	1 Dokumen	10,920,227
3.04.01.05.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Dompu	2 Dokumen	24,044,000	Kab. Dompu	2 Dokumen	25,599,808
3.04.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			16,799,000				15,769,155
3.04.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Dompu	1 Dokumen	16,799,000	Kab. Dompu	1 Dokumen	17,895,449
3.04.01.05.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			773,518,920				1,054,973,313
3.04.01.05.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Dompu	26 Lokasi	746,424,820	Kab. Dompu	35 Lokasi	966,867,658
3.04.01.05.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Dompu	5 Titik	27,094,100	Kab. Dompu	6 Titik	34,617,373
3.04.01.05.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			994,054,000				636,490,617
3.04.01.05.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Dompu	3 Ijin/ Usaha	994,054,000	Kab. Dompu	3 Ijin/ Usaha	1,049,058,553
3.04.01.05.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			493,808,289				479,803,442
3.04.01.05.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Dompu	125000 Batang	343,808,760	Kab. Dompu	125000 Batang	366,043,750
3.04.01.05.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Dompu	5 Unit	149,999,529	Kab. Dompu	5 Unit	175,000,000
3.04.01.06	Balai KPH Tambora				3,143,699,304				3,083,608,938
3.04.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			221,672,715				186,578,379
3.04.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Dompu	1 Rekening	5,140,375	Kab. Dompu	1 Rekening	5,472,743

3.04.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Dompu	5 Orang	62,676,000	Kab. Dompu	5 Orang	66,730,419
3.04.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Dompu	1 Orang	25,000,000	Kab. Dompu	1 Orang	23,336,046
3.04.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Dompu	14 Jenis	9,359,000	Kab. Dompu	14 Jenis	9,966,286
3.04.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Dompu	2 Jenis	1,522,340	Kab. Dompu	2 Jenis	1,620,774
3.04.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Dompu	160 OH	7,975,000	Kab. Dompu	160 OH	8,503,800
3.04.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	21,217,404
3.04.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Dompu	12 OT	36,000,000	Kab. Dompu	35 OT	63,315,427
3.04.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Dompu	2 Orang	50,000,000	Kab. Dompu	2 Orang	40,668,913
3.04.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			205,297,789				278,031,052
3.04.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kab. Dompu	1 Unit	169,762,000	Kab. Dompu	1 Unit	187,420,400
3.04.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Dompu	6 Unit	30,000,000	Kab. Dompu	6 Unit	25,258,814
3.04.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Dompu	4 Unit	5,535,789	Kab. Dompu	4 Unit	5,893,723
3.04.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			20,087,000				7,442,538
3.04.01.06.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Dokumen Anjab pegawai Dinas LHK yang tersusun	DAU	Kab. Dompu	1 Dokumen	20,087,000	Kab. Dompu	1 Dokumen	21,385,796
3.04.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			63,107,600				40,492,201
3.04.01.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Dompu	1 Dokumen	22,736,000	Kab. Dompu	1 Dokumen	24,206,363
3.04.01.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Dompu	2 Dokumen	40,371,600	Kab. Dompu	2 Dokumen	42,982,082
3.04.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			16,211,000				15,769,155
3.04.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Dompu	1 Dokumen	16,211,000	Kab. Dompu	1 Dokumen	17,260,190
3.04.01.06.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,165,503,600				1,054,973,313
3.04.01.06.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Dompu	40 Lokasi	1,138,407,800	Kab. Dompu	35 Lokasi	958,494,361
3.04.01.06.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Dompu	5 Titik	27,095,800	Kab. Dompu	6 Titik	34,617,373
3.04.01.06.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			988,180,000				636,490,617
3.04.01.06.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Bima	3 Ijin/ Usaha	988,180,000	Kab. Bima	3 Ijin/ Usaha	1,042,861,808
3.04.01.06.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			463,639,600				479,803,442

3.04.01.06.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Bima	125000 Batang	399,093,600	Kab. Bima	125000 Batang	418,777,500
3.04.01.06.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Bima	2 Unit	64,546,000	Kab. Bima	2 Unit	63,618,717
3.04.01.07	Balai KPH Maria Donggomasa				3,605,200,716				3,534,494,587
3.04.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			241,981,102				186,578,379
3.04.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kota Bima	2 Rekening	27,744,000	Kota Bima	2 Rekening	38,561,789
3.04.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kota Bima	3 Orang	36,061,600	Kota Bima	3 Orang	38,393,397
3.04.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kota Bima	1 Orang	25,000,000	Kota Bima	1 Orang	25,245,191
3.04.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kota Bima	15 Jenis	9,822,862	Kota Bima	15 Jenis	10,457,991
3.04.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kota Bima	3 Jenis	9,134,000	Kota Bima	3 Jenis	9,724,643
3.04.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kota Bima	7 Jenis	5,417,000	Kota Bima	7 Jenis	5,767,429
3.04.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kota Bima	2 Jenis	7,117,400	Kota Bima	2 Jenis	7,577,644
3.04.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kota Bima	230 OH	11,684,400	Kota Bima	230 OH	12,439,966
3.04.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	21,722,580
3.04.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kota Bima	12 OT	36,000,000	Kota Bima	25 OT	45,146,147
3.04.01.07.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kota Bima	2 Orang	49,999,840	Kota Bima	2 Orang	41,721,364
3.04.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			236,431,116				278,031,052
3.04.01.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kota Bima	1 Unit	145,290,800	Kota Bima	1 Unit	168,392,093
3.04.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kota Bima	1 Unit	24,411,200	Kota Bima	1 Unit	25,989,636
3.04.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kota Bima	14 Unit	61,549,200	Kota Bima	14 Unit	51,822,667
3.04.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kota Bima	3 Unit	5,179,916	Kota Bima	3 Unit	5,514,841
3.04.01.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			19,454,200				7,442,538
3.04.01.07.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kota Bima	24 Kali	19,454,200	Kota Bima	24 Kali	20,712,228
3.04.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			35,573,600				40,492,201
3.04.01.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kota Bima	1 Dokumen	9,555,400	Kota Bima	1 Dokumen	10,173,408
3.04.01.07.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kota Bima	2 Dokumen	26,018,200	Kota Bima	2 Dokumen	27,700,499
3.04.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			15,068,418				15,769,155
3.04.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kota Bima	1 Dokumen	15,068,418	Kota Bima	1 Dokumen	16,042,715
3.04.01.07.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,371,707,280				1,054,973,313
3.04.01.07.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Bima	49 Lokasi	1,344,611,480	Kab. Bima	40 Lokasi	1,132,109,876
3.04.01.07.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Bima	5 Titik	27,095,800	Kab. Bima	6 Titik	34,617,373

3.04.01.07.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			1,056,990,800				636,490,617
3.04.01.07.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Bima	3 Ijin/ Usaha	1,056,990,800	Kab. Bima	3 Ijin/ Usaha	1,116,062,609
3.04.01.07.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			627,994,200				479,803,442
3.04.01.07.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Bima	230000 Batang	627,994,200	Kab. Bima	230000 Batang	668,598,500
3.04.01.08	Balai KPH Rinjani Timur				2,957,467,992				2,916,503,304
3.04.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			169,786,292				186,578,379
3.04.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Rekening	24,349,992	Kab. Lombok Timur	1 Rekening	25,932,382
3.04.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Lombok Timur	3 Orang	35,257,200	Kab. Lombok Timur	3 Orang	37,670,153
3.04.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Orang	24,998,980	Kab. Lombok Timur	1 Orang	21,723,422
3.04.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Timur	8 Jenis	4,767,000	Kab. Lombok Timur	8 Jenis	5,076,095
3.04.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Jenis	1,880,000	Kab. Lombok Timur	1 Jenis	2,020,705
3.04.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	956,800	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	1,018,772
3.04.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Lombok Timur	200 OH	10,625,000	Kab. Lombok Timur	200 OH	11,471,712
3.04.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	21,133,208
3.04.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Lombok Timur	12 OT	18,000,000	Kab. Lombok Timur	25 OT	21,133,208
3.04.01.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Orang	24,951,320	Kab. Lombok Timur	1 Orang	20,428,748
3.04.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			272,900,000				278,031,052
3.04.01.08.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Unit	231,700,000	Kab. Lombok Timur	2 Unit	260,785,026
3.04.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	8 Unit	35,400,000	Kab. Lombok Timur	8 Unit	30,100,087
3.04.01.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Lombok Timur	4 Unit	5,800,000	Kab. Lombok Timur	4 Unit	6,356,802
3.04.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			27,280,600				40,492,201
3.04.01.08.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Lombok Timur	3 Dokumen	27,280,600	Kab. Lombok Timur	3 Dokumen	32,963,005
3.04.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			15,613,800				15,769,155
3.04.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	15,613,800	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	16,630,993
3.04.01.08.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,213,478,000				1,054,973,313
3.04.01.08.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Lombok Timur	40 Lokasi	1,186,382,400	Kab. Lombok Timur	35 Lokasi	998,888,594

3.04.01.08.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Lombok Timur	5 Titik	27,095,600	Kab. Lombok Timur	6 Titik	34,617,373
3.04.01.08.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			621,994,300				636,490,617
3.04.01.08.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Lombok Timur	2 Ijin/ Usaha	621,994,300	Kab. Lombok Timur	2 Ijin/ Usaha	659,870,520
3.04.01.08.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			636,415,000				479,803,442
3.04.01.08.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Lombok Timur	125000 Batang	336,815,000	Kab. Lombok Timur	125000 Batang	358,682,500
3.04.01.08.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Lombok Timur	10 Unit	299,600,000	Kab. Lombok Timur	10 Unit	350,000,000
3.04.01.09	Balai KPH Sejorong Mataiyang				2,850,864,660				2,819,392,327
3.04.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			228,295,140				186,578,379
3.04.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti	DAU	Kab. Sumbawa Barat	600 Lembar	3,005,000	Kab. Sumbawa Barat	600 Lembar	3,199,452
3.04.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Rekening	20,600,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Rekening	21,975,168
3.04.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa Barat	7 Orang	79,065,000	Kab. Sumbawa Barat	7 Orang	85,513,715
3.04.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa Barat	2 Orang	49,999,640	Kab. Sumbawa Barat	2 Orang	42,938,502
3.04.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa Barat	12 Jenis	7,797,000	Kab. Sumbawa Barat	12 Jenis	8,311,834
3.04.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	3,341,100	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	3,557,283
3.04.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa Barat	3 Jenis	2,387,400	Kab. Sumbawa Barat	3 Jenis	2,541,879
3.04.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa Barat	250 OH	12,230,000	Kab. Sumbawa Barat	250 OH	13,155,633
3.04.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	22,290,000	Luar Provinsi	5 OT	25,343,010
3.04.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa Barat	12 OT	27,580,000	Kab. Sumbawa Barat	12 OT	21,133,208
3.04.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			172,145,801				278,031,052
3.04.01.09.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Unit	114,287,401	Kab. Sumbawa Barat	1 Unit	134,148,088
3.04.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa Barat	12 Unit	56,000,000	Kab. Sumbawa Barat	12 Unit	47,149,786
3.04.01.09.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa Barat	2 Unit	1,858,400	Kab. Sumbawa Barat	2 Unit	1,978,607

3.04.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			24,352,000				40,492,201
3.04.01.09.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa Barat	2 Dokumen	24,352,000	Kab. Sumbawa Barat	2 Dokumen	25,928,594
3.04.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			15,735,500				15,769,155
3.04.01.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,735,500	Kab. Sumbawa Barat	1 Dokumen	16,762,170
3.04.01.09.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			984,460,700				1,054,973,313
3.04.01.09.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Sumbawa Barat	30 Lokasi	957,479,600	Kab. Sumbawa Barat	30 Lokasi	806,213,855
3.04.01.09.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Sumbawa Barat	5 Titik	26,981,100	Kab. Sumbawa Barat	6 Titik	34,617,373
3.04.01.09.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			1,139,055,879				636,490,617
3.04.01.09.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Sumbawa Barat	3 Ijin/ Usaha	1,139,055,879	Kab. Sumbawa Barat	3 Ijin/ Usaha	1,223,561,200
3.04.01.09.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			286,819,640				479,803,442
3.04.01.09.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa Barat	50000 Batang	131,030,000	Kab. Sumbawa Barat	50000 Batang	140,326,500
3.04.01.09.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa Barat	5 Unit	155,789,640	Kab. Sumbawa Barat	5 Unit	161,036,473
3.04.01.10	Balai KPH Batu Lanteh				2,722,743,910				3,066,965,123
3.04.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			239,946,760				186,578,379
3.04.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa	1 Rekening	16,080,000	Kab. Sumbawa	1 Rekening	17,175,994
3.04.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa	4 Orang	54,242,400	Kab. Sumbawa	4 Orang	47,501,978
3.04.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,999,120	Kab. Sumbawa	1 Orang	23,560,428
3.04.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	16 Jenis	9,151,700	Kab. Sumbawa	16 Jenis	10,594,304
3.04.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	3,227,800	Kab. Sumbawa	2 Jenis	3,537,076
3.04.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	20 Jenis	13,000,000	Kab. Sumbawa	20 Jenis	16,950,685
3.04.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Jenis	2,501,800	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,293,998
3.04.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa	225 OH	12,750,000	Kab. Sumbawa	225 OH	11,985,307
3.04.01.10.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	6 OT	29,552,812
3.04.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa	12 OT	29,997,800	Kab. Sumbawa	25 OT	42,519,004

3.04.01.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,999,620	Kab. Sumbawa	1 Orang	20,839,633
3.04.01.10.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	Tenaga pendukung kegiatan dinas tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,996,520	Kab. Sumbawa	1 Orang	20,839,633
3.04.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			377,624,600				278,031,052
3.04.01.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	164,324,600	Kab. Sumbawa	2 Unit	268,296,175
3.04.01.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAU	Kab. Sumbawa	3 Unit	107,450,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	30,142,185
3.04.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	20 Unit	92,500,000	Kab. Sumbawa	20 Unit	77,881,343
3.04.01.10.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	6 Unit	13,350,000	Kab. Sumbawa	12 Unit	25,721,892
3.04.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			52,758,200				40,492,201
3.04.01.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	21,458,200	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	24,974,905
3.04.01.10.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	31,300,000	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	31,194,635
3.04.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			19,553,000				15,769,155
3.04.01.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	19,553,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	20,817,473
3.04.01.10.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			798,105,640				1,054,973,313
3.04.01.10.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Sumbawa	27 Lokasi	769,864,240	Kab. Sumbawa	30 Lokasi	960,289,337
3.04.01.10.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Sumbawa	5 Titik	28,241,400	Kab. Sumbawa	12 Titik	76,705,124
3.04.01.10.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			771,645,400				636,490,617
3.04.01.10.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	771,645,400	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	819,194,986
3.04.01.10.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			463,110,310				479,803,442
3.04.01.10.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa	100000 Batang	318,196,801	Kab. Sumbawa	125000 Batang	418,777,500
3.04.01.10.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa	4 Unit	144,913,509	Kab. Sumbawa	2 Unit	63,618,717
3.04.01.11	Balai KPH Ampang Plampang				2,778,684,969				2,637,159,166
3.04.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			152,254,420				186,578,379
3.04.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa	1 Rekening	15,300,000	Kab. Sumbawa	1 Rekening	16,334,033
3.04.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa	2 Orang	31,198,000	Kab. Sumbawa	2 Orang	33,236,726
3.04.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,818,920	Kab. Sumbawa	1 Orang	21,777,156
3.04.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	7 Jenis	4,527,000	Kab. Sumbawa	7 Jenis	4,833,021
3.04.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	3 Jenis	5,352,500	Kab. Sumbawa	3 Jenis	5,700,072

3.04.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	2,007,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	2,138,580
3.04.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,190,000	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,546,587
3.04.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa	230 OH	11,365,000	Kab. Sumbawa	230 OH	12,103,182
3.04.01.11.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	23,498,500	Luar Provinsi	4 OT	21,217,404
3.04.01.11.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa	12 OT	29,997,500	Kab. Sumbawa	6 OT	12,797,799
3.04.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			211,301,075				278,031,052
3.04.01.11.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	169,001,075	Kab. Sumbawa	1 Unit	189,348,489
3.04.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	10 Unit	42,300,000	Kab. Sumbawa	10 Unit	35,614,928
3.04.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			20,245,172				40,492,201
3.04.01.11.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	20,245,172	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	21,554,188
3.04.01.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			13,350,000				15,769,155
3.04.01.11.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	13,350,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	15,618,367
3.04.01.11.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,318,404,900				1,054,973,313
3.04.01.11.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Sumbawa	45 Lokasi	1,291,349,400	Kab. Sumbawa	40 Lokasi	1,087,294,611
3.04.01.11.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Sumbawa	5 Titik	27,055,500	Kab. Sumbawa	6 Titik	34,617,373
3.04.01.11.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			599,604,270				636,490,617
3.04.01.11.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Sumbawa	2 Ijin/ Usaha	599,604,270	Kab. Sumbawa	2 Ijin/ Usaha	636,030,435
3.04.01.11.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			463,525,132				479,803,442
3.04.01.11.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa	125000 Batang	399,089,000	Kab. Sumbawa	125000 Batang	418,777,500
3.04.01.11.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa	2 Unit	64,436,132	Kab. Sumbawa	2 Unit	63,618,717
3.04.01.12	Balai KPH Orong Telu				2,926,169,028				3,314,163,197
3.04.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			202,337,540				186,578,379
3.04.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa	1 Rekening	22,920,000	Kab. Sumbawa	1 Rekening	24,416,854
3.04.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa	4 Orang	49,366,000	Kab. Sumbawa	4 Orang	52,566,455
3.04.01.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,995,420	Kab. Sumbawa	1 Orang	21,747,182
3.04.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	6 Jenis	4,209,600	Kab. Sumbawa	6 Jenis	4,482,092

3.04.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	2,868,500	Kab. Sumbawa	2 Jenis	3,059,263
3.04.01.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	10 Jenis	7,916,700	Kab. Sumbawa	10 Jenis	8,429,877
3.04.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,250,000	Kab. Sumbawa	1 Jenis	4,588,685
3.04.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa	130 OH	6,812,500	Kab. Sumbawa	130 OH	7,261,909
3.04.01.12.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	21,890,972
3.04.01.12.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa	12 OT	30,000,000	Kab. Sumbawa	25 OT	42,603,200
3.04.01.12.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,998,820	Kab. Sumbawa	1 Orang	20,671,241
3.04.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			289,136,000				278,031,052
3.04.01.12.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	161,790,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	187,420,400
3.04.01.12.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	28,390,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	30,226,381
3.04.01.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	15 Buah	33,196,000	Kab. Sumbawa	15 Buah	35,557,674
3.04.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	15 Unit	65,100,000	Kab. Sumbawa	15 Unit	57,312,249
3.04.01.12.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	3 Unit	660,000	Kab. Sumbawa	3 Unit	3,157,352
3.04.01.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			7,800,000				7,442,538
3.04.01.12.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Sumbawa	12 Kali	7,800,000	Kab. Sumbawa	12 Kali	8,561,643
3.04.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			25,430,400				40,492,201
3.04.01.12.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	5,400	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	8,001,319
3.04.01.12.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	25,425,000	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	27,069,029
3.04.01.12.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			17,388,700				15,769,155
3.04.01.12.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	17,388,700	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	18,521,446
3.04.01.12.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			975,494,300				1,054,973,313
3.04.01.12.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Sumbawa	35 Lokasi	946,027,400	Kab. Sumbawa	35 Lokasi	1,005,818,720
3.04.01.12.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Sumbawa	5 Titik	29,466,900	Kab. Sumbawa	16 Titik	100,394,524
3.04.01.12.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			959,729,700				636,490,617
3.04.01.12.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	959,729,700	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	1,142,492,112
3.04.01.12.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			448,852,388				479,803,442

3.04.01.12.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa	50000 Batang	131,768,668	Kab. Sumbawa	50000 Batang	140,326,500
3.04.01.12.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa	20 Unit	317,083,720	Kab. Sumbawa	20 Unit	337,586,120
3.04.01.13	Balai KPH Ropang				2,616,696,905				3,239,759,843
3.04.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			159,782,632				186,578,379
3.04.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa	3 Rekening	403,800	Kab. Sumbawa	3 Rekening	45,465,865
3.04.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa	4 Orang	470,000	Kab. Sumbawa	4 Orang	51,004,281
3.04.01.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,999,020	Kab. Sumbawa	1 Orang	21,012,235
3.04.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	10 Jenis	4,427,800	Kab. Sumbawa	10 Jenis	4,715,821
3.04.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	4 Jenis	6,724,300	Kab. Sumbawa	4 Jenis	7,161,716
3.04.01.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	8 Jenis	6,346,400	Kab. Sumbawa	8 Jenis	6,762,795
3.04.01.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Jenis	3,240,000	Kab. Sumbawa	1 Jenis	3,452,038
3.04.01.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa	185 OH	9,173,500	Kab. Sumbawa	185 OH	9,766,742
3.04.01.13.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	17,154,944
3.04.01.13.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,999,920	Kab. Sumbawa	1 Orang	20,502,849
3.04.01.13.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa	12 OT	29,997,972	Kab. Sumbawa	25 OT	42,182,219
3.04.01.13.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,999,920	Kab. Sumbawa	1 Orang	20,502,849
3.04.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			215,677,253				278,031,052
3.04.01.13.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	161,113,253	Kab. Sumbawa	1 Unit	189,348,489
3.04.01.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAK,DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	28,310,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	30,142,185
3.04.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	18 Unit	25,254,000	Kab. Sumbawa	18 Unit	67,356,837
3.04.01.13.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Kab. Sumbawa	2 Unit	1,000,000	Kab. Sumbawa	2 Unit	1,789,166
3.04.01.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			136,400				7,442,538
3.04.01.13.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Sumbawa	12 Kali	136,400	Kab. Sumbawa	12 Kali	7,691,898
3.04.01.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			36,439,700				40,492,201
3.04.01.13.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	36,439,700	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	38,797,538
3.04.01.13.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			16,300,000				15,769,155
3.04.01.13.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	16,300,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	17,386,484
3.04.01.13.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			913,422,900				1,054,973,313
3.04.01.13.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	Dana Bagi Hasil,DAU	Kab. Sumbawa	35 Lokasi	888,005,100	Kab. Sumbawa	30 Lokasi	860,285,735

3.04.01.13.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	Dana Bagi Hasil	Kab. Sumbawa	5 Titik	25,417,800	Kab. Sumbawa	10 Titik	60,511,446
3.04.01.13.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			986,392,520				636,490,617
3.04.01.13.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAK,DAU	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	986,392,520	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	1,236,726,994
3.04.01.13.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			288,545,500				479,803,442
3.04.01.13.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa	125000 Batang	233,999,500	Kab. Sumbawa	125000 Batang	416,420,000
3.04.01.13.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa	2 Unit	54,546,000	Kab. Sumbawa	2 Unit	63,618,717
3.04.01.14	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi				3,152,443,097				3,040,142,685
3.04.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			227,326,160				186,578,379
3.04.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Bima	3 Rekening	41,360,100	Kab. Bima	3 Rekening	44,034,532
3.04.01.14.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Bima	2 Orang	30,854,700	Kab. Bima	2 Orang	32,849,930
3.04.01.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Bima	1 Orang	24,995,120	Kab. Bima	1 Orang	23,702,299
3.04.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Bima	7 Jenis	4,456,600	Kab. Bima	7 Jenis	4,745,037
3.04.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Bima	2 Jenis	1,700,100	Kab. Bima	2 Jenis	1,810,215
3.04.01.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Bima	8 Jenis	6,841,400	Kab. Bima	8 Jenis	7,283,800
3.04.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Bima	230 OH	11,367,500	Kab. Bima	230 OH	12,103,182
3.04.01.14.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	3 OT	17,091,797
3.04.01.14.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Bima	2 Orang	49,999,740	Kab. Bima	2 Orang	40,837,305
3.04.01.14.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Bima	12 OT	31,750,900	Kab. Bima	15 OT	25,595,598
3.04.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			154,705,537				278,031,052
3.04.01.14.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Bima	1 Unit	107,805,538	Kab. Bima	1 Unit	125,220,570
3.04.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	DAU	Kab. Bima	11 Unit	46,899,999	Kab. Bima	11 Unit	39,487,946
3.04.01.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			5,140,300				7,442,538
3.04.01.14.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Bima	8 Kali	5,140,300	Kab. Bima	8 Kali	5,472,743
3.04.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			57,730,000				40,492,201
3.04.01.14.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Bima	1 Dokumen	17,615,400	Kab. Bima	1 Dokumen	18,754,669
3.04.01.14.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Bima	2 Dokumen	40,114,600	Kab. Bima	2 Dokumen	42,708,445
3.04.01.14.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			15,203,600				15,769,155

3.04.01.14.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Bima	1 Dokumen	15,203,600	Kab. Bima	1 Dokumen	16,186,690
3.04.01.14.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			1,209,301,000				1,054,973,313
3.04.01.14.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Dompu	42 Lokasi	1,181,292,400	Kab. Dompu	35 Lokasi	937,425,648
3.04.01.14.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Dompu	5 Titik	28,008,600	Kab. Dompu	10 Titik	59,876,187
3.04.01.14.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			1,001,935,300				636,490,617
3.04.01.14.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Dompu	3 Ijin/ Usaha	1,001,935,300	Kab. Dompu	3 Ijin/ Usaha	1,057,447,342
3.04.01.14.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			481,101,200				479,803,442
3.04.01.14.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Dompu	125000 Batang	331,101,200	Kab. Dompu	125000 Batang	352,508,750
3.04.01.14.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Dompu	5 Unit	150,000,000	Kab. Dompu	5 Unit	175,000,000
3.04.01.15	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas				2,264,769,124				2,723,175,870
3.04.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			179,286,966				186,578,379
3.04.01.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa	1 Rekening	21,000,000	Kab. Sumbawa	1 Rekening	23,586,518
3.04.01.15.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa	2 Orang	23,964,800	Kab. Sumbawa	2 Orang	46,489,626
3.04.01.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,924,520	Kab. Sumbawa	1 Orang	26,101,062
3.04.01.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	10 Jenis	6,736,916	Kab. Sumbawa	10 Jenis	7,172,619
3.04.01.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	4,235,380	Kab. Sumbawa	2 Jenis	4,553,638
3.04.01.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	9 Jenis	5,068,600	Kab. Sumbawa	9 Jenis	5,398,679
3.04.01.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Jenis	2,670,000	Kab. Sumbawa	1 Jenis	2,845,265
3.04.01.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa	240 OH	11,686,750	Kab. Sumbawa	240 OH	12,442,421
3.04.01.15.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	24,000,000	Luar Provinsi	4 OT	23,050,422
3.04.01.15.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	25,000,000	Kab. Sumbawa	1 Orang	25,114,936
3.04.01.15.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa	12 OT	30,000,000	Kab. Sumbawa	15 OT	33,409,712
3.04.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			261,116,600				278,031,052
3.04.01.15.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	197,995,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	210,798,615
3.04.01.15.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAU	Kab. Sumbawa	2 Unit	54,075,000	Kab. Sumbawa	2 Unit	57,598,515
3.04.01.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	3 Buah	9,046,600	Kab. Sumbawa	3 Buah	9,633,922

3.04.01.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			6,987,500				7,442,538
3.04.01.15.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Sumbawa	12 Kali	6,987,500	Kab. Sumbawa	12 Kali	7,442,538
3.04.01.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			37,512,800				40,492,201
3.04.01.15.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	9,012,800	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	10,129,858
3.04.01.15.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	28,500,000	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	30,362,343
3.04.01.15.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			14,800,000				15,769,155
3.04.01.15.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	14,800,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	15,769,155
3.04.01.15.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			714,447,960				1,054,973,313
3.04.01.15.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Sumbawa Barat	23 Lokasi	670,221,560	Kab. Sumbawa Barat	20 Lokasi	1,007,884,338
3.04.01.15.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Sumbawa Barat	6 Titik	44,226,400	Kab. Sumbawa Barat	6 Titik	47,088,975
3.04.01.15.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			600,023,500				636,490,617
3.04.01.15.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Sumbawa Barat	3 Ijin/ Usaha	600,023,500	Kab. Sumbawa Barat	3 Ijin/ Usaha	636,490,617
3.04.01.15.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			450,593,798				479,803,442
3.04.01.15.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa Barat	125000 Batang	364,177,452	Kab. Sumbawa Barat	125000 Batang	387,798,750
3.04.01.15.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa Barat	4 Unit	86,416,346	Kab. Sumbawa Barat	4 Unit	92,013,346
3.04.01.16	Balai KPH Brang Beh				1,857,895,254				2,723,167,216
3.04.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			170,685,086				186,578,379
3.04.01.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Sumbawa	1 Rekening	21,303,000	Kab. Sumbawa	1 Rekening	23,586,518
3.04.01.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Sumbawa	2 Orang	20,850,246	Kab. Sumbawa	2 Orang	46,489,626
3.04.01.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,271,320	Kab. Sumbawa	1 Orang	26,101,062
3.04.01.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	10 Jenis	6,728,900	Kab. Sumbawa	10 Jenis	7,172,619
3.04.01.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	4,268,500	Kab. Sumbawa	2 Jenis	4,553,638
3.04.01.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	9 Jenis	5,070,000	Kab. Sumbawa	9 Jenis	5,398,679
3.04.01.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Jenis	223,700	Kab. Sumbawa	1 Jenis	2,845,265
3.04.01.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Sumbawa	240 OH	11,682,500	Kab. Sumbawa	240 OH	12,442,421

3.04.01.16.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	21,650,000	Luar Provinsi	4 OT	23,050,422
3.04.01.16.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	24,651,320	Kab. Sumbawa	1 Orang	25,114,936
3.04.01.16.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Sumbawa	12 OT	29,985,600	Kab. Sumbawa	15 OT	33,409,712
3.04.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			261,131,000				278,031,052
3.04.01.16.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	197,995,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	210,798,615
3.04.01.16.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAU	Kab. Sumbawa	2 Unit	54,087,500	Kab. Sumbawa	2 Unit	57,598,515
3.04.01.16.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kab. Sumbawa	3 Buah	9,048,500	Kab. Sumbawa	3 Buah	9,633,922
3.04.01.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			6,989,800				7,442,538
3.04.01.16.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Sumbawa	12 Kali	6,989,800	Kab. Sumbawa	12 Kali	7,442,538
3.04.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			37,913,300				40,492,201
3.04.01.16.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	9,513,300	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	10,129,858
3.04.01.16.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	28,400,000	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	30,362,343
3.04.01.16.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			14,687,500				15,769,155
3.04.01.16.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	14,687,500	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	15,769,155
3.04.01.16.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			320,417,600				1,054,973,313
3.04.01.16.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Sumbawa	10 Lokasi	276,196,600	Kab. Sumbawa	20 Lokasi	1,007,884,338
3.04.01.16.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Sumbawa	6 Titik	44,221,000	Kab. Sumbawa	6 Titik	47,088,975
3.04.01.16.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			595,844,200				636,490,617
3.04.01.16.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	595,844,200	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	636,490,617
3.04.01.16.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			450,226,768				479,803,442
3.04.01.16.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Sumbawa	125000 Batang	363,826,668	Kab. Sumbawa	125000 Batang	387,798,750
3.04.01.16.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Sumbawa	4 Unit	86,400,100	Kab. Sumbawa	4 Unit	92,004,692
3.04.01.17	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada				2,222,780,433				2,723,167,216
3.04.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			172,855,119				186,578,379
3.04.01.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	DAU	Kab. Bima	1 Rekening	21,303,828	Kab. Bima	1 Rekening	23,586,518
3.04.01.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Bima	2 Orang	24,000,000	Kab. Bima	2 Orang	46,489,626

3.04.01.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Bima	1 Orang	24,999,720	Kab. Bima	1 Orang	26,101,062
3.04.01.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Bima	10 Jenis	6,737,016	Kab. Bima	10 Jenis	7,172,619
3.04.01.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Bima	2 Jenis	4,277,070	Kab. Bima	2 Jenis	4,553,638
3.04.01.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Bima	9 Jenis	5,070,809	Kab. Bima	9 Jenis	5,398,679
3.04.01.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Bima	1 Jenis	2,280,000	Kab. Bima	1 Jenis	2,845,265
3.04.01.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Bima	240 OH	11,686,776	Kab. Bima	240 OH	12,442,421
3.04.01.17.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	17,500,000	Luar Provinsi	4 OT	23,050,422
3.04.01.17.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Bima	1 Orang	24,999,900	Kab. Bima	1 Orang	25,114,936
3.04.01.17.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Bima	12 OT	30,000,000	Kab. Bima	15 OT	33,409,712
3.04.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			261,145,836				278,031,052
3.04.01.17.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Bima	1 Unit	197,996,521	Kab. Bima	1 Unit	210,798,615
3.04.01.17.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAU	Kab. Bima	2 Unit	54,100,476	Kab. Bima	2 Unit	57,598,515
3.04.01.17.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kab. Bima	3 Buah	9,048,839	Kab. Bima	3 Buah	9,633,922
3.04.01.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			6,990,000				7,442,538
3.04.01.17.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparaturnya	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Bima	12 Kali	6,990,000	Kab. Bima	12 Kali	7,442,538
3.04.01.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			38,032,800				40,492,201
3.04.01.17.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Bima	1 Dokumen	9,514,500	Kab. Bima	1 Dokumen	10,129,858
3.04.01.17.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Bima	2 Dokumen	28,518,300	Kab. Bima	2 Dokumen	30,362,343
3.04.01.17.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			14,811,200				15,769,155
3.04.01.17.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Bima	1 Dokumen	14,811,200	Kab. Bima	1 Dokumen	15,769,155
3.04.01.17.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			678,244,159				1,054,973,313
3.04.01.17.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Bima	22 Lokasi	634,015,059	Kab. Bima	20 Lokasi	1,007,884,338
3.04.01.17.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Bima	6 Titik	44,229,100	Kab. Bima	6 Titik	47,088,975
3.04.01.17.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			600,036,700				636,490,617
3.04.01.17.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Bima	3 Ijin/ Usaha	600,036,700	Kab. Bima	3 Ijin/ Usaha	636,490,617
3.04.01.17.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			450,664,619				479,803,442
3.04.01.17.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Bima	125000 Batang	364,247,500	Kab. Bima	125000 Batang	387,798,750

3.04.01.17.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Bima	4 Unit	86,417,119	Kab. Bima	4 Unit	92,004,692
3.04.01.18	Balai KPH Pelangan Tastura				2,189,467,908				2,699,580,698
3.04.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			146,425,478				186,578,379
3.04.01.18.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 Orang	24,000,000	Kab. Lombok Tengah	2 Orang	46,489,626
3.04.01.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 Orang	24,996,820	Kab. Lombok Tengah	1 Orang	26,101,062
3.04.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	10 Jenis	6,734,000	Kab. Lombok Tengah	10 Jenis	7,172,619
3.04.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 Jenis	4,277,000	Kab. Lombok Tengah	2 Jenis	4,553,638
3.04.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	9 Jenis	5,070,000	Kab. Lombok Tengah	9 Jenis	5,398,679
3.04.01.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 Jenis	2,670,240	Kab. Lombok Tengah	1 Jenis	2,845,265
3.04.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	DAU	Kab. Lombok Tengah	240 OH	11,682,500	Kab. Lombok Tengah	240 OH	12,442,421
3.04.01.18.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	DAU	Luar Provinsi	4 OT	23,999,998	Luar Provinsi	4 OT	23,050,422
3.04.01.18.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 Orang	24,999,920	Kab. Lombok Tengah	1 Orang	25,114,936
3.04.01.18.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	DAU	Kab. Lombok Tengah	12 OT	17,995,000	Kab. Lombok Tengah	15 OT	33,409,712
3.04.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			260,965,720				278,031,052
3.04.01.18.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	197,996,500	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	210,798,615
3.04.01.18.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 Unit	54,100,400	Kab. Lombok Tengah	2 Unit	57,598,515
3.04.01.18.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	DAU	Kab. Lombok Tengah	3 Buah	8,868,820	Kab. Lombok Tengah	3 Buah	9,633,922
3.04.01.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			6,750,000				7,442,538
3.04.01.18.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	DAU	Kab. Lombok Tengah	12 Kali	6,750,000	Kab. Lombok Tengah	12 Kali	7,442,538
3.04.01.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			38,032,900				40,492,201
3.04.01.18.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	9,514,600	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	10,129,858
3.04.01.18.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	DAU	Kab. Lombok Tengah	2 Dokumen	28,518,300	Kab. Lombok Tengah	2 Dokumen	30,362,343
3.04.01.18.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			14,811,472				15,769,155
3.04.01.18.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	DAU	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	14,811,472	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	15,769,155
3.04.01.18.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan			671,849,340				1,054,973,313
3.04.01.18.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	DAU	Kab. Lombok Tengah	22 Lokasi	627,620,340	Kab. Lombok Tengah	20 Lokasi	1,007,884,338
3.04.01.18.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	DAU	Kab. Lombok Tengah	6 Titik	44,229,000	Kab. Lombok Tengah	6 Titik	47,088,975
3.04.01.18.22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya			599,985,500				636,490,617

3.04.01.18.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	DAU	Kab. Lombok Tengah	3 Ijin/ Usaha	599,985,500	Kab. Lombok Tengah	3 Ijin/ Usaha	636,490,617
3.04.01.18.23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis			450,647,498				479,803,442
3.04.01.18.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	DAU	Kab. Lombok Tengah	125000 Batang	364,247,498	Kab. Lombok Tengah	125000 Batang	387,798,750
3.04.01.18.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	DAU	Kab. Lombok Tengah	4 Unit	86,400,000	Kab. Lombok Tengah	4 Unit	92,004,692
3:05	ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				11,040,313,491				12,151,000,004
3:05:01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				11,040,313,491				12,151,000,004
3.05.01.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Induk)				10,539,745,591				12,151,000,004
3.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			484,161,980				271,250,000
3.05.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	DAU	Provinsi NTB	1200 Surat	4,522,000	Provinsi NTB	1200 Surat	8,100,000
3.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DAU	Provinsi NTB	10 Orang	150,000,000	Provinsi NTB	10 Orang	150,000,000
3.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	4 Orang	96,605,280	Provinsi NTB	4 Orang	120,000,000
3.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	17 Jenis	29,999,500	Provinsi NTB	17 Jenis	30,000,000
3.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	10 Jenis	30,000,000	Provinsi NTB	10 Jenis	30,400,000
3.05.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	Provinsi NTB	8 Jenis	4,985,200	Provinsi NTB	8 Jenis	8,000,000
3.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keseluruhan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	DAU	Provinsi NTB	25 OT	1,450,000	Provinsi NTB	28 OT	225,000,000
3.05.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	DAU	Provinsi NTB	5 Orang	165,600,000	Provinsi NTB	5 Orang	200,000,000
3.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keseluruhan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	DAU	Provinsi NTB	80 OT	1,000,000	Provinsi NTB	90 OT	225,000,000
3.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			351,675,000				32,000,000
3.05.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan tugas	DAU	Provinsi NTB	5 Unit	49,675,000	Provinsi NTB	5 Unit	50,000,000
3.05.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	200,000,000	Provinsi NTB	1 Unit	100,000,000
3.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DAU	Provinsi NTB	20 Unit	52,000,000	Provinsi NTB	21 Unit	250,000,000
3.05.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	DAU	Provinsi NTB	50 Unit	50,000,000	Provinsi NTB	50 Unit	50,000,000
3.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			168,000,000				4,900,000
3.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	DAU	Provinsi NTB	92 Orang	8,000,000	Provinsi NTB	92 Orang	20,000,001
3.05.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	DAU	Provinsi NTB	16 Orang	160,000,000	Provinsi NTB	16 Orang	160,000,000
3.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP			125,493,800				197,500,000
3.05.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	34,993,800	Provinsi NTB	1 Dok	35,000,000
3.05.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	27,500,000	Provinsi NTB	1 Dok	27,500,000
3.05.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD	DAU	Provinsi NTB	3 Dok	63,000,000	Provinsi NTB	3 Dok	135,000,000
3.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP			30,000,000				30,000,000
3.05.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya data asset	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	30,000,000	Provinsi NTB	1 Dok	30,000,000
3.05.01.01.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices			803,592,000				60,000,000
3.05.01.01.15.04	Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Dokumen hasil produksi bidang pertambangan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	80,218,500	Provinsi NTB	1 Dok	250,000,000
3.05.01.01.15.10	Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP yang diawasi	DAU	Provinsi NTB	1 Tahun	390,600,000	Provinsi NTB	1 Tahun	523,000,000

3.05.01.01.15.12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	255,148,500	Provinsi NTB	1 Dok	450,000,000
3.05.01.01.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	77,625,000	Provinsi NTB	1 Dok	100,000,000
3.05.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi			3,924,103,714				49,999,995
3.05.01.01.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	146,987,800	Provinsi NTB	1 Dok	150,000,000
3.05.01.01.17.03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sarana dan prasarana ketenagalistrikan	DAU	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	1100 RTS	3,707,006,960	Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	1100 RTS	3,526,000,005
3.05.01.01.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	70,108,954	Provinsi NTB	1 Dok	100,000,000
3.05.01.01.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih			2,069,870,000				50,000,000
3.05.01.01.18.01	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Tersedianya dokumen perencanaan teknis	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	100,000,000	Provinsi NTB	1 Dok	100,000,000
3.05.01.01.18.02	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor	DAU	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	3 Unit	1,440,748,600	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	3 Unit	1,023,000,000
3.05.01.01.18.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	381,621,400	Provinsi NTB	1 Dok	220,000,000
3.05.01.01.18.04	Konservasi Air Tanah	Dokumen konservasi air tanah	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	147,500,000	Provinsi NTB	1 Dok	200,000,000
3.05.01.01.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral			97,849,100				305,000,000
3.05.01.01.19.01	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen usulan program/kegiatan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	5,940,500	Provinsi NTB	1 Dok	160,000,000
3.05.01.01.19.02	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi sektor ESDM	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	59,645,000	Provinsi NTB	1 Dok	70,000,000
3.05.01.01.19.03	Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen Pemantauan dan evaluasi	DAU	Provinsi NTB	3 Dok	32,263,600	Provinsi NTB	1 Dok	75,000,000
3.05.01.01.22	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi			662,499,997				899,999,998
3.05.01.01.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi	DAU	Provinsi NTB	1000 Orang	444,000,000	Provinsi NTB	1000 Orang	450,000,000
3.05.01.01.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Tersedianya data dan tersebarnya informasi potensi kawasan lindung geologi	DAU	Provinsi NTB	700 Orang	218,499,997	Provinsi NTB	700 Orang	449,999,998
3.05.01.01.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT			1,822,500,000				49,999,900
3.05.01.01.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	345,500,000	Provinsi NTB	1 Dok	350,000,000
3.05.01.01.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	DAU	Provinsi NTB	172 Unit	1,377,000,000	Provinsi NTB	172 Unit	2,000,000,001
3.05.01.01.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	100,000,000	Provinsi NTB	1 Dok	100,000,000
3.05.01.02	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa				500,567,900				518,149,895

3.05.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			256,668,000				271,250,000
3.05.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	DAU	Kab. Sumbawa	500 Surat	1,288,000	Kab. Sumbawa	500 Surat	2,500,000
3.05.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	DAU	Kab. Sumbawa	4 Jenis	32,000,000	Kab. Sumbawa	4 Jenis	35,000,000
3.05.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DAU	Kab. Sumbawa	2 Orang	11,880,000	Kab. Sumbawa	2 Orang	12,000,000
3.05.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	3 Orang	80,000,000	Kab. Sumbawa	3 Orang	80,000,000
3.05.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DAU	Kab. Sumbawa	11 Jenis	8,000,000	Kab. Sumbawa	11 Jenis	8,000,000
3.05.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	6,000,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	6,000,000
3.05.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	1,500,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	1,750,000
3.05.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	DAU	Kab. Sumbawa	2 Jenis	6,000,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	6,000,000
3.05.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	DAU	Luar Provinsi	8 OT	55,000,000	Luar Provinsi	10 OT	60,000,000
3.05.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	DAU	se-NTB	20 OT	55,000,000	se-NTB	20 OT	60,000,000
3.05.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			69,000,000				32,000,000
3.05.01.02.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan tugas	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	15,000,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	5,000,000
3.05.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	DAU	Kab. Sumbawa	1 Unit	30,000,000	Kab. Sumbawa	1 Unit	15,000,000
3.05.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DAU	Kab. Sumbawa	2 Unit	18,000,000	Kab. Sumbawa	2 Unit	6,000,000
3.05.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	DAU	Kab. Sumbawa	5 Unit	6,000,000	Kab. Sumbawa	5 Unit	6,000,000
3.05.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			4,900,000				4,900,000
3.05.01.02.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	DAU	Kab. Sumbawa	1 Orang	4,900,000	Kab. Sumbawa	1 Orang	4,900,000
3.05.01.02.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices			50,000,000				60,000,000
3.05.01.02.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dok	50,000,000	Kab. Sumbawa	1 Dok	60,000,000
3.05.01.02.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi			40,000,000				49,999,995
3.05.01.02.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dok	40,000,000	Kab. Sumbawa	1 Dok	49,999,995
3.05.01.02.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih			40,000,000				50,000,000
3.05.01.02.18.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	DAU	Kab. Bima	1 Dok	40,000,000	Kab. Bima	1 Dok	50,000,000
3.05.01.02.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT			39,999,900				49,999,900
3.05.01.02.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan	DAU	Kab. Sumbawa	1 Dok	39,999,900	Kab. Sumbawa	1 Dok	49,999,900
3:06	PERDAGANGAN				13,086,673,148				14,594,638,373
3:06:01	Dinas Perdagangan				13,086,673,148				14,594,638,373
3.06.01.01	Dinas Perdagangan (Induk)				13,086,673,148				14,594,638,373
3.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			1,234,382,970				1,341,646,712
3.06.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	520 buah	8,359,520	Provinsi NTB	550 buah	10,799,800

3.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Air dan Listrik yang terbayar	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	12 kali	171,996,000	Provinsi NTB	12 kali	196,318,632
3.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayar	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	12 orang	108,000,000	Provinsi NTB	12 orang	108,000,000
3.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	15 orang	303,377,020	Provinsi NTB	15 orang	303,990,000
3.06.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	500 Buah	40,193,700	Provinsi NTB	500 Buah	34,500,000
3.06.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	250 Buah	17,524,950	Provinsi NTB	300 Buah	20,310,000
3.06.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	9 Buah	100,771,500	Provinsi NTB	10 Buah	160,000,000
3.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	2 jenis	34,650,000	Provinsi NTB	2 jenis	36,268,000
3.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang tersedia bagi pegawai	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	2 Jenis	36,750,000	Provinsi NTB	2 Jenis	38,500,000
3.06.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dengan Kabupaten/kota	Dana Bagi Hasil	Luar Provinsi	5 Kali	182,105,000	Luar Provinsi	6 Kali	210,000,000
3.06.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	4 Kali	101,750,000	Provinsi NTB	5 Kali	107,500,000
3.06.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersediaanya Jasa Keamanan Kantor	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	12 bulan	96,605,280	Provinsi NTB	12 bulan	96,605,280
3.06.01.01.01.25	Pengelola Kearsipan	Jumlah dokumen kearsipan yang dikelola	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1500 dokumen	32,300,000	Provinsi NTB	1500 dokumen	18,855,000
3.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			981,841,000				1,267,009,000
3.06.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	6 unit	400,600,000	Provinsi NTB	1 unit	400,600,000
3.06.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	58 Unit	24,998,000	Provinsi NTB	60 Unit	49,980,000
3.06.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	3 unit	489,093,000	Provinsi NTB	3 unit	356,442,000
3.06.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	28 unit	27,250,000	Provinsi NTB	30 unit	300,000,000
3.06.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara berkala	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	16 unit	39,900,000	Provinsi NTB	17 unit	159,987,000
3.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur			17,240,029				18,354,738
3.06.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental fisik	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	52 orang	14,999,972	Provinsi NTB	53 orang	15,288,433
3.06.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan SDM	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 orang	2,240,057	Provinsi NTB	1 orang	3,066,305
3.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program			512,068,820				545,178,281
3.06.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	9 laporan	102,200,000	Provinsi NTB	9 laporan	150,200,001
3.06.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 laporan	22,375,000	Provinsi NTB	1 laporan	22,375,000
3.06.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah penyusunan rencana kerja SKPD	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	4 dokumen	60,698,000	Provinsi NTB	4 dokumen	12,698,000
3.06.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah penerima bantuan sosial dan hibah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	260 orang	186,795,960	Provinsi NTB	280 orang	190,000,160
3.06.01.01.06.15	Verifikasi/survey calon penerima bantuan mesin dan peralatan	Jumlah calon penerima bantuan mesin peralatan yang dilakukan verifikasi	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	260 orang	139,999,860	Provinsi NTB	280 orang	169,905,120
3.06.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset			29,313,000				31,208,664
3.06.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Manajemen asset/barang milik daerah	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	12 laporan	29,313,000	Provinsi NTB	12 laporan	31,208,664

3.06.01.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen			866,229,826				537,338,500
3.06.01.01.15.01	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta Rakor perlindungan konsumen	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	80 orang	100,700,000	Provinsi NTB	105 orang	72,030,000
3.06.01.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (SNI - Kadaluausa)	Jumlah Komoditi barang dan jasa yang diawasi peredarannya	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	100 komoditi	287,000,000	Provinsi NTB	110 komoditi	154,990,000
3.06.01.01.15.12	Penguatan Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Berbahaya	Jumlah Peserta penguatan perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	125 orang	41,365,000	Provinsi NTB	125 orang	62,500,000
3.06.01.01.15.16	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan konsumen	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pemberdayaan Konsumen	Dana Bagi Hasil	se-NTB	210 Orang	130,939,830	se-NTB	210 Orang	49,980,000
3.06.01.01.15.17	Penguatan dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga yang diberikan Pembinaan Jejaring Perlindungan Konsumen	Dana Bagi Hasil	se-NTB	6 Lembaga	56,249,996	se-NTB	6 Lembaga	22,842,000
3.06.01.01.15.18	Monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan, pemberdayaan, dan jejaring perlindungan konsumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kelembagaan, Pemberdayaan dan Jejaring Perlindungan Konsumen	Dana Bagi Hasil	se-NTB	2 Laporan	79,675,000	se-NTB	2 Laporan	15,000,000
3.06.01.01.15.19	Pengawasan perizinan di bidang perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pembinaan	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	25 orang	59,300,000	Provinsi NTB	30 orang	50,010,000
3.06.01.01.15.20	Monitoring dan evaluasi tertib niaga	Jumlah Laporan Monev Tertib Niaga	Dana Bagi Hasil	se-NTB	1 Laporan	73,300,000	se-NTB	1 Laporan	50,000,000
3.06.01.01.15.21	Penguatan kepala pasar dalam pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar rakyat	Jumlah Kepala Pasar yang diberikan Pembinaan dalam Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya	Dana Bagi Hasil	se-NTB	40 orang	37,700,000	se-NTB	50 orang	59,986,500
3.06.01.01.16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor			122,543,453				87,468,000
3.06.01.01.16.05	Isu-Isu Perdagangan Internasional	Jumlah Peserta pertemuan koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	50 orang	49,260,000	Provinsi NTB	60 orang	42,000,000
3.06.01.01.16.06	Pengawasan peredaran barang ekspor dan impor	Jumlah Laporan produk barang ekspor dan impor yang diawasi	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 laporan	73,283,453	Provinsi NTB	1 laporan	45,468,000
3.06.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (Cakupan UKM yang sudah bermitra dibagi total UKM dikali 100)			761,956,990				813,902,899
3.06.01.01.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah peserta Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Dalam Negeri	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	52 Pengusaha	7,687,000	Provinsi NTB	54 Pengusaha	59,999,994
3.06.01.01.17.03	Penguatan kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah pengusaha/eksportir peserta sosialisasi Prosedur Ekspor	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	30 Pengusaha	13,300,000	Provinsi NTB	35 Pengusaha	54,999,700
3.06.01.01.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah Laporan Informasi dengan Jejaring Eksportir	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 Laporan	100,000,000	Provinsi NTB	1 Laporan	75,000,000
3.06.01.01.17.10	Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah Eksportir/Pengusaha peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	30 Pengusaha	99,999,990	Provinsi NTB	32 Pengusaha	105,000,000
3.06.01.01.17.13	Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri	Jumlah Partisipasi pada Pameran dan Promosi Luar Negeri yang diikuti	Dana Bagi Hasil	Luar Provinsi	2 Kegiatan	156,000,000	Luar Provinsi	1 Kali	180,000,000
3.06.01.01.17.14	Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA	Jumlah Laporan Monitoring Importir yang sudah Memiliki API dan SKA	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 Laporan	65,000,000	Provinsi NTB	1 Laporan	65,000,000
3.06.01.01.17.15	INATRADE	Jumlah Peserta Sosialisasi Inattrade	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	25 orang	28,000,000	Provinsi NTB	35 orang	40,070,205
3.06.01.01.17.16	Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir/Pengusaha peserta sosialisasi regulasi perdagangan Luar Negeri (tentang MEA)	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	30 Pengusaha	37,470,000	Provinsi NTB	35 Pengusaha	39,970,000
3.06.01.01.17.17	Identifikasi potensi ekspor daerah	Jumlah Profil Pengusaha Eksportir Daerah yang tersedia	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	100 Buku	70,000,000	Provinsi NTB	105 Buku	53,865,000
3.06.01.01.17.22	Peningkatan Promosi dan Citra Produk Unggulan Ekspor	Jumlah promosi dan citra yang dilakukan terhadap produk unggulan Daerah	Dana Bagi Hasil	Luar Provinsi	2 Kali	112,500,000	Luar Provinsi	4 Kali	65,000,000
3.06.01.01.17.23	Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan melalui E-Commerce	Jumlah Produk Unggulan yang di sebarakan melalui E-Comerse	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	10 Produk	72,000,000	Provinsi NTB	11 Produk	74,998,000

3.06.01.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah			855,752,500				1,665,734,500
3.06.01.01.18.07	Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri (Aku Cinta Indonesia)	Jumlah masyarakat yang di lakukan Sosialisasi ACI	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	105 orang	138,970,000	Provinsi NTB	110 orang	185,020,000
3.06.01.01.18.08	Operasi pasar rakyat	Jumlah paket sembako yang di salurkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu	Dana Bagi Hasil	Kota Bima,Provinsi NTB	5300 paket	166,100,000	Kota Bima,Provinsi NTB	5350 paket	855,732,500
3.06.01.01.18.09	Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan	Jumlah Bahan Pokok Penting yang di Pantau	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	23 Jenis	109,997,500	Provinsi NTB	23 Jenis	124,982,000
3.06.01.01.18.10	Misi dagang	Jumlah Pengusaha/UKM yang Di Fasilitas	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	50 Eksemplar	125,000,000	Provinsi NTB	50 Eksemplar	135,000,000
3.06.01.01.18.12	Pemantauan perdagangan antar pulau	Jumlah Laporan Pemantauan Perdagangan Antar Pulau	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	2 Laporan	55,000,000	Provinsi NTB	2 Laporan	60,000,000
3.06.01.01.18.13	Pemantauan barang-barang strategis dan BBM	Jumlah Barang Strategis yang di Pantau	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	10 jenis	64,685,000	Provinsi NTB	12 jenis	75,000,000
3.06.01.01.18.15	Pelaksanaan Pasar Sembako Murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	Dana Bagi Hasil	Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	4 Kali	196,000,000	Kab. Lombok Timur,Kab. Sumbawa,Provinsi NTB	5 Kali	230,000,000
3.06.01.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan			7,182,146,560				7,646,797,210
3.06.01.01.19.01	Penguatan organisasi pedagang kaki Lima dan asongan	Jumlah Pedagang Kaki lima dan Asongan yang di fasilitas	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	10 Kab/kota	59,750,000	Provinsi NTB	10 Kab/kota	70,000,000
3.06.01.01.19.03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki Lima dan asongan	Jumlah Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Dana Bagi Hasil	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Kota Mataram,Provinsi NTB	10 Kab/Kota	7,122,396,560	Kab. Bima,Kab. Dompu,Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok Tengah,Kab. Lombok Timur,Kab. Lombok Utara,Kab. Sumbawa,Kab. Sumbawa Barat,Kota Mataram,Provinsi NTB	10 Kab/Kota	7,576,797,210
3.06.01.01.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra			523,198,000				639,999,869
3.06.01.01.20.02	Penyelarasan dokumen program perdagangan	Jumlah Visualisasi data fisik perdagangan	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 kegiatan	225,000,000	Provinsi NTB	1 kegiatan	235,000,000
3.06.01.01.20.10	Peningkatan kerjasama mitra praja utama (MPU)	Jumlah koordinasi dan Konsultasi sesama anggota MPU	Dana Bagi Hasil	Luar Provinsi	6 kali	124,998,000	Luar Provinsi	6 kali	129,996,000
3.06.01.01.20.16	Penyediaan informasi strategis pembangunan sektor Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perdagangan	Dana Bagi Hasil	Provinsi NTB	1 laporan	173,200,000	Provinsi NTB	1 laporan	275,003,869
3:07	PERINDUSTRIAN				11,253,142,526				17,510,232,978
3:07:01	Dinas Perindustrian				11,253,142,526				17,510,232,978
3.07.01.01	Dinas Perindustrian (Induk)				3,518,406,094				17,510,232,978
3.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			471,215,094				989,933,400
3.07.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	DAU	Provinsi NTB	1200 Eks	5,000,000	Provinsi NTB	1200 Eks	5,499,600
3.07.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	Provinsi NTB	50000 kwh/m3	24,000,000	Provinsi NTB	52000 kwh/3	141,566,880
3.07.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	DAU	Provinsi NTB	7 Orang	100,499,994	Provinsi NTB	7 orang	110,550,000
3.07.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	13 orang	223,904,000	Provinsi NTB	13 orang	322,499,000
3.07.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	20 jenis	21,253,700	Provinsi NTB	20 jenis	26,399,999

3.07.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	15,299,000	Provinsi NTB	2 jenis	22,000,000
3.07.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor	DAU	Provinsi NTB	15 jenis	6,258,400	Provinsi NTB	15 jenis	7,535,000
3.07.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	20 unit	75,000,000	Provinsi NTB	22 unit	283,360,000
3.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur			399,750,000				1,001,550,000
3.07.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	DAU	Provinsi NTB	3 Unit	365,000,000	Provinsi NTB	3 Unit	421,755,000
3.07.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	12 Unit	15,000,000	Provinsi NTB	12 Unit	214,500,000
3.07.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara	DAU	Provinsi NTB	40 unit	19,750,000	Provinsi NTB	40 keg	36,300,000
3.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan			319,696,000				38,500,000
3.07.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang tersusun	DAU	Provinsi NTB	4 dok	123,774,000	Provinsi NTB	4 dok	213,483,400
3.07.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	DAU	Provinsi NTB	1 dok	32,522,000	Provinsi NTB	1 dok	55,000,000
3.07.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	DAU	Provinsi NTB	5 dok	146,400,000	Provinsi NTB	5 dok	228,136,600
3.07.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelapora	DAU	Provinsi NTB	1 dok	17,000,000	Provinsi NTB	1 dok	225,000,000
3.07.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			20,825,000				20,825,000
3.07.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah	DAU	Provinsi NTB	1 dok	20,825,000	Provinsi NTB	1 dok	20,825,000
3.07.01.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi			94,000,000				2,746,414,000
3.07.01.01.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terbentuknya dan updating sistem dokumen sistem informasi IKM berbasis online	DAU	se-NTB	1 dok	94,000,000	se-NTB	1 dok	616,000,000
3.07.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina			384,900,000				1,250,000,000
3.07.01.01.16.01	Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya melalui bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya	DAU	se-NTB	160 IKM	319,400,000	se-NTB	160 IKM	1,000,000,000
3.07.01.01.16.08	Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan	Jumlah IKM yang produknnya tersertifikasi Halal dan teruji Mutu Produk Unggulan	DAU	se-NTB	120 IKM	4,250,000	se-NTB	150 IKM	350,115,000
3.07.01.01.16.10	Pendaftaran dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI)	Jumlah IKM produknnya terfasilitasi HKI, Sertifikasi Test Report, E-Katalog, E-Smart	DAU	Kab. Lombok Tengah,se-NTB	100 IKM	61,250,000	Kab. Lombok Tengah,se-NTB	110 IKM	360,145,999
3.07.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi			857,275,000				1,600,000,000
3.07.01.01.17.01	Penguatan Kemampuan Teknologi Industri	Tersedianya bantuan peralatan untuk pengembangan IKM berbasis potensi	DAU	se-NTB	1 keg	839,000,000	se-NTB	1 keg	11,093,196,500
3.07.01.01.17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI	DAU	se-NTB	1 keg	17,125,000	se-NTB	1 keg	310,000,000
3.07.01.01.17.06	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Dan Hilir	Terfasilitasinya industri turunan hasil smelter dan terlaksananya koordinasi antara OPD hulu dan hilir	DAU	se-NTB	1 keg	1,150,000	se-NTB	1 keg	240,694,000
3.07.01.01.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan			252,750,000				402,597,000
3.07.01.01.19.04	Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kreatif	Jumlah IKM yang terlatih dalam diversifikasi produk unggulan industri kreatif	DAU	se-NTB	1 keg	190,000,000	se-NTB	1 keg	200,000,000

3.07.01.01.19.05	Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan	Jumlah IKM Kerajinan yang terlatih dalam meningkatkan mutu dan desain produk unggulan	DAU	se-NTB	1 keg	62,750,000	se-NTB	1 keg	202,597,000
3.07.01.01.20	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra			717,995,000				803,074,000
3.07.01.01.20.02	Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian	Jumlah dokumen penyelarasan program perindustrian	DAU	Provinsi NTB	1 keg	333,900,000	Provinsi NTB	1 keg	375,000,000
3.07.01.01.20.03	Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah event promosi produk IKM yang ditingkatkan	DAU	Luar Provinsi	1 keg	150,000,000	Luar Provinsi	1 keg	175,000,000
3.07.01.01.20.04	Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah dokumen data dan informasi sektor perindustrian	DAU	se-NTB	1 keg	234,095,000	se-NTB	1 keg	253,074,000
3.07.01.02	Balai Kemasan Produk Daerah				1,150,452,440				2,450,762,640
3.07.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			309,670,940				989,933,400
3.07.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	DAU	Provinsi NTB	1 keg	1,010,000	Provinsi NTB	1 keg	1,650,000
3.07.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	Provinsi NTB	1 keg	68,640,000	Provinsi NTB	1 keg	77,484,000
3.07.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	59,292,000	Provinsi NTB	1 tahun	66,508,200
3.07.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	83,097,700	Provinsi NTB	1 tahun	91,740,000
3.07.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	1 keg	6,025,440	Provinsi NTB	1 keg	6,968,940
3.07.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	1 keg	3,850,000	Provinsi NTB	1 keg	4,235,000
3.07.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor	DAU	Provinsi NTB	1 keg	3,095,800	Provinsi NTB	1 keg	3,465,000
3.07.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	1 keg	24,000,000	Provinsi NTB	1 keg	55,000,000
3.07.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	2,400,000	Provinsi NTB	1 jenis	2,904,000
3.07.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman rapat kegiatan dan tamu	DAU	Provinsi NTB	1 keg	3,300,000	Provinsi NTB	1 keg	3,630,000
3.07.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	DAU	Luar Provinsi	1 dok	30,000,000	Luar Provinsi	1 dok	33,000,000
3.07.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan di kab/kota	DAU	se-NTB	1 dok	24,960,000	se-NTB	1 dok	22,500,000
3.07.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur			220,525,000				1,001,550,000
3.07.01.02.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	1 keg	125,000,000	Provinsi NTB	1 keg	137,500,000
3.07.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	1 keg	16,225,000	Provinsi NTB	1 keg	17,847,500
3.07.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara	DAU	Provinsi NTB	1 keg	79,300,000	Provinsi NTB	1 keg	88,000,000
3.07.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan			45,800,000				38,500,000
3.07.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	DAU	Provinsi NTB	1 keg	10,800,000	Provinsi NTB	1 keg	11,880,000
3.07.01.02.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	DAU	Provinsi NTB	1 keg	35,000,000	Provinsi NTB	1 keg	38,500,000
3.07.01.02.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi			418,141,500				1,600,000,000
3.07.01.02.17.05	Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM Olahan	Jumlah ikm olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)	DAU	se-NTB	1 keg	418,141,500	se-NTB	1 keg	1,600,000,000
3.07.01.02.23	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah			156,315,000				187,950,000
3.07.01.02.23.02	Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan	Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu Kemasan	DAU	se-NTB	1 keg	82,850,000	se-NTB	1 keg	105,000,000
3.07.01.02.23.03	Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah	Jumlah IKM Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah	DAU	se-NTB	1 keg	73,465,000	se-NTB	1 keg	82,950,000
3.07.01.03	Science Technology and Industrial Park				6,584,283,992				6,026,397,400

3.07.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			636,793,992				989,933,400
3.07.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	14,400,000	Provinsi NTB	1 tahun	204,600,000
3.07.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	1 tahun	490,994,000	Provinsi NTB	1 tahun	540,093,400
3.07.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	1 keg	6,000,000	Provinsi NTB	1 keg	11,600,000
3.07.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	1 keg	17,000,000	Provinsi NTB	1 keg	18,700,000
3.07.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor	DAU	Provinsi NTB	1 keg	20,000,000	Provinsi NTB	1 keg	22,000,000
3.07.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	1 keg	82,999,992	Provinsi NTB	1 keg	187,000,000
3.07.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	5,400,000	Provinsi NTB	1 jenis	5,940,000
3.07.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur			155,760,000				1,001,550,000
3.07.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	DAU	Provinsi NTB	1 keg	760,000	Provinsi NTB	1 keg	698,500,000
3.07.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	1 keg	132,000,000	Provinsi NTB	1 keg	227,700,000
3.07.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara	DAU	Provinsi NTB	1 keg	23,000,000	Provinsi NTB	1 keg	75,350,000
3.07.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan			35,000,000				38,500,000
3.07.01.03.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	DAU	Provinsi NTB	1 dok	35,000,000	Provinsi NTB	1 dok	38,500,000
3.07.01.03.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi			5,566,530,000				2,746,414,000
3.07.01.03.15.02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator	Jumlah WUB program inkubasi di STIPark	DAU	se-NTB	1 keg	5,566,530,000	se-NTB	1 keg	2,746,414,000
3.07.01.03.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina			190,200,000				1,250,000,000
3.07.01.03.16.06	Fasilitasi Kemitraan Industri Kecil Dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah kontrak kerja dan MOU Kemitraan pada STIPark	DAU	Provinsi NTB	1 keg	190,200,000	Provinsi NTB	1 keg	1,250,000,000
3:08	TRANSMIGRASI				110,379,540				176,811,698
3:08:01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				110,379,540				176,811,698
3.08.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Induk)				110,379,540				176,811,698
3.08.01.01.18	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran			110,379,540				176,811,698
3.08.01.01.18.01	Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)	Jumlah dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	28,443,100	Provinsi NTB	1 dokumen	56,811,698
3.08.01.01.18.03	Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Jumlah Dokumen	DAU	Kota Mataram	4 Dokumen	43,428,700	Kota Mataram	4 Dokumen	70,000,000
3.08.01.01.18.10	Bimtek Kewirausahaan	Jumlah transmigran yang dibina	DAU	Provinsi NTB	60 orang	17,808,400	Provinsi NTB	60 orang	25,000,000
3.08.01.01.18.11	Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah transmigran yang dibina	DAU	Provinsi NTB	30 Orang	20,699,340	Provinsi NTB	30 Orang	25,000,000
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				328,505,937,055				28,661,283,782
4:01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				153,823,011,084				28,661,283,782
4:01:03	Sekretariat Daerah				63,823,984,345				28,661,283,782
4.01.03.01	Biro Umum				14,416,521,393				28,661,283,782
4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			7,086,911,700				16,383,279,186
4.01.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola	DAU	Kota Mataram	40000 Surat	29,801,000	Kota Mataram	40000 Surat	33,014,400
4.01.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	DAU	Kota Mataram	59 Rekening	327,480,000	Kota Mataram	49 Rekening	2,000,000,000
4.01.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diterima	DAU	Kota Mataram	520 buah	453,050,000	Kota Mataram	27 Jenis	870,900,000
4.01.03.01.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Orang yang Berobat ke Klinik	DAU	Kota Mataram	1860 orang	48,678,800	Kota Mataram	2504 Orang	156,520,007

4.01.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DAU	Kota Mataram	100 Unit	170,399,000	Kota Mataram	101 Unit	179,072,999
4.01.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	DAU	Kota Mataram	156 OB	187,462,400	Kota Mataram	180 OB	199,955,000
4.01.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning Service yang tersedia	DAU	Kota Mataram	912 OB	1,934,140,000	Kota Mataram	912 OB	2,042,186,999
4.01.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	DAU	Kota Mataram	66 unit	28,900,000	Kota Mataram	72 unit	30,584,000
4.01.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	DAU	Kota Mataram	5428 buah	59,739,200	Kota Mataram	4289 buah	78,029,991
4.01.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	DAU	Kota Mataram	280 Eksemplar	44,035,000	Kota Mataram	3775 Eksemplar	63,615,998
4.01.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	DAU	Kota Mataram	1366 buah	90,115,000	Kota Mataram	46 jenis	122,292,171
4.01.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terseia	DAU	Kota Mataram	3877 buah	409,382,900	Kota Mataram	3877 buah	723,897,738
4.01.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang Tersedia	DAU	Kota Mataram	684 buah	169,755,000	Kota Mataram	281 buah	282,928,000
4.01.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	DAU	Kota Mataram	16280 eksemplar	58,200,000	Kota Mataram	17908 eksemplar	61,392,027
4.01.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayanan makan dan minum yang tersedia	DAU	Kota Mataram	72153 OK	2,645,281,400	Kota Mataram	80882 OK	4,219,047,766
4.01.03.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana	DAU	Kota Mataram	66 OT	10,534,000	Kota Mataram	76 OT	797,586,252
4.01.03.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi/ perkantoran yang terbayar	DAU	Kota Mataram	1658 OB	272,588,000	Kota Mataram	1392 OB	3,342,138,533
4.01.03.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dalam daerah yang terlaksana	DAU	Kota Mataram	521 OT	10,199,000	Kota Mataram	569 OT	878,973,305
4.01.03.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah arsip/surat yang dikelola	DAU	Kota Mataram	40000 berkas	137,171,000	Kota Mataram	50000 berkas	301,144,000
4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			4,166,558,700				8,155,592,377
4.01.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang dibangun	DAU	Kota Mataram	4 Gedung	70,073,000	Kota Mataram	3 Unit	288,122,000
4.01.03.01.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	DAU	Kota Mataram	1 unit	1,080,000	Kota Mataram	0 unit	0
4.01.03.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang tersedia	DAU	Kota Mataram	266 buah	569,303,500	Kota Mataram	173 jenis	1,517,369,873
4.01.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang layak	DAU	Kota Mataram	14 buah	49,700,000	Kota Mataram	18 buah	50,456,529
4.01.03.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah UPS/ Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik yang diadakan	DAU	Kota Mataram	31 unit	142,200,000	Kota Mataram	36 unit	352,867,438
4.01.03.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan yang layak huni	DAU	Kota Mataram	3 rumah jabatan	546,870,000	Kota Mataram	3 rumah jabatan	803,081,000
4.01.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	7 gedung	157,100,000	Kota Mataram	7 gedung	575,230,000
4.01.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	85 unit	1,691,465,000	Kota Mataram	91 unit	1,711,094,000
4.01.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	248 unit	134,125,000	Kota Mataram	347 unit	151,297,000
4.01.03.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	30 unit	38,575,000	Kota Mataram	93 unit	42,898,000
4.01.03.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor yang terpelihara	DAU	Kota Mataram	4 paket	365,424,000	Kota Mataram	3 paket	448,694,000
4.01.03.01.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah Rumah rumah jabatan yang layak huni	DAU	Kota Mataram	3 Rumah Jabatan	300,019,000	Kota Mataram	3 Rumah Jabatan	1,510,604,271
4.01.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak	DAU	Kota Mataram	7 gedung	100,624,200	Kota Mataram	7 gedung	703,878,265
4.01.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			449,449,000				580,565,419
4.01.03.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah waktu sewa sarana olahraga	DAU	Kota Mataram	336 jam	19,989,000	Kota Mataram	336 jam	21,294,000
4.01.03.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	DAU	Kota Mataram	2 orang	200,000	Kota Mataram	5 orang	15,970,500
4.01.03.01.05.25	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Jumlah Latihan, Gladi dan Pentas Marching Band Gema Bakti Praja	DAU	Kota Mataram	75 kali	429,260,000	Kota Mataram	75 kali	543,300,919

4.01.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			127,920,000				472,043,451
4.01.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas yang terselesaikan	DAU	Kota Mataram	2 dokumen	3,280,000	Kota Mataram	2 dokumen	95,200,000
4.01.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang terselesaikan	DAU	Kota Mataram	2 dokumen	78,115,000	Kota Mataram	2 dokumen	96,350,000
4.01.03.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersedia	DAU	Kota Mataram	4 dokumen	46,525,000	Kota Mataram	4 dokumen	280,493,451
4.01.03.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			263,276,000				426,144,257
4.01.03.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah buku DKBMD/DKPBMD	DAU	Kota Mataram	2 dokumen	263,276,000	Kota Mataram	2 dokumen	426,144,257
4.01.03.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH			2,322,405,993				2,643,659,093
4.01.03.01.16.06	Peningkatan pelayanan kedinasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Rakor Staf Ahli Gubernur/Bupati, Walikota	DAU	Kota Mataram	25 kali	279,300,000	Kota Mataram	25 kali	460,000,000
4.01.03.01.16.07	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	DAU	Kota Mataram	12 kali	2,043,105,993	Kota Mataram	12 kali	2,183,659,093
4.01.03.02	Biro Organisasi				3,936,105,069				2,219,500,739
4.01.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana			352,109,600				386,240,000
4.01.03.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	P A D	Kota Mataram	60 OB	47,452,000	Kota Mataram	60 OB	48,600,000
4.01.03.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	P A D	Kota Mataram	45 jenis	34,277,600	Kota Mataram	45 jenis	41,040,000
4.01.03.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	P A D	Kota Mataram	100 Eksemplar	9,400,000	Kota Mataram	110 Eksemplar	11,000,000
4.01.03.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	P A D	Kota Mataram	3600 Eksemplar	18,000,000	Kota Mataram	3600 Eksemplar	21,600,000
4.01.03.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	P A D	Kota Mataram	1000 Porsi	50,000,000	Kota Mataram	1000 Porsi	55,000,000
4.01.03.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah	P A D	Kota Mataram	17 OT	104,490,000	Kota Mataram	18 OT	117,000,000
4.01.03.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD dalam daerah	P A D	Kota Mataram	23 OT	88,490,000	Kota Mataram	23 OT	92,000,000
4.01.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara			186,338,000				222,717,620
4.01.03.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	P A D	Kota Mataram	24 unit	156,138,000	Kota Mataram	24 unit	196,494,312
4.01.03.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang layak pakai	P A D	Kota Mataram	58 unit	30,200,000	Kota Mataram	58 unit	26,223,308
4.01.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20,000,000				20,000,000
4.01.03.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	P A D	Kota Mataram	4 Orang	20,000,000	Kota Mataram	1 Orang	20,000,000
4.01.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			85,950,070				97,207,142
4.01.03.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	P A D	Kota Mataram	1 dok	20,990,000	Kota Mataram	8 dok	25,004,648
4.01.03.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan pelaporan	P A D	Kota Mataram	1 dok	64,960,070	Kota Mataram	2 dok	72,202,494
4.01.03.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase laporan asset yang tersusun			11,824,000				14,010,222
4.01.03.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	tersedianya dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	P A D	Kota Mataram	1 dok	11,824,000	Kota Mataram	1 dok	14,010,222
4.01.03.02.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi ; Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat			232,798,000				256,367,979
4.01.03.02.19.01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	jumlah inovasi pelayanan publik terinventarisir, jumlah reflikasi inovasi pelayanan publik, jumlah penerimaan penghargaan pelayanan publik berprestasi	P A D	Kota Mataram	4 inovasi	232,798,000	Kota Mataram	21 buah	256,367,979

4.01.03.02.21	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel			63,121,000				67,202,685
4.01.03.02.21.01	Penilaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja SKPD	P A D	Kota Mataram	3 Dokumen	63,121,000	Kota Mataram	1 Dokumen	67,202,685
4.01.03.02.23	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun			272,075,500				336,784,146
4.01.03.02.23.01	Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Anjab dan ABK, Dokumen Pedoman Syarat Jabatan, dan Dokumen Evaluasi Jabatan	P A D	Kota Mataram	3 Dokumen	145,108,500	Kota Mataram	56 Dokumen	179,600,568
4.01.03.02.23.03	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen Hubungan Kerja Jabatan Struktural, Jumlah dokumen Hubungan Jabatan Fungsional	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	126,967,000	Kota Mataram	2 Dokumen	157,183,578
4.01.03.02.24	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB			1,291,464,999				251,084,172
4.01.03.02.24.01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	jumlah dokumen LAKIP, PK, RKT,	P A D	Kota Mataram	3 Dokumen	1,291,464,999	Kota Mataram	4 Dokumen	251,084,172
4.01.03.02.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata			395,668,900				446,100,000
4.01.03.02.27.11	Penataan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata	P A D	Kota Mataram	3 Dokumen	382,068,900	Kota Mataram	3 Dokumen	446,100,000
4.01.03.02.27.13	Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	P A D	Provinsi NTB	3 dokumen	13,600,000	Provinsi NTB	3 dokumen	0
4.01.03.02.30	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik			59,513,000				69,153,019
4.01.03.02.30.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD	jumlah dokumen evaluasi SOP perangkat daerah / unit daerah	P A D	Kota Mataram	1 dokumen	59,513,000	Kota Mataram	1 dokumen	69,153,019
4.01.03.02.31	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik			46,556,000				52,633,754
4.01.03.02.31.01	Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja ASN	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	46,556,000	Kota Mataram	2 Dokumen	52,633,754
4.01.03.02.57	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun			736,311,000				0
4.01.03.02.57.01	Penguatan sumber daya lembaga perangkat daerah	Jumlah dokumen penguatan sumber daya lembaga perangkat daerah	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	366,921,028	Provinsi NTB	0 0	0
4.01.03.02.57.02	Penataan sumber daya aparatur	Jumlah laporan hasil sumber daya aparatur ASN yang tertata	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	369,389,972	Provinsi NTB	0 0	0
4.01.03.02.58	Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti			75,245,000				0
4.01.03.02.58.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	jumlah aduan masyarakat yang masuk	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	75,245,000	Kota Mataram	0 dok	0
4.01.03.02.59	Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik			36,590,000				0
4.01.03.02.59.01	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	jumlah OPD yang sudah memenuhi standar pelayanan	P A D	Kota Mataram	1 Unit Kerja	36,590,000	Kota Mataram	0 unit kerja	0
4.01.03.02.60	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi			70,540,000				0
4.01.03.02.60.01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	jumlah inovasi pelayanan publik yang tereplikasi	P A D	Kota Mataram	1 inovasi	70,540,000	Kota Mataram	0 inovasi	0
4.01.03.03	Biro Hukum				1,997,044,836				2,900,980,698
4.01.03.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			518,773,896				595,543,283
4.01.03.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang diproses	P A D	Kota Mataram	278 surat	9,999,000	Kota Mataram	278 surat	10,000,216
4.01.03.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	P A D	Kota Mataram	12 Rekening	16,999,992	Kota Mataram	12 Rekening	17,000,004
4.01.03.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Terbayar	P A D	Kota Mataram	60 OB	45,671,500	Kota Mataram	60 OB	58,584,000
4.01.03.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	P A D	Kota Mataram	25 buah	66,600,000	Kota Mataram	25 buah	66,600,000
4.01.03.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	P A D	Kota Mataram	11290 Eksemplar	33,250,000	Kota Mataram	11290 Eksemplar	34,999,000

4.01.03.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	P A D	Kota Mataram	72 Eksemplar	11,100,000	Kota Mataram	72 Eksemplar	17,167,968
4.01.03.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	P A D	Kota Mataram	624 Porsi	33,885,000	Kota Mataram	624 Porsi	42,120,000
4.01.03.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	P A D	Luar Provinsi	13 OT	109,200,000	Luar Provinsi	15 OT	135,490,020
4.01.03.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi/perkantoran yang terbayar	P A D	Kota Mataram	3 OB	90,187,476	Kota Mataram	3 OB	100,700,409
4.01.03.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah yang terlaksana	P A D	se-NTB	32 OT	101,880,928	se-NTB	34 OT	112,881,666
4.01.03.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			145,412,000				176,400,028
4.01.03.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang terawat dan layak operasional	P A D	Kota Mataram	18 unit	103,412,000	Kota Mataram	18 unit	133,900,002
4.01.03.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat Kantor yang terawat dan Layak Pakai	P A D	Kota Mataram	38 unit	42,000,000	Kota Mataram	41 unit	42,500,026
4.01.03.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD			75,000,000				84,196,047
4.01.03.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang tersedia	P A D	Kota Mataram	1 Dok	15,000,000	Kota Mataram	1 Dok	15,000,000
4.01.03.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan yang Tersedia	P A D	Kota Mataram	1 Dok	15,000,000	Kota Mataram	1 Dok	24,196,647
4.01.03.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Laporan Yang Tersedia	P A D	Kota Mataram	3 Dok	45,000,000	Kota Mataram	3 Dok	44,999,400
4.01.03.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah			13,585,000				14,481,720
4.01.03.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tertatannya Aset Daerah	P A D	Kota Mataram	2 Dok	13,585,000	Kota Mataram	2 Dok	14,481,720
4.01.03.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk			574,200,000				1,311,044,680
4.01.03.03.26.02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang terbentuk	P A D	Provinsi NTB	740 Perda/SK/Pergub	454,700,000	Provinsi NTB	740 Perda/SK/Pergub	669,700,000
4.01.03.03.26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terfasilitasi dan Terevaluasinya Produk Hukum Daerah	P A D	Kota Mataram	120 Perda/Perbup/Perwal	12,700,000	Kota Mataram	120 Perda/Perbup/Perwal	426,500,040
4.01.03.03.26.08	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah	P A D	Kota Mataram	160 Perda/Pergub/Peserta	106,800,000	Kota Mataram	160 Perda/Pergub/Peserta	214,844,640
4.01.03.03.28	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum			670,073,940				719,314,940
4.01.03.03.28.02	Rencana Aksi Ham & HAKI	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Rakor	P A D	se-NTB	120 Peserta	144,300,000	se-NTB	120 Peserta	156,054,000
4.01.03.03.28.03	Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum litigasi	P A D	se-NTB	4 Perkara	332,473,940	se-NTB	4 Perkara	356,410,940
4.01.03.03.28.04	Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Pemda	P A D	se-NTB	4 Perkara	84,400,000	se-NTB	4 Perkara	86,850,000
4.01.03.03.28.05	Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama	Jumlah Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama	P A D	se-NTB	20 Naskah	108,900,000	se-NTB	20 Naskah	120,000,000
4.01.03.04	Biro Pemerintahan				3,068,899,805				3,287,953,625
4.01.03.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			614,240,800				653,960,952
4.01.03.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	P A D	Provinsi NTB	250 surat	7,000,000	Provinsi NTB	250 surat	7,000,000
4.01.03.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening jasa komunikasi yang disediakan	P A D	Provinsi NTB	4 rekening	20,227,100	Provinsi NTB	4 rekening	21,119,752
4.01.03.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas Yang di pelihara	P A D	Provinsi NTB	17 unit	124,984,000	Provinsi NTB	19 unit	126,996,000
4.01.03.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	P A D	Provinsi NTB	5 OB	46,984,000	Provinsi NTB	5 OB	48,000,000
4.01.03.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	P A D	Provinsi NTB	25 buah	34,991,800	Provinsi NTB	25 buah	36,000,000

4.01.03.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Penggandaan dan barang cetakan	P A D	Provinsi NTB	1951 eksemplar	39,995,400	Provinsi NTB	1951 eksemplar	39,995,500
4.01.03.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah bahan bacaan yang disediakan	P A D	Provinsi NTB	3537 eksemplar	22,990,500	Provinsi NTB	4000 eksemplar	24,000,000
4.01.03.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minuman yang disediakan	P A D	Provinsi NTB	1200 porsi	36,000,000	Provinsi NTB	1233 porsi	36,990,000
4.01.03.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Penyelarasan program yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	P A D	Luar Provinsi	12 kali	150,000,000	Luar Provinsi	13 kali	169,999,700
4.01.03.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelarasan program yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	P A D	se-NTB	40 kali	118,000,000	se-NTB	40 kali	130,000,000
4.01.03.04.01.25	Pengelola Kearsipan	arsip yang dikelola	P A D	Provinsi NTB	3960 berkas	13,068,000	Provinsi NTB	3960 berkas	13,860,000
4.01.03.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur			61,000,000				65,111,595
4.01.03.04.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	jumlah komputer dan alat elektronik yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	1 unit	8,000,000	Provinsi NTB	1 unit	8,000,000
4.01.03.04.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	P A D	Provinsi NTB	1 unit	7,000,000	Provinsi NTB	1 unit	7,000,000
4.01.03.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	P A D	Provinsi NTB	42 unit	46,000,000	Provinsi NTB	45 unit	50,111,595
4.01.03.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan			147,400,000				157,614,000
4.01.03.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	P A D	Provinsi NTB	4 dokumen	95,000,000	Provinsi NTB	4 dokumen	100,000,000
4.01.03.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	P A D	Provinsi NTB	4 dokumen	52,400,000	Provinsi NTB	4 dokumen	57,614,000
4.01.03.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset			11,429,000				12,461,000
4.01.03.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen manajemen aset/BMD	P A D	Provinsi NTB	2 dokumen	11,429,000	Provinsi NTB	2 dokumen	12,461,000
4.01.03.04.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah			248,346,000				264,936,000
4.01.03.04.25.01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	Jumlah jenis iuran kerjasama yang dibayarkan	P A D	Luar Provinsi	2 jenis	248,346,000	Luar Provinsi	2 jenis	264,936,000
4.01.03.04.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata			1,330,556,000				1,422,968,000
4.01.03.04.27.05	Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB	Jumlah DOB yang difasilitasi	P A D	se-NTB	3 DOB	271,566,000	se-NTB	1 DOB	121,988,000
4.01.03.04.27.06	Penyelesaian administrasi kepala daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab./Kota se	Jumlah izin pejabat yang diselesaikan	P A D	Provinsi NTB	30 orang	549,990,000	Provinsi NTB	30 orang	760,980,000
4.01.03.04.27.08	Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pusat di daerah	frekuensi monitoring program pusat	P A D	se-NTB	10 kali	100,000,000	se-NTB	10 kali	110,000,000
4.01.03.04.27.09	Monev pelaksanaan trantib, Linmas dan Kebencanaan	frekuensi monev trantib, linmas dan kebencanaan	P A D	se-NTB	10 kali	119,000,000	se-NTB	10 kali	130,000,000
4.01.03.04.27.10	Monev pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah	frekuensi monev penegasan batas daerah dan penataan desa	P A D	se-NTB	10 kali	290,000,000	se-NTB	10 kali	300,000,000
4.01.03.04.32	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan			76,205,319				81,239,081
4.01.03.04.32.02	Pembinaan Penataan Daerah	jumlah dokumen pembinaan dan penataan daerah	P A D	se-NTB	1 dokumen	76,205,319	se-NTB	1 dokumen	81,239,081
4.01.03.04.33	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD			579,722,686				629,662,997
4.01.03.04.33.01	Penyusunan LPPD Gubernur	Jumlah dokumen yang disusun	P A D	Provinsi NTB	1 dokumen	343,423,000	Provinsi NTB	1 dokumen	372,663,000
4.01.03.04.33.02	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah	Frekuensi koordinasi	P A D	Provinsi NTB	1 kali	102,799,686	Provinsi NTB	1 kali	117,000,997
4.01.03.04.33.03	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB	Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat	P A D	Provinsi NTB	1 dokumen	133,500,000	Provinsi NTB	1 dokumen	139,999,000
4.01.03.05	Biro Perekonomian				1,808,748,155				2,317,224,813
4.01.03.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			181,952,013				259,156,742
4.01.03.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	Silpa	Provinsi NTB	2522 Surat	550,000	Provinsi NTB	2530 surat	1,160,005
4.01.03.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang terbayar	Silpa	Provinsi NTB	2 Rekening	12,000,000	Provinsi NTB	2 Rekening	12,500,000

4.01.03.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan yang terbayar	Silpa	Provinsi NTB	6 Orang	56,732,000	Provinsi NTB	6 Orang	59,236,782
4.01.03.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	Silpa	Provinsi NTB	15 Jenis	8,103,990	Provinsi NTB	15 Jenis	8,149,995
4.01.03.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Silpa	Provinsi NTB	4 Jenis	1,750,000	Provinsi NTB	4 Jenis	180,000
4.01.03.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang Undangan yang tersedia	Silpa	Provinsi NTB	60 Exemplar	4,999,000	Provinsi NTB	60 Exemplar	5,499,960
4.01.03.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pelayanan Makanan dan Minuman yang tersedia	Silpa	Provinsi NTB	40 OK	5,560,000	Provinsi NTB	50 OK	10,000,000
4.01.03.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang Terlaksana	Silpa	Luar Provinsi	45 OT	52,996,500	Luar Provinsi	50 OT	55,000,000
4.01.03.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis Administrasi/ Perkantoran yang Terbayar	Silpa	Provinsi NTB	1 Orang	39,200,000	Provinsi NTB	1 Orang	42,000,000
4.01.03.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah Yang Terlaksana	Silpa	Provinsi NTB	25 OT	60,523	Provinsi NTB	30 OT	65,430,000
4.01.03.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			81,178,700				93,184,100
4.01.03.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	Silpa	Provinsi NTB	16 Unit	77,178,700	Provinsi NTB	16 Unit	87,185,600
4.01.03.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	Silpa	Provinsi NTB	40 Unit	4,000,000	Provinsi NTB	45 Unit	5,998,500
4.01.03.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000				53,013,680
4.01.03.05.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	P A D	Provinsi NTB	20 OK	50,000,000	Provinsi NTB	20 OK	53,013,680
4.01.03.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			83,740,000				93,331,500
4.01.03.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas yang terselesaikan	Silpa	Provinsi NTB	1 Dokumen	12,000,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	12,000,000
4.01.03.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang Terselesaikan	Silpa	Provinsi NTB	1 Dokumen	12,800,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	12,800,000
4.01.03.05.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedia	Silpa	Provinsi NTB	5 Dokumen	58,940,000	Provinsi NTB	5 Dokumen	68,531,500
4.01.03.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset			10,598,000				11,236,927
4.01.03.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Buku DKBMD/ DKPBMD	P A D	Provinsi NTB	1 Dokumen	10,598,000	Provinsi NTB	1 Dokumen	11,236,927
4.01.03.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD			417,418,542				442,577,967
4.01.03.05.17.20	Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Perusda yang Terbina (11 Perusahaan)	P A D	Provinsi NTB	11 Perusahaan	294,906,420	Provinsi NTB	11 Perusahaan	312,660,805
4.01.03.05.17.21	Monitoring dan evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM	Jumlah rumusan kebijakan LK, Koperasi dan UKM (1 rumusan)	P A D	Provinsi NTB	2 Kegiatan	122,512,122	Provinsi NTB	2 Kegiatan	129,917,162
4.01.03.05.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD			105,057,000				220,534,897
4.01.03.05.22.03	Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD	Jumlah rumusan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD (2 rumusan)	P A D	Provinsi NTB	11 Perusahaan	105,057,000	Provinsi NTB	11 Perusahaan	220,534,897
4.01.03.05.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah			534,286,000				756,375,000
4.01.03.05.34.1	Monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Jumlah rumusan koordinasi monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan (2 rumusan)	DBH-CHT	Provinsi NTB	2 Dokumen	69,112,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	180,500,000
4.01.03.05.34.02	Monitoring dan evaluasi produksi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (2 rumusan)	DBH-CHT,P A D	Provinsi NTB	2 Dokumen	340,500,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	420,000,000
4.01.03.05.34.03	Monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Bahan Galian dan Energi (2 rumusan)	DBH-CHT	Provinsi NTB	2 Dokumen	124,674,000	Provinsi NTB	2 Dokumen	155,875,000
4.01.03.05.35	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi			183,301,200				196,470,000

4.01.03.05.35.1	Pengembangan Investasi	Jumlah Hasil Kajian investasi (4 kajian)	P A D	Provinsi NTB	1 Kegiatan	183,301,200	Provinsi NTB	1 Kegiatan	196,470,000
4.01.03.05.36	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti			161,216,700				191,344,000
4.01.03.05.36.1	Pendataan statistik perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan data dan statistik (1 rumusan)	Silpa	Provinsi NTB	2 Jenis	38,872,000	Provinsi NTB	2 Jenis	42,872,000
4.01.03.05.36.02	Pengendalian inflasi daerah	Jumlah rumusan kebijakan pengendalian inflasi (1 rumusan)	P A D	Provinsi NTB	2 Kegiata	78,395,000	Provinsi NTB	2 Kegiata	100,522,000
4.01.03.05.36.03	Monitoring dan evaluasi pariwisata dan perhubungan	Jumlah rumusan kebijakan hasil FGD Pariwisata dan Perhubungan (1 rumusan)	P A D	Provinsi NTB	2 Dokumen	43,949,700	Provinsi NTB	2 Dokumen	47,950,000
4.01.03.06	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP				4,999,209,627				5,521,580,791
4.01.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			466,821,100				499,000,000
4.01.03.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	DAU	Kota Mataram	1000 buah	9,043,000	Kota Mataram	1000 buah	9,100,000
4.01.03.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	1 jenis	30,600,000	Kota Mataram	1 jenis	32,000,000
4.01.03.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa administrasi	DAU	Kota Mataram	5 orang	85,781,600	Kota Mataram	5 orang	94,000,000
4.01.03.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	DAU	Kota Mataram	20 jenis	46,463,000	Kota Mataram	20 jenis	51,000,000
4.01.03.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	1 unit	24,600,000	Kota Mataram	1 unit	5,000,000
4.01.03.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	DAU	Kota Mataram	1 jenis	7,140,000	Kota Mataram	1 jenis	7,500,000
4.01.03.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum	DAU	Kota Mataram	2 jenis	39,468,000	Kota Mataram	2 jenis	42,500,000
4.01.03.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	frekuensi koordinasi	DAU	Luar Provinsi	10 kali	137,034,000	Luar Provinsi	10 kali	165,000,000
4.01.03.06.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jumlah orang	DAU	Kota Mataram	1 orang	38,997,000	Kota Mataram	1 orang	42,900,000
4.01.03.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	frekuensi koordinasi	DAU	se-NTB	5 kali	47,694,500	se-NTB	5 kali	50,000,000
4.01.03.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			54,912,000				191,189,670
4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	DAU	Kota Mataram	21 unit	54,912,000	Kota Mataram	21 unit	191,189,670
4.01.03.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,000,000				22,000,000
4.01.03.06.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang	DAU	Luar Provinsi	4 orang	21,000,000	Luar Provinsi	4 orang	22,000,000
4.01.03.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			95,188,000				102,610,000
4.01.03.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	DAU	Kota Mataram	1 dokumen	20,188,000	Kota Mataram	1 dokumen	22,610,000
4.01.03.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen	DAU	Kota Mataram	5 dokumen	75,000,000	Kota Mataram	5 dokumen	80,000,000
4.01.03.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			11,535,530				12,281,397
4.01.03.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen	DAU	Kota Mataram	1 dokumen	11,535,530	Kota Mataram	1 dokumen	12,281,397
4.01.03.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga			130,042,000				138,454,224
4.01.03.06.17.02	Penyusunan standar satuan harga	jumlah dokumen	DAU	Kota Mataram	3 dokumen	130,042,000	Kota Mataram	3 dokumen	138,454,224
4.01.03.06.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ			3,442,170,998				3,980,725,000
4.01.03.06.20.13	Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB	jumlah dokumen	DAU	Kota Mataram	3 dokumen	284,214,999	Kota Mataram	3 dokumen	310,000,000
4.01.03.06.20.24	Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	1 dokumen	94,000,000	se-NTB	1 dokumen	120,000,000
4.01.03.06.20.27	Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	1 dokumen	78,000,000	se-NTB	1 dokumen	105,000,000
4.01.03.06.20.28	Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	1 dokumen	81,500,000	se-NTB	1 dokumen	115,000,000
4.01.03.06.20.29	Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	1 dokumen	172,288,000	se-NTB	1 dokumen	210,000,000

4.01.03.06.20.30	Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	1 dokumen	81,500,000	se-NTB	1 dokumen	85,000,000
4.01.03.06.20.31	Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	kemantapan ULP	DAU	Provinsi NTB	3 level	2,401,263,999	Provinsi NTB	4 level	2,761,191,000
4.01.03.06.20.33	Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	jumlah dokumen	DAU	se-NTB	1 dokumen	81,500,000	se-NTB	1 dokumen	85,000,000
4.01.03.06.20.34	Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah pembinaan	DAU	Kota Mataram	5 kali	106,440,000	Kota Mataram	5 kali	121,319,000
4.01.03.06.20.35	Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah sistem elektronik	DAU	Kota Mataram	1 sistem	61,464,000	Kota Mataram	1 sistem	68,215,000
4.01.03.06.56	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)			777,539,999				575,320,500
4.01.03.06.56.01	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	OPD yang terlayani	DAU	Provinsi NTB	1 prov	249,400,000	Provinsi NTB	1 prov	260,000,000
4.01.03.06.56.02	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Jumlah standarisasi yg terpenuhi	DAU	Provinsi NTB	5 standar	528,139,999	Provinsi NTB	10 standar	315,320,500
4.01.03.07	Biro Kesejahteraan Rakyat				9,026,510,000				9,684,367,000
4.01.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			490,584,000				533,717,000
4.01.03.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang keluar	DAU	Provinsi NTB	1 Jumlah Surat	7,500,000	Provinsi NTB	1 Jumlah Surat	7,500,000
4.01.03.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	1 Jenis	15,000,000	Provinsi NTB	1 Jenis	15,000,000
4.01.03.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	16 Jenis	45,000,000	Provinsi NTB	16 Jenis	50,000,000
4.01.03.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	20 OB	69,984,000	Provinsi NTB	20 OB	70,000,000
4.01.03.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	100 Jenis	33,500,000	Provinsi NTB	100 Jenis	40,000,000
4.01.03.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	100 Jenis	45,000,000	Provinsi NTB	100 Jenis	45,000,000
4.01.03.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	5,000,000	Provinsi NTB	4 Jenis	10,000,000
4.01.03.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	DAU	Provinsi NTB	50 Eksemplar	12,480,000	Provinsi NTB	50 Eksemplar	20,000,000
4.01.03.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	100 orang	30,000,000	Provinsi NTB	100 orang	30,000,000
4.01.03.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	5 orang	50,000,000	Luar Provinsi	5 orang	50,000,000
4.01.03.07.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 orang	113,400,000	Provinsi NTB	1 orang	114,000,000
4.01.03.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	DAU	Provinsi NTB	1 orang	63,720,000	Provinsi NTB	1 orang	82,217,000
4.01.03.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			110,266,000				114,230,000
4.01.03.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan	DAU	Provinsi NTB	1 unit	110,266,000	Provinsi NTB	1 unit	114,230,000
4.01.03.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan IPTEK Aparatur			37,500,000				54,385,000
4.01.03.07.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	37,500,000	Provinsi NTB	1 orang	54,385,000
4.01.03.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			111,423,000				117,288,000
4.01.03.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 laporan	23,200,000	Provinsi NTB	1 laporan	25,000,000
4.01.03.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	25,000,000	Provinsi NTB	1 orang	25,000,000
4.01.03.07.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	63,223,000	Provinsi NTB	1 orang	67,288,000
4.01.03.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur			14,577,000				16,033,000
4.01.03.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jenis laporan	DAU	Provinsi NTB	1 laporan	14,577,000	Provinsi NTB	1 laporan	16,033,000
4.01.03.07.40	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan			6,378,794,000				6,896,809,000
4.01.03.07.40.01	Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)	jumlah kegiatan	DAU	Provinsi NTB	1 kegiatan	250,000,000	Provinsi NTB	1 kegiatan	250,000,000
4.01.03.07.40.02	Penguatan Pelaksanaan Embarkasi Haji NTB	jenis kegiatan	DAU	Provinsi NTB	1 kegiatan	500,000,000	Provinsi NTB	1 kegiatan	500,000,000
4.01.03.07.40.03	Pelaksanaan STQ/MTQ Provinsi/Nasional	jumlah jenis kegiatan	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	2,221,000,000	Provinsi NTB	1 jenis	2,500,000,000
4.01.03.07.40.04	Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	175,000,000	Provinsi NTB	1 jenis	175,000,000

4.01.03.07.40.05	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	1,500,000,000	Provinsi NTB	1 jenis	1,500,000,000
4.01.03.07.40.06	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama / FKUB	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	200,000,000	Provinsi NTB	1 orang	200,000,000
4.01.03.07.40.07	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	250,000,000	Provinsi NTB	1 orang	250,000,000
4.01.03.07.40.08	Pesona Khasanah Ramadhan	jenis jenis	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	1,157,794,000	Provinsi NTB	1 jenis	1,396,809,000
4.01.03.07.40.18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	125,000,000	Provinsi NTB	1 orang	125,000,000
4.01.03.07.41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular			178,801,000				185,220,000
4.01.03.07.41.01	Penguatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	178,801,000	Provinsi NTB	1 jenis	185,220,000
4.01.03.07.42	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS			175,000,000				181,283,000
4.01.03.07.42.03	Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	175,000,000	Provinsi NTB	1 orang	181,283,000
4.01.03.07.43	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG			108,579,000				112,477,000
4.01.03.07.43.01	Penguatan Upaya Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	108,579,000	Provinsi NTB	1 jenis	112,477,000
4.01.03.07.44	Program Pengendalian Penduduk dan KB	Rasio Akseptor KB dan Penduduk			90,000,000				93,231,000
4.01.03.07.44.19	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	90,000,000	Provinsi NTB	1 orang	93,231,000
4.01.03.07.45	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi			318,088,000				329,507,000
4.01.03.07.45.01	Pemuda Kreatif dan Berprestasi	jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	1 orang	318,088,000	Provinsi NTB	1 orang	329,507,000
4.01.03.07.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra			376,194,000				389,699,000
4.01.03.07.46.01	Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Monitoring dan Evaluasi partisipasi masyarakat	jumlah SPDD	DAU	Kab. Bima	1 orang	376,194,000	Kab. Bima	1 orang	389,699,000
4.01.03.07.47	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS			31,633,000				32,769,000
4.01.03.07.47.01	Penguatan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	jumlah jenis	DAU	Kab. Bima	1 jenis	31,633,000	Kab. Bima	1 jenis	32,769,000
4.01.03.07.48	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS			517,218,000				535,786,000
4.01.03.07.48.01	Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	jumlah jenis	DAU	Kab. Bima	1 jenis	100,000,000	Kab. Bima	1 jenis	100,000,000
4.01.03.07.48.02	Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA D Provinsi NTB)	jumlah jenis	DAU	Kab. Bima	1 jenis	417,218,000	Kab. Bima	1 jenis	435,786,000
4.01.03.07.49	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan			28,997,000				30,038,000
4.01.03.07.49.01	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	jumlah SPDD	DAU	Provinsi NTB	1 orang	28,997,000	Provinsi NTB	1 orang	30,038,000
4.01.03.07.51	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif			58,856,000				61,895,000
4.01.03.07.51.11	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	jumlah jenis	DAU	Provinsi NTB	1 jenis	58,856,000	Provinsi NTB	1 jenis	61,895,000
4.01.03.08	Biro Humas dan Protokol				22,786,265,400				23,268,301,996
4.01.03.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,955,977,000				1,871,750,000
4.01.03.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola	DAU	se-NTB	3000 surat	48,000,000	se-NTB	3000 surat	48,000,000
4.01.03.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	DAU	Provinsi NTB	8 Orang	90,072,000	Provinsi NTB	8 Orang	100,000,000
4.01.03.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	DAU	se-NTB	50 Buah	198,325,000	se-NTB	50 Buah	200,000,000
4.01.03.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	350 Buah	51,880,000	Provinsi NTB	350 Buah	78,750,000
4.01.03.08.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	8 Unit	135,300,000	Provinsi NTB	3 Unit	135,000,000
4.01.03.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	DAU	se-NTB	3 Paket	400,200,000	se-NTB	3 Paket	402,000,000

4.01.03.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana	DAU	Luar Provinsi	190 OT	475,000,000	Luar Provinsi	190 OT	418,000,000
4.01.03.08.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi/ perkantoran yang terbayar	DAU	se-NTB	2 Orang	67,200,000	se-NTB	2 Orang	91,000,000
4.01.03.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dalam daerah yang terlaksana	DAU	se-NTB	245 OT	490,000,000	se-NTB	190 OT	399,000,000
4.01.03.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			1,642,200,000				784,500,000
4.01.03.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	P A D	se-NTB	6 Unit	900,000,000	se-NTB	0 0	0
4.01.03.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	DAU	se-NTB	35 Unit	616,950,000	se-NTB	32 Unit	512,000,000
4.01.03.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	DAU	se-NTB	90 Unit	125,250,000	se-NTB	100 Unit	272,500,000
4.01.03.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur			57,760,000				57,840,000
4.01.03.08.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah Kapasitas SDM Aparatur yang Tersedia	DAU	se-NTB	80 Orang	57,760,000	se-NTB	80 Orang	57,840,000
4.01.03.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			174,960,000				190,000,000
4.01.03.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang Terselesaikan	P A D	Provinsi NTB	2 Dok	62,560,000	Provinsi NTB	2 Dok	70,000,000
4.01.03.08.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedia	P A D	Provinsi NTB	4 Dok	112,400,000	Provinsi NTB	4 Dok	120,000,000
4.01.03.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			21,640,400				23,056,000
4.01.03.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Aset/BMD yang dikelola	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	21,640,400	Provinsi NTB	1 Dok	23,056,000
4.01.03.08.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH			7,617,132,000				8,103,500,000
4.01.03.08.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat yang Terlaksana	DAU	se-NTB	14 Keg	1,088,432,000	se-NTB	14 Keg	1,050,000,000
4.01.03.08.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja yang Terlaksana	DAU	se-NTB	230 OK	388,700,000	se-NTB	230 OK	391,000,000
4.01.03.08.16.08	Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur	Jumlah Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Pendamping yang Terlaksana	DAU	Luar Provinsi	300 OT	4,800,000,000	Luar Provinsi	315 OT	5,512,500,000
4.01.03.08.16.09	Pemantapan Pelayanan Protokol	Jumlah Pelayanan Protokol yang terpenuhi	DAU	se-NTB	10 Keg	1,340,000,000	se-NTB	10 Keg	1,150,000,000
4.01.03.08.52	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa			6,275,533,000				6,680,500,000
4.01.03.08.52.12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	P A D	se-NTB	425 Kali	6,275,533,000	se-NTB	431 Kali	6,680,500,000
4.01.03.08.53	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media			5,041,063,000				5,557,155,996
4.01.03.08.53.01	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang tersedia	P A D	se-NTB	30 Buah	567,439,970	se-NTB	32 Buah	795,135,968
4.01.03.08.53.02	Pemantapan komunikasi dan informasi	Jumlah Peliputan dan Penyebaran Informasi yang Terfasilitasi	P A D	se-NTB	35 Keg	1,167,000,000	se-NTB	38 Keg	1,267,870,000
4.01.03.08.53.03	Peliputan kegiatan pimpinan dan program unggulan daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan yang dihasilkan	P A D	se-NTB	12 Keg	1,448,640,000	se-NTB	12 Keg	1,464,000,000
4.01.03.08.53.04	Publikasi Program Unggulan, Pengelolaan Isu dan Kumunikasi Publik	Jumlah Program Unggulan NTB Gemilang yang Terpublikasi.	P A D	se-NTB	30 Keg	960,000,000	se-NTB	30 Keg	960,000,000
4.01.03.08.53.05	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah Informasi Berbasis Aplikasi yang Dihasilkan.	P A D	se-NTB	10 Keg	897,983,030	se-NTB	12 Keg	1,070,150,028
4.01.03.09	Biro Administrasi Kerjasama				1,784,680,060				4,923,448,729
4.01.03.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			114,480,060				320,227,000
4.01.03.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	P A D	Kota Mataram	1200 surat	4,800,000	Kota Mataram	1250 surat	5,000,000
4.01.03.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Iuran bulanan rekening yang terbayarkan	P A D	Kota Mataram	12 Bulan	9,600,000	Kota Mataram	12 Bulan	9,780,000

4.01.03.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan yang terbayarkan	P A D	Kota Mataram	48 OB	48,420,000	Kota Mataram	48 OB	48,480,000
4.01.03.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	P A D	Kota Mataram	650 buah	19,980,600	Kota Mataram	670 buah	24,467,000
4.01.03.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	P A D	Kota Mataram	70 Eksemplar	9,679,600	Kota Mataram	75 Eksemplar	12,000,000
4.01.03.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kota Mataram	10 buah	19,999,860	Kota Mataram	14 buah	28,000,000
4.01.03.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas PP Luar Daerah	P A D	Luar Provinsi	17 OT	1,000,000	Luar Provinsi	18 OT	148,500,000
4.01.03.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalan Dinas PP Dalam Daerah	P A D	se-NTB	10 OT	1,000,000	se-NTB	11 OT	44,000,000
4.01.03.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			859,800,000				950,229,729
4.01.03.09.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	P A D	Kota Mataram	11 Unit	760,000,000	Kota Mataram	11 Unit	792,000,000
4.01.03.09.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	Kota Mataram	8 Unit	20,500,000	Kota Mataram	10 Unit	78,000,000
4.01.03.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara	P A D	Kota Mataram	13 Unit	52,400,000	Kota Mataram	13 Unit	52,500,000
4.01.03.09.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	37 Unit	26,900,000	Kota Mataram	38 Unit	27,729,729
4.01.03.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan Keuangan yg baik			212,350,000				232,578,000
4.01.03.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Kinerja	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	94,750,000	Kota Mataram	1 Dokumen	98,000,000
4.01.03.09.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	P A D	Kota Mataram	1 Dok	14,400,000	Kota Mataram	1 Dok	15,200,000
4.01.03.09.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen-dokumen rencana kerja skpd	P A D	Kota Mataram	3 Dok	103,200,000	Kota Mataram	3 Dok	119,378,000
4.01.03.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			24,800,000				27,918,000
4.01.03.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Aset BMD OPD	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	24,800,000	Kota Mataram	1 Dokumen	27,918,000
4.01.03.09.61	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin			18,000,000				948,240,000
4.01.03.09.61.01	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Kab./Kota	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah kab/kota	P A D	Provinsi NTB	10 Dok	6,000,000	Provinsi NTB	12 Dok	168,480,000
4.01.03.09.61.02	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Provinsi Lainnya	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah provinsi lainnya	P A D	Luar Provinsi	5 Dok	6,000,000	Luar Provinsi	8 Dok	263,520,000
4.01.03.09.61.03	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri	P A D	Luar Provinsi	4 Dok	6,000,000	Luar Provinsi	4 Dok	516,240,000
4.01.03.09.62	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin			17,700,000				959,040,000
4.01.03.09.62.01	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah di Kab./Kota	Jumlah kerjasama daerah dengan non pemerintahan di kab/kota	P A D	Provinsi NTB	10 Dok	5,700,000	Provinsi NTB	12 Dok	179,280,000
4.01.03.09.62.02	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah di Provinsi Lainnya	Jumlah kerjasama daerah dengan non pemerintahan di provinsi lainnya	P A D	Luar Provinsi	5 Dok	6,000,000	Luar Provinsi	8 Dok	155,520,000
4.01.03.09.62.03	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri	P A D	Luar Provinsi	4 Dok	6,000,000	Luar Provinsi	5 Dok	624,240,000
4.01.03.09.63	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi			537,550,000				1,485,216,000
4.01.03.09.63.01	Pengendalian Kerjasama Pemerintahan	Jumlah kerjasama pemerintahan yang terevaluasi	P A D	Provinsi NTB	17 Dok	448,200,000	Provinsi NTB	19 Dok	1,015,578,000
4.01.03.09.63.02	Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan	Jumlah kerjasama non pemerintahan yang terevaluasi	P A D	Provinsi NTB	17 Dok	89,350,000	Provinsi NTB	19 Dok	469,638,000
4:01:04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				83,697,591,002				90,749,384,359
4.01.04.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				83,697,591,002				90,749,384,359
4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,421,604,755				9,283,547,338
4.01.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	DAU	Kota Mataram	1508 surat	7,114,804	Kota Mataram	1508 surat	7,470,542
4.01.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening	DAU	Kota Mataram	5 jenis	1,230,340,229	Kota Mataram	5 jenis	1,309,891,782

4.01.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	DAU	Kota Mataram	10 orang	101,808,402	Kota Mataram	10 orang	108,634,567
4.01.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang Jasa kebersihan kantor	DAU	Kota Mataram	38 orang	983,548,050	Kota Mataram	38 orang	1,114,748,019
4.01.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	DAU	Kota Mataram	4 jenis	435,786,400	Kota Mataram	4 jenis	469,264,869
4.01.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	DAU	Kota Mataram	3 jenis	369,725,000	Kota Mataram	3 jenis	393,682,527
4.01.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DAU	Kota Mataram	6 jenis	78,900,000	Kota Mataram	6 jenis	84,083,785
4.01.04.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Kota Mataram	7 jenis	2,017,040,000	Kota Mataram	7 jenis	2,415,752,968
4.01.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	DAU	Kota Mataram	3 jenis	175,036,383	Kota Mataram	3 jenis	186,353,916
4.01.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah bahan bacaan	DAU	Kota Mataram	3 jenis	230,156,654	Kota Mataram	3 jenis	245,039,122
4.01.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	DAU	Kota Mataram	7200 orang	1,389,530,520	Kota Mataram	7200 orang	1,448,253,936
4.01.04.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	DAU	Luar Provinsi	40 SPPD	316,330,813	Luar Provinsi	40 SPPD	336,784,186
4.01.04.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	DAU	Kota Mataram	3 orang	121,765,000	Kota Mataram	3 orang	136,695,088
4.01.04.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	DAU	Kota Mataram	35 orang	964,522,500	Kota Mataram	35 orang	1,026,892,030
4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			7,107,437,369				4,348,743,705
4.01.04.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	DAU	Kota Mataram	10 unit	725,000,000	Kota Mataram	0 unit	0
4.01.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	1 unit	108,000,000	Kota Mataram	1 unit	162,000,000
4.01.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	2 unit	347,400,000	Kota Mataram	2 unit	416,880,000
4.01.04.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	4 unit	300,000,000	Kota Mataram	4 unit	360,000,000
4.01.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	61 unit	998,910,369	Kota Mataram	61 unit	1,339,200,000
4.01.04.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	DAU	Kota Mataram	7 jenis	678,640,800	Kota Mataram	7 jenis	814,368,960
4.01.04.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhab	DAU	Kota Mataram	2 unit	3,949,486,200	Kota Mataram	2 unit	1,256,294,745
4.01.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			370,515,079				395,457,156
4.01.04.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/diklat	DAU	Luar Provinsi	20 orang	370,515,079	Luar Provinsi	20 orang	395,457,156
4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD			216,389,319				356,141,755
4.01.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	DAU	Kota Mataram	1 dokumen	25,349,154	Kota Mataram	1 dokumen	39,373,439
4.01.04.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	DAU	Kota Mataram	1 dokumen	78,075,165	Kota Mataram	1 dokumen	100,954,764
4.01.04.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun	DAU	Kota Mataram	3 dokumen	112,965,000	Kota Mataram	3 dokumen	215,813,552
4.01.04.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah			35,662,655				39,446,409
4.01.04.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan asset	DAU	Kota Mataram	2 dokumen	35,662,655	Kota Mataram	2 dokumen	39,446,409
4.01.04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD ; Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti			67,545,981,826				76,326,047,996
4.01.04.01.15.01	Penyusunan Peraturan Daerah	jumlah peraturan daerah yang dihasilkan	DAU	Provinsi NTB	17 perda	3,896,204,909	Provinsi NTB	17 perda	4,143,913,877
4.01.04.01.15.02	Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang mengikuti hearing/dialog dan koordinasi	DAU	Kota Mataram	480 orang	52,721,803	Kota Mataram	480 orang	56,073,696
4.01.04.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	DAU	Kota Mataram	252 kali	2,101,000,000	Kota Mataram	252 kali	3,387,972,687
4.01.04.01.15.04	Rapat-rapat paripurna	jumlah rapat paripurna	DAU	Kota Mataram	48 kali	517,300,000	Kota Mataram	48 kali	771,412,389

4.01.04.01.15.05	Kegiatan reses	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	DAU	se-NTB	3 kali	17,651,259,396	se-NTB	3 kali	18,773,473,281
4.01.04.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	DAU	Luar Provinsi	2860 SPPD	39,000,000,000	Luar Provinsi	2860 SPPD	41,572,682,837
4.01.04.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah bimtek/workshop/pelatihan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD	DAU	Luar Provinsi	3 kali	2,556,824,999	Luar Provinsi	3 kali	5,698,985,829
4.01.04.01.15.09	Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	DAU	Provinsi NTB	32 kali	1,770,670,719	Provinsi NTB	32 kali	1,921,533,400
4:01:05	Badan Penghubung Daerah				6,301,435,737				7,288,670,420
4.01.05.01	Badan Penghubung Daerah				6,301,435,737				7,288,670,420
4.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,534,862,506				3,764,355,621
4.01.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	layanan surat menyurat yang tersedia	DAU	Luar Provinsi	500 Surat	21,000,000	Luar Provinsi	500 Surat	22,714,000
4.01.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	DAU	Luar Provinsi	4 Rekening	547,339,800	Luar Provinsi	4 Rekening	550,700,000
4.01.05.01.01.06	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terjalannya komunikasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	DAU	Luar Provinsi	110 orang	538,700,000	Luar Provinsi	110 orang	598,414,190
4.01.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	DAU	Luar Provinsi	28 orang	139,790,000	Luar Provinsi	28 orang	144,713,333
4.01.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa penyedia kebersihan Kantor	DAU	Luar Provinsi	190 orang	879,043,816	Luar Provinsi	190 orang	880,448,868
4.01.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis Kantor	DAU	Luar Provinsi	15 Jenis	84,522,295	Luar Provinsi	15 Jenis	86,783,295
4.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kegiatan penggandaan	DAU	Luar Provinsi	3 Jenis	24,752,000	Luar Provinsi	3 Jenis	30,152,001
4.01.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Sarana instalasi listrik yang terpasang	DAU	Luar Provinsi	25 jenis	30,199,000	Luar Provinsi	25 Jenis	31,699,000
4.01.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DAU	Luar Provinsi	10 Buah	6,000,000	Luar Provinsi	10 buah	7,000,000
4.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan	DAU	Luar Provinsi	300 orang	384,210,000	Luar Provinsi	300 orang	473,520,000
4.01.05.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedianya laporan hasil penyelarasan Program pemerintah Pusat dan Daerah	DAU	Luar Provinsi	274 kali	222,999,000	Luar Provinsi	279 kali	273,244,230
4.01.05.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	DAU	Luar Provinsi	99 orang	458,240,000	Luar Provinsi	99 orang	463,600,000
4.01.05.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	DAU	Luar Provinsi	42 orang	198,066,595	Luar Provinsi	42 orang	201,366,704
4.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,015,128,978				2,671,982,989
4.01.05.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran	DAU	Luar Provinsi	3 unit	511,200,000	Luar Provinsi	3 Unit	671,199,999
4.01.05.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional kedinasan	DAU	Luar Provinsi	6 unit	859,999,998	Luar Provinsi	2 unit	600,000,000
4.01.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	DAU	Luar Provinsi	20 unit	200,000,000	Luar Provinsi	20 unit	300,000,000
4.01.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Biaya pemeliharaan gedung kantor	DAU	Luar Provinsi	4 unit	270,681,000	Luar Provinsi	4 unit	321,181,000
4.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional kedinasan yang nyaman dan aman	DAU	Luar Provinsi	20 unit	63,400,000	Luar Provinsi	20 unit	661,200,000
4.01.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DAU	Luar Provinsi	30 unit	109,847,980	Luar Provinsi	30 unit	118,401,990
4.01.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			9,264,047				10,103,118
4.01.05.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparaturnya	Sumber Daya aparaturnya yang terbina	DAU	Luar Provinsi	41 orang	9,264,047	Luar Provinsi	42 orang	10,103,118
4.01.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD			119,845,750				127,753,468
4.01.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dancapaian kinerja SKPD	DAU	Luar Provinsi	5 laporan	20,207,750	Luar Provinsi	7 Laporan	43,553,468
4.01.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun SKPD	DAU	Luar Provinsi	5 Laporan	20,202,000	Luar Provinsi	5 Laporan	21,200,000
4.01.05.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja SKPD	DAU	Luar Provinsi	4 laporan	79,436,000	Luar Provinsi	3 laporan	63,000,000

4.01.05.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah			20,694,000				20,700,000
4.01.05.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersedianya laporan aset barang milik daerah	DAU	Luar Provinsi	4 Laporan	20,694,000	Luar Provinsi	4 Laporan	20,700,000
4.01.05.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-			53,333,984				110,016,000
4.01.05.01.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya.	DAU	Luar Provinsi	400 orang	53,333,984	Luar Provinsi	400 orang	110,016,000
4.01.05.01.55	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta			548,306,472				583,759,224
4.01.05.01.55.01	Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.	DAU	Luar Provinsi	8 Event	498,306,472	Luar Provinsi	8 Event	483,759,224
4.01.05.01.55.02	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Promosi dan Informasi Pariwisata Nusantara	Terlaksananya evaluasi efektivitas promosi dan informasi pariwisata nusantara	DAU	Luar Provinsi	1 Paket	50,000,000	Luar Provinsi	1 Paket	100,000,000
4:02	PENGAWASAN				14,527,890,500				16,178,103,692
4:02:01	Inspektorat				14,527,890,500				16,178,103,692
4.02.01.01	Inspektorat				14,527,890,500				16,178,103,692
4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan			2,168,552,200				2,557,552,806
4.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar	DAU	Kota Mataram	6 Jenis	158,362,500	Kota Mataram	6 Jenis	165,548,215
4.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	DAU	Kota Mataram	4 Jenis	373,725,000	Kota Mataram	4 Jenis	404,670,840
4.02.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan dinas/operasional	DAU	Kota Mataram	24 unit	204,614,000	Kota Mataram	24 unit	230,118,720
4.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	8 Orang	81,099,800	Provinsi NTB	8 Orang	93,137,724
4.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Jumlah Belanja Jasa Kebersihan Kantor Clearning Service	DAU	Kota Mataram	29 Orang;Jenis	143,004,100	Kota Mataram	29 Orang;Jenis	155,164,717
4.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	DAU	Provinsi NTB	48 Jenis	188,393,600	Provinsi NTB	48 Jenis	230,510,328
4.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang; Lembar; Buah	DAU	Provinsi NTB	11 Jenis	152,523,000	Provinsi NTB	11 Jenis	171,534,687
4.02.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik	DAU	Provinsi NTB	14 Jenis	18,594,000	Provinsi NTB	14 Jenis	20,911,705
4.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	171,000,000	Provinsi NTB	2 Jenis	192,314,808
4.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah	DAU	Provinsi NTB	30 OT	360,000,000	Provinsi NTB	30 OT	459,936,082
4.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan	DAU	se-NTB	5 Laporan	317,236,200	se-NTB	5 DLaporan	433,704,980
4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan			893,790,000				1,186,064,521
4.02.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	DAU	Kota Mataram	1 unit	240,000,000	Kota Mataram	1 unit	240,000,001
4.02.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis Barang/Jasa yang diadakan	DAU	Provinsi NTB	18 Jenis	184,130,000	Provinsi NTB	18 Jenis	237,888,800
4.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan/renovasi rutin/berkala gedung kantor	DAU	Provinsi NTB	1 Laporan	145,000,000	Provinsi NTB	1 Laporan	210,600,000
4.02.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang yang dilakukan pemeliharaan	DAU	Provinsi NTB	61 Unit	97,850,000	Provinsi NTB	61 Unit	119,552,821
4.02.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah kegiatan	DAU	Kab. Bima	3 Laporan	226,810,000	Kab. Bima	3 Laporan	378,022,900
4.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan			3,590,391,000				3,146,610,576
4.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Orang	DAU	Provinsi NTB	2 Orang	53,000,000	Provinsi NTB	2 Orang	57,244,583
4.02.01.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah orang	DAU	Provinsi NTB	115 Orang	3,537,391,000	Provinsi NTB	115 Orang	3,089,365,993

4.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan			144,618,000				274,507,177
4.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	1 Laporan	21,942,000	Provinsi NTB	1 Laporan	116,316,719
4.02.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	4 Laporan	69,192,000	Provinsi NTB	4 Laporan	73,722,926
4.02.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	3 Laporan	53,484,000	Provinsi NTB	3 Laporan	84,467,532
4.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan			24,914,500				41,455,888
4.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	2 Laporan	24,914,500	Provinsi NTB	2 Laporan	41,455,888
4.02.01.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ; Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)			3,436,296,600				4,310,285,842
4.02.01.01.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan	DAU	se-NTB	7 Laporan	609,100,000	se-NTB	7 Laporan	685,023,094
4.02.01.01.20.09	Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Asistensi	DAU	Kota Mataram	46 Laporan	73,118,600	Kota Mataram	46 Laporan	85,246,065
4.02.01.01.20.10	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Reviu	DAU	Kota Mataram	1 Laporan Hasil Reviu (LHR)	24,263,600	Kota Mataram	1 Laporan Hasil Reviu (LHR)	30,160,810
4.02.01.01.20.11	Audit Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit Kinerja	DAU	se-NTB	29 Laporan Hasil Audit (LHA)	1,438,663,600	se-NTB	29 Laporan Hasil Audit (LHA)	1,773,509,293
4.02.01.01.20.12	Joint Audit	Jumlah Dokumen Laporan Joint Audit	DAU	se-NTB	2 Laporan Hasil Audit (LHA)	60,560,300	se-NTB	2 Laporan Hasil Audit (LHA)	68,109,020
4.02.01.01.20.13	Monev Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Laporan Monev	DAU	se-NTB	2 Laporan	115,960,300	se-NTB	2 Laporan	131,651,632
4.02.01.01.20.14	Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	1 Laporan	37,195,300	Provinsi NTB	1 Laporan	41,831,620
4.02.01.01.20.15	Kegiatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	Jumlah Dokumen Laporan Monev TPTGR	DAU	se-NTB	6 Laporan	977,113,800	se-NTB	6 Laporan	1,132,423,590
4.02.01.01.20.17	Review KUA PPAS	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	1 Laporan Hasil Reviu (LHR)	24,233,300	Provinsi NTB	1 Laporan Hasil Reviu (LHR)	29,854,119
4.02.01.01.20.18	Review RKA PD	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	1 Laporan Hasil Reviu (LHR)	44,660,300	Provinsi NTB	1 Laporan Hasil Reviu (LHR)	50,710,718
4.02.01.01.20.19	Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah dokumen laporan Evaluasi	DAU	se-NTB	10 Laporan	948,900	se-NTB	10 Laporan	245,595,682
4.02.01.01.20.21	Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ	Jumlah dokumen laporan	DAU	Provinsi NTB	4 Laporan Hasil Reviu (LHR)	30,478,600	Provinsi NTB	4 Laporan Hasil Reviu (LHR)	36,170,199
4.02.01.01.23	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA			737,574,200				692,917,859
4.02.01.01.23.01	Asistensi Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil Asistensi LKjIP Perangkat Daerah	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	73,440,300	Kota Mataram	1 Laporan	83,078,085
4.02.01.01.23.02	Review LKjIP Pemda	Jumlah dokumen laporan hasil Reviu LKjIP Pemda	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	22,708,300	Kota Mataram	1 Laporan	28,167,137
4.02.01.01.23.03	Evaluasi SAKIP PD	Jumlah dokumen hasil Evaluasi SAKIP PD	DAU	Kota Mataram	46 Laporan (LHE)	221,634,300	Kota Mataram	46 Laporan (LHE)	252,343,170
4.02.01.01.23.04	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen laporan	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	39,622,000	Kota Mataram	1 Laporan	44,311,469
4.02.01.01.23.05	Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan PD	Jumlah Dokumen Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan	DAU	se-NTB	46 Laporan	334,970,400	se-NTB	46 Laporan	230,017,500
4.02.01.01.23.08	Review Renja Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	DAU	Kota Mataram	46 Perangkat Daerah	22,402,300	Kota Mataram	46 Perangkat Daerah	28,054,665
4.02.01.01.23.09	Review RKPD	Jumlah dokumen Laporan	DAU	Kota Mataram	1 Laporan	22,796,600	Kota Mataram	1 Laporan	26,945,833
4.02.01.01.24	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu ; Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK ; Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM			3,061,508,600				3,336,520,874

4.02.01.01.24.02	Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah dumas yang tertangani; Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu	DAU	se-NTB	60 Laporan Hasil Pemeriksaan	431,963,600	se-NTB	60 Laporan Hasil Pemeriksaan	304,072,320
4.02.01.01.24.03	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (AD PK)	DAU	se-NTB	4 Laporan	448,889,700	se-NTB	4 Laporan	671,678,700
4.02.01.01.24.04	Kegiatan SABER PUNGLI	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Saber Pungli	DAU	se-NTB	2 Laporan	898,365,000	se-NTB	2 Laporan	1,010,344,400
4.02.01.01.24.05	Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D)	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan P4D	DAU	se-NTB	2 Laporan	1,244,640,000	se-NTB	2 Laporan	1,308,731,750
4.02.01.01.24.06	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada PD	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	DAU	se-NTB	1 Laporan	37,650,300	se-NTB	1 Laporan	41,693,704
4.02.01.01.27	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur			83,274,800				123,643,354
4.02.01.01.27.01	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP	DAU	se-NTB	46 PD	49,730,600	se-NTB	46 PD	82,872,585
4.02.01.01.27.02	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP	DAU	Kota Mataram	7 PD	17,580,600	Kota Mataram	7 PD	20,329,609
4.02.01.01.27.03	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG	DAU	Kota Mataram	10 PD	15,963,600	Kota Mataram	10 PD	20,441,161
4.02.01.01.28	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP ; Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi			386,970,600				508,544,795
4.02.01.01.28.01	Telaahan Sejawat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Telaah Sejawat	DAU	Kota Mataram	2 Laporan	69,990,600	Kota Mataram	2 Laporan	106,864,728
4.02.01.01.28.02	Pelatihan Pengembangan APIP	Jumlah peserta Diklat Substantif dan Penjenjangan	DAU	Provinsi NTB	100 Orang	316,980,000	Provinsi NTB	100 Orang	401,680,067
4:03	PERENCANAAN				31,846,147,330				33,312,017,656
4:03:01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				31,846,147,330				33,312,017,656
4.03.01.01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				31,846,147,330				33,312,017,656
4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,013,693,020				9,853,998,034
4.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	DAU	Provinsi NTB	1600 eks	79,967,500	Provinsi NTB	1625 eks	112,499,985
4.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa pendukung SDA yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	48 Rekening	480,000,000	Provinsi NTB	48 Rekening	650,000,000
4.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	16 Orang	296,000,000	Provinsi NTB	16 Orang	296,000,000
4.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	13 Orang	428,681,700	Provinsi NTB	13 Orang	550,000,009
4.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	122,760,000	Provinsi NTB	2 jenis	225,000,000
4.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	22 Jenis	43,406,500	Provinsi NTB	24 Jenis	120,000,000
4.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	16 jenis	502,350,000	Provinsi NTB	16 jenis	798,974,992
4.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang terlayani makanan dan minumannya	DAU	Provinsi NTB	3138 Orang	235,350,000	Provinsi NTB	3140 Orang	325,005,700
4.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi koordinasi	DAU	Provinsi NTB	60 OT	684,000,000	Provinsi NTB	84 OT	990,737,748
4.03.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	1560 Orang	4,866,000,000	Provinsi NTB	1560 Orang	4,940,401,440
4.03.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi	DAU	Provinsi NTB	188 OT	275,177,320	Provinsi NTB	330 OT	845,378,160
4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor			2,304,695,084				1,922,350,000
4.03.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	DAU	Provinsi NTB	0 Unit	800,000,000	Provinsi NTB	1 Unit	800,000,000

4.03.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	214,200,000	Provinsi NTB	1 Unit	225,000,000
4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	77 Unit	423,500,000	Provinsi NTB	77 Unit	427,350,000
4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	2 Jenis	75,000,000	Provinsi NTB	2 Jenis	200,000,000
4.03.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	9 Jenis	112,500,000	Provinsi NTB	9 Jenis	270,000,000
4.03.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhab	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	679,495,084	Provinsi NTB	1 Unit	0
4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya			330,998,500				143,117,110
4.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang (aparatur) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	DAU	Provinsi NTB	10 orang	299,998,500	Provinsi NTB	10 orang	110,000,000
4.03.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang (aparatur) yang terbina mental dan fisiknya	DAU	Provinsi NTB	130 Orang	31,000,000	Provinsi NTB	130 Orang	33,117,110
4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan			83,001,000				88,374,416
4.03.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen keuangan	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	83,001,000	Provinsi NTB	1 dokumen	88,374,416
4.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah			105,905,500				112,887,814
4.03.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	jumlah dokumen aset/barang milik daerah	DAU	se-NTB	1 dokumen	105,905,500	se-NTB	1 dokumen	112,887,814
4.03.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia			802,198,800				931,069,192
4.03.01.01.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah data sektoral yang tersedia	DAU	Provinsi NTB	38 Jenis	609,198,800	Provinsi NTB	38 Jenis	631,069,192
4.03.01.01.15.09	Penyusunan Data Spasial	Jumlah dan jenis peta spasial	DAU	Provinsi NTB	3 dokumen	193,000,000	Provinsi NTB	3 dokumen	300,000,000
4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD			6,031,233,800				3,846,760,000
4.03.01.01.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	DAU	Provinsi NTB	3 kegiatan	459,993,000	Provinsi NTB	3 kegiatan	462,000,000
4.03.01.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	RKPD	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	311,000,000	Provinsi NTB	2 dokumen	330,000,000
4.03.01.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	jumlah partisipan dalam musrenbang	DAU	Provinsi NTB	650 orang	1,032,380,000	Provinsi NTB	650 orang	1,170,000,000
4.03.01.01.21.12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Gubernur	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	296,935,000	Provinsi NTB	1 dokumen	300,000,000
4.03.01.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monev	DAU	Provinsi NTB	15 dokumen	780,000,000	Provinsi NTB	15 dokumen	750,000,000
4.03.01.01.21.14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	239,987,000	Provinsi NTB	2 dokumen	249,800,000
4.03.01.01.21.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan OPD Bappeda (Renstra, Renja, RKA)	DAU	Provinsi NTB	0 dokumen	275,915,000	Provinsi NTB	0 dokumen	0
4.03.01.01.21.18	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	DAU	Provinsi NTB	30 dokumen	249,960,000	Provinsi NTB	30 dokumen	450,000,000
4.03.01.01.21.21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan	DAU	Provinsi NTB	0 aplikasi	636,056,800	Provinsi NTB	0 aplikasi	0
4.03.01.01.21.22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	RPJMD kab/kota yang diselaraskan	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	89,533,000	Provinsi NTB	1 dokumen	134,960,000
4.03.01.01.21.23	Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan	APBD PROV.	Provinsi NTB	0 dokumen	1,204,000,000	Provinsi NTB	0 dokumen	0
4.03.01.01.21.24	Penyelarasan strategi pencapaian target dan indikator SDGs	Jumlah dokumen strategi pencapaian target SDGs	APBD PROV.	Provinsi NTB	0 dokumen	455,474,000	Provinsi NTB	0 dokumen	0
4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi			2,500,215,528				3,066,985,840
4.03.01.01.22.02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah	APBD PROV.	Provinsi NTB	1 dokumen	225,875,060	Provinsi NTB	1 dokumen	250,470,000
4.03.01.01.22.10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Jumlah dokumen sosialisasi ketentuan di bidang cukai	DBH-CHT	Provinsi NTB	3 dokumen	1,050,000,000	Provinsi NTB	3 dokumen	1,500,000,000

4.03.01.01.22.11	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang investasi dan keuangan	APBD PROV.	Provinsi NTB	4 dokumen	305,217,500	Provinsi NTB	4 dokumen	316,615,840
4.03.01.01.22.12	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Jumlah dokumen Renja OPD bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	APBD PROV.	Provinsi NTB	4 dokumen	526,087,500	Provinsi NTB	4 dokumen	598,800,000
4.03.01.01.22.13	Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pangan dan pertanian	APBD PROV.	Provinsi NTB	4 dokumen	393,035,468	Provinsi NTB	4 dokumen	401,100,000
4.03.01.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya			3,107,087,400				4,157,986,817
4.03.01.01.23.05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pemerintahan	DAU	Provinsi NTB	9 dokumen	310,000,000	Provinsi NTB	9 dokumen	858,940,848
4.03.01.01.23.08	Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan	DAU	Provinsi NTB	7 dokumen	847,087,400	Provinsi NTB	7 dokumen	1,309,045,969
4.03.01.01.23.11	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pendidikan dan kesehatan	DAU	Provinsi NTB	5 dokumen	1,950,000,000	Provinsi NTB	5 dokumen	1,990,000,000
4.03.01.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam			7,828,368,698				7,945,488,433
4.03.01.01.24.07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen Renja OPD bidang prasarana wilayah	DAU	Provinsi NTB	4 dokumen	565,000,000	Provinsi NTB	4 dokumen	800,000,000
4.03.01.01.24.10	Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan	DAU	Provinsi NTB	7 dokumen	2,822,699,198	Provinsi NTB	7 dokumen	2,999,414,999
4.03.01.01.24.12	Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pengembangan dan pemanfaatan SDA	DAU	Provinsi NTB	3 dokumen	434,838,000	Provinsi NTB	3 dokumen	454,999,998
4.03.01.01.24.13	Perencanaan Pengembangan Geopark	Dokumen perencanaan Geopark	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	3,089,404,000	Provinsi NTB	2 dokumen	2,671,073,436
4.03.01.01.24.14	Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	Jumlah dokumen Renja OPD bidang kemaritiman	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	916,427,500	Provinsi NTB	1 dokumen	1,020,000,000
4.03.01.01.28	Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan			738,750,000				1,243,000,000
4.03.01.01.28.01	Keterpaduan perencanaan wilayah dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen yang mendukung indikator IKLH	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	273,750,000	Provinsi NTB	1 dokumen	720,000,000
4.03.01.01.28.02	Pemantapan keselarasan program pembangunan daerah dlm perencanaan wilayah	Jumlah dokumen Renja OPD bidang perencanaan wilayah	DAU	Provinsi NTB	4 dokumen	465,000,000	Provinsi NTB	4 dokumen	523,000,000
4:04 KEUANGAN					95,135,779,479				50,986,372,840
4:04:01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				57,755,006,350				50,986,372,840
4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD				46,048,093,246				50,986,372,840
4.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			3,589,083,528				5,036,999,672
4.04.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah arsip surat menyurat	P A D	Kota Mataram	10550 Surat	33,621,150	Kota Mataram	10600 Surat	70,076,600
4.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	P A D	Kota Mataram	4 Sumber Daya	585,000,000	Kota Mataram	4 Sumber Daya	625,000,000
4.04.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	P A D	Kota Mataram	26 Orang	520,109,996	Kota Mataram	26 Orang	570,000,002
4.04.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	P A D	Kota Mataram	15 orang	420,000,000	Kota Mataram	15 Orang	495,000,000
4.04.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	P A D	Kota Mataram	17 Paket	678,950,000	Kota Mataram	19 Paket	699,999,995
4.04.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku tentang pengelolaan keuangan daerah	P A D	Kota Mataram	5300 Eksemplar	45,002,300	Kota Mataram	5300 Eksemplar	54,998,100
4.04.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang terfasilitasi	P A D	Kota Mataram	175 Kali	475,000,075	Kota Mataram	200 Kali	575,000,000
4.04.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah yang terlaksana	P A D	Luar Provinsi	18 Kali	309,000,006	Luar Provinsi	21 Kali	395,000,004

4.04.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	P A D	Kota Mataram	3 Orang	155,000,001	Kota Mataram	3 Orang	165,000,000
4.04.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi di dalam daerah yang terlaksana	P A D	se-NTB	25 Kali	113,000,000	se-NTB	30 Kali	150,000,000
4.04.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	P A D	Kota Mataram	10 Orang	254,400,000	Kota Mataram	10 Orang	225,002,860
4.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur			11,107,134,625				642,999,980
4.04.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	P A D	Kota Mataram	2 Unit	659,040,000	Kota Mataram	2 Unit	1,258,305,976
4.04.01.01.02.14	Pengadaan Tanah dan Bangunan	Jumlah pengadaan tanah dan bangunan yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	25450 m2	8,086,992,000	Kota Mataram	25450 m2	8,224,981,900
4.04.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	1025 m2	519,999,925	Kota Mataram	1050 m2	595,000,350
4.04.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	84 Unit	485,000,040	Kota Mataram	86 Unit	595,000,030
4.04.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	210 Unit	282,102,660	Kota Mataram	220 Unit	377,017,740
4.04.01.01.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	P A D	Kota Mataram	2 Unit	339,000,000	Kota Mataram	2 Unit	450,000,000
4.04.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah pekerjaan gedung kantor yang direhabilitasi	P A D	Kota Mataram	3 Gedung	735,000,000	Kota Mataram	3 Gedung	834,999,999
4.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur			287,095,044				80,000,001
4.04.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah kegiatan olahraga dan imtaq yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	156 Kali	89,095,032	Kota Mataram	156 Kali	100,000,056
4.04.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM yang terbina dan terlatih	P A D	Kota Mataram	14 Orang	198,000,012	Kota Mataram	17 Orang	206,572,049
4.04.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			645,872,560				149,000,000
4.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	4 Dokumen	252,872,560	Kota Mataram	4 Dokumen	270,531,300
4.04.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	5 Dokumen	393,000,000	Kota Mataram	5 Dokumen	511,000,000
4.04.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			104,365,127				111,113,186
4.04.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD Badan yang tersusun	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	104,365,127	Kota Mataram	1 Dokumen	111,113,186
4.04.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB ; Opini laporan keuangan Prov. NTB			27,195,290,242				29,999,010,255
4.04.01.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan perda dan pergub tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	545,000,000	Kota Mataram	2 Dokumen	667,000,000
4.04.01.01.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sosialisasi regulasi yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	3 Kali	422,128,578	Kota Mataram	3 Kali	518,000,001
4.04.01.01.17.20	Penyusunan peraturan daerah dan peraturan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen rancangan perda dan pergub APBD dan Perubahan APBD	P A D	Kota Mataram	4 Dokumen	7,163,057,380	Kota Mataram	4 Dokumen	7,519,989,720
4.04.01.01.17.25	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah / Kuasa BUD	Persentase jumlah pengajuan SPM yang diterbitkan menjadi SP2D	P A D	Kota Mataram	100 Persen	861,798,680	Kota Mataram	100 Persen	1,035,000,000
4.04.01.01.17.29	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah penerima hibah dan bansos yang didatangi	P A D	se-NTB	175 Penerima	242,800,075	se-NTB	200 Penerima	465,000,000
4.04.01.01.17.39	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	11 Aplikasi	369,540,003	Kota Mataram	12 Aplikasi	527,010,264
4.04.01.01.17.62	Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA	Jumlah SKPD yang terfasilitasi	P A D	Kota Mataram	268 SKPD/UPT	494,543,048	Kota Mataram	268 SKPD/UPT	684,999,960
4.04.01.01.17.63	Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Persentase lapoan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersampaikan	P A D	se-NTB	100 Persen	195,000,000	se-NTB	100 Persen	293,000,000

4.04.01.01.17.64	Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Kursus/ Binte/ pelatihan yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	2 Kali	625,500,000	Kota Mataram	2 Kali	695,000,000
4.04.01.01.17.67	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah regulasi daerah yang tersusun	P A D	Kota Mataram	3 Regulasi	429,999,999	Kota Mataram	3 Regulasi	425,000,001
4.04.01.01.17.69	Penyusunan dokumen informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen laporan LAK, Pajak, dan SPJ Bendahara Penerimaan yang tersusun	P A D	Kota Mataram	5 Dokumen	695,000,000	Kota Mataram	5 Dokumen	795,000,000
4.04.01.01.17.70	Penataan dan pengembangan Informasi Arsip Keuangan	Jumlah Arsip yang ditertibkan	P A D	Kota Mataram	28100 Berkas	464,998,800	Kota Mataram	28200 Berkas	535,010,400
4.04.01.01.17.71	Peningkatan Kapasitas Pengeioaian Keuangan Daerah	Jumlah fasilitor dalam pengelolaan keuangan daerah	P A D	Kota Mataram	14 Orang	1,433,470,006	Kota Mataram	14 Orang	1,510,999,994
4.04.01.01.17.72	Pengeioaian Administrasi Keuangan PPKD	Jumlah pengelola keuangan daerah yang terfasiliasi	P A D	Kota Mataram	1908 Orang	8,894,806,608	Kota Mataram	1908 Orang	8,999,999,748
4.04.01.01.17.74	Publikasi Informasi Keuangan Daerah	Jumlah publikasi keuangan daerah yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	370 Kali	2,365,000,040	Kota Mataram	380 Kali	2,483,000,180
4.04.01.01.17.75	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	813,625,000	Kota Mataram	1 Dokumen	975,000,000
4.04.01.01.17.77	Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah	Persentase piutang daerah yang tertagih	P A D	Kota Mataram	65 Persen	216,250,025	Kota Mataram	70 Persen	324,999,990
4.04.01.01.17.78	Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer yang tersusun	P A D	Kota Mataram	7 Dokumen	325,000,002	Kota Mataram	7 Dokumen	445,000,003
4.04.01.01.17.79	Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah	Jumlah penerimaan daerah yang dievaluasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah	P A D	Kota Mataram	134 OPD/UPT	141,999,998	Kota Mataram	134 OPD/UPT	269,999,950
4.04.01.01.17.81	Penyusunan Pedoman RKA/RKAP SKPD	Jumlah dokumen pedoman RKA/RKAP SKPD yang tersusun	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	232,172,000	Kota Mataram	2 Dokumen	385,000,000
4.04.01.01.17.95	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	Jumlah SKPD yang terekonsiliasi	P A D	Kota Mataram	138 SKPD/UPT	263,600,000	Kota Mataram	138 SKPD/UPT	445,000,044
4.04.01.01.18	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota			1,699,252,120				1,867,762,438
4.04.01.01.18.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen keputusan gubernur tentang evaluasi perda dan perkara tentang APBD dan Perubahan APBD Kab./Kota	P A D	Kota Mataram	20 Dokumen	622,330,620	Kota Mataram	20 Dokumen	680,000,000
4.04.01.01.18.04	Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah dokumen rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan raperda dan raperkada pertanggungjawaban APBD Kab./Kota	P A D	Kota Mataram	10 Dokumen	319,921,500	Kota Mataram	10 Dokumen	353,000,000
4.04.01.01.18.06	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab./kota yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	2 Kali	350,000,000	Kota Mataram	2 Kali	374,762,438
4.04.01.01.18.07	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan kab./kota yang tersusun	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	245,000,000	Kota Mataram	1 Dokumen	280,000,000
4.04.01.01.18.09	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Jumlah periode rekonsiliasi APBD kab./kota yang terlaksana	P A D	Kota Mataram	4 Kali	162,000,000	Kota Mataram	4 Kali	180,000,000
4.04.01.01.29	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD			1,420,000,000				2,866,999,996
4.04.01.01.29.16	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase tindak lanjut usulan penghapusan BMD	P A D	Kota Mataram	100 Persen	645,000,000	Kota Mataram	100 Persen	725,000,000
4.04.01.01.29.82	Penyusunan RKBMD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	775,000,000	Kota Mataram	1 Dokumen	835,000,000
4.04.01.03	Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah				3,265,999,511				3,926,170,136
4.04.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			564,999,586				5,036,999,672
4.04.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah arsip surat menyurat	P A D	Kota Mataram	900 Surat	14,999,400	Kota Mataram	925 Surat	19,999,425
4.04.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	P A D	Kota Mataram	2 Sumber Daya	30,000,000	Kota Mataram	2 Sumber Daya	45,000,000
4.04.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	P A D	Kota Mataram	7 Orang	139,999,999	Kota Mataram	7 Orang	175,000,000
4.04.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	P A D	Kota Mataram	3 Paket	75,000,000	Kota Mataram	6 Paket	180,000,000

4.04.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku tentang pengelolaan keuangan daerah	P A D	Kota Mataram	1152 Eksemplar	15,000,192	Kota Mataram	1152 Eksemplar	19,999,872
4.04.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang terfasilitasi	P A D	Kota Mataram	80 Kali	100,000,000	Kota Mataram	90 Kali	115,000,020
4.04.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah yang terlaksana	P A D	Luar Provinsi	13 Kali	104,999,995	Luar Provinsi	16 Kali	170,000,000
4.04.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi di dalam daerah yang terlaksana	P A D	se-NTB	25 Kali	85,000,000	se-NTB	30 Kali	99,999,990
4.04.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur			124,999,920				642,999,980
4.04.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	175 m2	74,999,925	Kota Mataram	200 m2	100,000,000
4.04.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	45 Unit	49,999,995	Kota Mataram	50 Unit	65,000,000
4.04.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur			76,000,001				80,000,001
4.04.01.03.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM yang terbina dan terlatih	P A D	Provinsi NTB	7 Orang	76,000,001	Provinsi NTB	9 Orang	80,000,001
4.04.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			180,000,000				149,000,000
4.04.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	80,000,000	Kota Mataram	2 Dokumen	90,000,000
4.04.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram	2 Dokumen	110,000,000
4.04.01.03.29	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD			2,320,000,004				2,866,999,996
4.04.01.03.29.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang dimanfaatkan	P A D	se-NTB	29 Persil	885,000,004	se-NTB	30 Persil	1,016,170,830
4.04.01.03.29.57	Sertifikasi tanah	Jumlah tanah yang disertifikatkan	P A D	se-NTB	12 Persil	502,000,000	se-NTB	14 Persil	624,999,998
4.04.01.03.29.76	Penjaminan dan Penertiban Aset	Jumlah penanganan sengketa aset	P A D	se-NTB	5 Sengketa	933,000,000	se-NTB	5 Sengketa	1,015,000,000
4.04.01.04	Unit Pengelolaan Islamic Center NTB				8,440,913,593				8,695,999,648
4.04.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			4,877,970,093				5,036,999,672
4.04.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah arsip surat menyurat	P A D	Kota Mataram	550 Surat	10,000,100	Kota Mataram	600 Surat	16,999,800
4.04.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	P A D	Kota Mataram	2 Sumber Daya	950,000,000	Kota Mataram	2 Sumber Daya	970,000,000
4.04.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	P A D	Kota Mataram	8 Orang	195,000,000	Kota Mataram	8 Orang	215,000,000
4.04.01.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	P A D	Kota Mataram	11 Paket	3,497,409,998	Kota Mataram	13 Paket	3,524,999,998
4.04.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku tentang pengelolaan keuangan daerah	P A D	Kota Mataram	1152 Eksemplar	10,560,000	Kota Mataram	1152 Eksemplar	19,999,872
4.04.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang terfasilitasi	P A D	Kota Mataram	30 Kali	55,000,000	Kota Mataram	40 Kali	95,000,000
4.04.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah yang terlaksana	P A D	Luar Provinsi	8 Kali	110,000,000	Luar Provinsi	11 Kali	130,000,002
4.04.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi di dalam daerah yang terlaksana	P A D	se-NTB	15 Kali	49,999,995	se-NTB	20 Kali	65,000,000
4.04.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur			612,000,010				642,999,980
4.04.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	175 m2	570,000,025	Kota Mataram	200 m2	590,000,000
4.04.01.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	P A D	Kota Mataram	45 Unit	41,999,985	Kota Mataram	55 Unit	52,999,980
4.04.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			109,943,500				149,000,000
4.04.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	55,500,000	Kota Mataram	2 Dokumen	75,000,000
4.04.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	P A D	Kota Mataram	2 Dokumen	54,443,500	Kota Mataram	2 Dokumen	74,000,000

4.04.01.04.29	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD			2,840,999,990				2,866,999,996
4.04.01.04.29.97	Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Centre	Jumlah jasa kebersihan, tekhnisi dan keamanan serta sarana/prasarana Islamic Center yang tersedia	P A D	Kota Mataram	89 Orang	2,162,000,015	Kota Mataram	89 Orang	2,182,000,006
4.04.01.04.29.98	Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Islamic Centre	Jumlah pemakai/ pengguna aset daerah di Islamic Center untuk peningkatan PAD	P A D	Kota Mataram	85 Pengguna	678,999,975	Kota Mataram	90 Pengguna	684,999,990
4:04:02	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				37,380,773,129				24,368,432,154
4.04.02.01	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				14,698,046,878				24,368,432,154
4.04.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,915,354,820				730,616,242
4.04.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	se-NTB	2500 Surat	8,910,000	se-NTB	2500 Surat	52,177,500
4.04.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	se-NTB	14 Orang	115,449,000	se-NTB	14 Orang	133,126,807
4.04.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	se-NTB	16 Orang	241,623,200	se-NTB	16 Orang	279,124,887
4.04.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	se-NTB	100 Jenis	197,190,500	se-NTB	100 Jenis	286,172,733
4.04.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetaka dan Penggandaan	P A D	se-NTB	48 Jenis	1,477,546,000	se-NTB	50 Jenis	1,717,104,448
4.04.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P A D	se-NTB	12 Jenis	24,155,000	se-NTB	12 Jenis	25,813,069
4.04.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	se-NTB	70 Paket	981,110,000	se-NTB	72 Paket	1,232,580,520
4.04.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	P A D	se-NTB	10 Buah	46,930,000	se-NTB	10 Buah	49,953,742
4.04.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman	P A D	se-NTB	50 Kali	228,000,000	se-NTB	50 Kali	279,542,268
4.04.02.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Unit Jasa Kebutuhan Kokordinasi Antar Lembaga	P A D	se-NTB	64 Kali	600,110,000	se-NTB	66 Kali	638,012,762
4.04.02.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	DAU, P A D	se-NTB	22 Orang	849,313,200	se-NTB	22 Orang	924,580,925
4.04.02.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	P A D	se-NTB	10 Orang	145,017,920	se-NTB	10 Orang	167,526,586
4.04.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			2,332,150,000				2,188,772,214
4.04.02.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	P A D	se-NTB	1 Paket	64,125,000	se-NTB	1 Paket	97,527,087
4.04.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraam Dinas/Operasional	P A D	se-NTB	15 Unit	1,204,640,000	se-NTB	10 Unit	1,467,065,594
4.04.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	se-NTB	10 Buah	170,810,000	se-NTB	10 Buah	165,753,950
4.04.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	se-NTB	12 Paket	17,370,000	se-NTB	12 Paket	87,698,602
4.04.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	se-NTB	28 Unit	317,000,000	se-NTB	28 Unit	660,658,312
4.04.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkalan Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	se-NTB	10 Unit	56,700,000	se-NTB	10 Unit	60,396,631
4.04.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	se-NTB	10 Unit	96,480,000	se-NTB	10 Unit	102,719,177
4.04.02.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	P A D	se-NTB	3 Paket	405,025,000	se-NTB	2 Paket	431,371,148
4.04.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			614,796,000				18,739,800
4.04.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Masa Penyelesaian Pendidikan Formal, Diklat Teknis Subtantif, Diklat Teknis Struktural dan Fungsional	P A D	se-NTB	10 Orang	227,350,000	se-NTB	10 Orang	324,151,018

4.04.02.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	se-NTB	48 Kali	24,196,000	se-NTB	48 Kali	62,164,748
4.04.02.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah Unit/Sentra Layanan yang Mendapat Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Birokrasi dan Aparatur	P A D	se-NTB	11 Unit	239,900,000	se-NTB	11 Unit	259,211,562
4.04.02.01.05.24	Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Jumlah/Paket Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	P A D	se-NTB	2 Paket	123,350,000	se-NTB	2 Paket	190,451,457
4.04.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			338,410,300				8,396,703
4.04.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT dan PK)	P A D	se-NTB	43 Dokumen	195,780,300	se-NTB	43 Dokumen	271,919,403
4.04.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	se-NTB	1 Dokumen	2,350,000	se-NTB	1 Dokumen	171,030,236
4.04.02.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra Draf Awal, Renja OPD, RKA, DPA, DPPA dan Evaluasi Kinerja(yang disusun	P A D	se-NTB	46 Dokumen	27,890,000	se-NTB	46 Dokumen	459,356,776
4.04.02.01.06.17	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Jumlah Dokumen Profil OPD yang Divalidasi Data dan Informasi Kinerjanya	P A D	se-NTB	2 Dokumen	112,390,000	se-NTB	2 Dokumen	179,315,127
4.04.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			233,630,000				55,058,601
4.04.02.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	se-NTB	1 Dokumen	89,250,000	se-NTB	1 Dokumen	116,420,680
4.04.02.01.07.20	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penataan Arsip	P A D	se-NTB	1 Dokumen	50,000,000	se-NTB	1 Dokumen	185,792,609
4.04.02.01.07.21	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Temuan yang Ditindak Lanjuti	P A D	se-NTB	4 Dokumen	94,380,000	se-NTB	4 Dokumen	104,784,787
4.04.02.01.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			6,263,705,758				1,695,396,381
4.04.02.01.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	se-NTB	13 Dokumen	239,550,000	se-NTB	13 Dokumen	1,109,964,727
4.04.02.01.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	se-NTB	5 Sentra	344,669,000	se-NTB	5 Sentra	1,791,996,797
4.04.02.01.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	se-NTB	4 Dokumen	345,200,000	se-NTB	4 Dokumen	814,180,325
4.04.02.01.28.04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Data PBBKB	P A D	se-NTB	1 Dokumen	369,700,000	se-NTB	1 Dokumen	610,320,341
4.04.02.01.28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah Dokumen Data Potensi Penerimaan PAP	P A D	se-NTB	1 Dokumen	279,362,500	se-NTB	1 Dokumen	344,162,639
4.04.02.01.28.06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Jumlah Dokumen Data Pajak Rokok	Pajak Rokok	se-NTB	1 Dokumen	165,350,000	se-NTB	1 Dokumen	698,833,180
4.04.02.01.28.08	Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data, Penerimaan Retribusi dan PLL dengan Pihak Terkait	P A D	se-NTB	2 Dokumen	83,747,500	se-NTB	2 Dokumen	270,666,812
4.04.02.01.28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Jumlah Laporan Data Hasil Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	P A D	se-NTB	2 Dokumen	435,300,000	se-NTB	2 Dokumen	851,285,802
4.04.02.01.28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah Laporan Evaluasi Obyek Retribusi dan PLL dan Pelaksanaan Bintek	P A D	se-NTB	3 Dokumen	123,625,000	se-NTB	3 Dokumen	1,275,893,672
4.04.02.01.28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	P A D	se-NTB	1 Dokumen	16,540,000	se-NTB	1 Dokumen	81,695,754
4.04.02.01.28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Difasilitasi Penyusunannya	P A D	se-NTB	4 Regulasi	89,807,500	se-NTB	4 Regulasi	704,419,791

4.04.02.01.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	se-NTB	10 Kali	216,020,000	se-NTB	10 Kali	276,787,013
4.04.02.01.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	se-NTB	2 Event	994,080,140	se-NTB	2 Event	1,070,388,603
4.04.02.01.28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah	P A D	se-NTB	2 Kasus	201,235,000	se-NTB	2 Kasus	357,896,971
4.04.02.01.28.16	Pendaftaran, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	se-NTB	13 Laporan	128,610,000	se-NTB	13 Laporan	215,487,880
4.04.02.01.28.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Aspek Kelembagaan	DAU, P A D	se-NTB	1 Laporan	82,776,620	se-NTB	1 Laporan	214,682,480
4.04.02.01.28.19	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	se-NTB	12 Laporan	420,900,000	se-NTB	12 Laporan	455,415,283
4.04.02.01.28.20	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Dengan Pihak Terkait	P A D	se-NTB	12 Laporan	120,250,000	se-NTB	12 Laporan	310,313,959
4.04.02.01.28.21	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang Tersusun	P A D	se-NTB	10 Paket	436,069,998	se-NTB	12 Paket	469,644,355
4.04.02.01.28.22	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Perangkat Keras Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah yang Dikembangkan	P A D	se-NTB	10 Simpul	490,650,000	se-NTB	10 Simpul	528,357,488
4.04.02.01.28.23	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Pengelola Sistem Informasi Pendapatan	P A D	se-NTB	4 Paket	680,262,500	se-NTB	4 Paket	732,533,134
4.04.02.02	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram				1,984,182,786				2,877,099,558
4.04.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			279,357,100				730,616,242
4.04.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	Kota Mataram	1500 Surat	3,150,000	Kota Mataram	1500 Surat	5,475,330
4.04.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	P A D	Kota Mataram	8 Orang	110,000	Kota Mataram	8 Orang	101,386,053
4.04.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kota Mataram	11 Orang	110,000	Kota Mataram	11 Tahun	307,005,009
4.04.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	Kota Mataram	55 Jenis	52,423,000	Kota Mataram	55 Orang	106,165,997
4.04.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	P A D	Kota Mataram	2 Jenis	14,512,500	Kota Mataram	2 Jenis	17,018,002
4.04.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P A D	Kota Mataram	10 Jenis	11,125,000	Kota Mataram	10 Jenis	12,458,113
4.04.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kota Mataram	10 Unit	70,650,000	Kota Mataram	10 Unit	87,819,012
4.04.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	P A D	Kota Mataram	5 Buah	6,410,000	Kota Mataram	5 Buah	7,121,397
4.04.02.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	P A D	Kota Mataram	5 Orang	120,866,600	Kota Mataram	5 Orang	139,680,572
4.04.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			587,925,000				2,188,772,214
4.04.02.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	P A D	Kota Mataram	1 Tahun	440,800,000	Kota Mataram	1 Tahun	0
4.04.02.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kota Mataram	10 Buah	22,825,000	Kota Mataram	10 Buah	45,269,408
4.04.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kota Mataram	15 Unit	124,300,000	Kota Mataram	15 Unit	135,589,313
4.04.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			16,065,000				18,739,800
4.04.02.02.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kota Mataram	24 Paket	16,065,000	Kota Mataram	24 Paket	16,100,000

4.04.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,750,000				8,396,703
4.04.02.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	7,750,000	Kota Mataram	1 Dokumen	8,307,343
4.04.02.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			13,700,000				55,058,601
4.04.02.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kota Mataram	1 Dokumen	13,700,000	Kota Mataram	1 Dokumen	25,292,492
4.04.02.02.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,079,385,686				1,695,396,381
4.04.02.02.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kota Mataram	13 Dokumen	736,464,360	Kota Mataram	13 Dokumen	1,189,017,662
4.04.02.02.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DAU	Kota Mataram	3 Sentra	178,250,000	Kota Mataram	3 Sentra	216,531,993
4.04.02.02.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	DAU	Kota Mataram	1 Dokumen	32,495,700	Kota Mataram	1 Dokumen	60,991,144
4.04.02.02.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DAU	Kota Mataram	1 Event	103,215,626	Kota Mataram	1 Event	131,049,508
4.04.02.02.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	DAU	Kota Mataram	13 Laporan	28,960,000	Kota Mataram	13 Laporan	264,821,209
4.04.02.03	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya				1,632,689,254				3,766,773,207
4.04.02.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			612,139,654				730,616,242
4.04.02.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	Kab. Lombok Tengah	8 Orang	108,284,964	Kab. Lombok Tengah	8 Orang	115,090,559
4.04.02.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	8 Orang	193,796,560	Kab. Lombok Tengah	8 Orang	223,524,051
4.04.02.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	50 Jenis	98,089,500	Kab. Lombok Tengah	50 Jenis	101,750,498
4.04.02.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	P A D	Kab. Lombok Tengah	2 Jenis	30,210,000	Kab. Lombok Tengah	2 Jenis	32,112,707
4.04.02.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	5 Jenis	16,429,000	Kab. Lombok Tengah	5 Jenis	22,242,092
4.04.02.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	10 Unit	60,925,000	Kab. Lombok Tengah	10 Unit	299,445,216
4.04.02.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	P A D	Kab. Lombok Tengah	5 Buah	4,750,000	Kab. Lombok Tengah	5 Buah	5,053,708
4.04.02.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	8 Orang	99,654,630	Kab. Lombok Tengah	8 Orang	223,542,051
4.04.02.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			16,345,000				2,188,772,214
4.04.02.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kab. Lombok Tengah	10 Buah	653,000	Kab. Lombok Tengah	10 Buah	68,434,547
4.04.02.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	4 Paket	329,000	Kab. Lombok Tengah	4 Paket	319,843,942
4.04.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kab. Lombok Tengah	10 Unit	14,703,000	Kab. Lombok Tengah	10 Unit	165,664,141
4.04.02.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	60,000	Kab. Lombok Tengah	1 Unit	40,475,846
4.04.02.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Sedarang/Berat Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Paket	600,000	Kab. Lombok Tengah	1 Paket	63,916,025
4.04.02.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			17,110,000				18,739,800
4.04.02.03.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Lombok Tengah	24 Kali	17,110,000	Kab. Lombok Tengah	24 Kali	17,110,000
4.04.02.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,685,000				8,396,703

4.04.02.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	7,685,000	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	8,206,308
4.04.02.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			20,895,000				55,058,601
4.04.02.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	20,895,000	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	36,170,622
4.04.02.03.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			958,514,600				1,695,396,381
4.04.02.03.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Lombok Tengah	13 Dokumen	514,356,600	Kab. Lombok Tengah	13 Dokumen	1,021,087,079
4.04.02.03.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Lombok Tengah	6 Sentra	57,250,000	Kab. Lombok Tengah	6 Sentra	193,342,976
4.04.02.03.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Lombok Tengah	4 Laporan	19,510,000	Kab. Lombok Tengah	4 Laporan	47,017,030
4.04.02.03.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Lombok Tengah	13 Laporan	66,528,000	Kab. Lombok Tengah	13 Laporan	493,015,484
4.04.02.03.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Lombok Tengah	1 Event	150,870,000	Kab. Lombok Tengah	1 Event	110,197,605
4.04.02.03.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kab. Lombok Tengah	13 Laporan	150,000,000	Kab. Lombok Tengah	13 Laporan	159,530,720
4.04.02.04	Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong				3,004,222,040				5,084,017,239
4.04.02.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			979,299,040				730,616,242
4.04.02.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	Kab. Lombok Timur	1500 Surat	3,000,000	Kab. Lombok Timur	1500 Surat	6,410,985
4.04.02.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	P A D	Kab. Lombok Timur	4 Jenis	50,000,000	Kab. Lombok Timur	4 Jenis	226,845,090
4.04.02.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	Kab. Lombok Timur	8 Orang	98,496,000	Kab. Lombok Timur	8 Orang	113,827,994
4.04.02.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	13 Orang	338,118,480	Kab. Lombok Timur	13 Orang	362,673,934
4.04.02.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	50 Jenis	110,804,000	Kab. Lombok Timur	50 Jenis	117,758,913
4.04.02.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetaka dan Penggandaan	P A D	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	30,540,000	Kab. Lombok Timur	2 Jenis	32,921,300
4.04.02.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Jenis	19,665,000	Kab. Lombok Timur	10 Jenis	20,907,913
4.04.02.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Unit	127,740,000	Kab. Lombok Timur	10 Unit	140,868,511
4.04.02.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	P A D	Kab. Lombok Timur	5 Buah	7,670,000	Kab. Lombok Timur	5 Buah	8,796,340
4.04.02.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Orang	193,265,560	Kab. Lombok Timur	10 Orang	223,311,024
4.04.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			434,070,000				2,188,772,214
4.04.02.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Paket	147,625,000	Kab. Lombok Timur	10 Paket	184,136,754
4.04.02.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	4 Paket	90,000,000	Kab. Lombok Timur	4 Paket	40,414,102
4.04.02.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Unit	3,550,000	Kab. Lombok Timur	10 Unit	144,817,200
4.04.02.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkalan Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	5 Unit	110,000	Kab. Lombok Timur	5 Unit	26,055,870
4.04.02.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Unit	110,000	Kab. Lombok Timur	10 Unit	26,504,916

4.04.02.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Paket	192,675,000	Kab. Lombok Timur	1 Paket	1,058,725,489
4.04.02.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			15,600,000				18,739,800
4.04.02.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Lombok Timur	24 Kali	15,600,000	Kab. Lombok Timur	24 Kali	15,600,000
4.04.02.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,420,000				8,396,703
4.04.02.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	7,420,000	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	8,329,796
4.04.02.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			29,724,500				55,058,601
4.04.02.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	29,724,500	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	33,319,182
4.04.02.04.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,538,108,500				1,695,396,381
4.04.02.04.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Lombok Timur	13 Dokumen	589,270,000	Kab. Lombok Timur	13 Dokumen	1,164,763,456
4.04.02.04.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Lombok Timur	10 Sentra	164,250,000	Kab. Lombok Timur	10 Sentra	199,413,400
4.04.02.04.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Lombok Timur	1 tahun	52,902,500	Kab. Lombok Timur	1 tahun	92,663,576
4.04.02.04.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Lombok Timur	144 Kali	454,680,000	Kab. Lombok Timur	144 Kali	493,015,483
4.04.02.04.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Lombok Timur	1 Event	86,991,000	Kab. Lombok Timur	1 Event	113,081,056
4.04.02.04.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kab. Lombok Timur	13 Laporan	190,015,000	Kab. Lombok Timur	13 Laporan	228,854,954
4.04.02.05	Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar				1,859,515,310				3,244,721,175
4.04.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			213,930,490				730,616,242
4.04.02.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	Kab. Sumbawa	1500 Surat	3,780,000	Kab. Sumbawa	1500 Surat	16,645,470
4.04.02.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	Kab. Sumbawa	8 Jenis	99,684,000	Kab. Sumbawa	8 Jenis	115,113,658
4.04.02.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa	9 Orang	120,000	Kab. Sumbawa	9 Orang	251,209,019
4.04.02.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	DAU	Kab. Sumbawa	50 Jenis	39,917,590	Kab. Sumbawa	50 Jenis	76,857,478
4.04.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	P A D	Kab. Sumbawa	2 Jenis	16,605,000	Kab. Sumbawa	2 Jenis	17,771,727
4.04.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Kab. Sumbawa	6 Jenis	6,888,900	Kab. Sumbawa	6 Jenis	7,703,469
4.04.02.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU, P A D	Kab. Sumbawa	10 Unit	43,475,000	Kab. Sumbawa	10 Unit	170,699,829
4.04.02.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU, P A D	Kab. Sumbawa	5 Buah	3,400,000	Kab. Sumbawa	5 Buah	3,933,229
4.04.02.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa	7 Orang	60,000	Kab. Sumbawa	7 Orang	195,413,029
4.04.02.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			559,060,000				2,188,772,214
4.04.02.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	P A D	Kab. Sumbawa	1 Paket	437,755,000	Kab. Sumbawa	1 Paket	159,023,880
4.04.02.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kab. Sumbawa	10 Buah	44,130,000	Kab. Sumbawa	10 Buah	43,450,773
4.04.02.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	Kab. Sumbawa	10 Paket	110,000	Kab. Sumbawa	10 Paket	33,240,599

4.04.02.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kab. Sumbawa	10 Unit	76,900,000	Kab. Sumbawa	10 Unit	172,944,293
4.04.02.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	Kab. Sumbawa	5 Unit	55,000	Kab. Sumbawa	5 Unit	23,075,330
4.04.02.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa	4 Unit	110,000	Kab. Sumbawa	4 Unit	27,066,223
4.04.02.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			18,555,000				18,739,800
4.04.02.05.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Sumbawa	24 Kali	18,555,000	Kab. Sumbawa	24 Kali	18,555,000
4.04.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,680,000				8,396,703
4.04.02.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	7,680,000	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	8,206,308
4.04.02.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			47,386,000				55,058,601
4.04.02.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kab. Sumbawa	11 Dokumen	47,386,000	Kab. Sumbawa	11 Dokumen	54,205,415
4.04.02.05.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,012,903,820				1,695,396,381
4.04.02.05.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Sumbawa	13 Dokumen	457,000,000	Kab. Sumbawa	13 Dokumen	908,032,441
4.04.02.05.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Sumbawa	6 Sentra	59,840,000	Kab. Sumbawa	6 Sentra	184,346,609
4.04.02.05.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Sumbawa	4 Dokumen	24,601,320	Kab. Sumbawa	4 Dokumen	29,868,084
4.04.02.05.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Sumbawa	13 Dokumen	352,500,000	Kab. Sumbawa	13 Dokumen	410,846,236
4.04.02.05.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Sumbawa	1 Event	88,402,500	Kab. Sumbawa	1 Event	111,332,774
4.04.02.05.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kab. Sumbawa	13 Dokumen	30,560,000	Kab. Sumbawa	13 Dokumen	205,180,301
4.04.02.06	Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima				2,200,613,940				2,743,199,515
4.04.02.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			460,603,660				730,616,242
4.04.02.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	Kota Bima	1500 Surat	2,700,000	Kota Bima	1500 Surat	9,841,725
4.04.02.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	Kota Bima	8 Orang	86,700,000	Kota Bima	8 Orang	106,637,289
4.04.02.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kota Bima	6 Orang	120,000	Kota Bima	6 Orang	167,387,970
4.04.02.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	Kota Bima	50 Jenis	87,103,700	Kota Bima	50 Jenis	92,567,419
4.04.02.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	P A D	Kota Bima	2 Jenis	29,592,000	Kota Bima	2 Jenis	31,448,505
4.04.02.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P A D	Kota Bima	10 Paket	6,419,000	Kota Bima	10 Paket	6,822,218
4.04.02.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kota Bima	10 Paket	171,075,000	Kota Bima	10 Paket	120,104,989
4.04.02.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	P A D	Kota Bima	5 Buah	4,320,000	Kota Bima	5 Buah	4,990,176
4.04.02.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	P A D	Kota Bima	3 Orang	72,573,960	Kota Bima	3 Orang	83,693,985
4.04.02.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			219,720,000				2,188,772,214
4.04.02.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	P A D	Kota Bima	1 Paket	600,000	Kota Bima	1 Paket	0
4.04.02.06.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kota Bima	10 Buah	39,150,000	Kota Bima	10 Buah	103,364,680

4.04.02.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	Kota Bima	10 Paket	150,000,000	Kota Bima	10 Paket	28,065,349
4.04.02.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kota Bima	10 Unit	3,900,000	Kota Bima	10 Unit	150,879,316
4.04.02.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	Kota Bima	10 Paket	25,950,000	Kota Bima	10 Paket	27,628,652
4.04.02.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kota Bima	10 Paket	120,000	Kota Bima	10 Paket	18,085,311
4.04.02.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			9,055,000				18,739,800
4.04.02.06.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kota Bima	24 Kali	9,055,000	Kota Bima	24 Kali	9,110,000
4.04.02.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,695,000				8,396,703
4.04.02.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kota Bima	1 Laporan	7,695,000	Kota Bima	1 Laporan	8,206,308
4.04.02.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			49,660,000				55,058,601
4.04.02.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kota Bima	11 Dokumen	49,660,000	Kota Bima	11 Dokumen	52,875,117
4.04.02.06.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,453,880,280				1,695,396,381
4.04.02.06.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kota Bima	13 Dokumen	659,305,280	Kota Bima	13 Dokumen	912,403,486
4.04.02.06.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kota Bima	3 Sentra	154,550,000	Kota Bima	3 Sentra	187,636,779
4.04.02.06.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kota Bima	1 Dokumen	110,000	Kota Bima	1 Dokumen	29,455,296
4.04.02.06.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kota Bima	13 Dokumen	372,000,000	Kota Bima	13 Dokumen	410,846,237
4.04.02.06.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kota Bima	1 Event	90,365,000	Kota Bima	1 Event	113,463,493
4.04.02.06.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kota Bima	13 Dokumen	177,550,000	Kota Bima	13 Dokumen	67,685,218
4.04.02.07	Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung				3,102,324,535				3,580,408,535
4.04.02.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			678,482,255				730,616,242
4.04.02.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	DAU	Kab. Lombok Barat	1500 Surat	5,850,000	Kab. Lombok Barat	1500 Surat	9,703,125
4.04.02.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	DAU	Kab. Lombok Barat	8 Orang	97,862,000	Kab. Lombok Barat	8 Orang	113,170,724
4.04.02.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Orang	110,000	Kab. Lombok Barat	10 Orang	306,877,945
4.04.02.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	50 Jenis	107,353,375	Kab. Lombok Barat	50 Jenis	114,252,362
4.04.02.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	31,425,000	Kab. Lombok Barat	2 Jenis	33,412,232
4.04.02.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	20,300,000	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	23,576,271
4.04.02.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kab. Lombok Barat	10 Unit	190,200,000	Kab. Lombok Barat	10 Unit	212,919,953
4.04.02.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Kab. Lombok Barat	5 Buah	7,910,000	Kab. Lombok Barat	5 Buah	8,571,089
4.04.02.07.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	DAU, P A D	Kab. Lombok Barat	10 Orang	217,471,880	Kab. Lombok Barat	10 Orang	278,979,949

4.04.02.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			647,680,000				2,188,772,214
4.04.02.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Dana Insentif Daerah	Kab. Lombok Barat	1 Paket	173,950,000	Kab. Lombok Barat	1 Paket	82,343,734
4.04.02.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kab. Lombok Barat	4 Unit	50,325,000	Kab. Lombok Barat	4 Unit	108,135,789
4.04.02.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Buah	50,475,000	Kab. Lombok Barat	10 Buah	76,450,010
4.04.02.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	10 Paket	150,110,000	Kab. Lombok Barat	10 Paket	61,990,743
4.04.02.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU, P A D	Kab. Lombok Barat	5 Paket	220,000	Kab. Lombok Barat	5 Paket	22,699,254
4.04.02.07.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Paket	222,600,000	Kab. Lombok Barat	1 Paket	101,259,779
4.04.02.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			19,000,000				18,739,800
4.04.02.07.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Lombok Barat	24 Kali	19,000,000	Kab. Lombok Barat	24 Kali	19,000,000
4.04.02.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,695,000				8,396,703
4.04.02.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	7,695,000	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	8,206,308
4.04.02.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			30,646,000				55,058,601
4.04.02.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	30,646,000	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	32,628,775
4.04.02.07.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,718,821,280				1,695,396,381
4.04.02.07.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Lombok Barat	13 Dokumen	753,605,280	Kab. Lombok Barat	13 Dokumen	992,689,640
4.04.02.07.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DAU, P A D	Kab. Lombok Barat	6 Sentra	169,250,000	Kab. Lombok Barat	6 Sentra	182,416,215
4.04.02.07.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	DAU, P A D	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	100,000	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	29,928,789
4.04.02.07.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Lombok Barat	13 Dokumen	446,400,000	Kab. Lombok Barat	13 Dokumen	493,015,484
4.04.02.07.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DAU, P A D	Kab. Lombok Barat	1 Event	142,266,000	Kab. Lombok Barat	1 Event	108,224,717
4.04.02.07.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kab. Lombok Barat	13 Dokumen	207,200,000	Kab. Lombok Barat	13 Dokumen	159,955,649
4.04.02.08	Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang				2,231,233,940				2,727,870,655
4.04.02.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			547,448,300				730,616,242
4.04.02.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1500 Surat	2,700,000	Kab. Sumbawa Barat	1500 Surat	8,894,520
4.04.02.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	Kab. Sumbawa Barat	8 Jenis	77,818,000	Kab. Sumbawa Barat	8 Jenis	82,702,927
4.04.02.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	8 Orang	193,265,560	Kab. Sumbawa Barat	8 Orang	223,341,058
4.04.02.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	50 Jenis	57,910,100	Kab. Sumbawa Barat	50 Jenis	61,550,703
4.04.02.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	P A D	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	16,425,000	Kab. Sumbawa Barat	2 Jenis	17,737,072

4.04.02.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Jenis	3,987,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Jenis	4,254,356
4.04.02.08.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Unit	139,190,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Unit	200,819,931
4.04.02.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	P A D	Kab. Sumbawa Barat	5 Buah	3,730,000	Kab. Sumbawa Barat	5 Buah	3,982,900
4.04.02.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	2 Orang	52,422,640	Kab. Sumbawa Barat	2 Orang	55,795,990
4.04.02.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			391,870,000				2,188,772,214
4.04.02.08.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 Paket	73,100,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Paket	77,863,381
4.04.02.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Buah	37,290,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Buah	39,712,469
4.04.02.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Paket	110,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Paket	76,490,424
4.04.02.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Unit	96,430,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Unit	170,805,713
4.04.02.08.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Unit	22,150,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Unit	24,136,200
4.04.02.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	10 Paket	65,000	Kab. Sumbawa Barat	10 Paket	16,991,885
4.04.02.08.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Sengah/Berat Gedung Kantor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 Paket	162,725,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Paket	126,406,331
4.04.02.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			18,136,000				18,739,800
4.04.02.08.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Sumbawa Barat	24 Kali	18,136,000	Kab. Sumbawa Barat	24 Kali	18,136,000
4.04.02.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,303,000				8,396,703
4.04.02.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	7,303,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	8,235,496
4.04.02.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			44,798,000				55,058,601
4.04.02.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	44,798,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	47,705,480
4.04.02.08.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,221,678,640				1,695,396,381
4.04.02.08.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Sumbawa Barat	13 Laporan	509,051,320	Kab. Sumbawa Barat	13 Laporan	642,241,830
4.04.02.08.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Sumbawa Barat	4 Sentra	142,250,000	Kab. Sumbawa Barat	4 Sentra	170,275,369
4.04.02.08.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	27,346,320	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan	29,486,862

4.04.02.08.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Sumbawa Barat	13 Laporan	372,000,000	Kab. Sumbawa Barat	1 tahun	410,846,237
4.04.02.08.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Sumbawa Barat	1 Event	85,931,000	Kab. Sumbawa Barat	1 Event	117,410,482
4.04.02.08.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kab. Sumbawa Barat	13 Dokumen	85,100,000	Kab. Sumbawa Barat	13 Dokumen	92,047,040
4.04.02.09	Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung				2,341,466,180				3,283,688,247
4.04.02.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			605,733,400				730,616,242
4.04.02.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	P A D	Kab. Lombok Utara	1500 Surat	2,700,000	Kab. Lombok Utara	1500 Surat	4,562,775
4.04.02.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	P A D	Kab. Lombok Utara	4 Jenis	209,599,400	Kab. Lombok Utara	4 Jenis	222,747,136
4.04.02.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	P A D	Kab. Lombok Utara	8 Orang	110,000	Kab. Lombok Utara	8 Orang	98,073,131
4.04.02.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	P A D	Kab. Lombok Utara	6 Orang	155,000	Kab. Lombok Utara	6 Orang	167,503,483
4.04.02.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	P A D	Kab. Lombok Utara	50 Jenis	99,394,500	Kab. Lombok Utara	50 Jenis	105,630,591
4.04.02.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU, P A D	Kab. Lombok Utara	2 Jenis	24,101,500	Kab. Lombok Utara	2 Jenis	25,637,030
4.04.02.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Kab. Lombok Utara	10 Jenis	7,930,000	Kab. Lombok Utara	10 Jenis	8,467,127
4.04.02.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kab. Lombok Utara	10 Jenis	256,603,000	Kab. Lombok Utara	10 Jenis	272,698,103
4.04.02.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Kab. Lombok Utara	5 Buah	5,030,000	Kab. Lombok Utara	5 Buah	5,533,089
4.04.02.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Lombok Utara	4 Orang	110,000	Kab. Lombok Utara	4 Orang	111,655,512
4.04.02.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			276,630,000				2,188,772,214
4.04.02.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	DAU	Kab. Lombok Utara	10 Buah	275,230,000	Kab. Lombok Utara	10 Buah	248,574,795
4.04.02.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DAU	Kab. Lombok Utara	10 Paket	100,000	Kab. Lombok Utara	10 Paket	47,823,354
4.04.02.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Kab. Lombok Utara	10 Unit	1,200,000	Kab. Lombok Utara	10 Unit	151,889,668
4.04.02.09.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkalan Perlengkapan Gedung Kantor	DAU, P A D	Kab. Lombok Utara	10 Paket	100,000	Kab. Lombok Utara	10 Paket	7,970,559
4.04.02.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			18,150,000				18,739,800
4.04.02.09.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	P A D	Kab. Lombok Utara	24 Kali	18,150,000	Kab. Lombok Utara	24 Kali	18,200,000
4.04.02.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,650,000				8,396,703
4.04.02.09.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	P A D	Kab. Lombok Utara	1 Laporan	7,650,000	Kab. Lombok Utara	1 Laporan	8,195,082
4.04.02.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			30,700,000				55,058,601
4.04.02.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	DAU, P A D	Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	30,700,000	Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	32,780,327
4.04.02.09.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,402,602,780				1,695,396,381
4.04.02.09.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Lombok Utara	13 Dokumen	506,705,280	Kab. Lombok Utara	13 Dokumen	723,930,592

4.04.02.09.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Lombok Utara	3 Sentra	133,250,000	Kab. Lombok Utara	3 Sentra	156,920,438
4.04.02.09.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	120,000	Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	29,443,155
4.04.02.09.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Lombok Utara	13 Dokumen	446,400,000	Kab. Lombok Utara	13 Dokumen	505,253,457
4.04.02.09.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Lombok Utara	1 Event	88,295,000	Kab. Lombok Utara	1 Event	113,293,521
4.04.02.09.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	P A D	Kab. Lombok Utara	13 Dokumen	227,832,500	Kab. Lombok Utara	13 Dokumen	216,905,324
4.04.02.10	Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu				2,066,381,036				2,573,286,659
4.04.02.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			441,416,076				730,616,242
4.04.02.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	DAU	Kab. Dompu	1500 Surat	5,400,000	Kab. Dompu	1500 Surat	14,554,680
4.04.02.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	DAU	Kab. Dompu	8 Orang	84,948,000	Kab. Dompu	8 Orang	82,726,029
4.04.02.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kab. Dompu	8 Orang	193,330,560	Kab. Dompu	8 Orang	223,183,960
4.04.02.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	DAU	Kab. Dompu	50 Jenis	91,765,516	Kab. Dompu	50 Jenis	97,719,660
4.04.02.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Kab. Dompu	2 Jenis	15,870,000	Kab. Dompu	2 Jenis	17,119,076
4.04.02.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Kab. Dompu	10 Jenis	8,887,000	Kab. Dompu	10 Jenis	9,477,869
4.04.02.10.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kab. Dompu	10 Unit	32,275,000	Kab. Dompu	10 Unit	119,331,050
4.04.02.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Kab. Dompu	5 Buah	8,820,000	Kab. Dompu	5 Buah	9,425,888
4.04.02.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Dompu	5 Orang	120,000	Kab. Dompu	5 Orang	139,489,975
4.04.02.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			249,900,000				2,188,772,214
4.04.02.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	P A D	Kab. Dompu	1 Paket	243,050,000	Kab. Dompu	1 Paket	0
4.04.02.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Kab. Dompu	10 Unit	6,850,000	Kab. Dompu	10 Unit	214,250,873
4.04.02.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			19,000,000				18,739,800
4.04.02.10.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	DAU	Kab. Dompu	24 Kali	19,000,000	Kab. Dompu	24 Kali	19,000,000
4.04.02.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,200,000				8,396,703
4.04.02.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	DAU	Kab. Dompu	1 Laporan	7,200,000	Kab. Dompu	1 Laporan	8,082,820
4.04.02.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			44,260,000				55,058,601
4.04.02.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	DAU, P A D	Kab. Dompu	1 Dokumen	44,260,000	Kab. Dompu	1 Dokumen	49,686,894
4.04.02.10.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,304,604,960				1,695,396,381
4.04.02.10.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Dompu	13 Dokumen	509,512,640	Kab. Dompu	13 Dokumen	737,125,749
4.04.02.10.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Dompu	3 Sentra	144,250,000	Kab. Dompu	3 Sentra	169,061,284
4.04.02.10.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Dompu	1 Dokumen	24,261,320	Kab. Dompu	1 Dokumen	29,321,746

4.04.02.10.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Dompu	13 Dokumen	372,000,000	Kab. Dompu	13 Dokumen	410,846,237
4.04.02.10.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Dompu	1 Event	76,656,000	Kab. Dompu	1 Event	105,207,717
4.04.02.10.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	DAU	Kab. Dompu	13 Dokument	177,925,000	Kab. Dompu	13 Dokument	117,675,152
4.04.02.11	Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima				2,260,097,230				4,696,979,942
4.04.02.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			426,969,560				730,616,242
4.04.02.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	DAU	Kab. Bima	1500 Surat	3,060,000	Kab. Bima	1500 Surat	7,577,670
4.04.02.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	DAU	Kab. Bima	8 Orang	86,220,000	Kab. Bima	8 Orang	101,210,473
4.04.02.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	DAU	Kab. Bima	10 Orang	120,000	Kab. Bima	10 Orang	279,787,388
4.04.02.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	DAU	Kab. Bima	50 Jenis	91,500,600	Kab. Bima	50 Jenis	97,483,320
4.04.02.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Kab. Bima	2 Jenis	21,325,000	Kab. Bima	2 Jenis	22,727,249
4.04.02.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Kab. Bima	10 Jenis	15,520,000	Kab. Bima	10 Jenis	16,512,631
4.04.02.11.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kab. Bima	10 Unit	130,350,000	Kab. Bima	10 Unit	114,646,984
4.04.02.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Kab. Bima	5 Buah	6,300,000	Kab. Bima	5 Buah	6,976,543
4.04.02.11.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	DAU	Kab. Bima	3 Kali	72,573,960	Kab. Bima	3 Kali	83,693,985
4.04.02.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur			588,076,300				2,188,772,214
4.04.02.11.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	DAU, P A D	Kab. Bima	1 Paket	217,945,000	Kab. Bima	1 Paket	1,907,403,957
4.04.02.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraam Dinas/Operasional	P A D	Kab. Bima	1 Unit	50,325,000	Kab. Bima	1 Unit	26,746,277
4.04.02.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	DAU	Kab. Bima	10 Buah	94,800,000	Kab. Bima	10 Buah	42,041,893
4.04.02.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DAU	Kab. Bima	10 Jenis	55,000	Kab. Bima	10 Jenis	17,220,674
4.04.02.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DAU	Kab. Bima	10 Unit	3,000,000	Kab. Bima	10 Unit	156,829,170
4.04.02.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkalan Perlengkapan Gedung Kantor	DAU, P A D	Kab. Bima	10 Unit	55,000	Kab. Bima	10 Unit	13,068,125
4.04.02.11.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU, P A D	Kab. Bima	10 Unit	96,300	Kab. Bima	10 Unit	25,462,119
4.04.02.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Sedarang/Berat Gedung Kantor	P A D	Kab. Bima	1 Paket	221,800,000	Kab. Bima	1 Paket	0
4.04.02.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur			18,500,000				18,739,800
4.04.02.11.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	DAU	Kab. Bima	24 Kali	18,500,000	Kab. Bima	24 Kali	18,739,800
4.04.02.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD			7,886,750				8,396,703
4.04.02.11.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	DAU	Kab. Bima	1 Laporan	7,886,750	Kab. Bima	1 Laporan	8,396,703
4.04.02.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi			45,045,000				55,058,601
4.04.02.11.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	P A D	Kab. Bima	1 Laporan	45,045,000	Kab. Bima	1 Laporan	55,058,601
4.04.02.11.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)			1,173,619,620				1,695,396,381

4.04.02.11.28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	P A D	Kab. Bima	13 Laporan	501,990,000	Kab. Bima	13 Laporan	842,098,711
4.04.02.11.28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P A D	Kab. Bima	3 Sentra	147,250,000	Kab. Bima	3 Sentra	174,524,665
4.04.02.11.28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	P A D	Kab. Bima	1 Laporan	27,368,620	Kab. Bima	1 Laporan	29,467,436
4.04.02.11.28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	P A D	Kab. Bima	13 Laporan	372,000,000	Kab. Bima	13 Laporan	410,846,224
4.04.02.11.28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	P A D	Kab. Bima	1 Event	93,611,000	Kab. Bima	1 Event	117,050,870
4.04.02.11.28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	DAU	Kab. Bima	13 Dokumen	31,400,000	Kab. Bima	13 Dokumen	121,408,475
4:05 KEPEGAWAIAN					15,639,635,864				13,743,028,172
4:05:01	Badan Kepegawaian Daerah				15,639,635,864				13,743,028,172
4.05.01.01	Badan Kepegawaian Daerah				15,639,635,864				13,743,028,172
4.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,448,442,000				2,715,560,000
4.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon	DAU	Provinsi NTB	12 rekening	300,000,000	Provinsi NTB	12 rekening	249,000,000
4.05.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	DAU	Provinsi NTB	8 unit	4,000,000	Provinsi NTB	1 unit	1,500,000
4.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DAU	Provinsi NTB	12 Dokumen	104,390,000	Provinsi NTB	12 Dokumen	126,000,000
4.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor	DAU	Provinsi NTB	13 orang	359,226,000	Provinsi NTB	13 orang	373,100,000
4.05.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	DAU	Provinsi NTB	8 jenis	19,800,000	Provinsi NTB	8 jenis	23,200,000
4.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah Jenis alat tulis kantor	DAU	Provinsi NTB	90 jenis	301,416,900	Provinsi NTB	90 jenis	408,240,000
4.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	6 jenis	34,119,100	Provinsi NTB	6 jenis	37,200,000
4.05.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	Provinsi NTB	12 Jenis	39,525,000	Provinsi NTB	12 Jenis	45,000,000
4.05.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	Provinsi NTB	2 paket	299,300,000	Provinsi NTB	2 paket	400,000,000
4.05.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DAU	Provinsi NTB	2 jenis	27,500,000	Provinsi NTB	2 jenis	30,250,000
4.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makana dan minuman kegiatan dan tamu	DAU	Provinsi NTB	1000 porsi	69,065,000	Provinsi NTB	1000 porsi	69,070,000
4.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah	DAU	Provinsi NTB	73 OT	620,500,000	Provinsi NTB	74 OT	629,000,000
4.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	DAU	Provinsi NTB	4 kegiatan	200,000,000	Provinsi NTB	4 kegiatan	240,000,000
4.05.01.01.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	jumlah pelayanan administrasi	DAU	Provinsi NTB	12 bulan	69,600,000	Provinsi NTB	12 bulan	84,000,000
4.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			3,344,230,000				533,000,000
4.05.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung perkantoran yang terbangun	DAU	Provinsi NTB	1 paket	1,625,000,000	Provinsi NTB	0 paket	0
4.05.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	DAU	Provinsi NTB	2 unit	700,000,000	Provinsi NTB	0 0	0
4.05.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	4 gedung	120,000,000	Provinsi NTB	4 gedung	200,000,000
4.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	DAU	Provinsi NTB	37 unit	245,230,000	Provinsi NTB	37 unit	333,000,000
4.05.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	DAU	Provinsi NTB	1 paket	654,000,000	Provinsi NTB	0 0	0
4.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			36,579,124				38,944,264

4.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah kegiatan pembinaan mental fisik aparatur	DAU	Provinsi NTB	4 kegiatan	36,579,124	Provinsi NTB	4 kegiatan	38,944,264
4.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			210,282,500				222,900,000
4.05.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	73,000,000	Provinsi NTB	2 dokumen	80,400,000
4.05.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen pelaporan keuangan	DAU	Provinsi NTB	1 dokumen	33,297,500	Provinsi NTB	1 dokumen	36,500,000
4.05.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen rencana kerja	DAU	Provinsi NTB	4 dokumen	103,985,000	Provinsi NTB	4 dokumn	106,000,000
4.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			23,998,000				25,200,000
4.05.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah kegiatan manajemen asset/barang milik daerah	DAU	Provinsi NTB	12 bulan	23,998,000	Provinsi NTB	12 bulan	25,200,000
4.05.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN ; Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN ; Kriteria Penilaian Kinerja ASN			9,314,710,740				9,926,941,860
4.05.01.01.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS	jumlah CPNS/CPPPK terseleksi	DAU	Provinsi NTB	400 orang	660,000,000	Provinsi NTB	400 orang	700,000,000
4.05.01.01.17.03	Penempatan PNS/PTT	jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	DAU	Provinsi NTB	230 SK	119,600,000	Provinsi NTB	250 SK	132,500,000
4.05.01.01.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala	DAU	Provinsi NTB	3000 SK	510,000,000	Provinsi NTB	3000 SK	540,000,000
4.05.01.01.17.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	jumlah data dan informasi pegawai	DAU	Provinsi NTB	14143 pegawai	212,145,000	Provinsi NTB	14143 pegawai	226,288,000
4.05.01.01.17.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	jumlah PNS yang diberikan penghargaan	DAU	Provinsi NTB	44 orang	145,200,000	Provinsi NTB	48 orang	168,000,000
4.05.01.01.17.09	Penanganan Kasus	jumlah keputusan pembinaan disiplin aparatur	DAU	Provinsi NTB	40 SK	319,019,240	Provinsi NTB	45 SK	350,921,160
4.05.01.01.17.17	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Struktural	jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural	DAU	Provinsi NTB	330 SK	891,000,000	Provinsi NTB	363 SK	1,016,400,000
4.05.01.01.17.18	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional	DAU	Provinsi NTB	440 SK	110,000,000	Provinsi NTB	484 SK	130,680,000
4.05.01.01.17.19	Penilaian DUPAK dan Penetapan Angka Kredit	jumlah DUPAK/PAK jabatan fungsional	DAU	Provinsi NTB	44 DUPAK/PAK	132,000,000	Provinsi NTB	48 DUPAK/PAK	153,600,000
4.05.01.01.17.20	Tugas Belajar dan Ijin Belajar	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	DAU	Provinsi NTB	150 orang	75,000,000	Provinsi NTB	150 orang	82,500,000
4.05.01.01.17.21	Seleksi Sekolah Ikatan Dinas	jumlah praja/taruna yang lulus sekolah ikatan dinas	DAU	Provinsi NTB	33 orang	72,600,000	Provinsi NTB	33 orang	75,900,000
4.05.01.01.17.22	Cuti dan Kesra ASN	jumlah ASN yang melakukan cuti	DAU	Provinsi NTB	50 orang	9,365,500	Provinsi NTB	50 orang	10,318,850
4.05.01.01.17.23	Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Jabatan	jumlah ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan	DAU	Provinsi NTB	440 orang	127,600,000	Provinsi NTB	484 orang	145,200,000
4.05.01.01.17.24	Penilaian Kinerja ASN	jumlah OPD yang melaporkan kinerja	DAU	Provinsi NTB	49 OPD	294,000,000	Provinsi NTB	49 OPD	147,000,000
4.05.01.01.17.25	Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur	jumlah ASN yang mendapat pengembangan kapasitas	DAU	Provinsi NTB	50 orang	4,114,750,000	Provinsi NTB	50 orang	4,088,909,850
4.05.01.01.17.26	Penyusunan Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi CPNS/P3K	jumlah usulan formasi CPNS/CPPPK	DAU	Provinsi NTB	500 formasi	100,000,000	Provinsi NTB	500 formasi	105,000,000
4.05.01.01.17.27	Ujian Kenaikan Pangkat PNS	jumlah ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah	DAU	Provinsi NTB	50 orang	224,750,000	Provinsi NTB	50 orang	235,000,000
4.05.01.01.17.28	Pemberhentian PNS/PTT	jumlah keputusan pemberhentian PNS/PTT	DAU	Provinsi NTB	245 SK	110,250,000	Provinsi NTB	245 SK	115,150,000
4.05.01.01.17.29	Penetapan dan Pengangkatan CPNS, PNS dan P3K	jumlah keputusan pengangkatan CPNS, PNS dan P3K	DAU	Provinsi NTB	400 SK	76,000,000	Provinsi NTB	400 SK	84,000,000
4.05.01.01.17.30	Pembangunan/Pengembangan Sistem Dokumentasi Elektronik Kepegawaian	jumlah dokumentasi elektronik pegawai	DAU	Provinsi NTB	14143 pegawai	240,431,000	Provinsi NTB	14143 pegawai	254,574,000
4.05.01.01.17.31	Penyusunan Peta Komposisi ASN	jumlah dokumen peta komposisi ASN	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	80,000,000	Provinsi NTB	2 dokumen	90,000,000

4.05.01.01.17.32	Penyusunan Data Informasi Kompetensi	jumlah dokumen informasi kompetensi ASN	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	70,000,000	Provinsi NTB	2 dokumen	80,000,000
4.05.01.01.17.33	Pemetaan kompetensi ASN	jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi	DAU	Provinsi NTB	550 orang	550,000,000	Provinsi NTB	605 orang	907,500,000
4.05.01.01.17.34	Pelayanan Konseling ASN	jumlah pegawai yang konseling	DAU	Provinsi NTB	13 orang	26,000,000	Provinsi NTB	15 orang	37,500,000
4.05.01.01.17.35	Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN	jumlah dokumen kerjasama	DAU	Provinsi NTB	5 dokumen	45,000,000	Provinsi NTB	5 dokumen	50,000,000
4.05.01.01.18	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN			261,393,500				280,482,048
4.05.01.01.18.01	Pengelolaan Sistem Pelaporan LHKPN	jumlah wajib LHKPN yang melapor	DAU	Provinsi NTB	1584 Wajib LHKPN	189,296,000	Provinsi NTB	1584 Wajib LHKPN	201,168,000
4.05.01.01.18.02	Pembinaan ASN yang Wajib LHKPN	jumlah wajib LHKPN yang dibina	DAU	Provinsi NTB	1584 Wajib LHKPN	72,097,500	Provinsi NTB	1584 Wajib LHKPN	79,314,048
4:06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				14,472,472,798				15,723,008,610
4:06:01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				14,472,472,798				15,723,008,610
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				14,472,472,798				15,723,008,610
4.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,312,386,318				2,451,302,451
4.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	DAU	Provinsi NTB	3 Rekening	916,650,148	Provinsi NTB	3 Rekening	971,649,157
4.06.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan	DAU	Provinsi NTB	2 Unit	2,500,000	Provinsi NTB	2 Unit	2,500,000
4.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	DAU	Provinsi NTB	10 Org	116,425,350	Provinsi NTB	10 Org	124,575,125
4.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	DAU	Provinsi NTB	37 Org	1,014,184,319	Provinsi NTB	37 Org	1,064,893,549
4.06.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja	DAU	Provinsi NTB	10 Unit	23,625,000	Provinsi NTB	10 Unit	25,278,750
4.06.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	DAU	Provinsi NTB	80 Jenis	34,449,840	Provinsi NTB	80 Jenis	38,894,885
4.06.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DAU	Provinsi NTB	4 Jenis	11,463,076	Provinsi NTB	4 Jenis	12,913,542
4.06.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Provinsi NTB	18 Jenis	44,308,602	Provinsi NTB	18 Jenis	48,739,451
4.06.01.01.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Provinsi NTB	13 Unit	78,279,990	Provinsi NTB	13 Unit	86,108,000
4.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Provinsi NTB	2172 Eksempl	17,999,993	Provinsi NTB	2172 Eksempl	17,999,994
4.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	DAU	Provinsi NTB	600 Org	52,500,000	Provinsi NTB	600 Org	57,750,000
4.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur			3,095,306,599				3,295,442,448
4.06.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung	DAU	Provinsi NTB	1 Unit/M2	1,470,450,000	Provinsi NTB	1 Unit/M2	1,640,450,000
4.06.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	DAU	Provinsi NTB	3 Unit	305,742,492	Provinsi NTB	2 Unit	203,828,400
4.06.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	4 Unit	290,000,000	Provinsi NTB	4 Unit	319,000,000
4.06.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DAU	Provinsi NTB	4 Unit	259,665,668	Provinsi NTB	4 Unit	285,632,236
4.06.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	DAU	Provinsi NTB	1 Unit	769,448,439	Provinsi NTB	1 Unit	846,531,812
4.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12,717,000				13,538,545
4.06.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan mental dan fisiknya	DAU	Provinsi NTB	101 Org	12,717,000	Provinsi NTB	101 Org	13,538,545
4.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD			306,911,000				326,755,465
4.06.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	DAU	Provinsi NTB	8 Dok	211,539,850	Provinsi NTB	8 Dok	228,710,600
4.06.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	80,971,150	Provinsi NTB	1 Dok	83,644,865
4.06.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	DAU	Provinsi NTB	1 Dok	14,400,000	Provinsi NTB	1 Dok	14,400,000
4.06.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK			73,383,800				78,128,682
4.06.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah pejabat pengelola aset/BMD	DAU	Provinsi NTB	3 Org	73,383,800	Provinsi NTB	3 Org	78,128,682

4.06.01.01.16	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Bersertifikat			8,671,768,081				9,557,841,019
4.06.01.01.16.01	Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar	DAU	Kota Mataram	223 orang	2,070,008,000	Kota Mataram	250 orang	2,324,000,000
4.06.01.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah	Jumlah peserta Diklat Struktural	DAU	Kota Mataram	80 orang	1,942,497,884	Kota Mataram	80 orang	2,036,747,672
4.06.01.01.16.03	Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah	Jumlah peserta Diklat PIM II	DAU	Kota Mataram	10 orang	929,823,525	Kota Mataram	10 orang	1,311,306,980
4.06.01.01.16.04	Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah	Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Jafung	DAU	Kota Mataram	60 orang	685,179,100	Kota Mataram	60 orang	568,570,020
4.06.01.01.16.05	Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah	Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum	DAU	Kota Mataram	90 orang	369,519,340	Kota Mataram	90 orang	395,662,500
4.06.01.01.16.06	Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah	Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti Jabatan	DAU	Provinsi NTB	60 Org	412,420,500	Provinsi NTB	60 Org	439,663,500
4.06.01.01.16.07	Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang	DAU	Provinsi NTB	120 Org	614,860,000	Provinsi NTB	120 Org	690,663,480
4.06.01.01.16.08	Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah	Jumlah ASN yang disertifikasi	DAU	Provinsi NTB	45 Org	256,135,152	Provinsi NTB	140 Org	264,484,780
4.06.01.01.16.09	Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yg ditingkatkan kapasitasnya	DAU	Provinsi NTB	30 Org	355,476,318	Provinsi NTB	40 Org	391,023,952
4.06.01.01.16.10	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Modul/Sumber Belajar	DAU	Provinsi NTB	2 Modul/Sumbe Belajar	364,587,312	Provinsi NTB	2 Modul/Sum ber Belajar	397,331,000
4.06.01.01.16.11	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah ASN yg mengikuti karya ilmiah, Orasi ilmiah, seminar, temu ilmiah ,Pengukuhan, PGD,WorkShop. Rakor	DAU	Provinsi NTB	4 Org	671,260,950	Provinsi NTB	4 Org	738,387,135
4:07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3,061,000,000				3,264,899,999
4:07:01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				3,061,000,000				3,264,899,999
4.07.01.01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				3,061,000,000				3,264,899,999
4.07.01.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			3,061,000,000				3,264,899,999
4.07.01.01.27.01	Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	Hasil penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	DAU	Provinsi NTB	10 dokumen	1,424,000,000	Provinsi NTB	10 dokumen	1,450,000,000
4.07.01.01.27.02	Penelitian dan pengembangan sosial budaya	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sosial budaya	DAU	Provinsi NTB	3 dokumen	312,000,000	Provinsi NTB	3 dokumen	490,299,999
4.07.01.01.27.03	Penelitian dan pengembangan informasi geospasial	Jumlah hasil penelitian geospasial	DAU	Provinsi NTB	2 dokume	387,000,000	Provinsi NTB	2 dokume	244,600,000
4.07.01.01.27.04	Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	DAU	Provinsi NTB	2 dokumen	338,000,000	Provinsi NTB	2 dokumen	450,000,000
4.07.01.01.27.06	Publikasi Penelitian Unggulan	Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi	DAU	Provinsi NTB	3 dokumen	600,000,000	Provinsi NTB	3 dokumen	630,000,000